GERAKAN-GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL



EDITOR:
SATURNINO M BORRAS JR
MARC EDELMAN
CHRISTOBAL KAY

GERAKAN-GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

GERAKAN-GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

Saturnino M. Borras Jr (Editor)
Marc Edelman
Cristobal Kay

Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman, Cristobal Kay,
Gerakan-gerakan Agraria Transnasional— Borras Jr, S., Edelman, M., Kay, C., STPN, 2010

682 halaman, xiv, 14 x 21
ISBN 978-979-1097-79-6

1. Gerakan Agraria 2. Gerakan Sosial 3. Kajian Agraria
I. Judul

Cetakan Pertama, Oktober 2010
Penyunting: Dian Ardy
Penerjemah: Vica Tri Septianty
Desain dan Kompugrafi: Meja Malam Design

Diterbitkan oleh:
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 Po. Box 1216 Kode Pos 55293
Yogyakarta
Telp 0274 587239

Didistribusikan oleh:
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 Po. Box 1216 Kode Pos 55293
Yogyakarta
Telp 0274 587239

KATA PENGANTAR

Henry Bernstein And Terence J. Byres

Pada tahun 2008 kami mengundurkan diri, jika digabungkan telah bekerja total sekitar 56 tahun, dari pimpinan editor Mrxuqdo#ri#Shdvdqw#Vwxglhv (JPS) dan kemudian Mrxuqdo#ri#Djuduldq#Fkdqjh (JAC). Mrxuqdo#ri Shdvdqw#Vwxglhv# didirikan oleh T.J. Byres pada tahun 1973, kami menjadi editor bersama pada tahun 1985 sampai 2000. Lalu kami memulai Mrxuqdo#ri#Djuduldq#Fkdqjh pada tahun 2001 untuk melanjutkan proyek intelektual Mrxuqdo ri#Shdvdqw#Vwxglhv. Ketika pertama kali Mrxuqdo#ri#Djudu0 ldq#Fkdqjh didirikan dan berkembang pesat, kami memutuskan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyerahkannya ke tim editor yang baru pada tahun 2008. Mereka adalah Deborah Johnston, Cristobal Kay, Jens Lerche dan Carlos Oya. Pada akhir periode editorial, kami telah menyetujui untuk menerbitkan dua isu spesial mengenai Wudqvqdwlrqdo#Djuduldq#Pryhphqwv#Frqiurqwlqj Joredol}dwlrq dengan Jun Borras, Marc Edelman, dan Cristobal Kay sebagai editor tamu. Isu ini sebenarnya muncul dalam Mrxuqdo#ri#Djuduldq#Fkdqjh Vol 8 nomer 2-

3 namun juga dipublikasikan sebagai buku. Sangat menyenangkan menerima proposal awal untuk isu spesial dari tiga editornya, untuk mendiskusikan lebih jauh dan mendukung upaya mereka. Kami diberikan hak istimewa atas undangan mereka untuk menulis kata pengantar dalam versi buku ini.

Kami menggunakan kata pengantar singkat ini untuk menghargai imajinasi dan iluminasi yang mencerahkan dalam karya para editor dan kontributor buku ini. Kita juga dapat meletakkan arti dari pencapaian mereka dalam mengubah konteks historis dari isu agraria selama 35 tahun sejak awal mula Mrxuqdo#ri #Shdvdqw#Vwxglhv. Agenda awalnya adalah menunjukkan pengaruh intelektual yang tajam dan kondisi politik saat ini, serta menggambarkan khususnya sederetan kejadian yang dicirikan dengan perlawanan tanpa henti terhadap imperialisme, dimana masyarakat pedesaan menjadi aktor utamanya (terutama perlawanan masyarakat Vietnam untuk pembebasan nasional); prospek pada pembangunan ekonomi dan sosial yang saat ini dibangun sendiri, kebanyakan oleh petani, bekas koloni di Asia dan Afrika serta Amerika Latin; dan cara-cara dimana prospek tersebut dapat dieksplorasi melalui praktek investigasi, pengalaman dan teori transformasi sosialis di pedesaan (yang membayangi Cina). Gambaran-gambaran tersebut dipaparkan melalui suatu pendekatan ekonomi politik yang berdasar pada materialisme historis. Walaupun Mrxuqdo#ri #Shdvdqw#Vwxglhv dari tahun 1973 hingga 2000 menyajikan begitu banyak artikel mengenai formasi sosial agraria sebelum kapitalisme; transisi ke kapitalisme di daerah pedalaman dan kemudian setelah itu; perubahan agraria dalam kondisi kolonial dan situasi revolusioner Rusia dan Cina, Vietnam dan Kuba; proses perubahan agraria di negara merdeka dalam Dunia Ketiga pada konteksnya menunjukkan variasi "pembangunan nasional" mereka; dan terakhir kepunahan jenis

sosialisme yang berbeda-beda dari negara Rusia, Cina dan di tempat lain serta konsekuensinya.

Mrxuqb mendorong investigasi dan perdebatan dalam relasi sosial dan dinamika dari produksi dan reproduksi, kemiskinan dan kekuasaan, dalam formasi agraria dan proses perubahannya, baik secara klasik dan kontemporer. Sebagaimana tercantum dalam nama Mrxuqb, banyak cerita dari daerah yang menunjukkan keprihatinan yang dihuni oleh produsen desa yang didefinisikan dalam satu cara yaitu "petani" (shdvdqw) yang dianggap sebagai korban dan tokoh protagonis aktif dalam drama sejarah pembentukan modernitas. Hal ini juga memberi kesan bahwa pemahaman ekonomi-politik kita, yang menjadi panduan pendekatan dalam Mrxuqb ini pada "studi tentang petani", merupakan sebuah pendekatan yang ekspansif dan berhubungan dan berkaitan dengan banyak isu seperti sosiologi, politik, budaya dan ideologi.

Tentu saja terkadang ada kelambatan antara ritme antara pertanyaan intelektual dengan perubahan di dunia yang luas, terkadang secepat yang mereka pertentangkan. Sebagaimana Mrxuqb#ri #Shdvdqw#Vwxglhv membentuk indentitas intelektual dan reputasi internasionalnya, sederetan kejadian yang kemudian menginspirasi pendirinya dan mengembangkannya mulai dilakukan untuk menganalisa perubahan yang teramat besar yang menjadi semacam jelas selama dua dekade berikutnya. Perubahan itu adalah krisis akumulasi krisis dan restrukturisasi ekonomi kapitalis internasional dari tahun 1970an, yang dinamai "globalisasi". Agenda politik dan kebijakan itu disusun oleh pemilik modal besar untuk diatur dan mempromosikannya dari tahun 1980an yang dinamai "neoliberalisme". Pembagian kerja internasional dalam pertanian dan agrobisnis untuk pasar produk agrikultur dibentuk ulang oleh dinamika globalisasi dan neoliberalisme (atau 'globalisasi neoliberal'), yang merupakan pokok

masalah dalam ketidakmerataan kapitalisme. Hal ini memiliki dampak yang luas baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi "petani" di pedesaan "selatan" (tentu saja juga petani di "utara"). Salah satu dari wujud perubahan yang menyeluruh adalah berakhinya rezim pangan yang dibentuk di bawah hegemoni US setelah Perang Dunia Kedua, sebagaimana yang di analisis dalam karya pioner dari Harriet Friedmann dan Philip McMichael—-keduanya adalah kontributor dalam buku ini-.

Perubahan yang sangat berbeda, walaupun tidak diragukan saling berhubungan, adalah bahwa pada tahun 1970an mulai ditandai dengan berakhirnya periode panjang dari "perang petani pada abad ke 20" selama 60 tahun sebelumnya, yang dieksplor dalam karya terkenal Eric Wolf. Ini mulai tampak bahwa pergolakan dari pemberontakan petani "klasik" dan dinamika perlawanan—dinamika yang menyejarah dan mendunia yang membentuk modernitas dari Revolusi Perancis hingga kemenangan panjang perlawanan masyarakat Vietnam untuk pembebasan Nasional—-telah usai. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa bentuk politik oposisi dan perlawanan agraria dan pedesaan dan epik singkat dari "perang petani" mulai kehilangan relevansinya. Malah, Mrxuqdl#ri #Shdvdqw#Vwxg0 lv memberikan materi dari berbagai politik sosiologi pedesaan, termasuk dua isu spesial (juga dipublikasikan dalam buku) dalam "bentuk perlawanan sehari-hari", yang disorot dalam karya James Scott dan dalam gerakan petani yang baru di India yang menonjol pada tahun 1980an. Di tahun 1990an Mrxuqdo juga mulai mempublikasikan artikel mengenai kondisi dan dampak baru dari internasionalisasi pertanian yang dihasilkan oleh "globalisasi".

Artikel tersebut dipublikasikan di Mrxuqdl#ri #Djudu0 ldq#Fkdqjh dari tahun 2001, yang juga mempublikasikan sejumlah artikel yang kuat mengenai politik agraria

kontemporer dan reforma agraria yang baru-baru ini dibangkitkan kembali dalam wacana dan kebijakan pembangunan neoliberal, contohnya oleh Bank Dunia, gerakan sosial agraria di bagian berbeda di "Negara-negara selatan". Yang terakhir itu khususnya mengartikulasikan klaim mereka dalam hal kepentingan "petani", "keluarga petani" atau "masyarakat agraria", dan terkadang merayakan apa yang mereka anggap sebagai proses "pembentukan ulang masyarakat petani [uhshdvdqwl}dwlrq]", sehingga meresonansikan tradisi lama agraria populis dan menegaskan ulang ciri khas mereka untuk beroposisi pada globalisasi neoliberal.

Salah satu wujud yang paling menyolok saat ini adalah politik "baru" dari perlawanan agraria yaitu kemunculan "gerakan agrarian transnasional (wdqvqdwlrqdo djuduldq#pryhphqw)' yang menjadi pokok masalah dalam buku ini. Organisasi petani internasional yang komposisi sosialnya dan sifat politik dan tujuannya yang sangat berbeda tidak seluruhnya merupakan cerita novel, sebagaimana yang editor tunjukkan dalam pendahuluan bab mereka. Bagaimanapun juga, gerakan agraria transnasional saat ini dibentuk dalam level regional dan transkontinental yang akan dapat memberi klaim bentuk baru mobilisasi dan aksi serta oposisi mereka pada globalisasi neoliberal dan malapetaka yang ditimbulkannya. Jika penelitian tentang globalisasi membantu pemahaman kita pada strategi-strategi akumulasi dari agrobisnis kontemporer dan dampak mereka pada pertanian dan petani, maka politik ekonomi harusmesti disambungkan dengan politik sosiologi yang ketat semacam itu. Ini adalah tantangan yang rumit, dimana buku ini membuat ciri tersendiri dan signifikan. Sebagaimana para editor mengobservasi dalam kesimpulan di Shqgdkxxxdq:

> Gerakan agraria tranasional adalah proyek politik dengan akar sejarah yang dalam di beragam masyarakat nasional, dengan aliansi-aliansi yang beragam dan bergeser, ushuwdu berbagai aksi, dan bentuk representasi yang kompleks, kerangka isu dan perumusan tuntutan.....dengan mengakui kontradiksi gerakan agrarian transnasional, ambiguitas dan ketegangan dalam tataran internal (penulis dalam buku ini) juga melihatnya dari sudut pandang seorang intelektual yang turut terlibat dalam gerakan, untuk memajukan proyek politik transformatif dengan pemahaman yang lebih baik mengenai asal-muasal, kesuksesan dan kegagalan masa lalu dan tantangan saat ini dan masa mendatang dari gerakan agrarian transnasional.

Tujuan ini diformulasikan dengan kejelasan yang mengagumkan, kecermatan dan ketelitian dalam esai pendahuluan editor, yang juga memberikan kontribusi berharga dalam penjelasaan yang lebih luas mengenai gerakan sosial "baru". Kombinasi antara keterlibatan politik dengan tanggung jawab dan ketenangan intelektual yang menurut mereka diperlukan untuk mencegah voluntarisme dan perayaan kegagahan (wulxpskdolvp) 'gerakan', ini diekspresikan dalam berbagai cara dalam diskusi mereka mengenai "sunyinya literatur" mengenai gearakan agraria transnasional hingga sekarang. Kesunyian tersebut meliputi sepinya isu-isu seperti relasi kelas, dan basis lainnya dalam diferensiasi sosial dan ketidaksetaraan antara petani/masyarakat yang menguasai tanah—-yang menjadi pusat perhatian dalam ekonomi politik agraria—-sebagai masalah kompleks dari representasi politik, legitimasi dan kepemimpinan, ideologi serta perbedaan pandangan politik dalam gerakan agraria transnasional dan tentu saja komponen organisasi mereka serta geografi

politik yang sangat tidak merata dalam gerakan agraria transnasional.

Shqgdkxoxdq buku itu memberikan batu loncatan yang sangat baik untuk beragam dan kontribusi yang kaya yang mengikutinya. Hal tersebut membawa tema yang sudah dikenal seperti tuntutan terhadap tanah dan dukungan publik (lainnya) untuk petani kecil dan perlawanan pada penindasan dan perampasan negara, dan isu baru yang dihasilkan oleh globalisasi neoliberal seperti dampak perdagangan bebas, kontrol perusahaan pada tanaman genetik, dan reforma agraria yang dipandu oleh pasar. Lebih jauh, beberapa kontribusi yang diberikan di bagian Shqgdkxoxdq mempertimbangkan kompleksitas sosiologis dari kelas pedesaan, gender, relasi etnik, dan bagaimana mereka bertemu dengan gerakan dan hubungan antara mereka dan antar pedesaan dan kota dan hubungan dengan imigrasi buruh internasional. Berbagai bab menceritakan tema yang diperhatikan di wilayah utama di "Negara-ngara selatan", dari Amerika Tengah dan Brazil, yang memberikan dua bentuk gerakan sosial agraria yang melambangkan gerakan saat ini, Indonesia dan Filipina dan juga Burma dan Cina yang mana gerakan transnasional agraria belum tercapai dan mendemontrasikan bentuk kepentingan agraria mereka sendiri serta perlawanan pedesaan. Dalam koleksi ini juga digambarkan bagaimana gerakan di Sub-sahara Afrika, yaitu Afrika Selatan yang memiliki kesenjangan yang harus diperhatikan; sementara India diberi perhatian sedikit (di bab yang membandingkan kampanye RG di India, Afrika Selatan dan Brazil) walaupun editor memberi catatan bagaimana KRRS (Karnataka State Farmers Association) terkadang digembar-gemborkan sebagai gerakan agraria oposisi yang paling penting di India yang didominasi oleh petani menengah dan kaya.

Tidak bisa dihindari ada beberapa kesenjangan dalam buku ini. Meskipun demikian dengan kesenjangan seperti itu, buku ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan, impresif dan tentu saja dapat berkembang di masa depan untuk memahami gerakan agraria transnasional dalam kondisi globalisasi neoliberal saat ini. Kami sangat percaya bahwa kepentingan ini akan dihargai dan akan menstimulasi perdebatan yang bermanfaat, untuk penelitian lebih jauh dalam tema dan isu yang dicakupnya dan dibangunnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar v
1. Gerakan Agraria Transnasional: Asal-Muasal, Politik, Kampanye dan Pengaruhnya 1
2 Petani Membuat Sejarah Sendiri, Tapi Tidak Seperti yang Mereka Inginkan. 75
3 Organisasi Transnasional di Amerika Tengah: Sejarah, Tantangan, dan Prospek 123
4 La Via Campesina dan Kampanye Global Reforma Agraria 179
5 'Mobilisasi yang Lamban': Jaringan Petani Transnasional dan Organisasi Akar rumput di Brazil dan Afrika Selatan 241
6 Pergerakan Melawan Tanaman Rekasaya Genetik Di India, Afrika Selatan Dan Brazil. 289
7 Perdagangan dan Bioteknologi di Amerika Latin: Demokratisasi, Pertentangan dan Politik Mobilisasi 345
8 Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria dan Lingkungan di Indonesia 409
9 Aturan Siapa? Pertentangan untuk Menjamin " Produksi Lokal untuk Konsumen Jauh"200 467
10 Organisasi Migran dan Dampak Kampung Halaman di Meksiko Perdesaan 519
11 Dari yang Tersembunyi sampai yang Terbuka: Politik Sehari-hari Petani di Cina dan Implikasinya pada Gerakan Agraria Transnasional 573
12 Dimana Tidak Ada Gerakan :Perlawanan Lokal dan Potensi Solidaritas 627
Indeks 679

1

Gerakan Agraria Transnasional: Asal-Muasal, Politik, Kampanye dan Pengaruhnya

Saturnino M. Borras JR, Marc Edelman, dan Cristobal Kay

Kebangkitan Gerakan Agraria Transnasional

Bagaimanakah perubahan-perubahan ekonomi politik global belakangan ini dalam mempengaruhi otonomi dan kapasitas 'kaum miskin pedesaan'[1]? Bagaimana memahami kondisi kaum miskin pedesaan dan menganalisis kesempatan politik, ancaman, kerangka pandangan mereka, identitas dan solidaritas kaum miskin pedesaan, dan cara mereka membangun gerakan dan jaringan dalam aksi-aksi bersama? Apa bentuk-bentuk perlawanan secara lokal, nasional dan internasional yang sedang tumbuh dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi proses perubahan agraria? Bagaimana dan sejauh mana literatur ilmiah mengenai gerakan sosial dan

[1] kaum miskin pedesaan' merupakan kategori yang sangat heterogen, termasuk pemilik tanah kecil, petani bagi hasil, petani penyewa, buruh pedesaan, buruh migran, nelayan subsisten dan nelayan kecil, penghuni di wilayah hutan, masyarakat adat, perempuan petani dan penggembala. Perbedaan antara masyarakat miskin pedesaan ini hanya dari segi perbedaan kelas, jenis kelamin, ras, etnis dan kasta serta dimensi lain yang serupa.

studi agraria mampu menangkap perubahan yang cepat dalam hal ideologi, politik dan organisasi gerakan agraria transnasional itu? Semua pertanyaan-pertanyaan yang luas itu diajukan dalam buku ini.

Neoliberalisme secara signifikan telah mengubah dinamika hubungan pertukaran dan produksi agraria di dalam dan di antara negara-negara yang berada di utara-selatan. Proses serempak yang terjadi oleh globalisasi "dari atas", desentralisasi sepihak "dari bawah" dan privatisasi dari "samping" melalui negara sebagai pusatnya, memainkan kunci utama dalam pertumbuhan dan perkembangan sistem agraria, dan proses ini telah menggoncang masyarakat pedesaan hingga ke akar-akarnya (sebagai contoh lihat, Edelman 1999; Gwyne and Kay 2004). Proses yang secara luas terjadi di masyarakat pedesaan itu bersamaan dengan terjadinya gelombang restruksturisasi agraria yang terkini, yang memberikan kekuasaan penuh pada kapital domestik dan korporasi transnasional untuk mendikte syarat-syarat pertukaran nilai dan produksi pertanian (Byres 2003; Friedman 2004; Bernstein 2006; McMichael 2006; Akram Lodhi and Kay 2008). Sementara, ada yang menjadi pemenang dan pecundang dalam proses restrukturisasi global-lokal saat ini, orang-orang yang bekerja di sektor pertaniannya dan mata pencahariannya dengan cepat menghadapi kondisi yang semakin memburuk. Diversifikasi mata pencaharian (desa dan desa-kota; on farm, off farm atau non-farm) dijalankan dengan terpaksa atau sebaliknya menjadi semakin tersebar luas. (Bryceson et al. 2000; Ellis 2000; Rigg 2006; World bank 200). Akses dan kontrol terhadap tanah saat ini didefinisikan-ulang dan hak kepemilikan atas tanah telah direstrukturisasi untuk lebih menopang kapital swasta (De Soto 2000; World Bank 2003; lihat juga Rosset et al. 2006; Lahiff et al. 2007; Akram Lodhi et al. 2007).

Proses kompleks dari kondisi global-lokal inilah yang mempengaruhi "gerakan agraria" dalam berbagai bentuk. Kebanyakan, biasanya (dan berlangsung hingga sekarang) berlangsung semata-mata di dalam komunitas lokal dengan cakupan paling luas di tingkat nasional. Saat ini berbagai gerakan agraria telah "melokalisasi" perlawanan-perlawanan mereka sebagai respon terhadap desentralisasi yang parsial, sementara ada juga yang berfokus pada aktivitas yang lebih "terprivatisasi" dalam suatu sikap yang serupa dengan "mengganti peran negara" dalam hal isu-isu pembangunan seperti memberikan layanan sosial pada masyarakat, sementara ada juga yang telah "merambah jaringan internasional" dengan melakukan perlawanan-perlawanan sebagai respon terhadap "restrukturisasi agraria di level global".

Dewasa ini, Gerakan Agraria Transnasional (digunakan disini sebagai definisi yang longgar untuk mengartikan "pergerakan", "organisasi", "koalisi", "jaringan" dan lingkaran solidaritas" dari "kaum miskin pedesaan") dan beberapa kelompok gerakan petani nasional yang terhubung ke gerakan-gerakan transnasional itu telah memiliki kekuasaan penuh dan pengaruh politik (dan dalam beberapa hal, mungkin kemahsyuran)[2]. La Via Campesina merupakan jaringan atau koalisi yang paling terkenal dalam Gerakan Agraria Transnasional ini (Borras 2004; Desmairs 2007). Namun, terdapat juga beberapa gerakan transnasional, jaringan, dan koalisi yang berbasis sektor-sektor pedesaan atau kelompok advokasi untuk masyarakat pedesaan; beberapa gerakan tersebut terlibat dalam gerakan politik yang berhaluan kiri, sementara yang

[2] Untuk lebih mendapatkan nuansa diskusi akademik tentang perbedaan dan persamaan kategori pada konteks lintas-negara atau gerakan 'transnasional', lihat Fox (2000, 9 –12, 45) dan Khagram et al. (2002, 9).

lainnya dianggap sebagai kelompok radikal (Edelman 2003)[3].

Contoh lain dari Gerakan Agraria Transnasional yang juga didasarkan pada gerakan dan isu agraria adalah International Planning Commitee (IPC) yang bergerak dalam isu Kedaulatan Pangan, yang terdiri dari lebih 500 gerakan rakyat pedesaan dan beberapa NGO yang radikal dan konservatif sebagai anggotanya. Begitu pula di sektor perikanan, juga menunjukkan geliat gerakannya pada tingkat transnasional seperti World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers (WFF), World Forum of Fisher Peoples (WFFP) dan International Collective in Support of Fish Workers (ICSFW). Sementara itu gerakan yang muncul dari sektor "pekerja pedesaan" walaupun kelihatan relatif sedikit yang tampak namun International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations (IUF) masih tetap menjadi aktor global yang signifikan dan aktif. Memang beberapa jaringan yang bergerak di isu agraria relatif masih baru, namun sebenarnya mereka telah hadir selama beberapa dekade, seperti International Federation of Adult Catholic Farmers Movements (FIMARC), yang didirikan pada tahun 1950. Ada lebih banyak lagi jaringan masyarakat sipil—transnasional— yang berorientasi pada isu agraria seperti FoodFirst Information and Action Network (FIAN), Land Research and Action Network (LRAN), Erosion Technology and Concentration Group (ETC Group), Genetic Resources Action International (GRAIN) dan Friend of The Earth (Edelman 2003).

Beberapa dari gerakan dan jaringan global ini mempunyai ideologi dan orientasi politik yang pada dasarnya

---

[3] Nama organisasi selengkapnya akan diberikan ketika organisasi itu pertama kali disebutkan dalam buku ini. Setelah itu. kebanyakan dari nama organisasi itu akan disingkat saja.

berbeda, sebagai contohnya Via Campesina dan the International Federation of Agricultural Producers (IFAP) atau Via Campesina dan The Asian Peasant Coalition (APC). Sementara beberapa jaringan mempunyai hubungan persahabatan yang erat, seperti Via Campesina dengan The International Movement of Catholic Agricultural dan Rural Youth (MIJARC). Sementara, ada juga yang berfokus di regional, seperti Coodinadora Latinoamericana de Organization del Campo (CLOC) dan Reseau des Organizations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Quest (ROPPA). Lebih jauh lagi, jika diperhatikan, banyak dari gerakan agraria dibedakan menurut tingkatan sosial dari basis massa utama mereka, sebagai contoh di IFAP, kebanyakan anggotanya berasal dari kalangan petani menengah dan atas, sementara di La Via Campesina anggota organisasinya kebanyakan berasal dari petani miskin dan petani gurem.

Meski demikian, Gerakan Agraria Transnasional yang besar cenderung sangat heterogen dalam masalah kelas, misalnya IFAP juga mempunyai anggota-anggota yang datang dari kalangan petani miskin dan petani gurem, sementara Via Campesina juga mempunyai anggota yang berasal dari kalangan petani menengah dan petani kaya. Jadi, banyak gerakan, jaringan dan koalisi pada tingkat transnasional ini yang jenis keanggotaannya "tumpang-tindih", bahkan antara mereka yang juga saling bersaing, seperti antara Via Campesina dan IFAP.

Banyak dari kelompok gerakan agraria ini, utamanya Via Campesina, yang barangkali dapat dianggap sebagai kelompok yang paling kuat secara politik dari semua bentuk Gerakan Agraria Transnasional atau jaringan gerakan transnasional kontemporer, secara signifikan telah ikut bagian dalam melemahkan konferensi-konferensi besar yang penting yang dilakukan oleh lembaga transnasional,

seperti perlawanan mereka pada Konferensi World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, di Seattle, Washington DC, Cancun, Hongkong dan lainnya, aksi protes ini mereka tampilkan dalam bentuk teatrikal yang dilakoni oleh petani-petani sendiri, aksi-aksi protes inilah yang kemudian berkontribusi dalam meningkatkan perhatian publik dan media pada gerakan mereka. Sebagai contoh, setelah kekerasan yang terjadi pada KTT G-8 tahun 2001 di Genoa, Newsweek menempatkan Via Campesina sebagai salah satu dari delapan grup 'kelompok globalis yang lebih ramah dan sopan' setelah gerakan protes anti G-8 (Newsweek 2001,17). Pada tahun 2008, London Guardian memasukkan Koordinator Via Campesina dan Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih sebagai "pejuang lingkungan hidup yang terdepan", dan "50 orang yang dianggap dapat menyelamatkan bumi" (Guardian 2008).

Banyak gerakan nasional yang merupakan anggota terkemuka dari gerakan Transnasional ini terlibat dalam aksi-aksi dramatis sebagai wujud perlawanan terhadap korporasi-korporasi besar, seperti aksi membuldoser restoran cepat-saji McDonald di Perancis, aksi membakar sebuah outlet Kentucky Fried Chicken di Bangalore, dan menurunkan seorang General Manager dari perkebunan kedelai dan kebun pembibitan kayu putih di Brazil, serta beberapa aksi lainnya. Begitupun dengan aksi protes bunuh diri yang dramatik oleh Lee Kyang Hae, seorang petani yang berasal dari Korea Selatan, yang terjadi saat negosiasi WTO di Cancun, ini juga merupakan bentuk dari cara mereka menarik perhatian publik dan media.

Di sisi lain, gerakan agraria juga masuk dan menempati badan konsultatif di beberapa organisasi yang berada di bawah naungan PBB, seperti FAO, IFAD, dan UNHCR. Mereka melakukan negosiasi dan tawar menawar

dengan birokrasi internasional untuk berbagai macam agenda dari mulai agenda reformasi kebijakan hingga mencari dukungan dana. Mereka bernegosiasi dan bersepakat membuat kompromi dengan sejumlah pendonor non-pemerintah dan lembaga korporasi terpilih mengenai berbagai hal yang terkait dengan pendanaan aktivitas mereka. Tempat-tempat resmi di perwakilan internasional telah menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini ketika Gerakan Agraria Transnasional terlibat dan mempengaruhinya, mereka menjadi perwakilan langsung dalam "ruang-ruang" tersebut—menantang langsung "penghuni-penghuni" kunonya yang telah lama berada di kursi-kursi perwakilan PBB dan juga berfungsi sebagai perantara berbagai kelompok NGO. Dalam beberapa kasus, banyak gerakan agraria radikal yang mampu memperoleh kursi di tempat-tempat resmi ini kemudian merongrong hegemoni di tempat yang sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh gerakan-gerakan yang lebih konservatif. Perlawanan-perlawanan yang ditujukan tehadap NGO tradisional dan gerakan konservatif seperti IFAP dapat dilihat dalam kemampuan Via Campesina yang akhirnya mendapatkan perwakilan langsung dalam mekanisme resmi pertemuan global (Forum Petani) dengan kelompok petani di IFAD, FAO dan di ICARRD.

Pertumbuhan Gerakan Agraria Transnasional dalam skala internasional, visibilitasnya, suara dan pengaruh politiknya telah mengilhami berbagai proses progresif dan radikal pada jaringan gerakan non-agraria, dari kelompok "lingkungan" hingga kelompok hak asasi manusia, dan seringkali menghasilkan sinergi baru yang kokoh. Di samping itu, kemunculan gerakan petani baru pada umumnya, dan Gerakan Agraria Transnasional khususnya, juga membangkitkan gelombang baru dalam ranah kajian

akademik mulai dari interpretasi Marxis hingga post-modern terhadap fenomena tersebut (lihat, sebagai contoh, Harvey 1998; Edelman 1999; Brass 2000). Hal tersebut juga memberikan justifikasi konkret yang sangat diperlukan untuk beberapa program lembaga donor non pemerintah. Memang, Gerakan Agraria Transnasional telah mencapai tingkat jangkauan dan pengaruh yang tidak dapat diabaikan, bahkan oleh arus utama lembaga-lembaga pembangunan dan lembaga-lembaga keuangan sekalipun, yang selama ini intensif sekali melakukan upaya untuk mempengaruhi dan mengkooptasi, berkolaborasi atau melemahkan setidaknya beberapa Gerakan Transnasional tersebut.

Kebanyakan peneliti memusatkan perhatian mereka pada gerakan global yang paling terlihat dan 'berisik' , seperti Via Campesina. Tapi saat ini Gerakan Agraria Transnasional dan jaringan yang lain menjadi plural dan beragam, seperti yang diindikasikan sebelumnya. Beberapa pengamat cenderung beranggapan, sebagaimana aktivis agraria sering berasumsi, bahwa Gerakan Agraria Transnasional kontemporer merupakan fenomena baru. Tetapi Gerakan Agraria Transnasional dan jaringan yang lain juga, sebenarnya tidak selalu sama sekali baru. Banyak kelompok sebanding telah ada sebelumnya. Banyak gerakan atau jaringan yang selama puluhan tahun, seperti halnya Campesino A Campesino (Petani untuk Petani) di Amerika Tengah-Mexico, yang dimulai pada 1970-an (Holt-Giménez 2006). Selain itu, Gerakan Transnasional yang ada saat ini seringkali membangun jaringan lintas-negara secara langsung dengan baik sebelum serangan neoliberal pada awal tahun 1980-an (lihat misalnya, Edelman 2003 196-7) . Banyak jaringan lintas-negara dan lintas-benua itu telah terjadi prosesnya sejak sebelum itu, misalnya, selama tahun 1970-an dan 1980-an sebagai bagian dari jaringan

solidaritas politik waktu itu di Eropa dan Amerika Utara yang didukung oleh gerakan pembebasan nasional dan gerakan anti-kediktatoran di berbagai negara berkembang, seperti Chili, Nikaragua, Afrika Selatan dan Filipina. Namun, untuk melihat akar perkembangan aliansi transnasional kontemporer mau tidak mau harus melihat ke belakang. Memahami keragaman dan dinamika Gerakan Agraria Transnasional kontemporer, sebagian memerlukan pemahaman tentang masa lalu gerakan agraria transnasional dan jaringannya. Topik ini yang akan dibahas selanjutnya

Asal-Muasal Sejarah Gerakan Agraria Transnasional

Pembangunan aliansi transnasional di antara petani dan organisasi petani kecil mulai terlihat jelas setelah akhir 1980-an, tetapi sebenarnya semua cerita itu berakar dari akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian lintas-negara tidak hanya merupakan hasil dari teknologi komunikasi baru, yang semakin memperluas jangkauan komunikasi lembaga pemerintahan supra-nasional atau melemahnya sistem negara kontemporer di bawah payung globalisasi. Gerakan Transnasional organisasi petani awal kadang-kadang terdiri dari campuran eklektis dari berbagai aliran gerakan agraria: populisme, komunisme, reformisme yang dipimpin elit dan tuan tanah, pasifisme dan feminisme.

Internasional Hijau dan Internasional Petani Merah

Dalam sepuluh tahun setelah Perang Dunia I, dua gerakan internasional bersaing untuk mendapatkan dukungan petani di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dua gerakan itu adalah Gerakan Agraria Internasional Hijau, yang bermarkas di Praha, dan Gerakan Petani Internasional

Merah yang berbasis di Moskow atau Krestintern (Jackson1966,51)[4]. Setelah Perang Dunia, para gerakan agraria atau dan partai politik yang dikuasai petani berkuasa di Bulgaria dan Yugoslavia yang kemudian memberi pengaruh besar di Cekoslowakia, Polandia, Rumania, Hungaria, Austria dan Belanda. Partai politik agraria ini berbeda dalam ideologi dan praktek, masing-masing biasanya terdiri dari faksi yang bersaing ketat, tetapi kebanyakan dari mereka bertujuan untuk menggeser protokol perdagangan agar lebih berpihak pada pelaksanaan reforma agraria dan bagaimana menghancurkan kekuatan kelompok tuan tanah-tuan tanah tradisionial. Dua tujuan yang terakhir itu, tentu saja dilakukan bersama dengan kelompok komunis, dimana kelompok agraria ini telah menjalin hubungan intim dan telah melalui banyak persoalan yang kompleks bersama, kadang-kadang kolaboratif dan lebih sering bertentangan. Hubungan semacam itu terjadi di berbagai negara.

Salah satu pemerintahan agraria yang paling kuat terjadi di Bulgaria pada 1919, tepatnya setelah periode kekerasan dan ketidakstabilan, ketika kelompok dari Alexander Stamboliski dari Agrarian Union memenangkan pemilu pertama pasca perang (Jackson 1966, 161; Bell 1977, 142-3)[5]. Di bawah kepemimpinan Stamboliski, Bulgaria melakukan reformasi sosial, terutama setelah memodifikasi sistem pajak untuk mendukung kaum miskin di pedesaan dan melakukan redistribusi tanah beberapa perkebunan besar untuk kaum tani. Lebih dari empat tahun, kelompok ini memenangkan pemilihan (seperti yang juga dialami oleh kaum komunis, partai terbesar kedua).

---

[4] "Krestintern" adalah konjungsi dari "krest'yianskii Internatsional" Rusia atau Peasant International.

[5] Nama Partai yang dipimpin oleh Stamboliski ini adalah Bulgarian Agrarian National Union (BANU)

Stamboliski — terkenal memusuhi semua yang berbau "kota dan perkotaan", yang berkali-kali dia sebut sebagai "parasit" - berharap untuk mengubah Bulgaria menjadi "model negara pertanian" dalam 20 tahun (Jackson 1966, 42; Pundeff 1992, 82-3).

Novelis Ernest Hemingway, yang bertemu Stamboliski pada tahun 1922, menulis dalam Toronto Star bahwa Stamboliski berwajah 'tebal, merah-kecokelatan, memiliki kumis hitam yang persis seperti sersan mayor, dia tidak mengerti satu kata pun dari bahasa apa pun kecuali bahasa Bulgaria, dan pernah membuat pidato yang berdurasi lima belas jam lamanya, yang membuat lidahnya terkilir, dan dia adalah yang terkuat dan terkemuka di Eropa dalam masalah ini' (Hemingway 1987, 149)[6]. Di negaranya, Stamboliski membentuk Agrarian Orange Guard, sebuah kelompok milisi bersenjata yang terdiri dari para petani-petani, yang dimobilisasi secara periodik untuk menghadapi ancaman terhadap pemerintah, terutama dari Komunis dan sayap kanan nasionalis Macedonia (Pundeff 1992, 82). Dalam kebijakan luar negeri, ia berusaha mendapatkan dukungan dari pihak partai politik agraria di Polandia, Cekoslowakia dan tempat lain untuk membentuk Liga Pertanian Internasional yang akan berfungsi sebagai perlindungan untuk menghadapi dua kelompok reaksioner yaitu "Internasional Putih" yang merupakan kelompok bangsawan dan tuan tanah serta "Internasional Merah" yang merupakan kaum Bolshevik (Colby 1922, 108-9; Gianaris 1996, 113).

Internasional Hijau pertama kali terbentuk pada tahun 1920, ketika partai politik agraria dari Bulgaria,

---

[6] Pidato sepanjang 15 jam dalam pertemuan Agrarian Party. Menurut hemingway (1897,150) "pidato tersebut mematahkan hati komunis. Hal ini tidak baik beroposisi dengan pria yang bisa berbicara selama 15 jam.

Yugoslavia, Austria, Hongaria, Rumania, Belanda dan Swiss mulai melakukan pertukaran delegasi dan mendirikan sebuah liga yang teroganisir di bawah arahan bangsawan Bavaria, Dr. Georg Heim (Durrant 1920)[7] yang juga seorang pemimpin petani. Tahun berikutnya, aliansi itu menyatakan dirinya dengan resmi sebagai Biro Agraria Internasional dan mendirikan markas di Praha (Bell 1977, 143)[8]. Upaya ini terjadi utamanya karena inisiatif Stamboliski, yang membuat sedikit kemajuan selama tiga tahun, sebagai pemimpin Bulgaria yang saat itu menghadapi beragam masalah diplomatik dan lawan-lawan politik yang banyak di tingkat domestik, termasuk Komunis, elite perkotaan, nasionalis, para perwira tentara, pengungsi berkulit putih dari Rusia dan Ukraina dari perang saudara di Uni Soviet, dan ekstremis Macedonia.

Pada tahun 1923, musuh-musuh Stamboliski menumbangkannya dalam kudeta berdarah sayap kanan yang dilakukan selama lebih dari dua dekade oleh militer dan kaum bangsawan[9]. Stamboliski dipotong tangan kanannya dan setelah disiksa cukup lama, kemudian dia dipenggal (Bell 1977, 237-8). Perlawanan sporadis yang dilakukan oleh petani, dengan cepat diatasi dan puluhan pendukung BANU dibunuh dalam minggu berikutnya. Beberapa bulan setelah kudeta, aliansi yang rapuh dari Kelompok Agraria Bulgaria di luar negeri dan Komunis melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Komunis, tetapi ini juga dapat dipadamkan dengan cepat, dengan

---

7 Pandangan politik Heim di sebutkan secara berani di Brown (1923).

8 Dalam periode ini, the Green International memiliki orientasi Pan-Slav yang kuat. Keanggotaannya pada tahun 1921-25 dibatasi di Czech, Serbia, partai agraria Polish dan Bulgarian. (Bell 1977, 143)

9 Selama penggulingan Communist mendeklarasikan kenetralan dalam apa yang mereka lihat sebagai pertengkaran sederhana antara borjuis pedesaan dan kota. (Bell 1977,231).

sekitar 5.000 korban jiwa (Pundeff 1992, 85-7; Carr 1964, 209).

Bencana di Bulgaria ini, kemudian mendorong terbukanya jalan bagi Komunis Internasional (Komintern) untuk membentuk Internasional Petani Merah (Krestintern) yang juga sekaligus dimaksudkan untuk mempererat hubungan dengan pihak partai politik agraria. Beberapa faktor di dalam Uni Soviet dan gerakan Komunis internasional memberikan kontribusi terhadap pergeseran ini. Tahun 1921 dimulailah pemberlakuan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy) di Uni Soviet, ditandai dengan munculnya toleransi yang lebih besar terhadap pasar pertanian dan kepemilikan lahan skala kecil—ini adalah periode yang unik—dalam sejarah Soviet yang berlangsung hingga 1929, kebijakan ini berakhir ketika konsolidasi kekuasaan Stalin membawa langkah awal arah kebijakan Uni Soviet yang mengkolektifisasi pertanian dan "menghapus kelas kulak". Karena kecewa oleh kegagalan pemberontakan Komunis pada tahun 1919 di Jerman dan Hungaria dan kekalahan invasi Soviet ke Polandia pada tahun 1920, Moskow (USSR) mulai melirik timur sebagai zona yang paling mungkin untuk gerakan revolusioner baru yang sukses. Tetapi, masyarakat di sana hanyalah kaum proletariat industri kecil dan petani. Pada saat diadakannya kongres pendirian Krestintern pada tahun 1923, kelompok inilah yang mengeluarkan wacana 'petani buruh di negara-negara kolonial' (Carr 1964,615), Itulah isu yang diangkat pada edisi pertama jurnal yang diantaranya diisi oleh artikel Nguyen Ai-quÑc (nama samaran untuk Ho Chi Minh) dan Sen Katayama-salah seorang agen Komintern dari Jepang yang beroperasi di seluruh Asia, Meksiko dan Amerika Tengah (Edelman 1987,12).

Krestintern hanya berhasil menarik gerakan agraria non-Komunis pada beberapa kesempatan. Tahun 1924,

Krestintern merekrut Stjepan Radic—seorang pimpinan dari Partai Petani—sebagai anggota, yang sebelumnya sangat banyak bergerakan dalam gerakan agraria daripada gerakan Komunis. Seperti Moskow, Radic sangat keras menentang gagasan pembentukan Federasi Yugoslavia yang dapat berfungsi sebagai 'topeng imperialisme Serbia Raya' (Biondich2000,198). Namun, Radic yang berharap bisa memanfaatkan afiliasi Krestintern untuk menekan Beograd agar menciptakan otonomi Kroasia yang lebih besar, pada akhirnya bersikap pasifis dan menemui kesulitan dalam berkolaborasi dengan kaum Komunis Yugoslavia. Dia tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam kegiatan Krestintern dan penarikan dirinya dari Krestintern sebenarnya hanya melemahkan legitimasi organisasi yang sudah lemah (Carr 1964, 227-9, 953; Jackson 1966, 139).

Nasionalis Cina Kuomintang (KMT) juga "bermain" dengan Krestintern selama pertengahan tahun 1920-an sebagai bagian dari aliansi dengan Partai Komunis Cina (PKC). Beberapa pemimpin KMT mengunjungi koperasi Moskow dan Krestintern dan Komintern, termasuk Ho Chi Minh dan beberapa kelompok militan yang signifikan di Vietnam, yang belajar di Institut Pelatihan Gerakan Petani di Partai Komunis Cina, di mana Mao Tse-tung adalah salah seorang instrukturnya (Quinn-Hakim 2003, 82-9). Pada tahun 1925 slogan 'Gabung dengan Krestinern' dilaporkan muncul di poster di desa-desa Cina (Carr1964,723). Tapi hubungan ini juga terputus, pada tahun 1927, ketika KMT membantai Sekutu komunisnya di Shanghai, hal yang benar-benar membuat para pemimpin Uni Soviet terkejut. Pada malam kudeta, Komintern telah menginstruksikan kepada PKC untuk mengubur salah satu cabang organisasinya itu (Cohen 1975, 261).

Krestintern tidak pernah memperoleh pengaruh atau dapat menjangkau sebagian "anak organisasi" lainnya dari Komintern, seperti Persatuan Buruh Merah Internasional (Profintern) Atau Organisasi Internasional untuk Bantuan Kemanusiaan Revolusioner (juga dikenal sebagai Red Aid atau MOPR, dengan akronim Rusia). Pada awal 1925, Jurnal Krestintern menerbitkan permintaan maaf atas kesulitan yang mereka hadapi untuk mengadakan Kongres. Di penghujung tahun itu juga, Nikolai Bukharin, dalam laporan lengkapnya kepada Kongres Komintern Kelima, mengusulkan agar Komintern melakukan upaya-upaya di seluruh dunia untuk membawa kaum tani ke dalam organisasi revolusioner, dan di dalam laporan itu Bukharin tidak menyebut Krestintern sama sekali sebagai salah satu dari organisasi revolusioner itu. Setelah kongres Komintern, Krestintern mengadakan sidang pleno, dengan diikuti 78 delegasi dari 39 negara, kongres Ini merekomendasikan agar anggota-anggota Krestintern yang militan (yang datang pada waktu kongres itu) mulai melakukan pengorganisasian dalam organisasi-organisasi petani yang ada dan mencoba untuk menyelaraskan mereka dengan posisi Komunis (Carr 1964, 952-7). Tapi pendekatan ini persis merupakan pendekaatan dua tahun lalu yang justru menyebabkan kegagalan, sebagai contoh kegagalan di Shanghai dan memang beberapa berhasil melakukan pengorganisasian yang kecil dan singkat, tetapi sebenarnya Krestintern hampir mati pada akhir 1920-an. Tokoh-tokoh pro-petani di Partai Soviet, khususnya Bukharin, semakin menemukan bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan visi Stalin mengenai dunia pertanian, tetapi sebagian besar akhirnya dihilangkan dalam pembersihan pada pertengahan hingga akhir 1930-an (Cohen 1975). Salah satu keberhasilan Krestintern yang bertahan lama adalah pendirian Insititut Agraria Internasional di Moskow, yang secara eksplisit memang sengaja

dimaksudkan sebagai pengimbang untuk Institut Pertanian Internasional yang berbasis di Roma (IIA) (Carr 1964, 956)[10].

Dilihat dari luar, sebenarnya Internasional Petani Merah (Krestintern) bukanlah organisasi yang lemah. Pada tahun 1926-1927 misalnya, untuk menghadapi ancaman dari Krestintern, terdapat upaya dari lawan-lawan politiknya untuk membentuk badan koordinasi internasional untuk organisasi petani. Pertama berasal dari Dr Ernst Laur, Sekretaris Umum Serikat Petani Swiss, yang berusaha menyatukan Komisi Internasional Pertanian yang berbasis di Paris (ICA) dan IIA di Roma, yang berhubungan erat dengan Liga Bangsa-Bangsa[11]. Rencana Dr Laur adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara petani nasional dan organisasi-organisasi petani dan dua lembaga pengambil kebijakan itu, namun usaha ini kandas ketika IIA dan ICA dalam tingkat internasional masing-masing bersaing dengan mendirikan kelompok koordinasi organisasi petani internasional dan kondisi ini bertambah parah ketika partai politik agraria Eropa Timur menjaga jarak dan mencurigai Laur karena penolakannya pada pertanian besar yang dikerjakan oleh negara dan intervensi negara terhadap sektor pertanian (Jackson 1966, 140-50).

Pada tahun 1926, Biro Agraria Internasional di Praha mengubah orientasi Pan-Slavianya dan mulai menjangkau

---

[10] IIA didirikan pada tahun 1905 oleh seorang kebangsaan Amerika, David Lubin, dengan dukungan Rockefeller Foundation diharapkan untuk mempersatukan pemerintah dalam pendekatan umum untuk statistik agrikultur dan penelitian (Jackson 1966,140-1). IIA merupakan leluhur dekat United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), yang juga berbasis di Roma semenjak didirikannya pada tahun 1945.

[11] ICA dibentuk pada tahun 1889 oleh French Agricultur Minister, Jules melin. ICA berusaha terus untuk memegang kongres internasional periodik dalam masalah teknikal agrikultur dunia (Jackson 1966, 140-1).

organisasi petani di Perancis, Rumania, Finlandia dan di tempat lain di Eropa. Di bawah kepemimpinan Karel Mecir, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Ceko untuk Yunani, Internasional Hijau menjadi tempat sebagai pusat pertukaran pengalaman, penguatan moral dan solidaritas untuk para petani dan partai politik agraria, dan menyatakan diri sebagai oposisi internasional bagi pemerintahan nasional yang mengancam kepentingan petani. Kegiatan utama yang dilakukan adalah penerbitan buletin triwulanan dan tahunan dalam multibahasa. Puncaknya, pada tahun 1929, Green International memiliki 17 anggota yang terdiri dari partai-partai di berbagai negara, mengutip kata-kata Mecir, anggota Internasional Hijau saat itu mencakup 'dari Samudera Atlantik hingga Laut Hitam, dari Samudra Arktik hingga Aegea' (Jackson 1966, 149).

Krisis ekonomi dunia tahun 1929, kegagalan berbagai politik agraria nasional, dan bangkitnya fasisme, semua itu berkontribusi terhadap kematian Internasional Hijau. Pihak Komunis, walaupun sesekali sangat intim dengan pihak partai politik agraria ini, sering sekali melakukan pengutukan terhadap Internasional Hijau dan Dr. Laur dan upayanya untuk menyatukan ICA Paris dan IIA Roma. Di tengah semakin meningkatnya polarisasi Eropa Tengah dan Timur, dan di tengah menyusutnya ruang politik yang ada, sejak itu pula kegiatan-kegiatan gerakan petani internasional tidak pernah muncul kembali sampai setelah Perang Dunia II, hingga didirikannya International Federation of Agricultural Producers (IFAP).

*Organisasi Perempuan Pedesaan Dunia (*Associated Country Women Of The World*)*

Lebih ke barat lagi, terdapat semacam organisasi petani antarbangsa yang mulai terbentuk pada akhir 1920-an, yaitu Organisasi Perempuan Pedesaan Dunia (Associ-

ated Country Women Of The World= ACWW), yang masih ada hingga kini[12]. Saat ini, ACWW merupakan "organisasi internasional perempuan pedesaan terbesar", yang mengklaim memiliki anggota sembilan juta dari 365 kelompok masyarakat yang berpartisipasi dan berada di lebih dari 70 negara (ACWW 2002). Organisasi ini diperkirakan berasal dari pertemuan tokoh organisasi perempuan tingkat international yang bernama International Council of Women (ICW)—didirikan di Washington pada tahun 1888—-dan gerakan Women's Institute (WI), yang dimulai di Kanada pada tahun 1890-an dan menyebar ke Amerika Serikat, Inggris dan di banyak koloni Inggris lainnya (Davies n.d.).

ICW didirikan oleh para aktivis Amerika Serikat (dan delegasi dari delapan negara lainnya), yang juga berpartisipasi dalam gerakan-gerakan penghapusan perbudakan, hak pilih perempuan serta gerakan ugahari (Rupp 1997, 15). Women Institute diprakarsai oleh para pemimpin ICW Kanada yang berafiliasi memberi bantuan pada lembaga-lembaga pertanian pada sebuah program penyuluhan provinsi yang juga ada di Amerika Serikat (Moss dan Lass, 1988; McNabb dan Neabel 2001). Pada tahun 1913 aktivis Woman Institute Kanada yang bernama Madge Watt pindah ke Inggris di mana dia membantu mendirikan beberapa ratus Women Institute lokal, dan ini membuat presiden ICW, Ishbel Gordon Aberdeen sangat tertarik untuk memulai membuat sebuah federasi internasional. Watt dan Lady Aberdeen—-seorang aristokrat feminis yang suaminya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Kanada—-mengadakan rapat di London pada tahun 1929 yang diikuti perempuan dari 23 negara yang kemudian mendirikan sebuah komite ICW untuk

[12] Bagian ACWW dan IFAP berdasarkan Edelman (2003,185-8)

perempuan pedesaan (Drage 1961, 125)[13]. Komite tersebut menerbitkan sebuah buku tahunan yang diberi judul *What The Country Women Of The World Are Doing*, sebuah jurnal bernama *The Country Woman*, dan sebuah suratkabar dengan nama *Link of Friendship*; mereka juga mengedarkan selebaran dalam tiga bahasa untuk merekrut asosiasi nasional baru (Meier 1958, 5). Pada tahun 1933, di Stockholm, namanya berubah menjadi Associated Country Women of the World atau disingkat ACWW.

Pada masa awal berdirinya ACWW, aktivis perempuan dari Inggris, Belgia, Rumania, Jerman dan bangsawan Swedia memainkan peranan kunci (Meier 1958, 4-5; Drage 1961,131-3; *London Times* 1938). Pada tahun 1936 Konferensi peringatan tiga tahun pertama dilakukan di luar Eropa yaitu di Washington DC, kongres ini dihadiri sekitar 7.000 perempuan petani, sebagian besar dari mereka adalah petani-petani dari Amerika (Meier 1958, 7). Asosiasi ini menyiapkan pembicara dari kalangan akademisi untuk penyelenggaraan dan meneliti isu-isu seperti layanan kebidanan dan gizi. Dalam periode pra-perang ACWW bekerja dengan Liga Bangsa-Bangsa. Selama Perang, ACWW berpindah markas dari London ke Cornell University di New York. Setelah Perang Dunia II, ACWW mencapai status konsultatif dengan beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Meier 1958). Baru-baru ini, ACWW telah mendukung pembangunan dan program-program yang dapat membangkitkan pendapatan dan menganjurkan hal itu dalam forum internasional untuk hak-hak perempuan. Meskipun partisipasi perempuan

[13] Pada pertemuan Pendiri ACWW Lady Aberdeen dilaporkan "dengan cepat tertidur, dibungkus syal besar. Dia terbangun juga, tepat pada waktunya dan menutup pertemuan", "dia adalah", merujuk pada seketaris ACWW Dorothy Drage "orang yang sangat-sangat berbakat" (1961,134)

dari negara yang kurang berkembang mulai tumbuh dan pendekatan yang semakin canggih untuk isu-isu gender, tetapi ACWW tidak pernah berhasil mengatasi watak asal-usul elit Inggrisnya. Konvensi-konvensinya masih diadakan di Inggris, tanpa layanan terjemahan, sebuah praktek yang membatasi partisipasi dari peserta-peserta yang berasal dari negara yang tidak berbahasa Inggris, dan utamanya hanya diikuti oleh mereka yang berpendidikan dari kalangan perempuan kelas menengah dan kelas atas, sebagian besar dari mereka bukanlah dari produsen di pedesaan (petani), tetapi para pekerja NGO (Storey 2002).

International Federation of Agricultural Producers

International Federation of Agricultural Producers (IFAP) didirikan pada sekitar pasca Perang Dunia II. Situasi pada waktu itu dunia sedang diliputi optimisme tentang kerjasama global dan kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan pangan dan kambuhnya depresi pertanian seperti yang terjadi pada tahun 1930-an[14]. Pada tahun 1946 Serikat Petani Nasional Inggris menghimpun pertemuan di London diikuti 'wakil-wakil dari 30 negara, dengan tujuan mendukung badan PBB yang baru dibentuk yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan mengatasi perbedaan di antara kelompok-kelompok kepentingan yang berbasis-komoditas—misalnya petani gandum dan petani ternak—di dalam sektor pertanian (*London Times* 1946a, 1946b).

[14] Arah dari situasi makanan yang kritis yang diberikan oleh artikel Times yang serupa di jabarkan dalan pertemuan pendiri IFAP yang mencatat kedatangannya sebentar lagi di London dan berbagai kota lain "215,181 boks apel dari Australia" dan "pengiriman pertama tomat dari pulau Channel" yang mana yang akan dikirim ke utara Inggris atau Skotlandia (London Times 1947b).

Kelompok-kelompok Eropa Utara yang mendominasi IFAP mempunyai sejarah panjang dalam kongres internasional dimana mereka banyak melibatkan kelompok koperasi dan organisasi-organisasi petani Kristen yang dibentuk pada awal abad kedua puluh (ICA dan IFAP 1967; IFAP 1957, 5). Meskipun mereka bersikap ambivalen terhadap liberalisme pasar, tetapi mereka sering mendukung partai politik sayap kanan-tengah. Mereka bekerja dengan kelompok IIA-yang berbasis di Roma (lihat penjelasan tentang IIA di atas), yang terlibat dalam penelitian agronomi, mengkampanyekan sistem pelaporan statistik yang seragam dan bekerja sama dengan Liga Bangsa-Bangsa pada masa-masa perang. FAO, didirikan pada tahun 1945, yang secara eksplisit diharapkan dapat menjadi model meniru pada pengalaman sebelumnya dan IFAP dimaksudkan sebagai mitra dan sekutu FAO di sektor swasta.

Kondisi krisis pangan pasca perang menyebabkan IFAP menekankan pada peningkatan produksi. Beberapa delegasi, seperti Kanada, menyerukan adanya mekanisme pemasaran internasional yang 'akan mendistribusikan kelimpahan secara efisien dan sedemikian rupa bahwa surplus tidak akan menciptakan bencana kepada produsen' (*London Times* 1946b). Pemimpin IFAP juga sering menjadi delegasi pemerintah di konferensi FAO, kadang-kadang mereka menggunakan pengaruhnya terhadap kebijakan substansial di FAO (IFAP 1952). Baru-baru ini IFAP dan ACWW bergabung dalam mempublikasikan Hari Perempuan Petani se-dunia yang selalu dirayakan setiap tahun sejak diadakannya Konferensi Perempuan Beijing pada tanggal 15 Oktober 1995.

Sepinya Literatur Mengenai Gerakan Agraria Transnasional

Studi mengenai gerakan sosial dan perubahan agraria pada batas tertentu telah mengikuti arus dan dinamika neoliberalisme dan gerakan sosial: beberapa berfokus pada aksi-aksi masyarakat sipil lokal, sementara yang lain menekankan inisiatif "substitusi-negara" yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, sementara yang lain berkonsentrasi pada gerakan-gerakan sosial transnasional. Studi tersebut merentangkan batas-batas tradisional dalam pemahaman kita mengenai gerakan agraria kontemporer dan perubahan agraria. Namun, setidaknya ada tiga perbedaan besar tetapi saling terkait dalam kesenjangan literatur saat ini.

Pertama, ekspansi yang cepat dalam studi gerakan sosial dan masyarakat sipil, khususnya di tingkat internasional, telah memberikan cahaya baru pada organisasi-organisasi perantara, terutama NGOs, yang biasanya menjadi 'perantara' antara petani miskin di pedesaan dan berbagai lembaga pemerintahan, dan isu-isu sekitar hak asasi manusia, lingkungan dan negosiasi perdagangan. Namun, hanya sedikit dari studi ini yang memberikan pemahaman penuh pada dinamika internal dari gerakan agraria sendiri. Penelitian yang sistematis terhadap dinamika ini relatif sedikit, meskipun Gerakan Agraria Transnasional dengan sukses masuk ke panggung politik global selama satu setengah dekade terakhir. Sekilas mengenai berkembangnya literatur dalam gerakan-gerakan sosial transnasional menunjukkan bahwa fokus studinya banyak berkisar pada jaringan yang bersangkutan dengan isu Hak Asasi Manusia, perempuan dan hak-hak adat, buruh, lingkungan, migran dan isu mengenai lembaga keuangan internasional (lihat, misalnya, Keck dan Sikkink 1998; Cohen dan Rai 2000; Florini 2000; O'Brien et

al. 2000; Seoane dan Taddei 2001; Waterman 2001; Smith dan Johnston 2002; Pianta dan Silva 2003; Taylor 2004; Mei 2005; Tarrow 2005). Hal yang mengejutkan, mengingat dinamika dan profil gerakan agraria transnasional, para cendekiawan relatif kurang memperhatikannya dengan cermat, dengan sedikit pengecualian pada karya-karya Edelman (1998, 2003, 2005), Mazoyer dan Roudart (2002), Borras (2004), Holt-Giménez (2006) dan Desmarais (2007). Bagaimana gerakan di sekitar setiap isu (lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan, migran, agraria, dan seterusnya) bersekutu atau bersaing satu sama lain, dan bagaimana implikasinya, adalah pertanyaan lain yang pada umumnya yang kurang dieksplorasi. Bab ini berusaha untuk memunculkan upaya awal untuk mengisi kesenjangan ini dalam literatur gerakan sosial transnasional.

Kedua, terdapat kekurangan analisis mengenai dinamika kesalingterkaitan, atau ketiadaannya, antara gerakan agraria kontemporer di level internasional, nasional dan tingkat lokal. Satu contoh dari hal ini adalah cara dimana representasi dan akuntabilitas pada level-level yang berbeda tersebut cenderung diasumsikan secara meluas daripada diperiksa secara sistematis dan diteliti secara empirik. Padahal keterkaitan lokal-nasional-global yang ada saat ini membutuhkan perhatian yang lebih baik dan lebih mendalam. Salah satu isu serupa yang membutuhkan penelitian mendalam juga adalah pertanyaan tentang 'representasi parsial': ini adalah hal yang biasa terdengar, sebuah gerakan global yang mengaku sebagai 'wakil 'dari 'suara orang miskin di pedesaan' di negara tertentu. Bahkan ketika organisasi tertentu di negara tersebut masih jauh disebut sebagai representasi untuk mewakilkan beragam kaum miskin pedesaan dari negaranya. Demikian pula, sudah lazim didengar klaim

dari gerakan-gerakan tentang representasi 'global'; padahal hanya dibutuhkan satu cara untuk bertanya apakah gerakan-gerakan ini memiliki perwakilan dari Cina atau bekas Uni Soviet, atau wilayah Asia Tengah atau Timur tengah untuk menemukan bahwa cakupan 'global' mereka sangat terbatas. Buku ini berupaya untuk membahas isu ini secara lebih sistematis.

Jonathan Fox (2005) pernah mengangkat isu mengenai hal itu ketika dia membedakan antara 'keanggotaan transnasional dan translokal' yang dibuat dalam konteks studi kaum migran lintas-negara yang ditulis oleh Yashar Deborah's (2005) mengenai konsep tentang 'transkomunitas' dalam konteks masyarakat adat. Perbedaan ini secara analitis juga berguna untuk studi gerakan sosial transnasional, bukan hanya sekedar karena membutuhkan perhatian terhadap perbedaan antara hubungan asosiasi migran translokal atau masyarakat pribumi transkomunitas, tetapi juga mengingatkan kita untuk tidak mengambil posisi seperti yang diklaim oleh para pemimpin gerakan agraria (misalnya, 'jaringan transnasional '), di satu sisi, dan apa yang mungkin benar-benar ada dalam kenyataan (misalnya, 'translokal'), di sisi lain[15].

Selain itu, ada juga soal pandangan 'dinamis versus statis' mengenai representasi dan kesalingterkaitannya. Gerakan sosial yang sangat dinamis, mengalami masa

[15] Analisis Fox dan Yashar adalah indikasi dari komentar masalah semantik yang jarang. "transnasional" dan "transnasionalisme" yang digunakan dalam dua perbedaan, walaupun terkait dalam sosial ilmiah kontemporer. Salah satunya dipakai dalam bab ini dan hampir di kontrubusi lain di koleksi ini, menekankan hubungan politik dalam batas nasional. Penggunaan yang kedua ditujukan kebanyakan untuk migrasi dan fenomena yang berkaitan dengan Diaspora. Sebagai contoh dalam pendekatan terakit, lihat Mahler (1999) dan Glick Schiller (2004). Untuk analisi yang menjembatani penggunaan keduanya, lihat bab Fox dan Bada di koleksi ini.

bergelombang dan surut sepanjang waktu (lihat, misalnya, Edelman 1999 untuk sebuah kasus Amerika Tengah). Gerakan-gerakan tersebut dapat datang dan pergi, naik dan turun, atau ada saat-saat kuat tetapi kemudian melemah. Namun, klaim resmi gerakan transnasional tentang mereka sendiri, organisasi dan konstituen mereka masing-masing tingkatan perwakilan mereka cenderung statis. Upaya yang gagal dalam mempertahankan gerakan agraria transnasional dan gerakan sosial lain tetap kurang terteorisasikan secara signifikan dalam literatur, seperti yang dibahas oleh Edelman (pada tulisan ini)[16].

Ketiga, ada kecenderungan melemahnya hubungan analitis antara kebangkitan studi gerakan sosial dan masyarakat sipil di satu pihak dan studi tentang dinamika perubahan agraria di sisi lain. Dengan demikian, kita pada umumnya berhadapan dengan dua rangkaian studi yang paralel, yang kadang-kadang tidak berhubungan. Pada umumnya, studi mengenai gerakan sosial menjelaskan konteks politik dimana gerakan agraria muncul, tetapi kekurangan analisis mengenai struktur agraria di tempat munculnya gerakan itu. Sebaliknya, dalam banyak studi terbaru mengenai aturan perdagangan produk pertanian global, gerakan agraria transnasional benar-benar absen, meskipun gerakannya sering memberikan pengaruh yang signifikan pada negosiasi perdagangan global.

Ringkasnya, meskipun terdapat peningkatan perhatian secara akademis terhadap gerakan-gerakan sosial transnasional, dimensi agraria dari studi-studi itu tetap belum dipelajari secara signifikan. Sementara itu, bidang yang lebih luas pada studi agraria selalu terlambat untuk mengejar ketinggalan dengan perjalanan gerakan agraria transnasional yang fenomenal. Buku ini merupakan

[16] Meskipun demikian, lihat essay Anheir (1999)

kontribusi awal mengisi kesenjangan ini dan menyarankan beberapa agenda penelitian baru. Akan tetapi, tentu saja, hanya dapat menutupi dari sebagian kesenjangan yang dibahas di atas. Tetapi kami berharap bahwa hal itu akan menginspirasi atau memprovokasi studi lanjutan dari isu-isu yang belum dieksplorasi.

Isu-isu Utama

Tulisan-tulisan dalam buku ini terdiri dari beragam tema, beragam pendekatan analitis dan beragam disiplin keilmuan, sama halnya beragam juga dalam segi unit spesifiknya dan tingkat penelitian dan konteksnya, latar belakamg dan kondisi gerakan agraria yang diteliti. Namun, tulisan-tulisan tersebut memiliki perhatian yang serupa mengenai struktur agraria dan kelembagaannya serta mempertanyakan beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan-pertanyaan itu termasuk: (i) Apakah karakteristik dari struktur agraria di tempat gerakan-gerakan ini muncul (atau tidak muncul)? (ii) Apa basis sosial dari gerakan agraria yang sedang diteliti? Apakah kelas sosialnya, kelompok dan sektor yang diwakili oleh gerakan itu (atau klaim untuk mewakili atau tidak mewakili sama sekali)? (iii) Apakah isu-isu dan tuntutan yang diajukan oleh organisasi global, nasional dan lokal itu mengenai pembangunan dan kebijakan? Apakah sumber-sumber dari tuntutan dan kekuatan sosial dan politik yang mendukung mereka? (iv) Apakah isu-isu yang dapat menyatukan—dan memisahkan—gerakan agraria, dan mengapa? Dan (v) Pada tingkat apa peningkatan kampanye (dan wacana) dan tindakan kolektif dari waktu ke waktu dilakukan oleh gerakan ini, apakah ada perubahan (atau tidak) ke struktur agraria yang mereka upayakan untuk diubah sesuai dengan yang mereka inginkan?

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini memperoleh kedudukan yang signifikan dalam studi yang lebih teliti

tentang gerakan agraria transnasional yang bertujuan untuk mempertemukan antara gerakan-gerakan sosial dan studi literatur agraria: (i) representasi dan agenda, (ii) strategi politik dan bentuk-bentuk tindakan, (iii) memilah dan memahami dampak (iv) gerakan agraria transnasional sebagai arena aksi antar gerakan-gerakan (sub)nasional yang berbeda-beda, (v) asal-usul keragaman kelas, (vi) perbedaan ideologis dan politik dan (vii) dinamika pembangunan aliansi.

Klaim Representasi dan Agenda

Tulisan-tulisan dalam buku ini mempertimbangkan beragam kepentingan kelas sosial dan kelompok yang dinamai gerakan agraria transnasional dan jaringan warganegara global lainnya dalam membuat posisi kebijakan dan membuat tuntutan-tuntutan. Dampak neoliberalisme dalam hubungan pertukaran pra-produksi di pedesaan memiliki akibat yang bervariasi pada kelas sosial yang berbeda, daerah, dan sektor di antara negara-negara secara umum di Utara dan Selatan. Kaum miskin pedesaan yang biasanya mengalami dampak efek samping. JIka melihat ke atas dari bawah, kita melihat bahwa beberapa organisasi telah terbentuk dan bergabung dengan gerakan sosial, walaupun sebagian besar tetap di daerah. Beberapa organisasi lokal ini membentuk jaringan antara satu sama lain, sehingga menghasilkan pembentukan asosiasi nasional dan gerakan-gerakan sosial. Beberapa kelompok nasional ini mampu berhubungan dengan gerakan dari negara lain, atau mampu menempa untuk mengintegrasikan gerakan mereka dalam jaringan di tingkat 'vertikal' (Edwards dan Gaventa 2001; Fox 2001), dan telah membuat jejaring gerakan transnasional. Melihat ke bawah dari atas, jelaslah bahwa sementara beberapa gerakan global telah membuat langkah yang mengesankan,

ada banyak kelompok dan petani miskin telah ditinggalkan atau dieksklusi, karena berbagai alasan untuk tetap dalam batas-batas daerah dan nasional—tidak diikutsertakan dalam gerakan global agraria. Dalam terang kenyataan ini, jelas bahwa persoalan representasi dalam gerakan agraria transnasional perlu dibahas lebih hati-hati.

Representasi yang efektif dari basis kepentingan sosial dalam gerakan mereka tidak boleh diasumsikan otomatis dan bersifat permanen serta tanpa masalah. 'Representasi yang efektif' dinegosiasikan (kembali) secara dinamis di dalam dan di antara bagian dalam gerakan itu dari tingkat para pimpinan dan anggota gerakan dari waktu ke waktu. Penting untuk memeriksa secara kritis mengenai masalah representasi dalam memelajari gerakan agraria transnasional, setidaknya karena dua alasan yang saling terkait: (i) yaitu dari klaim gerakan dan jaringan untuk merepresentasikan sebuah kelompok atau sekelompok masyarakat yang mereka dukung inisiatif-inisiatif pembingkaian-isunya dan pembuatan-tuntutannya; (ii) Gerakan-gerakan yang berargumen untuk kepentingan, urgensi, kebutuhan atau keadilan untuk mereka dan membuat tuntutan berdasarkan klaim mereka untuk merepresentasikan kelompok masyarakat tertentu. Memang, inilah alasan publik dari keberadaan mereka. Dalam kasus gerakan agraria transnasional, biasanya 'masyarakat yang tertindas', 'masyarakat yang menduduki tanah' atau 'petani kecil' yang menjadi subyek dari klaim representasi ini.

Meskipun masalah representasi ini penting, tetapi tidak banyak upaya kritis untuk menelitinya. Hal ini sering terjadi, karena masalah representasi lebih banyak menjadi asumsi daripada sebagai sesuatu yang dapat diamati secara empirik. Demikian pula, tingkat representasi ini biasanya digabungkan dengan tingkat visibilitas dan 'kenyaringan' dari gerakan agraria transnasional, yaitu, semakin dia

terlihat dan semakin keras, maka mereka akan diakui sebagai representator. Sebagai contoh, sebuah jaringan global yang jauh lebih kecil, NGO misalnya, mungkin dapat hadir dalam banyak konferensi internasional dan forum-forum konsultasi resmi, sementara gerakan agraria Transnasional yang berbasis masyarakat yang jauh lebih besar, mungkin tidak dapat hadir dalam acara-acara global seperti konferensi dan acara kelembagaan internasional lainnya. Pengamat yang tidak kritis, terutama di kalangan badan-badan pembangunan internasional, mungkin menganggap yang pertama sebagai jaringan representasi (bahkan ketika hal ini tidak terjadi dalam kenyataan). Memahami representasi dalam konteks gerakan agraria transnasional memerlukan analisis yang melampaui apa yang dapat diamati dengan mudah, yaitu 'visibilitas dan kenyaringan', dan masuk ke dalam isu yang biasanya tidak termasuk dalam wacana gerakan-gerakan. Hal ini dapat dicapai dalam berbagai cara.

Pertama, dalam banyak kasus, tentang representasi, gerakan agraria transnasional sebenarnya berbicara tentang 'representasi parsial'. Representasi parsial dapat dilihat sekurang-kurangnya melalui dua perspektif: global dan nasional. Dari pengamatan yang cepat di seluruh dunia mengungkapkan bahwa sebagian besar dari keberhasilan gerakan agraria transnasional hari ini, ternyata tidak punya kehadiran keanggotaan yang signifikan dalam jumlah yang besar di beberapa wilayah di negara-negara dunia, terutama Rusia, Asia Tengah, Timur Tengah dan daerah Utara Afrika (MENA), serta terutama Cina. Padahal, daerah ini paling banyak ditinggali oleh mayoritas rakyat miskin pedesaan. Dalam buku ini, Kathy Le Mons Walker yang meneliti pedesaan kontemporer Cina, dan Kevin Malseed untuk kasus khusus orang Karen di Burma berupaya untuk menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat miskin di daerah

dapat berbeda, tetapi juga terkadang mirip dengan tuntutan masyarakat miskin pedesaan di tempat lain. Meskipun ada 'aspirasi dan wacana global gerakan agraria transnasional, kasus yang diteliti oleh Le Mons Walker dan Malseed benar-benar di luar 'radar' gerakan agraria transnasional, meskipun dengan derajat kepentingan, intensitas dan skala perjuangan yang serupa.

Secara nasional, representasi parsial dapat dilihat dengan kenyataan bahwa, tidak peduli apapun yang diklaim, tidak ada satu organisasi, gerakan atau kelompok gerakan yang dapat sepenuhnya mewakili kepentingan berbagai kelompok yang beragam di seluruh negeri. Kita dapat melihat hal ini dengan melihat dua latar belakang yang ekstrim: satu, di mana anggota nasional dari sebuah gerakan agraria transnasional sangat lemah dan yang lain di mana anggota nasionalnya sangat kuat. Afrika Selatan dan Brasil adalah contoh dari anggota organisasi Via Campesina yang akan dilihat. Sebagaimana Brenda Baletti, Tamara Johnson dan Wendy Wolford menjelaskan dalam bab ini, The Landless People Movement (LPM) di Afrika Selatan, adalah bentuk dari 'mobilisasi yang terlambat', dimulai dengan sangat lemah secara politik dan organisasi, dan setelah beberapa tahun, surut. Kelompok ini adalah satu-satunya organisasi yang mewakili kaum miskin pedesaan Afrika Selatan di Via Campesina meskipun sangat terbatas, saat ini jumlah perwakilan mereka tidak signifikan. Sementara itu, Movement Of The Landless Rural Workers of Brazil (MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) dapat dikatakan menjadi gerakan nasional yang paling koheren yang terbesar dan paling politis dalam Via Campesina. Ini jelas mewakili sejumlah besar orang-orang di Brasil yang miskin. Namun, bahkan dalam konteks Brasil, kapasitas perwakilan MST, paling banter masih sangat parsial. Pengakuan jujur baru-baru ini oleh pemimpin MST, João Pedro Stédile, tentang

kurangnya kemampuan untuk mengatur petani tak bertanah yang miskin di Brazil menjadi pelajaran (Stédile 2007, 195). Selain itu, bahkan kritik simpatik terhadap MST memperingatkan keterbatasan perwakilan di antara penduduk Afro-Brasil dan di kalangan perempuan pedesaan, yang beberapa di antaranya telah meninggalkan MST untuk membentuk organisasi sendiri (Stephen 1997, 217-33; Rubin 2002, 45-6). Perdebatan semua gerakan nasional lainnya di Via Campesina, nampaknya jatuh di suatu tempat di antara dua kutub ekstrim dalam hal representasi ini, yaitu derajat yang berbeda-beda dalam hal representasi parsial.

Sebagaimana akan dibahas pada studi dalam bab ini, representasi parsial mempunyai implikasi yang besar bagi watak dan orientasi pembingkaian-isu, proses pembuatan tuntutan dan hasilnya dalam gerakan agraria transnasional. Tapi salah satu implikasi dari realitas representasi parsial adalah bahwa mungkin lebih baik dilihat bukan dari perspektif 'either/or' [salah satu dari dua hal], misalnya representasi atau bukan. Namun, yang mesti dilihat adalah persoalan tingkatan representasi yang memang tidak bisa dipisahkan dari bahasan ini.

Kedua, memandang representasi sebagai suatu tingkat masalah yang tidak statis. Perwakilan adalah sesuatu yang terus dinegosiasikan ulang di dalam organisasi atau gerakan. Ini berarti tingkat representasi gerakan tertentu mungkin meningkat atau menurun dari waktu ke waktu, dan dalam beberapa kasus mungkin benar-benar hilang. Analisis historis Marc Edelman tentang aliansi petani Amerika Tengah, ASOCODE, dapat menggambarkan karakter representasi yang dinamis dan saling bersaing (Edelman, buku ini; Edelman1998).[17] ASOCODE

[17] ASOCODE adalah singkatan dari Asociaciom Centroamericana de

adalah salah satu versi yang agak awal dari bentuk gerakan-gerakan agraria transnasional yang progresif serta berbasis petani kecil dan petani tak bertanah. ASOCODE naik dengan cepat dan fenomenal pada ketenaran di awal 1990-an menjadi sebuah inspirasi bagi banyak gerakan lain di luar Amerika Tengah. Gerakan itu cukup aktif dan memiliki representasi yang kuat. Karena berbagai alasan internal dan eksternal, ASOCODE kemudian hancur. Pada pergantian abad, ASOCODE dianggap tidak lagi memiliki klaim dan tidak lagi dapat memiliki tingkat representasi yang tinggi di wilayah itu. Ini mirip dengan kisah yang diceritakan oleh Saturnino M. Borras Jr (buku ini; Borras 2004) dalam kasus Democratic Peasant Movement of The Philippines (DKMP, Demokratikong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas), organisasi lain dari Via Campesina yang memiliki basis sosial yang signifikan pada tahun 1990-an, namun memudar dengan cepat sebelum akhir dasawarsa itu. Solidarnosc sebuah pedesaan di Polandia, yang merupakan pendiri anggota Via Campesina dan duduk di Komite Koordinasi Internasional selama tahun-tahun terakhir ini, lagi-lagi mengalami kasus serupa. Solidarnosc kehilangan basis yang cukup besar dan menjadi tidak mampu untuk benar-benar menunjukkan tingkat representasi yang signifikan (di kalangan petani kecil di Polandia), mereka diminta untuk meninggalkan Via Campesina beberapa tahun setelah Kongres kedua Via Campisena. Gerakan agraria berjalan melalui dinamika alam yang surut dan mengalir seiring waktu. Kapasitas mereka untuk mewakili kelompok-kelompok tertentu bahwa mereka mengklaim untuk mewakili secara langsung dipengaruhi oleh siklus seperti itu dan dinamika-dinamika

---

Organizaciones Campesinas para la Cooperacion y el Desarrolo (Centra American Association of Peasant Organizations for Cooperation and Development).

yang kompleks, yang pada gilirannya telah berpengaruh pada sifat dan orientasi gerakan, dan pembingkaian isunya dan proses-proses pembuatan tuntutannya.

Ketiga, salah satu masalahnya adalah kegagalan untuk merepresentasikan secara signifikan kelompok masyarakat pedesaan, sebagian karena pembatasan terhadap definisi 'petani kecil [peasant]' atau 'petani [farmer]'[18]. Cara pandang konvensional gerakan agraria pada umumnya cenderung 'berpusat-pada pertanian [agriculture-centered]', dengan 'masyarakat yang menduduki tanah [people of the land]' sebagai karakter yang menentukan aktor. Tapi sektor pedesaan telah lama menjadi beragam dan jamak, seperti juga mata pencaharian orang miskin di pedesaan ini (lihat, sebagai contoh, Bryceson et al. 2000; Ellis 2000; Rigg 2006). Untuk membatasi upaya pengorganisasian serta pembingkaian-isu dan pembuatan-tuntutan dalam tema gerakan yang semata berorientasi pada pertanian maka secara efektif hal itu akan mengecualikan porsi yang signifikan dalam masalah kelompok miskin pedesaan. Kasus buruh migran lintas-negara sangat penting, karena mereka merupakan bagian yang besar dari penduduk pedesaan di dunia (di daerah asal mereka, tetapi banyak juga di negara-negara tujuan migrasi). Jonathan Fox dan Xochitl Bada (buku ini) menelaah bagaimana pekerja-

[18] Faktor struktural tentu saja juga signifikan dalam penjelasan mengapa ini terkadang sulit diatur dan mewakilkan desa sebagai perbandingan dengan masyarakat kota. Penyebaran geografikal, keterpencilan, komunikasi dan infrastrukur yang buruk, dan perbedaan besar dari masyarakat desa dan berbagai hubungan sosial di pedesaan yang menurut sejarah sulit untuk mengelola pedesaan, paling tidak sebagai perbandingan dengan upaya untuk mengatur kelas pekerjaan industri kota. Industrilisasi dan munculnya sektor informal yang terkadang mendampingi neoliberalisme selama dua dekade terakhir memberikan kesulitan terbesar di banyak bagian di dunia dalam mengatur penduduk kota miskin dan kelas pekerjaan.

pekerja migran lintas negara dari Meksiko ke USA memiliki dampak yang mendalam di daerah tempat pengiriman migrasi. Migrasi keluar mempengaruhi pasar tenaga kerja lokal dalam berbagai cara dan mempengaruhi masyarakat yang mengirim migrasi yang semakin lebih jauh lagi diubah oleh besarnya remitansi dari para pekerja migran. Ada pemisahan yang persisten dan menganggu, secara politis dan akademis, antara cepatnya migrasi tenaga kerja transnasional dengan kegagalan beberapa gerakan agraria transnasional utama untuk menempatkan isu mengenai buruh migran lintas-negara sebagai analisis dan strategi utama mereka[19]. Organisasi buruh migran dan studi mengenai migrasi lintas-negara jarang mengupayakan suatu kajian akademik atau politik dalam dinamika perubahan agraria (sebagaimana yang diamati oleh Fox dan Bada tentang isu persisten mengenai 'diskoneksi migrasi dan pembangunan'). Migrasi lintas-negara dari Mexico-AS yang telah mempunyai hubungan langsung dalam lingkungan sektor pedesaan Meksiko bukanlah satu-satunya migrasi yang secara signifikan mengalir keluar dari sebuah pedesaan yang terancam. Ada juga yang lain seperti

[19] Dalam banyak kasus, apapun yang mingkin kita katakan gerakan agraria tranasnasional "minor" dengan fokus dua negara telah mendukung secara efektif atas nama pekerja migran. Di antara contoh penting yang bekerja, baik di Amerika Serikat dan Meksiko, Rural Coalition (Rural Coalition 1994) dan Farm Labor Organizing Commitee (FLOC), yang mana berafiliasi dengan US AFL_CIO (American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations). FLOC yang dijalankan di Meksiko untuk membersihkan korupsi dalam sistem perekrutan untuk pekerja pertanian yang pindah ke Amerika Serikat yang menjadi target kekerasan dan pada tahun 2007 kehilangan pemimpin utamanya, Santiago Rafael Cruz karena di bunuh (Velasquez 2007). Beberapa dari ini dan kekurangan gerakan agraria transnasional yang memiliki hubungan formal dan informal dengan kelebihan gerakan agrarian transnasional seperti Via Campesina.

migrasi yang terjadi di negara-negara yang berdekatan: Nikaragua-KostaRika, Zimbabwe-Afrika Selatan, Maroko-Spanyol, Polandia-Britania dan Filipina-Malaysia.

Keempat, dan terakhir, sebagaimana yang ditunjukkan oleh diskusi di atas, masalah representasi merupakan suatu hal yang rumit dan sering bersitegang. Beragam realitas dan beberapa saluran representasi dan akuntabilitas seringkali terlalu rumit bagi pemimpin gerakan dan aktivis untuk memahami dan menanganinya. Sebagai contoh, konsep 'kelas' ini sering dikatakan dalam istilah yang terlalu abstrak dan samar-samar, dan terlalu memecah-belah. Tidak terstruktur, tidak-terorganisir dan bentuk-bentuk yang samar dan tidak kelihatan bagi aktivis dan pemimpin gerakan untuk mengakuinya atau memahaminya. Dengan demikian, dalam banyak hal, para pemimpin gerakan bertindak seperti di sebuah negara, karena mereka terlibat dalam suatu 'proses penyederhanaan' untuk membuat realitas kompleks itu agar terbaca dan dikelola bagi kepentingan mereka, sebagaimana dalam lensa analitik yang kuat ditawarkan oleh James Scott dalam bukunya *Seeing Like a State* (1998). Dengan berbuat demikian, banyak rincian detail yang penting cenderung akan hilang atau tidak terjawab dalam analisis dan wacana yang dihasilkan dari pembahasan tentang gerakan agraria transnasional (lihat Malseed dalam buku ini).

Masalah representasi secara inheren sangat erat hubungannya dengan isu gerakan agraria terutama yang ada kaitannya dengan proses penetapan agenda dan hasilnya. Jaringan global petani kelas menengah hingga petani kaya yang berdiri untuk memperoleh manfaat dari komoditi tertentu dalam perdagangan bebas tidak akan menentang inisiatif untuk menghalangi perdagangan bebas antar negara. Sebuah jaringan transnasional yang tidak memiliki basis massa di Cina atau negara-negara bekas Uni

Soviet cenderung akan mengangkat gagasan tentang alternatif sosialis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya dengan tidak mempersoalkannya lebih jauh lagi. Adalah hal yang sulit, jika bukannya mustahil, untuk memahami representasi dan penyusunan agenda gerakan sebagai isu yang terpisah. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk tidak secara otomatis dan tidak kritis menerima itu sebagai klaim yang tidak bermasalah oleh gerakan transnasional terutama yang berkaitan dengan agenda, basis dukungan dan keberhasilan politiknya. Salah satu cara untuk mendapatkan pandangan yang lebih bernuansa mengenai hal ini adalah dengan mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian antara klaim tentang agenda dan hal-hal lain antara kelompok-kelompok anggota di tingkat nasional, di satu sisi, dan gerakan agraria transnasional, di sisi lain. Respon dari gerakan petani (trans)nasional dan biasanya, petani kecil lokal dan petani di sekitar isu rekayasa genetik dalam hasil panen bisa menggambarkan diskoneksi itu. Sebagaimana Peter Newell (buku ini) tunjukkan dalam kasus Amerika Latin, dan Ian Scoones (buku ini) dalam kasus India, Afrika Selatan dan Brasil, hasil pertanian rekayasa genetik telah menjadi fokus utama dalam pertentangan, dan membuat organisasi petani kecil dan banyak aktivis lingkungan beradu dengan kelompok agrobisnis dan kelompok petani besar. Kontroversi tentang Rekayasa Genetik pada kenyataannya melibatkan berbagai perdebatan yang saling terkait: keamananan pangan, kontaminasi lahan pertanian, ancaman terhadap keanekaragaman genetik, kesehatan manusia dan spesies lain, anggaran yang harus dikeluarkan petani, kekayaan intelektual, hak petani untuk memproduksi dan menyimpan benih, kerentanan ekonomi dan ekologi yang ditunjukkan oleh genetik monokultur, dan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir perusahaan-perusahaan raksasa.

Namun sebagaimana Newell dan Scoones sarankan, titik pancang dalam diskusi ini dan mengenai praktek petani kecil di lapangan bukanlah sesuatu selalu dapat jelas dan terang sebagaimana di dalam klaim di kelompok yang saling bertentangan atau sebagaimana yang diharapkan oleh gerakan petani (lihat juga Müller 2006; Herring 2007).

Strategi Politik dan Bentuk-bentuk Aksi

Gerakan Agraria Transnasional umumnya sepakat pada beberapa jenis strategi politik dan bentuk-bentuk aksi yang umum. Adalah hal yang luar biasa bagaimana sangat beragamnya kelompok-kelompok petani (sub)nasional sdan (sub)regional seperti National Farmers 'Union (NFU) dari Kanada, MST di Brasil, European Peasants Coordination (CPE), KRRS dari Karnataka, UNAC di India atau Mozambik dapat menyepakati strategi politik dan bentuk-bentuk aksi secara bersama (lihat Edelman 2003; Desmarais 2007)[20]. Tetapi yang paling penting—-secara politik dan akademis—-untuk memahami strategis aliansi tersebut, adalah sama pentingnya dengan mengakui perbedaan potensi dan aktual di dalam dan di antara gerakan agraria transnasnional itu sendiri. Terutama, memahami keragaman dan perbedaan akan membawa kita untuk menghargai pencapaian lebih baik dalam usaha pembangunan persatuan Gerakan Agraria Transnasional, juga akan membantu kita memahami isu-isu terkait lainnya, seperti representasi dan proses 'inklusi-eksklusi' dalam Gerakan Agraria Transnasional. Singkatnya, ini akan membantu kita memahami Gerakan Agraria Transnasional

[20] KRRS adalah singkatan dari Karnataka Rajya Ryota Sangha (Karnataka State Farmers' Association). The European Peasant Coordination biasanya disingkat CPE Coodination Paysanne Europeenne dalam bahasa perancis. UNAC singkatan dari Uniao Nacional di Camponeses (National Union of Peasants)

lebih baik dalam segala kompleksitasnya. Kami secara singkat membahas masalah ini dalam tiga dimensi.

Pertama, persamaan dan perbedaan di antara Gerakan Agraria Transnasional dan kelompok-kelompok lain yang tidak mempunyai bentuk-aksi-aksi yang efektif dan strategi yang jelas dan terang. Kebanyakan gerakan agraria transnasional mencari organisasi 'partner' di masyarakat agraria lain. Ketika mereka tidak menemukan asosiasi masyarakat miskin pedesaan yang sesuai dengan "gambaran dan kesukaan" mereka, mereka cenderung untuk menyimpulkan bahwa "tidak ada yang terjadi" atau "tidak ada gerakan sosial" dalam masyarakat tersebut. Proses pencarian organisasi partner yang dilakukan oleh Gerakan Agraria Transnasional dalam prakteknya biasanya mempertimbangkan sekutu ideologis yang potensial serta strategi politik, metode dan bentuk tindakan kolektif. Ini adalah alasan dan ciri khas organisasi Gerakan Agraria Transnasional di daerah dan negara-negara seperti bekas Uni Soviet, Timur Tengah, Afrika Utara (MENA), Cina, dan Asia Tenggara, dan dalam beberapa tingkat yang signifikan dapat dilihat di negara Sub-Sahara Afrika, yang sepertinya tidak memiliki 'strategi politik yang jelas' atau "lemah secara politik dan organisasi". Di wilayah-wilayah itu biasanya terdapat argumen dan pendapat bahwa "tidak ada gerakansosial" atau "tidak ada mobilisasi dan aksi protes".

Tetapi karya-karya penting di sekitar tema 'bentuk perlawanan petani sehari-hari' (misalnya, Scott 1985, 1990; Scott dan Kerkvliet 1986; Kerkvliet 2005) dan studi selanjutnya terinspirasi atau dipicu oleh pendekatan ini (misalnya, O'Brien 1996; O'Brien dan Li 2006) mengingatkan kita bahwa asumsi semacam itu mengandung masalah. Dalam beberapa kondisi, petani terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak 'teror-

ganisir', 'terstruktur' dan 'terselubung' untuk membela atau menyuarakan kepentingan mereka. Le Mons Walker menjelaskan dalam kasus Cina kontemporer, resistensi petani Cina kontemporer sehari-hari lebih memilih strategi terang-terangan, tapi tetap 'tidak terstruktur' dan 'tidak terorganisir' (dalam arti konvensional dalam istilah ini). Malseed menggambarkan bagaimana, dalam kasus orang Karendi Burma, bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari memiliki banyak kesamaan dengan gerakan agraria yang konvensional, terorganisir, dan terstruktur. Le Mons Walker dan Malseed masing-masing berpendapat (dalam buku ini) yang bertentangan dengan asumsi-asumsi yang dominan, mungkin ada potensi besar untuk membangun jaringan transnasional antara berbagai inisiatif petani ini, tetapi itu akan membutuhkan revisi banyak terhadap pendirian dan asumsi konvensional Gerakan Agraria Transnasional. Pada tingkat yang signifikan, masalah konvensional Gerakan Agraria Transnasional untuk tidak memasukkan kelompok-kelompok tertentu adalah karena strategi politik mereka dan bentuk-bentuk tindakan mereka tidak seperti dalam "gambaran dan kesukaan" seperti yang dibayangkan Gerakan Agraria Transnasional, hal ini berlaku dalam kasus asosiasi migran lintas negara, seperti dijelaskan oleh Fox dan Bada (buku ini) dalam konteks kelompok migran Meksiko. Namun, gap kritis ini harus cepat dan serius ditangani oleh Gerakan Agraria Transnasional, bagaimana pembingkaian-isunya, penyusunan-tuntutannya dan daya keseluruhan pada tingkat global akan menjadi, lebih baik, dan melampaui potensinya. Para peneliti kritis Gerakan Agraria Transnasional memerlukan lensa yang benar-benar global dalam melihat gerakan-gerakan atau jaringan yang pembingkaian isu dan tuntut-annya dibuat mengatasnamakan kaum miskin pedesaan di dunia tetapi yang tidak memiliki perwakilan pada zona-zona geografis kunci tersebut.

Kedua, persamaan dan perbedaan antara Gerakan Agraria Transnasional. Terdapat perbedaan yang signifikan antara berbagai Gerakan Agraria Transnasional pada strategi politik dan bentuk-bentuk aksi mereka. Beberapa mendukung suatu kombinasi antara konfrontasi dan kolaborasi kritis dengan lembaga pemerintah, sementara yang lain mendukung strategi kolaborasi tidak kritis dan aliansi formal. Secara lebih umum, strategi jenis pertama telah membimbing kerja politik Via Campesina, sementara yang terakhir telah menjadi ciri IFAP. Via Campesina telah menyatakan bahwa hal itu tidak, dan tidak akan, melegitimasi lembaga-lembaga internasional kunci yang menjadi promotor globalisasi-neoliberal, seperti International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO) dan Bank Dunia. Mereka telah menolak untuk berpartisipasi dalam proses kelembagaan dan selalu upaya untuk mendiskreditkan lembaga ini di setiap kesempatan (Via Campesina 2000)[21]. Namun, Via Campesina tetap memutuskan untuk berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang simpatik dan reformis dalam Organisasi Pangan dan Pertanian dari bagian tertentu di Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti (FAO) dan Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD). Hal ini berbeda dengan hubungan harmonis IFAP yang sudah berlangsung lama dengan semua lembaga ini. Koalisi transnasional yang meliputi anggota kelompok (inter)nasional yang lebih radikal dan yang lebih konservatif cenderung bergerak bolak-balik antara kedua kutub, seperti kasus di IPC untuk Kedaulatan Pangan.

[21] Namun lihat Edelman (2003,207) dalam usaha berani Via Campesina untuk menghubungkan dialog dengan World Bank mengenai reforma agraria.

Gerakan Agraria Transnasional kadang diidentifikasikan sebagai gerakan yang radikal, mereka memakai aksi langsung sebagai cara yang paling sesuai dan efektif untuk menyuarakan masalah-masalah mereka ke agenda resmi dan mempengaruhi reformasi aktual yang mereka inginkan. Tindakan ini berupa okupasi tanah, serangan fisik pada eksperimentasi infrastruktur Rekayasa Genetik (GM) dan tempat-tempat pengujian situs, membuldoser atau membakar ikon simbolis perusahaan transnasional yang serakah, menduduki kantor-kantor pemerintah dan kantor perusahaan, dan pawai jalanan yang bertujuan mengganggu konferensi multilateral yang penting (lihat diskusi oleh Scoones, Newell, Edelman, Borras, dan Baletti, Johnson dan Wolford dalam koleksi ini). Gerakan Agraria Transnasional lainnya, terutama yang berkaitan dengan petani menengah dan kaya seperti IFAP, serta yang didominasi oleh NGO-NGO besar seperti ILC, tidak terlibat dalam bentuk tindakan dramatis dan konfrontatif seperti ini. Mereka lebih memilih untuk mengirim anggota eksekutif mereka untuk pertemuan resmi dengan lembaga-lembaga internasional penting.

Menelaah strategi dan bentuk-bentuk tindakan yang lebih efektif dari gerakan ini adalah bergantung pada tujuan dan sasaran kampanye mereka. Jika tujuannya adalah untuk mendeletimigasi lembaga-lembaga tertentu, kemudian mempermalukan mereka di depan publik melalui tindakan konfrontatif mungkin memang menjadi tindakan yang tepat. Dalam kampanye yang tujuannya untuk mengamankan konsesi, seperti misalnya, memperluas 'ruang partisipasi yang disediakan' (lihat Gaventa 2002) untuk partisipasi masyarakat sipil, maka interaksi kolaboratif yang lebih kritis kemungkinan besar akan lebih efektif. Secara keseluruhan dan dalam jangka panjang, bagaimanapun, hal itu mungkin tidak menguntungkan

gerakan agraria transnasional karena tindakan itu tersembunyi, tidak memiliki tindakan *repertoar* yang spesifik dan tidak mempunyai bentuk strategi, seperti 'hanya tindakan konfrontatif' atau 'hanya interaksi konformis melalui saluran resmi'. Kapasitas Via Campesina untuk menggabungkan beberapa taktik dan strategi di atas, serta berbagai bentuk tindakan berbeda, hampir pasti memberikan kontribusi yang efektif.

Ketiga, persamaan dan perbedaan dalam Gerakan Agraria Transnasional. Dalam Gerakan Agraria Transnasional yang besar, perbedaan strategi politik dan bentuk-bentuk aksi—-kadang-kadang bersaing dan saling bertentangan —-dapat terjadi secara simultan. Ambil misalnya strategi MST di Brazil, yang umumnya melakukan tindakan langsung yang konfrotantif, serta "independen" terhadap negara (Baletti, Johnson dan Wolford, serta Newell, buku ini) dan ini kontras dengan kelompok yang ada di Senegal yaitu CNCR (Conseil National de Concertation et de Kerjasama des Ruraux), yang bekerja jauh lebih erat dengan pemerintah dan memilih untuk melakukan bentuk tindakan yang kurang konfrontatif (McKeon et al. 2004). Adalah memungkinkan untuk memberikan daftar panjang kasus serupa yang menunjukkan kontradiksi antara strategi politik Gerakan Agraria Transnasional yang seharusnya dan bentuk-bentuk tindakan dengan anggota (sub)nasional dan (sub)regional mereka. Keragaman semacam ini dan kontradiksi yang dihasilkannya adalah sesuatu yang paling jelas dan paling meluas, sebagaimana yang terjadi pada IPC yang bergerak di isu Kedaulatan Pangan[22].

Apakah seharusnya aktivis dalam Gerakan Agraria Transnasional dan dalam organisasi anggota nasional

[22] Lihat Jordan dan van Tuijil (2000) untuk diskusi relevan pada isu ini.

mencapai standar konsensus untuk membuat sebuah strategi politik dan aksi yang efektif? Dalam kasus-kasus di mana hal ini terjadi, biasanya menggambarkan apa yang didefinisikan oleh aktor dominan di dalam dan di antara yang Gerakan Agraria Transnasional adalah sebagai standarnya, proses ini diilustrasikan tidak hanya persoalan tentang 'penyederhanaan atau upaya standarisasi gerakan agraria transnasional', tetapi juga harus dilihat bahwa Gerakan Agraria Transnasional juga memiliki situs-situs [pertarungan] kekuasaan. Keck dan Sikkink mengingatkan kita bahwa 'jaringan advokasi transnasional juga harus dipahami sebagai ruang-ruang politik, itu semua terletak pada aktor yang menegosiasikan—secara formal maupun informal— makna sosial, budaya, dan politik dari usaha bersama yang mereka lakukan '(1998,3). Menurut Keck dan Sikkink, 'Kekuasaan itu dijalankan di dalam jaringan, dan kekuasaan sering berasal dari sumberdaya... Aktor yang lebih kuat dalam aktivitas jaringan sering menenggelamkan aktor-aktor yang lebih lemah '(lihat juga Della Porta et al. 2006, 20). Biasanya aktor-aktor yang kuatlah dalam Gerakan Agraria Transnasional yang mendefinisikan standar untuk gerakan mereka dan, sejauh yang mereka dapat, termasuk untuk orang lain di luar gerakan mereka.

Memilah dan Memahami Dampak

Melakukan pemilahan terhadap dampak-dampak dari Gerakan Agraria Transnasional sangat penting untuk menilai apakah, bagaimana dan sejauh mana tindakan mereka membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Hal ini terutama karena, sebagaimana Tarrow jelaskan, 'para pendukung jaringan aktivis transnasional sering menyoroti contoh-contoh sukses dari intervensi sukses yang mengatasnamakan aktor yang terlalu lemah untuk mengajukan klaim mereka sendiri. Dalam dunia yang

terintemasionalisasi, kita cenderung melihat lebih banyak intervensi semacam itu, sehingga sangat penting untuk mengkajinya tanpa ilusi. Intervensi transnasional lebih sering gagal daripada berhasil" (2005, 200). Keck dan Sikkink (1998, 201) mengusulkan bahwa upaya jaringan transnasional untuk mewujudkan tujuan mereka terjadi melalui lima proses yang saling terkait, yaitu, (i) Pembingkaian debatan dan perumusan isu serta agenda, (ii) dengan mendorong komitmen diskursif negara dan komitmen pelaku kebijakan lain, (iii) dengan mendorong perubahan prosedur pada tingkat internasional dan domestik, (iv) dengan mempengaruhi kebijakan dan (v) dengan mempengaruhi perubahan perilaku pada target yang disasar.

Sebagian besar tulisan dalam buku ini bersepakat dan menunjukkan bahwa dampak Gerakan Agraria Transnasional yang terbesar dan paling jelas telah berada di pembingkaian debat serta perumusan isu dalam agenda. Argumen yang paling kuat mungkin disampaikan oleh Phil McMichael, yang menjelaskan bagaimana Gerakan Agraria Transnasional, terutama Via Campesina, membingkai kembali perdebatan tidak hanya pada isu-isu tertentu, tetapi meluaskan "arena perdebatan" di sekitar gagasan tentang "pembangunan" dan kekuatan petani dalam proses ini. McMichael, Scoones, Newell, dan Friedmann dan McNair (semuanya dalam buku ini) menunjukkan bagaimana jaringan transnasional telah berkontribusi untuk merumuskan ulang debat di sekitar isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi politik dalam persoalan pangan—dari permasalahan tentang sertifikasi makanan organik untuk memobilisasi gerakan anti-Rekayasa Genetik. Pengertian tentang 'kedaulatan pangan' sebagai alternatif—yang selama ini dikuasai oleh perusahaan makanan dan industri yang kompleks—telah dikembangkan oleh Via Campesina dan sejak itu kemudian menyebar

ke agenda Gerakan Agraria Transnasional lain, gerakan lingkungan, dan bahkan pemerintah dan antar institusi pemerintah.[23] Sementara itu, Fox dan Bada (buku ini) menunjukkan mengapa migrasi keluar dari pedesaan Meksiko ke Amerika Serikat tidak selalu merupakan pilihan 'keluar' atas 'bicara', sesuatu yang sering diasumsikan untuk melemahkan masyarakat sipil di wilayah asal migran tersebut. Mereka menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, 'keluar' dapat diikuti oleh 'bicara', dimana isu migran telah terbingkai wacananya di sekitar pembangunan lokal dan peran mereka di dalamnya. Borras (buku ini) menjelaskan bahwa Kampanye Global Reforma Agraria (Global Campaign for Agrarian Reform) yang dipimpin oleh Via Campesina mempunyai dampak paling signifikan dalam hal pembingkaian kembali perdebatan mengenai reforma agraria dan kebijakan pertanahan dalam reaksinya menanggapi dominasi model reforma agraria yang berorientasi pasar[24]. Peluso, Afiff dan Fauzi (buku ini) menjelaskan bahwa konvergensi lingkungan dan gerakan agraria di Indonesia, dengan hubungan ke jaringan global dapat menghasilkan dampak saling menguatkan dan itu memandu gerakan ini secara signifikan ke pembingkaian kembali isu lingkungan dan isu agraria[25].

---

[23] Via Campesina dan sekutu-sekutunya juga melihat 'kedaulatan pangan' sebagai alternatif dari terutama kuantitatif gagasan tentang 'ketahanan pangan' yang dikemukakan oleh beberapa antar pemerintah dan lembaga non pemerintah. Pemerintah daerah Tuscany (Italia) adalah salah satu dari beberapa sub-nasional di yuridiksi Eropa yang telah mempelopori kebijakan kedaulatan pangan di dalam batas-batas dan telah memberikan dukungan politik untuk kampanye kedaulatan pangan di Eropa. Untuk pembahasan latar belakang, lihat Patel (2006)dan Rosset et.al. (2006)

[24] Untuk latar belakang diskusi saat ini mengenai reforma agraria, lihat Borras (2007).

[25] Anna Tsing telah mempelajari kasus Indonesia serupa dan memberikan analisis yang kaya dan bernuansa dengan proses

Hal yang cukup penting, Edelman (buku ini) menunjukkan bahwa bagian dari memudarnya jaringan transnasional regional di Amerika Tengah adalah kegagalan gerakan untuk menyesuaikan agenda-agenda mereka dengan perubahan struktur agraria yang sangat cepat di wilayah ini, dan terjadinya eksodus besar-besaran migran dari daerah-daerah pinggiran. Dia menunjukkan, misalnya, bahwa gerakan agraria di wilayah ini terus meneriakkan isu reforma agraria. Tapi, ia berpendapat, hal itu dilakukan tanpa pandangan kritis dan pemahaman yang lebih sistematis tentang bagaimana negara itu dulu melakukan usaha reforma agraria tetapi mengalami kegagalan untuk meningkatkan mata pencaharian petani miskin, saat ini pembingkaian isu dan perumusan tuntutan di sekitar isu reforma agraria mungkin tidak akan sangat efektif dalam melawan elit dan upaya Bank Dunia untuk melaksanakan reforma agraria yang berorientasi pasar.

Dalam empat dimensi lain yang Keck dan Sikkink tunjukkan pentingnya untuk mengevaluasi dampak jaringan transnasional, Gerakan Agraria Transnasional, seperti yang dipaparkan dalam sebagian besar studi dalam buku ini, telah begitu jauh membuat sedikit kemajuan. Ini salah satu kemungkinan dari aspek yang paling berharga dari gerakan agraria transnasional yaitu pembingkaian kembali persyaratan yang relevan terhadap perdebatan tentang kebijakan dan politik internasional, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan konteks yang diinginkan oleh gerakan (sub)nasional untuk mencapai tujuan yang benar-benar jelas.

---

tranforming secara mutual dalam hubungan global yang dia sebut sebagai "perselisihan"

Gerakan Agraria Transnasional sebagai Arena Interaksi antara Gerakan (Sub)Nasional

Aktivis gerakan agraria cenderung untuk melihat Gerakan Agraria Transnasional sebagai 'aktor tunggal', sebagai jaringan atau gerakan dengan agensi kolektif. Pernyataan seperti itu pada gilirannya cenderung menjadi tidak kritis diterima oleh pengamat eksternal, termasuk Gerakan Agraria Transnasional yang lain, jaringan global masyarakat sipil, dan beberapa cendekiawan serta pakar kebijakan pembangunan. Para pelaku ini kemudian menyamakan keberagaman Gerakan Agraria Transnasional berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai pola-pola umum perilaku yang ditunjukkan oleh Gerakan Agraria Transnasional dari waktu ke waktu, (misalnya, beberapa anggota kelompok Gerakan Agraria Transnasional lebih radikal daripada yang lain dan lebih reformis daripada yang lain, dan sebagainya). Kenyataan bahwa gerakan agraria transnasional tertentu misalnya memiliki karakteristik khusus berbeda dari yang lain, dan bahwa ini adalah kelompok dengan lembaga kolektif, penting dilihat oleh aktivis gerakan agraria dalam proses pembangunan gerakan, yang bagi kalangan akademis ini kurang problematis. Namun, pengertian Gerakan Agraria Transnasional sebagai sesuatu yang tunggal, dengan kesatuan pelaku, tidak bisa dijelaskan, secara empiris dan analitis, dari yang lain, seiring fitur Gerakan Agraria Transnasional, ini juga merupakan arena interaksi antara gerakan (sub)nasional. Hal ini mengkonfirmasi apa yang Keck dan Sikkink sudah tunjukkan—yaitu, bahwa jaringan transnasional harus dilihat sebagai 'jaringan-sebagai-aktor' dan 'jaringan-sebagai-struktur' (1998,7)[26] Kedua lingkup dalam Gerakan

[26] Lihat diskusi terkait dalam Guidry et al. (2000,3) dan Batliwala dan Brown (2006).

Agraria Transnasional itulah yang membentuk (kembali) satu sama lain dalam proses dinamis yang mirip dengan pengertian dalam 'friksi' yang ditulis Anna Tsing's (2005), yaitu sesuatu yang mengakibatkan transformasi gerakan agraria transnasional terus menerus dan cara bagaimana interaksi antar anggota terstruktur.

Sesuatu yang inheren pada ruang-ruang politik di mana berbagai aktor datang untuk berinteraksi dengan lainnya merupakan masalah kekuasaan. Kelompok yang berbeda memasuki ruang ini dengan derajat kekuasaan politik yang tidak sama. Oleh karena itu, anggota gerakan memiliki berbagai pengaruh berdasarkan kadarnya dalam proses pembentukan karakter sebuah gerakan agraria transnasional, sebagai aktor tunggal, serta proses-proses yang menstrukturkan interaksi antara anggota gerakan. Baletti, Johnson dan Wolford (buku ini), misalnya, menggambarkan kekuasaan politik yang asimetris antara MST di Brazil dan LPM di Afrika Selatan, keduanya adalah anggota Via Campesina tetapi dengan tingkat pengaruh yang berbeda di dalamnya. Para penulis ini bahkan menganggap bahwa saran agar MST membantu LPM dalam membangun gerakan dan memobilisasi, yang sangat jelas jenis kolaborasi semacam ini sebagai keuntungan bagi Gerakan Agraria Transnasional, mungkin justrui akan merugikan dan tidak membantu LPM. Hal ini menggambarkan tentang adanya perkembangan yang tidak merata pada gerakan (sub)nasional dan ini adalah isu penting dalam pembelajaran Gerakan Agraria Transnasional. Baletti, Johnson dan Wolford menggunakan kategorisasi 'mobilisasi awal' untuk MST Brazil dan 'mobilisasi yang telat' untuk LPM Afsel dan menunjukkan bahwa dimensi waktu membentuk tingkat kekuatan kelompok dalam komponen gerakan agrarian transnasional.

Kategorisasi dari 'mobilisasi awal' dan 'mobilisasi yang telat' memang berguna dalam kasus MST dan LPM. Namun ada kasus-kasus di mana pendekatan analisis ini mungkin tidak berguna. Ambil contoh, misalnya, kasus FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) yang dijelaskan oleh Peluso, Afiff dan Fauzi (buku ini) dan membandingkannya dengan, misalnya, UNORCA di Mexico.[27] Yang terakhir ini dibentuk pada tahun 1980-an, dia adalah salah satu anggota kunci dari pendiri Via Campesina pada tahun 1993 dan tetap menjadi gerakan penting, terutama bagi Koordinasi Regional Amerika Utara dari Via Campesina. Sementara itu, FSPI, dibentuk di akhir 1996 dan memperoleh momentum untuk memobilisasi selama runtuhnya rezim otoriter dan pasca-transisi pada tahun 1998. Ini adalah salah satu contoh 'mobilisasi yang telat' di Via Campesina dan bahkan di Asia Tenggara. Akan tetapi, karena berbagai alasan, termasuk beberapa peluang eksternal (misalnya, Via Campesina ingin mentransfer sekretariat operasional ke Asia), FSPI cepat meningkatkan pengaruh politik global. Pada tahun 2004, mereka menjadi tuan rumah bagi Sekretariat Via Campesina, dan pemimpinnya, Henry Saragih, menjadi koordinator umum Via Campesina.

Di samping modus dari gerakan yang dikategorikan berdasarkan waktu dari bangunan organisasi dan mobilisasi, ada juga satu faktor penjelas dalam perbedaan posisi kekuasaan dalam gerakan agraria transnasional yang mungkin akan berguna juga untuk memeriksa waktu dari tindakan mereka yaitu menghubungkan kualitas dari hubungan antara gerakan dan organ gerakan agraria transnasional. Untuk tujuan ini, kita dapat menggunakan

---

[27] UNOCRA singkatan dari Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonomas (National Union of Autonomous Regional Peasant Organizations).

kategori 'penghubung awal', 'penghubung telat', 'penghubung yang kuat', 'penghubung yang lemah', yang mungkin juga dapat menetapkan posisi pengaruh organisasi dan kekuasaan dalam gerakan agraria transnasional. Misalnya KRRS Karnataka di India adalah sebuah 'penghubung awal' yang memberikan kontribusi untuk membangun Via Campesina. dia juga memiliki 'link kuat' karena sejarah yang khusus dan kemampuan untuk memulai tindakan dramatis melawan perusahaan transnasional dan Perusahaan pengembang bibit Rekayasa Genetik, sesuatu yang merupakan pusat wacana global Via Campesina. Sementara banyak gerakan dari buruh tak bertanah dan pekerja Dalit di India, dalami konteks Via Campesina ini adalah 'penghubung yang telat'. Banyak dari mereka berusaha untuk menjalin hubungan dengan Via Campesina hanya pada tahun 1996, tapi pada saat itu petani kelas menengah dan kaya yang berbasis KRRS sudah tertanam baik di dalam gerakan global—-aktif mencegah masuknya gerakan lain dari India atau efektifnya mengecilkan gerakan lainnya dari India dari mencari keanggotaan dalam Via Campesina[28].

Banyak dari 'penghubung telat' ini juga memiliki 'jaringan yang lemah' pada aktor-aktor global karena berbagai alasan, yang mencakup prioritas yang relatif

[28] Meskipun basis sosial KRRS diantara sektor yang secara relatif makmur dari petani, wacana organisasi dan aksi kadang radikal dan dramatik, khususnya selama periode 2004, ketika pemimpin lamanya professor M.D. Nanjundaswamy meninggal dunia. KRRS terkenal karena merampok kantor Cargill di Bangalore dan mengkampanyekan melawan kehadiran rangkaian makanan cepat saji Amerika Serikat di India (Gupta 1998). Selama tahun 2004 Mumbai World Social Forum (WSF), Nanjundaswamy dan KRRS menuduh acara tersebut disusun dan didominasi untuk LSM non India dengan sedikit dukungan populer, memboikot WSF dan mengorganisir "perlawanan" paralel forum dari luar acara utama.

rendah untuk isu-isu buruh dalam Via Campesina, yang advokasinya terutama untuk memproduksi surplus strata kaum tani yang terlibat dengan masalah perdagangan dan bioteknologi. Tidak ada kampanye sistematik yang berpusat pada isu buruh di dalam Via Campesina (tentang upah, misalnya), kecuali, tentu saja, reforma agraria, yang awalnya KRRS menentang sebagai fokus untuk kampanye global (lihat, sebagai contoh diskusi oleh Borras dan oleh Scoones dalam buku ini).

Banyak 'penghubung yang telat' tidak dapat menyisipkan diri secara efektif ke dalam gerakan agraria transnasional, terutama dimana saingan gerakan nasional mereka telah berada di dalam gerakan agraria transnasional. Hal ini, untuk misalnya, kasus UNORKA di Filipina, yang aplikasi keanggotaan dalam Via Campesina ditentang oleh KMP (lihat Borras, buku ini)[29]. Jenis ketegangan ini tersebar luas di sebagian besar Gerakan Agraria Transnasional.

Asal-usul Kelas Yang Beragam

Tanpa memakai cara baca analisis kelas, merupakan hal mustahil untuk memisahkan (dan memahami) proses dan akibat-akibat pembangunan. Para peneliti belakangan ini mengatakan untuk membawa kembali analisa kelas ke dalam studi pembangunan pedesaan tidak berarti bahwa lensa analitik kelas cukup untuk menjelaskan semua dinamika penting dari perubahan agraria. Persoalan lain tentang hubungan sosial dan identitas, khususnya gender,

[29] UNORKA singkatan dari Pambansang Ugnayan ng mga Nagasasariling likal Na Organisasyon sa Kanayunan (National Coordination of Autonomous Local Rural people's Organizations). KMP singkatan dari Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Peasant Movement of the Philippines).

etnisitas dan agama, juga memainkan peranan penting[30]. Tapi para sarjana yang menjelaskan kekuasaan terhadap identitas non-kelas dalam gerakan-gerakan sosial pedesaan baru-baru ini, juga sering berpendapat bahwa sementara etnisitas dan identitas non-kelas juga penting, kelas juga harus dipertimbangkan dalam setiap analisis pembangunan gerakan dan perubahan dinamika agraria[31]. Pendekatan yang bernuansa pada relevansi kelas inilah yang kami harap dapat dibawa ke dalam diskusi mengenai Gerakan Agraria Transnasional.

Dalam mengkaji Gerakan Agraria Transnasional saat ini ada dua pokok penting yang harus diperhatikan dalam dimensi-dimensi kritis terkait dengan isu kelas: (i) sejauh mana terjadi dominasi kelas tertentu atas kelas-kelas tertentu, dan (ii) sejauh mana tingkat pelibatan kelas tertentu atau kelas-kelas di dalam gerakan agraria transnasional. Sejauh ini, tingkat kehadiran dan dominasi dari kelas tertentu dalam persoalan gerakan transnasional mempengaruhi pola umum perilaku politik dari gerakan atau jaringan tersebut. IFAP, misalnya, yang didominasi oleh petani menengah dan kaya di Utara, sehingga kurang radikal dan umumnya posisi advokasinya konservatif. Namun, tingkat pelibatan (*quality of insertion*) menjadi jaringan transnasional menurut kelas tertentu juga penting. Bahkan ketika kelas tertentu merupakan minoritas, dalam kondisi tertentu dapat menjadi aktor kunci dalam ge-

---

30 Lihat sebagai contoh penjelasan Bernstein (2007) dalam konteks review dari wacana sarjana saat ini dalam kehidupan pedesaan, serta juga argumen Herring dan Agarwala dalam "restoring agency to class" dalam konteks diantaranya basis kelas perbedaan posisi dari berbagai kelompok "terorganisir" dan "tak terorganisir" berbasis desa dan kelompok desa di India memberikan perhatian pada isu tanaman RG.

31 Lihat sebagai contoh Brysk (2000) dan Yashar (2007) dalam kasus gerakan masyarakat adat di Amerika latin.

rakan. Hal ini terjadi ketika posisi representatif yang diadopsi oleh gerakan yang lebih luas yang mengakui keabsahan politik mereka dan nilai-nilai untuk mengorganisir dan memperkuat gerakan agraria transnasional. Kasus semacam itu terjadi dalam organisasi petani menengah dan kaya KRRS dan agitasi dan mobilisasinya tentang anti-koorporasi transnasional dan anti-benih hasil rekayasa genetik (lihat diskusi oleh Scoones dan oleh Borras, buku ini).

Lensa analisis kelas juga berguna untuk memeriksa sifat dan orientasi berbagai gerakan. Sebagaimana Peluso, Afiff dan Fauzi memaparkan (dalam buku ini) tentang aktivis lingkungan dan gerakan agraria di Indonesia yang berjejaring, dan menerima pengaruh dari jaringan transnasional. Komposisi kelas dari gerakan ini merupakan faktor utama dalam bagaimana jejaring ini membangun kekuatan di luar. Sebelumnya, gelombang gerakan agraria di tahun 1950-an dan 1960-an memiliki basis yang kuat di kalangan petani miskin yang menuntut tanah, yang kemudian dihancurkan dengan kekerasan oleh militer. Apa yang akan kemudian muncul adalah gerakan lingkungan yang buta-kelas. Sementara itu gerakan ini juga dibatasi oleh rezim Soeharto, bahkan dari permulaan hingga pertengahan tahun 1980-an yang merupakan masa penting di bagi organisasi masyarakat sipil yang berorientasi pedesaan di Indonesia yang terkait dengan jaringan internasional. Meskipun gerakan ini tidak memandang penting politik ekonomi dari hak kepemilikan atas tanah, yang banyak terjadi pada tahun-tahun awal tetapi kemudian selalu ditundukkan oleh orientasi keadilan lingkungan. Pada awal hingga pertengahan 1990-an, aktivis yang berorientasi pada keadilan lingkungan membuat aliansi dengan aktivis agraria dan kelompok masyarakat adat. Isu yang berorientasi kelas dalam redistribusi tanah itu kemudian diambil oleh gerakan agraria nasional yang bangkit

kembali selama rezim transisi pada tahun 1998 dari pemerintahan otoriter yang terpusat. Diskusi tentang kelas di antara aktivis di Indonesia umumnya dilakukan secara implisit, tapi tuntutan bahwa tanah harus dibagikan kepada petani miskin tak bertanah dan buruh pedesaan, mendapatkan kembali tanah dari perusahaan besar, dan sebagainya—-jelas menunjukkan tentang analisa yang berorientasi kepada kelas. Sementara itu, gerakan konservasi telah terbagi dalam garis kelas mengenai redistribusi tanah dalam taman nasional dan kawasan konservasi lainnya. Namun, pergeseran aliansi yang ambigu antara berbagai komponen gerakan ini membuat sulit untuk menentukan perbedaan-perbedaan yang jelas atau semata-mata berdasarkan kelas.

Sementara para pemimpin gerakan dan sekutu mereka hampir tidak mempertimbangkan pembagian kelas dan perjuangan di antara isu-isu favorit mereka dan mereka memang jarang berbicara secara terbuka, sesungguhnya kenyataan yang ada dalam gerakan-gerakan agraria transnasional dan dalam organisasi anggota nasional mereka menunjuk pada pentingnya kelas sebagai isu kritis. Beberapa pemimpin jaringan transnasional ini mungkin, bagaimanapun, kadang mengakui karakter kelas gerakan transnasional. João Pedro Stédile, misalnya, baru-baru ini menegaskan bahwa "MST [Brasil] dan Via Campesina, terutama, bekerja dengan teori gelombang atau siklus perjuangan kelas' (Stédile 2007, 194). Bahwa hal ini mungkin menjadi kontroversial atau menjadi klaim yang sulit untuk anggota organisasi Via Campesina di negara lain (lihat di bawah), poin utama Stedile adalah bahwa petani, tidak hanya di Brazil dan dengan kelas pekerja yang teroganisir di sana dan di tempat lain, telah berada di garis depan perjuangan anti-neoliberal dan anti-imperialis (lihat diskusi yang relavan oleh Petras dan Veltmeyer 2003). Isu

kelas juga tersirat dalam beberapa visi pemimpin Via Campesina yang bertujuan untuk membangun aliansi. Paul Nicholson, misalnya, seorang petani dari Basque Country (Spanyol) dan salah satu pemimpin Via Campesina yang paling penting, berpendapat bahwa aliansi yang paling mendasar di pedesaan dunia saat ini adalah antara petani kecil dan pekerja pedesaan (Via Campesina 2000).

Perbedaan Ideologi dan Politik

Dari waktu ke waktu, beberapa aktivis gerakan agraria transnasional mengakui bahwa perbedaan ideologis dan politik adalah masalah penting dalam gerakan atau pembangunan jaringan. Tetapi sekali lagi, seperti kelas, masalah ini biasanya dihindari sedapat mungkin dan biasanya ditujukan hanya secara internal. Implikasi strategis dari perbedaan ideologis dan politik di dalam dan di antara Gerakan Agraria Transnasional—-di gerakan, -aliansi dan pembangunan-koalisi, representasi dan akuntabilitas, pembingkaian isu dan penyusunan tuntutan—-tidak dapat diterima begitu saja. Hal tersebut memang benar-benar merupakan masalah. Perbedaan itu memainkan peran dalam jatuh dan bangunnya, kuat atau lemahnya gerakan transnasional, jaringan dan koalisinya. Dinamika ini dapat dilihat dari tiga perspektif:

(i) Berbasis-kelas. Kelas memberikan perbedaan ideologis dan politik dengan jelas. Kelompok yang didominasi oleh kelas-kelas tertentu memiliki kepentingan tertentu dan seperangkat isu-isu yang berbeda dari kelompok-kelompok lainnya dengan komposisi kelas sosial yang berbeda. Misalnya, KRRS di India tidak mendukung, dan bahkan menentang reforma agraria. Ini adalah gerakan yang didominasi oleh petani menengah dan kaya yang memiliki tanah dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa gerakan buruh pedesaan tak bertanah di India memi-

liki perbedaan politik dan berkonflik dengan KRRS terutama karena mereka berbeda kelas. Konflik seperti itu telah diinternalisasi dalam Gerakan Agraria Transnasional. Mengulang diskusi kita sebelumnya mengenai strategi politik yang berbeda yang kemudian diadopsi oleh MST di Brazil dan CNCR di Senegal (lihat McKeon et al. 2004). Pada skala yang lebih besar misalnya kita dapat menunjuk pada perbedaan ideologi dan politik yang memisahkan IFAP dan Via Campesina, persoalan kelas menjadi sesuatu yang penting, meskipun bukan satu-satunya alasan yang mendasari perbedaan seperti itu.

(ii) *Perbedaan pada strategi dan kalkulasi politik*. Ada juga kelompok-kelompok petani yang memiliki basis massa di kelas-kelas sosial yang sama di pedesaan, misalnya, petani miskin dan pekerja pedesaan, tetapi memiliki sikap menentang satu sama lain karena perbedaan ideologi dan politik. Diskusi oleh Borras (buku ini) tentang konflik antara tiga gerakan petani di Filipina -KMP, DKMP dan UNORKA - menggambarkan fenomena ini. Dalam skala global, ada perbedaan penting misalnya dalam kalkulasi politik International Land Coalition (ILC) dan IPC for Food Soverignty. NGO-NGO dan IFAP yang berada di dalam lingkup ILC memutuskan bahwa strategi terbaik untuk memajukan kebijakan pertanahan yang pro-rakyat miskin akan membutuhkan dana formal dan resmi dengan lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank Dunia) dan antar lembaga (misalnya, Program Pangan Dunia PBB). ILC juga bekerja untuk mereplikasi pendekatan serupa dalam organisasi tingkat nasional. Hal ini, tentu saja, strategi yang ditolak oleh IPC for Food Sovereignty, yang memilih untuk mempertahankan karakter masyarakat sipil dan otonomi dari Lembaga Keuangan Internasional dan lembaga pembangunan. IPC for Food Sovereignty, malah mencoba untuk membangun basis gerakan sosial pedesaan dan aliansi NGO dalam rangka

mendorong untuk lebih saling memperkuat interaksi dengan lembaga internasional yang lebih simpatik.

(iii) *Pertarungan institusional and perbedaan personal*. Mungkin ini adalah perbedaan yang paling umum di dalam dan antara kelembagaan Gerakan Agraria Transnasional berasal dari pertarungan kelembagaan dan perbedaan karakter personal. Persaingan yang besar untuk pendanaan dari lembaga pembangunan negara-negara Utara selalu menjadi sumber utama ketegangan di dalam dan di antara Gerakan Agraria Transnasional, meskipun jarang diakui. Selain itu, perbedaan-perbedaan karakter personal juga memainkan peran dalam menyulut api dalam ketegangan politik. Pada banyak kesempatan, persaingan untuk pendanaan, perjuangan untuk mendapat pengakuan publik dan ketenaran, dan pertengkaran personal telah berkontribusi untuk memperdalam kesalahpahaman di dalam Gerakan Agraria Transnasional sendiri.

Dinamika Pembangunan Aliansi

Gerakan Agraria Transnasional selalu berupaya untuk mengerahkan sumber daya dan prakarsanya untuk membangun aliansi dalam rangka memperluas jangkauan tindakan kolektif mereka di luar barisan mereka sendiri. Dan karena ini mereka melibatkan paling tidak dua kelompok berbeda yang mencoba untuk menemukan beberapa persamaan mendasar, disana selalu terdapat ketegangan inheren dan sederet kesalahpahaman dalam membangun aliansi. Di masa lalu, pola paling umum adalah jenis aliansi yang melibatkan gerakan tani dengan partai politik dan organisasi buruh (lihat, sebagai contoh, Kay dan Silva 1992 tentang kasus Chili; Salamini 1971 pada tahun 1930-an kasus Meksiko; Herring 1983 untuk beberapa kasus Asia Selatan; Heller 2000 tentang kasus India). Sebagian besar aliansi ini seiring dengan bangkitnya kekuatan sayap kiri, komunis atau partai-partai sosialis,

biasanya selama tiga-perempat dari abad yang lalu. Namun, memudarnya banyak partai politik dari sayap kiri pada 1970-an - 1980-an, kebangkitan neoliberal sejak awal 1980-an, dan melemahnya sebagian besar gerakan buruh semakin membuat gerakan berbasis pedesaan untuk menjauhkan diri dari kedua jenis aliansi ini. Pergeseran strategis ini bertepatan dengan munculnya politik identitas di kalangan gerakan sosial pedesaan, beberapa di antaranya, meskipun tentu tidak semua, kelas politik ditolak sama sekali (lihat, sebagai contoh, diskusi di Alvarez dan Escobar (1992) dalam konteks Amerika Latin). Sebagian besar gerakan petani yang bergabung dengan Gerakan Agraria Transnasional muncul selama periode ini setelah penurunan atau hilangnya partai politik dan aliansi pekerja-petani. Ini tidak berarti bahwa gerakan-gerakan ini tidak berinteraksi dengan partai politik atau serikat pekerja. Mereka biasanya melakukan itu, tapi tidak tersubordinasi secara politik praktis, suatu jenis 'sabuk transmisi' yang menandai era sebelumnya. Fakta ini misalnya dapat dilihat dalam konteks di mana MST Brasil muncul pada awal tahun 1980, secara resmi diluncurkan pada tahun 1985, dan sekarang berurusan dengan pemerintahan Partai Buruh (PT,Partido dos Trabalhadores). Ini juga merupakan konteks historis dari banyak gerakan yang muncul kemudian untuk memainkan peran penting dalam Gerakan Agraria Transnasional kontemporer (Eropa Selatan dan gerakan di Meksiko dalam Via Campesina, misalnya).

Sebagai pengganti dari partai politik dan aliansi kelas buruh-petani, Gerakan Agraria Transnasional kontemporer dihadapkan oleh tantangan luas, sekurang-kurangnya terhadap tiga jenis koalisi: hubungan NGO-gerakan petani, aliansi sektoral, dan aliansi advokasi yang tematik.

(i) hubungan NGO-gerakan petani. Mungkin salah satu isu yang paling kontroversial dalam perdebatan aliansi kontemporer gerakan petani adalah perdebatan antara

gerakan dan NGO. Yang paling umum, presentasi yang terkarikatur dalam masalah ini, beberapa aktivis petani telah mengasumsikan bahwa NGO tidak dan tidak dapat mewakili kaum miskin pedesaan dan NGO berwatak tidak demokratis, namun dia memiliki kursi istimewa di tempat resmi dan menempati kursi konsultatif di kalangan lembaga [non] pemerintah internasional, dan mereka memiliki dana. Aktivis yang sama juga melihat gerakan petani sebagai perwakilan kaum miskin pedesaan miskin dan sebagai organisasi demokratis, namun mereka mengeluh jarang diundang di tempat resmi konsultatif internasional dan mereka tidak memiliki dana. Ini sebagai akiabatnya, memunculkan hubungan yang 'benci tapi rindu' antara gerakan petani dan NGO. Tetapi walaupun gerakan petani sering melihat NGO secara lebih kritis, tetapi pada kenyataanya gerakan petani memiliki beberapa kesepakatan dan hubungan baik dengan NGO. NGO juga seringkali terlibat sebagai fasilitator Gerakan Agraria Transnasional yang paling signifikan untuk daerah geografis baru yang tidak memiliki kontak sebelumnya. NGO tetap sekutu yang paling dapat diandalkan oleh Gerakan Agraria Transnasional. Tidak semua NGO, tentu saja. Misalnya, Via Campesina bekerja sama dengan beberapa yang terpilih, termasuk Food First Information dan Action Network (FIAN) dan Land Research dan Action Network (Iran). Mereka menerima dukungan ekonomi kunci dari lembaga non pemerintah seperti Dutch Oxfam-Novib dan Inter-Chuch Organization for Development Cooperation (ICCO). Oleh karena itu, bagi Via Campesina, bukan NGO yang bermasalah. Sebaliknya, itu adalah masalah dalam syarat-syarat hubungan dan protokol hubungannya. Umumnya, NGO oleh beberapa aktivis gerakan agraria transnasional dan beberapa sarjana biasanya dihadapkan dengan realitas empiris. Edelman (buku ini), menulis tentang organisasi transnasional di Amerika Tengah pada

tahun 1990-an, dan memberi catatan ironi bahwa nada anti-NGO dalam wacana politik ASOCODE (yang pada gilirannya sangat mempengaruhi posisi Via Campesina pada masalah ini) tidak mencegah ASOCODE itu sendiri dari memiliki banyak ciri-ciri khas NGO yang 'buruk'.

(ii) Aliansi Sektoral. Apa yang membuat IPC for Food Sovereignty menarik dan penting bagi aliansi global yang berorientasi pedesaan, tidak hanya fakta bahwa mungkin saat ini dia merupakan jaringan gerakan terbesar, tetapi IPC juga membawa organisasi penting dari berbagai sektor pedesaan: petani kecil dan petani miskin, tengah dan petani kaya, nelayan, penggembala, petani perempuan, masyarakat adat dan pekerja di pedesaan. Di antara gerakan agraria transnasional saat ini, adalah Via Campesina yang memiliki kebijakan jelas tentang memprioritaskan aliansi dengan gerakan-gerakan sektor lainnya di pedesaan, termasuk biasanya gerakan buruh yang lemah di pedesaan. Sampai saat ini, bagaimanapun, Via Campesina telah mampu bekerja lebih dekat dengan petani perempuan, nelayan dan masyarakat adat dan sedikit dengan pekerja di pedesaan yang terorganisir, meskipun apa yang Nicholson (lihat di atas) katakan mengenai sulitnya aliansi petani dan pekerja di pedesaan akan berjuang melawan neoliberalisme. Secara teori, aliansi seperti itu mungkin diinginkan dan mudah dicapai karena kelompok ini mempunyai begitu banyak masalah-masalah umum dan perjuangan. Namun dalam kenyataannya, pembanguna aliansi pedesaan yang multi-sektoral dan lebih luas terbukti tidak mudah. Salah satu alasan untuk hal ini adalah bahwa gerakan sektoral berbeda (petani kecil, petani adat, pekerja pedesaan, nelayan, dan sebagainya) mempunyai konstituen yang saling tumpang tindih. Seringkali persaingan antar organisasi berkembang dalam perjuangan untuk merekrut dan merepresentasikan konstituen yang tumpang tindih ini. Banyak dari

mereka juga bersaing untuk mendapatkan dana yang sama dari NGO utara.

(iii) Aliansi Advokasi yang Tematik. Mungkin hal yang paling umum dari aliansi yang ada saat ini adalah aliansi yang berada di sekitar tema-tema advokasi tertentu. Ini biasanya aliansi multi-kelas dan multi-sektoral, melintasi batas pedesaan-perkotaan dan pembagian global Utara-Selatan. Beberapa akan dianalisis dalam buku ini: kampanye anti-rekayasa benih genetik (lihat bab-bab oleh Scoones dan oleh Newell), inisiatif untuk produksi makanan organik dan sertifikasi (lihat Friedmann dan McNair), Kampanye Global Pembaruan Agraria (lihat Borras), dan advokasi lingkungan-agraria (lihat Peluso, Afiff dan Fauzi). Dalam jenis ini aliansi yang sedang dilakukan oleh Gerakan Agraria Transnasional ini, pada akhirnya akan memberikan visibilitas yang lebih besar dan substansi kampanye yang lebih besar. Walaupun banyak dari aliansi ini adalah taktis, jangka pendek dan berorientasi pada kampanye yang spesifik, beberapa mempunyai strategi penting untuk Gerakan Agraria Transnasional. Jenis aliansi ini mungkin tetap kerja koalisi yang paling penting di tahun-tahun yang akan datang, dan dalam konteks inilah aliansi antar gerakan agraria transnasional di sekitar isu perubahan iklim dan agrofuel bisa dipahami.

Kesimpulan

Gerakan agraria transnasional merupakan proyek politik dengan akar sejarah yang mendalam di berbagai negara, dengan bentuk-bentuk keragaman dan pergeseran aliansi, berbagai tindakan *repertoar*, dan bentuk-bentuk representasi yang kompleks, serta pembingkaian isu dan perumusan tuntutan yang berbeda-beda. Para pemimpin dan aktivis Gerakan Agraria Transnasional berharap untuk memajukan tujuan dari rencana-rencana mereka dengan

cara menggambarkan koherensi organisasional, homogenitas dan kesatuan. Sementara para peneliti yang bersimpatik sering cenderung meremehkan ambiguitas dan kontradiksi Gerakan Agraria Transnasional, sebagaimana telah terjadi dalam studi gerakan sosial yang beroperasi di skup lokal atau nasional (Rubin 2004). Dalam beberapa kasus, klaim kesatuan ini berasal dari ketergantungan dari para peneliti pada metodologi yang hanya berhubungan dengan pemimpin gerakan, sedangkan dalam kasus lain, klaim tentang persatuan gerakan berasal dari para peneliti 'sendiri yang berniat baik sebagai upaya mereka untuk memajukan proyek-proyek politik yang mereka pelajari.

Para penulis di bab dalam buku ini mengambil pendekatan yang berbeda. Sementara metode dan subjek mereka bervariasi dalam bentang geografis, temporal dan lingkup politik, mereka berbagi pemahaman tentang 'kompleksitas Gerakan Agraria Transnasional yang tumbuh dari sebuah penghargaan asal-usul historis yang rumit dan tindakan politik yang seimbang yang berusaha untuk membangun aliansi lintas-negara yang menghubungkan organisasi yang heterogen, kelas sosial, etnis, pandangan-pandangan politik dan wilayah. Penulis dalam buku ini melihat kompleksitas ini sebagai suatu elemen penting dalam memahami Gerakan Agraria Transnasional. Dengan mengakui kontradiksi Gerakan Agraria Transnasional' , ambiguitas dan ketegangan internal, mereka juga mencari, dari sudut pandang intelektual yang terlibat, untuk memajukan proyek politik transformatif agar lebih baik di dalam memahami akar, keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, tantangan saat ini dan masa depan .

Kami telah mencatat di atas bahwa Gerakan Agraria Transnasional telah ada sejak awal abad kedua puluh, tapi kami juga berpendapat bahwa pergeseran besar terjadi pada Gerakan Agraria Transnasional yang baru mulai muncul

pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Namun, yang mengejutkan banyak orang, banyak petani dan petani kecil di berbagai daerah dunia telah menjadi kekuatan yang paling tangguh dalam menghadapi dan mengkritisi arus deras pasar bebas yang dimulai pada tahun 1970-an dengan runtuhnya kerangka Bretton Woods yang mengatur ekonomi dunia dan dimulainya era globalisasi (Helleiner 1994). Meningkatnya profil dan semakin kuatnya pengaruh Via Campesina dan jaringan regional, seperti CLOC di Amerika Latin dan ROPPA di Afrika Barat, yang memulai dan merefleksikan ekspansi masyarakat sipil transnasional yang lebih luas pada periode yang sama. Terjadinya krisis yang parah telah mempengaruhi kaum miskin pedesaan ini, dan itu semua telah memberikan karakteristik khusus untuk organisasi-organisasi dan pemimpin mereka untuk menggunakan berbagai tindakan repertoar yang semakin besar variasinya di berbagai tempat, dari pertemuan menteri WTO hingga lokasi pengujian tanaman rekayasa genetik. Perlawanan terhadap peraturan perdagangan yang tidak adil, kontrol korporasi atas benih genetik dan reforma agraria yang berorientasi pasar, serta pendekatan-pendekatan inovatif untuk pembangunan dan untuk mengambil-alih kemakmuran yang diproduksi oleh petani dan produsen petani keecil merupakan persoalan-persoalan yang tercakup dalam bab-bab dalam buku ini. Masalah pembangunan aliansi—dengan aktivis lingkungan, gerakan perempuan dan masyarakat adat dan kelompok minoritas, serta dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan lembaga supra-pemerintahan nasional—juga telah menjadi subjek bagi para peneliti ini dan untuk diperdebatkan di kalangan aktivis. Beberapa kontributor menyinggung sedikit pada kompleksitas tersebut dan kadang-kadang peranan yang saling berselisih antara para ilmuwan akademik dan para intelektual profesional itu dengan

kampanye gerakan dan proyek representasi gerakan, tetapi meskipun demikian, banyak pertanyaan penting lainnya di masa mendatang yang penting untuk diteliti lebih mendalam.

Referensi

ACWW, 2002. 'Associated Country Women of the World'. http://www.acww.org.uk, Accessed 20 November 2002.

Akram Lodhi, Haroon and Cristóbal Kay, eds., 2008. *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge.

Akram-Lodhi, Haroon, Saturnino M. Borras Jr and Cristóbal Kay, eds., 2007. *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization*. London: Routledge.

Alvarez, Sonia and Arturo Escobar, eds., 1992. *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*. Boulder, CO: Westview Press.

Anheier, Helmut K., ed., 1999. *When Things Go Wrong: Organizational Failures and Break- downs*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Batliwala, S. and D.L. Brown, eds., 2006. *Transnational Civil Society: An Introduction*. Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Bell, John D., 1977. *Peasants in Power: Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian National Union, 1899–1923*. Princeton: Princeton University Press.

Bernstein, Henry, 2006. 'Once Were/Still Are Peasants?

Farming in a Globalising "South"'. *New Political Economy*, 11 (3): 399–406.

Bernstein, Henry, 2007. 'Rural Livelihoods in a Globalizing World: Bringing Class Back In'. Paper for conference on 'Policy Intervention and Rural Transformation: Towards a Comparative Sociology of Development', China Agricultural University, Beijing, 10–16 September 2007.

Biondich, Mark, 2000. Stjepan Radiç, *The Croat Peasant Party, and the Politics of Mass Mobilization, 1904–1928*. Toronto: University of Toronto Press.

Borras, Saturnino Jr, 2004. 'La Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Move- ment'. TNI Briefing Series No. 2004/6. Amsterdam: Transnational Institute.

Borras, Saturnino Jr, 2007. *Pro-Poor Land Reform: A Critique*. Ottawa: University of Ottawa Press.

Brass, Tom, 2000. *Peasants, Populism and Postmodernism: The Return of the Agrarian Myth*. London: Frank Cass.Brown, Cyril, 1923. 'Says Germany also is Ready for Parley'. The New York Times, 9 April.

Bryceson, Deborah, Cristóbal Kay and Jos Mooij, eds., 2000. *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America*. London: Intermediate Technology Publications.

Brysk, Alison, 2003. *From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America*. Stanford, CA: Stanford University Press. Byres, Terence J., 2003. 'Paths of Capitalist Agrarian Transition in the Past and in the Contemporary World'. In Agrarian Studies: Essays on Agrarian Relations in Less-Developed Countries, eds. V.K. Ramachandran and Madhura Swaminathan, 54–83. New Delhi: Tulika; London: Zed.

Carr, Edward Hallett, 1964. *A History of Soviet Russia: Socialism in One Country 1924–1926*, Vol. 3. New York: Macmillan.

Cohen, Robin and Shirin M. Rai, eds., 2000. *Global Social Movements*. London: Athlone Press. Cohen, Stephen F., 1975. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938. New York: Vintage.

Colby, Frank Moore, ed., 1922. *The New International Year Book: A Compendium of the World's Progress for the Year 1921*. New York: Dodd, Mead and Company. Davies, Constance, n.d. 'The Women's Institute: A Modern Voice for Women'. http:// www.womens-institute.co.uk/memb-history.shtml, Accessed 7 December 2002.

Della Porta, D., M. Andretta, L. Mosca and H. Reiter, 2006. *Globalization from Below: Transnational Activists and Protest Networks*. Minneapolis, MN:University of MinnesotaPress.

De Soto, Hernando, 2000. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. New York: Basic Books.

Desmarais, Annette, 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Halifax: Fernwood; London: Pluto.

Drage, Dorothy, 1961. *Pennies for Friendship: The Autobiography of an Active Octogenarian, a Pioneer of ACWW*. London: Gwenlyn Evans Caernarvon.

Durantt, Walter, 1920. 'Accord in Balkans Takes Wider Scope'. The New York Times, 27 August. Edelman, Marc, 1987. 'The Other Superpower: The Soviet Union and Latin America, 1927–1987'. *NACLA Report on the Americas*, 21 (1): 10–40.

Edelman, Marc, 1998. 'Transnational Peasant Politics in

Central America'. *Latin American Research Review*, 33 (3): 49–86.

Edelman, Marc, 1999. *Peasants against Globalization: Rural Social Movements in Costa Rica*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Edelman, Marc, 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society 2003*, eds. Mary Kaldor, Helmut Anheier and Marlies Glasius, 185–220. London: Oxford University Press.

Edelman, Marc, 2005. 'Bringing the Moral Economy Back In...to the Study of Twenty-first Century Transnational Peasant Movements'. *American Anthropologist*, 107 (3): 331–45.

Edwards, Michael and John Gaventa, 2001. *Global Citizen Action*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Ellis, Frank, 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Florini, Ann M., ed., 2000. *The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Fox, Jonathan, 2000. 'Assessing Binational Civil Society Coalitions: Lessons from the Mexico–US Experience'. Working Paper No. 26, Chicano/Latino Research Center, University of California at Santa Cruz. Fox, Jonathan, 2001. 'Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool for Civil Society Policy Advocacy'. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 30 (3): 616–27.

Fox, Jonathan, 2005. 'Unpacking "Transnational Citizenship" '. Annual Review of Political Science, 8: 171–201. Friedmann, Harriet, 2004. 'Feeding the Empire: The Pathologies of Globalized Agriculture'. In *The Empire Reloaded: Socialist Register 2005*, eds. L. Panitch and C. Leys, 124–43. London: Merlin Press.

Gaventa, John, 2002. 'Exploring Citizenship, Participation

and Accountability'. *IDS Bulletin*, 33 (2): 1–11.

Gianaris, Nicholas V., 1996. *Geopolitical and Economic Changes in the Balkan Coun- tries*. Westport, CT: Greenwood Publishing.

Glick Schiller, Nina, 2004. 'Transnationality'. In A *Companion to the Anthropology of Politics*, eds. David Nugent and Joan Vincent, 448–67. Oxford: Blackwell.

Guardian, 2008. '50 People Who Could Save the Planet'. Guardian, 5 January, http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jan/05/activists.ethicalliving. Accessed 7 January 2008.

Guidry, J., M. Kennedy and M. Zald, 2000. 'Globalizations and Social Move- ments'. In *Globalizations and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere*, eds. J. Guidry et al., 1–34. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Gupta, Akhil, 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Durham, NC: Duke University Press.

Gwynne, Robert and Cristóbal Kay, 2004. *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*. London: Arnold; New York: Oxford University Press (second edition). Harvey, Neil, 1998. The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy. Durham,NC: Duke University Press.

Helleiner, Eric, 1994. 'From Bretton Woods to Global Finance: A World Turned Upside Down'. In *Political Economy and the Changing Global Order*, eds. Richard Stubbs and Geoffrey R.D. Underhill, 163–75. New York: St. Martin's Press.

Heller, Patrick, 2000. 'Degrees of Democracy: Some Comparative Lessons from India'. World Politics, 52 (2): 484–519. Hemingway, Ernest, 1987. 'Stambouliski of Bulgaria'. In *The Toronto Star*: Complete Dispatches

1920–1924, ed. William White, 155–6. New York: Scribner's [originally in *Toronto Star*, 25 April 1922].

Herring, Ronald, 1983. *Land to the Tiller: The Political Economy of Agrarian Reform in South Asia*. New Haven, CT: Yale University Press.

Herring, Ronald, 2007. 'The Genomics Revolution and Development Studies: Science, Poverty and Politics'. *Journal of Development Studies*, 43 (1): 1–30.

Herring, Ronald and Rina Agarwala, 2006. 'Restoring Agency to Class: Puzzles from the Subcontinent'. *Critical Asian Studies*, 38 (4): 323–56.

Holt-Giménez, Eric, 2006. *Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. Oakland, CA: Food First Books. ICA & IFAP [International Cooperative Alliance & International Federation of Agri- cultural Producers], 1967. Cooperation in the European Market Economies. Bombay: Asia Publishing House. IFAP, 1952. 'FAO Position on International Commodity Problems'. IFAP News, 1 (1) January: 6. IFAP, 1957. The First Ten Years of the International Federation of Agricultural Producers. Paris and Washington: IFAP. Jackson, George D., Jr, 1966. Comintern and Peasant in East Europe, 1919–1930. New York: Columbia University Press.

Jordan, Lisa and Peter van Tuijl, 2000. 'Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy'. *World Development*, 28 (12): 2051–65.

Kay, Cristóbal and Patricio Silva, eds., 1992. *Development and Social Change in the Chilean Countryside: From the Pre-Land Reform Period to the Democratic Consolidation*. Amsterdam: CEDLA.

Keck, Margaret E. and Kathryn S. Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kerkvliet, Benedict, 2005. *The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Trans- formed National Policy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Khagram, S., J. Riker and K. Sikkink, 2002. 'From Santiago to Seattle: Transnational Advocacy Groups Restructuring World Politics'. In *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms*, eds. S. Khagram et al., 3–23. Minnesota: University of Minnesota University Press.

Lahiff, Edward, Saturnino M. Borras Jr and Cristóbal Kay, 2007. 'Market-Led Agrarian Reform: Policies, Performance and Prospects'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1417–36.

London Times, 1938. 'Associated Country Women of the World'. London Times, 25 November.

London Times, 1946a. 'Conference of World Farmers: Supporting the FAO'. London Times, 20 May:6.

London Times,1946b. 'Marketing of Food'. London Times, 30 May: 4. Mahler, Sarah J., 1999. 'Theoretical and Empirical Contributions Toward a Research Agenda for Transnationalism'. In Transnationalism from Below, eds.

Michael Peter Smithand, Luis Eduardo Guarnizo, 64–100. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Mayo, M., 2005. *Global Citizens: Social Movements and the Challenge of Globalization*. London: 2 Books.

Mazoyer, Marcel and Laurence Roudart, eds., 2002. *Vía Campesina: Une Alternative Paysanne a la Mondialisation Néolibérale*. Geneva: Centre Europe-Tier Monde. McKeon, Nora, Michael Watts and Wendy Wolford, 2004. 'Peasant Associations in Theory and Practice'. Civil Society and Social Movements Programme Paper No. 8. Geneva: UNRISD.

McMichael, Philip, 2006. 'Reframing Development: Glo-

bal Peasant Movements and the New Agrarian Question'. *Canadian Journal of Development Studies*, 27 (4): 471–86.

McNabb, Marion and Lois Neabel, 2001. 'Manitoba Women's Institute EducationalProgram'. http://www.gov.mb.ca/agriculture/organizations/wi/mwi09s01.html, Accessed 7 December 2002. Meier, Mariann, 1958. ACWW 1929 –1959. London: Associated Country Women of the World.

Moss, Jeffrey W. and Cynthia B. Lass, 1988. 'A History of Farmers' Institutes'. Agricultural History, 62 (2): 150–63. Müller, Birgit, 2006. 'Introduction: GMOs – Global Objects of Contention'. Focaal-European *Journal of Anthropology*, 48: 3–16.

Newsweek, 2001. 'The New Face of Protest: A Who's Who'. Newsweek, 30 July, 17. O'Brien, Kevin, 1996, 'Rightful Resistance'. World Politics, 49: 31–55, October.

O'Brien, Kevin and Lianjiang Li, 2006. *Rightful Resistance in China*. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Brien, Robert, Anne Marie Goetz, Jan Aart Scholte and Marc Williams, 2000. *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.

Patel, Rajeev, 2006. 'International Agrarian Restructuring and the Practical Ethics of Peasant Movement Solidarity'. *Journal of Asian and African Studies*, 41 (1&2): 71–93.

Petras, James and Henry Veltmeyer, 2003. 'The Peasantry and the State in Latin America: A Troubled Past, an Uncertain Future'. In *Latin American Peasants*, ed. Tom Brass, 41–82. London: Frank Cass.

Pianta, Mario and Federico Silva, 2003. *Globalisers from Below: A Survey on Global Civil Society Organisations*. Rome: GLOBI.

Pundeff, Marin, 1992. 'Bulgaria'. In *The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century*, ed. Joseph Held, 65–118. New York: Columbia University Press.

Quinn-Judge, Sophie, 2003. *Ho Chi Minh: The Missing Years*. Berkeley: University of California Press.

Rigg, Jonathan, 2006. 'Land, Farming, Livelihoods, and Poverty: Rethinking the Links in the Rural South'. *World Development*, 34 (1): 180–202.

Rosset, Peter et al., 2006. 'Agrarian Reform and Food Sovereignty'. A paper prepared for and presented at the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD), March 2006, Porto Alegre, Brazil. http://www.icarrd.org, Accessed 19 February 2008.

Rosset, Peter, Raj Patel and Michael Courville, eds., 2006. *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland, CA: Food First Books.

Rubin, Jeffrey W., 2002. 'From Che to Marcos'. Dissent, 49 (3): 39–47.

Rubin,Jeffrey W., 2004. 'Meanings and Mobilizations: A Cultural Politics Approach to Social Movements and States'. *Latin American Research Review*, 39 (3): 106–42. Rupp, Leila J., 1997. Worlds of Women: The Making of an International Women's Movement. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rural Coalition, 1994. *Building the Movement for Community Based Development*: Rural Coalition 1994 Annual Assembly. Arlington, VA: Rural Coalition. Salamini, Heather Fowler, 1971. Agrarian Radicalism in Veracruz, 1920–38. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Scott, James, 1985. *Weapons of the Weak*. New Haven, CT: Yale University Press.

Scott, James, 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven, CT: Yale University Press.

Scott, James, 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale University Press.

Scott, James and Benedict Kerkvliet, 1986. 'Everyday Forms of Peasant Resistance in Southeast Asia'. *Journal of Peasant Studies*, 13 (2), special issue.

Seoane, José and Emilio Taddei, eds., 2001. *Resistencias mundiales: De Seattle a Porto Alegre*. Buenos Aires: CLACSO.

Smith, Jackie and Hank Johnston, eds., 2002. *Globalization and Resistance: Transnationalism Dimensions of Social Movements*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Stédile, João Pedro, 2007. 'The Class Struggles in Brazil: the Perspective of the MST'. In *Global Flashpoints: Reactions to Imperialism and Neoliberalism, Socialist Register 2008*, eds.Leo Panitch and Colin Leys, 193–216. London: Merlin Press.

Stephen, Lynn, 1997. *Women and Social Movements in Latin America: Power from Below*. Austin, TX: University of Texas Press.

Storey, Shannon, 2002. Marc Edelman interview with Shannon Storey, National Farmers Union (Canada), Saskatoon, 24 November.

Tarrow, Sidney, 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, Rupert, ed., 2004. *Creating a Better World: Interpreting Global Civil Society*. Bloom field, CT: Kumarian Press.

Tsing, Anna, 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Velásquez, Baldemar, 2007. 'Alleged Assassin of Santiago Rafael Cruz Detained in the US and Freed by Mexican Authorities'. News Farm Labor Organizing Committee, AFL- CIO. Press release 27 November.

Vía Campesina, 2000. 'Vía Campesina Position Paper: International Relations and Strategic Alliances', discussed during the III International Conference in Bangalore.

Waterman, Peter, 2001. *Globalization, Social Movements and the New Internationalisms*. London: Continuum.

World Bank, 2003. *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. Washington, DC: World Bank; Oxford: Oxford University Press.

World Bank, 2007. *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. Washington, DC: WB.

Yashar, Deborah, 2005. *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Post-Liberal Challenge*. Cambridge: Cambridge University Press.

Yashar, Deborah, 2007. 'Resistance and Identity Politics in an Age of Globalization'. *TheAnnals of the American Academy of Political and Social Science*, 610: 160–81.

2

Petani Membuat Sejarah Sendiri, Tapi Tidak Seperti yang Mereka Inginkan. . .

Philip McMichael

Pendahuluan

Narasi modernitas kapitalis telah menganggap para petani sebagai anakronisme sejarah, atau sebagai dasar kemunduran pembangunan. Teori ekonomi neoklasik dan ortodoks Marxisme sama-sama mereproduksi ontologi ini, atas dasar skala ekonomi dan/atau marjinalitas untuk kelas politik revolusioner. Bab ini membahas kondisi dan konsekuensi dari pandangan tersebut, dengan alasan bahwa kedua pandangan tersebut berbagi premis yang sama yaitu Eropa-sentris dan negara-sentris, yang pada gilirannya, telah membentuk sebuah episteme developmentalis yang sebagian besar bertanggung jawab atas krisis pedesaan yang terjadi. Mazoyer dan Roudart menangkap esensi krisis itu ketika mereka mengamati bahwa:

> sebagian besar orang yang kelaparan di dunia bukanlah konsumen dari masyarakat kota dan pembeli makanan di perkotaan, tetapi para petani produsen dan penjual produk pertanian. Selanjutnya, jumlah yang tinggi dari orang yang kelaparan tersebut bukan warisan dari masa lalu tetapi merupakan sebuah *hasil dari proses terus*

> *berlanjut* yang berujung pada kemiskinan bagi ratusan juta petani yang tertindas. (2006,10; penekanan ditambahkan).

Bandingkan ini dengan metafora jenjang pembangunan dari Jeffrey Sachs, dimana kemiskinan petani dianggap sebagai kondisi yang azali: "pergerakan dari kemiskinan universal ke berbagai tingkat kemakmuran terjadi dengan cepat dalam rentang sejarah manusia. Dua ratus tahun yang lalu, semua orang masih dalam keadaan miskin, kecuali segelintir minoritas dari kalangan penguasa dan pemilik tanah besar '(2005, 26).

Walt Rostow (1960) menguatkan pandangan developmentalis ini, bahwa petani mendiami sebuah dasar sebagai tahapan tradisional sejarah manusia. Pada perkembangannya, teori ini meletakkan petani pada tahap sejarah sebelumnya, dan W. Arthur Lewis (1954) mengoperasionalkan *episteme* ini dengan menggambarkan petani sebagai 'pasokan tenaga kerja tidak terbatas untuk industrialisasi ekonomi. Sebuah bentuk perlakuan sejarah dunia yang menyimpang (Wolf 1969;Walton1984), karena dari sini standar ilmu sosial menjadi menyimpang sedikit dari anggapan Barrington Moore tentang nasib politik petani di dalam karyanya, *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Sementara itu implikasi bahwa demokrasi liberal Inggris yang didasarkan pada penghapusan kaum tani adalah lambang dari perspektif modernis, ada kesenjangan dalam metode komparatif yang memisahkan Inggris dari luar negeri kerajaannya, yang dihuni sebagian besar oleh petani—-seperti petani di India dan petani-petani tersebut yang memproduksi 20 persen roti Inggris pada pergantian abad kedua puluh (Davis 2001, 299).

Ada tiga isu utama disini. *Pertama*, trayektori petani dikondisikan oleh dunia, bukan sejarah nasional. *Kedua*, sebagai alat legitimasi, narasi pembangunan yang ada

memungkinkan bagi tercabutnya hak petani yang diintensifkan di bawah rezim neoliberal yang dapat mematikan, dan telah menjadi titik fokus dari mobilisasi petani dewasa ini. *Ketiga*, para kaum konvensional (liberal dan Marxis) yang mencoba untuk mensistematiskan sejarah modern dalam pembangunan ternyata kandas di tahap teori—hasil dari demokrasi, yang secara nasional dibayangkan menjadi bagian dari representasi petani sebagai peninggalan sejarah. Sebuah perspektif yang menarik tentang hal ini adalah ungkapan seorang pemimpin petani Meksiko, yang mengamati: "campesino (petani) berasal dari pedesaan. Disana akan selalu ada *campesino* (petani). Mereka telah ada sebelum ada investor, industrialis, partai politik, dll, kaum petani selalu ada dan mereka akan selalu ada. Mereka tidak akan bisa dihilangkan' (Dikutip dalam Desmarais 2007, 19). Pertanyaannya adalah apa arti *'campesino'* hari ini? Dalam studinya tentang jaringan petani di Meksiko dan AmerikaTengah, *Campesino a Campesino*, Food First Director, Eric Holt-Giménez mengamati:

> "Bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional, *campesino* saat ini bukan merupakan budaya statis atau politik pasif. Tidak pula mereka menghilang sebagai kelas sosial. Perkumpulan *Campesino* di Mesoamerika dan Karibia (dan di seluruh dunia) yang terus-menerus beradaptasi dengan kekuatan global, regional, dan lokal merupakan sebuah kisah perlawanan yang tak kunjung padam untuk dekade "pembangunan" yang berusaha menghilangkan petani dari desa dan, baru-baru ini, untuk kebijakan ekonomi neoliberal yang memprioritaskan profit margin perusahaan daripada lingkungan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian pedesaan.
>
> (Ini adalah) sebuah perjuangan untuk pergolakan budaya karena budaya *campesino* memiliki pertahanan baik

> terhadap sosialis dan kapitalis…Bahkan hari ini, *campesino* melintasi tanah genting Mesoamerika melawan dampak dari globalisasi ekonomi yang menghancurkan komunitas mereka, ladang, pabrik, dan sektor jasa Amerika Serikat, yang mana selama ini mereka suplai pasokan cadangan tenaga kerjanya yang dibayar murah seperti tenaga kerja buangan". (2006, xii)

Artinya, pergerakan petani di dalam dan terhadap proyek neoliberal, [32] dalam skala dunia yang secara politis terlibat dalam suatu cara dan untuk suatu tujuan, menjadi suatu yang tak dapat terpikirkan oleh teori sosial klasik.

Pertanyaannya kemudian menjadi, apakah "pergerakan petani ini seperti 'bayangan semu nostalgia dan melankolis di antara budaya masyarakat modern' (Bartra 1992,17)? atau, apakah ini bentuk defensif, dan/atau dorongan reaksioner, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Saya berpendapat kedua. Petani akan selalu ada dan banyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan dengan berbagai matapencaharian yang berbeda, segmen pergerakan yang menjadi subjek pada bab ini. Mobilisasi Petani, seperti yang dibahas disini, sampai melampaui siklus hidup sehari-hari mereka dalam mempertahankan tanah yang kemudian menghubungkan perjuangan untuk meyusun ulang dari apa yang mungkin bertentangan dengan apa yang sedang dilakukan untuk mempertahankan tanah dan rakyat di atasnya dari rezim neoliberal. Banyak para pengamat mencatat perbedaan kesadaran, dan ketegangan

---

[32] "proyek neoliberal adalah spesifikasi budaya dari apa yang saya sebut "proyek globalisasi" (McMichael 1996) untuk menghindari asosiasi ekonomisme dengan istilah tidak resmi "globalisasi". Konsepnya pada dasarnya dapat dirubah dan merujuk pada perestrukturan politik dalam hubungannya dengan kapital pada skala dunia, dilegitimasi oleh normalisasi, sebuah kepercayaan terhadap privatisasi dari ajaran neoliberalisme.

yang terjadi antara sesama petani, antara pemimpin petani dan dengan aktivis petani (Wright dan Wolford 2003; 2004 Caldeira, 2006 Wolford; Desmarais 2007). Hal yang penting disini adalah, bahwa 'mobilisasi petani' lebih dari sekedar politik konvensional petani, dia adalah penyusunan-ulang ontologis melalui kritik terhadap neoliberalisme, dan merumuskan *agrarian question* dalam kaitannya dengan tuntutan pembangunan yang ada saat ini.

Sehingga, daripada memeriksa pertanyaan baru mengenai petani melalui lensa konvensional teori sosial modern, akan sangat berguna jika mengganti haluan epistemologis dan memeriksa gerakan petani[33] ini melalui praktek-praktek diskursifnya, karena hal tersebut secara kritis berhubungan dengan narasi kapitalis dan kebijakan yang memungkinkan mereka lakukan. Kritik dari proyek neoliberal oleh gerakan petani adalah respons yang mengundang serangan umum tentang kaum petani atas nama narasi pembangunan yang berpendapat tentang kemungkinan masa depan di atas tanah, dan itu melampaui batas-batas konvensional teori modernis.

Memahami Letak Gerakan Petani Transnasional

Dalam rangka menentukan gerakan petani transnasional secara historis, dibutuhkan pemahaman yang baik

[33] Dengan "gerakan petani" saya merujuk pada gerakan global umum yang meskipun demikian sangat beragam, ditempatkan dengan spesifik sosial dan proyek ekomogi, dan tetapi dengan sejarah dan politik umum dengan perlawanan pada komodifikasi tanah, bibit dan pangan dan pada rezim perdagangan WTO yang mana kebijakannua secara sistematis tidak menguntungkan dan merampas petani kecil di seluruh dunia. Kendatipun pembagian dan organisasi pemimpin seperti Via Campesina, ada persatuan dalan keberagaman dalam proyek "ketahanan pangan", yang mana sebaliknya membentuk (dan mendukung) proses politik (sebagai contoh, lihat Desmarais 2007).

tentang perbedaan temporal dan spasial. Perbedaan temporal terletak pada gerakan ini sehubungan dengan *agrarian question*, yang pertama kali dirumuskan pada akhir abad XIX. Perbedaan spasial menyangkut hubungan ontologis dari gerakan petani pada masa perkembangan kapitalisme dan masa depannya. Sebagaimana saya akan menyarankan, perbedaan ini saling berhubungan, dan sebenarnya gerakan petani itu sendirilah yang menggarisbawahi arti pertanyaan baru dari *agrarian question*, politisasi relasi pertanian dan pangan di dalam maupun di luar kapitalisme neoliberal.

Perbedaan Temporal

Secara temporal, gerakan petani saat ini pada dasarnya telah mengubah asumsi dan proyeksi permasalahan agraria klasik. Berdasarkan kaitannya dengan transisi politik kapitalis di bidang pertanian, permasalahan agraria awal adalah pertanyaan tentang bagaimana petani akan mengidentifikasi secara politik tentang berbagai proses 'diferensiasi' atau 'disintegrasi' aktivitas pertanian, sebagai kapital yang disubordinasi oleh kepemilikan tanah (cf. Lenin 1972). Karl Kautsky, seorang 'proletar eksklusif' (Alavi 1987), tetap berpendapat bahwa sentralisasi kepemilikan atas tanah sebagai kapital pertanian merupakan sesuatu yang bergantung, begitu juga sikap petani secara politik juga bergantung pada kombinasi antara harga pangan yang mampu dibeli oleh petani, dan upah buruh yang sebenarnya (1988, 317).

Sebagaimana yang dianalisis oleh kalangan rezim pangan, bahwa harga pangan semakin diatur oleh hubungan perdagangan internasional (Friedmann 1978). Akses ke imperium dan harga makanan murah, ironisnya menumpulkan potensi kontradiksi antara petani dan kaum proletar, upah tetap rendah, dan praktek pemerasan ter-

hadap petani-petani di Eropa tetap terjadi. Pada pergantian abad ke 20, perpisahan dan gabungan kontra gerakan agraria dan gerakan buruh menyimpang dari proyeksi revolusioner Marxis, dan berkontribusi pada resolusi sosial-demokratis sebagaimana dijelaskan oleh Polanyi (1957). Resolusi itu menyatakan sebuah dimensi yang diabaikan oleh permasalahan agraria klasik, yaitu, relasi sejarah-dunia yang berkontribusi terhadap transformasi sosial pada awal abad kedua puluh. Artinya, ini adalah bagian dari kompromi sosial-demokratis, yang berbasis pada sistem upah yang menganut prinsip Fordist, termasuk merkantilisme pertanian, sementara itu finansial-publik dilindungi oleh *First World Agriculture*, yang diidealisasikan sebagai pertanian keluarga (Friedmann dan McMichael 1989). Negara Dunia Ketiga telah dihadapkann oleh pertanian seperti itu sejak merkantilisme, yang berpuncak pada munculnya G-20 pada tahun 2003 di Kementrian WTO di Cancun.

Formulasi permasalahan agraria klasik, yang sekarang menjadi bermasalah pada abad ke-21, yaitu berpusat pada negara-sentris serta mencerminkan gaya pembangunan nasional pada akhir abad-19. Sebagaimana diungkapkan oleh Henry Bernstein, permasalahan klasik agraria juga menyangkut pengembangan *rumah* pasar modal sebagai '*agrarian question of capital'*, dan secara khusus kapital industri. Dalam konteks transisi ke kapitalisme, tenaga kerja serta modal juga diasumsikan sebagai permasalahan agraria, karena kedua kelas definitif ini memunculkan minat yang sama dalam transformasi dari feodalisme ke kapitalisme, dan hubungan sosial pra-kapitalis'(2003, 209).

Ironinya adalah bahwa proyek itu bersifat merujuk pada pengelaman (*self-referensial)* Eropa, yang berfokus pada modernisasi negara-bangsa, hubungan sosial pra-kapitalis dan praktek imperium, yang semakin terdegradasi (Davis 2001). Di sini, petani menjadi obyek eksploitasi,

daripada dieliminasi, seperti dalam skenario modernis. Dengan kata lain, kaum tani pada zaman kolonial adalah alas untuk -tenaga kerja upah metropolitan, peran ini tidak diperlihatkan dalam teori-teori sosial dengan kaitannya terhadap bentuk-bentuk akumulasi sosial modern, yang didasarkan pada model pembangunan Eropa-sentris sebagai proses nasional.[34]

Hal yang diperdebatkan juga adalah ide *developmentalisme* telah ikut melembagakan trayektori petani di sistem negara. Tentu saja, sesuai dengan termin Perang Dingin, di bawah tekanan pemberontakan petani, pengorganisasisan model pertanian keluarga Amerika menjadi inspirasi bagi organisasi seperti *Latin American Alliances for Progress,* revolusi hijau, dan itu juga dilakukan melalui kebijakan lembaga-lembaga asing seperti USAID di Mesir (Mitchell 2002). Tapi fase *developmentalisme* ini pada dasarnya adalah selingan nasionalisme ekonomi yang muncul akibat keresahan petani, merkantilisme sesudah perang, dan dekolonisasi politik yang disahkan pada tahun 1960 oleh PBB dalam *Declaration of Independence*.[35] Sementara terjadi pengorganisasian petani kembali disertai dengan semangat—-apa yang Araghi sebut sebagai—*-first struggle'*, '*first served'* yang konservatif dalam reforma agraria di Asia Timur dan Amerika Latin (1995, 346), proses penghancuran petani (*de-peasantization*) juga berlangsung di negara Dunia Ketiga, di bawah tekanan dari rezim bantuan pangan (Friedmann 1982), dan

[34] Cf. Tomich (2004) yang mefokuskan kembali dan merumuskan pemahaman sejarah kapitalisme melalui "prisma perbudakan", beragumen bahwa hubungan antara upah dan perbudakan masalah yang gawat dalam sejarah ini daripada menganggap upah buruh menjadi hubungan yang pasti.

[35] Untuk catatan kasus yang lengkap dari Reforma Agraria selama periode ini, lihat Rosset et al (2006)

ketidaksetaraan yang terjadi akibat revolusi hijau (Gupta 1998).

Ketika proyek neoliberal yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai 'globalisasi', telah diganti oleh periode nasionalisme ekonomi, proses penghancuran petani di Dunia Selatan telah terjadi secara intensif di bawah gabungan antara tekanan terhadap dukungan publik pada petani, praktek *Revolusi Hijau* kedua (bioteknologi yang diprivatisasi dan ekspor pertanian untuk memasok konsumen global), Reforma Agraria yang dipimpin pasar,[36] dan aturan perdagangan WTO yang memfasilitasi penargetan pasar di selatan dengan menurunkan harga surplus ekspor makanan secara artifisial dari Utara, adalah bentuk penghancuran itu. '*Rezim korporasi pangan'*, yang mengandalkan subsidi negara dengan mengurangi harga pertanian sebanyak 57 persen di bawah harga sebenarnya *(People's for Food Sovereignty 2003)* membuat "*harga pasar dunia*" yang diciptakan melalui liberalisasi perdagangan yang menimbulkan pengaruh yang sangat buruk pada petani kecil dimana-mana (Mc Michael2005)[37]. Sebagai contoh, Sharma (2004) melaporkan:

> Indonesia digolongkan di antara sepuluh eksportir beras teratas sebelum WTO memberlakukan kebijakan-

[36] Untuk analisis yang lengkap mengenai pasar tanah sebagai solusi neoliberal untuk desa miskin, lihat Borras (2006).

[37] Di tempat lain saya telah menggambarkan "harga pasar dunia" sebagai instrumen rezim perusahaan pangan dari perampasan (McMichael 2005). Tekanan suplai pangan dari agrifuel dan dari perubahan diet sosial di India dan China, khususnya yang berhubungan dengan harga pangan, pada tahun terakhir harga jagung dua kali lipat dan harga gandum naik 50 %, mengantarkan dunia pada "tonggak-era-kelebihan-makanan (Vidal 2007). Apakah dan untuk taraf apa secara sosial konstruksi kekurangan pangan akan mempengatuhi mekanisme "harga dunia" (dibentuk melaui perangkaian sokongan pertanian utara dan harga komoditi) akan tetap terlihat.

> nya. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1998, Indonesia telah muncul sebagai importir beras terbesar di dunia. Di India, sebelumnya sebagai produsen terbesar sayuran di dunia, terjadi impor sayur hampir dua kali lipat hanya dalam rentang satu tahun - dari Rs92.8 juta pada tahun 2001-02 menjadi Rs171 juta di 2002-03. Yang lebih parah lagi adalah Peru, yang impor makanannya meningkat secara dramatis setelah liberalisasi. Makanan impor sekarang diperhitungkan pada taraf 40 persen dari total konsumsi pangan nasional. Impor Gandum dua kali lipat pada tahun 1990, impor jagung, menyusul produksi dalam negeri, dan impor susu naik tiga kali dalam pertengahan pertama dari dekade sebelumnya, betul-betul memusnahkan petani Peru.

Dalam keadaan ini, di mana kebijakan *dumping* pangan menindas jutaan petani (Madeley 2000), krisis agraria di akhir abad kesembilan belas, yang dipicu oleh bahan makanan murah dari negara-negara baru dan negara jajahan kolonial yang telah disamaratakan saja, khususnya terjadi melalui sentralisasi pertanian kapitalis di negara utara, melalui resolusi merkantilisme setelah runtuhnya rezim perdagangan bebas di Britania. Sedangkan resolusi dari permasalahan klasik agraria itu dimediasi oleh proteksionisme GATT, yang semakin melembagakan perusahaan peternakan yang mempengaruhi di hampir seluruh dunia bagian Utara, permasalahan agraria saat ini telah diglobalisasi melalui media usaha pasar dunia. Namun, bukannya memainkan peranan cadangan yang konservatif dalam kelas politik dari kapitalis modernitas, gerakan petani malah mengubah permasalahan itu. Hal ini bukan lagi mengenai transisi agraria melalui akumulasi yang mengistimewakan kapital, melainkan transformasi agraria terhadap akumulasi imperatif, yang diperjuangkan oleh koalisi petani transnasional dan gerakan keadilan

sosial lainnya, yang berupaya untuk mende-*fetish*-isasi akumulasi.

Alih-alih mempertahankan sebuah dunia yang hilang, gerakan transnasional seperti Via Campesina berusaha untuk mendapatkan sebuah dunia baru—-dunia di luar bencana rezim pasar korporasi, di mana agrarianisme dinilai kembali sebagai pusat sosial dan keberlanjutan ekologis. Lebih dari sekedar manuver untuk melindungi diri sendiri, kaum petani memproklamirkan gerakan kedaulatan pangan[38] yang menyerukan masalah proyek "keamanan pangan" neoliberal, dan kiasan yang ditutupi dengan slogan "memberi makan dunia" dengan surplus pangan yang dihasilkan di Utara (McMichael 2003). Sebagaimana tercantum dalam website Via Campesina (2003):

> Kebijakan Neoliberal memprioritaskan perdagangan internasional, dan bukan pangan untuk rakyat. Mereka tidak memberikan kontribusi sama sekali untuk pemberantasan kelaparan di dunia. Sebaliknya, mereka telah meningkatkan ketergantungan masyarakat 'pada impor pertanian, dan telah memperkuat industrialisasi pertanian, sehingga membahayakan warisan genetik,

[38] Pertama kali diartikulasikan di World Food Summit tahun 1996 oleh gerakan petani transnasional, Via Campesina. Konsep dari ketahanan pangan pada umumnya menyerukan "hak bagi setiap bangsa untuk mempertahankan dan membangun kapasitas mereka untuk memproduksi bahan pokok dengan menghargai kebudayaan dan produksi keanekaragaman dan hak untuk menghasilkan makanannya sendir dalam wilayahnya sendiri (dikutip dari Desmarais (2007,34). Dalam mengembangkan "hak rakyat, komonitas dan negara untuk menetapkan agrikultur mereka, buruh, perikanan, pangan dan kebijakan tanah yang mana secara ekologi, ekonomi dan budaya sesuai dengan keadaan mereka yang unik" (dikutip dari Ainger 2003,11). Konsep dari ketahanan pangan meneliti fungsi sosio-ekologi agrikultur hingga koordinat wilayah (sebagai taktik politik).

budaya dan lingkungan bumi kita, serta kesehatan. Mereka telah memaksa ratusan juta petani untuk meninggalkan praktek pertanian tradisional mereka, hingga terjadi eksodus pedesaan atau imigrasi. Lembaga internasional seperti IMF (Internasional Monetary Fund), Bank Dunia, dan WTO (World Trade Organization) telah menerapkan kebijakan yang didikte oleh kepentingan perusahaan-perusahaan besar transnasional dan negara adidaya. WTO adalah lembaga yang benar-benar tidak memadai untuk menangani masalah pangan dan isu-isu yang terkait dengan pertanian. Oleh karena itu Via Campesina ingin WTO keluar dan jangan bicara masalah pertanian.[39]

Impor pertanian dengan harga rendah di seluruh dunia yang menghancurkan ekonomi pertanian lokal; misalnya susu impor dari Eropa ke India, daging babi Amerika ke Karibia, daging dan sereal dari Uni Eropa ke Afrika, dll. Produk-produk tersebut diekspor dengan harga yang rendah, berkat praktek dumping. Amerika Serikat dan Uni Eropa punya praktek *dumping* baru yang diratifikasi oleh WTO, menggantikan subsidi ekspor dengan penurunan harga komoditas pertanian yang kuat digabungkan dengan pembayaran langsung yang

[39] Desmarais mencatat slogan dari "WTO Out of agriculture" (WTO keluar dari agrikultur) adalah kompromi diantara cabang-cabang Via Campesina. Sementara KRRS di India mendukung pembongkaran WTO. Canada's National Farmer's Union (NFU) dan Mexico's Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonomas (UNORCA) menyokong pengubahan hubungan kekuasaan dari sistem regulasi perdagangan internasional dan French Confederation Paysanne mengusulkan perjanjian hak asasi manusia untuk WTO. Namun, "via campesina menuntut pengurangan kekuasaan organisasi dengan mengambil agrikultir dari wilayah kekuasaannya, sebagaimana membangun struktur baru dalam sistem UN yang ditransformasi, lebih demokratis dan transparan" (2007,111).

dilakukan oleh Negara. Untuk mencapai kedaulatan pangan, *dumping* harus dihentikan.

Kritik mengenai *dumping* tidak hanya tentang praktek perdagangan yang tidak adil. kritik ini juga memberikan penjelasan sirkulasi politik yang sebenarnya tentang pembangunan organisasi pasar yang didasarkan pada 'pembentukan' pleonasme petani, melalui cara-cara politik. Krisis di pedesaan telah menggantikan permasalahan agraria utama tentang implikasi politik pada transformasi kelas untuk aliansi politik nasional. *Home markets* tidak lagi jelas, dan regulasi politik pasar global pada dasarnya telah diprivatisasi, dengan cara, negara memainkan peran 'pembersih', dimana mereka benar-benar terlibat. Dalam versi klasik, bahan pangan teregistrasi melalui dampak harga pada identitas kelas dan atau pola akumulasi. Tetapi saat ini, seperti yang diajukan oleh gerakan kedaulatan pangan, bahan pangan mencakup seperangkat hubungan yang lebih luas, dan dia menjadi sebuah jendela sosial, demografi dan bencana ekologi akibat neoliberalisme.

Seperti Via Campesina katakan: "Gerakan besar-besaran untuk ketahanan pangan di seluruh dunia ikut mendorong peningkatan gerakan rakyat" (2000). Perdagangan pada surplus pangan memberikan kontribusi terhadap siklus pencabutan hak milik, yang pada gilirannya membuat tanah dan buruh pertanian tersedia untuk perusahaan dan dan untuk mendukung ekspor pertanian sebagai biaya tenaga kerja di Utara. Penyewaan tanah dan regulasi lingkungan muncul untuk mendorong penyebaran agribisnis (termasuk *agrofuel*)[40] perkebunan dan pabrik pengolahan makanan di Selatan yaitu sebuah

[40] Lihat sebagai contoh, isu spesial dalam Agrofuels di Seeding July 2007, ada di http://www.grain.org.

lembaga *revolusi ritel* yang baru-baru ini sedang dibangun (McMichael dan Friedmann 2007). Proses penghancuran petani (*de-peasantization)* selanjutnya memberikan kontribusi kepada meningkatnya jumlah buruh kasar di pasar tenaga kerja dunia pada umumnya. Sedangkan pada skala nasional mungkin ada pemisahan *(decoupling)* radikal dari industrialisasi sebagai akibat urbanisasi (Davis 2006, 17), pada skala global akumulasi modal sangat tergantung pada sejauh mana siklus pencabutan hak milik petani terjadi (McMichael 2005). Secara bertahap skala permasalahan agraria telah bergeser dari problematika pembangunan bangsa hingga politik-ekonomi global.

Melalui transisi kapitalis dalam skala global, yang mengandalkan agar perusahaan yang memimpin proses produksi komoditas pertanian menerapkan 'prinsip penawaran yang paling murah',[41] dinamika rekursif harga dunia mengacaukan model *jalur-ketergantungan* nasional dari masalah agraria klasik. Kelebihan produksi dan rezim agro-ekspor yang disamaratakan, secara artifisial menekankan harga komoditas pertanian dan melemahkan pertanian di mana-mana. Sehingga:

> Thailand yang dikenal sebagai salah satu eksportir pangan terkemuka di dunia, khususnya beras. Namun

[41] Sebagaimana dicatat, subsidi pertanian dari utara global secara besar-besaran mendukung agrobisnis dengan menggandakan harga dari tunjangan pertanian, memungkinkan harga pasar jatuh hingga ke biaya rendah yang dibuat-buat (pada pedagang dan prosesor) yang mana sebaliknya menurunkan harga di seluruh pasar dunia. Gerakan ketahanan pangan, apakah itu di eropa atau selatan global mendukung ganjaran sosial untuk memproduksi barang publik seperti bahan baku/ makanan sehari-hari, jasa lingkungan dan lain sebagainya. Walaupun coordination paysanne Europeene (CPE) mengklaim: "tunjangan masyarakat pada agrikultur mungkin akan menjadi legitimasi, contohnya untuk kelangsungan keluarga petani aga ada di setiap wilayah, memberikan tunjangan ini tidak digunakaan untuk ekspor harga rendah" (dikutip dari Madeley 2006).

> studi di Thailand menunjukkan bahwa sementara negara mengalami peningkatan ekspor berasnya, petani tidak mendapatkan keuntungan. Harga pertanian tidak meningkat selama dekade terakhir. Stagnasi dalam pendapatan riil telah disertai dengan kenaikan tajam dalam beban hutang rumah tangga pedesaan. Singkatnya, ekspor lebih tidak mengarah ke peningkatan kesejahteraan petani. (Jacques-Chai Chomthongdi, dikutip dalam LSM 2004).

Dengan menormalkan fenomena dari 'harga pasar dunia', yang menarik perhatian adalah sistem subsidi perusahaan sebagai dasar perdagangan yang dilakukan WTO, gerakan kedaulatan pangan pada dasarnya telah mengubah permasalahan agraria. Hal tersebut mengungkapkan peran negara (lembaga-lembaga multilateral) dalam '*global forces'* yang menghasilkan tenaga kerja cadangan dari petani yang terampas untuk proyek pengembangan perusahaan, yang kemudian menghasilkan "produksi massal kantong-kantong pemukiman kumuh" (Davis 2006, 13).

Perbedaan Spasial

'Perbedaan ruang' dari gerakan petani transnasional merujuk pada ontologisnya sehubungan dengan proyek neoliberal. Seperti yang disarankan di atas, kedaulatan pangan melibatkan gerakan secara kritis dengan infrastruktur politik neoliberal kapitalisme, dan mendenaturalisasi narasi pasar sebagai prakondisi untuk menguraikan sebuah narasi alternatif. Ini adalah tantangan untuk melihat terbentuknya modal di dalam relasi-relasi penundukannya, bukan dalam ucapan-ucapannya (cf. Beverley 2004), yang membuatnya menjadi ontologi agraria yang berbeda. Dimensi spasial menyangkut menempatkan ulang masalah agraria sebagai pusat—bukan sebagai tontonan politik dalam budaya politik industrialisasi, tetapi sebagai

suatu solusi politik untuk menangani bencana industrialisasi neoliberal.

Perbedaan spasial dibingkai dengan sangat apik melalui penjabaran kontemporer Harvey mengenai perlawanan ('anti-globalisasi') sebagai "gerakan melawan akumulasi dengan penjarahan (*accumulation by dispossesion)"* dan gerakan di sekitar "perluasan reproduksi" (2005, 203). Yang pertama mengacu pada gerakan tani, mereka menentang penggusuran, penarikan subsidi publikc untuk pertanian kecil, dan apropriasi lingkungan, pengetahuan dan budaya, yang menguatkan nilai-nilai dan budaya di luar hubungan akumulasi modal. Yang terakhir ini termasuk gerakan dimana 'eksploitasi upah buruh dan kondisi menentukan "upah sosial" sebagai pusatnya (2005, 203). Harvey mengklaim bahwa upaya untuk menemukan hubungan organik antara perbedaan gaya gerakan merupakan 'sebuah desakan teoretis dan beban praktis' (2005, 203).

Perdebatan ini juga menyangkut politik Via Campesina yang menyatukan resistensi tersebut secara seimbang dalam menghubungkan kuatnya gerakan ketahanan pangan dengan percepatan penghilangan hak kaum tani. Industrialisasi neoliberal pertanian dalam skala dunia secara bersamaan menghasilkan buruh kasar dan mengurangi biaya upah. Penggabungan sirkulasi politik dengan politik produksi dan reproduksi memberikan kritik pada sejarah dunia terhadap kondisi dan konsekuensi dari rezim perusahaan pangan (cf. McMichael 2005). Via Campesina merupakan bentuk pembalikan reifikasi dan merupakan eufemisme dari 'perdagangan bebas', pengungkapan tentang sejarah negara/perusahaan dan ketidakadilan, serta konsekuensi fatal yang diakibatkan ketidakadilan itu. Selanjutnya untuk menunjukkan bahwa perluasan reproduksi pada modal tergantung pada bangkitnya

perlawanan dengan isu upah tenaga kerja, juga menunjukkan bahwa perusahaan pertanian, tidak hanya menyangkut persoalan dia menghasilkan makanan murah, tapi juga tentang mengamankan kondisi baru untuk akumulasi dengan menurunkan biaya tenaga kerja di seluruh dunia. Dalam pengertian ini, pertanian menjadi solusi utama.

Dalam membangun hubungan yang seimbang antara gerakan melawan pencabutan dan terhadap hubungan perluasan reproduksi, Via Campesina mendesak kita untuk menerima bahwa akumulasi tidak hanya tentang tujuan utama dan sentralisasi kekuatan modal, namun juga tentang praktek penjarahan alternatif dan pilihan alternatif terakhir untuk masa mendatang. Secara khusus, ontologi modernitas kapitalis, yang berakar pada ekonomisme, mengesampingkan tempat bagi petani, dan secara fisik mengusir mereka dari tanah, dan secara epistemologis menghapusnya dari sejarah. Sebaliknya, ontologi dari gerakan kedaulatan pangan mengkritik reduksionisme dan janji-janji palsu neoliberalisme, menempatkan praktek dan masa depan di luar subyek pembangunan liberal, dan keunggulan ilmu pengetahuan. Ontologi ini muncul didasarkan pada proses penilaian kembali pertanian, pedesaan dan pangan sebagai bagian dari keberlanjutan sosial dan ekologi, dimulai dengan kembalinya kekuasaan kepada kaum tani.

Dalam teori ekonomi ada pendapat yang mengatakan mengenai tersingkirnya petani sebagai konsekuensi dari hukum tentang meningkatnya produktivitas, yang diperkuat oleh pendapatan yang rendah serta permintaan yang tinggi terhadap komoditi pangan, sehingga terjadilah penurunan populasi pertanian. Yang dibahas di sini adalah asumsi mengenai kondisi dan konsekuensi dari meningkatnya produktivitas pertanian. Seperti *Logika Ekonomi*

yang menekankan pertumbuhan secara kuantitatif, dan standardisasi pertanian dalam hal input-output. Disamping itu, efek eksternal terhadap ekologi seperti polusi kimia, erosi tanah dan genetik, emisi karbon, dan mengabaikan biaya energi dan struktur subsidi untuk agribisnis, tidak dilihat secara serius sebagai biaya ekonomi agro-industrialisasi (Martinez-Alier2002, 146-7). Dengan demikian, pertanian skala kecil dianggap tidak efisien—-secara jelas telah ditegaskan oleh tren *de-peasantisasi* yang terjadi. Meskipun *intisari penilaian ekonomi tersebut dibuat-buat* namun tetap memiliki konsekuensi, nyata, dan menimbulkan efek yang keras terhadap kaum tani.

Sebagai kemungkinan lain, perspektif ekologis menawarkan berbagai nilai-nilai multifungsi dan kontribusi epistemis dari pertanian ke manusia dan alam. Ini adalah perubahan ontologis yang menerangkan bahwa gerakan kedaulatan pangan dan pembelaannya berupaya untuk menghargai kembali pertanian kecil. Bahkan ketika neoliberalisme berupaya untuk mengatasi batas-batas ekonomismenya, sebagaimana Martinez-Alier mengingatkan kita:

> Takaran moneter yang diberikan oleh ahli ekonom untuk dampak negatif eksternalitas atau pelayanan lingkungan merupakan konsekuensi dari keputusan politik, pola kepemilikan properti dan distribusi pendapatan dan kekuasaan. Sehingga ada unit pengukuran umum (*common unit of measurement)*, namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat membandingkan alternatif dalam basis rasional melalui evaluasi multi-kriteria. Atau, dalam hal lain, memaksakan logika penilaian moneter. Itu semua tidak lebih dari sebuah latihan dalam kekuasaan politik. Penghapusan logika penilaian *moneter*, atau lebih tepatnya mengikatnya ke tempat yang tepat sebagai satu-satunya pandangan, membuka ruang politik yang luas untuk gerakan lingkungan. (2002,150).

Membangun ruang politik merupakan komponen konsolidasi gerakan kedaulatan pangan dari sebuah ontologi yang menolak narasi modernitas, dan industrialisme, dari organisasi kaum tani sebagai mimpi yang tak terpenuhi dan menegaskan sebuah alternatif sejarah berdasarkan narasi dan nilai yang tak terbandingkan sebagai dunia yang nyata, bukan logika abstrak yang membenarkan akumulasi dengan penjarahan. Hal ini adalah suatu ontologi yang memberikan suara politik dan perjuangan *pada* tanah, di samping perjuangan *untuk* tanah (Flavio dan Sanchez 2000), sehingga mempolitisir hubungan ekologi-sosial. Paul Nicholson, perwakilan Eropa dalam *International Coordinating Committee* dari Via Campesina mengatakan: "sampai saat ini seluruh dunia berdebat mengenai kebijakan agraria, gerakan petani telah hilang: kami tidak memiliki suara. Alasan utama untuk keberadaan dari Via Campesina adalah untuk menjadi suara itu dan untuk berbicara untuk terciptanya masyarakat yang lebih adil". Lebih lanjut lagi, International Planning Committee (IPC) untuk Kedaulatan Pangan (sebuah koalisi yang kuat dan heterogen yang terdiri dari berbagai organisasi, dimana di dalamnya Via Campesina juga tergabung) menyatakan:

> Tidak ada Reforma Agraria yang dapat diterima dan hanya didasarkan pada distribusi tanah. Kami percaya bahwa reforma agraria sekarang harus melingkupi visi kosmik dari wilayah kaum petani, petani tanpa tanah, masyarakat adat, pekerja di pedesaan, nelayan, penggembala nomaden, suku-suku, keturunan afrika, minoritas etnik, dan pengungsi, yang menyandarkan pekerjaan mereka pada produksi makanan dan yang menjaga hubungan, saling menghormati dan menjaga keharmonisan dengan bumi (*Mother Earth)* dan lautan. (2006, n.p.)

Dalam arti lain, gerakan kedaulatan pangan membentuk peningkatan signifikan dalam representasi politik ekonomi (Patel 2006) yang menggabungkan politisasi kebijakan neoliberal yang mengklaim hak-hak melebihi pasar dengan identitas agraria yang berdasarkan nilai kompleks yang dirajut bersama dengan subjektivitas ekologis dan pelayanan sebagai syarat untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan. Cara bertahan para petani tidak hanya sekedar untuk melestarikan budaya, namun penguatan praktek budaya yang berkomitmen untuk mengatasi subordinasi pangan dan pertanian untuk menetapkan harga juga menjadi penting. Dengan demikian, gerakan kedaulatan pangan menegaskan tidak membandingkan *pertanian dan diversifikasi pangan* dengan pertukaran-nilai dari rezim monokultural yang sasarannya adalan pangan yang kemudian mengakibatkan penggabungan produksi dan konsumsi ke dalam proses akumulasi kapital secara umum. Di saat yang sama, itu merupakan politik 'kewarganegaraan berbasis agrarian (agrarian citizenship)' (Wittman 2005), yang berbasis dan berkoalisi dengan gerakan keadilan sosial lainnya di pinggiran, atau di tengah proses *perluasan reproduksi kapital*. Jadi, *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) merekonstruksi "pedesaan" sebagai dasar kewarganegaraan untuk menghadapi kelas elit Brasil dan politik neoliberal, dengan mengembangkan bentuk koperasi tenaga kerja pedesaan, memproduksi bahan makanan pokok bagi pekerja miskin, dan membangun aliansi serta menawarkan mata pencaharian untuk pengangguran di perkotaan (Wright dan Wolford 2003). Dan *IPC for Food Sovereignty* mengusung ide "kedaulatan pangan" bukan hanya visi tetapi juga platform bersama perjuangan yang memungkinkan untuk terus membangun kesatuan dalam keanekaragaman. Reforma agraria dan kedaulatan pangan berkomitmen untuk sebuah

perjuangan yang lebih besar untuk mengubah dominasi model neoliberal dan akan membawa kesimpulan ini kembali ke perdebatan, dan akan menggunakan ide-ide untuk menghadapi kebijakan badan internasional seperti FAO, dan pemerintah (2006, np).

Perdebatan juga ada dalam diskusi tentang ide menciptakan ruang untuk suatu ontologi alternatif, gerakan kedaulatan pangan tidak hanya menempati perspektif yang sangat penting untuk menantang neoliberal kapitalisme (cf. Starr 2001, 224), tetapi juga menegaskan ulang letak penting pertanian dalam modernitas pasca-kapitalis (Duncan 1996). *Pemusatan ulang pertanian dalam visi politik ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai 'masalah agraria mengenai pangan'*(McMichael).

Masalah Agraria Mengenai Pangan (*The Agrarian Question of Food)*

Terjadi pergeseran epistemologis dalam hal perumusan masalah agraria mengenai pangan, pergeseran itu terutama terjadi pada isu produksi ke reproduksi sosial. Dalam permasalahan agraria klasik, transisi politik pertanian dianggap sebagai model suprastruktur, di mana ia memunculkan hubungan produksi kapitalis yang mengembangkan kemungkinan untuk kebangkitan politik kaum proletar. Kerangka acuan tersebut dibentuk oleh sebuah narasi reproduksi yang diperluas dari kapital (industri), yang pada gilirannya menutup arti dari 'reproduksi sosial' dan membatasinya pada reproduksi tenaga buruh yang hanya berkaitan dengan upah buruh. Meskipun marginalisasi *tenaga kerja rumah tangga*, yang oleh Polanyi dipahami sebagai ontologi kapitalis sebagai hal 'fiktif', karena pada satu waktu yang sama ia membatasi dan menstimulasi 'ditemukannya masyarakat' (*discovery of society*)—yang dilembagakan dalam resolusi "gerakan

ganda" melalui ikatan sosial yang terkait dengan isu warga negara yang muncul pertengahan abad kedua puluh. Meskipun visi Polanyi terbentuk dalam istilah negara-sentris pada waktu itu, namun visi itu menekankan masalah reproduksi sosial yang terabaikan dengan *logika akumulasi modal.* Selain itu, daya tarik konsep Robert Owen tentang kooperasi yang menekankan relasi material yang terikat secara sosial (*socially-embedded material relations*), memberikan konsep tandingan terhadap subjektivitas liberal tentang 'ekonomi untuk kepentingan pribadi'.

Gerakan kedaulatan pangan sebenarnya juga dapat membuat klaim serupa, yaitu bahwa proyek neoliberal telah membentuk sebuah *'pasar yang mengatur dirinya sendiri (self-regulating market)'* dalam skala global dengan melingkungi (*enclose*) masalah reproduksi sosial dengan legitimasi retorika seperti 'memberi makan dunia'. Dengan kata lain, dalam era di mana pasar—-bukan negara—-yang mengorganisir prinsip itu semua, sehingga reproduksi sosial muncul sebagai fungsi pasar. *WTO* memainkan peran sebagai bidan dalam proyek ini, dia mengelola sistem perdagangan yang dibentuk untuk 'Ketahanan pangan' melalui akses pasar. Namun, gerakan kedaulatan pangan berpendapat sebaliknya bahwa "keluarga petani dan petani yang memproduksi keperluan rumah tangga bertanggung jawab untuk sekitar 90% dari produksi pangan dunia, bahkan banyak dari produksi mereka yang tidak melewati pasar" (People's Food Sovereignty 2003).[42] Dengan demikian, reproduksi sosial melalui pasar dunia tidak efektif dan bahkan itu semua mengizinkan kekerasan yang terus-menerus terhadap bentuk reproduksi sosial, serta

[42] Menurut McCalla (1999) sekitar 90% dari konsumsi pangan dunia yang diproduksi; sementara masyarakat kota bergantung pada pasar hampir di seluruh konsumsi pangan mereka, populasi desa menkonsumsi 60 persen dari makanan yang mereka produksi.

pelebaran dari 'pengecualian sosial' di pedesaan dan daerah kumuh di perkotaan yang luas (Davis 2006; Cameron dan Palan 2004). Tanggapan IPC pada hal-hal tersebut bersifat programatik dan subjektif.

Secara programatik, dari perspektif global, dalam konteks kedaulatan pangan, tujuannya adalah untuk mewujudkan reforma agraria yang berpihak kepada rakyat, memberikan layanan kesehatan, kemudahan dalam menyediakan makanan untuk masyarakat serta perwujudan keadilan sosial. Reforma agraria dapat mengakhiri eksodus besar-besaran rakyat pedesaan ke kota, yang telah membuat kota-kota tumbuh tidak teratur dan dalam kondisi yang tidak manusiawi (IPC for Food Sovereignty 2006).

Dan konfederasinya di lingkup Eropa, *Coordinacion Paysanne Européene* (CPE),mengusulkan:

> Uni Eropa akan mempunyai banyak keuntungan dengan mempertahankan keberlanjutan keluarga pertanian, tidak hanya untuk menjamin pasokan pangan (ketahanan pangan), tetapi juga sebagai peran sosial dan fungsi lainnya dalam pertanian. Kecenderungan sekarang harus mulai dipusatkan pada pertanian, peternakan kecil dan menengah harus dipelihara, karena mereka memainkan peran penting dan tidak dapat digantikan dari segi kualitas dan diversifikasi produksi pangan, perawatan lingkungan, kayu dan pembabatan hutan, pendudukan wilayah, dll. Mempertahankan jumlah orang yang bekerja di pertanian bukanlah tanda keterbelakangan ekonomi namun menjadi nilai tambah. (2003,n.p.).

Via Campesina menyuarakan konsep Polanyi *'discovery of society'* dengan menunjukkan bencana pasar, yang secara subyektif sebagai masa melewati bencana pasar, dengan mendorong proteksionisme negara-sentris dengan suatu program hak substantif:

> Pemerintah harus membentuk kebijakan untuk pemulihan kondisi ekonomi petani kecil dengan menyediakan alokasi yang adil untuk produksi–produksi seperti air, hutan, sumber daya alam dan tambang sebagai sumber penghasilan untuk petani, serta mengakui hak-hak mereka sebagai produsen dalam masyarakat, dan juga mengakui hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. (2005, 25, 31)

Hak untuk menciptakan peradaban dan mengelola sumber daya alam merupakan penegasan untuk menekankan perbedaan ontologis yang dijalankan Via Campesina, yang merupakan makna yang lebih luas dalam istilah Wittman yaitu 'kewarganegaran berbasis agraria [*agrarian citizenship]'*. Hal tersebut melibatkan *reteretorialisasi* negara melalui revitalisasi ekologi makanan lokal di bawah pengurusan petani kecil untuk kepentingan masyarakat luas. Polanyi menyatakan bahwa dorongan sosial untuk melindungi pasar menghasilkan *discovery of society*, yang diwujudkan melalui hak warga negara. Sebaliknya Gerakan Kedaulatan Pangan mengakui keterlibatan negara dalam proyek pasar neoliberal[43] "Penemuan kembali" peradaban adalah hal substantif, bukan secara formal dalam pembentukan hak-hak harus dilakukan sebagai sarana untuk mencapai akhir dari reproduksi sosial, bukan mengakhiri diri mereka (McMichael 2005). Sebagaimana Raj Patel katakan, gerakan kedaulatan pangan memandang hak sebagai "cara untuk menggerakan hubungan sosial" yang pada gilirannya "merupakan suatu seruan untuk re-politisasi massa mengenai politik pangan dengan menyerukan rakyat untuk mencari tahu hak pangan

[43] Berbeda dengan International Federation of Agriculture Producers (IFAP) yang mana menerima prinsip neoliberalisme dan bekerja di WTO mengusahakan untuk memperbanyak kesempatan petani (Desmarais 2007,105).

yang mereka inginkan dalam komunitas mereka, mengingat kebutuhan masyarakat yang berbeda seperti iklim, geografi, preferensi makanan, percampuran sosial dan sejarah" (2007, 88, 91).

Apa yang menjadi masalah di sini berangkat dari problematika bahwa apakah masalah agraria dapat diselesaikan untuk modal, atau tenaga kerja. Daripada melihat petani sebagai seorang perampas dari politik kelas revolusioner, Via Campesina memutuskan asumsi ruang waktu dari teori sosial klasik serta mempolitisasi pengertian dari "perluasan reproduksi" kapital. Hal ini untuk melihat pencabutan hak petani dari modal/tenaga kerja yang memotong kaum tani sehingga membuat tenaga mereka juga ikut terampas dan menjadi pengangguran. Dengan demikian, mobilisasi petani adalah artikulasi kompleks yang terjadi pada krisis kapitalisme neoliberal. Pandangan ini menolak asumsi teleologis tentang kelas dan akumulasi yang berasal dari pemahaman produktivitas gerakan kapital melahirkan pandangan mengenai bahwa modal adalah bagian dari relasi dan sirkuit produksi. Dengan cara ini organisasi politik yang diprivatisasi dan memunculkan representasi dari pasar global sehingga muncul usulan untuk merestorasi masyarakat dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi. Demikian reformulasi masalah tentang hak-hak, reproduksi sosial dan keberlanjutan, petani membuat gerakan agraria memunculkan permasalahan agraria tentang pangan, di mana makanan merupakan perwujudan dari aspek sosial, budaya dan ekologis, lebih dari sekedar nilai materi. Seperti ungkapan gerakan petani dalam E-*Forum for Farmers* yang juga termasuk dalam Via Campesina, menyatakan:

> Seorang harus kembali membangun hubungan dengan *mother earth* mereka—yang telah memelihara mereka—

> dengan cara mempraktikkan pertanian dengan seimbang melalui unsur-unsur alam. Pertanian yang tidak merusak alam dan menjaganya. Di atas itu semua, apakah kita makan harus memuaskan kebutuhan fisiologis kita dengan maksud tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Saat ini 843 juta orang di dunia dan di antaranya tiga perempat petani kecil menderita kelaparan (gizi buruk atau kurang gizi). Yang pertama adalah tantangan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis penduduk dunia terhadap makanan yang cukup kualitasnya serta kuantitasnya. berbagi sumber daya alam dan praktek pertanian yang berkelanjutan berdasarkan aturan pasar yang berkeadilan. Apa yang kita makan juga dibentuk oleh kebudayaan, pertanian dan faktor kuliner. Aspek budaya ini perlu dipertahankan dengan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dan makanan sehari-hari. Inilah yang memberikan kontribusi pada kekayaan dari bumi kita. (Jean-Baptiste Pertriaux, dikutip dalam Pimbert et al. 2005, 15)

Dari sanalah untuk menegaskan kembali peran dasar pertanian dalam peradaban—di epistemologis, bukan sekedar kronologis. Seorang petani yang lain menyatakan:

> Siapapun yang berbicara tentang kehidupan harus berbicara mengenai air dan tanah, elemen yang sama pentingnya seperti udara untuk hidup. Kehadiran pertanian muncul dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk membuat hidup lebih lama dan berkualitas. Dari subsisten pertanian yang harus lebih mandiri dan hemat sumber daya karena pembatasan ruang dan kuantitas dari fungsi murni makanan, kami beralih ke 'commodisation'…….Kemudian kami menemukan globalisasi, sebuah kata yang bisa berarti penemuan dan pertukaran tetapi bagi kami itu adalah perbudakan, persaingan, pengambilalihan dan

> eksploitasi (tidak eksploitasi, tetapi selalu seperti itu.....). Dan delusi keagungan yang terus-menerus menginginkan lebih dan ingin mengambil alih dunia. Sebagai hasilnya tanah dan air berhenti menjadi elemen vital bagi kehidupan dan berubah menjadi aksesori dalam mengejar laba dan pangsa pasar. Gagasan makanan sangat tidak penting lagi sebagai petani kecil, mereka menghilangkan pengertian tentang hak dan kewajiban, kepekaan sosial, menghormati tenaga kerja untuk manusia dan untuk air dan tanah. (Chantal Jacovetti, dikutip dalam Pimbert et al. 2005, 10-11).

Membuat Sejarah

Permasalahan agraria mengenai pangan, memutar balikkan fokus utama dalam masalah transisi agraria. Gerakan kedaulatan pangan malah memunculkan masalah baru mengenai trajek dari narasi yang ada daripada narasinya sendiri. Dalam arti, seorang petani dituntut untuk membuat sejarah mereka sendiri. Dalam hal ini petani justru harus ditonjolkan karena mereka tidak bisa melakukan ini sama seperti yang mereka inginkan akibat Intervensi politik yang dikondisikan oleh sejarah krisis politik-ekonomi melalui tindakan yang keras. Hal tersebut ditekankan karena pembebanan yang berat pada hubungan pasar kapitalisme neoliberal dengan konsekuensi sosial dan ekologi di seluruh dunia yang mengakibatkan bencana. Kapitalisme terbukti memperdalam kontradiksi internal, tetapi dalam proses ini kondisinya diperumit dengan pencabutan hak politik yang melampaui analisis kelas. Hubungan komodifikasi alam dan intelektual(*qua* tenaga kerja sosial) mengukuhkan nilai material dan budaya yang berbeda dari dominasi wacana ekonomi. nilai-nilai tersebut pada dasarnya berkisar mengenai ekologi, dan menyangkut bagaimana manusia membangun hubungan pemahaman dan pengalaman mereka dengan reproduksi sosial.

Selain merusak reproduksi sosial pada hubungannya dengan tanah, kapitalis neoliberal juga menghasilkan 'Planet kumuh' yang mengungkapkan batas-batas sosial dan ekologi dari narasi pembangunan yang dianutnya. Persediaan tenaga kerja yang tidak terbatas dari pedesaan yang bermetamorfosis menjadi pasokan pengangguran yang tak terbatas yang kemudian menghuni habitat baru perkampungan kumuh. Marx (1967) berpendapat, modal adalah awal dari kepemilikan, sebagai metodologis yang tepat sebagai titik analisis. Tetapi ini tidak berarti bahwa dari subordinasi kepemilikan lahan secara ekologis atau bahkan sosial tepat, bahkan dalam memajukan masyarakat sosialis yang ideal sekalipun. Seperti Duncan mengklaim:

> Sarana yang tepat, untuk cukup memberikan alasan sehingga berpotensi secara permanen adalah, sosialisme akan menjadi pola yang kompleks dari unsur federasi pada masyarakat dunia yang tersebar, yang masing-masing akan menyadari bahwa mereka tinggal dalam lingkungan hidup di dalam siklus lokal masing-masing dan secara kolektif, sehingga mereka harus menyisipkan kegiatan pertanian dan industri. Akan ada pembagian kerja yang kompleks namun melibatkan beberapa skala dari entitas sosial; lingkungan, kota, daerah, dan seterusnya sampai tingkat global dan semua itu saling terkait satu sama lain. Konsepsi ini sesuai dengan prinsip sentralitas pertanian yang secara eksplisit harus berhubungan dengan jelas, meskipun sulit dipahami. Tuduhan bahwa ada kecenderungan mendapat saran dari seorang anti-modern, bahkan kaum tani yang mendekati masalah sosial. Titik kuncinya adalah penolakan dengan klaim bahwa semua kasus modernitas tergantung dan digantungkan harus dengan meminggirkan pertanian. (1996,48-9).

Pentingnya gerakan kedaulatan pangan adalah untuk menegaskan bahwa dalam narasi modernitas-kapitalis, proyek sebenarnya justru bersifat *tak terpikirkan* (cf. Trouillot 1995). Kategori sosial ilmiah termasuk episteme pasar membuat sebuah pendekatan *peasantist* terhadap masalah-masalah sosial yang hampir tidak bisa dimengerti, pertanian pada akhirnya dipandang sebagai sebuah cabang industri yang terpisah dari siklus regenerasi alami. Hingga analisis permasalahan petani melalui lensa "bahwa dia pekerja" yang berdasarkan pada "permasalahan tenaga kerja sektor agraria" (Bernstein 2004) dengan merombak kaum petani sebagai *semiproletarian*. Sementara kaum tani mungkin mengkader gerakan perjuangan secara konvensional (kedaulatan,reforma agraria , dan perjuangan hak), istilah-istilah ini mengasumsikan makna baru dalam ontologi alternatif 'Peasantist' (cf. Mitchell 2002; McMichael 2006). Sehingga muncul perdebatan mengenai wacana kedaulatan pangan yang memberikan metode alternatif yang mengembangkan modernitas yang berpusat pada pertanian dan pangan.

"Kedaulatan pangan" sendiri adalah istilah bermasalah yang sepertinya membangkitkan kembali semangat proteksionisme. Namun pemahaman refleksif dari konsep ini terletak dalam kaitannya dengan politisasi "ketahanan pangan", sebagai desain neoliberal dalam memberi "makan" dunia melalui pasar. Judit Bodnar berpendapat bahwa para aktivis Bove dalam melawan McDonalds adalah perlawanan terhadap agro-industrialisme, dia tidak sekedar merupakan bentuk respon *territorialist* terhadap Amerika Serikat yang mengancam produsen keju di Perancis. Mereka mengusung prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan perdagangan yang adil sebagai respon terhadap "hubungan antara tanah dan bangsa". Inilah bentuk Identifikasi masyarakat sipil di dunia yang dikonfirmasi

oleh pihak oposisi dari Via Campesina sebagai keterlibatan negara dalam proyek neoliberal (termasuk oposisi untuk G-20 yang mengkampanyekan politik perdagangan bebas di Cancun), dan tujuan politik *re-territorializing* negara dari dalam (*Agrarian citizenship*) dan juga dari luar melalui lembaga multilateral yang didedikasikan untuk perdagangan yang adil serta keadilan dunia (Bove dan Dufour 2001). Pada dasarnya,"kedaulatan pangan" berfungsi untuk membentuk dominasi wacana sebagai slogan pergerakan dan sebagai taktik politik untuk memperoleh traksi dalam politik ekonomi internasional dalam perjalanannya ke arah moral ekonomi global yang terorganisir yang meliputi "keuntungan bersama" sebagai pengiring untuk "keunggulan komparatif" dan lisensi neoliberal atas manipulasi perusahaan terhadap sistem negara dan perekonomian dunia selayaknya papan catur yang digunakan untuk mengakumulasi.

Dalam terminologi sejarah dunia, gerakan petani berdiri di tepi gerakan sebelumnya yang konsern terhadap perjuangan hak dan kemandirian (self-determination). Tentu saja, *apa* yang dimaksud *self-determination* disini adalah pertanyaan yang hanya dapat diajukan dan dijawab oleh sejarah. Argumen saya adalah bahwa hal tersebut bukanlah masalah hak-hak petani itu sendiri . Sebaliknya, juga merupakan hak-hak yang dalam wacana ini juga menyangkut keberlanjutan masalah sosial dan ekologi yang digerogoti oleh proyek neoliberal. Membalik pencabutan kepemilikan (dispossesion) yang telah terjadi dan melakukan reclaiming hak untuk menggarap lahan, adalah tindakan umum dari reproduksi sosial dan reproduksi ekologi, dan semua itu penting untuk menyokong 2,5-3 juta pedesaan yang miskin yang terabaikan oleh rezim perusahaan pangan.

Visi kedaulatan pangan adalah menentang monopoli bahan pangan pada rezim perdagangan yang secara tidak

adil dan tidak berkelanjutan menyerukan persoalan subsidi ke negara-negara bersaing sehingga terikat untuk menstabilkan harga nasional dan mata uang mereka dengan mengubah aturan liberalisasi ekonomi. Aturan tersebut merusak prinsip-prinsip solidaritas antar manusia, dan menghancurkan populasi di pedesaan. Seorang kawan Jose Bove yaitu Francois Dufour mengklaim: "pasar telah menghapuskan batas-batas, dan berusaha untuk memaksakan keseragaman di planet ini. Sekarang terserah kita, sebagai warga dunia untuk meningkatkan hak bagi semua orang. Hak asasi manusia tidak berhenti pada batas-batas; kita yang harus mengglobalisasikan mereka"(Bove dan Dufour 2001, 190). Sementara tuntutan resmi yang menjamin hak-hak kedaulatan pangan (termasuk perlindungan) berpendapat bahwa isi dari hak-hak (akses terhadap tanah, kredit dan perdagangan yang adil, dan keputusan mengenai pangan untuk ditanam dan bagaimana) akan ditentukan oleh masyarakat dan negara itu sendiri. Sehingga penegasan substantif reformulasi hak kedaulatan melalui konteks spesifik terletak dalam subjektivitas sejarah.

Bagaimana cara mewujudkan dan mempertahankan subjektivitas yang baru? Ini adalah kunci pertanyaannya. Semuanya merupakan proses jangka panjang dari berbagai unsur gerakan kedaulatan pangan yang saling berkaitan. Tidak hanya mengenai perjuangan terhadap lahan, tetapi juga dengan perjuangan diatas lahan, yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan perjuangan kolektif melawan neoliberalisme (Desmarais 2007; Wright dan Wolford 2003). Di tempat lain, politisasi atas subjectivitas ini diberlakukan berbeda karena di tempat tertentu persoalan dari gerakan kedaulatan pangan menyinggung hubungan yang berbeda dengan sistem negara nya masing-masing. Bove mencatat pembagian dasar: "bagi masyarakat di Selatan, kedaulatan pangan berarti hak untuk melindungi

diri terhadap impor. Bagi kami (di Eropa), itu berarti melawan ekspor dan bantuan terhadap intensifikasi pertanian"(Bove dan Dufour 2001, 96). Kekuatan dari gerakan global ini adalah tepat bahwa gerakan tersebut berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dunia adalah tempat yang kompleks, dan akan menjadi kesalahan untuk mencari jawaban tunggal untuk fenomena yang kompleks dan berbeda. Kita harus memberikan jawaban berbeda pada tingkatan yang berbeda. Bukan hanya tingkat internasional, tapi juga lokal dan nasional. Di Eropa perjuangan atas subsidi pertanian berbentuk pengungkapan bagaimana retorika 'multi-fungsi' pertanian (pekerjaan di pedesaan, jasa lingkungan, penyediaan makanan, lanskap) yang melindungi bentuk proteksionisme Eropa (melalui green box WTO yang terkenal), yang secara langsung menyokong agribisnis dan industri dengan konsekuensi yang merugikan bagi petani kecil di Eropa dan di seluruh dunia. Gerakan Kedaulatan pangan mendukung subsidi pertanian alternatif, yang tidak terkait dengan liberalisasi perdagangan, khususnya di negara-negra Selatan, yang memerlukan subsidi untuk kelangsungan hidup petani kecil dan elaborasi dari "development box" nya WTO.

Realisasi utama dari multi-fungsi pertanian melalui prinsip-prinsip kedaulatan pangan ini, melibatkan pendekatan yang "tidak seimbang" dan gabungan dalam gerakan pada umumnya. Idealnya, memang solidaritas yang berdasarkan saling mengakui dengan perjuangan yang berbeda:

> Kesulitan bagi kita, sebagai petani adalah bahwa kita didukung di tempat-tempat di mana kita hidup dan menanam makanan. Disisi lain dalam tataran global ternyata perkembangannya lebih cepat. Dan bagaimana cara kita mendekati untuk mengetahui ada orang-orang seperti kita di mana-mana di dunia ini yang pekerjaannya

> adalah petani yang berakar secara budaya di tempat mereka sendiri. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah, membangun jembatan solidaritas satu sama lain dengan saling menghormati keunikan tempat yang kita miliki masing-masing dalam komunitas kita sendiri, di negara kita sendiri. Ini jembatan yang akan mempersatukan kita pada isu-isu atau di tempat-tempat di mana kita harus bertemu di tingkat global. (Anggota Pendiri Via Campesina, Nettie Wiebe, dikutip dalam Ainger2003,10-11)

Laura Carlsen (2007) melaporkan dari Via Campesina internasional 2006 dalam sebuah forum di Mexico City:

> Untuk sebagian besar petani di Meksiko, Asia selalu tampak secara harfiah dan kiasan seperti dunia yang terpisah dari mereka. Tapi ketika Uthai Sa Artchop dari Thailand menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan transnasional berusaha untuk mematenkan dan mengkontrol variasi benih padi mereka. Petani Meksiko menyadari bahwa beras Thailand adalah sama dengan jagung mereka juga. Ketika petani dari Indonesia,Tejo Pramono berbicara tentang bagaimana pengiriman uang dari putra dan putri yang bekerja di Hong Kong dan TimurTengah dapat mensubsidi sebuah desa yang sekarat, petani Meksiko memikirkan sanak saudara mereka sendiri yang dipaksa untuk bermigrasi ke Amerika Serikat.
>
> Kedua belah pihak setuju dengan masing-masing deskripsi tentang hilangnya pasar untuk impor, turunnya harga produsen karena persaingan yang tidak sehat, dan pemotongan dari pemerintah kepada produsen kecuali para eksportir besar. Kasus krisis tortilla yang terjadi pada bulan Januari di Meksiko yang juga diiringi dengan terjadinya krisis minyak kelapa di bulan Mei di Indonesia, saat itu harga kedua bahan pokok tersebut melonjak akibat pengalihan untuk agrofuel dan kontrol pasar global.

Subjektivitas transformasi gerakan kedaulatan pangan beroperasi secara simultan di seluruh dan di dalam bagian tertentu.laporan Carlsen mengulangi subjektivitas co-produksi petani dalam krisis neoliberal, dan berbagai dampak negatifnya pada petani di seluruh dunia. Saat ia bertanya," siapa yang akan berpikir bahwa di era globalisasi, kelemahan petani terbukti menjadi kekuatan mereka?" ini merupakan cara lain untuk mengamati konvergensi antarbangsa mengenai politik petani melalui berbagi pengalaman pemerintahan neoliberal. Ini mewakili dimensi pemersatu dalam 'kesatuan keragaman' politik dari gerakan kedaulatan pangan.

Dalam organisasi gerakan, transformasi kesadaran bukanlah prestasi semalam atau yang seharusnya sudah ditakdirkan dalam lintasan spatio-ekonomi dan sejarah budaya nya yang bervariasi. Ini lebih dikarenakan oleh pengalaman yang berbeda, proyek transformasi melibatkan ambiguitas interpretatif, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Wolford tentang gerakan petani tak bertanah di Brasil. Misalnya di wilayah timur laut Brasil, di mana organisasi MST kesulitan ditafsirkan sebagai pendiri dari "individualisme". Wolford mencatat bahwa hubungan yang lemah antara pendatang terhadap gerakan ini akan disaring melalui pengalaman mereka atas hak tanah dalam sistem perkebunan, di mana lahan adalah cakupan dari nilai-nilai budaya yang melebihi fungsinya sekedar sebagai alat produksi. Dalam hal ini, sebaliknya untuk kepengurusan investasi ideologis dalam nilai kolektif penempatan lahan, gerakan pendatang bertujuan untuk mengakses tanah melalui bentuk individual '"lokalisasi", yang berasal dari tuntutan sejarah mereka karena menjadi "tawanan "patronase perkebunan. Subjektivitas petani selatan Brasil berbeda, di mana petani kecil yang memutuskan untuk bergabung MST "diikat" ke dalam bentuk produksi yang

luas secara spasial, luasan produksi lah yang mereka nilai sebagai bagian dari tuntutan masyarakat kebanyakan, keluarga dan petani-petani yang didorong terus menerus melalui praktek sehari-hari dengan bekerja di lahan sebagai bentuk partisipasi mereka di MST. Jadi, kondisi subyektf tidak dapat diduga, atau dipisahkan dari koordinat spasial dan temporal mereka.

Dalam membuat pengamatan ini, Wolford mengajukan metodologi penting yang interpretative. Dia memusatkan ulang permasalahan konvensional struktural mengenai asal-usul dan dampak gerakan sosial, untuk sebuah pertanyaan etnografi mengapa orang bergabung (dan pergi) dari gerakan. Perbandingan etnografi di wilayah lain mengungkapkan kesalahan prediksi berbasis superstruktur atau interpretasi *transformasi kesadaran*. Hal ini juga secara kontekstual mengapa para pendatang tidak merangkul visi kepemimpinan secara otomatis dan menekankan pentingnya perjuangan terus menerus terhadap lahan, ketika lahan itu telah diduduki. Perjuangan di atas lahan saja berarti hal yang berbeda di tempat yang berbeda, *lending complexity* (dan politik multi perspectival) untuk sebuah gerakan yang mewakili melalui *"single-point perspectif*" dari 'kedaulatan pangan' merupakan sebuah intervensi politik di wacana "ketahanan pangan".

Apakah ini berarti bahwa untuk sementara gerakan kedaulatan pangan didedikasikan untuk menggerakkan petani dan rakyat tak bertanah yang menjadi hak petani melawan *depredations* serta aturan neoliberal dan harus merupakan model kebutuhan subjektif *kesadaran mereka* yang dimunculkan untuk mengungkap dan menghilangkan cara-cara di mana subjektivitas neoliberal mengartikulasikan nilai-nilai budaya demokratis dalam daerah tertentu. Gerakan jaringan pembelajaran adalah bentuk usaha untuk menginternalisasi dan mengkonkretkan

prinsip-prinsip demokrasi bahwa kedaulatan pangan "hidup" dengan atau melalui pelatihan-pelatihan dan program yang ditujukan pada isu gender, kelas dan hubungan etnis.

Micro-politik mengartikulasikannya dengan makro-politik dalam arti bahwa kekuatan gerakan-gerakan individu mengacu pada kemampuan anggota untuk mengakui dan menghubungkan kondisi khusus mereka dengan proyek politik organisasi. Tujuan melakukan pembukaan akses terhadap tanah selain sebagai properti juga sebagai syarat untuk melatih tenaga kerja penggarapan lahan atau melindungi kebudayaan petani yang sudah lemah. Namun demikian di dalam semua kasus, perjuangan pada lahan (contoh kerja sama dalam tubuh MST, jaringan pelatihan petani lintas-negara, jaringan kebijakan lokal,[44] serikat pertanian kecil seperti *Movimento de pequenos agricultores* yang mengadvokasi korban argribisnis) bertahan melalui subjek refleksif dengan kapasitas untuk membiaskan perjuangan mereka melalui masalah-masalah pembangunan, sosial, kewarganegaraan dan co-produksi dari pola hidup yang berkelanjutan. Sementara mikro-politik adalah substansi dari gerakan, makro-politik merupakan dunia sosial dan sejarah yang

[44] Di Thailand sebagai contoh petani semi-kering di timur laut yang mengorganisir "jaringan kebijakan lokal" menggunakan konsep "pembelajaran aliansi" untuk memperbaiki hubungan ekologikal lokal untuk mendukung isu kesehatan, sebelum mereka dapat ilmu dalam praktek agrikultur. Semenjak krisis finansial pada tahun 1997, aliansi ini telah mendukung patnership antara jaringan dan pemerintah, untuk meningkatkan konservasi air, partisipasi teknologi, managemen komunitas perhutanan dan kemajuan keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk mengubah monokultur menjadi intergrasi, diversifikasi pertanian dan pembangunan komunitas dan untuk mengubah lembaga negara menjadi paradigma keberlangsungan pedesaan (Ruaysoongnerm and de Vries 2005). Lihat juga Holt-Gimenez (2006).

akan digunakan untuk menempatkan dan mengembangkan subjektivitas baru. Dengan tanda yang sama, makropolitik disaring melalui pengalaman tertentu.

Jadi, dalam mewakili *"environmentalism of the poor"*, Martinez-Alier mengklaim konflik lingkungan sering diungkapkan melalui dialektika 'makro/mikro yang berakar pada benturan pada standar nilai yang akan diterapkan, seperti pada kasus kehilangan keanekaragaman hayati atau warisan budaya, atau kerusakan pada mata pencaharian manusia, atau pelanggaran hak asasi manusia dan atau hilangnya nilai-nilai suci, yang dibandingkan dalam *keseimbangan* untuk meraih keuntungan ekonomi dari proyek pertambangan atau dari industri-industri ekstraksi tambang minyak.

Selanjutnya kritik ekologi Via Campesina yang "melokalisasi" tema universal:

> Isu-isu global tentang lingkungan hidup seperti konservasi keanekaragaman hayati, ancaman pestisida dan penghematan energi, ditransformasikan menjadi argumen lokal untuk perbaikan kondisi kehidupan dan untuk petani bertahan hidup, yang mana mereka sedang belajar untuk melihat pekerjaan mereka tidak lagi sebagai pekerjaan yang ditakdirkan untuk punah. Ini bukan fenomena pasca-modernitas, di mana beberapa kehidupan (atau mencoba membuat penghidupan) dengan membeli saham Monsanto. yang lain dengan penuh semangat memakan daging babi dengan kedelai transgenik, yang lainnya makrobiotik, dan masih orang lain melakukan pertanian organik. Ini lebih merupakan rute baru modernitas, jauh dari apa yang dikatakan Norman Borlaug. Sebuah modernitas yang berdasarkan diskusi ilmiah dengan menghormati pengetahuan adat dan meningkatkan ecologi ekonomi, kesadaran pada ketidakpastian, kebodohan dan kompleksitas lainnya, dan bagaimanapun kepercayaan pada kekuatan pikiran.

Pada akhirnya ini adalah politik yang menolak visi kapitalis modernitas dan subjek liberal yang tunggal, perbedaan sosial, budaya dan realitas ekologis sebagai bagian dari proses gerakan yang kompleks. Membangun dunia lain dengan keberagaman sebagai pokok yang bertahan lama, bergantung pada artikulasi nilai-nilai yang menkronketkan makro-politik global dalam settingan yang lebih mikro.

Kesimpulan

Interpretasi gerakan petani kontemporer yang memproses mereka melalui lensa modernitas kapitalis dan melihatnya sebagai sebuah fenomena romantis mungkin secara historis itu terlalu berlebihan. Bahkan saat mereka bersama mengungkapkan krisis neoliberalisme. Dalam argumentasinya Via Campesina "tidak menolak modernitas, teknologi dan perdagangan yang disertai dengan romantisasi kembali ke masa lalu yang kuno saat mendalami tradisi pedesaan" [Tapi didasarkan pada etika] dan nilai-nilai di mana budaya dan keadilan sosial diperhitungkan untuk sesuatu dalam rangka mewujudkan mekanisme yang ditempatkan untuk menjamin masa depan tanpa adanya kelaparan. Desmarais menekankan kritikannya atas modernitas kapitalis melalui keterlibatannya dalam membangun konsep alternatif yang berbeda dari modernitas dan sangat berakar pada budaya. Tapi alternatif modernitas termasuk melakukan politisasi subjektivitas, bukan hanya mengungkapkan krisis neoliberalisme.

Ketika gerakan kedaulatan pangan mengklaim bahwa "kelaparan bukanlah masalah berarti namun itu masalah hak". Hal ini menunjukkan bukan hanya sekedar krisis, namun jelas itulah keterbatasan dari proyek neoliberal. Artinya hal tersebut memfokuskan perhatian pada reduksionisme paradigma pasar, di mana pencapaian

'ketahanan pangan' direduksi menjadi masalah kuantitas dan "pasokan" pasar. Sebagaimana gerakan kedaulatan pangan menunjukkan bahwa pasar memenuhi pasokan perusahaan, bukan kebutuhan manusia. Perusahaan produksi pangan tidak menangani atau menghasilkan permintaan begitu banyak, mereka malah menghasilkan banyak kasus kelaparan. Penanganan pasar atas nama pembangunan secara sistematis melanggar hak-hak manusia untuk hidup berdampingan dan mengamankan reproduksi sosial untuk mayoritas penduduk dunia, dan praktek keberlanjutan ekologis.

Seperti yang diungkapkan di atas, gerakan kedaulatan pangan bukan tanpa ketegangan dan kontradiksi. Apa yang muncul sebagai kemenangan kecil dalam skema yang lebih besar (misalnya pemukiman tanah, penguatan kotak pembangunan' wacana di WTO, penggabungan "Kedaulatan pangan" menjadi perdebatan FAO, aliansi belajar agro-ekologi, saksi kekerasan, dll) itu semua merupakan gabungan wajah-wajah gerakan dunia, dengan agenda yang diperuntukkan sebagai bentuk *denaturalizing* tatanan neoliberal. Lebih dari sekedar itu, dia juga sebuah masalah mengembalikan negara di pasar, sebagai prinsip yang hanya mengatur intervensi strategis gerakan kedaulatan pangan, tidak hanya merupakan persoalan "Pasar" sebagai sebuah proyek perusahaan, tetapi juga mempersoalkan "negara" karena negara terlibat dalam proyek ini. Sementara, Via Campesina mengakui otoritas yurisdiksi dari negara, dan juga berupaya untuk mengubah otoritas itu dengan menantang sistem-sistem tersebut agar negara memungkinkan untuk "memiliki hak dan kewajiban serta berdaulat", yang didefinisikan dalam kebijakan agraria, pertanian, perikanan dan pangan dengan sedemikian rupa untuk menjamin hak atas pangan dan ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak seluruh penduduk dunia.

Pada saat yang sama, kewajiban untuk mengamankan kedaulatan pangan memerlukan "hukum, tradisi, adat, sistem kepemilikan, dan lembaga, serta pengakuan wilayah perbatasan dan budaya masyarakat". Begitu juga tentang reposisi kewarganegaraan, yang merupakan sarana untuk minoritas, dan juga hak asasinya, dalam mendorong wacana alternatif modernitas, termasuk *"re-territorialization" dari, dan, antara* negara. Gerakan kedaulatan pangan secara mendasar menantang hubungan kelembagaan kapitalisme neoliberal yang berkontribusi terhadap pencabutan massa. Secara paradoks, dia sedang mereproduksi kaum tani sebagai kekuatan sosial yang "unthinkable" sebagai syarat untuk memunculkan sebagai subjek sejarah dunia yang radikal.

Referensi

Ainger, K., 2003. 'The New Peasants' Revolt'.*New Internationalist*, 353: 9–13.

Alavi, H., 1987. 'Peasantry and Capitalism: A Marxist Discourse'. In *Peasants & Peasant Societies*, ed. T. Shanin. Oxford: Basil Blackwell.

Araghi, F., 1995. 'Global De-Peasantization, 1945–1990'.*The Sociological Quarterly* ,36 (2): 337–68.

Bartra, R., 1992.*The Cage of Melancholy*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Bernstein, H., 2003. 'Land Reform in Southern Africa in World-Historical Perspective'.*Review of African Political Economy*, 30 (96): 203–26.

Bernstein, H., 2004. ' "Changing Before Our Very Eyes": Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today'.*Journal of Agrarian Change*, 4 (1/2): 190–225.

Beverley, J., 2004. 'Subaltern Resistance in Latin America: A Reply to Tom Brass'. *TheJournal of Peasant Studies*, 31 (2): 261–75.

Bodnar, J., 2003. 'Roquefort vs Big Mac: Globalization and Its Others'. *European Journal of Sociology*, 44: 133–44.

Borras, S. Jr, 2006. 'The Underlying Assumptions, Theory, and Practice of Neoliberal Land Policies'. In *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*, eds P. Rosset,R. Patel and M. Courville, 99–128. Oakland, CA: Food First Books.

Bové, J. and F. Dufour, 2001.*The World Is Not For Sale*. London: Verso.

Caldeira, R., 2004. 'A House and a Farm or Social Transformation? Different Modes of Action and One Dominant Utopia'. Paper presented at Poverty, Inequality and Livelihoods workshop, University of Reading, June.

Cameron, A. and R. Palan, 2004.*The Imagined Economies of Globalization*. London: Sage.

Carlsen, L., 2007. 'Vía Campesina Sets an International Agenda'. http://www.mstbrazil/org/?=laviacampesinasetsagenda, Accessed 15 July 2007.

CPE (Coordination Paysanne Européene), 2003. 'For a Legitimate, Sustainable, and Supportive Common Agricultural Policy'. 15 November. http://www.cpefarmers.org/w3/article.php3?id_article=50, Accessed 31 January 2008.

Davis, M., 2001.*Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World*. London: Verso.

Davis, M., 2006.*Planet of Slums*. London: Verso.

Desmarais, A.A., 2002. 'The Vía Campesina: Consolidating an International Peasant and Farm Movement'.*The Journal of Peasant Studies*, 29 (2): 91–124.

Desmarais, A.A., 2007.*La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Point Black, NS and London: Fernwood Books & Pluto Press.

Duncan, C., 1996.*The Centrality of Agriculture: Between Humankind and the Rest of Nature*. Montreal: McGill Queen's University Press.

Eber, C.E., 1999. 'Seeking Our Own Food: Indigenous Women's Power and Autonomy in San Pedro Chenalhó, Chiapas (1980–1998)'. *Latin American Perspectives*, 26 (3): 6–36.

Almeida, L. and F. Ruiz Sanchez, 2000. 'The Landless Workers' Movement and Social Struggles Against Neoliberalism'. *Latin American Perspectives*, 27 (5): 11–32.

Friedmann, H., 1978. 'World Market, State, and Family Farm: Social Bases of Household Production in an Era of Wage Labor'. *Comparative Studies in Society and History*, 20 (4): 545–86.

Friedmann, H., 1982. 'The Political Economy of Food: The Rise and Fall of the Postwar International Food Order'. *American Journal of Sociology*, 88: 248–86. Friedmann, H. and P. McMichael, 1989. 'Agriculture and the State System: the Rise and Fall of National Agricultures, 1870 to the Present'. *Sociologia Ruralis*, 29: 93–117.

Gupta, A., 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Durham, NC: Duke University Press.

Harvey, D., 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

Holt-Giménez, E., 2006. *Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. San Francisco, CA: Food First Books.

IPC for Food Sovereignty, 2006. *Sovranita Alimentare*. Final Declaration: For a New Agrarian Reform Based on Food Sovereignty. 9 March. http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.ph, Accessed 31 January 2008.

Kautsky, K., 1988/1899. *The Agrarian Question*. Volume 2. London: Zwan Publications.

Kay, C., 2006. 'Rural Poverty and Development Strategies in Latin America'. *Journal of Agrarian Change*, 6 (4): 455–508.

Lenin, V.I., 1972. *The Development of Capitalism in Russia*: *Collected Works*, Volume 3. Moscow: Progress Publishers.

Lewis, W.A., 1954. 'Economic Development with Unlimited Supplies of Labour'. *Manchester School of Economic and Social Studies*, 22: 139–91.

Madeley, J., 2000. *Hungry for Trade*. London: Zed Books.

Madeley, J., 2006. 'The Enduring Racket: Why the Rich Won't Budge on Farm Subsidies'. *Panos Online*, 28 July. http://www.globalpolicy.org/socecon/trade/subsidies/2006/ 0728panos.htm, Accessed 31 January 2008.

Martinez-Alier, J., 2002. *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham: Edward Elgar.

Marx, K., 1967. *Capital*. Vol. 1. Moscow: Progress Publishers.

Mazoyer, M. and L. Roudart, 2006. *A History of World Agriculture: From the Neolithic Ageto the Current Crisis*. New York: Monthly Review Press.

McCalla, A.F., 1999. 'World Agricultural Directions: What Do They Mean For Food Security?'. Presentation to Cornell Institute for International Food and Development, Cornell University, 30 March.

McCarthy, J., 2005. 'Rural Geography: Multifunctional Rural Geographies – Reactionary or Radical?'. *Progress in Human Geography*, 29 (6): 773–82.

McMichael, P., 1996. *Development and Social Change. A Global Perspective*. First edition. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

McMichael, P., 2003. 'Food Security and Social Reproduction'. In *Power, Production and Social Reproduction*, eds S. Gill and I. Bakker, 169–89. New York: Palgrave Macmillan.

McMichael, P., 2005. 'Global Development and the Corporate Food Regime'. In *New Directions in the Sociology of Global Development*, eds F.H. Buttel and P. McMichael, 265–99. Oxford: Elsevier.

McMichael, P., 2006. 'Peasant Prospects in a Neo-Liberal Age'. *New Political Economy*,11 (3): 407 18.

McMichael, P., 2007. 'Sustainability and the Agrarian Question of Food'. Plenary Presentation, *European Rural Sociology Congress*, Wageningen, August.

McMichael, P., forthcoming. 'Food Sovereignty, Social Reproduction and the Agrarian Question'. In *Peasant Livelihoods, Rural Transformation and the Agrarian Question*, eds A.H. Akram-Lodhi and C. Kay. London: Routledge.

McMichael, P. and H. Friedmann, 2007. 'Situating the Retailing Revolution'. In *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains*, eds G. Lawrence and D. Burch, 291–319. London: Edward Elgar.

Mitchell, T., 2002. *Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity*. Berkeley, CA: University of California Press.

Moore, B. Jr, 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston, MA: Beacon Press.

Moyo, S. and P. Yeros, eds, 2005. *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. London: Zed Books.

NGOs, 2004. 'WTO Rules Must Respect Food Sovereignty'. http://www.southcentre.org/info/southbulletin/bulletin80/bulletin80-09. htm Accessed 31 January 2008.

Otero, G., 1999. *Farewell to the Peasantry? Political Class Formation in Rural Mexico*. Boulder, CO: Westview Press.

Patel, R., 2006. 'International Agrarian Restructuring and the Practical Ethics of Peasant Movement Solidarity'. *Journal of Asian and African Studies*, 41 (1/2): 71–93.

Patel, R., 2007. 'Transgressing Rights: La Vía Campesina's Call for Food Sovereignty'.*Feminist Economics*, 13 (1): 87–93.

People's Food Sovereignty, 2003. 'Peasants, Family Farmers, Fisherfolk and Their Supporters Propose People's Food Sovereignty as Alternative to US/EU and G20 Positions'. 15 December. http://www.ukfg.orguk/docs/Peoples%20Food%20Sovereignty%20declaration. doc, Accessed 31 January 2008.

Petras, J., 1997. 'Latin America: the Resurgence of the Left'. *New Left Review*, 223:17–47.

Pimbert, M., K. Tran-Thanh, E. Deléage, M. Reinart, C. Trehet and E. Bennett, eds, 2005. *Farmer's Views on the Future of Food and Small Scale Producers*. London: The International Institute for Environment and Development.

Polanyi, K., 1957. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times*. Boston, MA: Beacon.

Rosset, P., R. Patel and M. Courville, 2006. *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland, CA: Food First Books.

Rostow, W.W., 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ruaysoongnern, S. and F.P. de Vries, 2005. 'Learning Alliances Development for Scaling Up of Multi-Purpose Farm Ponds in a Semi-Arid Region of the Mekong Basin'. Paper presented at Learning Alliances Conference, Delft, 6–10 June 2007.

Ruggie, J.G., 1993. 'Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations'. *International Organization*, 47 (1): 139–74.

Sachs, J., 2005. *The End of Poverty*. New York: Penguin.

Sharma, D., 2004. 'Entitled to Subsidies!'. *India Together*, October. http://indiatogether. org/opinions/dsharma, Accessed 31 January 2008.

Starr, A., 2001. *Naming the Enemy: Anti-Corporate Movements Confront Globalization*. London: Zed Books.

Starr, A., 2005. *Global Revolt: A Guide to the Movements Against Globalization*. London: Zed Books.

Swords, A., 2007. 'Neo-Zapatista Network Politics: Transforming Democracy and Development'. *Latin American Perspectives*, 34 (2): 78–93.

Tomich, D.W., 2004. *Through the Prism of Slavery: Labor, Capital and World Economy*. New York: Rowman and Littlefield.

Trouillot, M., 1995. *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Boston, MA: Beacon.

Vía Campesina, 2000. 'Declaration of the International Meeting of the Landless in San Pedro Sula'. Honduras, July.

Vía Campesina, 2003. 'What is Food Sovereignty?'. January 15. Available at www.viacampesina.org.

Vía Campesina, 2005. *Impact of the WTO on Peasants in South East Asia and East Asia*. JI. Mampang Prapatan, XIV (5).

Vidal, J., 2007. 'The Looming Food Crisis'. *The Guardian*, 29 August.

Walton, J., 1984. *Reluctant Rebels: Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment*. New York: Columbia University Press.

Wittman, H., 2005. 'The Social Ecology of Agrarian Reform: The Landless Rural Workers' Movement and Agrarian Citizenship in Mato Grosso, Brazil'. Unpublished PhD Dissertation, Development Sociology, Cornell University.

Wolf, E., 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper.

Wolford, W., 2003. 'Families, Fields and Fighting for Land: The Spatial Dynamics of Contention in Rural Brazil'. *Mobilization: An International Journal*, 8 (2): 201–15.

Wolford, W., 2005. ' "Every Monkey has its Own Head": Rural Sugarcane Workers and the Politics of Becoming a Peasant in Northeastern Brazil'. Paper prepared for The Colloquium in Agrarian Studies, Yale University.

Wolford, W., 2006. 'The Difference Ethnography Can Make: Understanding Social Mobilization and Development in the Brazilian Northeast'. *Qualitative Sociology*, 29 (3): 335–52.

Wolford, W., 2007. 'Land Reform in the Time of Neo-Liberalism: A Many Splendored Thing'. *Antipode*, 39 (3): 550–70.

Wright, A. and W. Wolford, 2003. *To Inherit the Earth: The Landless Movement and the Struggle for a New Brazil*. San Francisco, CA: Food First Books.

3

Organisasi Transnasional di Amerika Tengah: Sejarah, Tantangan, dan Prospek

Marc Edelman

Pendahuluan

Dulu, Amerika Tengah tercatat memiliki gerakan-gerakan agraria yang paling berkuasa dan sukses dan juga memiliki tentara gerilya yang terdiri dari kaum petani dan beberapa gerakan reforma agraria yang paling ekstensif di bagian barat.[45] puncaknya pada tahun 1970an, sebagai contohnya, setelah beberapa dekade terjadi konflik yang terus-menerus, hampir seperempat petani tak bertanah serta populasi petani miskin di Honduras mendapat keuntungan dari reforma agraria yang dilakukan disana. Di El-salvador sekitar 25 persen rumah tangga di pedesaan mendapatkan lahan dari reforma agraria pada tahun 1980, yang mana

[45] "Amerika Tengah" dalam tujuan analisis disini secara umum akan ditinjau untuk termasuk dalam lima negara yang membentuk Spanis central America (Guatemala, El savador, Honduras, Nicaragua dan Costa Rica). Organisasi dari panama dan belize dan kemudian meksiko juga berpatrtisipasi dalam pengorganisasian petani transnasional di wilayah sebagaimana yang dicatat disini.

rezim Pro-US yang dimplementasikan sebagai harapan untuk dapat menghadang transformasi yang lebih radikal atau juga sebagai bagian pendistribusian program yang disusul oleh perang sipil di tahun 1992 yang berlangsung selama 12 tahun.

Pada tahun 1980an di Nicaragua, pemerintahan Sandinista menyelenggarakan Reforma Agraria yang lebih luas untuk memberikan akses pada tanah yang diperkirakan 37 persen petani-petani miskin dan buruh di pedesaan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan. Dalam masa jabatan pertama di bawah pemerintahan Sandinista hampir seluruh pemohon dengan jumlah yang cukup banyak, adalah mantan pejuang perang sipil yang berakhir pada tahun 1989, yang pada akhirnya mereka menerima tanah. Sebagaimana di Guatemala, para mantan pejuang dan petani tak bertanah serta kaum tani miskin ini, mereka menerima tanah di bawah kesepakatan damai pada tahun 1996.[46] Amerika tengah juga menjadi salah satu zona kunci dimana organisasi kontemporer petani transnasional muncul. Via Campesina dikatakan sebagai organisasi petani transnasional yang terbaik dari koalisi petani kecil sejak awal tahun 1990an yang mempunyai sejarah yang kuat di Amerika tengah.

Sejarah tersebut menjadi hal yang menarik di Amerika Tengah sebagai wilayah yang memiliki pengalaman-pengalaman dengan organisasi *cross-broader* yang termasuk diantaranya adalah kelompok-kelompok kecil dari para pelopor gerakan petani di berbagai wilayah disana.

---

[46] Kerap kali pasca konflik program distribusi tanah mempunyai orientasi pro-pasar yang kuat dan dampak demolisasi secara sosial (Gauster and isakson 2007; De Bremond 2007). Mereka bersamaan memproses reforma yang berlawanan secara signifikan, khususnya di nicaraguay (Fiallos 2002, 5:Jonakin 1997; Ruben and Masset 2003); dan Honduras (ruben and funez 1993).

Kelompok-kelompok tersebut kebanyakan muncul dari kongres di Nicaragua dan kemudian memunculkan juga organisasi petani-petani lainnya di Managua yang menjadi pusat organisasi-organisasi kecil periode 1996-2004 di Tegucigalpa, sebuah wilayah di Honduras.[47] Kaum tani ini terdiri dari sebagian besar pejuang pada waktu terjadi perang sipil di Guatemala, El-savador dan Nicaragua. Perang ini banyak menelan korban manusia secara tragis, hal tersebut juga memberikan persepsi di spektrum *left-right* bahwa petani miskin menjadi aktor penting dalam politik yang dapat digunakan dan dilatih oleh perubahan sosial yang radikal atau dinetralkan dan diatur oleh orang-orang yang ingin menghalanginya.

Pada awal abad 20, situasinya jauh dari kondisi yang mereka alami sekarang, dimana kaum tani adalah tokoh protagonis politik utama dan penggerak transformasi sosial. Di setiap negara yang memiliki persoalan pertanahan, para petani berusaha memperjuangkannya di mulai pada tahun 1970an sampai 1990. Yang mengalami tekanan pada

---

[47] Lihat juga kontribusi oleh Borras dalam koleksi ini. Demikian pula CLOC (Coordnination Latinoamericana de Organizaciones del Campo) sebuah jaringan yang keanggotaannya berlapis-lapis dengan Via Campesina dan bekerja sama dengannya. CLOC mempunyai markas di Kota Guatemala selama tahun 2001-2005. Keputusan CLOC (pada Third Congress, Agustus 2001, dimana Borras menghadirinya) untuk merubah kantornya ke Guatemala karena sering ada percekcokan. Walaupun Congress diadakan di Mexico City, bendera satu-satunya yang terpasang ada bendera Kuba. Beberapa organisasi Mexico kecil menginisiasikan sebuah kampanye untuk memindahkan markas CLOC ke Havana sebagai langkah solidaritas dengan Kuba. Pendukung dari perpindahan tersebut dikarenakan Guatemala berargumen bahwa lokasi Centra America akan memasukkan ClOC dalam wilayah dengan sejarah yang panjang dari perjuangan agraria dan juga akan membatasi isolasi yang akan terjadi karena bermarkas di Kuba. Setelah perdebatan yang sengit, mayoritas kecil delegasi memutuskan pilihan Guatemala City.

pelaksanaan reforma agraria yang kemudian memberikan kondisi yang lebih baik.

Wilayah–wilayah pedesaan telah kehilangan populasi dan pengaruh politiknya. Ratusan petani bermigrasi ke luar daerah. Muncul ambisi dari produsen kecil untuk berkoalisi ke luar negri yang kemudian menjadi pioneer munculnya organisasi transnasional pada tahun 1990an - ini juga menjadi cara untuk memutus jalannya "reforma agraria" neoliberal yang membuat kekacauan besar-, atau yang semula hanya ada untuk bertemu dalam "ruang" maya dan bahkan organisasi di atas "kertas" atau "dot cause" saja.[48] Konsolidasi dari rezim neoliberal yang lebih menyeluruh di beberapa negara dibanding yang lain dilanjutkan untuk membentuk resistansi signifikan dari masyarakat sipil yang teroganisir. Namun khususnya di pedesaan, terjadi pertumbuhan jumlah produsen kecil dan petani tak bertanah, dan mereka lebih memilih untuk "keluar" dibandingkan bersuara. Mereka juga menjauhkan diri dari non-pasar,

---

[48] Fenomena dari "gerakan sosial" yang hadir dalam internet namun terdapat masalah dasar tentang dimensi metodelogikal, politikal, etika dan representatif yang mana aktivis dan cendikiawan kadang-kadang membenarkan. Lebih dari dua dekade yang lalu Tilly (1984,311) demikian juga mengangkat masalah organisasi "fiktif"; baru-baru ini Anheir dan Themudo (2002, 209-10) menganalisa "dot-cause" atau organisasi yang basisnya dari pendukung di internet dengan konntitusi yang amat kecil. Tarrow (2005, 165) menggambarkan formasi "koalisi atas kertas" ini dan lebih sinis lagi terdapat beberapa komentator sekarang merujuk pada praktek pembentukan organisasi "rakyat" yang palsu sebagai "astroturfing". Ide dari "ruang" aktifis sebagai pembeda dari "gerakan sosial" datang dari perdebatan baru-baru ini di Brazil pada karakter dan kemungkinan dari World Social Forums. Pada isu yang menjangkau periode kebersamaan aktivis yang benar-benar memfasilitasi aksi sosial radikal atau secara alternatif hanya "faktor ide" atau "meeting ground" (Whitaker 2006, 68; santos 2006, 75-6). Perdebatan ini dibawa di beberapa hal diskusi di Via Campesina sebagai "arena aksi" (Borras 2004 dan di koleksi ini).

lalu mendekat pada politik untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka dan memilih untuk tetap hidup dari pertanian, dan wilayah pedesaan dan inilah organisasi yang kemudian membawa perjuangan untuk mempertahankan kepentingan dan mata pencaharian petani.[49]

Bab ini mencoba untuk menghubungkan studi tentang dinamika organisasi, yaitu para pendahulunya, formasi, tekanan internal dan bentuk-bentuk representasi- dengan analisis sosial ekonomi dari konteks yang mereka jalankan. Yang bergerak melampaui studi tentang "kesempatan politik" sebagai penghubung -diawal dan akhir- mereka terhadap ruang politik yang ada, untuk membahas perubahan struktural jangka panjang dan jangka menengah yang berdampak pada perlawanan-perlawanan kolektif yang mereka lakukan.[50] Pada bagian awal, bab ini menguraikan koalisi regional dari kelompok-kelompok *campesino* yang dengan muncul dengan cepat, tapi juga mengalami penurunan dengan cepat, yaitu *Association of Central American Peasant Organizations for Cooperation and Development* (ASOCODE) yang pada tahun 1991-1998 mempunyai *high profile* yang luar biasa dalam politik sengketa agraria. Hal tersebut dipertimbangkan dengan berani dalam beberapa usaha untuk merekonstruksi "posisi" petani di Amerika Tengah. Hal tersebut juga membawa kita untuk menganalisa beberapa perubahan utama yang saling berkaitan di dalam situasi ekonomi dan sosial di Amerika Tengah yang berdampak pada sektor pedesaan dan berdampak secara negatif pada organisasi petani baik nasional ataupun gerakan transnational. Hal ini juga membawa kita untuk membahas kemerosotan kepentingan pertanian dalam ekonomi negara yang memperburuk

---

[49] Dalam gagasan dari "keluar" dan "suara" lihat Hirschman (1970).

[50] Untuk kritikan dari gagasan konvensional dari "kesempatan politikal", lihat Bevington and Dixon (2005) dan Brockett (2005).

situasi produsen kecil gandum dan kopi. Juga, pembahasan ini mencakup tumbuhnya pengaruh budaya urban dan intensifikasi mata pencaharian "pluriactive" dan *rural-urban* serta migrasi ke luar daerah; dan rekonfigurasi gerakan pedesaan dari perjuangan-perjuangan secara global untuk memperkecil tuntutan mereka di tingkat sektoral. [51] pada bagian akhir, bab ini memunculkan pertanyaan mengenai implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dan implikasi model pembangunan baru negara bagi perlawanan petani untuk reforma agraria dan tuntutan yang berkaitan dengan itu.

Organisasi Petani Transnasional Di Amerika Tengah

Pada periode di akhir 1980an sampai pertengahan 1990an terjadi pertumbuhan organisasi petani transnasional di amerika tengah.[52] Organisasi-organisasi ini berhubungan dengan munculnya fenomena migrasi tenaga kerja internasional yang sudah berlangsung lama di negara-negara Amerika Tengah, selama satu dekade pengorganisasian intensif lokal dan level nasional dilakukan dan pengorganisasian juga dilakukan terhadap pengungsi dari luar negara berkembang di wilayah negara kecil yang menetap di perbatasan. Solidaritas internasional yang menyokong perlawanan Sandinitas melawan kediktatoran penguasa Somoza di Nicaragua juga memberikan inspirasi untuk aktivis pedesaan dari berbagai negara, yang mana pada bulan July 1979 mereka bertemu di acara regional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah Nicaragua atau oleh organisasi Pro-Sandinista. Ketika perang sipil diakhiri atau dihentikan pada tahun 1990an, mulailah terbuka ruang politik untuk membicarakan lebih intensif

[51] Gaete et al (2005,22) mendiskusikan dinamika ini di Kostarica.

[52] Akar dari upaya-upaya ini secara detail dibahas di Edelman (1998). Lihat juga Biekart (1999).

nasib dari masyarakat pasca konflik. Pada waktu yang sama harga kopi jatuh dan liberalisasi perdagangan gandum antar wilayah mulai diberlakukan, kondisi itu ditambah dengan beban yang ditimbulkan dari program penyerataan struktural (SAP) di seluruh dunia yang mengkontribusi untuk mengintensifkan tekanan ekonomi pada pertanian di lahan kecil. Di banyak daerah khususnya di Honduras dan Kosta rica, organisasi petani ada di bagian depan perlawanan nasional dalam berlawan terhadap program penyerataan struktural yang dilakukan disana.

Kebangkitan dan kemunduran ASOCODE

Di tahun 1991 aktivis petani yang menghadiri *European Community,* yaitu sebuah program pendidikan mengenai pendanaan ketahanan pangan di Panama mendirikan Asocciation of Central American Peasant Organization for Cooperation and Development. Mulanya diawali oleh seorang anak muda yang kharismatik dari Kosta rika bernama Wilson Campos. ASOCODE dengan cepat mengumpulkan legitimasi oleh rekan-rekan elite dan pemberi dana dari luar, sebagaimana aktivis campesino dari negara berbeda yang dengan cepat menerima bahwa itu adalah rekan sesama mereka dimanapun mereka berada, asal mereka dihadapkan dengan persoalan yang sama dan maka mereka harus berbagi keprihatinan serupa.[53] Petani

[53] Campos merupakan contoh figur yang disebut Tarrow dengan istilah "akar kaum kosmopolit". "orang-orang yang berasal dari konteks spesifik nasional, namun yang berhubungan dengan aktivitas politik yang berlangsung yang mengaitkan mereka dengan konflik dan hubungan jaringan transnasional". Para pelajar dari gerakan agraria transnasional secara besar gagal dalam memberikan teori secara sistematis pada tipe sosial ini untuk mengakui keberadaannya. Pemimpin dari petani dan organisasi pertanian yang memiliki pendidikan universitas (sebagaimana kasus dengan Campos), yang berbicara dua bahasa atau lebih, atau yang sebaliknya upwardly

dilihat secara luas sebagai aktor dalam politik regional, karena hal tersebut ASOCODE selama lebih dari lima tahun mengurus agar mereka mempunyai perwakilan untuk menghadiri banyaknya pertemuan presidensial dan kementrian. Mereka mengirimkan delegasi-delegasi ke eropa dan amerika utara secara berkala. Dipublikasikan di berbagai macam koran dan koran bulanan di spanyol dan inggris. Mensponsori pertemuan dan program untuk aktivis petani.[54] ASOCODE juga menjadi salah satu anggota dari "masyarakat sipil" yang bersuara di *Consulative Council* di SICA, yang mana membentuk bagian dari protokol Tegucigalpa pada tahun 1991 yang secara sistematis meremajakan institusi tata regional antar nasional utama amerika tengah sebagai tambahan untuk kesepakatan damai yang telah disetujui di Nicaragua yang disusun di El savador dan Guatemala.

Pembentukan ASOCODE secara jelas dapat dilihat ketika terjadi pergantian strategi pendonor Eropa di akhir tahun 1980 dan awal 1990, ketika pendonor multilateral, bilateral dan beberapa NGO disarankan untuk mendukung kegiatan di wilayah Amerika Tengah. Sebagai oposisi yang

---

mobile atau mengakumulasikan pokok kultural signifikan yang menonjol dalam petani transnasional dan mengorganisir petani dari permulaannya. Tidak semua "akar kaum kosmopolit" pemimpin petani si amerika tengah memberikan karakteristik seperti ini (tentu saja tidak harus), namun terutama di gerakan di awal tahun pentingnya beberapa figur utama dan "makelar" intelektual, antara organisasi dan lembaga donor sebagai contoh, tidak dapat berlebihan.

54 Dua koleksi dari essai yang berisi pujian (Tangerman and Valdes 1994; Biekart and Jelsma 1994) diberikan sebagai tanggapan, khususnya diantara lembaga pendonor asing dan kunjungan intelektual, yang mana ASOCODE menjadi organisasi penting, kuat dan organisasi yang bertahan lama. Beberapa pemimpin ASOCODE menklaim bahwa edisi koran English adalah untuk hadirin Belizean, walaupun yang lain mengakui semula itu untuk konsumsi asing.

berfokus di nasional dan lokal. Tidak mengherankan untuk memberikan prioritas pada perubahan. Koalisi petani di wilayah baru ini menarik aliran dana dari pendonor yang kemudian mencapai puncak pertahun sebanyak 1,5 juta US$ di tahun 1996. Dana paling banyak berasal dari lembaga di Belanda yaitu HIVOS, ibis-Denmark, dan cabang-cabang dari Oxfam serta NGO-NGO di Copenhagen yang berinisiasi dengan Amerika Tengah (Biekart 1999, 204–6, 280). Pada tahun 1995 ASOCODE menyediakan tunjangan perbulan sebanyak 4000 -5000 US$ untuk setiap koalisi nasional yang berpartisipasi. Dana tersebut juga dipakai untuk menggaji dua perwakilan yang ditugaskan untuk bekerja di dewan koordinasi ASOCODE (Edelman 1998). ASOCODE juga menjadi markas besar dengan ruang kantor yang luas di lingkungan kelas menengah kebawah di Managua. ASOCODE memiliki peralatan standar NGO dari negara berkembang seperti: komputer, mesin foto kopi, fax, sekretaris, pembantu, supir, teknisi yang membuat proposal proyek terus-menerus dan "rencana strategi" dan "cooperator" dari Belanda dan Canada.[55]

Di awal pertengahan 1990, ASOCODE juga berinisiasi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembentukan beberapa jaringan baru seperti: CICAFOC; CICA; ICIC; CLOC; dan Via Campesina yang juga termasuk dalam perwakilan-perwakilan dari organisasi petani di 60 negara (Desamarais 2007; Edelman 2003).[56] Pada waktu

---

[55] Evaluasi retrospeksif internal tahun 1999 mengindikasikan secara jelas bahwa pada tahun 1994 Asosiasi menginstitusionalkan fungsinya sebagai agen perusahaan. (ASOCODE 1999).

[56] Anggota organisasi ASOCODE juga mengkoordinasikan kegiatan dengan Campesino a Campesino Movement, program perpanjangan memimpin petani yang dimulai pada awal tahun 1970 di Guatemala dan setelah itu menyebar ke Meksiko, dan sisanya Amerika

terjadi kerusakan besar-besaran akibat Angin topan di Mitch pada bulan oktober tahun 1998, ASOCODE bersama dengan CICAFOC dan jaringan regional produsen kecil kopi membentuk *Central American Rural Coordinating Group* untuk mengikuti *Central America Solidarity Coordinating Group* yang lebih luas di Stockholm untuk bertemu dengan *European cooporation organization* yang akan melakukan usaha rekonstruksi. Perkembangan jaringan dengan peningkatan jumlah yang tajam di pertemuan se-regional dan di luar regional, banyak juga dihadiri oleh individu yang sama. Beberapa dari aktivis dilaporkan mendapat gaji utuh secara tetap lebih dari satu jaringan.[57]

Sukses dalam memperoleh dana dan sukses dalam pembentukan jaringan baru yang didukung oleh kalangan aktivitas yang intens bisa dapat membuat kesalahan yang memiliki dampak politik dan pengaruh secara mudah. Bagaimanapun juga proses-proses tersebut juga menekankan pada ketangguhan karakter untuk membuat keputusan di ASOCODE untuk mengurangi keadaan yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke komponen nasional dan membentuk secara tetap "kebutuhan baru" yang pada dasarnya untuk menanggapi tawaran pendonor dan tawaran prioritasnya. Menurut laporan internal ASOCODE bahwa "sumber dari perusahaan sangat banyak hingga melebihi kapasitas markas" untuk mengurusnya. "kelebihan dana" yang dikontribusikan sebagai dana untuk melakukan perlawanan telah memperburuk organisasi yang

---

Tengah dan Kuba. Sebagai sejarah yang memilukan di dalam Campesino a Campesino, lihat Holt-Gimenez (2006).

57 "double dipping" ini seperti yang Riles (2001;47) laporkan diantara jaringan masyarakat sipil wanita di pacifik. Tentu saja, analisinya dalam poin lemah dari jaringan seperti itu, yang didiskusikan lebih jauh di bawah, mempunyai resonansi yang besar dalam konteks amerika tengah.

telah ada dan utamanya adalah mendorong lembaga-lembaga pemberi dana untuk berhenti mensupport mereka.

Di tahun 1997 dan 1998 ASOCODE memasuki periode yang dalam evaluasi internal kita karakterisasikan sebagai "krisis dan perpecahan". Berawal dari koran edisi Spanyol dan Inggris tidak dipublikasi lagi. Banyak divisi-divisi organisasi melibatkan diri dengan lebih banyak tenaga, tetapi ASOCADE malah mengurangi kerjasamanya dalam pertemuan regional dan internasional. Banyak terjadi perselisihan yang dibuktikan dengan perpecahan kelompok, permulaannya dari kehadiran asosiasi antara "verticalist" panama dan salvador (ortodox yang cenderung pada leninist). Di satu sisi ada perpecahan yang terjadi juga dari perwakilan dari lima negara. Kontroversi tambahan membagi dewan koordinasi di garis yang berbeda, sebagai contohnya; apakah asosiasi harus menjadi lobi *campesino* regional atau berusaha untuk menyelesaikan masalah pertanahan dengan cepat pada negara-negara anggota?

Keberagaman dari organisasi-organisasi konstitusi dan basis sosial mereka seperti pekerja pertanian, masyarakat adat, petani independen, anggota koperasi dilihat sebagai suatu kekuatan dan menjadi sumber polarisasi dari perwakilan beberapa negara (khususnya, nicaragua dan kosta rica) yang diperdebatkan dalam orientasi yang dipersempit terhadap produsen dari pertanian skala kecil. Perselisihan yang memburuk disamping sumber antara *markas pusat* dan koalisi nasional yang berbeda juga mendorong beberapa organisasi penting mundur dan yang lainnya terusir dari koalisi nasional. Terkadang ini terjadi karena organisasi nasional melihat koalisi yang mewakilkan mereka dalam level regional juga terlibat dalam hadirnya ASOCODE untuk menekankan isu-isu ke negara mereka sendiri.

Pada tahun 1999, asosiasi meninggalkan seluruh upaya dalam melobi institusi internasional, regional dan nasional. Ketika organisasi pendonor menjadi sadar dengan kekacauan ini dan mereka menarik dukungan mereka sehingga dukungan terhadap ASOCODE turun dengan cepat. Beberapa lembaga mengindikasikan bahwa untuk selanjutnya mereka akan melakukan praktek pendanaan regional sebelumnya dan menyalurkan dukungan yang dialokasikan kepada ASOCODE untuk organisasi nasional bagian dari konstituennya. Seperti CONAMPRO, koalisi yang mewakili guatemala di ASOCODE dibubarkan, hancur akibat kurangnya pendanaan dari pendonor dan mundur akibat kemunculan aliansi yang lebih dinamis dari organisasi petani Guatemala (yang mana secara berani ikut berpartisipasi).[58] Markas yang mewah ASOCODE di Managua telah menutup pintu dan menjadi sebuah contoh dari salah satu kritikan yang menyebutnya jaringan "marcochepaly". Sejak maret tahun 2000 sebuah laporan internal berkomentar di bulan april 2001, "kita tidak lagi mempunyai sokongan dana dari lembaga koperasi atau organisasi. Aktifitas yang berbeda dikerjakan dengan suport

[58] CONAMPRO (coordinadora nacional de pequenos y medianos productores de guatemala) yang menjadi "mesas" atau koalisi terakhir nasional ASOCODE untuk dibentuk dan sebaliknya "mesas" negara lainnya, beberapa diantaranya telah hadir bertahun-tahun. Hal ini sebenarnya membentuk keberlanjutan didirikannya ASOCODE itu sendiri. CONIC (coordinadora nacional indigena y campesina) dan CNOC (coordinadora nacioanl de organizaciones campesinas) yang juga terbentuk di awal tahun 1999, dengan CONIC yang awal mulanya menjadi bagian pembentuk CNOC. Keduanya meneruskan untuk melakukan kegiatan bersama, yang mana mereka lukan sebelumnya dengan CONAMPRO. CONIC cenderung lebih menekankan pada isu masyarakat adat dan hak asasi manusia dan CNOC dalam reforma agraria dan pembangunan pedesaan. Dalam gerakan petani kontemporer Guatemalan, lihat Leanza dan Santa Cruz (2006).

yang diberikan oleh organisasi mereka. Biaya operasional yang dibutuhkan sampai Desember 2000....diperoleh dari penjulan peralatan-peralatan dari markas.

Di bulan April 2001, 25 delegasi (15 diantaranya adalah perempuan) dari 5 negara bertemu di Tegucigalpa (perwakilan dari Belize dan Guatemala diundang dan menkonfirmasi partsipasi mereka namun tidak pernah muncul). Agenda mereka adalah untuk mengkonsolidasi apa yang di deskripsikan sebagai "transisi". Dibandingkan membuat markas yang mahal dan membentuk komite koordinasi, ASOCODE memutuskan untuk membagi isu-isu ke dalam kelompok yang bekerja lebih spesifik untuk membangun komunikasi secara virtual atau bertemu langsung pada basis tertentu. COCOCH dan anggota koalisi Honduras, menjadi tuan rumah bagi jaringan Via Campesina yang setuju menyediakan kantor bagi ASOCODE dan memulai mengerjakan makalah-makalah yang dibutuhkan untuk mendirikan organisasi di Honduras secara legal. Meskipun kemunduran dari asosiasi , laporan komisi transisi menunjukkan pada aktifitas dalam jangkauan luas di tahun sebelumnya: "perjumpaan" regional dalam masalah agraria dan petani tak bertanah di Honduras, Elsavador, dan Nicaraguay. Para petani wanita di Nicaraguay bahkan sedang menyiapkan proposal untuk masyarakat sipil SICA di El savador, serta mereka berpartisipasi di dalam forum-forum di Montreal, Madrid, Bangalore dan Nairobi.

Pertemuan "transisi" di Tegucigalpa sebenarnya tidak mengabaikan hubungan yang terjadi di rakyat tani. Brosur–brosur ASOCODE kemudian diperbaharui, konfrensi pers sudah dijadwalkan di akhir acara dan rencana-rencana telah disusun untuk diumumkan sebagai struktur organisasi yang baru di halaman web asosiasi ini. Masyarakat Panama mendesak sisa dari delegasi untuk menegaskan kembali kehadiran ASOCODE di Amerika Tengah yang mengambil

keuntungan dengan menempelkan nama mereka di setiap kop surat di seluruh dokumen di "pesan" dari organisasi-organisasi nasional, sebagai contoh APEMEP-ASOCODE, ADC-ASOCODE,COCOCH-ASOCODE.[59]

Jaringan baru dalam sebuah ruang rekonfigurasi

Di tahun 2001 muncul dua jaringan masyarakat sipil transnasional di wilayah Amerika Tengah. Yang satu menunjuk pada partisipasi petani dan yang satunya lagi hanya diidentifikasi sebagai usaha petani. Dekade sebelumnya kelompok elite yang paling menonjol yang mendukung proyek pasar bebas regional adalah SICA dan usaha petani untuk "menglobalisasi ke bawah" terjadi dalam wilayah Amerika Tengah dan secara ekplisit melalui oposisi pada pandangan kelompok dominan. Saat ini kegelisahan SICA telah terganti dan ruang politik telah direkonfigur dan sebagai hasilnya presiden Mexico Fox mengajukan *Plan-Puebla* Panama, integrasi wilayah baru yang besar dan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Inter-American Development Bank yang berusaha untuk menghubungkan sengketa lahan Mexico dengan Amerika Tengah kedalam perdagangan bebas, membangun zona lingkungan konservasi yang mungkin menjadi kontradiksi.

Jaringan pertama yang baru itu adalah, *Mesoamerican Initiative for Trade* dan *Intergration and Sustainable Development (iniciativa CID)*, mereka mengambil sikap kritik dan berhati-hati dengan perjanjian dalam diskusi mengenai Plan Puebla-Panama yang diusulkan *Trade Treaty of Americas, The US-Central American Free Trade Treaty* dan yang kemudian disusul dengan usulan

[59] Singkatan- singkatan ini merujuk pada APEMEP (asociacion de pequenos y medianos productores de panama), ADC (alianza democratica campesina[el savador]), dan COCOCH (consejo coordinador de organizaciones campesinas de honduras).

paling terbaru yaitu ide perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Tengah dan Uni Eropa.[60] Hal ini didukung oleh organ-organ cabang Oxfam, Catholic Relief Services dan US AFL-CIO. *Iniciativa CID* berpendapat bahwa mengajukan kesepakatan akan memuculkan kesempatan dan sangat penting untuk melakukan lobi selama negosiasi guna menakar kompensasi petani agar memberi harga pasar rendah yang diakibatkan oleh subsidi yang diberikan pemerintah untuk petani US. Pada awalnya, Iniciativa CID merangkap beberapa organisasi petani yang paling penting di wilayah ini seperti, CNOC-Guatemala, COCOCH-Honduras, UPANACIONAL-Kosta Rika dan UNAG-Nicaraguay, UNAPA, dan ATC.[61] Akan tetapi di tahun 2006 organisasi—organisasi tersebut mundur atau meminalisir partisipasi mereka didalam jaringan, meninggalkan kelompok kecil NGO yang berorientasi pada penelitian untuk memperkuat kritikan pada pengusulan perjanjian perdagangan bebas dengan uni eropa.

Jaringan baru yang kedua adalah *Mesoamerican Peasant Platform* atau *Meeting* yang muncul untuk menolak PPP. Didukung oleh bagian dari CONIC Guatemala dan

---

[60] The Free Trade Treaty of the Americas, secara kuat dipromosikan oleh pemerintah US dibawah george w. Bush, pembentukannya sebagai hasil oposisi popular dan sangsi dari beberapa pemerintah amerika selatan, terutama Brazil. The US-Central American Free Trade Agreement menjadi Dominican Republic-US-Central American Free Trade Agreement (DR-CAFTA).

[61] UNAG merupakan organisasi pro-Sandinista yang mencakup produsen besar dan menengah, dan juga beberapa petani skala kecil dan koperasi. UNAG memegang peran utama dalam pendirian ASOCODE dan via campesina walaupun dalam pengunduran dari Via Campesina (lihat Borras dalam koleksi ini). UNAPA menjadi pengganti utama bekas pejuang dari National Resistance atau sebaliknya. ATC adalah organisasi pro-Sandinista yang mendukung kepentingan produsen kecil dan buruh desa dan yang mana saat ini berpartisipasi di beberapa jaringan transnasional.

CLOC. Jaringan luas di Amerika Latin yang baru-baru ini pindah markas ke guatemala. Pada tahun 2002 terjadi inklusi baru di Meksiko yang merekonfigurasi ruang politik untuk mendorong kader mereka sebagai presiden di ASOCODE yang hampir punah untuk mengatakan bahwa jaringan ECM yang baru telah mempertaruhkan tempatnya untuk melawan PPP. Rencana aksi kelompok baru ini memperoleh pengakuan publik sebagai *Regional Coordinator* dari organisasi petani di Meksiko dan Amerika Tengah, sebuah status yang diklaim sebelumnya oleh ASOCODE. Pada pertemuan ketiga jaringan di Tegucigalpa tahun 2003 itu, akhirnya menyetujui untuk "menginstitusikan" sendiri asosiasi dengan nama MOICAM. Pertemuan di Tegucigalpa juga mengusulkan agar MOICAM menjalin hubungan dan berjejaring dengan ASOCODE di Amerika Tengah, sementara CLOC berjejaring dalam level kontinental dan Via campesina yang ada di level dunia (ECM 2003)

Dalam kasus ASOCODE paling tidak "sudah ada" semangat optimis untuk dilanjutkan. Dengan masih diteruskannya kampanye dan kegiatannya di Internet dan "kantor" yang berada menempel didalam kantor COCOCH di Honduras. Penyimpangan dan keruntuhan baru cukup terasa ditahun 2004 ketika "mesas" memutuskan untuk mundur dan mengorganisir kembali di lingkup regional di kalangan organ Via Campesina yang ada di Amerika Tengah.

MOICAM yang baru, mendapat partisipasi dari organ Mexico dengan didukung pendanaan yang cukup besar dari Oxam Great Britain yang sudah kebal terhadap masalah di ASOCODE-sebuah pernyataan penutup pada pertemuan Tegucigalpa pada tahun 2003 yang dikeluhkan oleh mereka-;

Rencana aksi yang disetujui dalam pertemuan ini mini-

> mal sudah terpenuhi dan *Liaison Commision* yang kita setujui adalah membentuk hasil pertemuan di Mangua agar bisa berfungsi sedikit. Dengan kata lain, pertemuan ini (acercamientos) antara petani Mesoamerican masih tidak berubah, dia masih tetap menjadi organisasi regional yang sebenarnya.

Tiga tahun kemudian, Juan Tiney, koordinator umum dari CONIC Guatemala dan seorang pemimpin CLOC juga secara jelas menerangkan bahwa MOICAM masih fokus pada pertemuan aktivis regional secara periodik dan sedikitnya telah tercapai.

> Kita harus memperbaiki komunikasi. MOICAM tidak dapat meneruskan pertemuan dengan yang lain, menganalisa situasi yang kita telah kenal dan merencanakan rangkaian aktivitas yang nantinya tidak dapat kita lakukan. Oleh karenanya kami harus mendinamiskan komisi koordinasi yang juga untuk mendinamiskan MOICAM. Masyarakat adat yang juga berpartisipasi dalam organ ini perlu menkonkretkan posisi mereka sendiri yang mana akan membolehkan mereka untuk mempunyai peran aktif yang lebih banyak di MOICAM. Kami harus membulatkan tekad kami untuk mengaktifkan kembali partisipasi organisasi dari Belize dan Panama untuk selanjutnya menguatkan intergrasi organisasi dari negara lain (Tiney 2006, np).

Armando Brata, salah satu scholar-activist yang paling menonjol dalam "campesinista" tak henti-hentinya mendukung MOICAM (Bartra 2005, n.d.).[62] Dia menyoroti

[62] Banyak dari pekerjaan promosional ini yang muncul dalam website Observatorio Social del agro Mesoamericano, yang disponsori oleh Instituto de Estudios para el Desarrolo Rural "Maya" A.C (IEDRM), yang diarahkan oleh Bartraa. Dia juga merupakan professor di Universidad Autonoma Metropolitana Xochimilco di mexico city. Dalam perdebatan campesinista-descampenista dan

sebagai contoh pada tanggal 20 november 2006 terjadi demonstrasi yang diadakan oleh MOICAM yang diikuti oleh lebih kurang "10000 orang" masyarakat adat, yang bertepatan dengan penutupan pertemuan MOICAM di San Cristobal de la Casa, Chiapas. Meskipun demikian ada sebuah buletin yang dikirim oleh seorang koresponden dari CECCAM—sebuah organisasi yang secara umum bersimpati pada kepentingan petani—yang melakukan demonstrasi dengan 4000 orang pemrotes yang perhatian utama mereka tidak seperti isu yang dimainkan oleh MOICAM, namun lebih pada aksi solidaritas dengan gerakan protes di Oaxaca yang jika dilihat pada slogan dan spanduk-spanduk besarnya bernada mengejek pada kandidat presiden yang menang yaitu Andres Manuel Lopez obrador di kota meksiko yang dipercayai oleh massa ini sebagai kemenangan karena hasil pemilihan yang curang.

Sebuah Konteks Yang Rumit

Kesulitan–kesulitan kronis yang berdampak pada gerakan petani transnasional di Amerika Tengah dapat dijelaskan sebagai bagian dari kelemahan internal organisasi, yang akan dibahas di kesimpulan di akhir bab. Hal ini juga menyangkut kasus di eksternal organisasi petani yang mempengaruhi hingga ke banyak hal. Kesempatan politik telah menghilangkan kepentingan pertanian dalam perekonomian wilayah; kondisi petani kecil, terutama petani padi dan petani kopi menjadi memburuk; dan migrasi besar-besaran dari desa telah merubah rumah tangga di desa, ekspetasi budaya dan aspirasi politik yang dalam yang tidak memberi pertanda baik untuk hasil kerja organisasi petani.

kontribusi dan kontribusi Bartra. Lihat Edelman (1999,203-7) dan Kay (2001,377-86).

Menurunnya posisi penting pertanian

Di seluruh negara-negara di Amerika Tengah, pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian melemah dalam beberapa tahun ini dan disemua negara itu, pertanian tidak mewakili bahkan seperempat dari GDP. Proporsi dari populasi yang bekerja dalam pertanian saat ini sangat sedikit. Bahkan dalam masyarakat agraria di guatemala dan honduras (lihat tabel 2).[63] Meskipun dorongan besar sejak pertengahan 1980 untuk menstimulasi ekspor pertanian non-tradisional. Proporsi dari pendapatan ekspor yang bersal dari pertanian telah turun secara drastis dan dramatis di seluruh dunia di setiap wilayah (lihat tabel 3).[64]

Tabel 1.
Pertanian dalam persentase GDP Amerika Tengah, 1995-2005 (dalam konstan dollar tahun 2000)

	1995	2001	2005
Costa Rica	9.3	8.6	7.7
El savador	10.8	9.8	9.4
Guatemala	24.1	22.8	22.8
Honduras	15.2	14.0	13.6
Nicaragua	18.4	18.5	17.9

Sumber: Cepal (2006,87,94). "pertanian" termasuk berburu, kehutanan dan perikanan.

[63] Sebagaimana Segivia 92004,19) tunjukkan, kesenjangan diantara proporsi GDP dari agrikultur yang mana saat ini rendah (tabel 1) dan terkadang proporsi yang lebih tinggi dari populasi pekerja agrikultur (tabel 2) sepertinya mencerminkan keterlibatan buruh desa dalam non-agrikultural dan pekerjaan non-pertanian dan perbedaan produktivitas buruh agrikultural dan aktivitas agrikultural.

[64] "ekspor pertanian tradisional" biasanya merujuk pada kopi, pisang, gula dan daging. " ekspor agrikulutural non-tradisional" termasuk tanaman ornamental, sayuran beku, buah segar dan umbi-umbian untuk pasar Hispanic US. Ekspor dari pengolahan udang dan ikan segar juga berkembang cepat, terutama di Honduras dan Nicaragua dan mencakup di data CEPAL dalam "ekspor agrikultur".

Karena pertanian udang dan penangkapan ikan untuk tujuan ekspor telah berkembang secara luas selama periode ini dan mencakup data sektor agrikultur, kemunduran agrikultur tanaman yang tentu saja lebih signifikan daripada yang diindikasikan oleh angka di tabel.

Tabel 2.
Amerika Tengah: tenaga kerja agrikultur dalam persentase total tenaga kerja, 1990-2005

	1990	1995	2000	2005
Costa Rica	25.4	21.0	16.9	15.0
El savador	-	25.6	20.7	18.4
Guatemala	48.0	37.6	36.5	36.2
Honduras	42.0	38.2	34.0	36.3
Nicaragua	30.6	33.7	32.4	29.0

Sumber: CEPAL (2006,42).

Tabel 3.
Amerika Tengah: Ekspor agrikultural dalam persentase total agrikultur, 1995-2005

	1995	2000	2005
Costa Rica	43.6	23.3	21.8
El Savador	27.6	12.0	6.2
Guatemala	42.3	37.6	28.0
Honduras	60.0	37.5	29.5
Nicaragua	48.6	44.1	23.1

Sumber: CEPAL (2006,162,166,171,174,218). "ekspor agrikultural" mencakup berburu, kehutanan dan penangkapan ikan

Di awal tahun 1990, Salvador Arias dan Eduardo Stein keduanya merupakan figur kunci dalam kemunculan organisasi petani transnasional di wilayah- menjelaskan dalam buku pentingnya yang berjudul *Democracia Sin Pobreza*, disana mereka mengatakan bahwa industri pertanian dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan di Amerika Tengah dan bentuk baru dari kepemilikan dapat mendemokrasikan keuntungan yang mungkin menghasilkan.[65] Arias yang pandangannya diikuti oleh beberapa kontributor untuk masalah yang sama, beragumentasi bahwa:

> Satu dari sedikit pilihan yang tersisa untuk prospek positif bagi perekonomian regional adalah membangun industrialisasi pertanian dan sistem agro-pangan regional yang untuk sementara di lindungi sebagai bagian kebijakan keamanan pangan yang lebih luas. Permintaan domestik harus menjadi elemen yang mendinamiskan suplai disamping permintaan dari perekonomian internasional. (Arias Peñate, 1992, 64).

Sebagai tambahan untuk kebutuhan perlindungan bagi industri kecil, Arias menganjurkan "konstruksi hu-

---

[65] Arias dan Stein, keduanya adalah ahli ekonomi yang berafiliasi dengan lembaga donor European Community dan Panama City yang berbasis Comite de Apoyo al Desarrolo Economico y Social Centroamerica. CADESCA yang mendukung program pelatihan keamanan pangan di akhir tahun 1980 dan awal 1990, yang diajar secara besar oleh Arias, yang menjadi tempat pertama dimana aktivis petani Centra American dari negara berbeda bertemu dan bertukar pengalaman (Edelman 1998, 57-61). Arias yang melanjutkan menjadi anggota Political Commision of the Frente Farabundo Marti oara la leberacion Nacional dan sejak tahun 2003 dipilih EFLN menjadi wakil El Salvador's Legislative Assembly. Stein memimpin tim observasi pemilihan Organization of American States yang mengkontribusi pecahnya rezim otoriter dari presiden persia Alberto Fujimori. Dia pernah menjabat menjadi Foreign Minister (1996-2000) dan Vice president (2004-present) di Guatemala.

bungan produktif" antara pertanian heterogen regional dan sektor lainnya, yang akan mengubah situasi, sehingga "menghasilkan bentuk keimbangan keuntungan yang baru" (Arias Peñate, 1992, 80).

Saat ini lebih sulit untuk beragumen tentang masalah ini. Daripada model pertanian berbasis pembangunan dengan proteksi tingkat tinggi. Perekonomian agro-eksport tradisional regional telah melemah atau bahkan runtuh dan pemerintah memilihnya sejak akhir tahun 1980 dan yang disebut oleh para scholar sebagai *"New Economic Model"* (atau "Pembangunan berorientasi export") yang didasarkan pada pembukaan ekonomi global kecuali Kosta Rika, yang secara luas mengurangi peran negara dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial. Geliat industri baru, terutama tekstil dan pabrik perakitan elektronik, ekspor pertanian non tradisional, finansial publik, pariwisata dan pengiriman uang dari luar telah menjadi sumber utama devisa, sebuah target kunci untuk tataran regional dan kapital luar regional dan pentingnya sumber dari pekerjaan dan stabilitas makroekonomi. (Díaz Porras and Pelupessy 2004, 25; Segovia 2004, 7–8; Robinson 2003, 156–213). Migrasi besar-besaran, baik dari area pedesaan atau urban juga telah menghasilkan keuntungan pada kesempatan pekerjaan untuk makelar "coyote" (pendatang gelap) yang melaya pengiriman dana dan barang melintasi Amerika Tengah ke dan dari Amerika Serikat. Contoh negara yang menerapkan fitur yang spesifik dalam model neoliberal dan pencampuran aktivitas dari program yang berbeda dari negara ke negara, adalah El-savador dan Kosta Rica, kedua negara ini yang paling jauh jalannya untuk memilki perekonomian non pertanian, implementasi dari Dominican Republic-United States–Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) yang juga didukung oleh seluruh pemerintah regionalnya. Ini seperti mempercepat dan memperdalam pengaplikasian model ekonomi baru ini.

Padi dan biji kopi, yang dahulu adalah persendian sektor pertanian kecil

Kedua kegiatan pertanian yang menurut sejarah paling terpenting pada pada cerita petani kecil di amerika tengah, adalah petani padi dan petani kopi, keduanya telah diterjang dengan keras selama dua dekade terakhir. Pada kasus sebelumnya, masalah ini menunjukkan ironi yang kejam semenjak meningkatnya permintaan terhadap komoditi jagung untuk produksi ethanol di Amerika Serikat yang ujung-ujungnya justru mengakibatkan kenaikan harga di tahun 2006-2007yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kenaikan harga ini terjadi dampak masalah yang telah dimulai sejak awal tahun 1990an, sektor pertanian kecil jagung hampir menghilang di Kostarica, El Savador, Honduras dan Guatemala dan dikembangkan dengan sangat signifikan hanya di Nicaraguay. Sangat mirip dengan kasus terakhir sebagai hasil kembalinya substansi produksi oleh sektor yang populasi paling miskin.[66] Ketika dampaknya berimbas pada kenaikan harga jagung di tahun 2006, petani di Amerika Tengah masih belum menentu nasibnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena sektor pertanian kecil di tempatkan dengan kurang baik (dalam hal aksesnya untuk mendapat modal, lahan, transportasi, pelayanan dan fasilitas simpanan) sebagai alat untuk mengambil keuntungan perekonomian.

---

[66] Anggapan ini didukung oleh data yang menunjukkan kemunduran terbesar sejak tahun 1980 di nicaragua yang secara besar menggunakan pupuk, traktor per hektar di tanah yang subur dan persentasi irigasi di lahan pertanian 9Acevedo Vogl 2003, 54-5). Sementara pengolahan jagung dengan pemasukan rendah mungkin menjadi strategi pertahanan hidup yang cukup memadai bagi beberapa masyarakat miskin pedesaan. Hal ini tidak seperti menimbulkan kelangsungan proses akumulasi yang mungkin meyakinkan mereka menaikkan level menjadi sejahtera.

Selain itu di seluruh negara di Amerika Tengah, populasinya tumbuh melebihi produksi bahan pangan dan sementara area penanaman jagung sangat sedikit.[67] Meningkatnya harga jagung telah menjadi ancaman utama bagi rumah tangga yang ada dinegara-negara itu, terutama bagi rumah tangga petani, yang mana, para konsumer hanya menerima keuntungan dari jagung dan secara signifikan membeli makanan. Pembuat kebijakan dan analisis pasar juga memperhatikan bahwa pertanian kecil akan menjual cadangan jagung mereka untuk mendapat keuntungan dari naiknya harga namun tidak dapat membeli lagi biji atau jagung untuk di konsumsi sendiri oleh mereka.

Di seluruh negara-negara di Amerika Tengah, produsen padi menjadi kelompok yang paling banyak terkena imbas dari Program Penyesuaian Struktural, peng-integrasian pasar regional dan liberalisasi pada tahun 1980an dan 1990an. Periode dua dekade itulah yang mengakibatkan kenaikan harga pada tahun 2006-2007, sehingga produksi padi tidak menguntungkan. Bahkan petani kecil yang mengolah jagung untuk konsumsi rumah tangga, sepertinya mereka akan berpikir dua kali untuk melanjutkan penanaman jagung, jika mereka harus mengeluarkan uang banyak untuk membayar pemasukan manukfatur, menyewa tenaga kerja atau mesin, sewa lahan atau mempertimbangkan harga yang baik untuk hasil kerja mereka. Produksi untuk rumah tangga dan menjual surplus yang sedikit di pasar telah berhenti menjadi strategi yang lebih bijaksana. Pengecualian bagi mereka yang meminimalisir interaksi mereka dengan pasar ekonomi.

---

[67] Ini berdasarkan data produksi pangan per kapita, produksi jagung dan lahan panen dari data base online FAOSTAT (2008). Lihat juga proyecto Estado de la Region-PNUD (2003,138), yang melaporkan di area yang menanam padi di Amerika Tengah dan Panama meningkat 4 persen antara tahun 1978 dan 2001, ketika populasi di pedesaan meningkat 55 persen di periode yang sama.

Meskipun petani di Amerika Tengah melekat pada budaya penanaman jagung selama seribu tahun, namun untuk banyak alasan, pilihan yang baik adalah hanya membeli jagung yang mereka butuhkan, ketika harga jagung melejit setelah tahun 2006 yang juga mengakibatkan berkurangnya ekspor ke Amerika Tengah. Selama dua dekade dari praktek dumping dan meliberalkan perdagangan intra-regional pada padi memberikan dampak yang memperburuk mata pencaharian pertanian kecil. Ketika DR-CAFTA sudah dimplementasikan secara utuh, beberapa pertanian kecil memang mendapat keuntungan, tetapi kemungkinan akan banyak yang menghadapi kejatuhan dari kompetisi yang meningkat sebagaimana yang terjadi di meksiko.

Keadaan petani padi dari pertanian kecil yang sudah sulit, diperburuk selama dekade terakhir oleh elemen lainnya yaitu "new economic model" di Amerika Tengah atau yang lebih luas disebut sebagai globalisasi neoliberal. Hal ini juga mencakup memprivatisasi bank pembangunan negara, perluasan lembaga dan dewan pengurus komoditi; pendanaan untuk penelitian sektor publik agronomic khususnya dalam skala kecil; dan pertanian di lereng bukit yang masih berlanjut. Pemusatan yang selalu berkembang, dan integrasi vertikal diantara perusahaan-perusahaan besar yang selalu menyediakan pemasukan dan mengendalikan pembagian perdagangan pertanian; pengurangan atau eliminasi dari tarif perlindungan; dan menghilangnya subsidi (untuk kredit, insuransi pertanian, harga pendukung, pemasukan, dan bantuan teknisi) sekarang disediakan oleh institusi sektor publik yang justru memperlemah posisi petani kecil. Kondisi petani kecil ini semakin memprihatinkan karena mereka banyak meminjam pada lintah darat, sebagai perantara dan meningkatnya keadaan yang tak terduga dan paksaan yang tak terlihat. Proses

ekslusi dan pembalikan ide Reforma Agraria pada tahun 1960, 1970 dan 1980 -yang mana terjadi ketidaksukaan pada golongan atas sebagai penghambat permainan bebas dalam kekuatan pasar—telah menyebabkan pengurangan lahan petani dan menghancurkan harapan mereka. Harga yang harus dibayar dari seluruh proses yang substansi dalam masyarakat yang tinggal di pedesaan ini adalah terjadinya migrasi ke area pedesaan lain, atau munculnya rumah-rumah gubuk di perkotaan dan berbagai bentuk dari semua jenis patologi sosial yang ada (lihat dibawah)

Hingga terjadi pantulan yang dimulai pada tahun 2006—harga kopi yang dalam sejarah sudah rendah semenjak runtuh pada tahun 1989 di *International Coffee Agreement* ketika disetujui adanya penentuan quota untuk negara pengekspor[68]—setelah hampir dua dekade sektor kopi penuh dengan depresi, situasi ini diperburuk dengan munculnya negara-negara produsen baru, terutama Vietnam dan Indonesia yang diiringi dengan datangnya teknologi baru untuk pembakaran biji kopi, sehingga memungkinkan untuk menggabungkan kualitas rendah seperti biji robusta menjadi campuran premium, dan ini tentu saja merugikan produsen kopi arabika berkualitas tinggi di Amerika Tengah. Produsen kopi Amerika Tengah di beberapa wilayah benar-benar meninggalkan lahan mereka yang tidak lagi menguntungkan untuk panen. Yang lainnya tetap berusaha untuk meraih sukses dengan jujur dan untuk memenuhi permintaan pasar perdagangan kopi yang adil.

Sedikitnya dari setengah ekpor kopi di Kostarica saat itu berpindah ke pasar kopi "kualitas tinggi" dan masuk

[68] Harga melonjak antara bulan januari 2005 dan desember 2007 menjadi 80.8 persen untuk jenis robusta, namun hanya meningkat 19.8 persen untuk "jenis kopi arabika" yang diproduksi di Amerika Tengah (ICO 2008).

kepasar dengan harga yang rendah. Sebagaimana yang terjadi dengan komoditi jagung, meskipun demikian sebenarnya masih terlalu dini untuk mengatakan apakah memperbaiki perspektif dalam pasar kopi akan membantu keuntungan pertanian kecil di Amerika Tengah. Membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab sinyal harga yang baik dalam pangsa kopi daripada kasus penanaman komoditi tahunan. Hampir dua dekade setelah terjadi pelepasan institusi pada sektor tersebut (dan lahan pertanian mereka oleh produsen kopi terdahulu) menjadi tantangan bagi mereka untuk menjadi lebih baik

Tabel 4.
Ekspor kopi Amerika Tengah dalam persentasi total pendapatan kurs asing, 1980-2003.

	1980-4	1990-4	2000-3
Costa Rica	2.2	8.1	2.6
El Savador	43.1	11.2	2.7
Guatemala	25.4	13.2	6.4
Honduras	19.2	12.1	6.3
Nicaragua	24.5	12.9	8.0

Sumber: CEPAL data dikutip di Segovia (2004,14).

Lagi pula, ketika lahan dan area penanaman kopi telah meningkat dalam masa 15 tahun terakhir, kopi tidak lagi menjadi prioritas politik utama bagi pemerintah Amerika Tengah. Karena itu kontribusi kopi pada pendapatan ekspor menurun dengan cepat di seluruh negara di Amerika Tengah, terutama di Kostarica dan El Savador yang dahulu adalah produsen terkenal di regional itu.[69]

[69] Tabel 4 berdasarkan data CEPAL di Segovia (2004) capaian jumlah dalam periode bertahun-tahun menggambarkan tren yang luas. "total pendapatan dalam kurs asing" mencakup pengiriman uang dan

Di luar perdebatan campesinista dan descampesinista

Di Amerika Tengah dan dimanapun juga, para cendikiawan dan penentu kebijakan "modernist", memprediksikan bahwa sebagian atau secara utuh, alasan hilangnya kaum petani dari beberapa momen penting transnasional adalah: dengan bergantinya mekanisasi pertanian; lalu dengan datangnya paket teknologi "Revolusi Hijau", pembebanan akibat program penyesuaian struktural, liberalisasi ekonomi dan kekalahan reforma agraria yang dipimpin negara (kadang disebut "counter-reform"); dan yang baru-baru ini adalah dengan disepakatinya perjanjian perdagangan bebas dan munculnya reforma agraria yang dipimpin pasar. Dalam banyak kasus perdebatan, nasib kaum petani menjadi pusat dalam masalah yang saling berkaitan dalam kelangsunngan perekonomian dari lahan mereka dan reproduksi sosial rumah tangga petani. Hal tersebut bukan fokus yang pantas dalam diskusi seperti analisis produksi kopi dan beras yang disebut di atas atau migrasi dan pluri-activty yang ditunjukkan di bawah ini. Meskipun demikian dari sudut pemahaman dari kemungkinan gerakan petani, dan tentunya yang antarbangsa beberapa penambahan, yang perlu diperhitungkan adalah lebih luasnya pertimbangan politik.

Di Amerika Tengah, pergolakan-pergolakan yang penting terjadi di dua atau tiga dekade terakhir yang secara drastis mengubah keseimbangan kekuatan kelas disana dan itu berkontribusi terhadap rekomposisi kekuatan kaum elite dan non elite di setiap negara. Meskipun demikian kaum elite yang terikat dengan sejarah mereka, di beberapa kasus,

---

ekspor, sehingga proporsi yang dimunculkan dalam data sebagaimana diindikasi dalam tabel lebih kecil daripada jika data ekspor kopi dalam persentasi total ekspor itu sendiri. Data CEPAL yang menggunakan formula terakhir memberikan persentasi yang sedikit lebih tinggi (CEPAL 2006).

melanjutkan keterlibatannya dengan sektor agro-ekspor yang bermacam-macam. Sebagian pergolakan itu menghasilkan rasa ketidaknyamanan di area pedesaan bagi investor, terutama selama perang sipil di guatemala, elsavador dan nicaraguay; akibat penerapan dari reforma agraria di tahun 1980an, dua kasus terakhir ini mendorong kebanyakan pemilik tanah untuk mundur dari pedesaan tapi tidak dari aktivitas pertanian. Banyaknya aliran dana yang datang, telah menjadi faktor utama dalam memunculkan aktivitas perbankan kaum elite yang kuat yang didukung oleh kerabat mereka (para migran) untuk mentransfer dana dan ikut menanam investasi di regional dan luar regional yang mengakusisi banyak bidang finansial, juga melebarkan institusi di bidang finansial.[70]

Pengintensifan orientasi ekspor di pertanian Amerika Tengah pada tahun 1980 dan setelahnya, telah membawa pertumbuhan pesat terhadap perusahaan-perusahaan kapitalis. Sektor elite yang paling berkuasa di beberapa negara di Amerika Tengah yang pada dasarnya berorientasi dalam industri dan finansial, tertarik dengan jenis baru—tidak terlalu menarik bagi investor—yaitu perusahaan berukuran sedang yang berorientasi agro-ekspor, model ini memang sedikit memberi pemasukan, dan pemasaran pengeluaran dari penanggung finansial. Resiko model seperti ini sangat banyak, terbukti di seluruh wilayah, kemudian digantikan dengan model akumulasi terpusat model agro-ekspor tradisional (kopi,pisang, gula, daging sapi) yang berdasarkan pelayanan dan dalam sumber yang lebih beragam untuk devisa negara, termasuk agro-ekspor non tradisional

[70] Ketegangan ini ditimbulkan oleh orang Savador, yaitu Banco Cussatlan yang beroperasi di El savador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, dan Amerika Serikat yang mana telah mendapatkan bank di United Kingdom dan lainnya. Pada tahun 2007, Banco Cuscatlan dijadikan milik New York yang memiliki basis kelompok di perkotaan.

yang telah mengubah keseimbangan kekuasaan di elite agraria dan juga memperlemah elite non agraria.

Kemungkinan untuk sektor cross-class aliansi antara produsen beras besar dan kecil sebagai contoh telah hilang juga semenjak semuanya kecuali produsen beras yang terberkahi dapat pindah pada aktifitas yang lebih menguntungkan dan produsen kecil beras telah hancur oleh penurunan harga sepanjang dua dekade dan oleh penghematan sektor publik. Rekomposisi dari golongan elite juga telah mengintensifkan marginalitas politik dan pengecualian sosial yang berdampak pada sektor miskin kaum petani.[71]

Akibat pertanian mengalami kemunduran dalam sumbangannya terhadap perekonomian regional, pusat gravitasi ekonomi dan politik berpindah dari sektor pedesaan, yang membuat usaha untuk melaksanakan perjuangan disekitar perdagangan antara pertanian dan industri atau disekitar reforma agraria dan memperbaiki kondisi produksi semakin sulit.[72] Sebagaimana area pe-

---

[71] Istilah "pengecualian sosial" digunakan secara luas di pertengahan 1990, ketika analisis Uni Eropa dan Internasional labour Organizations mulai menyadurnya untuk merujuk apada apa yang mereka lihat sebagai jenis baru masalah sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh globalisasi (Gacitua dan Davus 2000,13). Organisasi yang populer menggunakan bahasa serupa, terutama dalam pembentukan jaringan trnasnasional berbasid Brazil yang menyebutnya "Cry of the Excluded" (grito dos excluidos. Grito de los exluidos) yang saling melengkapi dan memiliki hubungan dekat dengan CLOC. Baru-baru ini, bebbington (2007) dan yang lainnya berargumen bahwa konsep yang lebih analistis yang berguna adalah "kerjasama yang merugikan", semenjak hal ini dimunculkan bahwa masyarakat miskin yang paling miskin sering kali secara keseluruhan bergabung, walaupun dalam cara yang sangat tidak menguntungkan dalam sistem ekonomi dan sosial yang dominan.

[72] Dukungan dari reforma agraria negara yang diperbaharui adalah bagian penting dalam mimbar Via Campesina dan anggota organisasinya yang lebih jauh sulit dalam konteks yang mana

desaan diseluruh regional telah kehilangan populasi, mereka tidak hanya kehilangan perwakilan poltik di institusi formal namun juga kehilangan pengaruh politik dalam kelompok penting lobi politik dan kehilangan perlawanan yang muncul diluar institusi tersebut, urbanisasi cenderung mengurangi perhatian masyarakat urban dan konsumer dengan penanganan masalah pedesaan. Kecuali produsen kecil yang telah meraih kesuksesan dalam melakukan integrasi pada model ekonomi baru, -seperti petani sayur-sayuran musim dingin di guatemala dan Kostarica- yang menjadi terlampau susah bagi mereka untuk bersuara. Dan ketidakhadiran "suara" tersebut menimbulkan banyak yang memilih "keluar".

Tabel 5.
Amerika Tengah: persentasi dari populasi urban dalam total populasi, 1995-2010

	1995	2000	2005
Costarica	54.5	58.7	62.6
Elsavador	52.5	55.2	57.8
Guatemala	36.5	43	50
Honduras	42.9	45.3	47.9
Nicaraguay	54	55.4	56.9

Sumber: CEPAL (2006,33). Definisi dari koresponden "urban" yang digunakan di setiap negara. Data untuk tahun 2010 sebagai proyeksi.

Urbanisasi, Migrasi Dan Pluriaktivitas

Di Amerika Tengah dan dimanapun juga, aktivitas pekerja non-agrikultur dan pengusaha hampir di semua

sejumlah besar keuntungan dari reforma pada tahun 1960an dan setelah menyerahkan dan meninggalkan tanah mereka, kadang juga menjualnya pada agribisnis yang besar (Ruben and Funez 1993; Ruben and Masset 2003).

tempat meningkatkan peran dalam kelangsungan hidup pedesaan miskin. Hal ini mencerminkan indikator berubahnya komposisi populasi yang aktif di area pedesaan secara ekonomi sebagaimana dalam level rumah tangga.[73] Penggolongan strategi individu dan rumahtangga mengkontribusi bagi pengembangan paksaan bekerja dari semi dan desa tak terlatih yang kadang memelihara lahan dan atau menghubungkan masyarakat kota yang pada dasarnya bergantung pada upah tenaga kerja yang rumit, *self-employment* dan melibatkan diri dalam "mikro-enterprise", pertanian skala kecil, pekerja tangan atau industri dan aktifitas lain. Di beberapa area utama urban, banyaknya jumlah penduduk kota yang berpergian secara periodik atau musiman ke zona area pedesaan terdekat untuk bekerja di pertanian dan agroindustri.

Di semua negara Amerika Tengah, proporsi populasi yang hidup di area urban terus berlanjut tumbuh. Bahkan di Guatemala dan Honduras yang negara nya berbasis pedesaan, secara keseluruhan setengah populasinya saat ini atau nanti akan tinggal di area urban. Perubahan demografi dan geografi telah menimbulkan implikasi yang amat besar, tidak hanya pada komposisi sektoral perekonomian Amerika Tengah (pelebaran sektor pelayanan "informal" urban dan lainnya), namun juga untuk menkonfigurasi pasar tenaga kerja dan budaya serta imaji politik.

Dewasa ini, budaya kehidupan urban, pedesaan menumpuk di banyak cara yang memungkinkan untuk berbicara "urbanisasi" di tenaga kerja pedesaan dan "ruralization" di dalam kreasi pasar tenaga kerja perkotaan.

---

[73] Di seluruh negara Amerika tengah lebih dari 80 persen wanita desa yang aktif secara ekonomi pada tahun 1998 bergabung dalam aktivitas non-agrikultural; proporsi pria ditempatkan dari 21.5 persen di honduras sampai 57.3 persen di Costa Rica (proyecto Estado de la region- PNUD 2003,135).

Imaginari urban dan ekspektasi konsumsi urban saat ini telah menumbuhkan pengaruh dengan cepat di zona pedesaan. Bahkan di area pedusunan terpencil mulai dikembangkan akses ke pendidikan, mengembangkan kepercayaan pada pekerjaan diluar pertanian dan kemunduran kesuburan rata-rata di sejumlah keluaga tenaga kerja yang ada dan tingginya penekanan pada mereka yang masih bertani atau pada mereka yang bekerja dimanapun juga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Hal ini menimbulkan ketegangan hubungan ikatan keluarga dan membatasi kemungkinan dalam partisipasi di berbagai macam cara hidup kolektif.

Penyatuan budaya urban dan rural serta ekspetasinya, bagaimanapun juga tidak menandakan penyempitan perbedaan standar hidup. Perbedaan antar pedesaan dan urban dalam pendapatan, konsumsi, dan kesempatan hidup tetap ada di banyak wilayah. Peringkat kemiskinan masih tinggi di pedesaan, walaupun di beberapa negara (El Savador, Guatemala, Nicaraguay) perbedaan kemiskinan pedesaan dan urban sangat sedikit di beberapa tahun belakang ini.

Dalam pengertian situasi Amerika Tengah, disana mengalami situasi yang berbeda secara drastis sebagai "*new rurality*" yang mana, para scholar di Eropa memuji situasi ini. Jika area pedesaan menyediakan tenaga kerja, makanan dan bahan-bahan mentah untuk membangun negara, maka para scholar tersebut menyarankan dibawah "*new rurality*" pedesaan akan mengalami peningkatan di sektor pelayanan dan manufaktur, yang tidak lama lagi akan membutuhkan taraf yang sama dalam konsentrasi spasial seperti yang terjadi dalam model perekonomian *Fordist* dan itulah yang akan memberi kombinasi atau sebagai ganti dari pertanian yang menjadi sanggahan ekonomi domestik

keluarga petani selama ini[74] (Marsden 1995). Kecuali pada bagian di Amerika Tengah yang mengalami peningkatan di sektor pariwisata (umumnya di Kostarica), penerapan yang membatasi paradigma ini seharusnya jelas. Subordinasi dari pertanian pada industri tetap menjadi hal penting di luar Eropa, terutama di amerika tengah. Kombinasi dari harapan terhadap pemusatan mengakibatkan pada cara hidup menyimpang yang berkisar di soal kriminalitas ("maras" atau geng, bandar obat, dan kriminal 'ruralization" di perkotaan) sebagai aksi kolektif untuk mengimprovisasi kondisi kerusakan kepribadian dan orientasi politik.

Tabel 6.
Amerika tengah: pengiriman uang dari luar, 1995-2005 (jutaan dalam dollar US saat ini)

	1995	2000	2005
Costarika	133.9	93.4	270.4
Elsavador	1,388.60	1797.1	2,864.60
Guatemala	491.2	868.2	3,557.50
Honduras	242.5	746.9	2,002.40
Nicaraguay	138	406.2	750.4

Sumber: CEPAL (2006,140). Data merujuk pada jumlah transfer bersih saat ini dis eluruh dunia.

Patologi sosial yang sebelumnya tidak terlalu dikenal di pedesaan seperti kekerasan geng, jual beli dan konsumsi obat terlarang, meningkat kehadirannya di area pedesaan. (Andrade-Eekhoff and Silva Ávalos 2004, 72–4), alasannya kompleks dan saling berhubungan dimulai dari deportasi Amerika Serikat pada anggota geng di California ke asal negara mereka untuk kepentingan mengisolasi pangkalan-

[74] Untuk pandangan yan lebih kritis, lihat Rubio (2002) dan kay (2005,11-15).

pangkalan udara dan pelabuhan jalur perairan di daerah pedesaan di Amerika Tengah yang digunakan sebagai sarana pengepakan agro-ekspor obat terlarang, selain itu tingginya pengangguran dan demobilisasi yang menimpa pejuang perang sipil di wilayah memudahkan tersedianya senjata dalam periode setelah konflik, kondisi ini diperparah oleh kurangnya program rehabilitasi yang memadai dan terjadinya proses eksklusi sosial yang terus menerus.[75] Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam analisis ini adalah pada akhir tahun 1980an ketika ilmuwan sosial mulai meneliti geng di Amerika Tengah atau "maras", yang anggotanya kebanyakan adalah anak-anak muda yang lahir dan tumbuh di kota (Levenson 1989, 7). Selama satu dekade, "maras" telah menyebar ke kota-kota kecil dan desa-desa (terutama Guatemala, Elsavador dan Honduras) dan bisnis mereka meluas hingga ke bisnis jual beli manusia (dari utara hingga ke Meksiko dan Amerika Serikat) dan telah membangun dimensi transnasional yang kuat sehingga militer Amerika Serikat dan kebijakan resmi asing mulai melihatnya sebagai "aktor non-negara" yang berbahaya, yang menjalankan "*failed states*" dan sebagai ancaman utama pada keamanan nasional (Arana 2005; Manwaring 2005).

Rumah tangga di pedesaaan, semakin tergantung tidak hanya pada pekerjaan yang sifatnya *off-farm* namun juga pekerjaan di luar regional dan juga pengiriman uang. Sebuah pola yang telah ada di daerah tersebut seperti di timur Elsavador dan di setiap negara di wilayah yang jauh

---

[75] Penggunaan ekspor agro pembungkusan tanaman untuk mefasilitasi penyelundupan obat adalah salah satu konsekuensi ironis yang tidak disengaja untuk mendorong stimulasi ekspor non tradisional agrikultural. Metode seperti itu menjadi sangat umum yang mana lembaga US Drug Enforcement Administration melaporkannya dengan membri istilah pada mereka yaitu "the broccoli routes" (rute brokoli) (Fisher and Benson 2006, 27).

dari Kostarica.[76] Akhir-akhir ini, misalnya para pekerja migran Nicaragua mencapai lebih kurang 10% dari jumlah populasinya (Sandoval García 2002, 264–8). Pengiriman uang dari luar ini tidak hanya mengalami peningkatan yang ekstrim, tetapi juga mengakibatkan peningkatan yang esensial bagi reproduksi sosial dan stabilitas makroekonomi Amerika Tengah. Di Elsavador, Guatemala, dan Nicaraguay, dana yang dikirim dari luar negeri saat ini setara dengan setengah jumlah pendapatan ekspor (dan di guatemala hampir mendekati tiga perempat). (lihat tabel 6 dan 7)

Migrasi memang membuat angka pengangguran rendah, dan memberikan *katup pengaman* untuk mengurangi tekanan politik dan dampaknya, dia menjadi semacam takaran redistribusi dalam konteks program redistribusi yang dipimpin negara telah melemah atau menghilang. Migrasi juga memberikan penuaan dan feminisasi dalam populasi petani yang mana tampaknya mengacaukan ekonomi pertanian kecil, terutama di daerah pertanian yang masih tradisional di lereng bukit dimana tenaga kerja manual masih dibutuhkan (Morales and Castro 2002, 117).

Tabel 7.
Amerika Tengah: pengiriman uang dari luar, 1995-2005 (dalam persentasi pendapatn total ekspor)

	1995	2000	2005
Costarika	3.0	1,2	2,8
Elsavador	67,5	49.9	62,6
Guatemala	17,4	22,3	71,4
Honduras	14	30,0	58,5
Nicaraguay	22,7	43,2	54,6

Sumber: CEPAL (2006,135,140). Jumlah transfer bersih saat ini dari seluruh dunia dalam persentasi ekspor barang dan jasa.

[76] Di departemen timur Salvadoran La Union, membuat perkiraan

Besarnya aliran pengiriman dana ini memberikan dampak kepada kemunculan gaya hidup foya-foya, yang menyurutkan minat tenaga kerja dan investasi serta mendorong gaya konsumerisme (Segovia 2004). Hal ini pada gilirannya membawa konfigurasi ruang perekenomian transnasional baru dalam zona-zona pengiriman uang yang tinggi ini, batas area dimana pekerjaan dengan upah terendah di pertanian dan sektor lain yang di pegang kebanyakan oleh yang bukan warga negara, sama seperti tumbuhnya jumlah migran Nicaraguay dan Honduras di utara Elsavador atau banyanya migran Nicaraguay di Kostarica. (Morales and Castro 2002,12). Barangkali yang paling penting untuk tujuan bab ini adalah pembahasan tentang migrasi yang secara frekuensi menghancurkan kapasitas aksi politik. Seperti yang terjadi di daerah barat pemerintahan Salvador di San Antonio Pajonal yang mana Katherine Andrade dan Claudia silva bertanya , "apa yang dimaksudkan dengan kewarganegaraan efektif yang 80 persen pemilih teregistrasi tinggal justru di Los angeles (california)?. San Antonio pajonal mungkin menjadi kasus yang ekstrim dari migrasi di Salvador, namun ini memperlemah partisipasi sipil dan komitmen politik sebagai hasil dari arus migrasi transnasional (*dan keinginan untuk migrasi)* yang meskipun ini sangat penting di komunitas lain di seluruh wilayah.

Kesimpulan

Amerika tengah, dengan tradisi solidaritas *cross-border* karena munculnya tren migrasi yang pada tahun 1990an, telah menjadi titik pusat organisasi petani transnasional yang paling dinamis. Meskipun demikian hampir

sekita 41 persen rumah tangga menerima pengiriman uang dari luar (Hecht and Saatachi 2007,667).

dari satu dekade setelah munculnya jaringan regional petani pertama, prospek untuk konsolidasi organisasi petani transnational yang kuat jauh dari yang diharapkan.[77] Pemahaman dalam perubahan skenario membutuhkan perhatian pada masalah yang saling berkaitan dari kondisi internal politik organisasi dan cara bekerja serta lingkungan luar mereka.

Peningkatan program di tahun 1990an, menghasilkan teori "global" atau masyarakat sipil transnasional, yang diletakkan dalam gagasan "jaringan" sebagai kategori analitikal dan bentuk kelembagaan, teknologi komunikasi, dan praktek-praktek pengetahuan. Secara tipikal, analisis jaringan ini menghasilkan antusiasme yang besar dari pendukung nya yang sebagian besar adalah "masyarakat sipil global" bahkan mereka melakukan aksi menggemparkan dengan strategi kontra pemberontakan.[78] Seperti yang ditunjukkan Jonathan Fox (2000, 9–12, 45), selalu ada penggunaan konseptual yang terselip antara para scholar dan aktivis pada terminologi tentang "jaringan", "koalisi" dan "gerakan" (Fox 2000, 10, *italics in original*). Hal ini jelas bahwa terjadinya hubungan masyarakat sipil transnasional dapat menghasilkan jaringan, yang mana akan menghasilkan koalisi dan menghasilkan "gerakan". Hal ini juga muncul dari kasus Amerika Tengah yang didiskusikan diatas bahwa hal tersebut tidak terjadi secara otomatis. Seperti di dalam literatur aksi kolektif yang lebih

---

[77] Kesulitan-kesulitan ini tidak selalu dibenarkan oleh aktivis gerakan petani dalam diskusi strategi internal atau oleh intelektual yang menyertai mereka (namun lihat Gaete et al. 2005); tentu saja, sebagaimana yang diindikasikan diatas dalam poin berbeda, sering kali ada permasalahan penyangkalan atau eufimisme sehubungan dengan organisasional internal atau hambatan-hambatan eksternal.

[78] Kedua tiang dari diskusi ini dilambangkan oleh Riechmann dan Fernandez Buey dalam redes que dan libertad (1994), selain itu Arquilla dan Ronfeldt dalam networks and netwars (2001).

luas, studi tentang gerakan sosial yang gagal jelas berpengaruh terhadap teori (Edelman 1999, 2001), hanya ada satu-satunya suara yaitu Annelise Riles dalam tulisan etnografinya *tour-de-force* yang bercerita tentang organisasi wanita di pasifik, pertanyaan pemberlakuan pandangan "jaringan" sebagai organisasi yang tahan lama dan menaruh perhatian pada cara "jaringan", secara frekuensi itu menunjuk pada aktifitas jaringan mereka sendiri sebagai takaran yang dinilai sukses. Riles terlalu jauh dalam menyarankan bahwa " jaringan" adalah bentuk dari pengganti analisis dan kenyataan "kegagalannya" yang endemik, ini tentu berdampak pada bentuk jaringan (2001, 174, 6).[79] Meski mungkin tidak dapat diaplikasi di seluruh jaringan di setiap waktu dan semua tempat (seperti yang Riles klaim). Perspektif terakhir ini butuh pertimbangan ketika melakukan analisa terhadap kejatuhan ASOCODE di Amerika Tengah pada tahun 1990 atau kesulitan yang dihadapi oleh pendukungnya, seperti MOICAM.

Jika aktivis petani dan para pemikir yang mendampingi mereka tidak mau mengakui kesalahan yang terjadi antara "jaringan", "koalisi", dan "gerakan", maka mendiskusikan secara lebih jauh tentang NGO dan organisasi populer pasti akan menjadi tabu. Misalnya dalam persaingan memperebutkan pendanaan dari Eropa yang terjadi di Amerika Tengah pada tahun 1990 yang di klaim sebagai "organisasi populer" sebagai perwakilan kaum marginal, secara historis—pengecualian pada sektor—ini menjadi sepenuhnya penting. Mengingat adanya sejarah antagonis

[79] Comaroff dan Comaroff (1999,33) juga menarik perhatian untuk bagaimana 'membentuk modernis Euro' dari masyarakat sipil yang mungkin substansinya dikosongkan.....dirubah menjadi pemujaan yang kosong...(atau) bahan tertawaan yang berbahaya'. Pada waktu yang sama, mereka mengakui sebagaimana riles jarang-jarang melakukan bahwa "masyarakat sipil" walaupun demikian menjadi penggerak bagi visi utopian untuk membuka ruang demokrasi.

di tingkatan regional antara "organisasi populer" dan LSM, hal ini menarik perhatian seberapa banyaknya dua bentuk itu berkumpul, seperti dalam kasus ASOCODE. Menurut analisa gerakan feminis di Amerika Latin, Sonia Alvarez (1998) menyebut proses ini sebagai proses "NGO-ization" dari organisasi populer. ASOCODE dihadapkan pada aktifis yang suka berperang yang anti NGO kecil di regional. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang mahal, markas dan bentuk organisasi, pemimpin dan staf teknisi menjadi mempemudah proses pengrusakan pengulangan "LSM speak" (bahasa LSM) (sustainability, transparency, participation, accountability dll) yang menghancurkan *lampooned* pada aktifis hak asasi manusia argentina Gino Lofredo parodi, "get rich in the 1990. You still don't have an NGO?[80]

Mundurnya ASOCODE memberikan beberapa pelajaran dari asosiasinya dan koalisi. Grup seperti Via Campesina dan CLOC sebagai contoh, mereka sangat mengindari kepercayaan yang berlebihan pada pendanaan perusahaan. Ongkos pemeliharaan markas yang mahal dan cara kepemimpinan yang dikarakterkan oleh ikatan personality dan kurangnya rangkaian generasional, itulah yang memberikan kehancuran pada ASOCODE (dan juga kepada beberapa organisasi utama nasional di regional). Pada waktu yang sama, ternyata itu tidak juga memberikan pelajaran untuk membangun gerakan yang dinamis, sebagai contohnya MOICAM. Konsep dari ini dan organisasi lainnya sebagai "jaringan" dan "tempat" menegaskan batasan pada efisiensi politik mereka terutama dalam level transnasional.

Banyak potensi politik masyarakat sipil transnasional berasal dari—seperti Keck dan Sikkink (1998, 12–13)

[80] Untuk pendekatan yang kurang lucu pada persoalan yang sama, lihat Stirrat (1996).

katakan tentang—model "*pola boomerang*" dan yang lain menyebutnya sebagai "pergeseran tempat" (van Rooy 2004, 20) atau "*model lompat katak*" (O'Brien et al. 2000, 61). Pada dasarnya, gerakan yang tidak dapat mencapai tujuan mereka dalam politik domestik, kemudian mencari sekutu internasional untuk menekan pemerintah agar menyesuaikan dengan norma-norma internasional. Secara empiris, berdasarkan model Keck dan Sikkink, dapat ditemukan pada gerakan hak asasi manusia dan kampanye lingkungan namun, seperti yang ditunjukkan oleh Paul Nelson (2004), isu di wilayah lain, terutama perdagangan dan kebijakan finansial, kurang rentan terhadap strategi "boomerang" ini, dikarenakan oleh perdagangan dan kebijakan finansial lebih dipusatkan ke pemerintahan negara G8 yang kuat yang mengatakan bahwa proyek peminjaman World Bank, hak asasi manusia atau keringanan utang bagi masyarakat miskin sebagian besar ada di negara-negara kecil. Organisasi perdagangan dan lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF dan WTO, tidak terpengaruh oleh tekanan masyarakat sipil dan persuasi macam ini, mereka justru terpengaruh oleh penekanan yang dilakukan pemerintah nasional. Dalam bagian ini karena NGO dipertimbangkan legitimasinya sebagai kritikus pada kebijakan pembangunan dan kerjasama, maka kredibilitasnya sebagai kritikus makro ekonomi dan kebijakan finansial dan reformasi kelembagaan belum diakui. Akhirnya, tanggapan masyarakat sipil untuk jenis isu terakhir sering disebut untuk memperkuat daripada "menboomerang" kebijakan pemerintah nasional di regional yang beragam seperti regulasi tentang tenaga kerja, regulasi lingkungan hidup, perlindungan pasar dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Tentu saja Reforma Agraria yang dipimpin negara, kondisi produksinya lebih baik, seperti yang diinginkan

produsen pertanian kecil, memenuhi prinsip kedaulatan pangan dan memenuhi tuntutan organisasi petani, seperti perdagangan, dan keuangan, yang mereka juga kurang setuju dengan efek "boomerang" akibat tekanan internasional kepada pemerintah nasional. Upaya Via Campesina dan organisasi terkait , seperti FIAN, untuk meluaskan wacana bisa mulai memberikan dampak "boomerang" yang lebih besar (hal ini jelas merupakan niat mereka). Tapi perluasan dalam wewenang "hak" yang termasuk dalam hak-hak ekonomi dan sosial menghadapi hambatan ketika konsep hegemoni dibatasi untuk mempersempit pengertian tentang ekspresi individu dan "hak" pelaku ekonomi pasar.

Kesulitan dalam mengembangkan norma-norma dalam hak adalah bagian dari masalah lebih luas yang membuat suara petani terdengar di masyarakat di mana ribuan orang meninggalkan pedesaan setiap hari dan di mana kekuasaan elit dan pembuat kebijakan tidak lagi melihat pertanian sebagai kekuatan penggerak pembangunan ekonomi. Perubahan yang diuraikan di atas telah menggeser keseimbangan kekuasaan dalam politik Amerika Tengah dari zona pedesaan menuju perkotaan, jauh dari gerakan petani dan kelompok sektoral yang tuntutannya bervariasi, serta jauh dari model agro-ekspor tradisional kaum elite yang lebih condong pada kelompok kewirausahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor non-tradisional dan keuangan serta layanan lainnya. Migrasi besar-besaran ke Amerika Serikat (atau, dalam kasus Nikaragua ke Kostarica) telah mengurangi tekanan politik yang telah dibentengi oleh sektor finansial elit dan demobilisasi penduduk pedesaan yang dipolitisir melalui efek pengiriman uang kepada keluarga dan keinginan umum untuk "keluar" daripada tinggal di pedesaan dan berjuang di desa.

Seperti migrasi yang berkaitan dengan tumbuhnya 'keragaman aktivitas' di rumah tangga pedesaan dan peningkatan penetrasi kota ke desa, menyulitkan pertanyaan mengenai identitas petani dalam cara orang melihat perjuangan mereka dan partisipasi mereka dalam upaya kolektif untuk melakukan perubahan. Hal pertama untuk diakui bahwa petani saat ini bukan petani seperti 15 tahun yang lalu. Misalnya, seorang yang bertani selama musim hujan dan bekerja di lokasi konstruksi perkotaan selama musim kemarau, menyewakan pickupnya dan menyediakan jasa mekanik pada tetangga, menjual mainan yang diimpor dari Cina dan CD bajakan di kota pada akhir pekan, dan menerima telegram bulanan seharga 50 dolar dari anak yang tinggal di New York, inilah kecenderungan yang memperlihatkan bahwa agenda organisasi campesino yang dulu bersejarah dan yang dulu orang tuanya atau kakek neneknya hidup dengan cara petani tetapi sekarang berubah. Untuk itu, harus ada usaha organisasi petani untuk meyakinkan individu seperti ini bahwa apakah mungkin mereka mendapatkan banyak dari kondisi lahan dan produksi yang lebih baik dan mengatasi kesulitan ekonominya? Tentu saja ada etika yang mendalam, budaya dan alasan lain untuk melakukannya. Tapi apakah argumen ini dapat dibuat persuasif dalam kondisi saat ini? Apakah argumen ini cenderung lebih persuasif ketika organisasi membuatnya menjadi sektor-sektor (brokoli atau produsen tanaman hias, misalnya) atau ketika itu dilakukan dalam skala nasional atau bahkan transnasional dan semua dilakukan dengan terbuka?

Runtuhnya dua pilar utama pertanian kaum tani, beras dan kopi menunjukkan bahwa organisasi petani harus segera mengusulkan alternatif yang bahkan saat mereka juga harus memperjuangankan untuk tujuan jangka panjang seperti kedaulatan pangan yang dapat menjamin

kelangsungan hidup dari produsen jagung kecil. Apakah mungkin kemunculan organisasi-organisasi sektoral di pedesaan dan penurunan koalisi para petani yang didasarkan pada luas lahan melakukan sama persis dengan dinamika ini? produsen jagung di Honduras mungkin tidak akan pernah menjual jagung di Lowa, tapi mungkin dalam lingkungan ekonomi makro yang berbeda (dengan jaminan kedaulatan pangan), setidaknya dapat menjualnya di Tegucigalpa atau San Pedro Sula. Dalam jangka pendek jika mereka ingin bertahan hidup, mereka membutuhkan pilihan lain. Memang, peluang di pasar kopi sementara ini relatif menarik namun sepertinya itu tidak dapat menyelesaikan masalah dari semua petani kopi. Apakah organisasi petani memiliki sesuatu yang praktis untuk ditawarkan kepada petani kecil yang tidak bisa lagi memproduksi jagung atau kopi?

Di tempat lain saya berpendapat bahwa salah satu keberhasilan yang paling menonjol dari petani transnasional dan pengorganisasian petani kecil adalah, berhasilnya ditempatkannya kembali isu reforma agraria pada agenda pembangunan internasional di pertengahan hingga akhir 1990-an (Edelman 2003, 206–7). FIAN dan Via Campesina memainkan peran penting dalam hal ini. Memang tidak mudah, tapi ini cukup untuk menjelaskan argumen dan meyakinkan negara yang baru ingin menjalan reforma agraria, seperti di Amerika Tengah, dimana begitu banyak manfaat dari gelombang reforma agraria sebelumnya, yang kemudian ditinggalkan lahan-lahannya oleh petani ketika begitu banyak korporasi besar menyingkirkan petani ini. World Bank, tentu saja, memiliki sumber daya yang besar untuk membantu mempromosikan pangsa perusahaan atau "komunitas yang dikelola" versi reforma agraria. Kredibilitas dari pengajuan tawaran bank, bagaimanapun juga tidak hanya ditingkatkan dengan

promosi peralatan besar dan koneksi ke pusat kekuasaan, namun juga oleh kegagalan nyata dari begitu banyak proyek-proyek negara yang mendukung reforma agraria.

Dalam menyebut gelombang baru reforma agraria yang dipimpin negara-, petani kecil dan organisasi petani memiliki argumen tentang etika lingkungan, kekuasaan dan argumen pembangunan. karena sejak redistribusi, konservasi tanah dan keanekaragaman hayati menjadi hal penting dalam mengurangi kemiskinan dan merangsang permintaan. Tapi apakah organisasi dan para peneliti mendukung analisis mereka yang kuat tentang apa yang salah dengan reforma agraria sebelumnya? Paling penting, dalam menentang pendekatan orientasi pasar Bank Dunia, apakah mereka memiliki argumen persuasif tentang bagaimana masalah tersebut dapat dihindari atau diminimalkan di era baru reforma agraria yang dipimpin negara yang mereka harapkan untuk terwujud?

Beberapa organisasi petani yang ada dalam sejarah Amerika Tengah, mereka kembali berkampanye untuk lahan dan sumber daya yang terkait dengan keadilan lingkungan (seperti kampanye anti-pertambangan di Guatemala), dan beberapa telah berpartisipasi dalam koalisi yang menentang DR-CAFTA, rencana Puebla-Panama, Pengusulan Uni Eropa dan Amerika Tengah mengenai kesepakatan perdagangan bebas dan beberapa penentangan lain terhadap praktek yang ingin meliberalisasi ekonomi di regional. Di beberapa negara, aksi penggarapan tanah oleh petani yang terorganisir menjadi sasaran penindasan kekerasan. Berbeda dengan organisasi-organisasi petani yang terlibat dalam perlawanan-perlawanan yang pada umumnya merupakan kelompok yang lebih kecil yang berkonsentrasi pada sektor lain, *product-specific* atau tuntutan lokal yang biasanya disalurkan melalui saluran politik konvensional. Kedua jenis organisasi tersebut

mencoba untuk kembali membuat kaum tani menjadi tokoh protagonis dalam sejarah di kawasan itu, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Meskipun prospeknya tidak mendukung strategi untuk menghadapi banyak kendala dan masalah yang diuraikan di atas yang harus ada dalam agenda organisasi.

Referensi

Acevedo Vogl, Adolfo José, 2003. *Impactos potenciales del Tratado de Libre Comercio*

Centroamérica-Estados Unidos en el sector agrícola y la pobreza rural de Nicaragua. Managua:Ediciones Educativas.

Alvarez, Sonia E., 1998. 'Latin American Feminisms "Go Global": Trends of the 1990sand Challenges for the New Millennium'. In *Cultures of Politics/Politics of Cultures:Re-Visioning Latin American Social Movements*, eds Evelina Dagnino, Sonia E. Alvarez and Arturo Escobar, 293–324. Boulder, CO: Westview.

Andrade-Eekhoff, Katharine and Claudia Marina Silva Ávalos, 2004. 'La globalización de la periferia: flujos transnacionales migratorios y el tejido socio-productivo local en América Central'. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 1 (1): 57–86.

Anheier, Helmut and Nuno Themudo, 2002. 'Organisational Forms of Global Civil Society: Implications of Going Global'. In *Global Civil Society 2002*, eds M. Glasius, H. Anheier and M. Kaldor, 191–216. Oxford: Oxford University Press.

Arana, Ana, 2005. 'How the Street Gangs Took Central America'. *Foreign Affairs*, 84 (3): 98–110.

Arias Peñate, Salvador, 1992. 'El contexto regional y mundial de la estrategia alternativa de desarrollo del Istmo Centroamericano'. In *Democracia sin pobreza: alternativa de desarrollo para el istmo centroamericano*, eds E. Stein and S. Arias Peñate, 21–82. San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones.

Arquilla, John and David Ronfeldt, eds, 2001. *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND.

ASOCODE [Asociación de Organizaciones Campesinas de Centroamérica para la Cooperación y el Desarrollo], 1999. Documento para la discusión sobre el 'Proceso dereorganización y reorientación de ASOCODE', Managua, enero.

ASOCODE, 2001. Memoria: Encuentro regional de dirigentes campesinos centroamericanos, Tegucigalpa, 04 y 05 de abril.

Barham, Bradford, Mary Clark, Elizabeth Katz and Rachel Schurman, 1992. 'Nontraditional Agricultural Exports in Latin America'. *Latin American Research Review*, 27 (2): 43 –82.

Barquero, Marvin, 2007. 'Países productores de café descartan caída en precios'. *La Nación* (San José), 17 November. http://www.nacion.com/ln_ee/2007/noviembre/17/ economia1318924.html. Accessed 1 December 2007.

Bartra, Armando, 2005. 'Reinventando una identidad colectiva. Foros sociales y encuentros campesinos en Mesoamérica', http://osal.clacso.org/dev/imprimir.php3?id_article=95. Accessed 20 December 2007.

Bartra, Armando, 2006. 'III Encuentro del Moicam: Por el poder popular y la recuperación de las soberanías'. http://www.redmesoamericana.net/?q=node/380. Accessed 20 December 2007.

Bartra, Armando, n.d. 'La crisis mesoamericana'. http://www.redmesoamericana.net/?q=node/297. Accessed 20 December 2007.

Bebbington, Anthony, 2007. 'Social Movements and the Politicization of Chronic Poverty'. *Development and Change*, 38 (5): 793–818.

Bevington, Douglas and Chris Dixon, 2005. 'Movement-relevant Theory: Rethinking Social Movement Scholarship and Activism'. *Social Movement Studies*, 4 (3): 185–208.

Biekart, Kees, 1999. *The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencies and Democratic Transitions in Central America*. Amsterdam: International Books and the Transnational Institute.

Biekart, Kees and Martin Jelsma, eds, 1994. *Peasants beyond Protest in Central America: Challenges for ASOCODE, Strategies towards Europe*. Amsterdam: Transnational Institute.

Borras, Jr, Saturnino M., 2004. *La Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Movement*.Amsterdam: Transnational Institute, TNI Briefing Series No. 6.

Brockett, Charles D., 2005. *Political Movements and Violence in Central America*. Cambridge: Cambridge University Press.

Carazo Vargas, Eva, 2004. 'Implicaciones del TLC desde la perspectiva de la agricultura familiar campesina'. In *¿Debe Costa Rica aprobarlo? TLC con Estados Unidos: contribuciones para el debate*, eds María Florez-Estrada and Gerardo Hernández, 249–70. San José: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.

CCS-Chiapas (Coordinación de Comunicación Social, Gobierno del Estado de Chiapas), 2002. 'Comunicado de Prensa – Con la participación de la CNPA,

UNORCA, CIOACy CLOC en Tapachula, 5 de mayo'. http://www.ccschiapas.gob.mx/pagina_anterior/boletines/2002/mayo/bol1115.htm. Accessed 1 June 2002.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 2006. *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2006*. Santiago: CEPAL.

Comaroff, John L. and Jean Comaroff, 1999. 'Introduction'. In *Civil Society and the Political Imagination in Africa: Critical Perspectives*, eds John L. Comaroff and Jean Comaroff, 1–33. Chicago, IL: University of Chicago Press.

De Bremond, Ariane, 2007. 'The Politics of Peace and Resettlement through El Salvador's Land Transfer Programme: Caught between the State and the Market'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1537–56.

Desmarais, Annette Aurélie, 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*.Halifax and London: Fernwood Publishing and Pluto Press.

Díaz Porras, Rafael and Wim Pelupessy, 2004. 'Agricultores, consumidores y la mediacióninstitucional en las cadenas agroalimentarias globales en Centroamerérica'. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 1 (1): 25–56.

ECM (Encuentro Campesino Mesoamericano), 2003. 'Acuerdos del III Encuentro Campesino Mesoamericano, Tegucigalpa, 19–21 de julio'. Observatorio Social del Agro, http://redmesoamericana.net/?q=node/129. Accessed 21 December 2007.

Edelman, Marc, 1998. 'Transnational Peasant Politics in Central America'. *Latin American Research Review*, 33 (3): 49–86.

Edelman, Marc, 1999. *Peasants against Globalization:*

Rural Social Movements in Costa Rica. Stanford, CA: Stanford University Press.

Edelman, Marc, 2001. 'Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics'. *Annual Review of Anthropology*, 30: 285–317.

Edelman, Marc, 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society 2003*, eds M. Kaldor, H. Anheier and M. Glasius, 185–220.London: Oxford University Press.

Enríquez, Elio, 2006. 'Boletín CECCAM'. Posted on http://www.laneta.apc.org, 21 November, 15:09:37. Accessed 2 January 2008.

FAOSTAT, 2008. On-line database, United Nations Food and Agriculture Organization, Statistics Division. http://faostat.fao.org. Accessed 4 January 2008.

Fiallos, Alvaro, 2002. 'Nicaragua: principales problemas y limitaciones del sector agrícolay rural'. Santiago, Chile: Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Organizacióndе las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

FIAN (Food First Information and Action Network), 2006. *Voluntary Guidelines on the Right to Adequate Food: From Negotiation to Implementation*. Heidelberg: FIAN.

Fischer, Edward F. and Peter Benson, 2006. *Broccoli and Desire: Global Connections and Maya Struggles in Postwar Guatemala*. Stanford, CT: Stanford University Press.

Fox, Jonathan, 2000. 'Assessing Binational Civil Society Coalitions: Lessons from theMexico-US Experience'. Working Paper No. 26, Chicano/Latino Research Center, University of California at Santa Cruz.

Gacitúa, Estanislao and Shelton Davis, 2000. 'Introducción: Pobreza y exclusion social en América

Latin y el Caribe'. In *Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe*, eds Estanislao Gacitúa and Shelton H. Davis, 13–23. San José: FLACSO and Banco Mundial.

Gaete, Marcelo, Dennis Monero and Romano Sancho, 2005. *Análisis de movimiento campesino en el contexto costarricense actual. Lecciones para VECO Costa Rica y la Red COPRALDE*. San José: VECO-COPRALDE.

Galián, Carlos, 2004. 'TLC CA-EU: El tiro de gracia a la agricultura centroamericana'. *Tunapa*, 23: 4–5.

Gauster, Susana and S. Ryan Isakson, 2007. 'Eliminating Market Distortions, Perpetuating Rural Inequality: An Evaluation of Market-Assisted Land Reform in Guatemala'.*Third World Quarterly*, 28 (8): 1519–36.

Hecht, Susanna B. and Sassan S. Saatchi, 2007. 'Globalization and Forest Resurgence: Changes in Forest Cover in El Salvador'. *Bioscience*, 57 (8): 663–72.

Hirschman, Albert O., 1970. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations,and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Holt-Giménez, Eric, 2006. *Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. Oakland, CA: Food First Books.

ICO (International Coffee Organization), 2008. 'ICO Indicator Prices. Monthly and Annual Averages 2005–2007'. http://www.ico.org/prices/p2.htm. Accessed 4 January 2008.

Iniciativa CID (Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo), 2002. 'Campaña regional en torno al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centro América'. Document provided by the Federación Nacional de Cooperativas, Nicaragua.

Isaula, Roger, 1996. *Honduras: El ajuste en el sector agrícola y la seguridad alimentaria*. Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras.

Jonakin, Jon, 1997. 'Agrarian Policy'. In *Nicaragua Without Illusions: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1990s*, ed. Thomas W. Walker, 97–113. Wilmington, DE: SR Books.

Kay, Cristóbal, 2001. 'Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina'. In *El mundo rural en la era de la globalización: incertidumbres y potencialidades: X Coloquio de Geografía Rural de España de la Asociación de Geógrafos Españoles*, ed. Francisco García Pascual, 337–429. Lleida: Universidad de Lleida, Servicio de Publicaciones.

Kay, Cristóbal, 2005. 'Perspectives on Rural Poverty and Development Strategies in Latin America'. *Working Paper Series* No. 419. The Hague: Institute of Social Studies.

Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink, 1998. *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Leanza, Gustavo, 2004. 'Análisis crítico de las estructuras y relaciones de poder vinculadasal sector agrario'. Guatemala: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo and Programa Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centroamérica (manuscript).

Levenson, Deborah, 1989. 'Las Maras: violencia juvenil de masas'. *Polémica* 7: 2–12. Lofredo, Gino, 1991. 'Hágase rico en los 90. ¿Usted todavía no tiene su ONG?' *Chasqui*, 39: 15–18.

Manwaring, Max G., 2005. *Street Gangs: The New Urban Insurgency*. Carlisle, PA:Strategic Studies Institute, US Army War College.

Marsden, Terry, 1995. 'Beyond Agriculture? Regulating the

New Rural Spaces'. *Journal of Rural Studies*, 11 (3): 285–96.

Morales, Abelardo and Carlos Castro, 2002. *Redes transfronterizas: sociedad, empleo y migración entre Nicaragua y Costa Rica*. San José: FLACSO.

Morales Gamboa, Abelardo and Martha Isabel Cranshaw, 1997. *Regionalismo emergente:redes de la sociedad civil e integración centroamericana*. San José: FLACSO & Ibis-Dinamarca.

Moreno, Raúl, 2003. *The Free Trade Agreement between the United States and Central America:Economic and Social Impacts*. Managua: American Friends Service Committee.

Nelson, Paul, 2004. 'New Agendas and New Patterns of International NGO Political Action'. In *Creating a Better World: Interpreting Global Civil Society*, ed. Rupert Taylor, 116–32. Bloomfield, CT: Kumarian Press.

O'Brien, Robert, Anne Marie Goetz, Jan Aarte Scholte and Marc Williams, 2000. *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements*.Cambridge: Cambridge University Press.

Posas, Mario, 1985. 'El movimiento campesino hondureño: un panorama general (siglo XX)'. In *Historia política de los campesinos centroamericanos*, Vol. 2, ed. Pablo González Casanova,28–76. Mexico City: Siglo XXI.Proyecto Estado de la Región-PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 2003. *Segundo informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá*. San José: Proyecto Estado de la Nación.

Riechmann, Jorge and Francisco Fernández Buey, 1994. *Redes que dan libertad: Introduccióna los nuevos movimientos sociales*. Barcelona: Ediciones Paidós.

Riles, Annelise, 2001. *The Network Inside Out*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Robinson, William I., 2003. *Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization*. London: Verso.

Ruben, Raúl and Francisco Fúnez, 1993. *La compra-venta de tierras de la Reforma Agraria*.Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

Ruben, Ruerd and Edoardo Masset, 2003. 'Land Markets, Risk and Distress Sales in Nicaragua: The Impact of Income Shocks on Rural Differentiation'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (4): 481–99.

Rubio, Blanca, 2002. 'La exclusión de los campesinos y las nuevas corrientes teóricas de interpretación'. *Nueva Sociedad*, 182: 21–33.

Ruhl, J. Mark, 1984. 'Agrarian Structure and Political Stability in Honduras'. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 26 (1): 33–68.

Sandoval García, Carlos, 2002. *Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Santa Cruz, Wendy, 2006. *Una aproximación a la conflictividad agraria y acciones del movimiento campesino*. Guatemala: FLACSO.

Santos, Boaventura de Souza, 2006. 'The World Social Forum: Where Do We Stand and Where are We Going?' In *Global Civil Society 2005/6*, eds Marlies Glasius, Mary Kaldor and Helmut Anheier, 73–8. London: Sage.

Segovia, Alexander, 2004. 'Centroamérica después del café: el fin del modelo agroexportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo'. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 1 (2): 5–38.

Stirrat, R.L., 1996. 'The New Orthodoxy and Old Truths: Participation, Empowerment and Other Buzz Words'.

In *Assessing Participation: A Debate from South Asia*, eds S.Bastian and N. Bastian, 67–92. New Delhi: Konark Publishers.

Tangermann, Klaus-Dieter and Ivana Ríos Valdés, eds, 1994. *Alternativas campesinas: modernización en el agro y movimiento campesino en Centroamérica*. Managua: CRIES and Latino Editores.

Tarrow, Sidney, 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, Charles, 1984. 'Social Movements and National Politics'. In *Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory*, eds Charles Bright and Susan Harding,297–317. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Tiney, Juan, 2006. 'Antecedentes y perspectivas del Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano'. http://www.redmesoamericana.net/?q=node/406. Accessed 20 December 2007.

USAID and MFEWS [US Agency for International Development and Mesoamerica Famine Early Warning System], 2007. 'High Maize Prices Restrict Food Access – Guatemala Food Security Situation – January 2007'. http://www.fews.net/centers/innerSections.aspx?f=gt&pageID=monthliesDoc&m=1002304. Accessed 1 January 2008.

van Rooy, Alison, 2004. *The Global Legitimacy Game: Civil Society, Globalization and Protest*. London: Palgrave.

Vía Campesina, 2002. *Peasant Rights – Droits Paysans – Derechos Campesinos*. Tegucigalpa: Vía Campesina.

Vía Campesina, 2005. *Annual Report Peasant Rights Violation – Informe Anual sobre las violaciones de los derechos campesinos*. Jakarta: Vía Campesina.

Viales Hurtado, Ronny, 2002. 'Ruralidad y pobreza en Centroamérica en la década de 1990, el contexto de la

globalización y de las políticas agrarias "neoliberales" '. In *Culturas populares y políticas públicas en México y Centroamérica (siglos XIX y XX)*, eds Francisco Enríquez Solano and Iván Molina Jiménez, 157–86. Alajuela, Costa Rica: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

Whitaker, Chico, 2006. 'The World Social Forum: Where Do We Stand and Where Are We Going?'. In *Global Civil Society 2005/6*, eds Marlies Glasius, Mary Kaldor andHelmut Anheier, 66–72. London: Sage.

4

La Via Campesina dan Kampanye Global Reforma Agraria

Saturnino M. Borras Jr

Asal Usul Via Campesina

Saat ini kampanye global untuk reforma agraria – Global Campaign for Agrarian Refoorm-(GCAR) oleh Via Campesina dan aliansinya telah mendapatkan peran penting dalam pembuatan rencana kebijakan agraria global. Agenda Via Campesina dan tuntutan (Vía Campesina 2000a, 2000b; Vía Campesina n.d.; Rosset 2006) untuk membentuk argument bantahan terhadap doktrin neoliberal (see, e.g., Broad 2002; Mayo 2005) menjadi "suara" alternatif dari bawah (see, e.g., Appadurai 2006) yang benar-benar mewakili populasi pedesaan di seluruh dunia. Kenapa dan bagaimana suara ini terbentuk, bagaimana suara itu dikembangkan dan apa prospek dari perlawanan terhadap globalisasi neoliberal?

Terkadang diasumsikan bahwa munculnya kampanye keadilan global kontemporer seperti CGAR ini adalah akibat yang tidak dapat dihindari sebagai dampak neoliberal. Sekalipun begitu banyak kebijakan neoliberal yang tidak menimbulkan ketertarikan yang benar-benar

serius bagi gerakan sosial seperti yang telah sering ditunjukkan di banyak literatur, yang memberi kesan bahwa ada faktor lain yang ikut terlibat. Khususnya, ketika kita berpendapat bahwa sosial ekonomi dan perubahan kebijakan membawa globalisasi neoliberal dan perubahan dalam kesempatannya masuk kedalam struktur politik internasional diantara faktor-faktor yang lain, yang memainkan peranan penting dalam menetapkan waktu dan kerangka program dari CGAR.[81]

Tarrow yang menyebut proses ini sebagai "internalization" mengatakan bahwa hal tersebut ditandai oleh tiga faktor yaitu: 1. Meningkatnya keeratan horisontal antar negara, lembaga pemerintahan dan aktor-aktor non-state; 2. Meningkatnya hubungan vertikal antar organisasi-organisasi di level daerah, nasional, dan internasional; 3. Terjadinya sebuah peningkatan struktur formal dan informal ditataran aktivis transnasional yang memfasilitasi jaringan yang terdiri dari aktor-aktor non-state, negara, dan internasional, ini adalah faktor penting dalam melihat kasus Via Campesina. Namun ini adalah proses yang berlainan yang membutuhkan waktu untuk menyusun, hanya dalam beberapa waktu lalu Via Campesina telah mengambil langkah penting dalam mengkampanyekan isu-isu tentang tanah yang ditandai dengan munculnya "pengaturan organisasi yang mapan", jaringan yang kokoh dan munculnya identitas kolektif.

---

[81] Tarrow telah menjelaskan oportinitas politik sebagai "sinyal konsisten (namun belum tentu formal, permanen, atau nasional) untuk aktor sosial atau politik yang mendukung atau menjatuhkan mereka untuk memakai kesempatan internal untuk membentuk gerakan sosial". Ia juga mengindentifikasikan empat oportunitas politik yang penting: akses kekuasaan, pergeseran garis, adanya pengaruh kaum elit dan perpecahan diantara elit. Ini juga merujuk pada penjelasannya yang lain mengenai perlunya membawa masuk dalam gagasan "ancaman" (Tarrow 2005,240).

Selama dua dekade terakhir, negara-bangsa di negara berkembang yang melakukan transformasi dipengaruhi oleh tiga situasi yang menekan ": globalisasi, desentralisasi (parsial) dan privatisasi. Negara tetap memainkan peran yang sangat penting namun juga bertransformasi. Jangkauan, langkah dan tujuan dari tranformasi ini, termasuk restrukstur komponen agrarianya telah diperjuangkan oleh aktor yang berbeda. Sehingga terjadi perubahan hubungan internasional-nasional-lokal yang membentuk perekonomian baik itu ancaman maupun kesempatan bagi populasi pedesaan dunia. Ancaman dan kesempatan yang terdahulu telah mendorong banyak gerakan sosial pedesaan membatasi lebih jauh tanggapan nya pada desentralisasi negara dan tanggapan terhadap "internationalize" (tanggapan pada globalisasi). Tekanan yang tampaknya berkontradiksi (dari globalisasi dan desentralisasi) mempunyai dampak pada negara-bangsa yang juga mempengaruhi perubahan di gerakan sosial pedesaan. Sebagai akibatnya, orang akan melihat kemunculan yang lebih horizontal pada gerakan sosial pedesaan yang polisentrik, yang pada waktu yang sama mengadakan perlawanan untuk membentuk struktur koordinatif yang jelas bagi integrasi vertikal yang lebih besar yaitu munculnya gerakan kontemporer "transnational agrarian movement" (TAMS).[82]

Berlawanan dengan latar belakang ini, Via Campesina telah disusun sebagai gerakan internasional untuk petani miskin dan petani kecil dari selatan dan utara. Yang awalnya diinisiasi oleh gerakan petani dari Amerika

[82] Dalam bab ini , kami menganggap dengan bebas Via Campesina sebagai "gerakan transnasional", "jaringan transnasional" dan "koalisi transnasional", diiringi dengan penjelasan penting dalam kategori ini oleh Khagram et al (2002,9). Via Campesina menunjukkan fitur-fitur dari keseluruhan kategori berdasarkan pada kampanye tertentu atau keadaan.

Tengah, Selatan dan Utara dan kelompok petani Eropa. Via campesina secara formal berdiri pada tahun 1993. Keberadaan jaringan transnasional oleh aktivis yang menempatkannya pada gerakan petani dan lembaga pendonor dana non-pemerintah di utara yang menfasilitasi hubungan sebelumnya antara gerakan petani nasional, yang kebanyakan telah muncul pada tahun 1980. Via campesina saat ini mewakili lebih dari 150 bangsa dan daerah organisasi gerakan sosial pedesaan dari 56 negara di Amerika Latin, Karibia, Amerika Utara, Eropa (barat) , Asia dan Afrika.[83] Sejak kemunculannya, agenda Via Campesina adalah untuk memerangi tekanan neoliberal dan untuk membangun sebuah kekuatan alternatif yang berpusar pada konsep "ketahanan pangan" (lihat Rosset 2006; IPC for Food Sovereignty 2006).[84]

Posisi Via Campesina dan bentuk aksi pada isu utamanya pada dasarnya berbeda dari tendesi yang mendominasi oposisi dan pesaingnya yaitu IFAP. IFAP didirikan pada tahun 1946 oleh asosiasi petani besar sampai menengah yang sebagian besar dari negara berkembang, IFAP menjadi organisaisi sektor pertanian yang telah diklaim dan membuat perwakilan resmi di lembaga (inter) pemerintah. Kebijakan neoliberal pada umumnya tidak berpengaruh buruk banyak pada konstitusi paling tidak secara finansial. Walaupun bukan jaringan yang homogen secara ekonomi, politik di IFAP cenderung didominasi oleh kekuasaan dan anggota politik yang konservatif secara ekonomi dan finansial (Desmarais 2007). Sejak tahun

---

[83] Hal ini berfokus dalam tujuh isu: 1. Reforma agraria, 2. Sumber keanekaragaman hayati dan genetik, 3. Ketahanan pangan dan perdagangan, 4. Wanita, 5. Hak asasi manusia, 6. Migrasi dan buruh desa dan 7. Kelangsungan agrikultur petani.

[84] Gagasan ketahanan pangan ini juga beresonansi dengan konsep Bello yaitu "deglobalization" (Bello 2002).

1990an IFAP juga merekrut atau mengizinkan organisasi dari petani miskin dari negara berkembang masuk kedalamnya, tidak diragukan hal ini terjadi sebagai reaksi dari munculnya Via campesina. Via campesina mempunyai keanggotaan yang heterogen tidak hanya berdasarkan kelas, gender dan golongan etnik yang bervariasi, namun juga kepercayaan ideologi anggotanya juga beragam. Namun meskipun perbedaan itu muncul dalam terminologi *world view* , agenda politik dan metode kerja, tetapi terdapat kesamaan yang menjadi pemersatu. Masalah utama dari hal tersebut adalah kebanyakan basis massa Via campesina mewakili sektor di utara dan selatan, yang secara ekonomis dan politik global selama ini dimarginalisasikan. Ini merupakan profil yang membedakan Via campesina dengan IFAP.

Sebagai "aktor" kelas dunia, Via Campesina telah mendapat pengakuan sebagai suara utama untuk sektor yang diorganisir yaitu masyarakat pedesaan yang dimarginalisasikan, sehingga itu menenggelamkan hegemoni IFAP yang sebelumnya kuat. Pada waktu yang sama selayaknya suatu kesatuan yang mencari kesatuan, mengorganisir dan mewakili pluraritas dari identitas dan minat, Via Campesina membentuk dan memunculkan "arena aksi", dimana sebuah gerakan yang berbasis identitas dan strategi dapat dipertentangkan dan di negosiasi (kembali) dari waktu ke waktu. Kedua karakter ini membantu Via Campesina menjadi intstitusi yang penting dari dan untuk gerakan petani lokal atau nasional. Namun menjadi kesatuan yang kompleks untuk pengamat luar dan aktor luar untuk memahami dan menghadapinya. Diskusi pada kedua karakter dari gerakan transnasional mirip dengan gagasan "jaringan-sebagai-aktor" dan "jaringan-sebagai-struktur" oleh Keck dan Sikkink. CGAR baiknya dilihat dari sudut perspektif gerakan nya yang berkarakter dua ini.

Lanjutan dari bab ini terdiri dari bagian sebagai berikut: bagian selanjutnya membahas CGAR, fokus pada mengapa dan bagaimana CGAR muncul menjadi sebuah kampanye penting, lalu menganalisa dampak-dampaknya. Bagian keempat membahas isu-isu yang menjadi perdebatan dalam menentukan keputusan di Via Campesina dan kemungkinan masa depan trayek dari CGAR, kemudian baru diikuti oleh kesimpulan.

Global Campaign For Agrarian Reform (Cgar)

Enam tahun setelah berdiri, tepatnya pada tahun 1999-2000, Via Campesina meluncurkan CGAR. Pada waktu yang sama ketika itu terjadi serangan neoliberal terhadap Reforma Agraria. Kebijakan menyangkut agraria dibahas kembali dalam agenda resmi di institusi internasional dan di banyak negara-bangsa dengan berbagai argumentasi dan alasan. (see, e.g., Akram Lodhi et al. 2007; Rosset et al. 2006; Bernstein 2002; Byres 2004a, 2004b; Griffin et al. 2002; Ghimire 2001; Borras et al. 2007a). Berangkat dari perdebatan mengenai reforma agraria klasik, mulai muncul perhatian terhadap kebijakan pertanahan yang didominasi oleh orientasi pro-pasar. Kampanye Via Campesina adalah reaksi langsung pada model neoliberal, yaitu Reforma Agraria yang dipandu oleh pasar atau dikenal juga dengan Market-Led Agrarian Reform (MLAR).

Dalam ekonomi mainstream, masalah kebijakan pertanahan pada masa lalu, yang terkait dengan mengalokasikan (ulang) sumber daya tanah adalah peran negara, pandangan ini menyebabkan terjadinya distorsi pasar tanah yang menghasilkan terjadinya "insecure" hak kepemilikan dan investasi di ekonomi pedesaan. Mereka sering mengatakan (contohnya terjadinya pengurangan hak kepemilikan pribadi secara jelas) sebagai "bukti" dari

dampak "yang tidak diinginkan" dari intervensi negara dalam pasar tanah. Dalam pandangan mereka, apa yang dibutuhkan jelas bukan hak kemepmilikan pribadi secara formal pada sisa tanah publik di kebanyakan negara-negara berkembang yang masih dalam transisi perekonomian (lihat De soto 2000[85], lihat juga World Bank 2003; lalu lihat juga Nyamu-Musembi 2007 dan Cousins 2007 untuk pengetahuan lebih kritis dalam konteks Afrika). Serupa dengan perpektif neoliberal, "kegagalan" reforma agraria yang dipimpin negara pada tanah milik pribadi disebabkan oleh metode akusisi tanah yang menimbulkan resistensi tuan-tuan tanah

Secara jelas, dalam hal ini tuan-tuan tanah telah ditumbangkan oleh kebijakan, menghindari mensubsidi pertanian mereka atau yang paling baik mempertahankan tanah. Mereka juga meluncurkan serangan lewat cara-cara legal secara pelan-pelan, yang tidak dicegah banyak oleh reforma agraria. Tidak akan ada ruang pertentangan;-dalam catatan sejarah itu dapat dicegah-. Poinnya berangkat dari perlawanan tuan tanah pada reforma agraria-haruskah itu dilawan atau dihadapi? (lihat keterkaitan argumen tentang *the nature of expropriation offered* by Chonchol (1970). Para ekonomis neoliberal melihat

[85] Hernando de Soto adalah seorang ahli ekonomi dari persia yang berargumen bahwa modal potensial untuk masyarakat miskin adalah tanah, namun kebanyakan darinya adalah "modal mati", tidak adanya titel tanah pribadi yag dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi finansial. Dan juga, investor dan bank merasa tidak aman untuk bertransaksi dengan masyarakat miskin. Solusi adalah untuk menghasilkan titel tanah individu pribadi untuk sisa tanah masyarakat pada negara berkembang. Dia telah memberi inspirasi bagi ahli ekonomi di seluruh dunia yang baru-baru ini memimpin "commision for the legal empowerment of the poor (CLEP) dengan dukungan seketariat dari UNDP yang mendukung implementasi gagasan de Soto.

perlawanan tuan tanah sebagai sesuatu yang harus dihindari, perdebatan pada inti kepercayaan bahwa model reforma agraria neoliberal adalah untuk pembentukan kepemilikan tanah pribadi. Model ini berdasarkan "serangan pasar bebas" sebagai mekanisme yang paling diinginkan untuk mengalokasi (kembali) sumber daya tanah, membayangkan sebuah proses yang memerlukan privatisasi dan desentralisasi. Seringkali di maksudkan pada MLAR yang membalikkan apa yang di klaim untuk menjadi fitur utama model konventional yang "dipimpin negara": dari implementasi *expropriationary* hingga *voluntary*; dari *sentralisasi-statis* hingga *privatisasi-desentralisasi* dan seterusnya (Borras 2003; Borras et al. 2007a).

Timbulnya model kebijakan tanah neoliberal yang banyak menelan korban pada tahun 1990 tentu saja tidak tercatat, meskipun ada upaya yang sia-sia oleh pendukung RA untuk mengkamuflasekannya sebagai "anti poverty community-based" atau "negosiasi" reforma agraria, atau mengemasnya sebagai "pemberdayaan hukum untuk masyarakat miskin". Namun penting untuk di catat bahwa tanggapan pada kebijakan ini pada tataran antar negara utama dan aktor sosial pada arena isu reforma agraria sudah tercampur, dan munculnya segelintir kelompok oposisi. Diantara yang menjadi oposisi model tersebut, adalah Via Campesina – sebagai pemimpin yang tidak perlu diragukan- dan penyusunan CGAR secara luas dilakukan untuk menjadi sarana utama perlawanan global mereka.

Dalam usaha kampanye ini, Via Campesina memperhalus isu agararia yang digunakan pada tahap awal, ketika membangun dan tahap konsolidasi mereka melakukan "pendekatan berdasarkan hak asasi manusia" pada tanah. Padahal kerangka global dari posisi Via Campesina terhadap agraria telah muncul bertahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2006 ketika deklarasi

Food Sovereignty bersama dengan IPC[86] yang menjadi versi paling komprehensif dan sistematis dalam kelompok ini. Selama tahun-tahun pertama CGAR, permintaan utama adalah untuk menjatuhkan MLAR. Alhasil, posisi jaringan muncul untuk mencangkup permintaan untuk mengadopsi kerangka "hak asasi manusia" dan visi alternatif. Hal ini menyarankan bahwa kampanye menginginkan untuk menetapkan dan mengartikulasi interpretasinya dari arti dan tujuan reforma agraria, sebagai langkah terhadap menkonstruksi visi alternatif.

Via campesina juga tidak menginginkan untuk "tenggelam" (terlalu dilokalisasi) atau "mengambang" (terlalu terglobalisasi) pada usahanya, namun lebih pada "vertikalisasi" dari aksi kolektif dengan menghubungkan kelompok lokal, nasional, dan internasional. Dilihat lebih dekat, kemunculan CGAR ,mencakup proses yang tekait: 1. Penggeseran Eksternalisasi dari isu bangsa-lokal; 2. Membentuk aliansi transnasional; 3. Membentuk target dan kerangka bersama; 4. keterbukaan komunikasi dan transportasi yang cepat dan murah lintas negara dan 5. Meningkatnya otonomi dan kapasitas untuk menggabungkan bentuk dari aksi kolektif.

Eksternalisasi yang Cepat dalam isu-isu Lokal-Nasional

MLAR dijalankan di negara-negara basis Via Campesina, yang secara langsung berdampak pada organisasi yang kemudian berpengaruh dalam jaringan. Ini sebagian besar alasan bahwa "eksternalisasi" (penyorotan secara vertikal pada klaim domestik atas institusi internasional atau aktor dari luar – Tarrow 2005, 32) dari isu-isu tanah

[86] International Planning Commitee. Berasal dari kelompok masyarakat sipil yang dibentuk dalam Worls Food Summit di Roma tahun 1996.

lokal dan nasional yang beredar sangat cepat di Via Campesina. Di tingkatan berbeda, MLAR dilaksanakan di Brazil, Colombia, di negara-negara Amerika Tengah, Filipina, Afrika Selatan dan Namibia. Negosiasi diusahakan di negara lain seperti Nepal. Di semua negara-negara ini, hanya Namimbia yang tidak ada dalam hitungan Via Campesina, atau belum masuk hitungan. Amerika tengah dan selatan, khususnya Brazil merupakan benteng Via Campesina, dengan adanya MST yang berbasis di Brazil[87] sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh di gerakan global. Ketika MLAR dikenalkan di Brazil pada tahun 1997 melalui *Projecto Cedula Da Terra (PCT*), Brazil dengan cepat telah masuk dalam pengaruh MST. Memang pada level nasional, PCT meraih kemahsyuran, sebagian dikarenakan dukungan yang baik dari tuan tanah (Navarro 1998; Borras 2003). Pada poin ini pendukung MLAR berada dalam kejayaan, mendapat kesuksesan di negara-negara berbeda. Namun gerakan sosial pedesaan dan aliansi mereka di Brazil meyakinkan bahwa PCT tidak akan memberikan hasil untuk reforma redistributif dan hanya akan merusak usaha-usaha oleh negara dan gerakan petani tak bertanah sebelumnya (Sauer 2003). Oposisi mereka diperkokoh dalam *National Forum for Agrarian Reform*, sebuah forum nasional untuk seluruh gerakan agraria di Brazil, termasuk MST, CONTAG[88] dan FETRAF[89]. Forum nasional ini menginginkan sebuah investigasi terhadap PCT melalui *World Bank Inspection Panel*, namun permintaannya ditolak dua kali karena masalah teknis. Dan meskipun hasil MLAR meragukan, program ini tetap

[87] Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (Movement of the Landless/ gerakan petani tak bertanah) – lihat Wright dan Wolfford (2003).

[88] Confederacao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

[89] Federacao dos Trabalhadores na Agricultura Familiar.

diteruskan dan bahkan diperluas, yang menebar ancaman lebih nyata di mata MST dan anggota Via campesina lainnya di Brazil dan kemudian membantu mendorong penggeseran externalisasi isu di Brazil ke kancah internasional.

Sementara, MLAR yang tidak ikut bekerja sama dalam kesepakatan damai di beberapa negara di Amerika Tengah dipertengahan tahun 1990. Guatemala, Honduras dan El savador, menjadi saksi dikenalkannya program MLAR, termasuk salah satunya yang mirip dengan model dalam buku teks (Guatemala; Gauster and Isakson 2007) dan juga merupakan hybrida antara negara-pasar (El Salvador; De Bremond 2007). Amerika tengah merupakan tempat kelahiran Via Campesina,[90] paling tidak secara informal. Dimana pada konfrensi di Managua pada tahun 1992, ide pertama yang konkrit untuk mendirikan gerakan global didiskusikan tidak hanya oleh pemimpin petani Amerika Tengah namun juga dari luar wilayah. Koalisi petani Amerika Tengah, ASOCODE[91] hampir mati pada saat MLAR mendapat perhatian di negara-negara ini. Namun wilayah tersebut masih tetap merupakan tuan rumah untuk beberapa kelompok yang berorientasi pada isu agraria yang secara relatif mereka masih aktif, terorganisisr dan terartikulasi di Via campesina.[92] Bukan merupakan kebetulan, dari tahun 1996 sampai 2004, seketariat global Via Campesina berada di organisasi Honduras, yaitu COCOCH[93] dan dipimpin oleh direktur COCOCH sendiri yaitu Rafael Alegria. Alegria bekerja

---

90 Tempat lahirnya yang resmi adalah Mons di Belgia.

91 Association of Central American Peasant Organization for Cooperation and Development.

92 Untuk latar belakang terdahulu (optimistik) dalam ASOCODE, lihat Biekart dan Jelsma (1994).

93 Honduran Coordinating Council of Peasant Organization.

sebagai Koordinator umum di Via campesina selama periode ini. Sebagai tambahan, seketariat internasional CGAR dijalankan oleh kader dari organisasi Nicaraguay, yaitu ATC[94]. Hasilnya isu agraria di Amerika Tengah dengan cepat tereksternalisasi pada tataran global dan ditangani serius oleh aliansi.

Sementara itu, Filipina telah menjadi "pintu gerbang" Via Campesina untuk masuk ke wilayah asia pada tahun 1993, ketika hubungan dengan "orang luar" dalam wilayah ini terbatas hanya dilakukan oleh KMP[95] di filipina, dan KRRS[96] di India. Gerakan Filipina di fasilitasi dengan hubungan di banyak bagian di wilayah, dan KMP adalah anggota yang berpengaruh (paling tidak sampai sekitar tahun 2004). Dan ketika MLAR diperkenalkan di Filipina pada tahun 1996, dan selama negosiasi di tahun 1999 untuk proyek rintisan, sebenarnya MLAR Filipina telah masuk ke dalam radar Via campesina dan GCAR walaupun beberapa aktifis anti MLAR dipelopori bukan dari anggota Via Campesina.

Sementara itu, di Afrika Selatan, MLAR menjadi kerangka untuk kompromi reforma agraria pasca-apartheid, walaupun hal tersebut merupakan salah satu bentuk hibrida negara-pasar (Lahiff 2007; Ntsebeza and Hall 2006; Walker 2003). Ketidakhadiran gerakan petani nasional (sampai tahun 2000) ditangani dengan cepat oleh usaha reforma agraria di afrika selatan oleh aktivis danNGO, yang paling terkenal waktu itu, namun sekarang telah mati yaitu *National Land Committee* atau NLC (Mngxitama 2005). Ketika *Landless Peoples Movement* (LPM) lahir di tahun 2000 dengan bantuan NLC, LPM dengan cepat menjadi anggota Via Campesina (Greenberg 2004) dan pada waktu

---

94 Asociacion de trabajadores del Campo
95 Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.
96 Karnataka State Farmers' Association.

itu juga isu agraria di Afrika Selatan ditangani dengan cepat oleh GCAR.

Dalam beberapa hal, eksternalisasi terjadi karena kebutuhan: dimana perlawanan yang signifikan pada model MLAR telah disusun oleh anggota Via Campesina yang usaha awalnya mempengaruhi pemerintah nasional dan itu ternyata tidak memberikan hasil yang diinginkan gerakan. Memaksa gerakan petani untuk mengeksternalisasi kampanye mereka dengan mengijinkan mereka untuk kembali dalam pemerintah nasional dengan kekuatan yang lebih besar. Pola ini yang disahkan sebagai "efek boomerang" yang dikemukakan oleh Keck and Sikkink (1998, 12 13).[97]

Sementara itu, banyak pendukung nasional di sekitar MLAR yang di eksternalisasi dalam agenda dan kampanye Via Campesina dan mereka memiliki fitur serupa: kebanyakan dari mereka termasuk dalam anggota penting Via Campesina. Dimana Via Campesina tidak mempunyai perwaikilan atau dimana aliansi via campesina tidak memiliki jaringan. Isu-isu MLAR walaupun bermasalah cenderung tidak dipilih oleh aktifis reforma agraria transnasional. Sebagai contoh walaupun MLAR dilakukan di Namibia (van Donge et al. 2007) atau variasi lain MLAR di lakukan di Mesir (Bush 2007), kasusnya tidak akan dibahas dalam GCAR karena tidak ada anggota Via Campesina di negara-negara tersebut.

---

[97] Ketika saluran antara negara dan aktor domestiknya dihalangi, pola boomerang dari pengaruh karateristik jaringan transnasional dapat terjadi: LSM domestik mengelilingi negara mereka dan secara langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba membawa penekanan pada negara mereka dari luar (Keck dan Sikkink 1998, 12-13) namun penjelasan Marc Edelman bahwa efek boomerang berjalan lebih baik untuk beberapa permintaan dibanding yang lain (lihat edelman dalam buku ini).

Tersedianya aliansi transnasional

Aliansi dengan kelompok-kelompok dengan sumber politik dan logistik yang relevan sangat dibutuhkan. Gerakan petani di selatan, yang berhubungan baik dengan NGO, lembaga donor dan para akademisi yang simpatik, dibawah syarat dan kondisi tertentu, mereka memiliki potensi besar sebagai aliansi. Namun aliansi tersebut tidak dapat tumbuh begitu saja dengan munculnya isu di masa datang, tidak menjadi masalah bagaimana mendesaknya dalam perhatian gerakan. Bahkan jaringan formal (informal) yang ada sebelumnya diantara individu dan kelompok biasanya juga memainkan peran penting dalam menempatkan dasar-dasar bagi pembangunan koalisi lintas-bangsa dan intra-sektor/ intra- jaringan yang lebih luas. Dan ketika tercapai, hal ini tidak akan tetap statis.

Dalam kasus Via Campesina, dua aliansi disekitar CGAR penting. Keterlibatan pertama dari FIAN (Food-First Information and Action Network), sebuah jaringan aktifis hak asasi manusia yang terdiri dari individu dan kelompok global yang berlokasi di selatan dan utara. Didirikan pada tahun 1980an, FIAN memfokuskan diri dalam memperluas konvensi internasional UN dalam bidang ekonomi, sosial, hak budaya dan khususnya "hak untuk pangan". Bagi FIAN "hak untuk tanah" adalah prasyarat yang dibutuhkan sebelum "hak untuk pangan". Sebelum ditempa menjadi aliansi dengan Via campesina pada tahun 1999-2000, FIAN meluncurkan kampanyenya yang tidak berlangsung lama. Namun inisiiatif yang lebih awal ini tentu saja penting bagi partisipasi kelompok nasional dan untuk dukungan secara global pada FIAN. FIAN memerlukan kekuatan organisasi dan penyebaran secara global dari Via campesina. pada bagian ini, anggota Via Campesina dihadapkan secara langsung oleh MLAR yang kekurangan "master frame" yang dapat menghu-

bungkan kampanye mereka dalam "cerita tentang hak" yang dengan cepat memperoleh cakupan wilayah di seluruh dunia pada periode ini (De Feyter 2005) dan merupakan sanggahan argumen yang paling logik untuk melawan MLAR. Namun tidak semua pendukung hak asasi manusia mempunyai pemahaman dengan hukum hak asasi manusia dan metodologi nya. Setiap jaringan juga diakui sebagai pelengkap untuk usaha lainnya dan aliansi global yang ditempa.

Aliansi telah diatur untuk tetap menguntungkan dan menguatkan satu sama lain sejak saat itu, meskipun terkadang ada ketegangan. Sewaktu kampanye mendapatkan momentum, aktifis didalamnya menyadari dengan cepat bahwa pendekatan "expose dan oppose" dan "agitasi-propaganda" akan cukup untuk melawan ancaman MLAR. Kesuksesan membutuhkan argumen yang kuat yang didukung oleh bukti dan proposisi yang lebih kuat secara alternatif.

Perhatian mendesak selanjutnya adalah proses pembingkaian dari kampanye yang bisa cepat menghasilkan yaitu kampanye tentang " reforma agraria berbasis ketahanan pangan" yang diadakan saat ini. Dalam kerangka ini, Via Campesina menemukan aliansi yang strategis yaitu LRAN (Land Research and Action Network), sebuah jaringan global yang terdiri dari individu dan peneliti yang memiliki perhatian penuh pada isu-isu agraria, politik makanan, agroekologi, dan perdagangan. Semula, tuan rumah jaringan ini adalah organisasi penelitian non-pemerintah bernama *Food First Policy Institute* di Oakland, California, tetapi setelah itu dia berdiri sendiri.

Perluasan dari kerangka kampanye yang dibuat oleh CGAR lebih mudah diakses dan menarik lebih luas perhtian aktivis jaringan (trans) nasional yang berkerja di ruang lingkup isu-isu pangan dan lingkungan. Pada akhirnya, hal tersebut tidak diperhatikan lagi di akhir tahun

1990an, lembaga donor non-pemerintah kebanyakan membuka "program global" baru, di samping program negara mereka yang telah lebih mapan, sebagai respon pada berkembangnya kegiatan aktivis transnasional dalam mencari partner donor baru. Program global baru menjadi sumber utama untuk TAMs seperti Via campesina dan juga CGAR.

Pemaknaan Bersama, Target bersama

"Makna" dari tanah telah dikembangkan oleh CGAR selama beberapa waktu bersamaan dengan promosi agresif World Bank dengan MLAR-nya di tahun 1990an yang memberikan konstruksi makna umum dari "tanah". Aktivis Via Campesina setuju bahwa "tanah adalah hal yang penting untuk mata pencaharian petani", namun pengawasan efektif pada sumber agraria ini di monopoli oleh kelas-kelas pemilik tanah dan hal penting juga adalah kebutuhan untuk meredistribusi tanah pada petani yang tidak memiliki tanah; dan MLAR tidak akan bisa untuk melakukannya. Dalam kenyataanya, MLAR malah akan menghancurkan usaha tersebut (see, e.g., Via Campesina 2000a). Hal ini merupakan awal berbagi pemahaman di Via Campesina. Sejak itu, dalam jaringan dan tanpa harus menyimpang dari sumber filosofi yang asli, pemahaman dari makna dan tujuan tanah (dan sebagai konsekuensi sifat dari kampanye global itu sendiri) telah dilanjutkan untuk dikembangkan sebagai hasil upaya terus-menerus untuk menghubungkan isu tanah dengan isu ketahanan pangan yang lebih luas, serta isu pembangunan dan lingkungan (terutama setelah bergabungnya LRAN). Saat ini keterlibatan Via Campesina dengan *International Planning Committee* untuk kedaulatan pangan (yang mana termasuk peternak, nelayan dan sektor lainya yang secara umum tidak kuat di via campesina) muncul untuk mengorientasikan kembali praktek-

praktek aksi pengambilan tanah, bahkan lebih jauh.[98]

Akhirnya, faktor yang secara kritis penting untuk memfasilitasi terciptanya penyebab umum dan yang memungkinkan awal kemunculan CGAR ditengah-tengah keberagaman, dan menjelaskan keberadaan sasaran target, (atau orang yang melakukan kesalahan), tentu saja World Bank, ketika pendonor-pendukung-penemu MLAR memberikan target high-profile yang konkret yang merupakan "kejahatan" juga secara relatif mudah dijelaskan pada kekuatan subjektif yang berbeda terhadap masyarakat luas bahwa kampanye itu diharapkan untuk dapat memiliki kekuatan.

Cepat dan murahnya komunikasi dan transportasi lintasnegara

Pemutusan monopoli informasi, komunikasi dan mobilitas oleh pemerintah nasional dan lembaga keuangan internasional adalah perubahan yang penting dan menguntungkan dalam "struktur kesempatan politik" bagi aktivis (TAM) (Keck and Sikkink 1998; Tarrow 2005; Bob 2005). Hal ini juga disebabkan oleh kemunculan CGAR. Ketika Via Campesina dibentuk pada tahun 1993, e-mail mulai diperkenalkan di dunia NGO, dan kembali lagi sangat sedikit gerakan petani yang bisa menggunakan teknologi baru ini.[99] Malahan, faksimili yang mahal dan tidak praktis

---

[98] Keterlibatan Via Campesina yang lebih luas (dalam representasi dan persuasi ideologi) dalam IPC Food Sovereignty yang tampaknya merubah baik Via Campesina dan anggota IPC melalui interaksi yang tidak selalu mulus dengan sektor pedesaan lainnya, jenis asosiasi (IPC termasuk LSM) dan perbedaan ideologi politik (IPC termasuk kelompok yang kurang radikal). Hal ini berdasarkan observasi penulis sendiri dalam beberapa peristiwa penting yang dipartisipasi oleg IPC, sebagaimana juga berdasarkan wawancara komprehensif semi-sturuktur dengan Antonio Onorti yang merupakan pelaku fokus global dari IPC (Juni 2007, Berlin).

[99] Dapat diingat kembali bahwa kode HTML hanya mulai didapat

(khususnya dalam menangani dokumen elektronik dalam jumlah besar) menjadi cara komunikasi yang mendominasi di sesama anggota Via Campesina hingga kira-kira sampai di akhir 1990an. Padahal waktu itu banyak muncul website yang menyediakan layanan e-mail gratis dan bebas akses untuk dokumen dan website yang membuka kesempatan baru bagi kelompok petani (trans) nasional) untuk berkomunikasi secara cepat untuk menemukan dan membagi informasi penting. Di tahun-tahun mendatang, skype dan sms juga menjadi hal penting, yang secara relatif lebih mudah dalam arti aktivis TAMS secara mudah berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain melewati rangkaian-kesatuan waktu-ruang yang diperluas.

Kemudian, ada transportasi udara dengan harga murah, yang juga telah memperluas mobilitas aktivis CGAR, yang memungkinkan mereka bertemu satu sama lain (dan dengan "musuh-musuh mereka) secara langsung di pertemuan global, untuk menyaksikan kondisi bangsa-lokal satu sama lain dan bahkan secara literal berdiri bersama dalam solidaritas: dalam baris penjagaan atau demonstrasi massa, atau misi pencarian-fakta hak asasi manusia disana. Peningkatan kesempatan yang besar untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung di semua tingkatan ini telah (dan akan terus) membuat dampak mendalam dalam dinamika gerakan (di setiap tingkat), dan tentu saja membutuhkan perhatian yang lebih fokus dari yang bisa kita beri disini.

Salah satu dampak yang penting adalah terhapusnya monopoli informasi yang selama ini hanya bisa diakses oleh pemerintah, LSM yang besar dan lembaga pembangunan.

---

secara luas di pertengahan tahun 1990an. Sebelum adanya halaman teks berbasis interner dan tidak ada sistem web berbasis email (saya berterima kasih pada Marc Edelman untuk mengingatkan saya tentang ini).

Sebagai bukti dalam kasus Filipina, ketika World Bank mulai bernegosiasi dengan pemerintah Filipina untuk mengenalkan MLAR, dengan menceritakan kesuksesan MLAR yang mengada-ada di Amerika Latin dan afrika selatan. Keraguan aktivis Filipina, dengan menggunakan e-mail, mereka dengan cepat menghubungi kolega di Amerika Serikat dan Amerika Latin untuk menanyakan pandangan alternatif. Beberapa hari kemudian, aktivis-aktivis ini memiliki senjata yaitu dokumen-dokumen yang menunjukan gambaran yang benar-benar berbeda dari apa yang di klaim sebagai keberhasilan MLAR oleh World Bank. Proses yang serupa akan terjadi berulang kali di negara lainnya juga, dengan didapatkannya data yang relevan oleh aktivis dan analisis alternatif dari gerakan dimanapun atau mengakses informasi melalui website, memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi advokasi mereka pada momen-momen penting.

Otonomi dan kapasitas untuk menggabungkan bentuk-bentuk aksi bersama.

Aksi bersama dilaksanakan pada ruang politik internasional yang kadang membawa TAMs berhadapan dengan institusi internasional, dengan beberapa dari mereka telah memiliki pengalaman berinteraksi, dan yang lainnya tidak. Di kasus lain, ancaman ko-optasi membayangi aktivis TAM. Hal tersebut berguna untuk membedakan antara dua konsep: "independen" dan "otonomi". Independen kadang dilihat sebagai salah satu pilihan dalam hubungan absolut, satu atau dua kelompok yang membiarkan diri mereka untuk dipilih institusi internasional dan mereka yang diisolasi dari bentuk pengaruh dan campur tangan dari luar. Sebagai pembanding, otonomi adalah "kadar masalah yang tidak dapat dipisahkan" dan merujuk pada jumlah pengaruh eksternal pada gerakan agraria dalam membuat keputusan internal. Dalam gambaran ini,

sebuah organisasi mungkin memiliki hubungan dengan entitas lain, namun tidak masalah untuk istilah menggambarkan untuk hubungan tersebut (based on Fox 1993, 28).

Bagi via campesina, perjuangan untuk otonomi adalah untuk menghadapi dua bidang: dengan institusi internasional (inter) pemerintah dan NGO. Sebagaimana di jelaskan di dokumen organisasi sebelumnya, " kami tidak mempunyai pilihan apakah kami berinteraksi dengan yang lain yang berhubungan di arena kami, namun kami mempunyai pilihan dalam bagaimana kami bekerja untuk membuat perubahan yang kami inginkan". Hal tersebut menguraikan: "Via Campesina harus mempunyai otonomi untuk menentukan ruang yang akan ditinggali sebagai pengamanan objektif, ruang yang cukup besar untuk secara efektif mempengaruhi segala peristiwa". Sementara itu kapan dan bagaimana untuk menggunakan aksi langsung dan mobilisasi sebagai bentuk aksi bersama dan dalam masalah strategi politik yang lebih luas, adalah pertanyaan sementara yang tampaknya ditujukan dan agak terbuka di Via Campesina karena mengeinternasionalkan aksi bersama dalam isu agraria tidaklah mudah bagi jaringan.

Pencarian taktik yang sesuai dan bentuk aksi adalah hubungan interaksi yang tidak dapat dihindari dengan institusi global (inter) pemerintah. Pilihan macam taktik dan aksi apa yang akan diambil tergantung kepada dalam bagian tipe yang bagaimana institusi global berinteraksi. Sifat dari institusi pada umunnya tidak menjadi soal dalam perhitungan Via Campesina. Pada umumnya, mereka lebih condong pada sistem UN yang melekat pada mekanisme perwakilan "satu negara-satu pilihan", karena sistem itu membantu untuk menjelaskan kesulitannya namun tetap menjalin hubungan kolaboratif dengan beberapa kelompok seperti Food and Agriculture Organization of the UN

(FAO) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD). Namun konsistensi dengan kerangka dasar mereka, Via Campesina kurang lebih secara otomatis mengkonfrontasi dari sudut "expose dan oppose" terhadap lembaga keuangan international seperti World Bank. Via Campesina melihat institusi seperti ini sebagai penyebab bukan solusi terhadap masalah kaum petani.

Via Campesina sedikit mahir dalam menggabungkan beragam bentuk aksi, seperti aksi konfrontasi terhadap TNC dan partner dalam negeri mereka, aksi-aksi ini menggunakan bentuk aksi agresif seperti okupasi tanah, membongkar lahanlahan pertanian Rekayasa Genetik (GM) dan bergerak di kota-kota besar. Pada waktu yang sama aksi tersebut telah berkolaborasi dengan aliansi daerah di beberapa lembaga dalam isu-isu tertentu, bernegosiasi, berkolaborasi dan bahkan berinisiatif bersama. Dari perspektif ini bahwa strategi yang dianut dalam CGAR bisa dipahami lebih baik. Strategi tersebut telah mengambil posisi "expose dan oppose" terhadap MLAR dan World Bank, dengan menggunakan koordinasi dan bentuk aksi agresif serempak di lokal-nasional-internasional, termasuk "agit-prop", mempermalukan MLAR didepan publik dan melakukan okupasi-okupasi di tingkat lokal

Sementara itu aksi tersebut telah menimbulkan kerja kolaboratif dengan beberapa aliansi di IFAD dan FAO dalam mengembangkan dokumen, konferensi dan proyek bersama. Kedua tipe pendekatan yang luas, mempunyai sorotan media tersendiri sebagaimana yang dilihat sebagai saling menguatkan satu sama lain. Negosiasi dengan lembaga lain bisa menjadi lemah tanpa ancaman yang nyata yang Via campesina sebenarnya mengambil jalan bentuk aksi agresif untuk melawan mereka, yang sebaliknya aksi-aksi yang semata-mata "terbuka dan melawan" tanpa

bernegosiasi sebentar akan menyorot gerakan sebagai suatu hal yang tidak masuk akal. Aksi yang diseimbangkan secara hati-hati diperlukan dalam penggunaan bentuk aksi tersebut dan kerjasama yang baik dengan media (for related discussions, see Hertel 2006; Bob 2005), dalam dan diluar CGAR, strategi ini relatif dapat dilakukan oleh Via Campisena secara efektif

Pendeknya CGAR muncul dengan besar karena lima faktor yang berhubungan asosiasi dengan perubahan dalam strategi kesempatan politik internasional saat ini: penggeseran eksteralisasi isu nasional, munculnya aliansi dengan sumber politik dan logistik, penempaan makna bersama dalam kampanye dan munculnya target bersama dan konkret dalam kampanye, munculnya komunikasi dan transportasi lintas negara yang cepat dan murah dan pencapaian di tingkat yang lebih besar dalam otonomi dan kapasitas untuk mengkombinasi aksi bersama. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut CGAR diragukan dapat dimunculkan, seperti penegasan dari Smith dan Johnston (2002,8), yang berargumen bahwa "peningkatan integrasi global memunculkan sumber potensial untuk menyatukan gerakan politik, faktor pelengkap lainnya dibutuhkan potensi ini untuk direalisasikan.

Dampak Awal

Beberapa tahun yang lalu, Baranyi dkk memperingatkan para pengamat reforma agraria: 'tidak seorang pun dapat merendahkan dampak dari Kampanye Global untuk Reforma Agraria yang dipelopori oleh Via Campesina yang pada akhirnya ada dalam perdebatan dan diperhitungkan dalam kebijakan internasional (2004, 47). Bagaimana kita berdalih untuk mendapat pandangan yang masuk akal terhadap dampak kampanye global Via Campesina ini? Apa yang Keck and Sikkink berikan,

relevan dalam hal ini: "jaringan mempengaruhi politik di tingkat yang berbeda karena aktor-aktor dalam jaringan ini secara bersama-sama membantu untuk menegaskan area isu, meyakinkan pembuat kebijakan dan masyarakat bahwa masalah yang ditegaskan dapat dipecahkan, menentukan solusi dan memonitoring pelaksanaannya' (1998, 201). Hal ini berarti bahwa "kita dapat berpikir, sebauh jaringan dapat efektif di tempat yang berbeda: 1. Dengan mengkerangkai perdebatan dan mendapatkan masalah dalam agenda, 2. Mendorong komitmen yang tidak bersambungan satu sama lain dari negara dan aktor kebijakan lainnya, 3. Dengan melakukan perubahan prosedur dalam level internasional dan domestik, 4 Memberikan dampak pada kebijakan, 5. Mempengaruhi perubahan sikap dalam aktor yang dituju (1998, 201). Melihat lebih dekat pada lima dimensi kampanye Via Campesina ini lebih baik dilakukan sambil mengingat pencegahan yang diberikan oleh Tarrow: "pendukung aktivis jaringan transnasional telah menimbulkan banyak intervensi yang sukses secara instan atas nama aktor yang terlalu lemah untuk meningkatkan klaim mereka. Dalam dunia internasional, kita tampaknya lebih banyak melihat intervensi seperti itu, jadi sangat penting untuk melihatnya tanpa ilusi. Intervensi transnasional lebih banyak gagal daripada sukses" (2005, 200)

Framing debates and getting issues on the agenda

Dampak CGAR menjadi signifikan dalam hal menkerangkai (ulang) perdebatan dan mengangkat isu dalam agenda. CGAR menggunakan kerangka yang dipermudah dalam kampanye: perpektif ekonomi yang tidak berdimensi versus fungsi tanah yang multidimensional, tanah sebagai komoditas versus tanah sebagai sumber penghidupan rakyat, penjualan tanah secara sukarela versus perampasan berdasarkan reforma agraria,

klaim kesuksesan MLAR versus klaim sanggahan kegagalan dan seterusnya. Via Campesina mengangkat isu ini dalam konteks perdebatan global, pada waktu yang sama anggota jaringannya sebenarnya digerakkan dalam level komunitas ,membuat advokasi yang dilakukan cukup berpihak pada kalangan bawah, secara empiris dia sangat informatif dan juga memiliki kekuatan. Saat ini isu-isu yang diangkat oleh Via Campesina menjadi tema utama dalam debat global pada kebijakan pertanahan. Salah satu contoh dari dampaknya bisa dilihat dalam isi *International Confrence on Agrarian Reform and Rural Development* (ICARRD), dan proses sebelumnya , selama dan setelah peristiwa maret 2006 (see http://www.icarrd.org). Hal tersebut merupakan gerakan yang berani untuk FAO, atau bagian di FAO, dan menjado diskusi mainstream tentang reforma agraria waktu itu ketika kebanyakan lembaga internasional tidak mau bahkan menggunakan frasa yang sama dalam pidato mereka: bahkan lebih berani lagi adalah keputusan untuk membiarkan Via Campesina mempunyai peran penting didalamnya. Bukti lainnya dapat dilihat dalam proses *Farmers Forum* di IFAD, dimana kerangka progresif "reforma agraria" secara relatif menjadi rujukan dalam pidato resmi.

Encouraging discursive commitments from state and other policy actors

Dampak dengan tingkat yang lebih rendah dapat dilihat disini. Disamping komitmen resmi dari beberapa kelompok dalam FAO dan IFAD, kampanye tidak dapat mengumpulkan komitmen yang baik bahkan pada banyak tingkatan yang dijanjikan oleh lembaga lain. Namun hal ini sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa CGAR tidak benar-benar berhubungan dengan banyak institusi. Kampanye Via Campesina tidak berhubungan secara kolaboratif

atau konfrontatif dengan lembaga bilateral. Hal ini menimbulkan implikasi penting karena lembaga bilateral memiliki dana lebih banyak dan signifikansinya dapat dilihat dari tiga dimensi yang berkaitan. Pertama, lembaga-lembaga ini mempunyai kebijakan agraria tersendiri dan secara langsung melaksanakannya dalam setting lokal dan nasional. Ada pluralitas dari lembaga intenasional yang berhubungan dengan kebijakan pertanahan, tidak hanya World Bank, FAO dan IFAD. Kedua, lembaga-lembaga bilateral kadang menyediakan dana untuk lembaga multilateral dan juga lembaga-lembaga seperti World Bank, FAO dan IFAD. Ketiga, banyak dari lembaga bilateral juga mempunyai skema pendanaan bersama dengan lembaga donor non pemerintah yang menyediakan uang untuk gerakan agraria (trans)nasional. Adanya kelalaian hubungan yang signifikan dengan lembaga-lembaga ini dapat dijelaskan sebagian oleh argumen karena rendahnya tingkat pencapaian dari kampanye CGAR dalam hal berusaha berkomitmen dengan aktor-aktor ini. Akhirnya pada level lokal-nasional, dampaknya bahkan semakin termarginalnya CGAR dalam mendapatkan komitmen resmi dari aktor negara, contohnya pemerintahan Lula yang justru memperlebar MLAR di Brazil, sementara pemerintah afrika selatan terjebak dengan MLAR.

Perubahan prosedur di tingkat international dan dalam negeri

Dampak dengan tingkat yang lebih rendah itu dapat dideteksi disini. Beberapa perubahan bisa didapat jika gerakan Brazilian menuntut pada World Bank untuk melakukan *Inspection Panel* dalam MLAR yang telah pergi yang hanya tinggal arsipnya. Tingkatan yang lebih tinggi dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam mengkerangkai proses lembaga kebijakan juga diperlukan,

pada umumnya dari World Bank dan Uni Eropa (FIAN-Via Campesina 2004), tapi itu tidak cukup membantu. Meskipun demikian, kampanye CGAR dapat mendorong beberapa perubahan prosedur yang berhubungan dengan proses di IFAD dan FAO, khususnya dalam hal memperluas 'kesempatan' ruang politik yang bisa diduduki oleh anggota Via Campesina dan aliansinya. Sebagai contoh, mekanisme interface IFAD dengan masyarakat sipil biasanya didominasi oleh IFAP dan NGO-NGO melalui non-konflik, umumnya mekanismenya adalah "kemitraan" yang tidak di politisir.[100] Dengan masuknya kampanye global yang dilakukan Via Campesina ke dalam ruang seperti ini, mengakibatkan habisnya monopoli kelompok konservatif secara politik dan mempolitisir proses interaksi.[101] Di Brazil, kita dapat menyebutnya "perubahan prosedur" dengan kata lain versi MLAR yang terakhir (hanya tanah-tanah yang tidak menjadi subjek untuk dirampas dan yang masuk dalam kualifikasi untuk MLAR).

Namun dampak negatif bagi Via Campesina di negara ini adalah: terjadinya perubahan prosedur, menjadi alasan pelebaran MLAR dan terlibatnya CONTAG lebih jauh dalam partisipasinya terhadap agenda MLAR (see, e.g., Vianna 2003), CONTAG memutus hubungan kesatuan sebelumnya yang mana dia berada diwilayah oposisi terhadap MLAR pada Forum Nasional untuk Reforma Agraria. Satu dampak dari ini adalah demolisasi forum utama pada hubungan negara saat itu, seorang peneliti menggambarkan kejadian ini sebagai istilah "momentum dari fragmentasi yang cepat" (Sauer 2007)

---

[100] Untuk diskusi yang lebih umum dalam isu ini, lihat Harris (2002).

[101] Dalam konteks ini, ada dinamika menarik antara gerakan-gerakan yang terlibat dalam Via Campesina, namun tidak dapat dibahas disini. Untuk diskusi umum yang berguna dalam tema ini yang berkaitan dengan LSM, lihat Jordan dan van Tuijl (2000).

Mempengaruhi Kebijakan

Dampak dari kampanye Via Campesina paling rendah sejauh ini adalah terhadap *policy reform*. Kampanye belum dapat memaksa perpindahan kebijakan pada lembaga yang mempromosikan MLAR dan kebijakan pertanahan neoliberal lainnya dan tentu saja pada hakekatnya dia belum dapat menyebabkan adopsi rencana alternatif, baik pada level international atau nasional. World Bank berada dalam posisi defensif, namun belum (juga) menurunkan MLAR. Pada bagian ini harapan World Bank terjepit untuk menghasilkan kesuksesan di Brazil dan melanjutkan argumentasinya bahwa masalah dengan MLAR di beberapa negara hanya masalah operasional dan administrasi.

Sementara, ini tantangan bagi Via campesina untuk tetap berhubungan dengan FAO dan IFAD karena tendensi yang mendasari lembaga-lembaga ini terdiri dari pertarungan antara kekuatan anti reform dan pro redistribusi, yang dapat menimbulkan kekacauan, posisi kontradiksi terus menerus, termasuk isu pertanahan. Melalui kepentingannya ICARRD yang merupakan salah satu dari beberapa tempat di tatar global yang mempermasalahkan dinamika kebijakan politik global pertanahan dan secara relatif lebih lemah jika di bandingkan dengan yang dikontrol oleh pemain/pendonor yang lebih besar: World Bank, EU dan lembaga bilateral. Namun ICARRD merupakan prestasi politik utama bagi Via Campesina. Apakah momentum dapat mendukung dan diterjemahkan dalam reforma kebijakan tetap bisa dilihat.

Sayangnya kelemahan yang nyata dari aliansi di FAO pasca-ICARRD (dalam kaitan memotong pendanaan dan reorganisasi internal) tidak menjadi tanda yang lebih baik. Di IFAD aliansi Via Campesina ditempatkan kebanyakan di Divisi Kebijakan, divisi ini relatif lemah secara politik,

sebagian besar karena mereka tidak mengontrol dana dan secara langsung tidak bertemu dengan negara partner. Dalam bagian ini, divisi operasi yang lebih berkuasa di IFAD dimana dana utama secara langsung ditangani, di IFAD masih kurang posisi yang berkaitan dengan reforma agraria dan urusan tendensi pro-pasar secara luas.[102]

Mempengaruhi hingga terjadi perubahan prilaku para aktor yang disasar.

Walaupun kampanye telah menkontribusi pada terjadinya perubahan perilaku pada intstitusi yang menjadi target, hal tersebut sebenarnya tidak perlu untuk medukung CGAR. Sebagai contoh, World Bank mengambil isu substantif dan prosedur yang diangkat oleh Via campesina secara relatif serius. Namun di negara dimana MLAR sedang berlangsung, perubahan tidak menjadi positif. Di Filipina sebagai contoh MLAR, agenda telah disusun ulang dan diterima kembali di pemerintah nasional baru. Di Brazil, World Bank menempatkan dengan baik kerangka dan petunjuk implementasi, memenangkan pemerintahan Lula dan merekrut CONTAG dalam proyeknya.

Ketika isu transparansi dan akuntabilitas muncul, World Bank sangat ahli dalam merekrut kelompok masyarakat sipil yang lain untuk berpartisipasi dalam proses MLAR, dengan cara konsultasi elektronik secara global dan konsultasi regional yang nanti bisa menjadi petunjuk untuk mengklaim bukti bahwa dia telah mempromosikan

[102] Sebagai contoh, Kay (2006,491) menemukan di Amerika latin dan Karibia selama beberapa tahun IFAD secara umum mengikuti kebijakan pasar orientasi tanah yang promosikan oleh World Bank. Oleh sebab itu, ketika Via Campesina mampu mendapat kemajuan dalam level global dengan aliansinya kebijakan ekpert utama IFAD dan seterusnya, hal tersebut mungkin memundurkan hingga ke setting lokal dan nasional jika kebijakan tanah yang dilakukan oleh program negara IFAD berkontradiksi dengan visi Via Campesina.

'partisipasi" "masyarakat sipil". Proses problematika yang diprotes oleh CGAR adalah dalam hal "tidak-transparan" dan "manipulatif" nya WB. Diprediksikan, perubahan perilaku positif yang terjadi telah dibatasi di beberapa bagian saja seperti dalam FAO dan IFAD.

Akhirnya, disini terdapat area urgent, dimana CGAR tampaknya tidak dapat memberikan dampak positif perubahan perilaku sejauh ini dalam hal memberhentikan kekerasan di pedesaan dan pemerasan hak asasi manusia terhadap petani yang menuntut tanah. Kampanye untuk memberhentikan kekerasan di pedesaan telah dilaksanakan di seluruh dunia sebagai bagian CGAR, namun sejauh ini dampaknya terlalu sedikit dalam usaha memberhentikan kekerasan itu. (untuk latar belakang diskusi ini, lihat, e.g., Via Campesina 2006; Franco 2007; De Carvalho Filho dan Mendonc'a 2007).

Isu-isu yang Bertentangan dan Trayektori di Masa Depan

Keck and Sikkink mengingatkan kita bahwa "advokasi jaringan transnasional harus juga dipahami sebagai ruang politik, yang membedakan situasi saat aktor bernegosiasi secara formal atau informal, sosial, budaya, dan politik sebagai usaha bersama. Mereka meneruskan : 'kekuatan jaringan adalah latihan dalam jaringan itu sendiri dan kekuatan yang mengikuti dari sumbernya.....Aktor yang lebih kuat dalam jaringan sering menjatuhkan yang lemah, namun karena sifat bentuk jaringan organisasi, banyak aktor yang bertransformasi melalui partisipasi mereka dalam jaringan (1998, 3; see also Della Porta et al. 2006, 20). Perspektif seperti itu dilengkapi oleh penjelasan seterusnya oleh Tarrow bahwa "aktivis transnasional sering membagi antara kerangka global dari kampanye gerakan transnasional dan kebutuhan lokal dari mereka yang mengklaim sebagai perwakilan (2005, 76). Dia beragumen

bahwa kerangka global dapat dihargai dan memberikan klaim yang mungkin sebaliknya tetap membatasi dan picik. Hal tersebut adalah tanda bahwa aktivis terlalu banyak bekerja dan terisolasi bahwa ada orang yang melebihi batas yang membagi keluhan mereka dan mendukung perkara mereka. Dia memperhatikan bagaimanapun juga bahwa dengan mengganti perhatian pada target yang jauh, membawa kesulitan melepaskan aktivis dari kebutuhan dunia nyata dari orang yang ingin mereka wakilkan (ibid.; see also Bob 2005, 195).Tarrow menyimpulkan bahwa "aktivisme transnasional akan terus-menerus terjadi dan berkontradiksi, dan akan berdampak nyata dalam politik domestik' (2005, 219).

Hal tersebut merupakan pengingat bahwa hubungan lokal/global-nasional, perwakilan dan akuntabilitas tidak terlalu dipermasalahkan, meskipun beberapa aktivis TAM mengklaim itu dipersoalkan. Tentu saja ini adalah politik sehari-hari dari pembangunan gerakan, jika segalanya berbicara mengenai rancangan strategi untuk menyatukan pengalaman yang beragam. Namun walaupun mudah dipahami, tendensi untuk menegaskan "kesatuan dalam keberagaman" *(while downplaying diversity)* kadang-kadang mengabaikan resiko bahwa terdapat ketegangan yang tersembunyi yang memerlukan perhatian.

Ada tiga dimensi pada umumnya yang dipertimbangkan lebih jauh oleh aktivis Via Campesina: perbedaan kelas, perbedaan ideologi dan berkembangnya jaringan namun masih dibatasi perwakilan dari kepentingan beragam dan identitas dari pedesaan miskin. Untuk lebih luasnya, pembagian belahan bumi antara selatan dan utara secukupnya ditujukan oleh Via Campesina dalam pidatonya mengenai potensi lebih dan perbedaan aktual melalui solidaritas lintas-negara (lihat, e.g., Bove 2001, 96; Stedile 2002, 99–100; Desmarais 2007). Dalam hal ini perbedaan gender juga jadi perhatian, sekalipun oleh gerakan agraria

baik dilakukan dengan pelan-pelan pada level nasional dan internasional. Pada umumnya dalam tataran internasional, Via Campesina tentu saja harus dilihat sebagai contoh yang baik untuk pembentukan dengan seimbangnya perwakilan antara wanita dan pria pada badan pembuat keputusan yang paling kuat, yaitu International Coordinating Committee (ICC).

Perbedaan kelas

Pada dasarnya Via Campesina memang organisasi yang heterogen. Perkiraan kasar profil kelas di Via Campesina diungkapkan seperti berikut: (i). Petani tak bertanah, petani penyewa, petani yang berbagi hasil dan buruh pedesaan yang kebanyakan di Amerika Latin dan Asia; (ii). Petani kecil dan paruh waktu di (Barat) Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Korea Selatan; (iii) Keluarga petani di dunia Selatan, termasuk yang ada di Afrika yang terbentuk melalui program Reforma Agraria, seperti di Brazil dan Mexico; (iv) petani menengah kaya, tapi in hanya di India; dan 5. Semi- proletariat bertempat di komunitas kota dan pinggir kota di beberapa negara seperti Brazil dan afrika selatan.[103] Yang terbanyak jumlahnya, paling bersemangat secara politik sebagai kelompok yang berpengaruh di Via Campesina adalah dari blok Amerika Latin, kelompok Eropa (Barat) dan beberapa gerakan di Asia. Pengaruh ini sebagian dicerminkan atau dihasilkan oleh distribusi kekuatan kepemimpinan global yang tampaknya memperkuat pengaruh Amerika – Eropa. Setengah dari keanggotaan ICC, 18 orang (pada tahun 2007) berasal dari Amerika Latin dan Karibia.[104]

---

[103] Untuk kelompok ini, merujuk pada contoh penjelasan yang dibuat oleh Stedile (2002).

[104] Beberapa dekade terakhir yang menjadi saksi kebangkitan gerakan sosial pedesaan di Amerika latin (sebagai contoh lihat Veltmeyer

Keanggotaan organisasi di Afrika memang berkembang, namun relatif masih sedikit dan sangat heterogen, kebanyakan anggotanya adalah masyarakat pinggir kota yang tidak bertanah di Afrika Selatan sampai petani skala kecil di Mozambik. Organisasi di region yang paling memperkuat orientasi organisasional dan politik terdekat dengan partner mereka di Amerika dan Asia adalah UNAC.[105] Ada dua anggota yang giat di Afrika Barat, bernama CNCR[106] di senegal dan CNOP[107] di Mali (plus CPM[108] di Madagaskar). Meskipun demikian kepergiatan mereka tidak seperti anggota Via Campesina yang lainnya, CNCR (dan CPM) yang bersama-sama mempertahankan keanggotaannya dengan rival Via Campesina, IFAP.

Gerakan dari Amerika Latin dan beberapa negara asia adalah kelompok yang paling suka mengeluarkan pendapat dalam Via Campesina di CGAR. Di Amerika Latin, diantara suara-suara yang paling dikenali adalah dari MST di Brazil dan COCOCH di Honduras. Di Asia, ada gerakan dari Filipina dan Indonesia (terutama ketika seketariat global Via Campesina berpindah ke Indonesia pada tahun 2004) dan belakangan ini beberapa kelompok dari Asia Selatan, walaupun kepentingan dalam hak mereka tidak (belum) kompak dan kuat seperti blok Amerika Latin yang solid, kemungkinan karena berbagai alasan termasuk keberagaman signifikan linguistik dan perbedaan ideologi. Meskipun demikian Via Campisena bersama gerakan

1997), termasuk gerakan masyarakat adat (Yashar 2005) dalam skala dan tingkatan radikalisasi politik yang dilihat hanya di beberapa tempat di asia dan afrika selama periode yang sama. Ini merupakan catatan untuk sifat dominan di kontingen Amerika Latin di badan kepemimpinan global Via Campesina.

105 Uniao Nacional de Camponeses atau National Peasants Union.

106 Conseil National de Concertation et de Cooperation des Ruraux.

107 Coordination National de Organization Paysannes (CNOP).

108 Coalition Paysanne de Madagaskar.

buruh desa dan petani tak bertanah di Amerika Latin dan Asia (dan mungkin ditambah LPM sebelum dikontrak) adalah kekuatan utama untuk mendorong Via Campesina menjalankan reforma agraria sebagai strategi kampanye global.

Gabungan kekuatan dari kelompok ini sangat berpengaruh dan kuat, bahkan ketika kelompok berkuasa lainnya di Via Campesina, dengan kata lain KRRS yang awalnya keberatan reforma agraria menjadi pokok utama kampanye. KRRS di India yang basis massanya adalah petani menengah dan kaya, secara meyakinkan menolak masalah ini. Hal ini relevan untuk menguraikannya pada kasus KRRS. Kelompok ini bergabung sejak tahun 1980an dalam kampanye anti-TNC dan terakhir anti – tanaman GM (tanaman hasil rekayasa genetik). Banyak dari kampanye ini yang terbentuk secara dramatis dan mendapat sorotan media (Scoones pada koleksi ini; Herring 2007).

Kampanye ini berhubungan baik dengan advokasi kelompok di Utara yang juga melawan GM crops. KRRS menjadi aktor yang penting dalam kampanye global anti-GM crops dan anti- TNC di Via campesina. Hal tersebut menjadi sangat berpengaruh dalam gerakan global dan pada gilirannya mendapat peran menjadi "penjaga gerbang" di Asia Selatan. Namun, KRRS secara sadar mengelak dari isu-isu yang dapat mempertajam isu kelas. M.D Nanjundaswamy, pemimpin KRRS (yang meninggal di awal tahun 2001) dahulu menjelaskan bahwa: "kita tidak dapat membagi diri kita menjadi tuan tanah dan petani tak bertanah dan merangsang perpecahan, karena perpecahan tidak akan memberikan kekuatan tapi akan menimbulkan beban" (Assadi 1994, 215). Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa KRRS beroposisi dengan petinggi legislatif dalam tanah pedesaan yang secara bersama membatasi advokasi untuk kepemilikan properti industri

kota. Lebih jauh lagi, dalam tulisannya lebih dari sepuluh tahun yang lalu, assadi menjelaskan bahwa keduanya (Maharashtra berbasis di Shetkari Sanghatana dan Karnataka di berbasis KRRS) tidak hanya mengutuk kekejaman terhadap masyakat adat dan pemisahan dari Dalits namun dalam beberapa kasus pelaku dari aksi tersebut menjadi anggota mereka (1994,215)

Apa yang terjadi dalam kasus KRRS adalah adanya perbedaan kelas yang serius antara gerakan dan dalam gerakan yang (tidak) atau berafiliasi dengan Via Campesina. Hal itu akan relevan jika menggunakan lensa analistis untuk memeriksa banyaknya organisasi seperti *Bharatiya Kisan Union* yang beraffiliasi (atau tidak) dengan Via Campesina, dan akan berguna untuk mengkonsultasikan dengan berbagai studi di bab sebelumnya yang diedit oleh Brass (1994). Perbedaan kelas ini telah menyebabkan implikasi mendalam untuk tuntutan kampanye yang dikerangkai dan diwakilkan, serta dibentuk dalam gerakan. Dalam kasus KRRS proporsi yang signifikan dari bagian yang terorganisir dari kelas sosial pedesaan yang dieksploitasi tidak hanya di India namun juga di Asia Selatan, secara umum diperkecualian dari proses Via Campesina, salah satunya karena KRRS memblokir masuknya mereka dalam Via Campesina atau mereka menolak untuk berpartisipasi dalam proses dimana "penjaga gerbang" adalah KRRS.[109]

Beberapa dari organisasi tersebut dapat masuk ke dalam Via Campesina pada akhirnya. Ketika Nanjundaswamy meninggal di awal tahun 2004, 16 organisasi dari Asia Selatan bergabung ikut masuk dalam Via Campesina beberapa bulan setelahnya. Sampai sekarang, walaupun begitu masih terdapat sejumlah organisasi masyarakat desa

[109] Informasi mengenai ini berdasarkan sejumlah percakapan penulis dengan pemimpin utama gerakan dalam Via Campesina dan dari berbagai kelompok di India selama beberapa tahun.

miskin yang tidak bertanah di India yang masih diluar Via Campesina, sebagian karena meneruskan pengaruh KRRS dan sebagian lagi karena komplikasi politik dan ideologi yang muncul dan dibangun pada akhir tahun 1990an.[110]

Namun situasi yang telah diungkapkan tadi bukanlah satu-satunya, situasi itu adalah hal yang umum dalam sejarah Via Campesina. Masalah yang serius yang terjadi dalam Via Campesina adalah UNAG[111] di Nicaragua. UNAG merupakan salah satu pendiri utama Via Campesina, salah satu pilar asli dari Via Campesina, —seperti ASOCODE di Amerika Tengah—dan dia merupakan tuan rumah bagi konferensi solidaritas global pada tahun 1992 di Managua yang melahirkan ide yang paling konkret dalam pembangunan Via Campesina. UNAG dahulu adalah anggota dari IFAP, keikutsertaan itu mencerminkan persamaan yang dekat pada sesama jaringan petani menengah dan kaya dan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan pemerintah, pada produksi dan isu perdagangan dan fasilitas kredit via lembaga donor bilateral dan multilateral.

Sebaliknya, jika diperhatikan, organisasi pelopor di Nicaragua adalah Asosiasi Buruh Tani, ATC[112], dengan isu petani tak bertanah dan tuntutan seperti upah dan tanah. Ketika konflik meletus antara pendiri Via Campesina dan sebuah NGO dari Jerman (PFS) *over the nature*, dan orientasi Via Campesina (NGO ini didukung oleh yang lain, bahwa anggota Via Campesina seharusnya bergabung

---

110 Masalah ini menangkap isu yang diangkat oleh sekutu dekat Via Campesina, yang mengatakan bahwa "di India kasta petani tertinggi bergabung dalam Via Campesina dan sekarang kasta terendah dikeluarkan dari Via Campesina. Bagaimana memperbaiki hal ini?" (wawancara anonimus dengan sekutu dekat di Rosset dengan Martinez 2005,37).

111 Union Nacional de Agricultores y Ganaderos.

112 Asociacion de Trabajadores del Campo.

dengan IFAP). UNAG malah berdampingan dengan Dutch NGO, memilih untuk meninggalkan Via campesina dan tetap di IFAP. Meskipun munculnya insiden ini menyebabkan konflik "turf-related" politik intra-gerakan, yang dilihat dari dekat sebagai masalah kelas-berdasarkan *fault line.*

Pendeknya, melihat lebih dekat Via Campesina, kita akan melihat kelas yang berbeda diantara dan dalam gerakan nasional.[113] Perbedaan kelas dari kelompok di Via Campesina ini sebagian di klaim resmi oleh pemimpin gerakan bahwa masalah dan penindas mereka sama, namun pada waktu yang sama hal itu menunjukkan bahwa penegasan ini hanya sebagian saja yang benar: petani kaya bisa menjadi penindas bagi buruh tani; reforma agraria tentu ditolak oleh petani kaya, harga tinggi untuk produksi makanan adalah kebijakan yang baik untuk surplus pangan bagi petani produsen, namun kabar buruk bagi rumah tangga pedesaan yang kekurangan pangan, fasilitas kredit dan isu perdagangan tidak mungkin menjadi isu yang gawat bagi penghidupan buruh desa yang tidak mempunyai tanah yang otomatis tidak memiliki surplus pertanian untuk dijual, upah bukanlah isu menarik bagi petani menengah dan miskin namun dia menjadi isu utama bagi buruh desa dan seterusnya. Tentu saja, mereka semua adalah "people of the land", namun mereka bersaing dalam kepentingan kelas. Mengakui perbedaan tersebut, lebih baik daripada mengabaikan kepentingan mereka, ini adalah langkah penting dalam menemukan cara untuk memastikan

[113] Beberapa gerakan, terutama yang besar juga membedakan kelas. Walaupun tidak ada referensi spesifik di CNCR, usaha oleh Oya (2007) dalam perbedaan kelas proses akumulasi pedesaan diantara petani di Senedal secara tidak langsung memberi kesan bahwa CNCR memiliki basis berbeda yang sangat tinggi, dengan pengaruh kepemimpinan oleh yang lebih kaya (juga berdasarkan diskusi personal dengan Oya).

perwakilan yang benar-benar inklusif dan efektif dalam pembuatan keputusan dan pembuatan tuntutan

Perbedaan ideologi dan politik

Sumber tekanan lain adalah ideologi politik, yang mana tampaknya jarang diperbincangkan oleh aktivis TAM. Via Campesina merupakan koalisi kelompok yang luas dengan beragam orientasi ideologi termasuk: 1. Berbagai jalur dari kelompok populis yang radikal, 2. Berbagai jenis dari Marxists, 3. Kelompok radikal dengan tradisi anarkis, 4. Pakar lingkungan radikal, dan 5. Aktivis feminis. Banyak kelompok dan individu yang berada di suatu tempat diantara kategori yang luas ini, meskipun yang lainnya memiliki orientasi yang menumpuk, contohnya kaum feminis dan seterusnya. Yang lainnya masih belum memiliki sumber ideologi yang jelas sama sekali atau tidak mempunyai posisi ideologi yang terbentuk dengan baik.

Tingkatan perbedaan ideologi yang berbeda dari satu kasus ke yang lain, dan keragaman orientasi ideologi ditemukan tidak hanya antara gerakan, bandingkan sebagai contoh kelompok BKF[114] yang menganut marxists ortodoks di Bangladesh dengan kelompok radikal SOC[115] yang non ortodoks di Andalusia, Spanyol. Keragaman juga ditemukan dalam gerakan, terutama yang besar, seperti MST di Brazil dan CNCR di Senegal. Meskipun demikian, kepemimpinan global saat ini didominasi oleh koalisi yang signifikan ini, dengan kaum radikal yang juga cenderung mendominasi. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar gerakan nasional dalam Via Campesina adalah bagian dari gelombang gerakan sosial yang telah bebas dari dukungan partai politik paternalistik dan pengawasan partai politik.

---

[114] Bangladesh Krishok Federation.
[115] Sindicato Obrero del Campo.

Ilustrasi lainnya dari Via Campesina yang juga berkaitan yaitu tentang adanya tiga gerakan yang berhubungan dengan Via Campesina, namun di cara yang berbeda, menimbulkan masalah dari bagaimana hal ini mempengaruhi istilah eksternalisasi dari isu agraria yang diusung dalam kampanye global Via Campesina. Semua kelompok ini mempunyai basis massa atau paling tidak klaim formal dari basis massa di petani miskin.

Pertama adalah KMP, Maoist yang terinspirasi organisasi petani legal yang mana posisi ideologinya pada reforma agraria mengikuti posisi orthodoks marxis, mengkampanyekan untuk nasionalisasi tanah, mendukung pertanian negara, walaupun membiarkan kepemilikan individu transnasional. KMP menyebutnya sebagai "reforma agraria yang asli" artinya pengambil alihan tanah tanpa kompensasi bagi pemilik tanah besar dan distribusi tanah gratis bagi petani. KMP menolak hukum reforma agraria negara (*Comprehensive Agrarian Reform Program* atau CARP) yang pro- pemilik tanah dan anti-petani, mereka menyebut ini sebagai "reforma agraria palsu". KMP merupakan salah satu pendiri organisasi Via Campesina dan perwakilan Asia di ICC selama tahun-tahun pembentukan. Kampanye KMP adalah untuk menghalangi CARP yang menggunakan metode agit-prop.

Kedua adalah DKMP[116], kelompok yang memisahkan diri dari KMP pada tahun 1993 karena perbedaan ideologi. DKMP lebih banyak mengambil kaum radikal agraria dalam hal reforma agraria, yang mendukung pergerakan keluarga petani kecil. Meskipun demikian, karena perbedaan personaliti diantara pemimpinnya, DKMP gagal untuk mengerahkan dan mengkonsolidasi kekuatannya. Di pertengahan kedua tahun 1990an, DKMP mengalami

[116] Democratic KMP.

penyusutan untuk menggenggam pemimpin petani dan mengantongi petani beras di Luzon Tengah. Dengan beberapa kasus reforma agraria dan dukungan kecil dari beberapa NGO, DKMP mampu untuk mempertahankan kehadirannya yang relatif telah lemah. Karena DKMP melemah terus menerus, DKMP melanjutkan untuk menavigasi parameter negara dan hukum reforma agraria, namun menggunakan sedikit gerakan massa dan lebih banyak berhubungan dengan NGO dan kantor pemerintah untuk memberikan keputusan yang diinginkan untuk beberapa klaim tanah.KMP dan DKMP masih tetap anggota Via Campesina, walaupun di tahun-tahun ini dan sebagian karena alasan ideologi, KMP tidak lagi berjaya di Via Campesina (akan dibahas nanti). Sebagai hasilnya, kita akan menemukan situasi yang ironis dimana satu anggota organisasi dengan basis massa yang secara relatif signifikan (KMP) telah dimarginalisasi dalam Via Campesina, sementara anggota organisasi lainnya tanpa basis massa yang signifikan (DKMP) menjadi arus utama dalam gerakan global.

Kelompok ketiga adalah UNORKA[117]. Bongkahan besar dari gerakan petani yang memisahkan diri dari gerakan inspirasi Maoist di awal tahun 1990, tidak menemukan situasi kondusif dibawah bendera DKMP. Tentu saja, mereka bahkan mengkelompokan kembali dibawah naungan organisasi yang baru, UNORKA. Diformalkan hanya pada tahun 2000, UNORKA dengan cepat menjadi kelompok terbesar yang secara langsung berhubungan dengan reforma agraria di Filipina dan tetap terjadi hingga saat ini karena hampir 800 konflik agraria terjadi di negara ini. Basis massanya kebanyakan dari petani tidak bertanah dan buruh desa, seperti MST di Brazil,

[117] National Coordination of Autonomous Local Rural People's Organizations.

UNORKA menggunakan hukum reforma agraria negara sebagai konteks institusional dalam kampanye mereka, bernavigasi dalam parameter hukum dengan meregangkan batasannya, mereka juga menggunakan cara agresif dalam strategi mobilisasi massa namun mereka agak sedikit pragmatis.

UNORKA termasuk kategoti organisasi yang "pemilih" dalam hal posisi ideologi pada tanah: walaupun mengambil pendirian kaum agraria, namun juga memilki basis signifikan antara buruh desa, jadi advokasinya tidak secara ekslusif berorientasi pada susunan keluarga petani kecil. UNORKA ingin bergabung dengan Via Campesina namun KMP keberatan, karena peraturan organisasi memperbolehkan anggota yang ada untuk menolak pemohon dari negaranya sendiri. Sampai sekarang masuknya UNORKA secara formal ke dalam jaringan masih ditentang. Saat ini, walaupun KMP berkeberatan, Via campisena mulai mengundang UNORKA dalam beberapa pertemuan sebagai pengamat. Di kampanye global, FIAN bekerja secara dekat dengan UNORKA, sementra LRAN (melalui fokus pada selatan global) bekerja dengan UNORKA dan DKMP.

Apa yang terjadi pada kasus Filipina menunjukkan bahwa bahkan ketika tidak ada perbedaan kelas yang signifikan antar gerakan-pun, perbedaan ideologi dapat membuat perpecahan yang penting antara mereka. Secara ironis, adanya sedikit kesamaan antar KMP (atau DKMP) dan MST mengenai strategi reforma tanah, dan lebih banyak kesamaan antar MST dan UNORKA; dan tetapi KMP dan DKMP masuk, meskipun demikian UNORKA keluar dari Via Campesina.

Filipina bukan hanya satu-satunya contoh kasus yang menyorot pada perpecahan ideologi antara dan dalam gerakan. Kembali lagi ke Asia Selatan, kita dapat melihat

saat ini bagaimana isu KRRS digunakan oleh kelompok petani sayap kiri di India membenarkan bahwa terjadi perpecahan formasi di gerakan yang berkompetisi di wilayah, *Asian peasant Coalition (APC).* Seketariatnya saat ini berada di KMP. Kekuatan dari jaringan APC adalah, semua anggotanya diklaim memiliki satu garis kelas dengannya, dalam hal mengorganisir petani miskin dan buruh pedesaan; sebagai hasilnya, basis utamanya dapat ditemukan diantara golongan petani yang paling miskin, dan juga jaringan ini mempunyai potensi untuk menajamkan analisis kelas dan sesuai keinginan dari Via Campesina, juga melebarkan perwakilan Via Campesina di wilayah. Jaringan APC yang besar ini dapat memperkuat kampanye reforma agraria di Asia, jika tidak untuk pendirian ideologi dan politik tampaknya sangat eksklusif dan picik. Dari sana, hubungan antara APC dan Via Campesina menjadi menurun.[118]

Perbedaan lain, sifatnya tidak terlalu ideologis, namun lebih politikal. Ketegangan antara anggota Via Campesina di Mexico menjadi contoh yang baik, yang mana kemunculan UNOCRA[119] terlihat seperti menjadi "penjaga gerbang" di negara itu, mengasingkan dan membatasi gerakan penting lainnya (contoh ANEC[120] dan CNPA[121]). Kesalahan ini sebagian terlihat dalam perbedaan di strategi politik, contohnya yang berkenaan dengan program negara. Contoh yang berhubungan adalah perbedaan antara MST di Brazil dan CNCR di Senegal dalam hal yang berhubung-

---

[118] Data dan informasi dalam hal ini berdasarkan rangkaian diskusi informal penulis dengan pemimpin Via Campesina dan aktivis gerakan di Asia selama beberapa tahun.

[119] Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonomas.

[120] Asociacion Nacional de Empresas Comercializadoras de produtores del Campo.

[121] Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

an dengan negara dan institusi pembangunan internasional: MST mengambil langkah lebih otonomi dan hubungan konfliktual dengan institusi – institusi tersebut, termasuk mengambil posisi anti – World Bank, sementara itu CNCR termasuk beberapa organsisasi sponsor pemerintah, mereka memilih untuk menggabungkan negosiasi dan konfrontasi singkat dendan institusi ini, mencakup hubungan kolaboratif dengan World Bank. Ini adalah perbedaan serupa ketika kita melihat pada keseluruhan Via Campesina dan CNCR pada isu ini. Fondasi dari perbedaan ini tentu saja umumnya terkait dengan sejarah sosial dan politik di negara yang berbeda dimasing-masing wilayah kemunculan anggota Via Campesina. Ketegangan yang muncul di Afrika Selatan sebagian mencerminkan perbedaan itu juga, walaupun dalam jenis yang berbeda. Poinnya adalah perbedaan ideologi dan politik signifikan dan tidak dapat ditangguhkan.

Representasi Politik

Dalam wawancara baru–baru ini di *Socialist Register*, Stedile dari MST berbicara tentang gerakan nasional dan aliansi lintas nasional. Dalam wawancara itu ia berkata:'' kami diproyeksikan sebagai bayangan yang lebih besar dari yang sebenarnya dan kami menjadi terkenal karenanya. Dalam kenyataannya MST sebagai pengorganisir kekuatan kaum buruh di Brazil masih sangat sedikit (2007, 195). Lebih jauhnya, dia berkata bahwa 'gerakan Afrika mempunyai level yang rendah dari organisasi dan sangat miskin dan banyak yang masih berlokasi dalam suku-suku dan level lokal. Beberapa negara mempunyai gerakan nasional'. (2007, 214)

Keterusterangan mengenai MST yang masih membatasi perwakilan dari petani tak bertanah di Brazil juga tentang kekuatan komparatif dari gerakan di wilayah

berbeda, terutama Afrika yang membantu meletakkan Via Campesina dan GCAR lebih realistis. Walaupun bangkitnya Via Campesina terjadi secara dramatik dan impresif sebagai gerakan agraria utama internasional, luasnya perwakilannya masih tetap dibatasi ketika dilihat dari perpektif global. Bahkan dalam daerah kekuasaan nasional yang dipimpin oleh anggota Via Campesina, yang mengorganisir basisnya tetap terbatas, sebagaimana komentar Stedile mengenai MST Brazil. Ini tidak mungkin jadi lebih baik di negara lain dimana Via Campesina berada, sekalipun klaim dari anggota organisasi yang terkadang bisa berlebihan. Sementara itu di Asia Selatan yang merupakan daerah yang sangat luas, bahkan sampai sekarang-pun kubu utama Via Campesina adalah Asia Selatan (plus Korea Selatan), yang mana walaupun signifikan, tapi itu tidak membentuk terjadinya massa teroganisir disana. Dalam bagian ini, Asia Selatan adalah tuan rumah bagi sejumlah gerakan agresif dari kelas buruh desa yang berhubungan dengan perlawanan kelas, namun banyak dari gerakan ini tidak terintergrasi secara formal dalam Via Campesina, meskipun organisasi utama Via Campesina disana-(KRRS)- adalah gerakan petani menengah dan kaya yang tidak setuju dengan pembicaraan tentang kelas sosial, eksploitasi kelas dan perjuangan kelas serta mereka bahlan menentang Reforma Agraria.

Tidak ada gerakan agraria nasional yang signifikan saat ini baik di Asia Tengah atau Timur Tengah yang mendekati orientasi politik di Via Campesina atau mempunyai hubungan formal. Sementara itu, negara yang amat besar dengan kelas buruh desa yang besar juga seperti Cina dan pendahulu nya –USSR (Uni Sovyet)- juga tidak lagi berada dalam orbit Via Campesina, oleh karena itu beberapa jenis perlawanan petani sepertinya menghilang dalam diskusi Via Campesina. Akhirnya di wilayah Afrika yang luas,

hanya ada sedikit anggota (lima) di Via Campesina dan gerakan tersebut mewakili kelas buruh desa di negaranya dan bahkan lebih terbatas dari MST di Brazil. Pendeknya, walau lebih signifikan daripada gerakan agraria transnasional lainnya, Via Campesina secara langsung mewakili hanya fraksi kecil dari kelas buruh desa global (paling tidak untuk saat ini).

Membawa keragaman dalam isu agraria tidak hanya dalam negara-negara dimana anggota Via campesina ada, namun juga di banyak negara dimana mereka masih absen (termasuk negara-negara besar ex- sosialis "dalam masa transisi"), yang tentu saja akan merumitkan "kerangka isu global" saat ini dan proses pembuatan tuntutan dan dinamika. Sementara, debat reforma agraria global itu sendiri tidak selalu statis, namun juga berkembang, bahkan lebih jauh merumitkan posisi Via Campesina, misalnya sejak salah satu dari kebijakan utama mereka berjuang dalam isu kebijakan pertanahan kontemporer yang melawan isu formalisasi hak tanah dan privatisasi sisa tanah masyarakat (see, e.g., De Soto 2000; Cousins 2007). Hal itu bukan isu reforma agraria klasik, namun mungkin mempengaruhi pada segmen populasi pedesaan.[122] Banyak keadaan yang mempengaruhi kampanye seperti itu justru berada dalam wilayah dimana kehadiran Via Campesina sangat kecil dan bukan benar-benar absen, seperti Afrika. Ancaman dari inisiasi fomalisasi/privatisasi dan hubungannya dengan kerangka kampanye CGAR ditangkap dalam apa yang dikatakan oleh pemimpin Mozambik, Diamantino Nhampossa dari UNAC: 'kita telah melaksanakan dengan seksama Reforma Agraria. Agar CGAR membantu kita, kita harus fokus pada tantangan yang kita hadapi yaitu

[122] Sebagai contoh, hingga 90 persen tanah agrikultural di Indonesia secara resmi ditilik sebagai "tanah dan hutan milik negara" (lihat sebagai contoh Peluso 1992).

memberikan "tandingan reforma agraria" terhadap neoliberalisme, jika (CGAR) tetap berfokus "melawan latifundio" (perkebunan pribadi yang besar", itu lebih sedikit berkaitan dengan kita'. Nhampossa menambahkan, World Bank mempromosikan gelombang baru privatisasi tanah (di Mozambik) dan itu harus diakhiri. Kami berpikir (CGAR) harus memperluas kekuasaannya yang juga harus menjadi bagian dari kampanye adalah "mempertahankan tanah".....dan "melawan privatisasi tanah".[123]

Sementara CGAR telah memulai untuk mengambil jalan untuk "kerangka isu global" disekitar isu umum, yang pengaruh eksternalnya belum signifikan terhadap kampanye lokal/nasional. Disini dijelaskan, mengapa CGAR membuat serangan signifikan dalam isu reforma agraria konvensional, namun sampai saat ini tidak (belum) mandapat hasil yang signifikan dalam kampanye anti-formalisasi dan anti-privatisasi tanah masyarakat. Namun jika "eksternalisasi" adalah kunci sebenarnya untuk membangun jaringan transnasional yang koheren dan tahan lama (sebagaimana argumen Tarrow) maka Via Campesina seharusnya mempeluas kehadirannya kedalam area ini terlebih dahulu. Dalam beberapa hal, Via Campesina kini menghadapi dilemma: haruskah memberikan waktu dan sumber memperluas kehadirannya ditengah keterbatas-

[123] Wawancara di Rosset dengan Martinez (2005, 21-22). Via Campesina sebenarnya secara resmi meluncurkan CGAR di Afrika pada bulan januari 2007 selama Worls Social Forum di Nairobi, pada dasarnya meminta pengganti rugi tanah dan redistribusi tanah, yang ditargetkan di pertanian komersial kulit putih di Afrika. Namun di negara dimana isu tersebut secara relatif masih "hangat" (contoh Afrika selatan, Zimbabwe, Namibia), Via Campesina hambir absen. Wawancara penulis dengan orang dalam di Via Campesina yang mengakui bahwa deklarasi Nairobi lebih merupakan statement politik "agit-prop" daripada meluncurkan kampanye yang asli. Untuk latar belakang diskusi yang lebih baik mengenai isu tanah kontemporer di Afrika, lihat Peters (2004) dan Berry (2002).

annya saat ini dan masuk dalam area yang ditargetkan oleh agenda "formalisasi" neoliberal atau haruskah terus melawan agenda ini tanpa basis lokal yang signifikan untuk mendukungnya? Pada akhirnya apakah atau bagaimana CGAR dapat mereposisi dan membuat dampak signifikan saat ini dalam isu kebijakan agraria yang lebih luas pada masa mendatang?, tampaknya akan tergantung pada pembuatan dua proses politik, dengan kata lain menggabungkan kerangka isu global dari atas dan inisiasi untuk meluncurkan kampanye lokal/nasional dari bawah terhadap eksternalisasi, yaitu melakukan perlawanan semesta atau "sandwich strategy". Ini merupakan tantangan yang membutuhkan Via Campesina untuk berpikir kembali dan merombak beberapa peraturan organisasinya, diantaranya seperti pembentukan aliansi, ide mengenai bentuk perlawanan dan aksi bersama, dan perpektif pada tanah. Singkatnya, hal tersebut tidak akan bijaksana dan kreatif secara politik untuk bersikeras pada tuntutan gerakan petani nasional untuk berhubungan dengan kelompok di banyak kondisi dimana gerakan seperti itu tidak akan muncul dalam waktu dekat.

Beberapa tindakan pada gerakan tampaknya membantu, seperti menempa aliansi dan pemahaman dengan kelompok NGO lokal yang progresif. Menunggu untuk gerakan nasional - gambaran seperti anggota nasional "ideal" Via Campesina yang muncul dalam kondisi ini - tampaknya mengambil waktu yang sangat panjang, jika tidak sama sekali belum muncul[124]. Nico Verhagen, staff senior Via campesina mengatakan, dalam konteks Afrika,

[124] Dalam konteks ini, literatur mengenai bentuk sehari-hari perlawanan petani dapat memberikan pandangan relevan, lihat sebagai contoh Scott (1985), Kerkvliet (2005) dan O'Brien dan li (2006). Lihat juga Chavez dan Franco (2007) untuk diskusi relevan mengenai masyarakat sipil di afrika.

jika dimplementasikan mungkin bisa membuka beberapa langkah awal: saat ini banyak organisasi di Afrika yang tidak mempunyai posisi politik yang jelas, namun hal tersebut dapat berubah. Sebagai contoh, dalam kasus ROPPA[125], semakin mereka banyak berinteraksi dengan Via Campesina, mereka semakin radikal. Strategi kami di Afrika seharusnya membuka ruang dialogis di Via Campesina dan mengundang setiap orang kedalamnya.[126]

Kesimpulan

CGAR yang diluncurkan dan dipimpin oleh Via Campesina dan dikoordinasikan dengan aliansinya telah mencapai hasil yang signifikan secara transnasional dalam hal meletakkan isu reforma agraria sebagai oposisi dari MLAR dalam agenda resmi lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. CGAR telah membentuk ulang istilah kebijakan saat ini dan debat politik dan dapat menkonstruksikan visi alternatif kebijakan pertanahan kedepan. Meskipun demikian, CGAR tidak memperoleh hasil yang signifikan dalam hal reforma kebijakan yang diinginkan, secara internasional dan dalam setting nasional, maupun menghasilkan perubahan prosedur yang signifikan atau menyebabkan perubahan perilaku yang diinginkan diantara aktor kunci dalam institusi pembangunan. Bagian dari alasan mengapa CGAR berada pada puncak dan bertahan, terutama karena proses kesusksesan dari eksternalisasi isu dan kampanye lokal/nasional. Lebih spesifiknya, kampanye anti MLAR, mendapat tendensi agar dilakukan secara cepat oleh Via Campisena karena pertimbangan telah dijalankannya MLAR di beberapa negara dimana

[125] Reseau des organizations Paysannes et de Producteirs de l'afrique de l'Quest.

[126] Wawancara di Rosset dengan Martinez (2005,30).

terdapat anggota Via Campisena yang sudah mulai terpengaruh oleh MLAR.

Namun CGAR juga mengungkapkan perpecahan terpendam dan kelemahan-kesalahan dalam Via Campesina yaitu basis kelas dan ideologi. Masuk dalam isu tersebut akan menghasilkan pandangan tentang adanya perbedaan ideologi, politik dan konsolidasi organisasi dalam Via Campesina lebih jauh. Paul Nicholson, seorang petani dari Basque (Spanyol) dan pemimpin utama Via Campesina di tahun 2004, menjelaskan mengenai prinsip-prinsip gerakan dalam membentuk aliansi akan memberikan titik pangkal fundamental:[127] aliansi diantara petani, petani pria atau wanita, dengan buruh desa adalah aliansi fundamental dalam pembentukan aliansi. Menganggap secara serius apa yang Nicholson katakan untuk menerima isu kelas diantaranya dalam gerakan.

Lebih jauh lagi, CGAR juga mengekspos kelemahan penting Via campesina yang saat ini menyebar ke seluruh dunia, dan juga mengekspos kapasitas aktual untuk mewaliki minat beragam dari banyak kelompok dalam kondisi yang berbeda. Sebuah pemahaman dari isu-isu ini akan membantu menjelaskan mengapa tidak ada dampak signifikan yang serupa yang dibuat oleh Via Campesina dalam oposisinya pada formalisasi hak tanah dan kebijakan privatisasi tanah yang ditargetkan pada tanah masyarakat yang dilaksanakan secara besar-besaran dalam setting nasional –lokal dimana kehadiran Via Campesina sangat sedikit namun tidak benar-benar absen. Bagi Via Campesina, untuk dapat mereposisi kepemimpinannya dalam isu agraria di seluruh dunia, dengan kata lain memperdalam

[127] Dalam uraian press di Sao Paolo pada tanggal 11 juni 2004 dalam acara pertemuan global IV Via Campesina di Brazil. http://www.viacampesina.org; diakses pada tanggal 30 oktober 2007.

dan memperlebar jangkauan kampanye. Pilihannya bukan antara "kerangka isu global dari atas atau lalu menyebarkannya secara nasional atau lokal atau kampanye lokal/nasional dari bawah lalu meneksternalisasi kedalam level internasional. Sebetulnya, mungkin pilihan yang paling menjanjikan adalah mengadopsi "sandwich strategy" yang secara bersama-sama mendorong kedua proses dari atas dan dari bawah.

Penggunaan Singkatan

ANEC (Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo)
ASOCODE (Association of Central American Peasant Organizations for
Cooperation and Development)
ATC (Asociación de Trabajadores del Campo)
BKF (Bangladesh Krishok Federation)
CNCR (Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux)
CNOP (Coordination National de Organisations Paysannes)
CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala)
COCOCH (Honduran Coordinating Council of Peasant Organizations)
CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura)
CPM (Coalition Paysanne de Madagaskar)
DKMP (Demokratikong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas)
EU (European Union)
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar)
FIAN (Foodfirst Information and Action Network)
GCAR (global campaign for agrarian reform)
ICARRD (International Conference on Agrarian Reform and Rural Development)
ICC (International Coordinating Committee – of Vía Campesina)
IFAD (International Fund for Agricultural Development)
IFAP (International Federation of Agricultural Producers)
IPC (International Planning Committee)
KMP (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas)
KRRS (Karnataka State Farmers' Association)
LPM (Landless People's Movement)
LRAN (Land Research and Action Network)
MLAR (market-led agrarian reform)
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra)
NLC (National Land Committee)
PCT (Projeto Cedula da Terra)
ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest)
SOC (Sindicato Obrero del Campo)
TAM (transnational agrarian movement)
UNAC (União Nacional de Camponeses or National Peasants' Union)
UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos)
UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas)
UNORKA (National Coordination of Autonomous Local Rural People's Organizations)

Referensi

Akram-Lodhi, H., S. Borras and C. Kay, eds, 2007. *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization*. London: Routledge.

Appadurai, A., 2006. 'Foreword'. In *Transnational Civil Society: An Introduction*, eds S. Batliwala and D.L. Brown, xi–xv. Bloomfield: Kumarian Press.

Assadi, M., 1994. ' "Khadi Curtain," "Weak Capitalism," and "Operation Ryot": Some Ambiguities in Farmers' Discourse, Karnataka and Maharashtra, 1980–93'. In *New Farmers' Movement in India*, ed. T. Brass, 212–27. London: Frank Cass.

Baranyi, S., C.D. Deere and M. Morales, 2004. *Scoping Study on Land Policy Research in Latin America*. Ottawa: The North-South Institute; International Development Research Centre.

Batliwala, S., 2002. 'Grassroots Movements as Transnational Actors: Implications for Global Civil Society'. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*,13 (4): 393–409.

Batliwala, S. and D.L. Brown, eds, 2006. *Transnational Civil Society: An Introduction*.Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Bello, W., 2002. *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. London: Zed.

Bernstein, H., 2002. 'Land Reform: Taking a Long(er) View'. *Journal of Agrarian Change*, 2 (4): 433–63.

Bernstein, H., 2006. 'Once Were/Still Are Peasants? Farming in a Globalising "South" '. *New Political Economy*, 11 (3): 399–406.

Berry, S., 2002. 'Debating the Land Question in Africa'. *Comparative Study in Society and History*, 44 (4): 638–68.

Biekart, K. and M. Jelsma, eds, 1994. *Peasants Beyond Protest in Central America*. Amsterdam:Transnational Institute.

Bob, C., 2005. *The Marketing of Rebellion: Insurgents, Media and International Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Borras, S., 2003. 'Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (3): 367–94.

Borras, S., 2004. 'La Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Movement', *TNI Briefing Series* No. 2004/6. Amsterdam: Transnational Institute.

Borras, S., 2007. *Pro-Poor Land Reform: A Critique*. Ottawa: University of Ottawa Press.

Borras, S. and J. Franco, 2005. 'Struggles for Land and Livelihood: Redistributive Reform in Agribusiness Plantations in the Philippines'. *Critical Asian Studies*, 37 (3): 331–61.

Borras, S., C. Kay and E. Lahiff, eds, 2007a. 'Market-Led Agrarian Reform: Contestations and Trajectories'. *Third World Quarterly*, special issue, 28 (8).

Borras, S., D. Carranza and J. Franco, 2007b. 'Anti-Poverty or Anti-Poor? The World Bank Experiment in Market-Led Agrarian Reform in the Philippines'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1557–76.

Bové, J., 2001. 'A Movement of Movements? A Farmers' International?'. *New Left Review*, (12): 89–101.

Brass, T., ed., 1994. *The New Farmers' Movements in India*. London: Frank Cass.

Broad, R., 2002. *Global Backlash: Citizen Initiatives for a Just World Economy*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Bush, R., 2007. 'Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Agricultural Reform and Market Liberalization in

Egypt'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1599–616.
Byres, T., 2004a. 'Introduction: Contextualizing and Interrogating the GKI case for Redistributive Land Reform'. *Journal of Agrarian Change*, 4 (1&2): 1–16.
Byres, T., 2004b. 'Neo-Classical Neo-Populism 25 Years On: Déjà vu and Déjà Passé:Towards a Critique'. *Journal of Agrarian Change*, 4 (1/2): 17–44.
Chavez, D. and J. Franco, 2007. *Grassroots Democratization in Sub-Saharan Africa*. Amsterdam: Transnational Institute; Utrecht: ICCO.
Chonchol, J., 1970. 'Eight Fundamental Conditions of Agrarian Reform in Latin America'. In *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America*, ed. R. Stavenhagen. 'Garden City', New York: Doubleday.
Cousins, B., 2007. 'More Than Socially Embedded: The Distinctive Character of "Communal Tenure" Regimes in South Africa and its Implications for Land Policy'. *Journal of Agrarian Change*, 7 (3): 281–315.
De Bremond, A., 2007. 'The Politics of Peace and Resettlement through El Salvador's Land Transfer Programme: Caught between the State and the Market'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1537–56.
De Carvalho Filho, J.L. and M.L. Mendonça, 2007. 'Agrarian Policies and Rural Violence in Brazil'. *Peace Review*, 19 (1): 77–85.
Deere, C.D., 2003. 'Women's Land Rights and Rural Social Movements in the Brazilian Agrarian Reform'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (1&2): 257–88.
De Feyter, K., 2005. *Human Rights: Social Justice in the Age of the Market*. London: Zed. Della Porta, D., M. Andretta, L. Mosca and H. Reiter, 2006. *Globalization from Below: Transnational Activists and Protest Networks*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

De la Rosa, R., 2005. 'Agrarian Reform Movement in Commercial Plantations: The Experience of the Banana Sector in Davao del Norte'. In *On Just Grounds*, eds J. Franco and S. Borras, 45–144. Amsterdam: Transnational Institute.

Desmarais, A., 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. London: Pluto.

De Soto, H., 2000. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. New York: Basic Books.

Edelman, M., 1998. 'Transnational Peasant Politics in Central America'. *Latin American Research Review*, 33 (3): 49–86.

Edelman, M., 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society 2003*, eds M. Kaldor, H. Anheier and M. Glasius, 185–220. Oxford: Oxford University Press.

Edwards, M. and J. Gaventa, 2001. *Global Citizen Action*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

FIAN-Vía Campesina, 2004. 'Commentary on Land and Rural Development Policies of the World Bank'. http://www.viacampesina.org, Accessed 25 November 2007.

Fox, J., 1993. *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Fox, J., 2001. 'Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool for Civil Society Policy Advocacy'. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 30 (3): 616–27.

Franco, J., 1999. 'Market-Assisted Land Reform in the Philippines: Round Two – Where Have All the Critics Gone?'. *Conjuncture*, 11 (2): 1–6. Manila: IPD.

Franco, J., 2007. 'Again, They are Killing Peasants in the Philippines: Lawlessness, Murder and Impunity'. *Critical Asian Studies*, 39 (3): 315–28.

Franco, J., forthcoming. 'Making Land Rights Accessible: Social Movement Innovation and Political-Legal Strategies in the Philippines'. *Journal of Development Studies*.

Friedmann, H., 2004. 'Feeding the Empire: The Pathologies of Globalized Agriculture'. *Socialist Register 2005: The Empire Reloaded*, eds L. Panitch and C. Leys, 124–43. London: Merlin Press.

Gauster, S. and R. Isakson, 2007. 'Eliminating Market Distortions, Perpetuating Rural Inequality: An Evaluation of Market-Assisted Land Reform in Guatemala'. *ThirdWorld Quarterly*, 28 (8): 1519–36.

Ghimire, K., ed., 2001. *Land Reform and Peasant Livelihoods*. London: ITDG.

Greenberg, S., 2004. 'The Landless People's Movement and the Failure of Post-Apartheid Land Reform'. Durban: KwaZulu-Natal, School of Development Studies.

Griffin, K., A.R. Khan and A. Ickowitz, 2002. 'Poverty and Distribution of Land'. *Journal of Agrarian Change*, 2 (3): 279–330.

Guidry, J., M. Kennedy and M. Zald, 2000. 'Globalizations and Social Movements'. In *Globalizations and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere*, eds J. Guidry, M. Kennedy and M. Zald, 1–34. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Gwynne, R. and C. Kay, 2004. *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*. London: Arnold.

Harriss, J., 2002. *Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital*. London: Anthem Press.

Herring, R., 2007. 'The Genomics Revolution and Development Studies: Science, Poverty and Politics'. *Journal of Development Studies*, 43 (1): 1–30.

Hertel, S., 2006. *Unexpected Power: Conflict and Change Among Transnational Activists*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

IPC for Food Sovereignty, 2006. 'Agrarian Reform in the Context of Food Sovereignty, the Right to Food and Cultural Diversity: "Land, Territory and Dignity" '. http://www.icarrd.org, Accessed 15 October 2007.

Jordan, L. and P. van Tuijl, 2000. 'Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy'. *World Development*, 28 (12): 2051–65.

Kay, C., 2006. 'Rural Poverty and Development Strategies in Latin America'. *Journal of Agrarian Change*, 6 (4): 455–508.

Keck, M. and K. Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Keohane, R. and S. Nye Jr, 2000. 'Governing in a Globalizing World'. In *Visions of Governance for the 21st Century*, eds S. Nye Jr and J. Donahue, 1–41. Cambridge:Cambridge University Press.

Kerkvliet, B., 2005. *The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Khagram, S., J. Riker and K. Sikkink, 2002. 'From Santiago to Seattle: Transnational Advocacy Groups Restructuring World Politics'. In *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms*, eds S. Khagram, J. Riker and K. Sikkink, 3–23. Minneapolis, MN: University of Minnesota University Press.

KMP, 1986. 'Program for Genuine Land Reform'. Quezon City: KMP (Pamphlet). Lahiff, E., 2007. ' "Willing Buyer, Willing Seller": South Africa's Failed Experiment in Market-Led Agrarian Reform'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1577–97.

Landsberger, H. and C. Hewitt, 1970. 'Ten Sources of Weakness and Cleavage in Latin American Peasant

Movements'. In *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America*, ed. R. Stavenhagen, 559–83. New York: Anchor Books.

Lara, F. and H. Morales, 1990. 'The Peasant Movement and the Challenge of Democratisation in the Philippines'. *Journal of Development Studies*, 26 (4): 143–62.

Mayo, M., 2005. *Global Citizens: Social Movements and the Challenge of Globalization*. London: Zed.

McKeon, N., M. Watts and W. Wolford, 2004. 'Peasant Associations in Theory and Practice'. Civil Society and Social Movements Programme Paper No. 8. Geneva: UNRISD.

McMichael, P., 2006. 'Reframing Development: Global Peasant Movements and the New Agrarian Question'. *Canadian Journal of Development Studies*, 27 (4): 471–86.

Medeiros, L., 2007. 'Social Movements and the Experience of Market-Led Agrarian Reform in Brazil'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1501–18.

Meszaros, G., 2000. 'Taking the Land into Their Hands: The Landless Workers' Movement and the Brazilian State'. *Journal of Law and Society*, 27 (4): 517–41.

Mngxitama, A., 2005. 'The National Land Committee, 1994–2004: A Critical Insider's Perspective'. Durban: University of KwaZulu-Natal Civil Society Centre Research Report No. 4, Vol. 2, pp. 35–82.

Monsalve, S., 2006. 'Gender and Land'. In *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*, eds P. Rosset, R. Patel and M. Courville, 192–207. Oakland, CA: Food First Books.

Navarro, Z., 1998. 'The "Cédula da Terra" Guiding Project – Comments on the Social and Political-Institutional Conditions of its Recent Development', http://www.dataetrra.org.br. Accessed 21 January 2001.

Ntsebeza, L. and R. Hall, eds, 2006. *The Land Question in South Africa: The Challenge of Transformation and Redistribution*. Cape Town: HSRC Press.

Nyamu-Musembi, C., 2007. 'De Soto and Land Relations in Rural Africa: Breathing Life into Dead Theories About Property Rights'. *Third World Quarterly*, 28 (8): 1457–78.

O'Brien, K. and L. Li, 2006. *Rightful Resistance in China*. Cambridge: Cambridge University Press.

Oya, C., 2007. 'Stories of Rural Accumulation in Africa: Trajectories and Transitions among Rural Capitalists in Senegal'. *Journal of Agrarian Change*, 7 (4): 453–94.

Palmer, R., 2007. *Literature Review of Governance and Secure Access to Land*. London: DFID.

Patel, R., 2006. 'International Agrarian Restructuring and the Practical Ethics of Peasant Movement Solidarity'. *Journal of Asian and African Studies*, 41 (12): 71–93.

Peluso, N., 1992. *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley,CA: University of California Press.

Pereira, J., 2007. 'The World Bank's "Market-Assisted" Land Reform as a Political Issue: Evidence from Brazil (1997–2006)'. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, (82): 21–49.

Peters, P., 2004. 'Inequality and Social Conflict Over Land in Africa'. *Journal of Agrarian Change*, 4 (3): 269–314.

Petras, J., 1997. 'Latin America: The Resurgence of the Left'. *New Left Review*, (223): 17–47.

Putzel, J., 1992. *A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines*. New York: Monthly Review Press.

Putzel, J., 1995. 'Managing the "Main Force": The Com-

munist Party and the Peasantry in the Philippines'. *Journal of Peasant Studies*, 22 (4): 645–71.

Razavi, S., 2003. 'Introduction: Agrarian Change, Gender and Land Rights'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (1/2): 2–32.

Rosset, P., 2006. 'Agrarian Reform and Food Sovereignty'. A paper prepared for and presented at the Land, Poverty, Social Justice and Development Conference at the Institute of Social Studies (ISS) in the Hague, the Netherlands, 9–14 January 2006.

Rosset, P. with M.E. Martinez, 2005. *Participatory Evaluation of La Vía Campesina*. Oslo: Norwegian Development Fund.

Rosset, P., R. Patel and M. Courville, eds, 2006. *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland, CA: Food First Books.

Sassen, S., 2006. *Territory, Authority, Rights: From Medieval t o Global Assemblages*.Princeton,NJ: Princeton University Press.

Sauer, S., 2003. 'A Ticket to Land: The World Bank's Market-Based Land Reform in Brazil'. In *The Negative Impacts of World Bank Market-Based Land Reform*, eds F. Barros,

S. Sauer and S. Schwartzman, 45–102. Brazil: Comissão Pastoral da Terra, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Sauer, S., 2007. 'Rural Social Movements and Democratization in Brazil'. Paper presented at the Rural Democratization Workshop, Transnational Institute, Amsterdam, 5–6 October 2007.

Scholte, J.A., 2002. 'Civil Society and Democracy in Global Governance'. In *The Global Governance Reader*, ed. R. Wilkinson, 322–40. London: Routledge.

Scott, J., 1985. *Weapons of the Weak*. New Haven, CT: Yale University Press.

Smith, J. and H. Johnston, 2002. *Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

Spoor, M., ed., forthcoming. *Contested Land in the 'East': Land and Rural Markets in Transition Economies*. London: Routledge.

Stedile, J.P., 2002. 'Landless Battalions: The Sem Terra Movement of Brazil'. *New Left Review*, 15: 77–105.

Stedile, J.P., 2007. 'The Class Struggles in Brazil: The Perspective of the MST'. In 'Global Flashpoints: Reactions to Imperialism and Neoliberalism', *Socialist Register 2008*, eds L. Panitch and C. Leys. London: Merlin Press.

Tadem, E., 1996. 'Reflections on NGO-PO Relations'. Paper presented at the NGO Parallel Forum to the Vía Campesina International Assembly, April 1996, Tlaxcala, Mexico. Vía Campesina Tlaxcala unpublished documents.

Tarrow, S., 1994. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tarrow, S., 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C., 2004. *Social Movements, 1768–2004*. Boulder, CO: Paradigm Publishers.

Van Donge, J.K., with G. Eiseb and A. Mosimane, 2007. 'Land Reform in Namibia: Issues of Equity and Poverty'. In *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization*, eds H. Akram Lodhi, S. Borras and C. Kay, 284–309. London: Routledge.

Veltmeyer, H., 1997. 'New Social Movements in Latin America: The Dynamics of Class and Identity'. *Journal of Peasant Studies*, 25 (1): 139–69.

Vía Campesina, 2000a. 'Struggle for Agrarian Reform and Social Changes in the Rural Areas', Bangalore, India. Jakarta: Vía Campesina.

Vía Campesina, 2000b. Draft 'Vía Campesina Position Paper: International Relations and Strategic Alliances', discussed during the III International Conference in Bangalore. Jakarta: Vía Campesina.

Vía Campesina, 2004. 'Debate on Our Political Positions and Lines of Actions: Issues proposed by the ICC-Vía Campesina for regional and national discussion in preparation for the IV Conference', in IV International Vía Campesina Conference, pp. 45–58. Jakarta: Vía Campesina.

Vía Campesina, 2006. 'Violations of Peasants' Human Rights: A Report of Cases and Patterns of Violence'. Vía Campesina document. Jakarta: Vía Campesina.

Vía Campesina-FIAN, 2003. 'International Seminar on Agrarian Reform and Gender: Declaration of Cochabamba'. Heidelberg: FIAN.

Vianna, A., 2003. 'The Inspection Panel Claims in Brazil'. In *Demanding Accountability: Civil Society Claims and the World Bank Inspection Panel*, eds D. Clark, J. Fox and K. Treakle, 145–66. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Walker, C., 2003. 'Piety in the Sky? Gender Policy and Land Reform in South Africa'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (1/2): 113–48.

World Bank, 2003. *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. Washington, DC: World Bank.

Wright, A. and W. Wolford, 2003. *To Inherit the Earth: The Landless Movement and the Struggle for a New Brazil*. Oakland, CA: Food First Books.

Yashar, D., 2005. *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Post-Liberal Challenge*. Cambridge: Cambridge University Press.

5

'Mobilisasi yang Lamban': Jaringan Petani Transnasional dan Organisasi Akar rumput di Brazil dan Afrika Selatan

Brenda Baletti, Tamara M. Johnson
dan Wendy Wolford

Pendahuluan

Salah satu perkembangan globalisasi yang paling mengejutkan di akhir abad 20 adalah menjamurnya keberadaan gerakan tani tak bertanah yang terkenal di seluruh dunia. Bahkan saat pertanian skala kecil semakin berkurang perannya di sektor ekonomi global dan perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan semakin meningkat, para buruh tak bertanah dan petani-petani kecil bergabung bersama untuk menuntut akses terhadap tanah dan kebijakan pembangunan ekonomi baru yang memprioritaskan keberlanjutan dan ketahanan pangan komunitas lokal. Dari Brazil ke Meksiko hingga Afrika Selatan dan Filipina, gerakan sosial akarrumput dan ornop-ornop (organisasi nonpemerintah) yang memiliki perhatian pada isu yang cakupannya luas ini telah mengartikulasikan upaya mereka melalui pertemuan-pertemuan dan organisasi-organisasi transnasional, seperti yang mudah diidentifikasi

di masa kini adalah '*Transnasional Peasant Network*' (Jaringan Tani Transnasional, selanjutnya disebut JTT) yang mengorganisir perjuangan secara global untuk masyarakat desa dan 'hak untuk memiliki hak' mereka (Desmarais 2007; Edelman 1998).

Ini adalah saat bersejarah bagi aktivisme transnasional yang lebih luas: jaringan gerakan berskala global dapat membangkitkan gairah membara di arena akademik dan politik karena berpotensi menghindari politik lokal maupun nasional dengan mengatasnamakan isu-isu universal seperti hak asasi manusia, akses terhadap tanah, konservasi lingkungan, hak perempuan, dan lain sebagainya. Isu-isu universal seperti itu disebarkan sebagian untuk menapis logika universalisasi globalisasi ortodoks. Karena kami baru menyadari dan memahami jaringan-jaringan seperti ini, di awal pekerjaan kami banyak yang terfokus pada kemampuan pemberdayaan gerakan berbasis-wilayah untuk 'meningkatkan skalanya' (Smith 1993), terutama dengan mengambil potensi gerakan sosial 'transnasional' begitu saja. Analisa keragaman hubungan dan konteks yang dilokalisasi berdasarkan tempat di mana jaringan transnasional ini berada baru dilakukan belakangan ini (lihat Edelman 2005a, 2005b; Featherstone 2003; Routledge et al. 2007). Arahan analisa seperti ini penting karena jaringan-jaringan sosial transnasional berusaha menciptakan sesuatu yang baru – seperti yang dikatakan David Featherstone, mereka adalah 'pembangkit' politik bentuk baru – pada saat yang bersamaan mereka juga merupakan kompilasi hubungan dan karakteristik secara historis (Featherstone 2003). Meskipun tampaknya sudah jelas, menurut kami arahan analisa seperti ini menimbulkan berbagai implikasi yang dapat diperhitungkan terhadap studi JTT.

Dalam bab ini, kami menganalisa dinamika politik JTT kontemporer dengan cara membandingkan dua

gerakan: *Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) Brazil dan *Landless People's Movement* (LPM/ Gerakan Rakyat Tak Bertanah) Afrika Selatan. MST yang didirikan tahun 1984 memiliki pengikut dalam negeri terbesar dari gerakan sosial manapun dalam jaringan transnasional, karena itulah MST ditempatkan di ujung tombak perjuangan internasional yang lebih luas. Dalam jangka waktu yang singkat setelah pembentukannya di tahun 2001, LPM juga cukup banyak menarik perhatian internasional karena potensinya dalam memobilisasi kepedulian akarrumput terhadap pembaruan agraria di Afrika Selatan. Kami berpendapat bahwa dalam konteks lokal maupun transnasional dibutuhkan dalam menganalisa kedua gerakan tersebut – baik MST maupun LPM tidak akan dapat dipahami dengan baik dan jelas di luar konteks transnasional (khususnya konteks JTT). Bagaimana kedua gerakan ini terhubung dengan transnasionalisme juga hanya akan dapat dipahami dengan baik dalam konteks kondisi politik, sosial, dan ekonomi lokal di Brazil dan Afrika Selatan secara terpisah – namun kami maju selangkah lebih jauh untuk membangun sebuah teori 'mobilisasi yang lamban' (berdasarkan teori Alexander Gerschenkron di tahun 1952 mengenai 'pembangunan yang lamban'). Teori kami tentang mobilisasi yang lamban merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan geografi dan sejarah dalam studi gerakan transnasional kami. Tempat dan skala memang penting, namun begitu juga dengan waktu: dalam sistem dunia yang terkoneksi, apa yang dilakukan satu negara/wilayah/kelompok pada satu waktu akan mempengaruhi semua hal yang terjadi selanjutnya, seringkali bahkan secara langsung (lihat juga McMichael 1990).

Dalam sebuah jaringan transnasional, salah satu manfaat yang paling nyata adalah pertukaran ide, pengalaman, dan informasi (Keck dan Sikkink 1998), namun pertukaran

ini tidak terjadi dalam satu kekosongan, melainkan terjadi dalam konteks bersituasi historis dan bermuatan kekuasaan dari satu sistem dunia yang tak samarata. Karena itu, dalam perbandingan yang kami lakukan terhadap MST dan LPM, kami berpendapat bahwa LPM adalah 'pelaku mobilisasi yang lamban', dan karena itu LPM telah mengalami keuntungan maupun kerugian bergabung dengan JTT. Sejak terorganisir di tahun 1984, para aktivis MST dari Brazil membantu melatih, mendidik, dan menginspirasi para aktivis Afrika Selatan setelah LPM terbentuk pada tahun 2001. Namun kunci keberhasilan MST ternyata tidak cocok dan tidak berhasil diterapkan dalam konteks Afrika Selatan. Di satu sisi, pengalaman dan saran MST membantu LPM untuk membangun strategi dan memperoleh pengakuan; di sisi lain, LPM mengalami kesulitan untuk menerjemahkan keberhasilan internasional MST yang begitu spektakuler ke dalam kampanye akarrumput yang organik. Pada akhirnya, transfer pengetahuan gerakan dari MST kepada LPM mungkin bisa berhasil meskipun dalam jangka waktu yang panjang untuk LPM ini.

Menurut kami keberhasilan MST di Brazil terletak pada tiga elemen utama: pertama, MST dibangun melalui kepemimpinan pemuda-pemudi yang merupakan anak para petani kecil – para pemimpin 'organik' yang lahir dari gerakan mereka sendiri sehingga dapat mempertahankan satu hubungan ideologis yang kuat dalam perjuangan mereka untuk masa depan petani kolektif; kedua, gerakan ini bersikukuh melakukan aksi okupasi lahan secara langsung sebagai strategi utama dalam menekan pemerintah untuk mengalihkan pemilikan lahan – okupasi-okupasi ini secara publik merupakan hal yang logis bagi gerakan dan juga memberi kesempatan bagi anggota gerakan untuk membangun solidaritas; ketiga, sejak kelahirannya, gerakan ini berusaha mempertahankan otonominya dari negara Brazil, memastikan kepemimpinannya tidak terlibat dalam

kerjasama dengan politik 'serampangan' sistem pemilu Brazil (Mainwaring 1995). Karena itulah kemudian MST berhasil menerjemahkan kesuksesan nasional ke dalam internasionalisme petani yang baru. Gerakan ini kemudian menyebarkan pesannya dan memperluas basis dukungannya di tahun 1990.

Ketika MST telah menjadi aktor transnasional yang berpengaruh, para aktivis gerakan berkelana ke berbagai tempat seperti Afrika Selatan untuk mendorong dan memberi masukan pada para aktivis pedesaan di sana. Sayangnya, strategi utama MST untuk mobilisasi – yaitu okupasi tanah – menjadi bumerang dalam konteks Afrika Selatan. Contoh yang terdekat yaitu ketegangan ras di Zimbabwe membuat okupasi tanah secara politik memiliki daya ledak di Afrika Selatan. Okupasi juga sulit diorganisir oleh LPM karena gerakannya tidak mampu mengadopsi kedua elemen kesuksesan MST lainnya: kepemimpinan yang dibangun melalui pengalaman akarrumput serta otonomi dari organisasi masyarakat sipil dan negara.

Kesulitan-kesulitan menerjemahkan strategi gerakan ini tentunya bukan merupakan dampak dari mobilisasi yang lamban dan juga tidak bertanggung jawab terhadap kesuksesan atau kegagalan land reform di dua negara tersebut. Argumen kami secara spesifik berkaitan dengan mobilisasi sosial. Di sini kami berpendapat bahwa mengorganisir secara transnasional tidak dapat dipandang baik secara menyeluruh. Namun, para peneliti dan aktivis gerakan perlu mencoba dan memahami di bawah kondisi-kondisi apa saja transnasionalisme kemudian memberikan keuntungan atau kerugian. Seperti para praktisi pembangunan terdahulu yang tidak selalu memeriksa spesifikasi konteks di mana pembangunan dilaksanakan (Ferguson 1994), kami berpendapat bahwa menerapkan pengorganisasian transnasional begitu saja secara terburu-buru akan menafikan kekhususan geografis dan historis.

Selanjutnya dalam bab ini kami menggambarkan konteks politik dan ekonomi distribusi tanah di Brazil dan menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap para aktivis MST untuk mengkerangkakan ketiga faktor yang paling mempengaruhi pada keberhasilan gerakan. Setelah mengkerangkakan transformasi dan pengaruh MST, kami kemudian menjelaskan asal muasal dan lokasi LPM dalam perdebatan pahit mengenai restitusi dan reformasi tanah saat kebangkitannya pada tahun 1994 yang mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. Kami menganalisa dua wawancara dengan pimpinan gerakan yang kritis untuk membangun dan memposisikan analisa kami.

Dari Para Pemukim Liar Hingga *Sem Terra*: Kebangkitan MST di Tahun 90-an

Brazil merupakan salah satu negara yang distribusi kepemilikan tanahnya paling tidak merata di dunia. Ketidakmerataan ini merupakan warisan dari kolonisasi dan masyarakat perkebunan Portugis yang memperkenalkan dan menerapkan hierarki sosial rasialis dalam kepemilikan tanah dan hubungan perburuhan (Schwartz 1985). Produksi tebu mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun awal kolonial, dan pola penguasaan lahan merefleksikan kecenderungan kerajaan Portugis terhadap penguasaan lahan berskala besar. Namun demikian, selain perkebunan-perkebunan, para petani berlahan sempit diizinkan berkembang. Di awal 1800-an, para penguasa lahan sempit melesatkan pertumbuhan penduduk dan mengakibatkan depresi agrikultur di Brazil. Mereka menggarap dan menempati wilayah perbatasan bagian selatan negara. Meskipun para pemilik perkebunan mencoba menghalangi para imigran baru memperoleh tanah sendiri sehingga mereka harus menjadi buruh untuk memperoleh hasil panen (Viotti da Costa 2000), sebuah pekelas tani tumbuh dan berkembang di bagian selatan

Brazil bersamaan dengan tumbuhnya pemukiman baru di wilayah perbatasan (di utara dan barat tengah). Di akhir tahun 50-an, populasi Brazil didominasi oleh masyarakat pedesaan (75 persen), meskipun 85 persen dari populasi itu hidup dan bekerja di lahan seluas hanya 10 persen dari yang ada.

Ketidakmerataan kepemilikan lahan ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat pedesaan hingga kemudian meletus pada tahun 60-an ketika mobilisasi rakyat untuk akses atas tanah mulai menyebar di seluruh Brazil dan Latin Amerika. Pada masa itu, para petani dan buruh tani tumbuh semakin radikal. Mereka diorganisir oleh serikat dagang pedesaan, berbagai faksi kelompok Komunis Brazil, dan Gereja Katolik (Forman 1975; Maybury-Lewis 1994; Pereira 1997; Santos and Costa 1998). Ketika itu banyak pemerintahan di Amerika Latin mulai mengimplementasikan reforma agraria (de Janvry 1981; de Janvry et al. 2001; Grindle 1986), namun di Brazil, upaya reformasi yang gigih mengancam elit penguasa tanah yang berkuasa. Di tahun 1964, sebuah kup militer menjalankan pemerintahan otoriter yang bisa mempertahankan kekuasaan selama 21 tahun (Hall 1990; Reis 1990). Sejak berkuasa pemerintahan militer membangun strategi bercabang dua untuk mengatasi keresahan masyarakat pedesaan: di satu sisi, masyarakat pedesaan yang miskin (atau penggerak tani) direlokasi ke daerah perbatasan kolonisasi baru, seperti wilayah hutan hujan Amazon; sementara di sisi lain, pertanian skala besar ditargetkan untuk modernisasi inisiatif pemerintah (*state-led modernization*) dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan Brazil pada petani kecil.

Di akhir tahun 70-an, negara otoritarian mulai melemah. Ketika militer mulai menarik diri dari kekuasaan, para petani tak bertanah dan buruh-buruh pedesaan mulai membentuk pemukiman-pemukiman liar di seluruh negeri

yang terkonsentrasi di wilayah selatan negara bagian Rio Grande do Sul, Santa Catarina dan Paraná (Fernandes 1999). Dengan terjadinya restorasi demokrasi di Brazil pada tahun 1985, tuntutan untuk akses atas tanah mulai merebak di mana-mana dengan kekuatan yang diperbarui. Tuntutan ini menjadi bagian dari 'budaya politik nasional' sebagian besar karena pembentukan gerakan sosial baru seperti MST (Gohn 1997; Novaes 1998). Para aktivis bersama MST memobilisasi para buruh pedesaan untuk mengokupasi perkebunan-perkebunan yang tidak produktif, dengan menggunakan Pasal 186 Undang-Undang Dasar Brazil sebagai alas hak terhadap properti 'tidak produktif' yang tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum (lihat Branford dan Rocha 2002; Fernandes 1999; Wright dan Wolford 2003). Selama itu, MST dapat membangun 'daftar usulan' yang cerdas (Tilly 1978) meliputi berbagai pemberian ruang secara simbolis seperti properti bertanah, bangunan pemerintah, dan jalan-jalan umum.

Di akhir tahun 90-an, kehendak politik untuk melaksanakan reforma agraria di Brazil semakin meningkat karena seruan nasional dan internasional terhadap dua pembunuhan massal yang kejam. Di tahun 1995, sepuluh pemukim liar tak bertanah dibunuh di Corumbiara, Rondônia dan hanya setahun kemudian, 19 pemukim liar tak bertanah dibunuh di jalan raya saat mereka berbaris menuju ibukota negara bagian Pará. Kedua peristiwa ini – yang kedua sempat tertangkap rekaman video – menjadi salah satu sebab meningkatnya keterkenalan kemiskinan di pedesaan, kekerasan, dan MST (Ondetti 2001; Pereira 2003). Di tahun 1997, presiden Cardoso membuat pemukiman untuk 80.000 keluarga, hampir dua kali lipat dari pemukiman pada tahun pertama kepresidenannya (Cardoso 1997). Sejak 1994 hingga 1998 anggaran tahunan untuk pelaksanaan reforma agraria berlipat lebih dari lima kali (Seligmann 1998). Luis Inacio 'Lula' da Silva, yang

memenangkan kepemimpinan eksekutif pada tahun 2002, berjanji melanjutkan upaya reforma agraria, meskipun pengalaman administrasinya telah dicampur aduk (Deere dan Medeiros 2007).

Selama pertengahan tahun 1990-an, saat MST meraih keterkenalan secara nasional, gerakannya juga meraih keterkenalan secara internasional. Pengaruh dan upaya MST sebagai organisasi melesat tinggi, sebagian karena adanya seruan internasional terhadap pembunuhan massal yang terjadi. Setelah tahun 90-an, MST berubah dari gerakan para 'gelandangan' dan pemukim liar yang dianggap remeh dan termarjinalkan menjadi gerakan sosial yang 'paling kuat dan terorganisir dengan baik sepanjang sejarah Brazil' (Petras 1997, 18). Saat ini gerakan tersebut memiliki sekitar dua juta anggota (meskipun angka ini bisa diperdebatkan dan sebagian bahkan memperkirakan jauh lebih sedikit dari itu) yang menempati pemukiman-pemukiman land reform yang didanai pemerintah atau tinggal di 'tempat perkemahan' sementara sambil menunggu resolusi akhir dari klaim mereka terhadap tanah. Lebih dari 70.000 orang menghadiri Kongres Nasional MST Kelima pada tahun 2007.

Dalam menginternasionalisasi perjuangan atas tanahnya, MST memandang dirinya sebagai perwakilan dari semua pihak yang telah dimarjinalisasi oleh proyek kapitalisme modern global. Melalui ekspansi yang luar biasa dari basisnya, gerakan ini menjadi aktor penting dalam sistem gerakan nasional dunia dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan anti-neoliberal dan anti-globalisasi. MST juga menjadi salah satu kelompok yang paling aktif dan berpengaruh dalam mengorganisir *Vía Campesina* (Cara Petani), gerakan payung petani internasional.

Metode Kebangkitan: Kepemimpinan, Okupasi Dan Otonomi

Ada banyak alasan bagi keberhasilan MST baik di Brazil maupun secara internasional, namun ada tiga yang paling utama. Pertama, MST membangun sirkuit 'profesionalisasi' kepemimpinan yang sangat kuat, di mana pemimpin-pemimpin baru melakukan perjalanan keliling negeri, belajar di pusat-pusat pembentukan MST serta membangun ikatan-ikatan baru dengan aktivis-aktivis dan anggota-anggota gerakan lokal; kedua, MST selalu menekankan okupasi tanah sebagai strategi utamanya, okupasi-okupasi ini bertindak sebagai sumber-sumber kepemimpinan baru, solidaritas gerakan dan keberadaan secara politis; dan ketiga, MST menjaga teguh otonominya baik dari negara maupun dari berbagai lembaga yang mapan, seperti Gereja Katolik atau ornop-ornop, dengan cara membangun yang berjarak dari politik kekuasaan resmi yang individualis dan tak dapat diandalkan.

Strategi Kesuksesan #1: Kepemimpinan

Banyak akademisi dan pengamat menghubungkan kebangkitan MST yang demikian pesat dengan kepemimpinannya yang mengabdi (Petras 1997; Wright dan Wolford 2003). Banyak pimpinan MST yang direkrut dari institusi yang kekiri-kirian – seperti agama yang diorganisir, serikat dagang pedesaan atau Partai Pekerja – atau dari okupasi tanah itu sendiri. Banyak pimpinan-pimpinan awalnya adalah anak-anak dari petani kecil yang diperkenalkan pada gerakan melalui Gereja-gereja Katolik dan Lutheran (Houtzager dan Kurtz 2000).

Begitu gerakan mulai mengorganisir okupasi, para pemuda dan pemudi yang berpartisipasi mempelajari tujuan dan ideologi gerakan. Mereka merupakan sebagian dari anggota yang paling berkomitmen, dan mereka juga –

mungkin ironisnya – adalah orang-orang yang paling kecil kemungkinannya untuk memenangkan akses atas tanah saat pemerintah mengalihkan properti (Rosa 2007). Pemerintah secara legal terikat untuk memprioritaskan keluarga daripada orang-orang dewasa atau pemuda yang belum menikah. Karena itulah para pemuda dan pemudi yang tidak memiliki pasangan atau anak dikirimkan dari satu okupasi ke okupasi yang lain dan meradikalisasi pandangan politik mereka dalam perjalanannya. Begitu direkrut, para pimpinan MST diharapkan bisa melakukan perjalanan ke manapun dan kapanpun demi gerakan dan perjuangan. Mobilitas politis ini membantu gerakan untuk memperluas keanggotaannya dari selatan ke bagian lain negara pada pertengahan tahun 90-an.

Sejalan dengan bertumbuhnya MST, perkembangan pimpinan-pimpinan muda seperti itu tetap menjadi prioritas gerakan. Hal ini terlihat dalam halaman-halaman yang dimuat koran MST sendiri, yang diterbitkan setiap bulan sejak akhir tahun 80-an. Sebuah kolom bulanan dalam *Jornal Sem Terra* (Koran Bagi Kaum Tak Bertanah) menyoroti akarrumput yang mengorganisir para aktivis (*militantes*) yang dilahirkan sendiri melalui wawancara dengan orang-orang yang berbeda setiap bulannya dari seluruh negeri. Semua aktivis tersebut memberi cerita yang serupa mengenai kontak awal mereka dengan gerakan, yaitu melalui partisipasi dalam okupasi atau demonstrasi, jatuh cinta pada gerakan, memanjat tangga kepemimpinan melalui pelatihan resmi oleh gerakan dan kemudian bekerja sebagai organiser. Melalui kerja para pimpinan inilah aksi langsung tetap menjadi strategi gerakan utama karena meskipun gerakan ini secara strategis semakin membesar, para pimpinan tadi masih terus bekerja secara lokal dalam perjuangan untuk memperoleh tanah, memobilisasi rakyat untuk melakukan okupasi, mengorganisir pemukiman-pemukiman, serta merekrut dan melatih pimpinan-

pimpinan baru yang kemudian pindah ke tempat-tempat baru untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang sama.

Pada bulan Juni 2007, kami mewawancara Julia (bukan nama sesungguhnya), seorang pimpinan MST di negara bagian Paraíba yang merupakan contoh yang sangat baik sebagai pimpinan MST yang mengabdi. Kami mewawancara Julia di kantornya di João Pessoa, ibukota negara bagiannya. Kota ini berlokasi di wilayah pantai tropis yang lembab, dikelilingi oleh tebu dan pemukiman yang membesar. Julia jelas terlihat sangat lelah. Dia bangun sejak pukul 4:00 pagi untuk menangani urusan-urusan regional bagi gerakan sosial transnasional, Vía Campesina. Baru-baru ini dia ditunjuk sebagai perwakilan MST untuk Vía Campesina di negara bagiannya. Karena baru saja dimulai, tentunya pekerjaannya banyak sekali. Julia juga mengkoordinasi satu kelompok donor yang sedang berkunjung dari Itali: sembilan pemuda dan pemudi Itali, yang mendermakan uangnya untuk MST, datang ke Paraíba untuk melihat langsung bagaimana uang mereka dipergunakan. Julia duduk dengan enggan untuk wawancara ini, mengeluarkan rokok dan menyilangkan tangan dengan erat di dadanya.

Julia tumbuh jauh dari João Pessoa di bagian selatan negara bagian Santa Catarina. Dia dibesarkan di sebuah desa kecil tanpa listrik dan tumbuh besar sambil bekerja di pertanian keluarganya. Keluarganya tidak berada, katanya, namun dia selalu bekerja keras dan tidak pernah bolos sehari pun dari sekolah. Ketika sudah cukup dewasa, dia mulai mempelajari agama dengan maksud ingin menjadi biarawati, namun perkenalan dengan Teologi Liberasi di gereja menginspirasinya untuk bergabung dengan aktivisme dan dia menjadi seorang yang militan dalam *Comissão Pastoral da Terra* (CPT/Komisi Tanah Pastoral), sebuah gerakan gereja yang (selain kegiatan lainnya) bekerja sebagai fasilitator untuk kaum tak bertanah dalam

perjuangan mereka memperoleh tanah. Namun demikian, dua tahun kemudian Julia meninggalkan CPT hanya karena, menurutnya, 'MST dilahirkan'. Julia mendengar tentang MST melalui kerja-kerja religiusnya. Di tahun 1989 gerakan mengirimnya – bersama 19 aktivis lainnya dari selatan (termasuk di dalamnya Jaime Amorim, seorang pimpinan yang cukup terkenal dari negara bagian Pernambuco, yang dibesarkan di seberang jalan rumah Julia) – ke timurlaut untuk membantu mengembangkan pemukiman baru di wilayah tersebut. Pada saat itu, MST masih merupakan sebuah gerakan yang muda dan kecil. Ini menarik bagi Julia karena, mengutip kata-katanya, "MST ini adalah sebuah gerakan *dari* rakyat bukan *untuk* rakyat" (meskipun Julia, seperti banyak pimpinan lain yang terkenal, tidak memperoleh tanahnya sendiri melalui gerakan ini). Selama tahun 90-an, Julia tinggal dan bekerja di Bahia, Pernambuco, Maranhão, dan Paraíba, mendidik basis akarrumput gerakan dan melatih para pimpinannya. Bahkan setelah 18 tahun hidup di timurlaut, jauh dari keluarganya, Julia masih bersedia pergi ke manapun gerakan membutuhkannya. Melalui model memindahkan para pimpinan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendidik dan melatih militan-militan lain ini gerakan bisa meraih – seperti kata Julia, 'hegemoni di seluruh Brazil'.

Merekrut dan melatih para pimpinan muda baru adalah sebuah strategi kunci gerakan dan tanggung jawab utama bagi banyak pimpinan. Pimpinan lain di bagian timur laut yang diwawancara yaitu Brenda dan Wendy menerangkan mengenai pentingnya mengalihkan tanggung jawab kepemimpinan pada generasi yang lebih muda: "masalahnya adalah adaptasi, jika [tidak mendapat pimpinan baru], kami akan menua dan pemukiman-pemukiman pun demikian, karena mereka akan mulai melakukan sesuatu yang didasarkan pada kepala-kepala orang tua, kau tahu … Idenya adalah mempersiapkan [pemuda], agar

mereka melangkah ke depan dan mengambil tanggung jawabnya".

Strategi Kesuksesan #2: Okupasi Tanah

MST telah membangun serangkaian strategi untuk mempromosikan agendanya, namun okupasi tanah terus menjadi senjata politis utama bagi gerakan (Fernandes 2007). Okupasi adalah peristiwa yang telah direncanakan dengan matang dan pada umumnya mengikuti naskah standar. Para aktivis mengadakan pertemuan dan mengorganisir di 'basis' selama berbulan-bulan sebelum memilih wilayah yang diokupasi. Biasanya properti yang dipilih adalah yang tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang), yaitu tidak produktif atau yang tidak jelas statusnya. Kemudian para aktivis mempersiapkan anggota sebelum tiba hari yang dipilih. Mereka memberi tahu semua partisipan agar siap saat diajak, tas telah siap di balik pintu, siap di tempat saat bis atau van atau truk datang. Okupasi biasanya dilakukan di malam hari saat kecil kemungkinan terdeteksi. Begitu berada di lahan, para aktivis mengorganisir pendirian tenda-tenda plastik hitam kecil di mana setiap keluarga akan tinggal hingga negosiasi dengan pemerintah (atau dengan senjata pribadi tuan tanah) dimulai. Okupasi-okupasi seringkali dikoordinasikan di wilayah yang lebih luas – senegara bagian atau bahkan senegara – sebagai usaha memperkuat tuntutan-tuntutan lokal atas tanah. Seperti yang dikatakan salah seorang pimpinan di wilayah timur laut:

> Bukan kami yang memutuskan bagaimana segala sesuatu [dalam sebuah okupasi] berlangsung. Ada arahan-arahan di negara bagiannya juga, lho. Misalnya, ketika kami mengokupasi di sini [di Paraíba], kami tidak hanya mengokupasi satu properti di sini. Ini kapasitas yang kami miliki: kami mengokupasi di sini dan mengokupasi

> properti lain di wilayah lain di negara bagian ini secara serempak. Mereka merencanakan aksinya bersama dengan wilayah-wilayah lain di negara bagian yang sama sehingga tenaga kami bisa lebih kuat.

Okupasi memberi peluang bagi produksi dan reproduksi gerakan: di sinilah banyak (meskipun tentunya tidak semua; lihat Wolford 2006) anggota gerakan yang menyadari bagaimana sesungguhnya gerakan itu (Fernandes 2007). Mereka mungkin ikut okupasi karena didorong teman atau organiser gereja mereka, atau karena sudah merasa putus asa untuk berusaha melakukan hal lain agar mereka mendapatkan lahan. Tapi sekali bergabung, orang seringkali terjerat dalam intensitas peristiwa politis tersebut. Para pimpinan gerakan mengadakan pertemuan secara reguler selama okupasi agar rakyat tetap sibuk dan siap pada kemungkinan memenangkan akses terhadap tanah. Selama okupasi juga pimpinan-pimpinan muda direkrut. Baik dalam wawancara maupun berdasarkan pengalaman kami, para pimpinan memberi cerita serupa mengenai keterlibatan awal mereka dalam gerakan melalui sebuah okupasi yang berujung pada kemenangan orang tua mereka atas sebidang tanah dan mereka mulai bekerja mengorganisir basis gerakan.

Strategi Kesuksesan #3: Otonomi

Ketika MST menyelenggarakan Kongres Nasional Pertama pada tahun 1985, terjadi diskusi mengenai apakah gerakan ini perlu bekerja di dalam Gereja Katolik atau bergerak sendiri. Para pimpinan yang terkemuka kemudian teringat bahwa para organiser dari gereja sendiri berpendapat mengenai kemandirian gerakan: MST perlu membangun perjuangannya sendiri, tidak terikat oleh aliansi tradisional atau cara-cara 'berpolitik' kuno (Branford dan Rocha 2002, 12). Sejalan dengan semakin kuatnya gerakan

dan semakin solidnya demokrasi dalam negeri, semakin banyak tarikan dari pemerintah untuk bekerja lebih dekat: dua sosiologis pedesaan yang terkemuka beranggapan bahwa MST kehilangan kesempatan historisnya untuk menjalin kepentingan buruh-buruh pedesaan dengan pemerintah negara bagian (de Souza Martins 2003; Navarro 2002). MST tetap tak bergeming pada setiap saran afiliasi politik apapun. Seperti yang dikatakan pimpinan yang paling terkemuka gerakan ini, João Pedro Stedile, "analisis kami terhadap gerakan petani Amerika Latin Brazil telah mengajarkan bahwa kapanpun gerakan massa disubordinasi pada satu partai, maka ia akan dilemahkan oleh dampak perpecahan dan pertempuran faksi dalam partai itu sendiri … Gerakan harus bebas dari arahan politik luar" (2002, 80).

Proyek gerakan membangun hegemoni meliputi aliansi dengan organisasi-organisasi lain seperti organisasi religius yang berbeda, serikat dagang kota dan pedesaan, serta politisi. Namun demikian, aliansi-aliansi ini secara umum berfungsi sebagai hubungan bertujuan tertentu, bukan integrasi atau bahkan afiliasi. Dukungan dari organisasi-organisasi lain yang cukup dikenal seperti *Central Workers' Union* (CUT/Serikat Pekerja Pusat), *Pastoral Land Commission* (CPT/Komisi Tanah Pastoral), atau para akademisi dan politisi dari Partai Pekerja, adalah dukungan yang biasa bagi gerakan, namun gerakan belum pernah mengkompromikan keotonomiannya.

Komitmen MST untuk otonomi terlihat dalam klaim yang dilakukan secara terus-menerus dan ketidaktergantungannya pada masyarakat sipil dan negara. MST mengklaim otonomi dari negara, namun bukan berarti mereka tidak bernegosiasi dengan negara atau hasil okupasi dan pemukiman MST tidak bergantung pada negara untuk sumberdayanya. Mereka menerima bantuan pangan yang diberikan pada wilayah okupasi, tanah di dalam pemu-

kiman, bantuan kredit untuk para pemukim, serta kekuatan dan dukungan politik dari negara. Namun mereka mengklaim bahwa semua itu merupakan hak bukan bantuan atau sumbangan. Meskipun selalu bernegosiasi dengan negara namun tidak pada posisi yang bergantung, sehingga MST dapat mempertahankan klaim otonominya.

Julia juga membicarakan posisi gerakan terhadap pemerintah federal. "Tiga musuh terbesar gerakan", katanya, "adalah eksekutif, legislatif, dan judikatif"; dengan kata lain adalah pemerintah. Dia juga mengkritik ketidakefisienan *National Institute for Colonozation and Agrarian Reform* (INCRA/Lembaga Nasional untuk Kolonisasi dan Reforma Agraria), sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan reforma agraria. Julia berpendapat bahwa INCRA tidak kompeten dalam mengambil alih lahan dan menyediakan asistensi pertanian untuk para penghuni pemukiman, dia meyakini sebagian besar penyebabnya adalah mayoritas pegawai INCRA menentang proyek distribusi land reform.

Seorang aktivis lain di wilayah timurlaut menerangkan ketidakpercayaannya pada pemerintah federal dalam kutipan berikut:

> Secara hukum, INCRA bisa lebih sering datang [ke pemukiman], namun kami tidak mengizinkan. Maksudnya begini: Aku dapat mengizinkan pegawai INCRA datang kemari dan mengatakan pada kami bahwa tetangga sebelah ini seharusnya tinggal di pemukiman [catatan: ini merujuk pada sengketa yang sedang berlangsung di pemukiman]. Namun kami lah yang menentukan, karena setelah pegawai pemerintah ini datang kemari dan mengatakan … bahwa tetangga ini punya hak, kemudian si pegawai kembali ke mobilnya dan pergi, sementara kami yang tinggal di sini masih belum lepas dari masalah … Karena itulah komunitas punya otonomi

tertentu, sementara INCRA pergi dan melukis dan merenda [atau apapun yang dilakukannya] (Wawancara, Juli 2008).

Tanah Untuk Mereka yang Menggarapnya: Kasus Afrika Selatan

Serupa dengan kasus Brazil, penguasaan atas lahan merupakan tulang punggung kebijakan kolonial di Afrika Selatan. Namun demikian, di Afrika Selatan kebijakan-kebijakan pembagian lahan yang rasial terbawa masuk ke dalam negara bagian yang merdeka dan menjadikan petani kecil sulit berkembang. Hasilnya tuntutan kontemporer atas tanah di Afrika Selatan kurang terorganisir untuk kembali pada pertanian sesuai dengan hakikatnya. Konsentrasinya lebih pada perjuangan yang lebih luas untuk kebijakan kewarganegaraan, hak politik, reforma buruh, dan kesejahteraan sosial. Perbedaan pengalaman antara Brazil dan Afrika Selatan ini membuat para aktivis LPM kesulitan menduplikasi strategi keberhasilan MST.

Meskipun bangsa Eropa telah tinggal di bagian selatan Afrika sejak tahun 1600-an, proses mengalienasi penduduk asli dari lahan mereka baru dimulai dengan gigih sejak ditemukannya berlian di Kimberley pada tahun 1867 dan emas di tempat yang sekarang disebut Johannesburg pada tahun 1886. Penemuan mineral kaya di Afrika Selatan ini menarik perhatian kerajaan Inggris, sehingga tanah di wilayah ini menjadi lebih mahal. Tiga tahun setelah pembentukan Serikat Afrika Selatan, Undang-Undang Tanah Penduduk Asli pada tahun 1913 dikeluarkan untuk mengendalikan berbagai aktivitas Kulit Hitam di atas permukaan tanah dan kepemilikan mereka atas tanah. Undang-Undang ini membatasi area okupasi bangsa Afrika berdasarkan hukum: kecuali dengan izin khusus, para penduduk asli Afrika dipaksa untuk tinggal di penampungan-

penampungan (*Bantustans*) yang terdiri atas hanya 7 persen dari keseluruhan luas lahan. Undang-undang Tanah ini diikuti perundang-undangan baru pada tahun 1936 yang juga menghapus bagi hasil dan sewa tanah digantikan dengan sewa tenaga kerja (Sihlongonyane 2005; Thwala 2006). Banyak akademisi yang menunjuk Undang-Undang Tanah itu sebagai saat yang menentukan dalam proletarianisasi petani Afrika Selatan. Proletarianisasi sangat mempengaruhi pembangunan agrikultur kapitalis, karena para petani yang dicabut hak miliknya seringkali menjadi pekerja upahan di pertanian Kulit Putih atau menjadi pekerja tambang (Ntsebeza 2007)[128]. Pencabutan hak milik juga mengurangi kompetisi di antara para petani Kulit Putih dan menciptakan sebuah kelas buruh upahan yang bekerja di pertanian-pertanian milik Kulit Putih dan di pertambangan-pertambangan. Meskipun Undang-Undang Tanah tidak berhasil mencabut hak milik semua bangsa Afrika atau menghentikan mereka dalam memperjuangkan tanah, Undang-Undang ini mengakibatkan pembedaan yang lebih jauh di mana kaum tani bangsa Afrika kemudian dimasukkan ke dalam satu kelas pemilikan tanah dan para petani terusir yang pindah ke lahan-lahan tak bertuan, banyak di antaranya yang menjadi buruh-buruh migran (Hart 2002). Karena itulah kemudian ketidakmerataan akses atas tanah menjadi komponen inti ekonomi politik Afrika Selatan (Thwala 2006).

Migrasi Kulit Hitam ke wilayah perkotaan juga diatur dan terutama dibatasi dengan ketat. *The Buntu Consolidation Act* (Undang-Undang Konsolidasi Bantu) di tahun

[128] Pada tahun 1980-an, kepadatan penduduk rata-rata untuk adalah 151 orang per kilo meter persegi, bandingkan dengan 19 orang per kilometer persegi di seluruh Afrika Selatan. Dimana kalangan kulit Putih Afrika Selatan telah surplus dalam perumahan, sementara daerah kulit hitam mengalami defisit perumahan (Thwala 2006)

1946, yang mengidentifikasi bangsa Afrika mana yang diizinkan tinggal di wilayah perkotaan selama lebih dari 72 jam, membuat buku tamu untuk mencatat dan memonitor pergerakan Afrika Selatan Kulit Hitam ke dalam kota-kota. Pemisahan ini dipertegas di tahun 1948 saat Partai Nasional meraih kekuasaan dan membuat Sistem *Homeland*. Sistem *Homeland* ini terdiri dari 10 teritori yang memisahkan penduduk Kulit Hitam sesuai dengan kesukuannya. Harapannya teritori ini dapat berlaku sebagai bangsa Afrika yang potensial. *Native Laws Amendment Act* (Amandemen Undang-Undang Hukum Penduduk Asli) yang baru pada tahun 1957 mengendalikan rekrutmen dan pergerakan pekerja Kulit Hitam dengan ketat mulai dari penampungan-penampungan di pedesaan sampai pegawai-pegawai perkotaan di 'Afrika Selatan Kulit Putih'.

Cousins (2006) berpendapat bahwa 'penurunan petani' di Afrika Selatan memang disengaja dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan segregasionis dan Apartheid yang berlangsung selama abad dua puluh. Disengaja maupun tidak, pertanian subsisten di kalangan rakyat pedesaan semakin jarang ditemukan sebagai sumber kehidupan dan rakyat di penampungan semakin dipaksa untuk bergantung pada kerja-kerja non-agrikultur. Antara tahun 60-an hingga 80-an, situasi semakin memburuk ketika 1,75 juta rakyat pedesaan direlokasi dan dikeluarkan terutama dari pertanian-pertanian Kulit Putih (65 persen) dan lahan bebas milik bangsa Afrika (35 persen). Kondisi ini menghapus persewaan tenaga kerja dan para pemukim liar secara efektif (Hart 2002, 89). Meskipun 70 persen masyarakat di pemukiman pedesaan memiliki akses atas tanah, 50 persen lebih dari mereka hanya memiliki akses atas tanah kurang dari satu hektar. Ini memperlemah pertanian subsistensi dan memperkuat strategi mencari

mata pencaharian menjadi buruh pedesaan dan pertambangan (Ntsebeza 2007).[129]

Penduduk pedesaan di Afrika Selatan saat ini masih terus dibedakan secara ekonomi dalam kelompok-kelompok yang dilokalisasi berdasarkan bidang-bidang strategi mata pencaharian yang meliputi: pertanian, migrasi, buruh pertanian, jasa pengiriman uang, pegawai sektor formal, pensiunan, dan perusahaan-perusahaan kecil (Cousins 2006). Karena itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyan tentang agraria di Afrika Selatan harus di "lepas hubungan" nya dengan pertanian dan dihubungkan dengan berbagai tuntutan yang lebih luas cakupannya (Hart 1996, 269; Cousins 2006). Masyarakat tidak bisa begitu saja dikategorikan dalam pekerja atau petani – atau bahkan kombinasi antara keduanya – namun, seperti yang telah ditunjukkan secara umum oleh Henry Bernstein kepada Global South, mereka dipaksa untuk menghidupi diri 'lintas pembagian sosial buruh yang berbeda: perkotaan dan pedesaan, pertanian dan non-pertanian, pekerja yang diupah dan pekerja wiraswasta' (Bernstein 2004, 205).

Sekarang, 13 tahun setelah keruntuhan Apartheid, pertanyaan tentang tanah di Afrika Selatan masih menjadi masalah yang kritis. Realitas kepemilikan dan penguasaan tanah pun masih dipengaruhi batas-batas antar ras. Peraturan perundangan tentang land reform masih dilihat sebagai salah satu metode menyeimbangkan ketidakmerataan Apartheid, termasuk soal masyarakat yang sebelumnya termarjinalisasi dalam "Negara Pelangi" Afrika Sela-

[129] Di tahun 80-an, kepadatan penduduk asli rata-rata 151 orang perkilometer persegi, bandingkan dengan 19 orang perkilometer persegi di wilayah Afrika Selatan lain. Saat Afrika Selatan Putih surplus lahan pemukiman, wilayah Hitam mengalami defisit lahan pemukiman (Thwala 2006).

tan. Setelah pemilu demokratis pertama di tahun 1994, pemerintahan Mandela mengajukan program land reform yang terpusat pada tiga hal: restitusi (tanah dikembalikan pada pengklaim yang dapat membuktikan bahwa kepemilikan tanah mereka dilepas setelah diberlakukannya Undang-Undang Tanah Penduduk Asli tahun 1913), redistribusi (tanah yang dibeli pemerintah sesuai dengan nilai pasar dan diredistribusi pada pengklaim tak bertanah), dan keamanan menggarap (jaminan bahwa rakyat yang tinggal di pertanian-pertanian Kulit Putih tidak akan diusir dengan sewenang-wenang). Tujuannya adalah meredistribusikan 30 persen lahan pertanian dalam lima tahun pertama dengan menerapkan sistem "penjual yang berniat, pembeli yang berniat"; namun ternyata, land reform di Afrika Selatan berjalan dengan sangat lamban, hanya 3 persen yang berhasil didistribusikan pada tahun 2001 (Adams and Howell 2001).

Selama masa pemerintahan Apartheid, perjuangan atas tanah tergabung (dan ditempatkan di urutan kedua) dalam perjuangan yang lebih luas melawan Apartheid. Dengan demikian, "tuntutan atas tanah tidak diartikulasikan di dalam dan dari perjuangan itu sendiri, namun lebih digunakan sebagai simbol kurangnya demokrasi politik dan rasisme dari rezim apartheid" (Greenberg 2004b, 15; Greenstein 2003). Sementara mayoritas penduduk Afrika Selatan tidak bertanah, sebagian besar di antaranya diidentifikasikan secara politis di luar status tersebut karena adanya resistensi yang dibangun di bawah Apartheid. Fakta bahwa perjuangan atas tanah berada di barisan belakang dalam perjuangan kebebasan yang lebih luas telah membuat pengorganisasian perjuangan kaum tak bertanah di masa pasca Apartheid menjadi sulit. Sampai tingkatan tertentu, membangun gerakan tak bertanah akan membutuhkan rekontekstualisasi tuntutan-tuntutan jangka panjang –

untuk partisipasi politik, akses untuk sumber daya alam, dan sebagainya – di luar isu tanah (Greenberg 2004b).

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2001, Lahiff dan Cousins mengungkapkan pendapat bahwa pemerintah tidak memberi perhatian pada land reform pedesaan, sebagian di antaranya disebabkan oleh ketiadaan suara kaum akarrumput tak bertanah yang memberi tekanan pada pemerintah untuk mengedepankan isu ini. Namun di tahun yang sama, Gerakan Rakyat Tak Bertanah (LPM) dibentuk untuk menentang kebijakan dan pendekatan land reform yang dijalankan pemerintah Afrika Selatan serta untuk memacu distribusi tanah agar menjadi sorotan nasional dan internasional. Di tahun 2004, LPM mencatat keanggotaan (pendefinisiannya bebas) sekitar 100.000 orang, 90 persen di antaranya berlokasi di daerah pedesaan (Alexander 2004). Jumlah keanggotaan ini sulit untuk diverifikasi dan mungkin tidak akurat, namun klaim kekuatan sejumlah itu merupakan strategi yang penting bagi LPM agar dikenal luas. Pada saat kami mulai berdiskusi dengan para aktivis dan akademisi tentang LPM di bulan September 2006, terdapat konsensus umum bahwa LPM sedang mengalami penurunan, bahkan beberapa menyatakan lebih jauh bahwa gerakan itu telah mati.

Selanjutnya, kami menganalisa kebangkitan dan kemunduran LPM yang terbaca melalui pengalaman dua tokoh yang tergabung dalam gerakan sejak kelahirannya: Mangaliso Khubeka, seorang pendiri dan organiser nasional LPM, dan Ricardo Jacob, anggota staff *Surplus People's Project* (SPP/Proyek Surplus Rakyat) di Cape Town, sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu rakyat bertarung melawan relokasi yang diprakarsai pemerintah saat itu Afrika Selatan Kulit Hitam, dan anggota dewan penasihat untuk pembentukan LPM. Wawancara Mangaliso

menggambarkan pendekatan LPM terhadap tiga konsep utama yang kami utarakan di atas sebagai kunci kesuksesan MST: otonomi politik, okupasi tanah, dan kepemimpinan organik. Wawancara Ricardo menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini dibentuk dalam konteks Afrika Selatan. Kami mengetahui bahwa pendapat kedua tokoh ini bukan merupakan pendapat secara umum para aktor lain yang tergabung dalam gerakan tersebut, namun kami meyakini bahwa wawancara-wawancara ini tidak hanya menyoroti mentalitas para tokoh kunci dalam LPM kepengurusan sekarang, namun kata-kata mereka juga merefleksikan jalur yang ditempuh gerakan ini dalam sejarahnya yang pendek.

Kebangkitan Gerakan Rakyat Tak Bertanah

Kami mewawancara Mangaliso pada bulan November 2006 di kantor *Surplus People's Project* di Cape Bagian Barat. Dia sedang melakukan perjalanan dengan anggota LPM lain yang berbasis di KwaZulu-Natal bersama beberapa pengunjung dari MST Brazil. Tugas mereka adalah membangun jaringan dengan LPM di Cape Bagian Barat sambil mencoba merekrut komunitas tak bertanah ke dalam gerakan. Mangaliso adalah anggota pendiri LPM: dia bergabung dengan mobilisasi kaum tak bertanah ketika sedang bertahan melawan pengusiran dari rumahnya di sebuah pertanian di luar wilayah Newscastle di propinsi Kwazulu-Natal. Dia dan beberapa orang lainnya membentuk komite lokal kecil yang kemudian menjadi organisasi setingkat propinsi yang disebut *Tenure Security Coordinating Committee* (TSCC/Komite Koordinasi Keamanan Menggarap) setelah rapat dengan *Association for Rural Advancement* (AFRA/Asosiasi Peningkatan Pedesaan). Mangaliso dan anggota TSCC lainnya merasa keluhan-keluhan mereka tidak diacuhkan oleh pemerintah lokal maupun propinsi. Mereka merasa ada kebutuhan mem-

bentuk sebuah organisasi "yang bisa menjadi penyuara keinginan rakyat".

Pada bulan Agustus tahun 2001, Afrika Selatan menjadi tuan rumah Konferensi PBB Melawan Rasisme dan Diskriminasi, sebuah peristiwa yang membuat perhatian internasional tertuju pada gerakan sosial Afrika Selatan dan gerakan sosial secara global. Kelompok-kelompok pemerhati khusus berdiskusi di Durban selama berminggu-minggu yang berujung pada peristiwa tersebut. Konferensi ini "memberi ruang dan kesempatan mobilisasi sumber daya untuk aksi gabungan pertama secara nasional berbagai gerakan komunitas independen baru". Saat itulah LPM dibentuk dari berbagai kelompok rakyat tak bertanah (Greenberg 2004b, 18). Dalam periode ini, LPM bersama sejumlah organisasi yang telah berdiri sebelumnya, bergabung di bawah bendera *Durban Social Forum* (Forum Sosial Durban) untuk mempromosikan kampanye "Tak Bertanah = Rasisme" dan mengemukakan keadaan rakyat tak bertanah yang sengsara (Ntsebeza 2007).

Di tahun 2005, Mangaliso menjelaskan bahwa LPM terdiri dari "orang-orang paling sengsara dari yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki tanah sendiri" (Wawancara). Sebagian besar di antara mereka, seperti Mangaliso, dulunya merupakan para pekerja pertanian Kulit Hitam yang diusir. Dalam artikel lain (n.d.) Mangaliso mengartikulasikan hasrat para anggota LPM: "mereka bertanya pada saya, apa yang saya inginkan. Saya ingin membajak … Kami tidak punya tanah. Kami tidak bisa melihat adanya pembangunan yang berkelanjutan di masa depan; rakyat kelaparan. Kami tidak punya tanah maupun pekerjaan" (Martorell 2007). KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Johannesburg pada tahun 2002 memberi kesempatan bagi ornop-ornop untuk bersama-sama membawa rakyat tak bertanah dari seluruh

negeri untuk membentuk Majelis Rakyat Tak Bertanah. Lima ribu delegasi dari LPM bergabung dengan 25.000 anggota dari *Social Movement Indaba*/Gerakan Sosial Indaba (sebuah organisasi payung bagi gerakan sosial Afrika Selatan yang dibentuk untuk memupuk solidaritas di antara akarrumput yang bekerja dan berkampanye untuk isu-isu serupa) untuk bergerak bersama menentang kebijakan yang cenderung neoliberal dari pemerintah Afrika Selatan. Komentar-komentar Mangaliso merefleksikan sentimen yang transparan, mulai dari kekecewaan yang umum terhadap pemerintah Afrika Selatan dan kelambanan land reform: "tak ada hasilnya land reform di Afrika Selatan", hingga kejengkelan yang tampak jelas, "orang kulit hitam, mereka tidak punya hak di Afrika Selatan. Mereka tidak punya hak. Hanya di atas kertas mereka mengatakan kami memiliki hak".

Pada tanggal 11 Juni 2007, kami mewawancara Ricardo Jacobs, seorang anggota staff *Surplus People's Project* (SPP/Proyek Rakyat Surplus). Saat ini, SPP mengadvokasi mobilisasi pedesaan dan reforma agraria. Ricardo telah bersama SPP selama bertahun-tahun dan juga adalah seorang anggota *National Land Committee* (NLC/Komite Tanah Nasional), instrumen organisasi dalam pendirian LPM. Ricardo, yang mengaku aktivis dan menyatakan bahwa bahkan setelah pembubaran NLC kemudian mendampingi sebagai seorang dewan penasihat, mengorganisir pendidikan politik untuk para pemilih dari LPM. Ketika ditanya tentang situasi LPM saat ini, dia menjawab bahwa karena lambannya langkah land reform, situasi politiknya masih memungkinkan bagi berkembangnya gerakan kaum tak bertanah dan bahwa sejak 1994 tuntutan kaum miskin belum terpenuhi, khususnya di daerah pedesaan. Dia menghubungkan situasi ini dengan restrukturisasi pertanian neoliberal dan pilihan pemerintah Afrika Selatan untuk menjalankan *Market-Led Agrarian Reform*

(MLAR/Reforma Agraria Inisiatif Pasar) daripada alternatif inisiatif rakyat (lihat Borras 2003 untuk diskusi latar belakangnya).

LPM dalam Jaringan Internasional

Tidak berapa lama setelah pembentukan LPM pada tahun 2001, gerakan ini mulai menjalin ikatan dengan gerakan petani internasional seperti Vía Campesina dan gerakan-gerakan kaum tak bertanah lain yang berhasil di negara-negara lain seperti MST di Brazil. Tidak seperti MST, LPM merupakan gerakan internasional sejak kelahirannya karena dukungan dan nasihat yang diterimanya dari berbagai organisasi petani dan rakyat tak bertanah internasional. Sebagai organiser nasional LPM, Mangaliso mengunjungi Brazil lima kali sejak 2001 hingga 2006. Dia juga melakukan kunjungan ke Meksiko dan Amerika Serikat, memproklamasikan bahwa "di mana-mana terdapat masalah-masalah tanah. Sehingga kami bisa terhubung dengan dunia sebagai LPM" (Wawancara). Secara khusus, MST sangat berarti bagi gerakan tak bertanah Afrika Selatan karena kemiripan struktur agraria kedua negara itu, seperti ekonomi pertanian rangkap, konsentrasi kepemilikan tanah berdasarkan warna kulit ras, dan ketidakmerataan yang sangat signifikan. Kemiripan-kemiripan tersebut menutupi perbedaan di antara kedua tempat itu. Misalnya saja, gerakan di Brazil didirikan oleh para petani yang mengartikulasikan perjuangan atas tanah mereka melalui hak atas tanah dan buruh. Di Afrika Selatan, hak atas tanah diidentifikasi lebih baik melalui hak untuk hak yang sejajar. Kedua gerakan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama – redistribusi tanah – namun terdapat perbedaan yang mendalam pada dasar-dasar historis ketidakmerataan distribusi dan pembenaran filosofis terhadap distribusinya.

Menurut Mangaliso, anggota-anggota MST mengunjungi Afrika Selatan setiap tahun semenjak 2003

hingga 2006. Mereka datang untuk bertemu dengan anggota LPM, berbagi land reform dalam konteks Brazil, dan memberi wawasan mengenai bagaimana memperkuat mobilisasi kaum tak bertanah. Di tahun 2005, dua aktivis MST menghabiskan waktu 3 bulan penuh di Afrika Selatan "untuk mengajarkan para aktivis LPM bagaimana mobilisasi dilakukan di Brazil" (Rosa 2007, 4). Menurut Ricardo, tujuan utama MST selama mengunjungi Afrika Selatan adalah "untuk mendukung LPM dan berbagi pengalaman … Sebagian tujuan perjalanan adalah untuk menilai dan melihat kondisi gerakan serta melakukan sesi-sesi tanya jawab sehingga [LPM] bisa maju". Ketika tersedia dana, LPM mengirim anggota-anggotanya ke luar negeri bertemu dengan MST untuk mempelajari "bagaimana mereka melakukan kegiatannya di Brazil" (bagaimana bekerja dengan tanah, misalnya). Dengan menjadi anggota Vía Campesina, Mangaliso merasa bahwa LPM terhubung dengan sebuah gerakan global "rakyat yang berpihak pada pertanian" dan yang bisa "berbicara dengan satu suara" melawan ketidakadilan kapitalisme global. Banyak akademisi Afrika Selatan yang juga merasa optimis: "dalam organisasi-organisasi seperti inilah [Gerakan Rakyat Tak Bertanah/LPM] negara kita jadi hidup dan di sinilah perjuangan yang sesungguhnya untuk mempertahankan dan mendalami demokrasi kita" (Desai and Pithouse 2003).

Ricardo juga memahami manfaat membentuk hubungan dengan gerakan-gerakan tani di seluruh dunia. Namun menurutnya, ketika LPM didirikan gerakan sosial pedesaan seperti MST begitu kuat sehingga muncul upaya untuk "membangun sebuah mitos Latin Amerika" dalam konteks Afrika Selatan. Menurutnya, hal seperti ini adalah kelemahan yang mendasar dalam gerakan: sementara bangsa Brazil membangun gerakan mereka melalui sejarah

dan pahlawan-pahlawan Brazil, filosofi dan praktek LPM sendiri tidak mengakar dalam sejarah mobilisasi petani.

Ricardo juga mengemukakan bahwa ornop-ornop Afrika Selatan sangat dipengaruhi oleh yang dia sebut sebagai "para selebriti gerakan anti-globalisasi". Dalam membesarkan LPM, mereka mencoba menerapkan teori-teori bangsa Barat ke dalam konteks Afrika Selatan.

Selanjutnya kami berpendapat bahwa LPM mencoba meniru kesuksesan MST dalam memobilisasi rakyat miskin pedesaan dengan melakukan okupasi tanah. Namun strategi ini sulit direproduksi, baik karena konteks politik-ekonomi yang khusus di Afrika Selatan maupun karena LPM tidak memiliki kedua hal yang sangat krusial bagi kesuksesan MST: kepemimpinan organik yang berasal dari akarrumput dan otonomi politik atau keuangan.

Strategi yang Tidak Berhasil: Okupasi Tanah

Tak lama setelah pembentukannya, secara bertahap LPM mulai membangun taktik-taktik radikal dalam upayanya menentang pemerintah Afrika Selatan. Menurut Amanda Alexander, seorang akademisi tamu di *Centre for Civil Society* (Pusat Masyarakat Sipil) Universitas Kwa-Zulu-Natal, para anggota LPM mula-mula mendekati pemerintah secara birokratis, meminta bertemu dengan para pejabat pemerintah, mengirim surat, dan berbaris menuju kantor-kantor pemerintah. Namun, setelah selalu mengalami frustasi karena tidak adanya respon nyata dari pemerintah, para pimpinan gerakan mulai mengancam akan mengokupasi tanah "sebagai salah satu metode redistribusi lahan melalui aktivitas mandiri kaum tak bertanah adalah [mengidentifikasi] lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang tidak atau kurang dimanfaatkan, dan tanah milik para petani yang mengalami kekerasan sebagai fokus awal redistribusi" (Greenberg 2004b, 2).

Sebenarnya, dalam *Landless People Chapter* (Piagam Rakyat Tak Bertanah) tahun 2001, LPM meminta redistribusi "semua lahan yang tidak produktif, tidak dimanfaatkan, kosong, atau milik yang berutang". Jika tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi, piagam gerakan itu menyatakan bahwa LPM akan "melaksanakan sebuah kampanye mengokupasi tanah kosong dan tanah negara dan kembali ke tanah kami".

Namun di Afrika Selatan, okupasi tanah secara politik memiliki daya ledak, karena dampak okupasi tanah secara sosial dan ekonomi mendatangkan malapetaka di wilayah Zimbabwe. Sejak tahun 2000, kebijakan land reform presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, berdampak besar pada perdebatan yang meliputi soal pendekatan Afrika Selatan terhadap land reform. Dalam proses pemilu kepresidenan di bulan Februari 2000, para veteran perang perjuangan kemerdekaan Zimbabwe yang merasa jemu dengan kelambanan land reform di sana, memutuskan untuk menangani masalah ini dengan menginvasi pertanian-pertanian yang dimiliki para petani Kulit Putih. Ketika para petani Kulit Putih mengajukan banding ke pemerintah, permintaan mereka ditolak. Mugabe, yang beresiko kehilangan kepresidenannya, mengampuni invasi tersebut, dan akhirnya mengagungkan para veteran tersebut dengan menyebut mereka sebagai pukulan bagi para penjajah kolonial sebelumnya.

Aksi-aksi ini berlanjut pada penggantian para petani komersil Kulit Putih dengan para pekerja pertanian Kulit Hitam yang mengakibatkan krisis pangan dan kelaparan di wilayah itu. Dalam lima tahun, Zimbabwe, yang pernah menjadi keranjang roti negara bagian, sekarang secara umum dikenal sebagai kotak keranjang negara bagian. Masyarakat internasional menunjukkan perhatian pada Afrika Selatan, agar pimpinan ekonomi dan politik negara

bagian itu berbicara menentang aksi Mugabe dalam land reform: namun, karena "kewajiban" politik Afrika Selatan kepada Mugabe (berasal dari bantuan pemerintah Mugabe yang diberikan selama perjuangan melawan Apartheid di tahun 80-an), Mbeki tidak sungguh-sungguh mengkritik aksi Mugabe. Keengganan Afrika Selatan dalam mengkritik Mugabe kemudian segera berdampak pada situasi ekonominya.

Banyak anggota LPM yang secara vokal didukung oleh program pengambilalihan tanah Mugabe, berusaha menggunakan situasi Zimbabwe untuk memperkuat ancaman mereka mengokupasi lahan (Greenberhg 2004b, 30). Partai Komunis Afrika Selatan mendukung LPM, dan menulis dalam website bahwa:

> LPM menginginkan sebuah KTT Tanah yang dapat memperluas pemikiran kami sebagai satu masyarakat mengenai land reform. Di dalamnya meliputi berbagai pelajaran yang terjadi di negara-negara dan benua-benua lain. LPM khususnya, ingin menempatkan agenda keberhasilan model okupasi lahan luar biasa yang dilakukan MST dan organisasi-organisasi lain di Brazil serta "klausul kewajiban sosial" dalam perundang-undangan yang memungkinkan okupasi lahan ini terjadi di banyak negara Amerika Latin. Pada intinya sebuah prinsip "gunakan atau kehilangan" kepemilikan dan akses tanah adalah sebuah klausul kewajiban sosial yang dapat memberdayakan rakyat tak bertanah untuk mengidentifikasi, mengokupasi, dan memanfaatkan tanah yang saat ini tidak dimanfaatkan atau tidak produktif. LPM juga mempertimbangkan tanah para petani yang mengalami kekerasan dan tanah para pemilik absentee yang tidak produktif secara sosial, serta meminta lahan-lahan ini disiapkan untuk redistribusi dan dimanfaatkan oleh kaum tak bertanah. (AIDC 2004)

Mangaliso mengutip pernyataan ini ketika dia mengutarakan bahwa "kami ingin rakyat yang tinggal di tanah-tanah pertanian mulai menggarap tanah itu sekarang. [Kami tidak peduli] para petaninya mengatakan "stop menggarap di lahan kami". Mereka yang tidak takut terhadap para petani itu harus mulai menggarap lahannya" (Wawancara). LPM mencoba mempengaruhi situasi Zimbabwe dengan mengancam akan mengokupasi lahan. Namun strategi tersebut menjadi bumerang bagi mereka. Sebagai respon terhadap penurunan ekonomi yang dihubungkan dengan dukungan kepada Zimbabwe, pemerintah Afrika Selatan yang mengkuatirkan kehilangan kepercayaan investor luar negeri terhadap munculnya model pengambilan lahan Zimbabwe, menangani secara keras setiap upaya okupasi dengan menerapkan kebijakan tanpa toleransi dan memotong strategi potensial utama LPM. Dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan pada bulan Maret 2004, ANC mendeklarasikan: "Afrika Selatan tidak akan mentoleransi kejahatan yang hanya ditujukan untuk membawa rakyat ke arah yang salah dan menciptakan kekacauan dan kerusuhan. Mereka yang berencana untuk secara sengaja mencemooh hukum dan mengokupasi lahan akan dikenakan kuasa hukum sepenuhnya … Jika LPM telah melegitimasi hal-hal yang berkaitan dengan proses restitusi tanah, dapat dan harus berurusan dengan departemen pemerintah yang bersangkutan" (dikutip dari Alexander 2004).

Tentu saja okupasi lahan di Afrika Selatan bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam perjuangan anti-Apartheid yang gigih, okupasi lahan dilakukan di seluruh negeri sebagai bagian dari sebuah taktik untuk membuat lahan tidak dapat dikuasai lawan. Seringnya okupasi-okupasi ini hanya bersifat simbolis dan sementara (Mngxitama 2005, 17-18). Greenberg (2004a) menggambarkan okupasi tanah di masa Apartheid sebagai 'senjata kaum yang

lemah'. Namun, dalam situasi masa kini, menurut Ricardo, strategi okupasi tanah yang efektif diterapkan di Brazil ternyata secara politis tidak dapat hidup di Afrika Selatan.

> Jadi sekarang kami ingin mengadopsi [strategi-strategi] MST dan kamu dengar orang-orang mengancam akan melakukan okupasi tanah. Orang-orang selalu membuat pernyataan-pernyataan bodoh seperti itu di media … Namun itu tidak akan terjadi, kamu tahu, karena tidak ada proses politik yang dapat mengiringi [okupasi tanah]. Bahkan meskipun Undang-Undang Brazil membolehkan 'fungsi sosial tanah' … itu merupakan hasil dari resistensi petani sehingga mereka membuat amandemen perundang-undangan [1946] (Wawancara).

Akhirnya, Ricardo mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman bagaimana seseorang dapat mengklaim tanah (secara logis) di Afrika Selatan dan Brazil.

Strategi yang Tak Berhasil: Kepemimpinan Lokal

Seperti yang diterangkan dalam bagian MST di bab ini, kepemimpinan gerakan di Brazil digarap dengan hati-hati di tingkat akarrumput dalam pemukiman-pemukiman. Dalam satu pemeriksaan terhadap kepemimpinan terbaru di MST, Marcelo Rosa menilai bahwa bagi para aktivis MST "kehidupan adalah memperoleh pemahaman dari pengalaman ketidakbertanahan sosial" (2007, 7). Sebaliknya para pimpinan LPM, menurut Rosa, menjalani kehidupan mereka di luar atmosfir ketidakbertanahan. Para aktivis LPM cenderung lebih tua dan telah memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan bekerja di dalam partai-partai politik atau ornop. Seringkali mereka telah memiliki berbagai komitmen di luar LPM, termasuk pekerjaan lain dan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga (tidak seperti MST, LPM tidak dapat memberikan memberikan upah pada para pimpinannya untuk menjaga

keberlangsungan hidup keluarga mereka). Asesmen Greenberg terhadap LPM di tahun 2004 menemukan bahwa, di atas kertas, LPM terstruktur "di bagian atas" dengan adanya dewan nasional, dewan propinsi dan struktur ranting. Sebagian besar anggota dewan tidak memiliki jaminan akses atas tanah. Namun, di tingkat akarrumput; LPM "sebagian besar tidak terstruktur" (Greenberg 2004b, 21). Greenberg menduga bahwa upaya yang dilakukan para aktivis dan para pengembang untuk menciptakan "struktur yang sangat jelas dan sempurna" bagi LPM sebagai gerakan sosial itu kurang matang (2004b, 21).

Ricardo berpendapat bahwa tujuan-tujuan dan aksi-aksi LPM "seharusnya mengakar pada perjuangan harian rakyat". Namun ini rumit karena basis gerakannya 'berumur 40 tahun ke atas' dan kepemimpinan gerakan ini menua. "Ini merupakan sebuah proses sulit yang membutuhkan waktu dan tenaga. Karena itu gerakan seharusnya terfokus pada merepolitisasi pemuda Afrika Selatan." Ricardo sengaja membandingkan LPM dan MST: MST, katanya, 'secara efektif menyelesaikan' isu para pimpinan muda yang enerjetik ini dengan melibatkan anak-anak muda ke dalam gerakan pada usia yang masih muda dan memberi mereka tanggung jawab yang besar di dalam pemukiman-pemukiman. Dia menilai bahwa kepemimpinan LPM harus menjangkau jaringan nasional, lokal dan internasional dengan memasukkan orang-orang yang dapat mengorganisir dan mengartikulasi aspirasi anggota. Masalah kunci LPM, menurut Ricardo, adalah bahwa kepemimpinan dilihat sebagai bagian dari intelejensi kelas-tengah karena para anggota staff ornop telah demikian mempengaruhi arah yang diambil oleh LPM. Menurut Ricardo, bahkan pemerintah Afrika Selatan mengkritisi gerakan kaum tak bertanah karena tidak memiliki kepemimpinan yang terhubung kepada basis akarrumput: 'Negara pada intinya … mengatakan … "atas nama siapa

kamu berbicara? Mana orang-orang yang kamu wakili?"' (Wawancara).

Strategi yang Tak Berhasil: Otonomi Politik

Mungkin perbedaan yang paling penting antara MST dan LPM adalah kemampuan setiap gerakan untuk mempertahankan otonominya baik dari negara maupun elemen-elemen masyarakat sipil yang terorganisir. Di Brazil, MST bersikukuh menggarap kemerdekaannya, menggunakan berbagai sumberdaya dari pemerintah Brazil dan Gereja Katolik namun tidak pernah menyerahkan kemerdekaannya untuk dipertukarkan dengan dana. Sedangkan di Afrika Selatan, LPM sangat bergantung pada organisasi-organisasi masyarakat sipil sejak awal. Ketika hubungan gerakan dengan organisasi-organisasi ini menjadi pahit dan pendanaan menjadi lebih sulit, LPM hanya memiliki sedikit sumberdaya sendiri untuk digunakan.

Di masa awal pasca-Apartheid, organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti NLC merupakan organisasi kunci secara politis. Hubungan antara negara dan masyarakat sipil – yang dimediasi melalui organisasi-organisasi semacam ini – beralih dari "oposisi dan konflik" menjadi "rekanan dan kerjasama" (Greenberg 2004a; Alexander 2004; Greenstein 2003). Pemerintah baru mendanai ornop-ornop untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan visi pemerintah menuju Afrika Selatan baru. Hubungan semacam ini seringkali membuat ornop-ornop sulit untuk secara terbuka mengkritisi atau menentang pemerintah (Alexander 2004): banyak organisasi dipaksa memprofesionalisasi anggota-anggota staff mereka agar secara aktif mewujudkan proyek-proyek dan aktivitas-aktivitas yang diprioritaskan oleh organisasi-organisasi donor dan pemerintah (Greenberg 2004a, 25).

Proses-proses politisasi dan profesionalisasi ini mengasingkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dari konstituen yang menjadi tanggung jawab mereka dan mengalihkan prioritas pelayanan mereka dari organisasi-organisasi akarrumput. Misalnya, para pekerja lapangan NLC sebagian besar adalah aktivis Kulit Hitam yang berasal dari komunitas lokal, sementara para koordinator program dan peneliti sebagian besar adalah Kulit Putih. Segmentasi ras ini memperburuk ketegangan internal yang telah ada (Mngxitama 2005).

Secara paradoks, proses-proses depolitisasi, profesionalisasi dan alienasi ini memberikan ruang politik bagi perkembangan gerakan sosial baru (Barchiesi 2004, 4). Masa awal kepresidenan Mbeki 'bertepatan dengan permulaan gerakan sosial politik dan aktivisme baru yang mengartikulasikan penolakan umum terhadap perubahan arah ANC yang konservatif dalam kebijakan makroekonomi' (Barchiesi 2004, 23; Greenstein 2003). Namun peningkatan gerakan sosial baru ini, dibangun di atas warisan organisasi masyarakat sipil yang kuat. Beberapa akademisi beranggapan bahwa gerakan-gerakan sosial masih terlalu dekat berhubungan dengan institusi masyarakat sipil yang memegang benang dana. Pada akhirnya hal ini akan mendorong "perubahan bertahap dibanding pelaksanaan aksi secara radikal" (Alexander 2004, 49-50; Mngxitama 2004).

Hubungan yang berubah antara negara, masyarakat sipil, dan gerakan sosial ini merupakan dasar untuk memeriksa kondisi-kondisi nasional, regional, dan internasional serta dukungan yang mengarah pada kebangkitan LPM. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, "LPM merupakan sebuah ciptaan ornop-ornop ini dari atas sampai ke bawah, terinspirasi oleh MST, dengan tujuan untuk mendorong respon dari keluarga-keluarga buruh pedesaan Kulit Hitam yang diusir dari

wilayah-wilayah pedesaan" (Sihlongonyane 2005, dikutip dalam Rosa 2007, 4). LPM bergantung pada NLC khususnya untuk dukungan secara finansial dan organisasional. Andile Mngxitama dari NLC berpendapat hal yang tidak diungkapkan dalam hubungan-hubungan ini adalah gagasan bahwa "tanpa lembaga donor tidak ada kemungkinan untuk terjadinya perjuangan" (2005, 41). Demikian juga para intelektual kelas tengah yang bekerja dengan gerakan melalui hubungan dari masyarakat sipil membentuk "imej gerakan" melalui sumberdaya dan koneksi nasional dan internasional yang mereka miliki (Greenberg 2004b, 25).

Ricardo beranggapan bahwa NLC adalah penyelenggara yang secara institusi mempunyai konflik bagi LPM. Kepemimpinan NLC tidak menyepakati bagaimana melakukan pendekatan terbaik dengan pendirian politik dan ekonomi yang dijalankan pemerintah setelah 1994. Greenberg (2004b) menggambarkan konflik ini sebagai perpecahan antara faksi antagonis dalam NLC, yaitu mereka yang memandang redistribusi melalui okupasi massa sebagai metode terbaik untuk memperoleh akses terhadap tanah, dengan faksi yang mendukung kesepakatan kritis dengan pemerintah. Andile Mngxitama (2005), yang bekerja dengan Ricardo di NLC, menjelaskan perdebatan dalam komite ini sebagai perjuangan antara kaum kesejahteraan-reformis dengan kaum aksi massa, terutama mengenai isu okupasi tanah dan sikap terhadap pemerintah baru. Ketegangan-ketegangan internal di dalam NLC ini kemudian ditularkan pada LPM. Ricardo menghubungkan perpecahan NLC pada benturan ide dan ideologi serta sengketa mengenai perbedaan pendapat dan hubungan dengan pemerintah.

Ketika faksi-faksi dalam LPM mengajukan strategi-strategi yang semakin radikal (seperti okupasi tanah) yang menentang pemerintah daripada bergiat di dalam kerangka

kerja legal (birokrasi yang tak bisa dipungkiri) dengan cara negosiasi, para anggota dan afiliasi NLC yang lebih memilih pendekatan yang kurang radikal mulai memisahkan diri dari gerakan. Karena LPM bergantung hampir sepenuhnya pada NLC untuk dana dan manajemen keuangan, ruang kantor, serta media dan asistensi hukum (Alexander 2004), maka ketika NLC dibubarkan, gerakan ini kehilangan sumber dukungan organisasi dan keuangan utamanya. Dalam sebuah wawancara, Ricardo berpendapat bahwa NLC juga bertanggung jawab dengan membiarkan terjadinya ketergantungan secara finansial: "Namun saya pikir sebagai ornop, kami benar-benar harus melihat diri kami sendiri, bagaimana kami menciptakan ketergantungan dan orientasi tertentu pada rakyat dan komunitas, karena inilah kesulitan yang dialami [LPM] dalam mengorganisir dan memobilisasi … Sehingga kami harus melihat ada peran ornop di dalamnya" (Wawancara). Ricardo beranggapan bahwa LPM harus bisa mendefinisikan dirinya sendiri lebih baik sebagai sebuah gerakan dengan membangun sebuah "program aksi, sebuah filosofi, dan sebuah pandangan … yang akan menginspirasi para petani pedesaan atau kaum tak bertanah untuk berdiri tegak dan mulai bergerak maju dalam perjuangan [terbuka]" dengan cara berbicara tentang realita sehari-hari kaum tak bertanah Afrika Selatan.

Kesimpulan: Mobilisasi Yang Lamban Dalam Dunia Transnasional

Akhirnya, apa yang kami peroleh dari perbandingan antara MST dan LPM? Keduanya jelas-jelas merupakan gerakan yang sangat berbeda, di luar kesamaan partisipasi mereka dalam jaringan tani transnasional. Namun demikian, hanya dengan tinjauan ke belakang, perbedaan-

perbedaan mereka terlihat dengan jelas. Ketika LPM didirikan tahun 2001, gerakan ini memiliki banyak kemiripan dengan MST: LPM menarik sejarah panjang represi agraria, dan gerakannya juga mengartikulasikan sebuah sentimen anti-negara yang populer yang membuat para aktivisnya memperoleh dukungan dari sejumlah besar masyarakat pedesaan dan perkotaan Afrika Selatan. Dalam pembentukannya, LPM segera – dan secara alami – menjadi rekan MST. Para aktivis Brazil bersimpati pada LPM dengan adanya sejarah panjang ketakbertanahan dan ketakbermilikan di Brazil. Mereka mendukung kerja LPM dengan mengirimkan aktivis-aktivisnya ke Afrika Selatan dan sebaliknya juga menerima para pimpinan LPM yang dikirimkan. Kelihatannya LPM memiliki kepercayaan diri untuk menjadi bagian penting dari jaringan tani transnasional bersama dengan MST. Namun hanya lima tahun kemudian, LPM pada dasarnya dibubarkan, dan para aktivis dan akademisi kuncinya tidak lagi dihargai sebagai aktor potensial dalam perdebatan mengenai ketidakmerataan lahan dan kemiskinan di Afrika Selatan. Bagaimana kita dapat memahami transisi seperti ini?

Kami tidak berusaha memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kegagalan LPM dalam bab ini. Namun, kami mengeksplorasi hubungan antara LPM dan MST dalam sebuah upaya untuk memahami lebih baik dinamika jaringan tani transnasional – dan bagaimana dinamika-dinamika ini membentuk arahan pada LPM. Sebuah perbandingan secara berdampingan antara kedua gerakan ini (pada Matrix 1) menunjukkan kunci perbedaan yang membuat pengetahuan melalui koneksi jaringan sulit diberikan di antara keduanya. Kesulitan ini menghadirkan masalah yang potensial bagi politik progresif karena transfer pengetahuan dianggap sebagai salah satu manfaat utama dari jaringan semacam itu.

***Matrix 1*:**
Sebuah Perbandingan Antara LPM dan MST

	MST	LPM
Partisipasi dan Representasi Internasional	Diinternasionalisasi melalui tahapan perkembangannya	Dikenal secara internasional sejak kelahirannya
Tuntutan Redistribusi	Berdasarkan hak untuk memiliki bagi mereka yang menggarapnya (teori buruh terhadap kepemilikan); tanah bagi para petani kecil untuk digarap.	Berdasarkan tuntutan untuk kesejajaran ras; tanah untuk tempat kediaman, kewarganegaraan, pemukiman dan berbagai hak
Hubungan dengan ornop	Ornop memberikan dukungan kelembagaan namun MST selalu menjaga jaraknya dari otoritas ornop dan membangun bermacam-macam sumber dana	Didirikan oleh para pimpinan ornop dan memelihara hubungan yang erat, terutama untuk dana.
Basis kepemimpinan	Kepemimpinan organik dari akarrumput; digarap dalam okupasi dan melalui aktivisme politis sebelumnya	Sebagian besar pimpinan yang terkenal adalah cangkokan dari ornop, walaupun terdapat partisipasi akarrumput.
Sumber dana	Pemukiman-pemukiman (pendanaan internal), penjualan produk-produk MST, ornop-ornop – terutama ornop internasional, asistensi negara.	Terutama didanai oleh ornop, baik nasional maupun internasional.

Kesimpulannya, terdapat tiga kunci argumentasi dalam bab ini. Argumen kami yang paling awal dan

mendasar adalah bahwa jaringan-jaringan transnasional – tak peduli seprogresif atau sealternatif apapun – tidak persis sama. Seperti sistem dunia secara umum, jaringan-jaringan tersebut dibuat rumit oleh ketidakmerataan dan perbedaan kekuasaan. Pada saat yang sama, para aktor dalam jaringan atau gerakan transnasional itu berada pada alur historis yang cukup berbeda, tak peduli dunia menyeru "petani", "kaum tak bertanah" atau "pekerja" untuk solidaritas. Argumen kedua kami adalah bahwa karena terdapat spesifikasi historis, studi jaringan transnasional perlu ditempatkan dalam skala yang berlapis, baik dengan cara "diglobalkan" maupun "dilokalkan". Di kedua tingkatan ini, kami berpendapat bahwa moral ekonomi produksi dan reproduksi sosial itu penting, demikian juga dengan sifat setiap tempat di mana jaringan transnasional meraih ke atas dan menyentuh ke bawah. Ketiga, dan yang terakhir, menurut kami analisis transnasional kritis semacam ini membutuhkan metode yang cukup spesifik. Studi berbagai sejarah di masa kini pada setiap tingkatan membutuhkan etnografi kritis (Hart 2003, 2004) yang peka terhadap sifat intim hubungan sosial dan, seperti yang disebut oleh Philip McMichael (1990) sebagai "perbandingan yang digabungkan", di mana kasus-kasus dibandingkan perbedaan dan kesamaannya serta hubungan antar kasusnya. Metode-metode tersebut mengoperasionalisasi teori Gerschenkron tentang pembangunan yang lamban, atau dalam kasus gerakan tani sosial, mobilisasi yang lamban. Pemahaman terhadap mekanisme yang tepat di mana jaringan nasional menjadi "pelaku mobilisasi cepat" versus "pelaku mobilisasi yang lamban" membutuhkan perhatian etnografis yang lebih banyak pada jaringan itu sendiri daripada yang telah kami lakukan dalam penelitian kami. Lagi-lagi, kami ingin menekankan bahwa mobilisasi yang lamban tidak begitu saja dinilai merugi sebelum dianalisa.

Pengaruh jaringan transnasional terhadap gerakan tertentu selalu berada di dalam sejarah yang konkrit dan dalam kerja-kerja yang tak terpisahkan dari sistem dunia.

Referensi

Adams, M. and J. Howell, 2001. 'Redistributive Land Reform in Southern Africa'. *Natural Resource Perspectives*, 64.

AIDC (Alternative Information and Development Centre), 2004. 'Landless People's Movement (Gauteng): Discussion Document on Forging a United Front with the SACP'. http://www.aidc.org.za/?q=book/view/363, Accessed 8 January 2008.

Alexander, A.S., 2004. ' "Not the Democracy We Struggled For": The Landless People's Movement and the Politicization of Urban-Rural Division in South Africa'. Unpublished BA Honours Thesis. Boston, MA: Harvard University.

Barchiesi, F., 2004. 'Classes, Multitudes and the Politics of Community Movements in Post-Apartheid South Africa'. Centre for Civil Society, Research Report 20: 1–41.

Bernstein, H., 2004. ' "Changing Before our Very Eyes": Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today'. *Journal of Agrarian Change*, 4 (1/2): 190–225.

Borras, S. Jr, 2003. 'Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa'. *Journal of Agrarian Change*, 3 (3): 367–94.

Branford, S. and J. Rocha, 2002. *Cutting the Wire: The Story of the Landless Movement in Brazil*. London: Latin American Bureau.

Cardoso, F.H., 1997. *Reforma Agrária: Compromisso de Todos*. Brazil: Presidencia da Republica and Secretaria de Comunicação Social.

Cousins, B., 2006. 'Agrarian Reform and the "Two Economies": Transforming South Africa's Countryside'. In *The Land Question in South Africa*, eds L. Ntsebeza and R. Hall, 220–45. Capetown: HSRC Press.

De Janvry, A., 1981. *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

De Janvry, A., E. Sadoulet and W. Wolford, 2001. 'The Changing Role of the State in Latin American Land Reforms'. In *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action*, eds A. de Janvry, G. Gordillo, J. Platteau and E. Sadoulet, 279–303. Oxford: Oxford University Press.

De Souza Martins, J., 2003. 'Representing the Peasantry? Struggles for/about Land in Brazil'. In *Latin American Peasants*, ed. T. Brass, 300–35. London: Frank Cass Publications.

Deere, C.D. and L.S. de Madeiros, 2007. 'Agrarian Reform and Poverty Reduction: Lessons from Brazil'. In *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*, eds A.H. Akram-Lodhi, S. Borras Jr and C. Kay, 80–119. London: Routledge.

Desai, A. and R. Pithouse, 2003. '"But We Were Thousands". Dispossession: Resistance, Repossession and Repression in Mandela Park'. *Journal of Asian and African Studies*, 39 (4): 239–69.

Desmarais, A.A., 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. London: Pluto Press.

Edelman, M., 1998. 'Transnational Peasant Politics in Central America'. *Latin American Research Review*, 33 (3): 49–86.

Edelman, M., 2005a. 'When Networks Don't Work: The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America'. In *Social Movements: An Anthropological Reader*, ed. J. Nash, 29–45. Oxford: Blackwell.

Edelman, M., 2005b. 'Bringing the Moral Economy Back in . . . to the Study of Twenty-first Century Transnational Peasant Movements'. *American Anthropologist*, 107 (3): 331–45.

Featherstone, D., 2003. 'Spatialities of Transnational Resistance to Globalization: The Maps of Grievance of the Inter-Continental Caravan'. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 28: 404–21.

Ferguson, J., 1994. *The Anti-Politics Machine: 'Development', Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Fernandes, B.M., 1999. *MST, Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: Formação e Territorialização*. São Paulo: Editora Hucitec.

Fernandes, B.M., 2007. 'The Occupation as a Form of Access to Land in Brazil: A Theoretical and Methodological Contribution'. In *Reclaiming the Land: the Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, eds S. Moyo and P. Yeros, 317–41. New York: Zed Books.

Forman, S., 1975. *The Brazilian Peasantry*. New York: Columbia University Press.

Gerschenkron, A., 1952. 'Economic Backwardness in Historical Perspective'. In *The Progress of Underdeveloped Areas*, ed. B. Hoselitz, 3–29. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Gohn, M.d.G., 1997. *Os Sem Terra, ONGs e Cidadania*. São Paulo: Cortez.

Greenberg, S., 2004a. 'The Landless People's Movement

and the Failure of Postapartheid Land Reform'. *Centre for Civil Society Research Report*, 26: 1–40.

Greenberg, S., 2004b. 'Post-Apartheid Development, Landlessness and the Reproduction of Exclusion in South Africa'. *Centre for Civil Society Research Report*, 17: 1–42.

Greenstein, R., 2003. 'Civil Society, Social Movements and Power in South Africa'. RAU Sociology Seminar Series, Fourth term, 12 September: 1–40.

Grindle, M., 1986. *State and Countryside: Development Policy and Agrarian Politics in Latin America*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Hall, A.L., 1990. 'Land Tenure and Land Reform in Brazil'. In *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies*, eds R. Prosterman, M. Temple and T. Hanstad, 205–35. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Hart, G., 1996. 'The Agrarian Question and Industrial Dispersal in South Africa: Agro-industrial Linkages through Asian Lenses'. In *The Agrarian Question in South Africa*, ed. H. Bernstein, 245–77. London: Frank Cass.

Hart, G., 2002. *Disabling Globalization: Places of Power in Post-Apartheid South Africa*. Berkeley, CA: University of California Press.

Hart, G., 2003. 'Denaturalizing Dispossession: Critical Ethnography in the Age of Resurgent Imperialism'. Paper prepared for Creative Destruction: Area Knowledge & the New Geographies of Empire conference, Center for Place, Culture & Politics CUNY Graduate Center New York, 15–17 April 2004.

Hart, G., 2004. 'Geography and Development: Critical Ethnographies'. *Progress in Human Geography*, 281 (1): 91–100.

Houtzager, P.P. and M. Kurtz, 2000. 'The Institutional

Roots of Popular Mobilization: State Transformation and Rural Politics in Brazil and Chile'. *Comparative Studies in Society and History*, 42 (2): 394–424.

Keck, M. and K. Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Lahiff, E. and B. Cousins, 2001. 'The Land Crisis in Zimbabwe Viewed from South of the Limpopo'. *Journal of Agrarian Change*, 1 (4): 652–66.

Mainwaring, S., 1995. 'Brazil: Weak Parties, Feckless Democracy'. In *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, eds S. Mainwaring and T. Scully, 354–98. Stanford, CT: Stanford University Press.

Martorell, J., 2007. 'World Summit for Sustainable Development in Johannesburg: ANC Government Tries to Silence its Critics with Apartheid-Style Repression'. http://www.marxist.com/Africa/wssd_repression.html, Accessed 15 November 2007.

Maybury-Lewis, B., 1994. *The Politics of the Possible: The Brazilian Rural Workers' Trade Union Movement, 1964–1985*. Philadelphia, PA: Temple University Press.

McMichael, P., 1990. 'Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative Comparative Method'. *American Sociological Review*, 55 (3): 385–97.

Mngxitama, A., 2005. 'The National Land Committee, 1994–2004: A Critical Insider's Perspective'. Centre for Civil Society, Research Report, 34 (2): 1–48.

Navarro, Z., 2002. 'Mobilização sem emancipação – as lutas sociais dos sem-terra no Brasil'. In *Produzir para Viver*, ed. B. de Sousa Santos, 189–232. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.

Novaes, R.C.R., 1998. 'A Trajetória de uma bandeira de luta'. In *Política e Reforma Agrária*, eds R. Nonato

and L.F. Carvalho Costa, 169–80. Rio de Janeiro: Ed. Mauad.

Ntsebeza, L., 2007. 'Land-Reform Politics in South Africa's Countryside'. *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 19 (1): 33–41.

Ondetti, G., 2001. 'When Repression Backfires: The Rise of the Brazilian Landless Movement in the Mid-1990s'. Paper presented at Latin American Studies Association meetings, Washington DC, 6–8 September.

Pereira, A.W., 1997. *The End of the Peasantry: The Rural Labor Movement in Northeast Brazil, 1961–1988*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

Pereira, A.W., 2003. 'Brazil's Agrarian Reform: Democratic Innovation or Oligarchic Exclusion Redux?'. *Latin American Politics and Society*, 45 (2): 41–65.

Petras, J., 1997. 'Latin America: The Resurgence of the Left'. *New Left Review*, 223: 17–47.

Reis, E.P., 1990. 'Brazil: 100 Years of the Agrarian Question'. *International Social Science Journal*, 50 (157): 419–32.

Rosa, M., 2007. 'Landless Experiences: Youth and Social Movements in Brazil and South Africa'. Unpublished Manuscript. Brazil: Federal University of Fluminese.

Routledge, P., A. Cumbers and C. Nativel, 2007. 'Grassrooting Network Imaginaries: Relationality, Power, and Mutual Solidarity in Global Justice Networks'. *Environment and Planning A*, 39 (11): 2575–92.

Santos, R. and L.F.C. Costa, 1998. 'Camponeses e Política no Pré-64'. In *Política e Reforma Agrária*, eds L.F.C. Costa and R. Santos, 13–41. Rio de Janeiro: Mauad.

Schwartz, S., 1985. *Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society: Bahia, 1550–1835*. New York: Cambridge University Press.

Seligmann, R., 1998. *PROCERA: Programa Especial de Credito Para Reforma Agrária*. Brasilia, DF: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Sihlongonyane, M.F., 2005. 'Land Occupations in South Africa'. In *Reclaiming the Land: the Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia, and Latin America*, eds S. Moyo and P. Yeros, 142–64. London: Zed Books.

Smith, N., 1993. 'Homeless/Global: Scaling Places'. In *Mapping the Futures. Local Cultures, Global Change*, eds J. Bird, B. Curtis, T. Putnam, G. Robertson and L. Tickner, 87–119. London: Routledge.

Stedile, J.P., 2002. 'Landless Battalions: The Sem Terra Movement of Brazil'. *New Left Review*, 15: 77–104.

Thwala, W.D., 2006. 'Land and Agrarian Reform in South Africa'. In *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*, eds P. Rosset, R. Patel and M. Courville, 57–72. Oakland, CA: Food First Publications.

Tilly, C., 1978. *From Mobilization to Revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Viotti Da Costa, E., 2000. *The Brazilian Empire: Myths and Histories*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Wolford, W., 2006. 'The Difference Ethnography Can Make: Understanding Social Mobilization and Development in the Brazilian Northeast'. *Qualitative Sociology*, 29 (3): 335–52.

Wright, A. and W. Wolford, 2003. To Inherit the Earth: The Landless Movement and the *Struggle for a New Brazil*. Oakland, CA: Food First Publications.

6

Pergerakan Melawan Tanaman Rekasaya Genetik Di India, Afrika Selatan Dan Brazil.

Ian Scoones

Pendahuluan

Bagian ini mengeksplorasi tentang karakter lokal dan transnasional dari dinamika pergerakan seputar tanaman rekayasa genetik (RG) di India, Afrika Selatan dan Brazil selama periode sepuluh tahun hingga 2005. Ceritanya bermula pada pertengahan tahun 1990 yaitu ketika pertama kalinya usaha untuk mendapat persetujuan mengenalkan tanaman RG mulai dilakukan. Di India, bahan transgenik dipakai dalam produksi Bt Monsanto[130] yang kemudian pertama kali diimpor pada tahun 1995 dan, padahal tahun 1989 pertama kalinya pengaturan tentang biosafety sudah ada. Meskipun demikian, tanaman kapas Bt tidak diizinkan untuk dikomersialkan hingga maret 2002, walaupun beberapa tahun setelah penanaman ilegal dari "pem-

[130] Kapas BT adalah produk transgenik berdasarkan sisipan dari gen Cry1 dari bakteri bacillus thuringensis yaitu bakteri yang sebagai daya tahan bagi serangga di hewan peliharaan, secara khusus ulat bulu helicoverpa armigera.

bajakan" kapas RG telah terjadi sebelumnya.[131] Di Afrika Selatan, percobaan pertama kapas RG dimulai oleh Monsanto pada tahun 1992 di bawah rezim apartheid, dengan perilisan kapas transgenik untuk penggunaan komersial di tahun 1997. Pada tahun 1998 jagung kuning juga dikomersialkan, lalu diikuti jagung putih Bt pada tahun 2000. Aksi GMO di Afrika Selatan telah berlalu di tahun 1997, namun tidak ada tindakan sampai akhir tahun 1999. Di Brazil, hukum Biosafety dibuat pada tahun 2005 oleh wewenang pengaturan CTNBio, yang pada tahun 1997 menerima percobaan pertama dari kacang kedelai RG Monsanto *"roundup ready" herbicide-tolerant*. Kedelai RG ini yang secara formal diterima untuk dijual pada tahun 2002, diikuti percekcokan yang panjang di pengadilan. Di bulan maret 2005, hukum Biosafety yang baru diratifikasi dan memberikan kekuasaan pada CTNBio untuk meng-ijinkan penanaman.

Tanaman RG dikenalkan dalam setting agraria yang berbeda di tiga negara. Di Brazil, kedelai RG diselundupkan melewati perbatasan Argentina, dan digunakan secara ekstensif oleh produsen komersial skala besar, tanpa membayar harga premium yang dikenalkan Monsanto pada saingannya. Di Afrika Selatan, komersial besar serupa menjadi pendukung kuat untuk penanaman jagung RG, yang umumnya menjadi jalan untuk mengurangi biaya dan subsidi untuk sektor pertanian komersial yang besar yang secara progresif dikurangi. Tanaman RG dihubungkan dengan petani yang memiliki ladang kecil, terutama komoditi kapas Bt di area Makhatini Flats di KwaZulu Natal. Hanya di india tanaman RG menjadi tanaman pokok petani kecil di area pertanian kapas, dimana mereka

[131] Dalam salah satu review di bab ini menunjuk istilah "pembajakan" kapas RG adalah istilah yang tidak benar dalam konteks di india karena tidak ada perlindungan hak paten disana.

memakainya dalam skala yang amat besar bahkan sebelum regulasi yang resmi dikeluarkan. Ini adalah cara insentif untuk mengurangi biaya tinggi pada pemakaian pestisida untuk tanaman kapas, dan Monsanto sangat ingin berpindah fokus dari cara tradisional mereka pada agro kimia pada sektor pembibitan (Glover 2007). Walapun secara pokok penanaman tanaman RG dilakukan oleh petani yang berbeda-beda, produsen komersial skala besar kedelai dan jagung di Brazil dan Afrika Selatan, dan petani kecil yang menanam kapas di India dan di (pada tingkat yang lebih rendah) Afrika Selatan, mereka mampu mendapat pemasukan.

Munculnya tanaman RG rupanya tidak terjadi dalam situasi yang tenang. Dalam dekade terakhir bermunculan banyak protes yang membabi buta yang meletus di tiga negara ini, yang dipelopori oleh berbagai kelompok, sorotan media yang intens dan berkembangnya perdebatan global. Perdebatan berfokus pada keputusan komersialisasi tanaman RG, ketakutan mengenai prospek dari gen "terminator"[132], di samping perhatian yang lebih luas pada hak paten, pengaturan perusahaan dan tentu saja konsekuensi dari hubungan perdagangan globalisasi. Dalam banyak hal, ada kesamaan hubungan yang membingkai oposisi terhadap proyek tanaman RG di tiga negara, namun ada yang membedakan mereka, yaitu konteks dan pertimbangan lokal yang ditunjukkan di bawah ini. Di tiga negara dalam periode ini memperlihatkan rentetan dari munculnya kegiatan anti tanaman RG. Setiap negara memiliki hubungan yang berbeda dan terkadang tidak jelas asosiasinya dengan gerakan dan organisasi petani. Terkadang ada

[132] Gen "terminator" merujuk pada Genetic Use Restriction Technologies (GURTs), dimana sisipan gen dicegah penggunaannya di generasi berikutnya. Akibat kehebohan dari teknologi ini sehingga belum juga dikeluarkan.

deretan jelas dari politik dan kepentingan materi yang kadang kurang jelas. Kunci pertanyaan yang dieksplor dibawah ini adalah untuk menanyakan kepada siapa kelompok baru anti tanaman RG ini berbicara dan kepentingan apa yang mereka wakilkan? Demikian, aliansi baru dan jaringan yang masing-masing dibuat dengan level nasional, regional, dan global, yang membuat berbagai tempat untuk mobilisasi dengan dimensi lokal dan global, yang pada gilirannya menghasilkan berbagai bentuk yang beririsan dengan mobilisasi transnasional dan lokal. Dampak lokal ini masuk ke dalam jaringan aktivis global yang dihubungkan oleh internet dan jaringan ekstensif antara kelompok yang diantaranya berasal dari kelompok agraria, lingkungan dan kampanye konsumen.

Aktivis anti RG beragumen bahwa adanya kekuatan monopoli, pemakaian tanaman RG akan mengakibatkan kenaikan harga dan menurunnya keragaman jenis pilihan bibit sehingga memaksa petani yang miskin mundur dan mengikuti cara yang sama, sehingga, perusahaan agrikultur kapitalis lah yang mendominasi. Mereka beragumen, menyebarnya bahan genetik RG, akan menimbulkan resiko ini akan ditambah dengan ancaman potensial pada biodiversity dan terhadap konsumen, yang berpotensi kena resiko tinggi akibat makanan yang tidak aman. Pendukung pro RG sebaliknya beragumen bahwa bibit RG akan mengurangi biaya petani dalam skala cara normal, membiarkan petani kaya dan miskin sama-sama meraih untung. Dengan menghilangkan beban petani dari pembelian pestisida, baik secara kesehatan dan keuntungan ekonomi akan didapat. Tidak diketahui adanya resiko kesehatan dan lingkungan, klaim mereka dan jika dikendalikan oleh sistem regulasi yang singkat, semuanya akan beres dan keuntungan dari "revolusi gen" akan menjadi kenyataan. Cara beragumen seperti ini digunakan dengan berbagai cara di berbagai tempat, dengan penekanan pada

elemen yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Di studi kasus negara-negara ini, berbagai aliansi dihadapkan antara mereka yang konsen dengan perlindungan beragam tanaman asli di area pertanian kering, aktivis agraria konsen untuk land reform radikal, kaum nasionalis berkepentingan dalam melindungi ekonomi nasional-budaya dari pengaruh luar dan pemrotes anti-globalisasi yang terhubung untuk mengembangkan jaringan aktivis internasional.

Beberapa komentator mengacuhkan pergerakan anti – RG sebagai semata-mata tanggapan tiruan oleh aktivis elit, menggunakan hubungan dengan organisasi petani sebagai cara untuk mencari dana. Namun apakah hasil sesungguhnya lebih dari ini? Apakah ini bukan bentuk baru dari ekspresi legitimasi politik, yang penuh dengan kontradiksi kontemporer, namun juga sebuah kontribusi penting untuk debat demokratis dalam konteksnya, karena paksaan neoliberalisme yang hanya mempunyai ruang alternatif kecil? Bagian ini memperdebatkan tentang hal itu dalam cara yang berbeda dan kelompok-kelompok anti RG adalah contoh dari bentuk jaringan baru dari aktivisme sosial, hubungan masyarakat, isu dan politik dalam cara baru disekitar isu yang dijelaskan secara global, namun selalu di konstruksi ulang dalam konteks lokal dan melalui proses politik lokal. Dengan mengurutkan hubungan dari setting tiga bangsa pada arena internasional dan dengan memeriksa hubungan antar tiga negara, studi ini menaksir tingkatan yang mana aktivis anti RG bertambah menjadi jaringan transnasional yang dihasilkan oleh proses "globalisasi dari bawah" dan sebaliknya memunculkan pertanyaan mengenai proses representasi dan hubungan antara kelompok anti-RG dan perbedaan populasi pertanian pedesaan.

Bab ini diawali dengan pemeriksaan dari dinamika pergerakan, menjelajahi secara komparatif antara aktivis transnasional dan karakter lokal. Hal ini ditempatkan pada

pendekatan fokus utama dalam pandangan dari dekat tentang aksi bersama (Edelman 2001, 286), sebelum mengambil lebih jauh pengertian struktural politik yang dalam, dan faktor sejarah yang mengkondisikan praktek seperti itu. Di rangkaian negosiasi di tempat yang berbeda, dalam studi ini menanyakan: isu apa yang muncul dan tuntutan apa yang dibuat? Bagaimana bisa terbentuk dan oleh siapa? Hubungan apa yang ada antara negosiasi di tatar global dan lokal? Dan yang paling penting adalah, apa yang dikatakan oleh praktek dari mobilisasi ini pada kita mengenai karakter transnasional dari pergerakan anti RG dalam basis sosial politik nya.

Pada setiap negara, tujuannya adalah untuk berfokus pada peristiwa yang berlangsung lebih dari periode sepuluh tahun sampai 2005, dan untuk membentuk analisis ini dalam pandangan sejarah yang lebih luas. Materi yang empiris diberikan berdasarkan wawancara semi tersusun dengan pemain utama[133], digabungkan dengan arsip analisis dokumen, termasuk dokumen resmi pemerintah, publikasi dari aktivis di organisasi dan artikel koran.

Dinamika Pergerakan Dalam Konteks Tiga Negara

India

Di india, perdebatan mengenai tanaman RG menarik sorotan media nasional untuk pertama kalinya pada tahun 1998 yang menyebutnya sebagai kontroversi "terminator".[134] Masuknya kapas transgenik Mosanto menimbulkan ketakutan bahwa produknya akan termasuk dalam pela-

[133] Total lebih dari 70 wawancara detail yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini di India (februari 2004), di afrika selatan (Maret 2004) dan di Brazil (di April 2004). Wawancara di India membuat peneleitian jangka panjang antara tahun 2000 dan 2005 dalam tema ini.

[134] Sebagai contoh liha Omvedt (1998); shiva (1998)

belan aktivis anti-RG global, terutama RAFI[135] dan GRAIN. Gen terminator yang akan menghalangi penanaman kembali dan membuat petani bergantung dari tahun ke tahun pada perusahaan bibit. Ini adalah barang yang menimbulkan emosi dan sangat efektif dalam menimbulkan ketakutan, meskipun Monsanto dengan kuat menyangkalnya. Ketakutan ini mengusik banyak perasaan. Bagi beberapa kelompok, kapas Bt menjadi simbol dari perlawanan yang lebih luas terhadap dominasi kapital mutlinasional, bentuk tertentu dari modernisasi teknologi dan globalisasi pada umumnya.

Di pertengahan tahun 1998, pertempuran antara kelompok dimulai. Monsanto meluncurkan rangkaian iklan di surat kabar, pada waktu yang sama kelompok NGO meluncurkan kampanye "Monsanto Quit India" untuk menggugah kesadaran publik. Walaupun sudah diketahui luas bahwa percobaan lahan telah didirikan, detail mengenai satu-satunya tempat percobaan, baru diketahui masyarakat di bulan November 1998. KRRS (karnataka Rayja Ryota Sangha, yang sekarang menjadi gerakan petani Karnataka) dengan segera mengumumkan kampanye "Cremate Monsanto". Pemimpin KRRS terakhir, Professor M.D. Nanjundaswamy memperkenalkan rangkaian slogan: "*Stop Genetic Engineering*", *"No Patents on Life", "Cremate Monsanto"* dan "*Bury the WTO*". Dia memberi peringatan bahwa seluruh tempat percobaan di Karnataka, bagian India Selatan akan di bakar , dan itu mendapat sorotan media.[136] Kedutaan US meminta perlindungan polisi untuk perusahaan US di Bangalore dan meminta

---

[135] Sekarang dikenal sebagai ETC Group, lihat http://www.etcgroup.org.

[136] Menurut dari laporan media masa, pembakaran pertama terjadi pada bulan November 1998 oleh petani. Aktivis dari KRRS bersama dengan "front dari kelompok progresif" (yang sedikit diketahui), "front aksi", "front Pembebasan Karnataka" dan "Organisasi Petani

pengadilan tinggi di Karnataka untuk mengatur perlindungan tempat percobaan dan properti perusahaan bibit Mayhco. Di bulan desember, KRRS mengancam untuk mengajukan kasus kriminal dibawah *Union Seed Act* di pengadilan daerah, negara dan pemerintah pusat untuk melawan Monsanto, dengan alasan bahwa percobaan tersebut ilegal (Deccan Herald 1998).

Perang media berlanjut hingga ke tingkatan yang lebih tinggi sepanjang tahun 1999 dan 2000, dengan banyaknya kesempatan bagi media massa untuk mengeluarkan ulasan, dan didorong oleh sejumlah workshop dan forum-forum konsultasi.[137] Monsanto masih berada dalam sorotan diikuti usahanya untuk mengimpor plasmid untuk penelitian tanaman transgenik di pusat penelitian mereka di Bangalore (Economic Times 1999; The Hindu 1999). Saat itu, beberapa lebih berpusat pada gerakan perlawanan oleh lobi pro RG dengan intervensi dari ilmuwan non-penduduk india (terutama C.S. Prakash, dari universitas Tuskegee di USA, yang beberapa kali mengunjungi India dan menulis artikel dengan bahasan luas di media massa), pemimpin petani lain (termasuk Sharad Josho dari *Shektari Sanghatana* dan *Chengal Reddy of the Andhra Pradesh Farmers Association*)[138] dan komentator industri, termasuk kontribusi lagi dari Monsanto yang melaksanakan survey opini masyarakat, yang tidak mengherankan menunjukkan bagaimana petani mendukung bioteknologi. Tinggal sedikit dari ilmuwan lokal india yang bersiap memasuki keributan, seperti penerima Nobel dan pahlawan Green Revolution

---

tak Bertanah", menurut perilisan media massa dari KRRS, Bangalore. Pembakaran juga diikuti oleh lima anggota tim dari kelompok yang berbasis di Geneva "global people action group"

137 Sebagai contoh, TERI "stakeholder dialogues"; The National Science Summit di Bangalaore; konsultasi nasional tanaman RG MSSRF di Chennai.

138 Lihat Financial Express (1999,2000,2001)

Norman Borlaug yang tidak malu memberikan opini mereka di selembaran dalam koran Indian.

Segera setelah materi Bt diimpor, penolakan diberikan dalam bentuk petisi ke pengadilan oleh RFSTE, dipimpin oleh Vandana Shiva yang menentang bentuk dan konten dari regulasi ini. Sejak itu, pengadilan terlihat meneruskan tindakannya dengan melakukan persidangan, minat masyarakat pada proses pengadilan cukup tinggi, mereka mengikuti persidangan-persidangan dengan cermat. Petisi RFSTE mencakup pemeriksaan ekstensif di pengadilan tinggi dan memperbanyaknya sejumlah bukti tentang itu. Tindakan di Delhi High Court oleh Campaign Gene di tahun 2001 mengklaim bahwa penjualan ilegal bibit RG di Gujarat dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah. Petisi lebih lanjut oleh Gene Campaign beragumen untuk hak penyingkapan informasi pada hasil percobaan dibawah *Freedom of Information Act*.

Bentuk protes langsung lainnya juga dilanjutkan, dengan KRRS yang aktif dengan aksi pembakaran tanaman menjadi sorotan media, dan perdebatan penundaan lima tahun bibit RG (Economic Times 2001), mengikuti pola didirikannya *kampanye "lepas" Eropa.* Aksi protes terjadi di berbagai tempat, termasuk aksi reguler dan demonstrasi di markas penelitian bekas Monsanto di *Indian Institute of Science* di Bangalore. Peristiwa seperti *citizen juries* di Karnataka di tahun 2000 dan Andhra Pradesh tahun 2001 juga memberikan fokus aktivis untuk melaporkan tanaman RG dan menghubungkannya dengan masa depan agrikultur ActionAid 2000; Pimbert and Wakeford 2002). Minat media semakin tinggi dengan persaingan pelayanan berbasis internet yang memberikan pandangan alternatif pada keadaan di India.[139]

---

[139] Sebagai contoh, lihat AgBioIndia (http://www.Agbioindia.org), yang didukung oleh altivis Devinder Sharma di Delhi; lebih banyak

Perilisan resmi dari kapas Bt di tahun 2002 menimbulkan banyak protes. Usaha pembakaran tanaman selama 2002 memberikan dampak kekacauan, beberapa petani mau menerima kompensasi dari KRRS untuk pengrusakan pada tanaman mereka, namun yang lainnya dengan tegas menolak pemberian tersebut dan mengadu pada polisi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemrotes lebih banyak bisu. Ini disebabkan menurunnya kesehatan Nanjundaswamy, sebelum meninggalnya beliau di Ferbruari 2004. Dengan pegangan dia pada fraksi KRRS yang dia kendalikan dengan tergopoh-gopoh, kurangnya koordinasi dan kampanye yang tidak aktif menjadi bukti. Meskipun demikian yang lainnya tetap aktif. *Gene Campaign* contohnya mengadakan konferensi high-profile di Delhi, yang mendebatkan pemeriksaan sistem regulasi.[140] Sementara itu G*reenpeac*e dengan kantornya yang sekarang berlokasi di Bangalore unjuk gigi dalam protes berbasis konsumen pada outlet belanja dan menarik pemrotes pada diskusi mengenai regulasi.

Di tahun 2003 dan 2004 pemrotes berlanjut, namun banyak aktivis menaruh perhatian mereka pada review tiga tahun dari hasil kapas Bt di tahun 2005. Banyak yang ditanamkan dalam memberikan bukti alternatif berdasarkan survey di area kapas, yang akan mendemonstrasikan batasan teknologi. Banyak kampanye berfokus pada NGO juga mulai melihat kampanye anti RG sebagai pembatas yang tidak dapat dipisahkan, dan ingin memberikan sisi lain dari cerita itu, membangun narasi tentang alternatif yang memungkinkan. Contohnya *Karnataka Coalition*

---

daftar internasional (termasuk bio_activists@iatp.org) dengan sudut tanaman yang lebih skeptis dan Monsanto India (http://www.monsantoindia.com) yang lebih banyak mengambil posisi probiotek.

140 Lihat perilisan press genecampaign.org

against GM Crops membangun hubungan dengan berbagai kelompok, mencakup mereka yang bertempat di gerakan agrikultur alternatif di india dan diluar India.[141]

Afrika selatan

Pada tahun 1997 dilakukan kampanye Biowatch oleh sekumpulan kelompok kecil peneliti yang dibentuk di Afrika Selatan yang dipimpin oleh bekas ilmuwan universitas *biological scientist*, Rachel Wynberg. Biowatch memulai kampanyenya dengan mengadakan rangkaian workshop, debat dan surat kabar yang ditugaskan untuk berfokus pada isu seperti label dan pemisahan.[142] Pada tahun 2000 organisasi ini membuat aliansi, SAFeAGE kemudian diluncurkan, hal ini terinspirasi dari "kampanye bebas" European. Dipimpin oleh aktivis Cape Town, Glenn Ashton, SafeAge menaikkan tempo aktivitasnya dengan strategi orientasi media dengan membangkitkan kesadaran publik pada isu RG. Publikasi artikel di koran reguler, slot di tv dan pembicara di radio membuat RG menjadi isu publik.[143] Munculnya kelompok koalisi yang mengorganisir sejumlah acara *high-profile*, menarik tokoh-tokoh anti RG global seperti Vandana Shiva dari India dan Tewolde Berhan Egziabher dari Ethiopia. Untuk menandingi ini, organisasi pro RG yang didanai industri, AfricaBio diluncurkan pada akhir tahun 1990, yang berusaha untuk mempergunakan standar ilmiah *high ground* atau yang melegitimasi pendiriannya dalam hal keahlian ilmiah. Dalam periode ini, konfrontasi sering terjadi antara sisi yang beroposisi pada debat RG, yang hampir selalu dengan orang yang sama.

---

141 Termasuk Green Foundation, ICRA, AME dan yang lainnya.

142 Lihat http://www.biowatch.org.za.

143 Sebagai contoh, lihat Business Day (2002,2004); Mercury (2003); Mail and guardian (2000).

Meskipun demikian perdebatan ini hampir didominasi secara eksklusif oleh kulit putih, dan aktivis kelas menengah yang berpendidikan yang berbasis di Cape Town, Johannesburg atau Durban. Pada pasca era apartheid -yang condong pada aktivis kulit putih yang menjadi bagian dari perlawanan di berbagai cara- sebelum tahun 1994 menemukan diri mereka pada posisi yang tidak mudah. kecuali sebagian besar orang-orang baru pemerintah, mereka berasal dari beragam NGO yang harus membentuk baru kehadiran mereka dalam konteks afrika selatan "baru". Mereka memulai usaha untuk meraih konstitusi lebih luas melalui hubungan pada organisasi lain sebagai bagian pembangunan koalisi anti RG yang lebih kuat. Sehingga seperti perserikatan (contoh *The Food and Allied South Africa*), kelompok konsumen (*the National Consumer Forum; the safe Food Coalition*), organisasi berbasis hak asasi (*the Environtmental Justice Networking Forum, EJNF*) organisasi pembangunan dan lingkungan (*Environment Monitoring Group; The Wolrd Conservation Union)*, kelompok keagamaan (termasuk *the South African Council of Churches; the Pietermaritzburg Agency for Christian Awareness; the Ecumenical Service for socio-economic transformation*), kelompok perlindungan alam (*Botanical and Wildlife Societies of South Africa)* dan kelompok penghijauan (*Earthlife Africa; Earth Woman; Trees for Africa*) mereka termasuk sebagai kelompok yang mengambil peran dalam kampanye. SAFeAGE beragumen bahwa aliansi ini diikuti lebih dari 200.000 orang di Afrika Selatan.

Membangun jaringan dengan pemain internasional menjadi strategi penting. Ini juga mencakup Jaringan Dunia Ketiga yang berpusat di Malaysia, RFSTE di India, aktivis anti – RG yang berpusat di utara berasosiasi dengan GRAIN, RAFI dan yang lainnya. *The World Summit on Sustainable Development* yang diadakan di Johannesburg

pada bulan september 2002 merupakan titik pertemuan penting, dengan banyaknya diadakan workshop paralel yang membahas isu RG, dan banyaknya para peserta dari Afrika Selatan dari berbagai organisasi yang terlibat. Usaha internasional ini telah mendorong kepercayaan dan legitimasi dalam pekerjaan di negara mereka masing-masing, yang berfokus pada peningkatan intervensi strategi dalam proses legal yang kemudian digabungkan dengan beberapa cara lain, sehingga meningkatkan aksi protes. Pada agustus 2002, Biowatch melayangkan tuntutan pengadilan pada *National Departement of Agriculture,* yang digandeng oleh Mosanto sebagai terdakwa dalam kasus yang hak konstitusional untuk mengakses informasi pada persetujuan dan percobaan RG. Pemeriksaan pengadilan akhirnya dilaksanakan selama tahun 2004 dengan keputusan perihal kasus yang dilayangkan Biowatch di bulan February 2005. Kasus serupa yang berkepanjangan mencakup persetujuan jagung Syngenta Bt11 yang diajukan oleh Biowatch pada tahun 2002. Kasus naik banding hanya terdengar di tahun 2004, dengan tidaka danya banding selama ini, kondisi Syngenta diterima begitu saja. Pada waktu yang sama, kerja intensive dengan komite portfolio parlementer dari *Agriculture and Land Affairs and Environment* berlangsung, yang berfokus pada mengubah rancangan undang-undang GMO Act tahun 1997. Ketentuan baru akhirnya diluluskan di tahun 2004, menyebabkan respon penuh dari Biowatch.[144]

Sementara itu, SAFeAGE bersama dengan beberapa kelompok aktivis lingkungan, seperti Earthlife Africa, EJNF, Earth Women,- Ekogaia melakukan protes dengan gaya populer yang ditujukan pada rangkaian retail, menyorot isu yang sedang berkembang. pemboikotan

[144] Lihat detail dari keseluruhan aksi di http://www.biowatch.org.za.

konsumsi dipilih sebagai taktik protes di era apartheid- yang difokuskan pada outlet-outlet produk RG seperti Pick n Pay dan Woolworths. "Trolley runs" (dimana pemrotes memenuhi troley di supermarket dengan barang dan permintaan yang merupakan produk RG) yang menjadi fokus pada ulasan media lebih jauh.

Pada tahun 2005, diikuti dengan kesuksesan Biowatch dengan tuntutannya di pengadilan, lobi kelompok pro RG AfricaBio mengeluarkan pernyataan *vituperative* yang berjudul *"Thoughtless activists continue to misinform and mislead the public".*[145] Mereka mengklaim bahwa aktivis anti RG merendahkan hak asasi manusia dan mengompori editor surat kabar yang beritanya tidak berdasar fakta. Pernyataan mereka mengklaim bahwa kampanye anti RG merupakan bagian dari :

> Kampanye yang terpimpin dengan baik yang dibiayai se jumlah $70 juta setahun dari dana yayasan, kelompok makanan organik, pemerintah Uni Eropa dan bahkan lembaga UN dan program-programnya. Menggunakan penundaan dan ancaman melawan import agriculture dari negara yang menanam tanaman Biotech, kompleks dan syarat yang mahal untuk melabel seluruh bahan-bahan RG dan mencarinya dari bibit sampai rak toko, bahkan kebohongan yang sama sekali palsu mengenai keamanan bioteknologi.

Sepuluh tahun yang lalu, tanaman RG hampir menjadi perhatian di Afrika Selatan. Pemerintah bersama dengan industri dan kelompok kecil bawah tanah para ilmuwan, membentuk term tentang isu ini. Saat ini hal itu sudah berubah. Gabungan dari kasus pengadilan *high profile*, demonstrasi yang berlangsung, tumbuhnya media dan hubungan jangka panjang dengan legislator, birokrasi, dan

[145] Lihat www.africabio.com/press/biowatch.pdf.

ilmuwan yang melakukan pergulatan panjang, berdampak pada terbukanya isu ini dari perdebatan sampai penelitian yang lebih besar, bahkan berdampak pada keputusan dan pembatasan kebijakan.

Brazil

Di Brazil banyak aktivis anti RG di tuntut di pengadilan. Pada tahun 1997 greenpeace-Brazil memiliki file perkara hukum tentang kegagalam melawan barang import GMO. Pada tahun 1998, CTNBio, otoritas pemerintah Brazil menerima lima *Roundup Ready* dari macam-macam bibit kedelai untuk diatur dan dimonitor perilisan komersial nya. Organisasi konsumen, IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) [146] segera menanggapi dengan menjadikannya perkara hukum ke hakim federal untuk menolak peluncuran bibit kedelai ini. Keputusan melawan perilisan komersial dikeluarkan pada bulan desember 1998. Hingga tahun 1999, pemrotes meningkat dengan banyaknya ulasan di media dan berusaha untuk dapat dukungan di level negara, agar pemerintah membentuk rintangan perluasan lebih jauh dari tanaman RG. Di bulan maret 1999 gubernur negara Dutra of Rio Grande do Sul mengeluarkan surat yang memberikan sistem lisensi spesial bagi perusahaan RG di Brazil dan pemerintah Rio Grande meminta Monsanto untuk memberikan analisis dampak lingkungan secara detail untuk dugaan dari operasinya. Monsanto kemudian sukses mengawal keputusan untuk menolak intervensi pemerintah-negara didalam aktivitas penelitiannya. Namun ucapan terimakasih diucapkannya kepada agitasi efektif di level negara, gubernur meresponnya dengan mendeklarasikan bahwa negara "bebas-RG". Keputusan tersebut

[146] Lihat www.idec.org.bt.

diragukan oleh legislatif negara pada tahun berikutnya, namun meskipun demikian ini membuat sorotan media semakin kencang, menaikkan tempo, dan berfokus pada perhatian meningkatnya aksi di level negara.

Sementara itu pada level federal, terjadi peningkatan jumlah NGO - kelompok partai politik, mencakup IDEC, IBAMA (the Brazilian Environment ministry's Institute for the Environment and Renewable Natural Resources) dan PT (Workers' Party)- yang turut serta melakukan pengamatan intervensi legal dalam meninjau ulang keputusan yang dibuat oleh kementrian pertanian Brazil. Kementrian memiliki otoritas untuk meregistrasi bermacam-macam jenis kedelai RG tanpa dugaan dampak lingkungan secara formal yang menjadi bahan keberatan dan argumen (agar punya kekuatan hukum) para pemprotes. Pada bulan agustus 1999 hakim federal mengubah keputusan sementara terhadap penanaman tanaman RG pada keputusan pengadilan resmi. Monsanto diminta untuk memenuhi tuntutan dan meneruskan untuk melakukan *hard lobby*.

IDEC dan Greenpeace sementara itu memulai memberikan peringatan dengan berusaha menumbuhkan kesadaran konsumen akan bahaya RG dan melakukan aksi boikot. Himbauan itu terutama terfokus pada konsumen kota dan kelas menengah di pemukiman-pemukiman perkotaan, kelompok yang cukup banyak di Brazil. Pengaruh kuat IDEC sebagai organisasi konsumen dan pengalaman internasional Greenpeace dengan pemogokan konsumennya, kemudian merebut perhatian media. Pada bulan juni 2000 mereka mengumumkan bahwa 11 produk RG berada pada rak-rak supermarket di Brazil. Antara tahun 2000 - 2001, greenpeace memimpin protes di supermarket-supermarket yang ada di negara tersebut (Reuters 2000b).

Tantangan import produk RG adalah taktik lain yang dikerahkan pada saat itu. Greenpeace memberikan aduan

pada pengadilan untuk menolak pelayaran dari San Fransisco yang membawa dua kapal kontainer besar yang berisi jagung RG untuk pertenakan ayam. Hal ini menyorot berkembangnya perdagangan produk RG dan terjadi peningkatan pendukung protes di Brazil. Pada bulan juli 2000, gerakan petani yang dipimpin oleh Landless people movement (MST), menyerang kapal di Recige yang berisi jagung RG dari Argentina (Reuters 2000a).

Seluruh aksi ini berdampak pada meningkatnya frustrasi pada kekuasaan pemerintah. Seluruh kabinet kementrian menandatangani nota tentang tanaman RG di bulan juli 2000 dan president Cardoso mendatangani dekrit yang memberdayakan CTNBio untuk menguasai tanaman RG. Namun hal ini hanya akan memuncakkan determinasi dari kelompok aktivis anti RG, dengan blokade dan perintah melawan pengiriman yang intensif, dan dengan kelompok jaringan yang bebas bermunculan pada kampanye anti(bebas)-RG di Brazil (Campanha Nacional por um Brasil livre de Transgenicos), jumlah kelompok yang terlibat meluas. MST khususnya, melalui hubungannya dengan gerakan petani internasional, Via Campesina, menambah meningkatnya keterlibatan jaringan yang mampu menggerakan petani dengan jumlah besar. *World Social Forum* di Porto Alegre pada bulan januari 2000 adalah titik utama bagi pemrotes dan kemudian terus berlanjut pada kegiatan yang terus berlangsung di tahun 2001 dan 2003 yang menarik banyak aktivis internasional di seluruh dunia. Pada tahun 2001 lebih dari 1000 orang yang tergabung di MST menyerbu pertanian Monsanto di Rio Grande Sul, menghancurkan lima hektar lahan kacang kedelai RG. Mereka bekerja sama dengan aktivis petani dari Perancis, Jose Bove, yang lalu ditahan karena ikut berpartisipasi. Pergerakan anti RG saat itu menjadi hit dalam press internasional dan menarik perhatian Action-Aid Facilitates *citizen jury* di Fortaleza.

Pada tahap ini keterlibatan partisipasi pada kampanye dari keragaman impresif organisasi dan konstitusi dan konsumen (melalui IDEC), *environmentalist* (greenpeace dan ESPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria), aktor pembangunan (ActionAid Brazil dan AS-PTA, Assessoria e Servic'os a Projetos em Agricultura Alternativa), kelompok pendidikan (FASE Federac'ao dos Orgaos para Asistencia Social e Educacional and INESC, Instituto de Estudos Socio-Economicos) gerakan petani (MST), serta organisasi politik (PT-partai buruh). Masing – masing berfokus pada area pembelaan berbeda dan aksi yang berbeda, tetapi dengan orientasi protes yang langsung berfokus pada praktek demonstasi alternatif; melalui pengadilan dan ke media. Meskipun jaringan yang muncul dari slogan yang sederhana seperti "RG-Free-Brazil" tetapi mereka mampu mewujudkan "*discourse coalition*" (wacana koalisi) dan mampu membuat kekacauan di berbagai ruang berbeda.

Selama tahun 2002 banyak harapan yang diberikan pada kesuksesan PT dalam pemilihan umum. Banyak NGO dan kelompok aktivis dan gerakan memberikan aspirasi mereka pada PT, termasuk apa yang banyak dipahami sebagai komitmen untuk menolak RG di Brazil dalam kesuksesan PT. Namun ketika Lula terpilih pada oktober 2002, sorak kegirangan merosot. Bahkan sebelum pemerintah baru dimulai, kementrian agrikultur Roberto Rodrigues seorang pendukung terkenal dalam agribisnis berbicara mengenai tanaman RG (The Guardian 2002).

Sepanjang perselisihan di pengadilan dan protes aktivis dari tahun 1998 dan seterusnya, terjadi peningkatan kegiatan penanaman tanaman RG di Brazil bagian selatan, meskipun ada penolakan, pada dekrit dan keputusan.[147]

[147] Lihat Nature (2000); Dow Jones (2001)

Aspirasi untuk bebas RG di Brazil secara substantif menurun. Pada tahun 2003 pemerintahan Lula, menerima kehadiran tanaman RG dalam kuantitas besar dan dihadapi oleh dilema utama, apakah meneruskan penegakkan pada penolakan dan menghancurkan tanaman RG, yang menyebabkan tuntutan utama untuk kompensasi politik dia atau membiarkan penjualan tanaman RG. Rangkaian dekrit kepresidenan yang mengizinkan penjualan kedelai RG, walaupun masih belum disetujui penanamannya (Reuters 2003a), tetapi faktanya, bahwa Brazil tidak lagi bebas RG.

Pada saat itu, medan tempur utama adalah melakukan revisi bagi hukum Biosafety. Monsanto meluncurkan kampanye PR: dengan membuat film yang mengiklankan proklaim keuntungan dari tanaman RG, walaupun masih ilegal secara nominal.[148] Monsanto juga frustrasi sekali, karena kehilangan pendapatan royalti dari mengembangkan kedelai RG secara ilegal dan melanjutkannya ke pengadilan dan bernegosiasi dengan produsen utama (New York Times 2003). Poin utama melekat pada kekuasaan CTNBio dan tempat dari penilai lingkungan independen. Walaupun konsesi sebelumnya dimenangkan oleh lobi anti RG dan mengakibatkan penundaan lama, pemerintah bahkan menerima kekuasaan penuh CTNBio yang kemudian mengesahkan undang-undang nya pada bulan maret 2005.

Sejak itu gelombang berganti melawan posisi anti RG. Pertempuran ditingkat legal berakhir saat itu, CTNBio bergerak cepat untuk menerima Bollgard Monsanto dengan kapas Bt-nya. Pada bulan Maret 2005, Monsanto mendapat perjanjian royalti dengan produsen kedelai Brazil dan menyepakati usaha bersama untuk menghilangkan *black*

[148] Lihat Reiters (2003b); Financial Times (2004).

market dalam penjualan bibit, yang sebenarnya bertujuan untuk memastikan dominasi pasar Monsanto, dan kesepakatan itu berakibat terhadap tertundanya pengeluaran varietas lokal dari organisasi penelitian agrikultur negara, Embrapa. Pada tahun 2005, memang surat kabar memberitakan bahwa aliansi Brazil bebas-Rg bersumpah untuk melawannya, namun dengan industri kedelai yang kini secara formal berkomitmen dengan RG, visi dari bebas RG di Brazil kini pada hakekatnya mati dan terkubur.[149]

Hubungan Global, Berakar Lokal

Jadi bagaimana kita dapat memahami kampanye anti RG pada periode ini, dalam kaitannya pada konteks mereka secara lokal, nasional, dan transnasional? Apakah ini merupakan rangkaian kegagalan protes, didorong oleh kelompok elite dan didanai oleh kepentingan yang raguragu (oleh Eropa) sebagaimana klaim mereka (Paarlberg 2000)? Atau apakah periode ini menunjukkan kemunculan dari jenis protes dimana hubungan antara politik (dan juga nilai dan etnik) dan pengetahuan (dan bukan hanya prespektif tendensi ilmuwan) yang dapat dilihat sebagai informasi yang baru, membangun solidaritas transnasional dan berbagi tujuan? dengan masa depan cerah tanaman RG bagi produsen dengan lahan kecil atau kemalangan tertentu, -tergantung pada posisi anda- apakah ini setara dengan menjelajahi seberapa berbeda jalinan perdebatan RG yang menghubungkan dengan minat politik agrarian yang berbeda, atau malah sebaliknya mengugurkan beberapa informasi pada karakter kelas dalam isu RG.

Perdebatan yang menunjukkan sisi berbeda ini telah membuat permainan besar pada posisi dan kepentingan

[149] Walaupun koran GM-Free Brazil pada tanggal 20 desember 2007 (lihat http://www.aspta.org.br) merayakan bahwa tanaman RG masih belum diterima secara ilegal hingga akhir tahun.

dari petani sebagai korban (Shiva et al. 2000)atau terkadang sebagai pahlawan (Herring 2005, 2007). Namun siapakah petani-petani ini yang tampaknya menjadi pusat pada perdebatan namun terlalu sering diam dalam diskusi diluar keterwakilan mereka di sisi lain? Sebagaimana pada diskusi sebelumnya, kehadiran tanaman RG kedalam konteks agraria yang berbeda di seluruh kasus di pasar utama secara relatif mampu membuat petani berorientasi lebih komersial: "petani kaya" atau "petani kapitalis" seperti klasifikasi yang digunakan oleh beberapa orang. Di beberapa kondisi, bibit RG dicoba oleh banyak petani berbeda, di beberapa bagian di India masih ada sedikit bibit RG yang dipakai. Namun bibit RG jarang didapat oleh petani miskin sebagai nafkah hidupnya. Namun lobi pro RG berasumsi pandangan positif dari keuntungan pertanian kapitalis, bahkan pada akhirnya untuk produsen miskin, mereka memberi asumsi pada kenetralan teknologi dan kebutuhan untuk berhubungan dengan pasar global. Berbeda dengan argumentasi anti – RG yang memberikan banyak penekanannya pada perspektif yang meragukan bentuk agrikultur kapitalis yang akan menyebabkan meningkatkan ketidaksamarataan ini, petani yang tak bertanah dan miskin bahkan semakin terpuruk dalam krisis agraria yang telah ada. Sebagai contoh ekonomi agraria yang sangat tidak rata di Afrika dan Brazil, topangan dari komersial agrikultur skala besar, dihadapkan pada tuntutan yang berlangsung pada tanah dari petani miskin dan tak bertanah, dilihat sebagai penghinaan bagi komitmen pada demokrasi, kebebasan dan pembangunan.

Fitur utama di ketiga negara adalah hubungan global yang mengaitkan aktivis anti RG dan perdebatan yang ada disekitarnya. Kampanye pada level nasional direfleksikan pada debat global mengenai anti globalisasi, ketahanan pangan, hak petani dan biodiversity, sebagai

contoh. Dalam jaringan yang menyusun pemrotes global, isu RG menjadi pusat keseluruhan susunan isu berbeda para pemrotes terhadap monopolisasi kepemilikan teknologi dan pengetahuan melalui paten dan perjanjian TRIPS; bagi keadilan perdagangan sebagai bagian dari pembaruan (atau abolisi) WTO; melawan pembinasaan yang dirasa muncul dari perusahaan multinasional (dengan monsanto menjadi target global); atau malah dia terjadi dalam hubungan untuk memperluas fokus kampanye pada makanan, kesehatan dan pertanian. Perjuangan melawan tanaman RG menjadi perang dari agenda yang lebih luas, meliputi isu besar tentang cerita kemiskinan, perdagangan dan hak asasi manusia yang terkadang kata-kata "miskin" didefinisikan dalam kategori "petani" sebagai pusatnya. Kerangka dari debat global secara intens membuat frustrasi pro RG yang melobi industri, regulasi pemerintah dan banyak ilmuwan. Mereka merasa aktivis mengada-adakan isu, menyelisipkannya di protes yang luas dan juga politik, memasukkan nilai dan sudut etnik kedalam apa yang mereka lihat sebagai secara relatif sebagai isu teknik yang sederhana dan sempit mengenai tanaman RG. Apa yang penting adalah memperluas kerangka kampanye nasional untuk menyorot isu yang luas dari hak dan keadilan sosial dalam konteks kebijakan agraria neoliberal diluar teknologi itu sendiri (cf. Jepson 2002).

Setiap kampanye menjalankan program yang berbeda, memaparkan strategi dan taktik yang berbeda, dan mencakup jaringan dan aktor yang berbeda, seluruhnya berkaitan pada wilayah global. Sejumlah peristiwa internasional di akhir dekade ini adalah hal penting dalam membawa aktivis bersama-sama dan menkonsolidasi hubungan dan jaringan di berbeda tempat. Protes anti globalisasi yang penting pada pertemuan WTO di Seattle pada tahun 1999 adalah moment utama kemunculan ini, yang setelah itu diikuti oleh pertemuan WSF (World So-

cial Forum) di Porto Alegre pada tahun 2001. Sejak itu pertemuan WSF terus menerus dilakukan pada tahun 2002,2003 dan 2005, di Mumbai pada tahun 2004 dan pertemuan *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg di tahun 2002, dan juga pertemuan global di Via Campesina serta berbagai pertemuan yang dilakukan kelompok kampanye dan gerakan anti-globalisasi lainnya.

Protes terhadap globalisasi ini telah membuat sejumlah konsekuensi. Hal ini membuka gerakan rakyat pada jaringan yang lebih luas, menghubungkan mereka melalui internet, e-mail dan pertemuan pada forum dan lokakarya. Hal ini menyediakan konfirmasi dan dukungan bagi posisi yang terkadang di perjuangkan dalam cara yang tidak bebas di negara masing-masing. Berkembangnya "bintang" anti RG internasional memberikan kesempatan kepada aksi protes yang rata-rata bijaksana, mengumpulkan publisitas dan ulasan media. Namun acara tahunan WSF juga menjadi kesempatan tahapan pemrotes, oleh Jose Bove (dari Perancis), Vandana Shiva (dari India), Peter Rosset (dari USA), Percy Scheimer (dari Canada) dan banyak lainnya.

Kemungkinan tidak ada seorang pun yang dapat menandai gerakan ini pada arena global dari yang terakhir dilakukan professor M.D Nanjundaswamy dari KRRS India.[150] Melalui hubungan dia dengan kampanye anti RG dan tautannya dengan petani global dan gerakan anti globalisasi, terutama Via Campesina, berpindah dari politikus lokal dan pemimpin petani level negara hingga figur internasional. Dia berpindah-pindah dalam lingkaran aktivis internasional, dihormati sebagai pemimpin petani dari "selatan", dan menjadi penyambung suara dari kaum miskin dan terpinggirkan.[151] Dalam sebuah wawancara ia

---

[150] Lihat kontribusinya di Brass (1995)

[151] Bahkan sebelum kampanye GM, KRRS mempunyai sejarah high

memaparkan: "tidak ada perbedaan antara isu lokal, internasional, dan domestik saat ini. Melihatnya dalam konteks internasional penting bagi aktivis lokal. Melihat apa yang terjadi di Seattle dan Prague adalah hal signifikan.[152]

Dia juga hampir tak henti-hentinya menjadi sorotan media, termasuk media internasional dengan aksinya dalam pembakaran lahan percobaan monsanto, membalasnya dan tentu saja membesarkan hati, taktik protes dari Greenpeace, Genetic Snowball dan yang lainnya di Eropa. Peristiwa-peristiwa tersebut juga hadir dihadapan para pengamat dan aktivis internasional, yang kini banyak nama yang dikenal di lingkungan anti RG di tingkat global. Selama periode ini, perkembangan jaringan aktivis melalui internet juga mendorong KRRS dan Nanjundaswamy kedalam arena internasional dan beritanya yang dikopi ribuan di seluruh dunia.

Praktek Mobilisasi: Keterlibatan Tempat

Keterlibatan global ini bagaimanapun banyak dipengaruhi oleh proses mobilisasi yang pada umumnya terjadi dalam konteks nasional. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk: beberapa yang seperti kita lihat, dipusatkan dalam formal, *invited spaces* dimana para aktivis berhubungan dalam konsultasi dengan lembaga negara dalam pembaruan regulasi; yang lainnya dilaksanakan oleh jaringan aktivis. Di india, contohnya *the set-piece* "tribu-

profile, mengambil perhatian media dengan aksi langsung, antara lain kompetisi Miss World, Kentucky Friend Chicken dan Cargill. Pembakaran pada depot Cargill di Karnataka menghasilkan kesepakatan baik dari penghukuman di media massa dan diantara kelompok aktivis yang lebih luas karena sikap merusak dalam aksi protes.

[152] Wawancara oleh M.D Nanjundaswamy di Bangalore, 27 februari 2001.

nals" yang diorganisir oleh RFSTE[153] terjadi bersamaan dengan peristiwa yang dipimpin Monsanto. Kedua belah sisi menggunakan taktik yang sama. Sebagai contoh konferensi utama di delhi yang diorganisir oleh *Gene Campaign* tahun 2003 diganggu oleh gerombolan petani yang tergabung dalam kelompok pro RG. Baik di India dan Brazil, percobaan dengan *citizen juries* juga diorganisir oleh kampanye anti RG dan kelompok pembangunan. Peristiwa ini memberikan kesempatan ideal bagi media dengan hasil yang baik di media lokal dan internasional.

Walaupun banyak keterkaitan aktivis anti RG dibalik layar informal melobi dan jaringan. Profil aktivis yang berpendidikan, urban, dan menengah yang menunjukkan mereka juga berhubungan yang dengan lantang meneriakkan kasus pada kementrian senior, Pegawai Sipil dan yang lainnya. Sebagai contoh, aktivis india secara efektif berkecimpung dalam pusat Departement of Biotecnology, kementrian lingkungan dan kehutanan dan kementerian kesehatan dan agrikultur, kementrian agrikultur dari pemerintah Union dan beberapa departemen pemerintah negara. Dengan akses ke orang yang tepat, aktivis juga mempengaruhi proses *briefing dan exsposure* yang hati-hati.

Element utama dalam melobi diluar birokrasi adalah untuk memastikan bahwa politikus yang terpilih dapat diharapkan mendukung mereka. Jika figur utama terpilih kembali pada posisi, mereka dapat mengajukan bahkan dihadapan para pegawai-pegawai yang enggan. Taktik di Brazil seperti yang didiskusikan, sangat dihubungkan dengan pemilihan politik dan kepentingan dukungan level negara bagi sudut anti RG. Keterlibatan yang erat pada aktor gerakan di kampanye PT (Partai Buruh) untuk

[153] Lihat http://www.vhiva.net/arhives/campaigns and business line (2000).

kepresidenan nasional menunjukkan bahwa aktivis memiliki pendirian yang kuat (jika tidak dapat disebut komitmen yang tegas) yang mana pemerintah yang dipimpin Lula membentuk penolakan bagi tanaman RG. Bahwa hal ini tidak terjadi seperti yang didiskusikan diatas, malah menjadi kekecewaan yang utama, namun meskipun demikian kasusu Brazil menghasilkan pembagian dalam pemerintahan Lula yang telah dibuka sebagai kunci bagi cara-cara hingga kesepakatan terjadi. Dalam penyusunan Hukum Biosecurity, aktivis MST Brazil melakukan aksi diam diluar parlement Brasil selama beberapa bulan, mereka terus menerus melakukan aksinya diluar sementara diskusi sedang berlangsung didalam parlemen. Di Afrika Selatan, fokusnya dipengaruhi komite portfolio parlement dalam Kementrian urusan lingkungan, kementrian pertanian dan pertanahan. Di Afrika Selatan, mereka memberikan komitmen konstitusional untuk membuka bentuk demokrasi, ruang ini relatif mudah diakses; banyak warga negara dapat memberi argumen pada komite sebagai bukti. Namun pengaruh yang diperoleh merupakan masalah lain yang mana membutuhkan pelobian yang cerdik. Lagi, perbedaan politik dan personal diteliti dan dibuka, hubungan personal di kapitalisasi dan ulasan tentang bibit dijadikan sebagai kunci argumen. Sebagai contoh NGO yang ada di Cape Town, *Evironmental Monitoring Group,* mengajak keseluruhan portfolio komite dalam karyawisata pada proyek "agrikultur berkelanjutan" sebagai bagian dari usaha untuk mendemonstarikan bahwa ada agrikultur alternatif yang berjalan terus di negara tersebut.

Jika proses politik cenderung menjadi pengecualian, berubah-ubah dan terkadang mengecewakan, rute lain yang ada di keseluruh tiga negara adalah sistem pengadilan independen. Penyesuaian prosedur untuk regulasi yang menurut undang-undang dan konstitusional/ hak-hak didasarkan pada penolakan, ini menjadi bagian penting

dalam aktivisme anti RG. Berkembangnya isu di pengadilan bisa menjadi cara yang bahaya untuk memberatkan kesadaran politik dan media dari isu tersebut dan membangkitkan para politikus. Kemauan untuk membuat ketertarikan masyarakat pada proses pengadilan di india, sebagai contoh yang dapat dilihat dari banyaknya kritikan pada fungsi demokrasi. Hal tersebut murah dan secara relatif mudah untuk dilakukan, pengadilan dipaksa untuk mendengarnya (bahkan jika permohonan di tolak) -sebagai bagian dari hak demokrasi-. Sehari di pengadilan atau bahkan satu jam adalah kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran, menarik perhatian media, memanggil saksi dan memberikan argumen pada publik. Di india kasus seperti itu telah dilakukan, mereka menuntut transparansi informasi pada data percobaan bibit RG, penilaian penuh dari pakar lingkungan, rangkaian percobaan regulasi dan kompensasi bagi tanaman yang gagal.[154] Di Brazil pengadilan digunakan dengan sangat sukses, secara formal mereka menolak penanaman tanaman RG sampai 2005. Hal ini melibatkan kelompok konsumen, IDEC bersama dengan Greenpeace untuk mendebatkan bahwa tanaman RG tidak seharusnya ditanam kecuali kalau penilaian penuh pakar lingkungan dilakukan dengan kesesuaian dengan adanya hukum lingkungan. Di Brazil, proses dari prosedur di tangguhkan walaupun pada akhirnya tidak berhasil, membiarkan isu tetap berada di publik dan pandangan politik publik.

---

[154] Di Times of India, Gene Campaign juga mengajukan permohonan untuk proses pengadilan bagi kepentingan publik dengan Supreme Court tahun 2004, yang memperdebatkan bahwa regulasi dapat dirubah untuk memenuhi hak-hak konstitusional (lihat http://indiatigether.org/2004/jan/env-gmsyspil.htm;http://www.genecampaign.org) sebagai tambahan petisi untuk Supreme Court, meningkatnya jumlah kasus PIL telah diserahkan pada High Court level negara.

Menghasilkan pengetahuan dan memberikan fakta-fakta, dilihat sebagai peran utama bagi aktivis organisasi dan tidak hanya dalam kasus pengadilan. Hubungan antara pembelaan dan penelitian terkadang tidak mudah, sebagaimana banyak aktivis membenarkannya. Anggota staff Biowatch di Afrika Selatan dengan terang-terangan mengakui bahwa: "di awal tahun, data penelitian kita tidak cukup baik. Kita tidak dapat membuat argumen". Memang, Ini adalah masalah sumberdaya. Sebagaimana mereka melanjutkan pengamatan: "monsanto bisa menghasilkan data dalam berbagai kesempatan. Mereka bisa mendapat peneliti univesitas dari manapun di dunia untuk datang dan bekerja".[155] Di India contohnya, jika mengikuti dirilisnya secara formal kapas Bt di tahun 2002, kompetisi antara para peneliti menjadi kuat. Secara harfiah, selusin "penelitian" telah dilakukan, dan masing-masing memberikan hasil berbeda (Scoones 2005a, 289–91).

Namun keseluruhan penemuan, pastinya berbeda dalam konteks yang spesifik. beberapa bercerita tentang keefektifan berdasarkan hasilnya di akhir. Proyek yang berfokus pada pertanian kecil masih bertahan dan malah meningkat menjadi tempat dan kesempatan untuk pembuktian dan juga bagian dari keseluruhan cerita. Narasinya memang kacau, namun juga memberikan alternatif positif. Di tiga negara, petani pemilik lahan adalah element utama dalam jaringan anti RG. Membawa masyarakat, politikus, pembuat undang-undang, dan ilmuwan ke lokasi proyek, kadang sangat kuat memberikan dampak.

Dari semua praktek mobilisasi apakah itu lobi informal, melakukan konsultasi, kasus pengadilan atau proyek demonstrasi tentu saja semua itu berpengaruh. Perbedaan bagian jaringan aktivis yang luas di setiap negara men-

[155] Wawancara, Cape Town, March 2004.

cerminkan strategi yang berbeda. Namun beberapa subjek memberikan lebih banyak perdebatan daripada strategi dan taktik untuk aksi protes langsung. Mungkinkah itu merusak pada penerimaan ide tersebut secara luas? Apa yang mungkin mengucilkan usaha dalam lobi informal dan kasus pengadilan? Apakah aksi langsung ilegal, termasuk pengrusakkan properti dan tanaman diterima? Apakah seharusnya pemrotes ditujukan pada media, mengembangkan profil untuk aksi lain atau berakhir pada mereka sendiri? Ada banyak pendapat dalam isu-isu ini begitu juga aktivis dan kelompok lainnya, tidak ada yang dapat menjawab itu dengan mudah.

Seperti yang diketahui sebelumnya di tiga negara, aksi langsung dan protes dari jenis berbeda telah terjadi pada moment berbeda pada dekade terakhir. Di India, KRRS memimpin cara pengrusakan tempat percobaan kapas Bt di awal 1998, gelombang cara protes yang serupa terjadi di Eropa. Hal tersebut merupakan peristiwa media, bertahap, dramatis, layak diberitakan dan memberikan kesempatan mendapat hasil foto yang baik. Sebagaimana di Brazil, mereka menjadi bagian dari lingkaran aktivis global yang datang berkunjung kesana. Aktivis internasional diundang untuk menyaksikan peristiwa dan melaporkan kembali ke jaringan mereka. Kehadiran mereka pun memberikan dampak terhadap sorotan media, dan membantu untuk memastikan tindakan aparat keamanan (polisi) tidak terlalu berlebihan. Keinginan Nanjundaswamy untuk mempublikasikan aksinya tentu saja terbayar. Protes KRRS antara tahun 1998 dan 2001 berlanjut menjadi sorotan media. Kadang mereka membuat sasaran terhadap *Monsanto Research Centre* di Bangalore, kadang lahan tempat percobaan Monsanto/Mayhco, kadang mereka beraksi di acara utama internasional (seperti asian Seed Industry Congress) dan kadang di lembaga legislatif. Meskipun

media massa selalu telat menginformasikannya dan perilisian media massa dilakukan dari kantor KRRS di Bangalore yang kecil yang kemudian diterbitkan melalui email di seluruh dunia, aksi ini dilihat sebagai hal yang tidak konvensional dan tidak pantas, namun tak seorang pun dapat membantah bahwa mereka meningkatkan eskalasi perdebatan.

Di Brazil keterlibatan MST memperlihatkan pergantian dari kampanye yang konvensioanal menjadi aksi protes langsung. Menghubungkan isu RG pada permasalahan yang lebih luas dari reforma agraria mengijinkan invansi tanah untuk memperluas aksi pada invansi Monsanto dan tempat penelitian lain dan termasuk mencabut tanaman percobaan. Sebagaimana di india, hal ini menjadi tahapan, peristiwa yang simbolis yang mana dirancang agar menjadi sorotan media dengan melibatkan kelompok International yang anti RG. Mengikuti taktik yang sukses di Eropa, Greenpeace berinisiasi melakukan protes pada supermarket dan menyebarkan brosur, termasuk di kereta dorong yang ada di supermarket tersebut. Laporan media massa untuk setiap kejadian, membuat isu RG terus menerus ada di koran, melanjutkan tekanan yang panjang, dan mengambil pertimbangan yang legal.

Seperti yang didiskusikan diatas yang ditekankan secara berulang, media memiliki pengaruh utama pada kesempatan mobilisasi. Karena cara berita dibuat dan dikelola, yang menghasilkan penjahat dan pahlawan, mengikonisasi beberapa dan mengutuk yang lain. Mengartikulasikan individu utama yang mampu memberikan bagian yang terdengar bagus atau keinginan menulis berita op-ed untuk deadline yang padat adalah hal vital untuk jurnalis. Berita harus ditulis dengan dua sisi, kelompok pro dan anti yang saling melemparkan perlawanan, narasi David and Goliath dari NGO lokal dan aktivis petani bertempur melawan perusahaan multinasional global.

Monsanto memang berada dalam posisi yang paling efektif secara nasional, dia dapat menambahkan sensibilitas media global untuk memudahkan berita dapat dibuat. Dalam beberapa persitiwa, Monsanto di India dengan mudah mengirim ulasan melalui fax pada sejumlah besar daftar jurnalis. Hal tersebut memberikan salinan yang cepat. Jurnalis langsung mendapatkan "sisi lain" untuk pembuatan berita. Seorang jurnalis yang mengulas isu RG untuk beberapa tahun di koran nasional berkomentar, "membuat berita mudah. Kamu mendapat fax dari Monsanto, lalu kamu hubungi kelompok kampanye anti RG untuk sisi lain dan kamu tinggal menulis artikel".[156] Secara kolektif gerakan anti RG juga memiliki mesin PR yang sangat efektif. Greenpeace contohnya memberikan berita yang bagus di China yang ditunjukkan di *Science* dengan perilisan dari sponsor Greenpeace yang berasal dari universitas Nanjing yang menunjukkan tentang fakta kapas Bt sebagaimana dikatakan oleh pendukung anti RG yang lain. Hal ini diperoleh dengan segera oleh aktivis di India melalui dunia maya dalam website dan sejak itu kabar dari China itu diberitakan dimana-mana oleh aktivis anti RG.[157]

Memahami Proses Mobilisasi: Dalam Konteks Aktivis Anti RG

Dalam diskusi sejauh ini telah memberikan deskripsi yang komparatif dari proses dan praktek dari mobilisasi disekitar tanaman RG di ketiga negara. Pada bagian ini, konteks politik ekonomi yang lebih luas untuk mobilisasi anti RG akan dibahas, memeriksa proses ini, adalah memeriksanya dalam konteks politik dan ekonomi,

---

[156] Wawancara, Chennai, February 2002.

[157] Untuk daftar jaringan dan internasional lihat http://ngin.tripod.com;http://www.gene.ch/genet;http://www.biotech_activist.iatp.org;http://www.gmwatch.org,.

terutama transisi pada demokrasi dan adopsi pembaruan ekonomi neoliberal dan implikasi nya terhadap konteks agraria; rangkaian perdebatan yang lebih luas diakibatkan oleh aktivis anti RG telah terhubung dan beraliansi dan membentuk jaringan, termasuk posisi sosial dan politik aktivis itu sendiri. Semua faktor tersebut bersamaan secara fundamental membentuk kesempatan, taktik dan strategi untuk proses mobilisasi.

Transisi Ekonomi Politik

Saat ini India, Afrika Selatan dan Brazil membanggakan diri mereka karena tetap kuat dalam mempertahankan demokrasi. - Transisi demokrasi di Afrika Selatan pada tahun 1994 dan di Brazil di tahun 1986- yaitu ketika tumbangnya Rezim apartheid di Afrika Selatan dan diktator di Brazil, adalah praktek dan pengalaman demokrasi yang asing dan berharga. India adalah contoh yang berbeda, setelah mendirikan demokrasi parlementer pada saat hari kemerdekaan di tahun 1947, yang mengakhiri masa darurat. Meskipun demikian, disamping umur demokrasi di negara-negara ini panjang, ancaman pada demokrasi terasa sangat kuat. Di tiga negara hal ini adalah situasi yang tidak terhindarkan, sulit berkilah dari hal tersebut, dapat dilihat dari artikulasi mereka selama wawancara dengan lembaga pemerintah, aktivis NGO dan media liberal yang memiliki kemampuan untuk memprotes, berdebat dan mengatur adalah bagian yang penting dari transisi ke demokrasi apakah itu di tahun 1947 (India), 1986 (Brazil) atau 1994 (Afrika Selatan).

Untuk tingkatan berbeda, di ketiga negara mempunyai struktur federal (Heller 2001). India dan Brazil adalah negara yang besar, dimana negara bagian memiliki populasi dan ekonomi yang seimbang untuk negara dengan ukuran medium. Politik daerah selalu menjadi bagian

penting untuk digambarkan, hubungan antara provinsi/ negara dan pusat menjadi dinamika yang penting. Faktor kesatuan menjadi setting perlindungan konstitusioanal di dalam rangkaian hak dan tanggungjawab yang luas dari warga negara, darimanapun mereka berasal. Di Afrika Selatan, konstitusi dibuat sebagai ikon suksesnya penyelesaian negosiasi dan dirayakan sebagai sesuatu yang paling komprehensif dan radikal di seluruh dunia (Habib dan Padayachee 2000). Tantangan konstitusional pada aksi legistatif dan pemerintah adalah fitur utama pada tanggapan masyarakat sipil di ketiga negara. Pengadilan independen atau paling tidak, hakim terlihat simpatik pada argumen yang didasarkan pada alasan yang lebih luas daripada yang disampaikan oleh pemerintah, inilah yang terlihat sebagai pusat dari negara demokratis.

Praktek demokrasi, meskipun demikian sangat dikondisikan oleh faktor perubahan ekonomi. Pemahaman oleh institusi -hukum, pemerintah atau regulasi- tidak dapat dipisahkan dari penilaian yang lebih luas tentang ekonomi politik dibawah kondisi neoliberal. Sifat dari negara, struktur ekonomi dan terutama kondisi agraria telah berubah secara dramatis di ketiga negara. Dari tahun 1991, India mulai meliberalisasi sistem ekonomi, membongkar banyak fungsi negara setelah-kemerdekaan- yang dipimpin oleh Nehru. Hal ini mengantar India pada bentuk politik yang berbeda, salah satunya adalah ke bentuk ekonomi yang berbasis pasar, apa yang terjadi pada level pemerintahan itu penting sebagaimana yang terjadi di pusat, perintah dari pusa -apakah itu dalam bentuk regulasi atau statuta- harus diimplemantasi untuk benar-benar dilaksanakan, dan dalam agenda neoliberal, kapasitas negara secara bertahap mulai dibatasi. Sebagai contoh penanaman ilegal kedelai RG yang menyebar luas (di Brazil) dan kapas RG di India menjadikan regulasi pemerintah pusat bahan

ejekan, yang mengakibatkan perubahan yang sangat memalukan, undang-undang sementara dan dekrit paruh waktu yang dibuat sendiri oleh negara pusat.

Ketika tekanan persaingan berlangsung intens di tingkatan ekonomi global, fokus kebijakan utama bagi seluruh pemerintah, apakah itu dalam level nasional atau daerah adalah mendapatkan kemungkinan investasi (kebanyakan dari luar) sebanyak-banyaknya. mereka mengabaikan hal-hal lain, ini terlihat dari praktek transaksi, tawar-menawar dan pembuatan perjanjian dengan investor (termasuk perusahaan besar RG) yang tidak terlalu diperhatikan dalam subjek penelitian. Dalam liberalisasi, dan globalisasi ekonomi dari sistem federal di India, Afrika Selatan dan Brazil, kepentingan pasar kadang menggantikan kepentingan rakyat kebanyakan. Dan tentu saja, saat waktu pemilihan umum, parahnya krisis dari ekonomi agraria tidak dihiraukan. Transisi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung mempengaruhi sifat dan kemungkinan demokrasi dan protes, dengan implikasi yang besar apakah terbuka atau tertutupnya ruang bagi taktik dan strategi aktivis.

Di ketiga negara, kondisi agraria yang dimaksud adalah masa transisi politik agraria dan kepentingan untuk beraliansi. Di india ketentuan politik tentang petani tidak lama berlaku, dengan permainan dalam pemilihan yang diatur dalam koalisi yang kompleks dari kepentingan diranah setting pedesaan dan kota, dengan retorika tentang "ekonomi baru" yang mendominasi segalanya, karena bercampurnya dengan gaya politik lama dalam area pedesaan dan kebutuhan untuk memecah aliansi dengan kelompok pertanian elit, tanaman RG terkadang dilihat oleh elit bisnis dan politik sebagai pengalihan yang berbahaya, ketika fokus pada bioteknologi sebagai motor pertumbuhan industri menjadi narasi yang mendominasi. Meskipun demikian, krisis yang terus-menerus dalam

perekonomian agrikultur dan kemiskinan yang berkepanjangan di banyak area pedesaan tetap menjadi perhatian, walapun dugaannya kondisi itu disebabkan oleh keberadaan tanaman RG, tetapi tak seorang pun yang percaya. Di Brazil dan Afrika Selatan, pengaruh terus menerus dari kepentingan pertanian komersial dalam kebijakan yang sedang berjalan, dan politik agraria yang terpimpin sangat penting. Tanaman RG dilihat oleh kelompok tersebut sebagai tanda bahaya bagi pertahanan ekonomi mereka, disana RG dihadapkan pada tekanan redistributif reforma agraria, penghapusan subsidi dan restruktur agraria. Saat ini, manuver politik yang hati-hati dan kepentingan ekonomi dikuatkan dengan kepentingan pertanian komersial skala besar, namun lobi anti RG dengan koalisi kepentingan dan isu yang beragam terlihat sebagai ancaman yang menantang, bagi kekuasaan ekonomi dari sektor komersial skala besar.

Diberikannya pembagian konstitusi politik, putaran pemilihan telah menjadi fokus penting bagi aktivitas mobilisasi di ketiga negara. Di seluruh kasus pemerintahan saat ini, hal tersebebut merupakan koalisi dengan partai kuat yang mendominasi. Di India, pemilihan pada tahun 2004 memperlihatkan kembalinya partai Congress, bersamaan dengan kembalinya aliansi paham kiri. Di Afrika Selatan, *African National Congress* mengalami peningkatan jumlah pemilih pada tahun 2004 dan berlanjut untuk memimpin tiga pihak aliansi yang mengambil alih, diikuti dengan jatuhnya apartheid pada dekade yang lalu. Di Brazil, PT –sebagai pemimpin aliansi- mempertahankan kekuasaannya dari tahun 2003. Sebagaimana kemunculan perekonomian dengan ambisi global di ketiga negara, meskipun rakyat mereka secara retorika miskin, tetapi itu tidak mengubah terlalu jauh pandangannya tentang pro bisnis yang kuat dan pandangan tentang investasi. Hal tersebut berdampak dalam beberapa kompromi yang tidak

mudah antara retorika kaum nasionalis, sosialis, atau sedikit di kalangan Sosial Demokrat, terutama yang berkaitan dengan konsep ideal dan praktek di lapangan. Di ketiga negara, pemerintah yang sedang menjabat dikritik keras akibat terlalu banyak berkompromi dengan kekuatan modal dalam kesibukan mereka untuk menunjukkan diri agar investasi internasional tetap berlangsung. Sehingga di Afrika Selatan, antara aliansi ANC, Unions (COSATU) dan South African Communist Party terkadang terlihat tidak jelas (Lodge 2003). Di Brazil, gerakan yang mendukung Lula dalam permintaannya menjadi presiden menjadi kritikan tajam oleh pengurus PT. Tekanan dari MST contohnya, pada implementasi kebijakan reforma agraria yang dijanjikan menjadi meningkat dari tahun 2004 sampai 2005, dengan invansi pertanian besar-besaran. Di india, terdapat lebih banyak pandangan sinis pada proses politik. Namun secara tidak terduga, ketika kembalinya Partai Kongres memenangkan pemilu pada penghujung 2004 telah menimbulkan spektrum dari serangan pedesaan terhadap kaum arogan, masyarakat kota yang rakus dan kaum elite yang menggerakkan politik selama ini. Di ketiga negara, juga politik neoliberalisme menjadi faktor utama dalam membentuk strategi mobilisasi dan respon negara-negara ini. Tanaman RG dalam hal ini dilihat sebagai medan tempur untuk perdebatan dan setting agraria masa mendatang, dengan perbedaan kepentingan yang mirip antara satu dengan yang lain dan itu terjadi dalam perdebatan politik yang intens. Usaha yang dilakukan khususnya oleh pendukung pro RG untuk mempersempit salah satu kegunaan teknologi dan biosafety malah mengaburkan politik dan kepentingan yang tidak diterima oleh koalisi anti RG yang secara terus-menerus menekankan perdebatan yang lebih luas dan asosiasi yang jelas antara posisi pro RG dan khususnya kepentingan serta bayangan secara mutlak pertanian masa mendatang.

Keterkaitan isu: Di Luar Perdebatan RG

Dalam diskusi tentang mobilisasi anti RG sehingga dia mendekati puncak agenda politik, bagaimanapun juga harus diingat bahwa tidak hanya terjadi di ketiga negara tersebut. Mereka menaikkan pemahaman mereka pada poin yang berbeda, menarik perhatian media dan tanggapan beberapa politikus namun lebih dari itu, ada isu simbolis yang terkait pada perdebatan lain. Bagi mereka yang berada di tengah-tengah perdebatan RG hal ini mungkin membuat frustrasi dan upaya secara berlanjut mendorong isu RG tiba pada urutan teratas, menyoroti implikasinya yang lebih luas dan menghubungkannya pada isu yang sedang hangat dan menarik perhatian. Tentu seringkali mobilisasi petani digerakkan oleh organisasi petani, -KRRS di Karnataka atau MST di Brazil- mereka adalah petani yang sama dengan yang menanam tanaman RG secara ilegal, atau mereka yang mencoba jika mampu.

Sehingga di Brazil, MST mampu untuk menggerakkan petani dalam isu RG dengan mengaitkannya pada permasalahan reforma agraria yang lebih luas. Gerakan Via Campesina yang mana MST berhubungan dengannya, berbicara tentang isu hak pangan, kedaulatan pangan dan butuhnya petani untuk mandiri dalam cengkraman agrobisnis global.[158] Bagi masyarakat desa yang terpinggirkan di Brazil, hal ini selaras dengan yang mereka inginkan. Bahkan ketika mereka tahu sedikit mengenai tanaman RG dan melihat Monsanto sebagai musuh yang bersekutu dengan negara brazil yang segan untuk ikut serta dalam reforma agraria yang berarti, semua itu menghasilkan cerita yang meyakinkan pada masyarakat luas.

Bahwa hubungan seperti ini mengalami kegagalan di Afrika Selatan, boleh jadi ini masih menjadi teka-teki.

[158] Lihat http://www.viacampesina.org;http://www.mstbrazil.org.

Pencabutan populasi di pedesaan sebanding dengan ketidaksamarataan kepemilikan tanah, disana tidak menghasilkan gerakan serupa pada reforma agraria yang bersemangat, mata pencaharian pedesaan dan perubahan agraria. Lagi, jika kita harus bercermin pada inti dari isu yang dihasilkan dalam mobilisasi. Di Afrika Selatan, dimana gerakan politik yang menjadi partai yang menguasai muncul dari area urban dan gerakan serikat, isu pedesaan tidak menjadi prioritas. Reforma Agraria, walaupun penting sebagai bagian dari retorika pemerintah, ternyata tidak menjadi prioritas kebijakan utama di ANC. Tidak sama dengan kemunculan MST; walaupun model Gerakan Petani Tak Bertanah itu sendiri sebagian besar gagal untuk menghasilkan mobilisasi dalam skala apapun. Elit politik melihat pertanian komersial skala besar walaupun dengan pemindahan kepemilikan ilegal adalah sebagai sektor agrikultur masa depan, dengan tanaman RG yang banyak digambarkan. Alih-alih begitu, prioritas bagi aktivis saat ini telah terpusat pada isu kekerasan di kota, menanggapi virus HIV/AIDS dan kondisi buruh, sebagai tema – tema penting yang ada dalam mobilisasi masyarakat sipil dekade terakhir.

Dalam kampanye melawan tanaman RG di ketiga negara, juga terkait dengan masalah perhutangan dan meningkatnya kepercayaan pada kredit dan pinjaman dari pedagang bibit dan perusahaan bibit. Masalah ini juga terkait dengan komersialisasi yang dinamis dalam ekonomi pertanian, dengan terpinggirkannya petani kecil dalam unit skala besar dan perjanjian pertanian, ini menjadi sorotan dalam konsekuensi politik pada pengaturan kembali struktur agraria. Perdebatan juga terkait dengan pengurangan keragaman lokal dan pilihan bagi petani dan utamanya pada aktivitas daur ulang bibit. Dan untuk debat globalisasi yang lebih luas, WTO dan penghapusan pembatasan

kuantitas impor dan ketakutan akan jatuhnya harga untuk komoditas dengan meluapnya pasar lokal. Sehingga tidak ada dari isu-isu tersebut yang tentu saja hanya mengenai tanaman RG; mereka mempergunakan isu seperti keragaman hibrida dan tren yang luas dalam ekonomi agrikulutural, yang sepenuhnya bebas dari isu RG. Di Brazil dan India khususnya banyak petani yang telah lama menanam tanaman RG, walaupun kurangnya persetujuan regulasi. Apa yang disorot oleh keterkaitan ini dan peniadaan, bagaimanapun juga ini adalah rangkaian permasalahan yang lebih luas mengenai pilihan, ketahanan dan pilihan mata pencaharian di masa depan, dan keterkaitan yang lebih konkrit pada perhatian masyarakat yang lebih nyata daripada rahasia ilmiah dan perdebatan teknikal mengenai dampak dari tanaman dan makanan RG.

Sehingga di ketiga negara, perdebatan RG telah dikarakterisasikan oleh pembangunan strategis oleh aliansi dan keterkaitan aktor dan organisasi yang baru, kadang dalam bentuk koalisi yang rapuh. Kebanyakan berfokus pada politik yang lebih luas dari pergantian isu agraria, yang mana telah kita lihat, dia memperoleh proses politik yang berubah-rubah. Bahkan ikut menempa para konsumen perkotaan. Di ketiga negara, organisasi konsumer menjadi terlibat dalam perdebatan RG, mengikuti bimbingan dari rekan mereka di Eropa dalam membangun kesadaran mengenai isu keamanan pangan, melalui mobilisasi bagi pelabelan pangan dan boikot konsumen untuk menahan produk RG yang ada di supermarket. Namun di India, Afrika Selatan dan Brazil, kebanyakan konsumer tidak memiliki ketertarikan atau kesadaran yang membedakannya dengan pembeli di Eropa. Ada kelompok kecil namun berpengaruh dari kelas menengah konsumer yang mau membayar lebih untuk makanan non RG, kalangan ini beragumen mengenai ramah lingkungan, dan sistem

produksi lokal. Meskipun demikian bagi kebanyakan masyarakat kota dan tentu saja pedesaan, yang sebagian besar berasal dari kalangan konsumer dengan pendapatan rendah, perhatian mereka adalah dengan harga komoditas (murah atau mahal) bukan asalnya lokal atau tidak.

Lagi perhatian mengenai makanan RG terkait dengan isu lain dalam pembahasan para aktivis. Di Afrika Selatan, konsumer kadang mengajukan pertanyaan mengenai kualitas nutrisi bagi penderita AIDS. Contoh lain, makanan bayi, terjadi peningkatan pembelian ke pedagang eceran, bahkan konsumer yang miskin tertarik memastikan kualitas tinggi dan tidak menanggapi resiko. Bahkan dari kebanyakan aktivis yang bergiat di gerakan konsumer mengakui menumbuhkan kesadaran mengenai isu makanan merupakan perjuangan yang berat; walaupun mereka melakukan konsolidasi dari eceran hingga sejumlah rentetan supermarket, yang banyak dibeli oleh masyarakat kelas menengah, dan kalangan elit aktivis anti – RG yang ikut melawan pelabelan di beberapa kasus penolakan.

Aliansi dan Jaringan: Meraih Legitimasi dan Kekuasaan

Membangun aliansi dan jaringan untuk meningkatkan prioritas isu RG kemungkinan paling berhasil dibangun di Brazil. Di Brazil, organisasi dengan tingakatan beragam yang besar datang bersama ketika terjadi kekalahan kampanye bebas RG di Brazil. Beberapa dari organisasi ini tidak secara biasa dilihat bersamaan; malahan masing-masing mempunyai pandangan yang sangat berbeda dari strategi yang paling pantas dalam melawan RG. Namun sebagian besar dari mereka mampu menghindari perselisihan pada detail strategi dan taktik, yang mana dibiarkan pada masing-masing organisasi untuk memutuskan dan fokus untuk mempersatukan dibawah bentuk yang sederhana. Koalisi juga membentuk pertentangan dalam banyak hal, namun berfokus hanya

pada area perjanjian. Hal ini juga secara wajar rapuh dan harus dikelola dengan hati-hati. Para koordinator sadar betul dengan ini dan mampu mengurus ketegangan secara efektif.

Pola yang serupa juga jelas di Afrika Selatan, walaupun pada skala lebih kecil. Dalam pengelompokan besar yang didentifikasikan dengan kampanye anti RG, ada yang sangat tidak setuju dengan taktik aksi langsung, sementara ada yang merasa pembangkangan sipil dan taktik mengacaukan adalah cara satu-satunya untuk bertindak. Mereka yang mampu untuk bekerja sama adalah jaringan-jaringan yang tidak percaya hanya pada satu strategi saja, kelompok kecil ini sebagian berpusat pada Biowatch dan SAFeAGE hingga organisasi tingkat lebih besar, banyak diantaranya yang tidak mempunyai aktivisme anti RG yang menjadi fokus satu-satunya. Kebanyakan mempunyai fokus lingkungan yang lebih luas; yang lainnya memiliki penekanan pada praktek yang terkait dengan pertanian organik; yang mempunyai orientasi keadilan/hak; dan yang lain terkait pada gerakan buruh atau kelompok keagamaan.

Di India susunan organisasi serupa secara luas berada dibawah payung anti RG, namun tidak ada kampanye yang terorganisir. Berbagai usaha datang bersamaan dan kemudian gagal karena pandangan yang berbeda, namun faktor personaliti lah yang menjadi penyebab. Masing-masing dari kelompok utama anti RG selama sepuluh tahun terakhir mempunyai pemimpin dengan kultus individu yang kuat. Vandana Shiva yang memimpin RFSTE kemungkinan adalah yang paling dipuji. Devinder Sharma dari *Forum for Biotechnology and Food Security* sama-sama berkampanye dengan efektif dan komentator media, namun dengan gaya yang berbeda. Suman Sahai, ketua komite *Gene Campaign* berbeda juga, dengan penekanannya pada penelitian dan perjanjian kebijakan. Dan yang terakhir adalah pemimpin dari fraksi KRRS M.D.

Nanjundaswamy yang merupakan pemimpin yang tidak konvensional dan cerdas, seorang jurnalis yang pintar dari media terkenal.

Namun, di tempat tertentu, perlawanan itu terjadi diluar sorotan nasional dan permainan media, ada individu dan kelompok lain yang menjalankan di tingkat dan level yang lebih sederhana, tanpa pembongkaran dan tanpa (kebanyakan) politik personaliti. Dalam survei aktivis organisasi anti RG di kota India selatan, Bangalore, saya mengidentifikasikan lebih dari 20 organisasi dengan pernyataan secara eksplisit pada sudut anti RG, termasuk tentu saja KRRS. Ini adalah kelompok yang mereka bekerja secara praktek di lapangan melalui aksi-aksi demonstrasi, kampanye pertanian yang berkelanjutan dan organik, keberlangsungan bibit dan biodiversity (Green Foundation, AME Foundation, Honey Bee Network; Organic Agriculture Network); ada juga mereka yang fokus pada isu pembangunan lebih luas (termasuk NGO internasional seperti ActionAid dan NGO lokal seperti MYARADA); disamping itu ada juga kelompok dengan fokus hak-hak secara eksplisit (DISC- menekankan hak pangan dan buruh; CREAT menekankan hak konsumen dan pendidikan) dan kelompok dengan fokus lingkungan (Greenpeace India; Environment Support Group). Ada juga organisasi lain, termasuk partai politik (terutama CPI(M) dan jaringan akademis (contoh Association of Environmental Economist).

Legitimasi dan kekuasaan dari jaringan-jaringan anti RG ini tentu saja adalah isu utama. Hal itu memunculkan mobilisasi yang sangat baik pada kelompok yang beragam, membentuk koalisi di narasi-narasi sederhana seperti slogan- Bebas RG-nya Brazil atau penyetopan di Afrika Selatan atau slogan Monsanto Quit di India. Namun bagaimana mudahnya menyingkirkan koalisi seperti itu?

Apakah hal tersebut mempunyai kesempatan atau mempengaruhi kekuatan yang lainnya?

Seperti yang didiskusikan sebelumnya, pada hakikatnya semua aktivis terkemuka di ketiga negara berlatar berpendidikan baik, mereka yang terkoneksi dengan baik dalam pendanaan, kadang terkait berbagai bantuan donor internasional (HIVOS, ActionAid, Ford Foundation adalah diantara yang sudah disebutkan). Mereka mempunyai pengalaman sebagai aktivis dan dalam arena politik, di Brazil aktivis termekmuka ini memiliki pengalaman dalam perlawanan terhadap kediktatoran pada tahun 1970 dan 1980 dan untuk pemilihan Lula di tahun 2002-03; di India mereka memiliki pengalaman dalam gerakan lingkungan petani dan wanita dan upaya anti globalisasi yang lebih luas baru-baru ini; dan di Afrika Selatan mereka berpengalaman dalam perlawanan terhadap apartheid termasuk organisasi union dan boikot konsumen. Beberapa telah melakukan penyusupan kedalam proses pemilihan resmi itu sendiri. Apa yang mereka pahami sangat detail adalah dalam bekerjanya proses politik, dan fungsi dari birokrasi negara. Namun apakah karakter elite dari kepemimpinan gerakan merupakan masalah? Apakah ini sebagaimana beberapa menyarankan, merusak legitimasi dari klaim mereka? Untuk menjawab pertanyaan sulit ini diperlukan peninjauan lebih dalam dari asalnya dan posisi politik dalam konteks kelompok anti RG

Di Afrika Selatan, sejarah yang baru-baru ini mengenai perlawanan anti Apartheid telah membentuk banyak kelompok anti RG. Persatuan buruh tentu saja menjadi pusat pada oposisi rezim apartheid dan kunci dari kelompok serikat COSATU yang secara formal menjadi bagian dari ketiga aliansi yang berpengaruh di negara. COSATU secara abstrak memberi dampak sedikit pada kampanye anti RG secara langsung, namun kelompok anti

RG menegaskan komitmen kelompok union pada penyebab bahwa mereka yang membawa banyak pengaruh. Jaringan anti RG didominasi oleh kelompok pakar lingkungan konvensional. Beberapa darinya hampir konservatif dan elite, tentu saja menurut sejarah, termasuk kalangan botani dan wildlife; kelompok yang menunjuk diri mereka sebagai radikal, namun dalam "deep green", dari pada arah "Eurocentric", seperti EJNF yang bekerja dalam isu lingkungan di kota kecil dan memiliki keanggotaan beragam. Bersama-sama mereka memberikan cerita alternatif dalam pembangunan Afrika Selatan, namun mereka bisa mempengaruhi peristiwa di Afrika Selatan konteks nya sangat terbatas, memberikan partai yang berkuasa untuk berkomitmen secara kuat pada trayek pembangunan neoliberal yang sangat beragam.

Di Brazil, mimbar utama dalam pembangunan jaringan anti RG masuk ke dalam daftar MST. Pada mulanya diragukan, setelah itu dengan segera terlihat oleh pemimpin gerakan bahwa itu merupakan keuntungan. Meningkatnya gerakan internasional dengan website dan kelompok pendukung di USA dan Eropa, ini merupaka langkah mudah. Sehingga, dengan kehadiran aktivis yang memenuhi Porto Alegre untu menghadiri festival WSF setiap tahun, MST mampu untuk membangkitkan profil internasional mereka (dan juga lokal) dan memimpin hubungan dengan *hall-of fame* aktivis internasional anti RG. Bagi kelompok NGO kecil, poin yang menjadi pokok anggota jaringan merupakan hal yang sulit. Mereka tidak lagi dapat dikritik karena tidak mewakilkan, tidak bertanggung jawab, NGO yang didanai dari luar , namun terkait dengan gerakan massa dengan hubungan resmi dan informal dengan PT (partai buruh), ini memungkinkan pengaruh politik lebih baik dari yang mungkin sebelumnya. Apakah argumen untuk legitimasi dan kekuasaan ini memperjuangkan pengawasan adalah pertanyaan terbuka,

ini adalah simbol dari kepentingan aliansi dalam isu dan organisasi, gerakan anti RG dapat memberikan suara alternatif, menantang kebijakan pemerintah dalam berbagai aksi, termasuk usaha yang sedang berlangsung secara formal untuk mengenalkan tanaman RG.

Sesuatu yang serupa terjadi di India. Di india sejarah gerakan sosial menjadi signifikan, dalam perlawanan terhadap penindasan pedesaan disekitar waktu "masa darurat" dan keterlibatan sehari-hari dalam isu hak-hak pada level lokal. Dan juga, simbol pentingnya gerakan tersebut menjadi terpusat. Seperti yang sudah dibahas, KRRS di Karnataka yang menjadi garis terdepan dalam perlawanan anti RG di India. Namun KRRS pada dasarnya adalah aliansi dari petani yang secara relatif kaya dari Karnataka yang tertarik untuk mendesak klaim mereka bagi subsidi pertanian (khususnya listrik murah dan air untuk irigasi) dan pengendalian harga (baik pemasukan dan pengeluaran), dan posisi anti RG yang tidak sulit bagi anggota (tentu saja menjadi fokus perdebatan pemecah belah). Mereka ikut serta dalam kampanye yang lebih luas mengenai koordinasi di India, anti-globalisasi, anti WTO dan anti paten dari tanaman RG, sebagian besar ide ini dari dorongan Nanjundaswamy yang karismatik dan persuasif. Namun mengetahui pentingnya pilihan pedesaan, pemerintah negara harus menangani mereka secara serius. Bahwa sejumlah besar dari petani berbalik mendukung demonstrasi dan aksi kemungkinan ini menjadi bukti dari pentingnya organisasi sebagai pelobi yang efektif dalam isu lain, daripada komitmen untuk menyingkirkan tanaman RG sendiri. Namun di Brazil, simbol asosiasi dengan organisasi yang berbasis petani menjadi hal penting bagi organisasi lain yang terkait dengan jaringan anti RG. Sebagaimana NGO kecil dengan keanggotaan yang banyak, mereka harus membuat suatu kasus dalam pembicaraan mereka dalam hal petani dan pedesaan miskin.

Terkadang mereka melakukan ini dengan cara sederhana, berbicara sebagai perantara dengan pengalaman orang tertentu dan sebagai hasil dari perjanjian lahan mereka yang sedang berlangsung melalui proyek. Kadang hubungan yang dibuat untuk memperluas lahan mobilisasi, singkatnya disekitar hak pangan, yang mana dikelola untuk menggerakan masyarakat dari kehidupan yang beragam. Kadang sesuatu yang agak melampaui batas klaim membentuknya karena hubungan pada kelompok tertentu, NGO berbicara atas dasar kategori besar dari masyarakat (miskin, wanita, suku, dan lain-lain).

Demikian representasi politik tetap menjadi isu komplek dalam jaringan anti RG di ketiga negara. Beberapa masalah utama timbul dari penilaian ini: apakah fakta dari kontradiksi dan ketidakkonsisten ganda ada, dan kesetiaan dan aliansi terkadang bersifat sementara dan dangkal, menyembunyikan pertentangan, merusak legitimasi sudut anti RG? Dengan membongkar kompleksitas dalam politik gerakan anti RG, apakah ini secara otomatis menyarankan bahwa di berbagai cara posisi pro RG adalah dengan kegagalan, benarkah itu? Bagian kesimpulan akan beragumen tentang apresiasi yang lebih menarik dari gerakan agraria dan perlawanan di tanaman RG, yang berisi pentingnya mengemukakan argumen beragam dan posisi berbeda pada perdebatan terbuka dan demokratis yang tanpa pemasukan akan pasti akan ditutup dan ditangkap oleh ketertarikan khusus dan sempit.

Kesimpulan

Mobilisasi anti RG yang dibahas di bab ini -seperti yang kita ketahui- lebih banyak kalahnya, dan memperlihatkan rapuhnya hubungan jejaring mereka daripada cara gerakan sosial "klasik" yang digambarkan pada pada bab diatas. Jaringan ini terhubung pada aktor dan

perdebatan global yang memiliki karakter transnasional yang berbeda, sehingga selalu di tempatkan pada perlawanan lokal dan proses politik. Mereka bangkit sebagai aliansi yang selektif dan strategis diantara kelompok yang beragam dan berbeda diantara berbagai isu. Beberapa memang menyingkirkan ini sebagai sesuatu yang tidak koheren dan sangat kurang substantif, namun mereka kadang menambahkan perspektif alternativ terhadap masa depan agraria pada garis standar pandangan Neoliberal, bahkan jika terkadang sangat buruk diartikulasikan dan menimbulkan kontradiksi. Posisi tersebut adalah hasil dari kompleksitas koalisi yang ber-hybrid antara kepentingan dan ide, sebagaimana didiskusikan diatas, itu tidak memberi definisi (dari kelas) kepentingan. Dengan koneksi global mereka dan elite, berpendidikan dan kepemimpinan di kota, mereka dapat dilihat terlepas dari realitas pedesaan dan perlawanan agraria. Namun resonansi dan hubungan tentu saja ada, sebagaimana yang kita lihat dari kekuatan tuntutan mereka, potensi kekuatan politik yang mereka miliki, yang berada dalam hubungan isu lokal, nasional dan global; pedesaan dan perkotaan; produsen dan konsumen; elite dan kaum miskin yang tekonstruksi dan termobilisasi.

Meskipun kritikan diberikan secara merata pada kelompok anti RG dalam pembangunan dunia, aktivisme seperti itu tidak dapat dibaca dengan mudah sebagaimana yang terlihat dari persitiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika berbagi dan tukar-menukar menjadi fitur yang penting dari mobilisasi anti RG, upaya-upaya yang difokuskan secara lokal dan negara telah menghadapi karakter yang sangat berbeda. Melalui pembentukan strategi aliansi dan menghubungkan perdebatan RG kedalam perhatian yang lebih luas,maka mungkin untuk memasukkan isu RG ke dalam agenda politik lokal, nasional, dan global dalam cara yang berbeda. Maka dari itu isu GM menjadi ikon;

mewakilkan rangkaian luas perlawanan dan fokus pada mobilisasi di pembagian dan lokal ganda.

Namun upaya-upaya yang didiskusikan diatas membedakan pembatasan. Pertama yang diakui oleh kebanyakan aktivis adalah isu representatif. Siapakah dari kelompok aktivis jaringan yang secara bebas berbicara? Sementara yang lain berikut serta dalam demonstrasi perubahan bahwa mereka adalah "wakil rakyat"; yang lain lebih optimis. Mereka memperdebatkannya dengan memunculkan perdebatan, membentuk "ruang yang tidak berkesinambungan", mereka membuka diskusi yang mana sebaliknya akan ditutup. Mereka beragumen hal ini penting untuk demokrasi dan juga membenarkan term mereka sendiri. Tantangannya adalah untuk mendukung pertimbangan di ruang yang tidak berkesinambungan, mendapati yang lain dalam diskusi. Ketika tendensi pembahasan politik dan ekonomi dibawah kondisi neoliberalisme yang juga didominasi oleh perhatian dari keterlibatan dalam pasar ekonomi global, pembukaan bagi pertimbangan demokrasi yang luas yang kadang sempit, membuat peran utama dari LSM dan kelompok kampanye dalam membuat klaim nyata dari demokrasi yang gigih.

Kedua adalah dampak dari isu. Bagaimana kesuksesan strategi aktivis ini? Apakah aktivis membuat perbedaan, melebihi iritasi marginal sampai pada mereka yang berkuasa? Di ketiga negara ini menjadi perdebatan secara besar oleh kelas menengah dan perkotaan. Ini bukan isu pemilihan, juga bukan mobilisasi massa sebenarnya, kecuali melalui pilihan bersama dan keterkaitan isu. Alih-alih begitu, hal ini meningkatkan keterikatan dengan perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan baru dari kapitalisme kontemporer dan masyarakat; isu mengenai ketahanan; ketidakrataan; hak; keadilan dan lainnya. Sebuah usaha yang mungkin untuk membentuk alternatif

narasi utama, satu pengajuan pertentangan pada tendensi pandangan dunia mengenai neoliberalisme. Isu yang lebih besar tidak akan diselesaikan dalam perdebatan mengenai RG tentu saja. Bagaimanapun juga sebagaimana studi ini memperlihatkan lambang dari perlawanan yang luas, dengan kepentingan politik yang berkuasa yang sedang digunakan. Di ketiga negara ada aliansi yang progresif secara relatif di pemerintah di pusat, semuanya menyatakan berkomitmen pada keadilan sosial, pembangunan dan penghapusan kemiskinan. Namun agenda ekonomi neoliberal, butuhnya untuk menarik investasi asing dan pengaruh politik global sangatlah kuat. Hal ini membuatnya kedalam perdebatan berbasis kerangka yang berbeda dari pembangunan yang tentu saja sangat sulit.

Posisi anti RG secara pasti menghasilkan ambiguitas dan tegangan di jaringan aktivis. Beberapa kelompok merasa nyaris lebih nyaman berfokus pada isu lingkungan; fokus pada masalah keamanan pangan konsumen; sementara yang lain mengkerangkai perdebatan dalam hak dan keadilan. Bagaimanapun hubungan ini berkaitan dengan masalah yang lebih luas tentang perubahan politik dan agraria terkadang tidak jelas. Mencakup barisan yang luas kadang berarti merencanakan strategi dengan teliti dalam beberapa isu yang kuat, dengan kontradiksi dan tegangan yang ditunda. Namun menghindari beberapa isu yang dalam juga berarti koalisi dan aliansi yang bertiras-tiras. Ketika petani tertarik untuk ikut serta dalam pasar global untuk memperbaiki mata pencaharian mereka, bagaimana ini menyelaraskan dengan posisi di ketahanan pangan yang ditekan oleh beberaoa, sebagai contoh? Dan ketika petani menunjukan perhatian nyata mengenai perubahan di ekonomi desa dan kondisi agraria, mereka kadang enggan untuk mencoba tanaman RG yang baru, apakah itu "dipajak" atau disupplai oleh perusahaan

multinasional. Kontradiksi ini tetap tidak terpecahkan dan tidak ditujukan pada kelompok anti RG.

Dikatakan, secara kolektif aktivis anti RG telah mengatur kadang hanya secara temporari dan pada batasan dan selalu dengan ambiguitas yang dalam dan kontradiksi yang terjadi, untuk mengartikulasikan rangkaian posisi yang menunjukkan bagaimana perdebatan mengenai tanaman RG memang benar-benar debat tentang banyaknya rangakaian isu; mengenai masa depan pertanian dan petani skala kecil; tentang kontrol kerjasama; hak properti; peraturan perdagangan dan sebagainya. Sementara komentator pro RG berargumen bahwa aktivis seperti itu menyelundupkannya dalam perdebatan yang tidak seharusnya menjadi bagian diskusi. Aktivis anti RG beragumen secara keras bahwa perdebatan tersebut mengenai nilai dan politik harus dilihat sebagai pusat, bagian dari negosiasi baru dalam kewarganegaraan, pengetahuan dan politik di era globalisasi.

Referensi

ActionAid, 2000. *Indian Farmers Judge GM Crops*. ActionAid Citizens' Jury Initiative. London: ActionAid.

AgBioIndia, 2002. 'Demand for Monsanto's Ouster Picks Up: Karnataka Bans Monsanto's Bt Cotton Seeds'. 11 August. http://ngin.tripod.com/110802b.htm, Accessed 4 February 2008.

Appadurai, A., 2000. 'Grassroots Globalization and the Research Imagination'. *Public Culture*, 12 (1): 1–19.

Assadi, M., 2002. 'Globalisation and the State: Interrogating the Farmers' Movement in India'. *Journal of Social and Economic Development*, 4 (1): 42–54.

Bond, P., 2000. *Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa*. Durban: Natal University Press.

Brass, T., ed., 1995. *New Farmers' Movements in India*. London: Routledge.

Business Day, 2003. 'Biowatch SA Says Modified Organisms Need Regulation'. 20 August. Rosebank, Johannesburg, South Africa.

Business Day, 2004. 'Open Wide for GM Bite'. 6 February. Rosebank, Johannesburg, South Africa.

Mobilizing Against GM Crops in India, South Africa and Brazil 173

Business Line, 2000. 'MNC Seed Interest vs Farmers' Plight'. 26 September. Chennai, India.

Castells, M., 1997. *The Information Age: Economy, Society and Culture; Volume 2: The Power of Identity*. Malden, MA: Blackwell.

Da Silveira, J.M. and I. De Carvalho Borges, 2005. 'An Overview of the Current State of Agricultural Biotechnology in Brazil'. Paper presented at Science, Technology and Globalization Project, Agricultural Biotechnology for Development – Socioeconomic Issues and Institutional Challenges, Bella Villagio, Bellagio Italy, May–June 2005. Belfer Center, Kennedy School of Government, Harvard.

Deccan Herald, 1998. 'KRRS to File Criminal Case Against Monsanto'. 18 December. Bangalore, India.

Dow Jones, 2000. 'Brazil Government Fights Back Against Anti-GMO Court Ruling'. 10 July. New York, USA.

Dow Jones, 2001. 'GMO Soy Planting in Brazil Said to Be Spreading North'. 18 December. New York, USA.

Economic Times, 1999. 'Monsanto Proposal to Genetically Alter Rice Draws Flak'. 6 August. New Delhi, India.

Economic Times, 2001. 'KRRS Opposed Commercial Release of Bt Cotton Seeds'. 20 June. New Delhi, India.

Edelman, M., 2001. 'Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics'. *Annual Review of Anthropology*, 30: 285 – 317.

Ellison, N., 1997. 'Towards a New Social Politics: Citizenship and Reflexivity in Late Modernity'. *Sociology*, 31 (4): 697–717.

Financial Express, 1999. 'Farmers Support Biotech Use for Increasing Yield – Monsanto Study'. 31 August. New Delhi, India.

Financial Express, 2000. 'Farmer Leader Pleads for Immediate Release of GM Crops in India'. 24 April. New Delhi, India.

Financial Times, 2001. 'Brazil Police Add to Bové's Radical Status – Anti-Globalisation Activist'. 31 January. London, UK.

Financial Times, 2004. 'Monsanto Takes GM Crusade to Brazil'. 6 February. New York, USA.

Friedberg, S. and L. Horowitz, 2004. 'Converging Networks and Clashing Stories: South Africa's Agricultural Biotechnology Debate'. *Africa Today*, 51 (2): 3–25.

Glover, D., 2007. 'The Role of the Private Sector in Modern Biotechnology and Rural Development: The Case of the Monsanto Smallholder Programme'. DPhil thesis, Institute of Development Studies, University of Sussex.

Habib, A. and V. Padayachee, 2000. 'Economic Policy and Power Relations in South Africa's Transition to Democracy'. *World Development*, 28 (2): 245– 63.

Hajer, M., 1995. *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford: Oxford University Press.

Heller, P., 2001. 'Moving the State: the Politics of Democratic Decentralization in Kerala, South Africa and Porto Alegre'. *Politics and Society*, 29 (1): 131–63.

Herring, R., 2005. 'Miracle Seeds, Suicide Seeds, and the Poor: Mobilizing Around Genetically Modified Organisms in India'. In *Social Movements and Poverty in India*, eds R. Ray and M.F. Katzenstein, 203 – 32. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishing Group.

Herring, R., 2007. 'Stealth Seeds: Bioproperty, Biosafety, Biopolitics'. *Journal of Development Studies*, 43 (1): 130 – 57.

Huang, J., S. Rozelle, C. Pray and W. Qinfang, 2002. 'Plant Biotechnology in China'. *Science*, 295: 674 –77.

Jepson, W., 2002. 'Globalization and Brazilian Biosafety: the Politics of Scale over Biotechnology Governance'. *Political Geography*, 21 (7): 905 – 25.

Lahiff, E., 2003. 'Land and Livelihoods: The Politics of Land Reform in Southern Africa'. *IDS Bulletin*, 34 (3): 54 – 63.

Leach, M. and I. Scoones, 2007. 'Mobilising Citizens. Social Movements and the Politics of Knowledge'. IDS Working Paper 276. Brighton: Institute of Development Studies.

Lodge, T., 2003. *Politics in South Africa: From Mandela to Mbeki*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Mail and Guardian, 2000. 'SA Receives Bulk Shipments of Frankenfoods'. 25 February. Rosebank, Johannesburg, South Africa.

McAdam, D., S. Tarrow and C. Tilly, 2003. 'Dynamics of Contention'. *Social Movement Studies*, 2 (1): 99 –102.

Mercury, 2003. 'Government Hands Out Free GE Seeds in South Africa'. 27 August. Durban, KwaZulu, South Africa.

Nature, 2000. 'Smugglers Aim to Circumvent GM Court Ban in Brazil'. 25 November. London, UK.

New York Times, 2003. 'Monsanto Pursues Seed Pirates'. 13 June. New York, USA.

Omvedt, G., 1998. 'Terminating Choice'. *The Hindu*, December 26. Chennai, India.

Paarlberg, R., 2000. 'The Global Food Fight'. *Foreign Affairs*, 79 (3): 24–38.

Paarlberg, R., 2001. *The Politics of Precaution: Genetically Modified Crops in Developing Countries*. Baltimore, MD: John Hopkins Press.

Patel, R. and A. Muller, 2004. 'Shining India? Economic Liberalisation and Rural Poverty in the 1990s'. Food First Policy Brief 10. Oakland: Food First.

Pimbert, M. and T. Wakeford, 2002. 'Prajateerpu: A Citizens' Jury/Scenario Workshop on Food and Farming Futures for Andhra Pradesh, India'. Brighton: Institute of Development Studies and London: International Institute for Environment and Development. http://www.diversefoodsystems.org/lfs_docs/Prajateerpu.pdf, Accessed 4 February 2008.

Ray, R. and M.F. Katzenstein, eds, 2005. *Social Movements and Poverty in India*. Lanham, MD: Rowan and Littlefield Publishing Group.

Reuters, 2000a. 'Brazil Turns Away GM Argentine Corn'. 6 June. New York, USA.

Reuters, 2000b. 'Greenpeace Protest for Argentine GM Food Labels'. 20 July. New York, USA.

Reuters, 2003a. 'Brazil Lula Says Legalizing GM Soy Was Best Option'. 8 October. New York, USA.

Reuters, 2003b. 'Monsanto Invests to Improve GMOs' Image in Brazil'. 8 December. New York, USA.

RFSTE (Research Foundation of Science, Technology and Ecology), 1998. 'Indians Fight Biotechnology Giants: Implement "Operate Cremate Monsanto" '. Monsanto Quit India Campaign Press Release. RDFTE: New Delhi.

Rudolph, L. and S. Rudolph, 2001. 'Redoing the Constitutional Design: From an Interventionist to a Regulatory State'. In *The Success of India's Democracy*, ed. A. Kohli, 127–62. Cambridge: Cambridge University Press.

Samykta Karnataka, 1998. 'Police Protection to all American Companies in Bangalore City'. 25 November. Bangalore, India.

Scoones, I., 2005a. *Science, Agriculture and the Politics of Policy. The Case of Biotechnology in India*. Hyderabad: Orient Longman.

Scoones, I., 2005b. 'Contentious Politics, Contentious Knowledges: Mobilising Against GM Crops in India, Brazil and South Africa'. IDS Working Paper 256. Brighton: Institute of Development Studies.

Scoones, I., 2007. 'The Contested Politics of Technology: Biotech in Bangalore'. *Science and Public Policy*, 34 (4): 261–71.

Shah, E., 2005. 'Local and Global Elites Join Hands: Development and Diffusion of Bt Cotton Technology in Gujarat'. *Economic and Political Weekly* (Special Articles), 40(43): 4629–39.

Shiva, V., 1998. 'Terminating Freedom'. *The Hindu*, 26 December. Chennai, India.

Shiva, V., A. Emani and A. Jafri, 1999. 'Globalization and Threat to Seed Security: Case of Transgenic Cotton Trials in India'. *Economic and Political Weekly*, 34 (10): 601–13.

Shiva, V., A. Jafri, A. Emani and M. Pande, 2000. *Seeds of Suicide: The Ecological and Human Costs of Globalization of Agriculture*. Delhi: Research Foundation for Science, Technology and Ecology.

Stone, G., 2007. 'Agricultural Deskilling and the Spread of Genetically Modified Cotton in Warangal'. *Current Anthropology*, 48: 67–103.

Suhai, S., 2003. 'Monsanto's Claims are Uninformed'. *Times of India*, 12 March. New Delhi, India.

The Guardian, 2001. 'Jury Delivers "No" Verdict to GM Crops in Brazil'. 23 May. London, UK.

The Guardian, 2002. 'Brazil's Farms Minister Supports Gene-Modified Crops'. 7 December. London, UK.

The Hindu, 1999. 'Monsanto Turns to Food Crops'. 6 August. Chennai, India.

Thirtle, C., L. Beyers, Y. Ismael and J. Piesse, 2003. 'Can GM Technologies Help the

Poor? The Impact of BT Cotton in Makhathini Flats, KawZulu-Natal'. *World Development*, 31: 717–32.

Times of India, 1998. 'Monsanto Trials Illegal, Says Environmentalist'. 21 December. New Delhi, India.

Toni, A. and J. von Braun, 2001. 'Poor Citizens Decide on the Introduction of GMOs in Brazil'. *Biotechnology and Development Monitor*, 47: 7–9.

Xue, D., 2002. *A Summary of Research on the Environmental Impact of Bt cotton in China*. Nanjing: Greenpeace/Nanjing Institute of Environmental Sciences.

7

Perdagangan dan Bioteknologi di Amerika Latin: Demokratisasi, Pertentangan dan Politik Mobilisasi

Peter Newell

Pendahuluan

Sebuah jangkauan dari gerakan sosial telah diarahkan untuk memperjuangkan aturan tentang bioteknologi dalam perkembangan pertanian di Amerika Selatan. Penerapan tanaman GM (genetically modified/rekayasa genetik [RG]) oleh para pelaku pertanian besar global seperti Brasil dan Argentina, telah menimbulkan serangkaian pertanyaan utama tentang industrialisasi pertanian (Pengue 2005), masalah akses dan kontrol teknologi serta pilihan yang sulit tentang distribusi tanah dan penggunaannya secara berkelanjutan. Hubungan antara bantuan dan perdagangan juga menempatkan teknologi berada pada pusat pengembangan ekonomi politik di wilayah ini. Di samping pertentangan sekitar bioteknologi di blok Mercosur dan negosiasi pada Free Trade Area of America's accord (kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika), perjanjian perdagangan bilateral telah digunakan untuk memperkenalkan tanaman transgenik RG ke negara – negara yang

menjadikan pertanian sangat penting untuk sumber mata pencaharian dari jutaan petani yang miskin (seperti petani kentang di Peru). Sementara itu Negara – Negara yang mengadopsi sikap yang agak kritis terhadap teknologi seperti Bolivia telah menemukan jati diri merasakan diri mereka tunduk kepada tekanan politik yang sangat besar terhadap para eksportir RG seperti Amerika Serikat atas nama lobi agribisnis mereka.

Berlawanan dengan perubahan latar belakang dalam struktur regional dan global dari investasi dan produksi Negara agraris. Sebuah kesatuan yang menarik dari organisasi masyarakat dan gerakan sosial telah mengembangkan daftar susunan perlawanan ke pengawasan pertanian yang dilakukan perusahaan(Jansen dan Vellema 2004; Glover dan Newell 2004). Hal ini diambil dari pembentukan perjuangan diatas legitimasi, jangkauan dan hak kepemilikan intelektual. Pertanyaan fundamental tentang hak kepemilikan lahan telah meningkat yang diakibatkan oleh pergerakan seperti *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) dan Vía Campesina, juga disebabkan oleh kelangsungan penggunaan tanah yang mengharuskan menggunakan pola penempatan teknologi yang masih diragukan oleh cakupan luas kekuatan sosial yang berhubungan dengan efek sosial dan ekologis pertanian mono-crop (Peleaz dan Schmidt 2004). Dari sudut pembangunan dan mata pencaharian pedesaan, yang menghubungkan antara bioteknologi dan keamanan pangan telah menjadi perhatian utama di tengah isu ketahanan pangan, hal ini akan dieksplorasi di tempat lain dalam tulisan yang lebih terperinci.

Meskipun terjadi hubungan yang sangat erat di tiap isu dan agenda yang ada, di sini akan di fokuskan pada pertentangan kelompok-kelompok agraria dan lingkungan sekitar aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan bioteknologi di Amerika Latin. Secara tidak langsung

dalam hal ini akan berfokus pada *transnasional biotek* yang terkait dengan perjuangan mereka untuk mempromosikan bioteknologi di dalam negeri dan perjanjian perdagangan bilateral. Fokus dalam percekcokan ini adalah isu-isu tentang hak kekayaan intelektual (HKI), liberalisasi dan perlindungan pertanian, serta biosafety. Mengingat sifatnya yang tertutup dari proses yang berjalan, salah satu tantangan utama bagi gerakan ialah bagaimana untuk mendemokratisasi pembuatan kebijakan perdagangan (Newell dan Tussie 2006). Di beberapa hal, ini berarti bekerja dalam celah yang sempit dalam partisipasi lembaga yang ada di lingkup formal dalam proses pengambilan keputusan terutama antar-negara. Di lain sisi, ini merupakan kritik terhadap isu-isu pertanian yang dimasukkan dalam perjanjian perdagangan utama di wilayah ini, memang telah dilakukan upaya untuk melawan perjanjian itu dan membuka perdebatan kebijakan perdagangan terhadap pertanyaan mendasar tentang barang dan jasa yang harus tunduk (dan yang tidak boleh dipersoalkan) kepada perdagangan internasional dan yang, menguntungkan dari kebijakan yang diperkirakan akan menanggung biaya penyesuaian yang tak terelakkan (Newell 2007).

Penelitian ini difokuskan pada dua daerah kunci pemain dalam sektor bioteknologi, yaitu Argentina dan Brazil, yang memiliki pengalaman yang sangat berbeda dalam keterlibatannya dengan bioteknologi, yang mencerminkan tingkat yang kontras akan mobilisasi masyarakat sipil seputar permasalahan ini, dan perbedaan tradisi politik pedesaan dan strategi negara terhadap teknologi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memobilisasi dan bagaimana gerakan protes itu di mobilisasi, dan tentang pilihan strategis yang timbul ketika gerakan protes dengan beragam latar sejarah, basis keanggotaan dan budaya ini melakukan aksinya . Isu-isu akuntabilitas, representasi dan menjalankan partisipasi

melalui analisis strategi organisasi dan pembuatan hak yang diadopsi oleh berbagai eklektis kelompok untuk menentang peran bioteknologi dalam tatanan produksi pertanian, lembaga yang mengelola hubungan dan wacana-wacana yang mempertahankannya . Secara khusus, analisis ini akan berpusat pada respon dari mereka yang memobilisasi keprihatinan masyarakat miskin di garis depan "Revolusi gen" seperti yang dilakukan di daerah pedesaan Amerika Latin.

Meskipun aktivis telah membuat kemenangan yang penting, dengan membuka perdebatan tentang bioteknologi terhadap bermacam-macam suara, menentang tatanan struktur yang telah didirikan untuk mengelola teknologi dan membangun arena alternatif untuk memperdebatkan kemungkinan kerugian dan manfaatnya, ujungnya ternyata berakhir dengan dijalankannya strategi negara, yang menerima bioteknologi sebagai kunci daya saing global ekonomi mereka, dengan modal elemen dimana warga negara dan warga negara asing sangat dibatasi kesediaan ruang untuk menentang bioteknologi. Selain itu, sementara organisasi NGO lingkungan membuat beberapa kemenangan dalam memajukan pembaruan peraturan dan menggunakan proses hukum untuk menunda adopsi teknologi itu, gerakan sosial pedesaan, meskipun basis sosial mereka lebih luas dan koneksi internasional yang kuat, belum mampu untuk menggeser perdebatan tentang bioteknologi dari bio-safety dan tanggung jawab penanganan untuk kepemilikan tanah, hak milik dan hubungan yang tidak merata dari kekuasaan yang mengukung mereka.

Pertanian Bioteknologi di Amerika Latin

Meskipun klaim oleh para pendukungnya bahwa bioteknologi pertanian memiliki potensi untuk meningkatkan hasil di sepanjang musim kemarau dan tahan terhadap penyakit tanaman, tetapi pengurangan penggu-

naan pestisida, kekurangan gizi dan kelaparan (Conway 1999; Lipton 2001), telah menghasilkan suatu tingkatan kontroversi yang belum pernah terjadi di Eropa dan bagian Asia dan, seperti yang akan kita lihat di bawah ini, juga di Amerika Latin. Kritik difokuskan pada keprihatinan tentang akibat bio-safety (potensi hilangnya keanekaragaman hayati dan kontaminasi varietas non-RG), dampak pada kesehatan manusia dan tingkat kontrol kemampuan teknologi perusahaan untuk menyediakan mata pencaharian pada masyarakat miskin pedesaan (Warwick, 2000; FoEI 2007).

Di Amerika Latin, bioteknologi pertanian modern diadopsi dari latar belakang reformasi struktural ekonomi yang terjadi disana dari awal tahun 1990-an. Untuk negara-negara di Amerika Latin, reformasi neo-liberal telah menghasilkan transformasi dalam tatanan produksi agraria, konsentrasi kepemilikan tanah dan penghapusan dukungan kebijakan kepada petani miskin, semua ditujukan untuk intensifikasi produksi untuk memenuhi pasar ekspor (Kay 2002; Bellisario 2007; Thrupp 1996; Oya 2005; Murray 2006). Penyerapan bioteknologi dengan paketnya yaitu bibit, pupuk dan kontrak politik teknologi pertanian dan budidaya tanaman satu jenis menduduki tempat yang nyaman dengan organisasi yang berorientasi agribisnis, dan pertanian besar. Agribisnis memiliki peran penting dalam strategi akumulasi modal dari negara terbesar di wilayah ini. Sektor agribisnis Brasil masih menyumbang lebih dari 40 persen dari total GNP. Brasil adalah Negara eksportir ketiga terbesar di dunia dalam hal produk pertanian dan setelah itu Amerika Serikat yang merupakan produsen kedelai terbesar (meskipun bukan produsen terbesar kedelai RG), sisanya, 7,5 persen berasal dari negara – negara pengekspor lainnya. Selain itu, menurut Departemen Pertanian AS sendiri, Brasil memiliki sumber daya lahan yang cukup untuk memperluas areal dan produksi kedelai

untuk menduduki posisi utama yang selama ini diduduki AS (Peleaz dan Schmidt 2004). Pada tahun 2006, Brasil adalah pembudidaya ketiga terbesar tanaman RG di dunia, sekarang disana sedang membudidayakan 11.500.000 hektar tanaman RG. Angka ini menjelaskan mengapa 'di Brasil, kebijakan politik pertanian selalu di utamakan' (Paarlberg, 2001, 68). Sementara itu Argentina, dengan 18 juta hektar lahan budidaya RG, kini menjadi produsen terbesar dan eksportir tanaman RG kedua di dunia, kira – kira sebesar 23 persen dari produksi global (James 2006).

Bagaimanapun juga yang menarik tentang posisi Brasil, adalah bahwa hal itu berlanjut menjadi sumber utama untuk pembuatan tepung kedelai non-biotek. Ini menjelaskan mengapa Brasil telah menjadi sebuah situs yang signifikan dalam politik perebutan bioteknologi dan cakupan sosial yang lebih luas, atau menempatkan diri sebagaimana Paarlberg katakan 'yang penting perluasan tanah 'selama' dan 'dalam' pertentangan global dengan tanaman RG '(2001, 67). Perusahaan bioteknologi Brasil mengatakan: "kami sangat berharap bahwa domino terakhir akan jatuh '.[159] Untuk inilah alasan penentangan yang dilakukan oleh kelompok lingkungan hidup dan kelompok-kelompok pedesaan terhadap pengembangan RG, yang menurut juru bicara perusahaan itu juga, "telah membuat sebuah situasi yang tak mengenakkan di Brasil". Mereka tahu kalau itu terjadi, semua akan hilang '. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya situasi saat ini digambarkan secara akurat. Hal ini juga menjelaskan dengan baik mengapa perusahaan seperti Monsanto yang mewakili skala besar melakukan penanaman tanaman RG secara illegal sebagai bukti permintaan petani untuk produk mereka

[159] Bob Callanan, juru bicara untuk asosiasi Kedelai Amerika, dikutip dalam Peleaz dan Schmidt (2004, 237).

ditengah pengiriman pesan yang jelas tentang kesia-siaan klaim untuk menjaga Brasil bebas dari RG. Kembali pada tahun 2001, perkiraan industri bibit adalah bahwa dari 2 juta hektar kedelai yang ditanam di Rio Grande do Sul, antara 400.000 dan 750.000 hektar merupakan transgenik (dikutip oleh Paarlberg 2001, 81). Bukti dalam penelitian ini ternyata petani di Paraguay menerima bibit illegal dari sebuah perusahaan pembibitan, inilah bentuk penetrasi pasar yang diusulkan oleh perwakilan implement utama yang kemudian meminta aparat keamanan perusahaan untuk mengacaukan perlawanan terhadap teknologi dan mengelilingi proses formal pengambilan keputusan.

Kita akan lihat bagaimana gelombang perlawanan terhadap teknologi secara dramatis memperlambat laju persetujuan komersial tanaman RG, tapi bagaimanapun sekali lagi ini telah dipercepat dengan dibuatnya persetujuan hukum dan resolusi tentang biosafety yang baru-baru ini di Brasil pada tahun 2005, sedikitnya untuk sementara waktu, pertanyaan dari badan pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menyetujui komersialisasi mereka. Dalam hal ini, aktivis mungkin telah memenangkan pertempuran tapi kalah dalam perperangan, Sedangkan di Argentina mungkin aktivis tidak pernah sampai ke medan perang.

Penerapan teknologi tidak sama pelaksanaannya di seluruh daerah. Brasil terlihat ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi sebagai pusat strategi pertanian yang alasannya dibahas di bawah ini. Argentina justru melihat potensi teknologi adalah bagian dari strategi meningkatkan pertumbuhan negara dan konsolidasi untuk memperkuat posisinya di pasar global. Tujuh jenis tanaman RG ini telah disetujui untuk dikomersialisasikan di Argentina, semuanya merupakan tanggapan terhadap evaluasi yang diminta oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Kedelai RG yang paling luas adalah tanaman RG yang ada di Argentina

hampir terdiri dari 90% dari 12 juta hektar yang ditanam pada tahun 2001/2002 dan hampir setengah dari semua produksi pertanian di Argentina pada tahun 2002/2003. Menggaris bawahi kegiatan ekspor yang didukung secara alami melalui model ini, pada tahun 2003, 98 % kedelai ekspor Argentina berupa kacang, bungkil kedelai untuk pakan ternak dan minyak kedelai, mewakili sekitar 20 persen dari total ekspor Argentina pada tahun 2004 (Galli 2005). Ini menjelaskan bahwa Argentina peka terhadap gangguan arus perdagangan, keikutsertaan perusahaan dalam kasus perdagangan WTO terhadap de facto Uni Eropa dalam penundaan tanaman RG adalah buktinya.

Lebih penting lagi, ekspor RG yang diperoleh Argentina diperbarui setelah gagal dengan kucuran hutang nasional pada bylan desember 2001 sejumalh US $ 140 milyar, yang kemudian mengakibatkan devaluasi besar. Seorang pedagang pertanian Argentina (chief executive Cresud) berkomentar: 'IMF harus bahagia bersama kami. Tanpa agribisnis dan minyak, Argentina tidak akan memenuhi surplus tuntutan mereka '(Elsztain, dikutip dalam Vara 2005, 8). Pemerintah memutuskan bahwa pendapatan yang berasal dari ekspor akan membantu meningkatkan pendapatan asing yang pada gilirannya akan membantu orang miskin. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dikenakan atas ekspor kedelai RG, saat ini 6 % dari seluruh pendapatan pemerintah, dan itu telah digunakan untuk mensubsidi pasar internal (Ekonom 2006).[160] Penghematan lainnya berefek pada pengurangan penggunaan pestisida dan semakin tingginya erosi karena pengolahan tanah yang kurang intensif. Meskipun ada beberapa bukti dampak

[160] Pajak tersebut (pada tingkat yang berbeda) telah ada sejak tahun 1991, tapi pemerintah mengklaim pendapatan berasal dari sumber ini digunakan untuk memerangi kemiskinan yang diperoleh sesudah krisis keuangan pada 2001/2002.

tersebut, laporan menunjukan bahwa sampai saat ini laporan yang diambil dari berbagai isu yang lebih luas kurang positif, seperti bukti meningkatnya bahan kimia impor (seperti glifosat dari Cina), terjadinya peningkatan penggundulan hutan terkait dengan pembukaan lahan untuk produksi RG (Greenpeace 2006a), serta terjadinya konsentrasi kepemilikan tanah dan penurunan kinerja antara buruh menengah ke bawah dengan rantai pasokan pertanian. Namun demikian, politik agribiotech sering disebut sebagai "non-isu 'di Argentina. Dengan kekuatan penyelarasan kepentingan negara dan nasional dan modal asing tentang nilai bioteknologi, perlawanan sekitar akses utama dan kepemilikan teknologi, lebih dipentingkan daripada desirabilitas sosial dan istilah lingkungan. Persentase pertanian ditujukan kepada biotek dan persentase ekspor berbasis pertanian membuatnya sangat jelas bahwa bahan kontribusi sektor biotek terhadap perekonomian Argentina sangat besar. Memang, persetujuan disusun disekitar sistem potensi ekspor teknologi[161].

Mobilisasi

Pada latar belakang , telah dibahas tentang bentuk mobilisasi yang sangat tidak merata di seluruh tingkat nasional dan dalam hubungannya dengan arena pembuatan kebijakan transnasional. Pertanyaan tentang siapa yang memobilisasi merupakan sumber perselisihan di antara para peneliti. Secara umum, sementara kampanye kelompok-kelompok urban berbasis lingkungan berfokus pada isu biosafety dan mengadopsi strategi berbasis hukum untuk

[161] The DNMA (Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios) membuat penilaian terhadap potensi ekspor tanaman yang sedang dipertimbangkan untuk komersialisasi. Ini dikenal sebagai 'cermin kebijakan ': tidak mengkomersilkan tanaman yang belum disetujui di kunci pasar ekspor Argentina.

terlibat dengan rezim peraturan yang saat ini, gerakan sosial pedesaan justru memasukkan bioteknologi ke dalam khasanah kampanye bukan sebagai suatu teknologi unik yang dapat menghasilkan risiko baru, politik baru dan memerlukan bentuk-bentuk kampanye baru. Sebaliknya, secara cepat diserap dalam prioritas kampanye yang ada, bingkai ideologi dan cara tindakan kolektif.

Sepanjang ini, Scoones, misalnya, menarik perbedaan antara 'pusat kota' -yang terdiri populasi kelas menengah yang signifikan serta kehadiran NGO. Mereka merupakan bagian dari masyarakat metropolitan, sirkuit elit di mana jaringan aktivis terpusat disana- dan daerah desa pedalaman dimana tempat wacana dimana jaringan aktivis yang berbeda mungkin ada (2005, 3).Peleaz dan Schmidt mengatakan sebaliknya, 'itu akan menyeret kita pada kesimpulan yang salah, bagaimana dengan tuntutan hukum yang dibawa oleh IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa lakukan Consumidor) dan Greenpeace, tentang perlawanan terhadap lembaga-lembaga RG di Brasil baru-baru ini dan terutama oleh organisasi-organisasi urban yang menggerakkan konsumen dan lingkungan. Mereka berpendapat, 'resistensi ini adalah hasil langsung dari sebuah gerakan yang menantang model Revolusi Hijau dan modernisasi pertanian pada akhir tahun 1970-an' (2004, 239).

Penekanan inilah yang belakangan ini menimbulkan klaim hak-hak petani dan otonomi dalam kaitannya dengan produksi benih dan upaya yang konsekuen untuk menolak perpanjangan hak milik atas bahan genetik bagi perusahaan. Dalam prakteknya, kelompok yang berbeda, bisa menjadi bagian dari kampanye untuk audiens yang berbeda tergantung pada unsur perhatian yang mereka terima. Sebagai contoh, masalah pelabelan dan larangan iklan hanya membangun kekhawatiran kelas menengah perkotaan, sementara efek sosial-ekonomi, mata pencaharian dan keprihatinan perdagangan, bergaung lebih kuat di

kelompok-kelompok pedesaan yang terpinggirkan yang lebih langsung terkena. Hal ini jelas bahwa beberapa kasus wacana dan cara keterlibatan diperlukan untuk mempengaruhi negara, dibandingkan dengan aktor perusahaan, misalnya. Hal ini juga mencerminkan pilihan ideologis tentang apakah tujuan kampanye yang dicapai melalui keterlibatan pemerintah di ranah kelembagaan formal, karena bertentangan dengan sikap oposisi melalui aksi massa.

Protes yang berbeda dapat diamati dengan banyak cara di ENGO (Environmental NGO) yang terlibat dalam isu ekonomi dan dalam perdebatan teknis tentang tanaman biosafety. Sampai batas tertentu, mereka menerima perdebatan dengan wacana yang dibatasi oleh peraturan. Seperti catatan Scoones, di sini yang bahaya adalah "jenis ilmu yang disebarkan dan sifat argumen yang digunakan dalam menanggapi esensi yang dibingkai oleh posisi pro-RG '(2005, 39). Penekanan yang paling banyak adalah pada perbaikan mekanisme kontrol dan pengawasan, keahlian deskripsi yang mereka bawa untuk keprihatinan dan menunjang keanggotaan mereka. Hal ini berbeda dengan gerakan yang berusaha untuk menantang struktur produksi dan kepemilikan yang menciptakan bioteknologi. Bahkan di dalam negara yang berbeda. Sementara ruang masuk lingkungan NGO cenderung banyak mengarah ke pusat sekitar kementerian Lingkungan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan biosafety, Departemen Pertanian dan Ekonomi sering menjadi sasaran gerakan pedesaan, mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara langsung berdampak pada mata pencaharian. Namun, ketika merumuskan kebijakan perdagangan, agraria dan lingkungan kelompok ini jarang memiliki hubungan yang kuat dengan departemen perdagangan dan keuangan, jarak pengaruh kebijakan bertambah buruk dalam lembaga-lembaga regional seperti

Mercosur, yang memiliki fungsi yang kuat pada hubungan antar pemerintah.

Meskipun dengan latar belakang dan strategi yang berbeda, situasi ini dapat meningkatkan hubungan antara NGO dan gerakan sosial di perkotaan dan di pedesaan untuk melayani kebutuhan masing-masing. Meskipun perlawanan terhadap Lembaga RG secara tradisional berasal dari masyarakat kota yang berbasis lingkungan dan kelompok konsumen, tetapi ada juga serikat petani yang besar, seperti gerakan petani tak bertanah (MST) dan Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian (CONTAG) di Brazil, mereka juga menyatakan penentangan terhadap RGO. CONTAG, misalnya, agenda mereka pada tahun 2002 adalah berkampanye melawan produksi dan komersialisasi RGO, dan untuk pelabelan RGO yang telah dikomersialisasikan. Hubungan kelompok lain telah melayani gerakan pedesaan dan NGO. Catatan Peleaz dan Schmidt: "munculnya. . . gerakan yang mengarah pada penguatan otonomi petani kecil 'meningkatkan daya tawar organisasi sosial di sektor pedesaan dan memberikan legitimasi yang diperlukan bagi NGO untuk mewakili kepentingan politik sektor pedesaan dalam Kongres-kongres' (2004, 242).

Via Campesina merasa berkepentingan dalam membawa MST ke dalam perjuangan melawan pertanian RG, sehingga dapat memperluas basis perjuangan sosial dan dengan demikian ini lebih dirasakan sebagai suatu legitimasi. kelompok yang mewakili produsen kecil, mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mereka melakukan ini secara efektif, mengatasnamakan kredibilitas moral dan politik kepada koalisi untuk bertindak atas nama dan membela kepentingan produsen kecil dalam menghadapi perusahaan-perusahaan bioteknologi multinasional. Demikian pula, kampanye

NGO tentang "Brasil bebas RG ', dilihat sebagai suatu jaringan MST yang menyediakan sarana untuk meningkatkan kekuatan kredibilitas mereka:

> Untuk kelompok kecil NGO, yang terpenting adalah anggota jaringan inti, Mereka tidak bisa lagi dikritik hanya karena menjadi tidak representatif, tidak akuntabel, NGO yang didanai oleh orang asing (yang mereka turuti), tetapi dikaitkan dengan sebuah gerakan massa dengan resmi dan hubungan informal kepada PT, sehingga pengaruh politik jauh melampaui apa yang sebelumnya bersifat positif. (Scoones 2005, 22).

Namun beberapa koalisi lebih didominasi oleh NGO, missal kampanye 'Brazil Bebas dari RGO', adalah koalisi NGO yang dibuat oleh Greenpeace, Lembaga Pertahanan Konsumen (IDEC), Proyek pelayanan Pertanian Alternatif (ASPTA), ActionAid Brasil, Bantuan Sosial dan Pendidikan Federasi (fase), Institut Studi Sosial-Ekonomi (INESC) dan Penasehat serta Pusat Penelitian (ESPLAR). Tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan risiko kesehatan produksi dan konsumsi RG. Bagaimanapun, kesamaan antara NGO dan gerakan terletak pada cara mereka mengartikulasikan kritik umum terhadap perdagangan produk RG. Proses mobilisasi di sekitar proses produksi dan perdagangan produk-produk bioteknologi pertanian berujung pada klaim mobilisasi yang menarik diloihat karena dia ikut menghidupkan kritik yang lebih luas dari model produksi agribisnis dan perdagangan yang berlaku. Ada perbedaan antara kelompok-kelompok ini, yaitu tentang tingkat di mana mereka akan mendukung semua klaim. Tetapi itu hanya sedikit, jika ada, itu tidak ke semua elemen dan tentu tidak semuanya sama. Berikut ini adalah tema umum saat ini dalam wacana dan pembuatan klaim oleh aktivis.

1. Tema kunci nya adalah kekuatan yang tidak terlihat dalam agribisnis, dan itu paling jelas terlihat dalam konsentrasi kepemilikan tanah dan penguasaan pasar. Di Brasil saja, misalnya, Monsanto adalah perusahaan bibit asing terbesar, mengendalikan 60 % dari pasar nasional jagung dan 18 % kedelai.[162] Monsanto membeli lima perusahaan bibit nasional yang berbeda di Brazil, termasuk beberapa perusahaan benih terbaik di Brasil seperti Agroceres. Hanya dalam satu tahun, industri bibit hibrida domestik Brasil 82 % dimiliki oleh Monsanto (Paarlberg 2001, 70). Model agribisnis menyebabkan pengkonsentrasian kekayaan bukan mendistribusikannya, seperti pernyataan salah seorang pemimpin MST João Pedro Stedile, dia mengatakan sepuluh perusahaan multinasional yang beroperasi di Brazil menerima kredit sama dengan sejumlah kredit yang di berikan kepada lebih dari empat juta keluarga petani kecil di Brasil (Stedile 2004). Liberalisasi perdagangan dipandang telah mengaktifkan dan mempercepat konsentrasi ini. Menguatkan gema apa yang dikatakan di atas tentang kesesuaian sistem yang ada pada produksi pertanian untuk budidaya RG, aktivis di Brazil mengklaim bahwa *latifundium* adalah sekutu kuat dari perusahaan biotek multinasional (Andrioli 2006). Secara khusus, diduga adanya hubungan antara *latifundium*, agribisnis dan perusahaan transnasional seperti Cargill, Monsanto, ADM dan Bunge, yang dilihat sebagai 'musuh utama MST "(Santos 2006).

2. Gambaran yang kuat kritik teori ketergantungan yang menyoroti bahaya ekonomi global yang lebih dari

[162] Dikatakan bahwa dalam hal benih RG secara khusus, Monsanto bertanggung jawab atas 88 persen dari pasar (Igor Felipe de Santos, multinasional MST 'berusaha untuk mendominasi seluruh rantai makanan', lihat situs web Via Campesina, http://www.viacampesina.org/main_sp.

sekedar keterikatan pada modal swasta untuk pembangunan negara-negara pinggiran, ini membuat berkembanganya tema wacana otonomi dan kedaulatan pangan di kalangan aktivis. Untuk MST dan Via Campesina, 'kedaulatan pangan' telah muncul sebagai tema utama dalam kampanye melawan agribisnis pada umumnya dan perannya dalam pengembangan bioteknologi khususnya, 'memproduksi, makanan bertukar dengan mengkonsumsi makanan dan itu terjadi dalam satu teritori'. Via Campesina mengklaim, misalnya, rakyat hanya akan berdaulat jika dapat mengendalikan produksi bibit sendiri "(Via Campesina dn b). Unsur ini sangat berkaitan dengan perdagangan: dumping, benih murah dan penghapusan pembatasan kuantitatif impor pertanian. Memang, Via Campesina mengeluarkan surat terbuka ke Presiden Brasil Lula yang berbunyi bahwa WTO tidak memiliki peran dalam mengatur akses terhadap hakhak dasar seperti makanan dan kegiatan WTO bukan untuk sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempromosikan kedaulatan pangan dan keanekaragaman genetik (Via Campesina nd a) .

3. Selain isu-isu umum kedaulatan dan otonomi, serangkaian keprihatinan terhadap akses dan kontrol teknologi tertentu dan fitur pengetahuan juga menonjol dalam wacana aktivis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu instrumen utama kebijakan perdagangan dalam perjanjian perdagangan regional dan bilateral, dan ini telah menimbulkan kecendrungan semangat baru dalam wacana. Di Brazil ada mobilisasi yang signifikan di sekitar RUU Paten yang diusulkan oleh Presiden Fernando Collor, dimana difokuskan pada isu bibit paten. Ini adalah hasil intervensi dari kelompok 'agro-ekologi dan NGO lingkungan, serta Konferensi Uskup Katolik' (Peleaz dan Schmidt 2004, 242). Kampanye yang berisi seruan 'tidak ada hak paten dalam hidup' sedangkan perhimpunan

Penggunaan Forum Bebas Pengetahuan (Forum pela Liberdade do Uso do Conhecimento), organisasi yang menaungi lebih dari seribu organisasi masyarakat sipil termasuk serikat buruh, organisasi profesi, gereja, masyarakat ilmiah, LSM dan bahkan unsur-unsur modal nasional memanfaatkan lemahnya perlindungan atas kekayaan intelektual ini seperti perusahaan farmasi. perjanjian perdagangan bilateral dan juga telah menjadi jalan untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dan karenanya menjadi titik fokus untuk kampanye aktivis. Sebagai contoh, negosiasi Peru terhadap perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat termasuk ketentuan untuk menyinkronkan tingkat perlindungan HKI negara. Aktivis mengklaim bahwa ini akan memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap petani dalam penanaman bibit dan tanaman yang sekarang akan dikenakan untuk pengontrolan yang jelas (Third World Network 2006).

4. Kampanye tentang' terminate terminator ' di Brazil adalah bentuk oposisi terhadap penggunaan GURTs (Genetic Use Restriction Technologies / Teknologi Pembatasan Penggunaan Genetika) pada bibit yang mengharuskan petani untuk membeli bibit baru setiap musim daripada menanam kembali atau tukar menukar bibit dengan petani lain. Isu ini berfokus pada kemungkinan pengaruh teknologi seperti di Brazil, di mana diperkirakan bahwa sebanyak 87 persen dari seluruh petani tidak membeli benih (Radio Mundo Real, nd). Pada tanggal 22 Maret 2006, diumumkanlah perlawanan terhadap teknologi terminator ini, setelah itu, 300 pekerja di pedesaan berunjuk rasa di Curitiba menentang suspensi dari moratorium untuk mencegah budidaya bibit terminator (Santos nd). Keputusan dari pertemuan ke-8 Konferensi Para Pihak pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang diselenggarakan di Curitiba, adalah agar moratorium

ditegakkan pada penggunaan bibit terminator, dan moment ini digunakan oleh Via Campesina untuk memberikan kredibilitas dan dukungan terhadap kampanye anti RG(Via Campesina dn c).

Perdagangan dalam bantuan pangan juga menarik perhatian untuk melihat masalah tentang pengontrolan makanan di tengah klaim tentang standar ganda yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan biotek besar yang digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai tempat pembuangan untuk teknologi yang ditolak di tempat lain. Clapp (2006) menunjukkan bagaimana bantuan pangan RG telah digunakan untuk melemahkan perlawanan. Ekuador adalah negara berkembang pertama yang diketahui menerima bantuan pangan yang mengandung RGO dalam pengiriman kedelai dari AS dan disalurkan melalui Program Pangan Dunia (WFP). Ia akhirnya dihancurkan bersamaan dengan komplain dari Ekuador. Ketika bantuan makanan jagung dikirim ke Bolivia pada tahun 2002, meskipun ada moratorium negara atas impor tanaman RG, isu standar ganda sekali lagi muncul kepermukaan. Transgenik yang membantu orang Bolivia berisikan jagung merk starlink yang telah dimodifikasi sehingga tidak diterima di Amerika Serikat untuk dikonsumsi manusia (hanya sebagai pakan ternak). Beberapa NGO menyatakan bahwa meskipun fakta StarLink ditemukan dalam pasokan makanan AS namun itu segera dihapus dari pasaran, AS tidak berusaha untuk menghapus jagung itu dari Bolivia, ini akan memicu tuduhan standar ganda (Clapp 2006). Penggunaan bahan makanan di Argentina pada saat krisis pangan di negara itu juga menghasilkan wacana sanggahan sekitar respon perusahaan terhadap krisis RG yang digunakan sebagai 'forrajeros para los pobres "(makanan untuk orang miskin) atau lebih buruk lagi sebagai kesempatan untuk mengakses lebih banyak lagi potensial konsumen untuk produk RG (Kossoy 2003).

5. Dampak potensial lingkungan dari bioteknologi telah mengunci kritik elemen aktivis lain dari isu bioteknologi. Perdagangan lintas perbatasan pada bibit RG ini sangat sulit untuk dimonitor, diatur sementara ancaman tentang biosafety dan potensi kontaminasi silang tanaman non RG sangat tinggi, seperti yang terjadi dengan jagung RG di Meksiko (Fitting 2006). Pusat mobilisasi Lain mengklaim terjadinya deforestasi untuk membuat jalan bagi budidaya tanaman monokultur RG. Di Argentina, misalnya, kelompok-kelompok seperti Grupo Reflexion Rural dan Greenpeace telah memprotes karena terjadinya kehancuran lingkungan akibat budidaya kedelai ini, termasuk hilangnya kesuburan tanah dan terjadinya deforestasi secara khusus (Benbrook 2005)[163]. Karena besarnya tanah yang dibutuhkan budidaya tanaman kedelai mono, mereka merujuk ke Argentina sebagai 'Republica Unida de la Soja' (Boy 2006). Pembabatan hutan untuk dijadikan perkebunan kedelai di Argentina telah meng-global dan berfungsi untuk bahan kampanye, Brasil, Negara yang berdekatan dengan nya, menemukan sendiri fokus dari kampanye transnasional setelah belajar dari kasus Argentina. Di Brazil, pembukaan hutan hujan Amazon untuk budidaya kedelai telah menimbulkan protes lingkungan dan upaya untuk berunding dan memperoleh janji dari perusahaan terkemuka untuk tidak membeli kedelai yang dibudidayakan secara ilegal. Dalam halaman iklan The Guardian secara gamblang, digambarkan oleh Greenpeace sebagai "Sebuah titik balik dalam perjuangan untuk melindungi Amazon' oleh produsen makanan dan rantai makanan cepat saji seperti McDonalds yang tidak meng-

[163] Kritik posisi ini, termasuk beberapa para aktivis lingkungan, menunjukkan bahwa bioteknologi per se bukanlah pendorong utama mono-budidaya seperti klaim kampanye aktivis. Wawancara dengan activist ENGO, 9 November 2006.

gunakan kedelai yang hidup secara ilegal di Brasil, yaitu komoditi dari perusahaan multinasional seperti Cargill, ADM dan Bunge disebut sebagai yang bertanggung jawab untuk membiayai kerusakan hutan akibat penanaman kedelai (Greenpeace 2006b).

Beberapa kelompok di Amerika Latin berkeberatan terhadap pengembangan tanaman RG. ETC (Action Group about Erosion, Technology and Concertation)[164] Meksiko telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai sari tepung pohon RG yang dihasilkan. Pergeseran hutan hujan yang juga telah dimobilisasi seputar seruan untuk melarang pembebasan pohon-pohon RG dalam mendukung sikap pencegahan yang diambil oleh negosiator CBD, mengangkat isu di COP8 (SDA 2006). Kelompok-kelompok seperti *Rede Alerta kontra o Deserto Verde* memfokuskan diri pada akibat sosial dan ekologi tanaman mono atau pohon perkebunan, terutama penggusuran tanah dan efeknya terhadap masyarakat adat Indian yang mendiami daerah itu (RACDV nd).

Masing-masing wacana bergema dengan perdebatan global yang lebih luas dan perdebatan di sekitar hak-hak petani, kedaulatan pangan, perlindungan keanekaragaman hayati dan kritik yang dikembangkan oleh gerakan anti-globalisasi. Pembingkaian inilah yang menghubungkan perdagangan bioteknologi yang lebih luas dengan kampanye anti-RG dan dengan agenda kelompok gerakan petani. Selama negosiasi FTAA terdapat pernyataan pemerintah secara eksplisit untuk mendukung perdagangan organisme transgenik, ini membuat khawatir kalangan aktivis bahwa FTAA akan menyediakan jalur pintu belakang untuk menyebarkan penggunaan RG di daerah (Global Exchange

[164] Sebelumnya Rafi (Rural Advancement Foundation International) yang berbasis di Kanada.

2004). Hal ini bertentangan dengan pengungkapan keberatan dari negara-negara seperti Bolivia tentang teknologi, dan didorong oleh kepentingan AS, Kanada dan Argentina, khususnya, untuk menemukan pasar baru bagi produk yang ditolak di Eropa dan sebagian di Asia. Masalah ini telah diajukan oleh kelompok campesino di negara-negara asal tanaman utama, contohnya jagung, yang berasal dari Meksiko, sebuah negara yang telah mengalami kontaminasi tanaman non-RG oleh varietas transgenik.[165] transgenik ini telah dimasukkan ke dalam ketentuan IPR yang diusulkan dalam FTAA, ini berhubungan dengan ketentuan paten Amerika Utara, yang bertujuan untuk lebih menaikkan hak masyarakat 'komunal dan adat (Acción Ecológica 2004).

Pengorganisasian Transnasional

Ini adalah tema yang berkaitan dengan klaim, dan hubungannya dengan masalah yang lebih luas tentang model integrasi pasar dalam wilayah yang berhubungan dengan aktivitas di banyak tempat, inilah yang membentuk kampanye bersama antara aktivis transnasional biotek dikemudian hari. Oleh karena itu, hal ini menjadi bagian dari penelitian, ulasan dan penilaian strategi yang diadopsi oleh aktivis di Amerika Latin terhadap percekcokan bioteknologi dan promosi melalui perjanjian perdagangan di daerah ini. Namun, memang sulit, untuk menilai dengan tingkat keakuratan yang benar di tingkat mobilisasi transnasional karena berkaitan dengan hubungan antara bioteknologi dan perdagangan di Amerika Latin. Koalisi transnasional dengan basis keanggotaan yang luas seringkali beroperasi secara bebas, modelnya desentralisasi, dengan kepala organisasi yang berfungsi sebagai unit

[165] Pertemuan dengan Grupo de Estudios Ambientales, Mexico City, Agustus 2002.

koordinasi dan koalisi publik yang sifatnya transnasional terutama mereka yang memiliki anggota di berbagai negara yang menyumbang pada pendirian organisasi. Sebagai contoh, Via Campesina memiliki staf yang sangat kecil yang terdiri dari seorang sekretaris eksekutif dan beberapa staf pendukung yang bertugas mengirimkan bahan-bahan kampanye dan makalah pada daftar email yang ada di yahoo (Edelman 2003; Borras 2004). Demikian pula, HSA (Hemispheric Social Alliance), menyatukan berbagai gerakan oposisi terhadap FTAA walaupun dengan staf dan anggaran yang sangat kecil. Tampilan luar dari koalisi besar secara transnasional yang mengorganisir aktivitas terkadang mengukapkan realitas kantor yang kecil tapi sangat terorganisir dengan hubungan global yang amat baik. Selain itu, ikatan yang mempertahankan jaringan seperti ini lebih banyak daripada hubungan non pribadi yang formal atau kolaborasi inter-organisasional reguler (Edelman 2003).

Kita telah melihat di atas bagaimana koalisi para environmentalist dan gerakan berbasis petani telah mengisi posisi yang cukup kuat pada masalah ini. Di bawah, saya mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana kepedulian tersebut berasal dari basis keanggotaan mereka atau itu hanya merupakan strategi dalam memposisikan gerakan mereka dengan tepat dalam kaitannya dengan fokus saat ini dalam rangka memobilisasi. Di sini saya secara singkat berbicara mengenai dinamika 'kesalingterkaitan' -seperti yang disinggung dalam Pendahuluan- di tingkat lokal ke global melalui regional dan kembali lagi. Sebagaimana dengan analisis di atas, bentuk-bentuk pengorganisasian mengangkat isu-isu representasi dan akuntabilitas dalam ukuran yang sama.

Beberapa bukti yang menunjukkan kedua koalisi antibioteknologi generik di dalam sebuah kawasan serta aliansi yang bertujuan untuk menangani aspek-aspek tertentu itu, misalnya, *Red por una América Latina Gratis de*

Transgénicos (RALLT) yang dibentuk pada bulan Januari 1999 di sebuah lokakarya yang diadaiakn di Quito dengan tema RGO dan biosafety. Dorongan awal berasal dari 'kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan strategi global terhadap pengenalan organisme transgenik dan untuk mencegah introduksi mereka ke daerah' (RALLT 2007; diterjemahkan). Jaringan antar Negara ini bertujuan untuk : perlindungan masyarakat lokal dan proses nasional yang berusaha menghindari pengenalan RGO; perlindungan otonomi pemerintah dalam memutuskan apakah akan menerima pertanian RG dan memastikan bahwa masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang terkena dampak termasuk dalam keputusan; dan, akhirnya, untuk bekerja ke arah moratorium pelepasan dan perdagangan RGO sampai saat ini seperti bukti lengkap keselamatan mereka dan kesempatan publik untuk berdebat dengan cara memberitahukan resiko dan dampak yang terkait dengan teknologi. Keanggotaannya yang luas, termasuk organisasi *campesino*, kelompok masyarakat adat dan lingkungan. Setiap kelompok atau individu yang setuju dengan deklarasi yang dikembangkan oleh kelompok ini tentang RGO dapat menjadi anggota jaringan. Selain koalisi yang luas, posisinya terhadap teknologi pada umumnya sama dengan koalisi lainnya yaitu menggunakan target spesifik itu. *The Red Latinoamericana contra los de Arboles Monocultivos* menentang penggunaan pohon RG atas dasar kerusakan lingkungan yang disebabkan olehnya, seperti yang disebutkan di atas, dan selanjutnya adalah Forum for Bilogical and Cultural Diversity yang dibentuk pada tahun 2001 di Chiapas, Meksiko untuk "melakukan pembelaan terhadap obat-obatan asli dan varietas tanaman terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan bebas '.[166]

[166] Untuk informasi lebih lanjut pada forum itu lihat http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/.

Banyak koalisi tersebut memiliki titik awal yang sama dengan kelompok-kelompok seperti ETC (Action Group on Erosion, Technology and Concentration), tetapi dengan koneksi internasional yang kuat. ETI 'terfokus pada isu-isu HKI dan GURTs atau' teknologi "terminator". Mereka secara konsisten ikut pada pertemuan internasional bio-safety, menyelenggarakan berbagai lokakarya dan acara pendukung untuk isu yang mereka geluti, melobi pemerintah, mereka juga melakukan penelitian dan membuat position paper untuk dibagikan kepada khalayak luas. Sebuah organisasi yang memainkan peran serupa di Amerika Latin adalah *Interamericana Merah Agriculturas de y Democracia* (RIAD) yang menjadi sumber informasi terbuka dan analisis bagi NGO dan organisasi petani. [167]

Beberapa badan-badan regional dan internasional yang sudah ada yang bekerja pada isu-isu pedesaan dan berusaha untuk melindungi kepentingan petani telah mengadopsi posisi mengenai isu bioteknologi. Misalnya, *Coordinadora Latinamericana de Organizaciones del Campo* (CLOC), terbentuk pada tahun 1994, yang terdiri dari perwakilan 84 organisasi dari 21 negara yang bekerja pada agenda umum reforma agraria, kedaulatan pangan dan hak-hak masyarakat adat. Mengingat ini berkaitan erat dengan Via Campesina, dan keragaman keanggotaannya yang sangat luas, hampir semua organisasi anggota Via Campesina di Amerika Latin berpartisipasi dalam CLOC dan banyak organisasi CLOC yang berpartisipasi dalam Via Campesina (Edelman 2003). Dalam hal ini terlihat mereka mendukung hubungan satu sama lain dalam koalisi, yang pada gilirannya, memainkan peran penting dalam membangun koalisi lainnya pada isu-isu tertentu

[167] APM-Mondial memainkan peran penting dalam menciptakan jaringan ini, dia memberikan ilustrasi lain di mana cara jaringan yang ada cenderung membiakkan jaringan baru.

seperti *Forum for Biological and Cultural Diversity* yang disebutkan di atas atau IPC(International Planning Committee for Food Sovereignty). Ini merupakan aliansi global dengan puluhan gerakan agraria transnasional ditambah kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya, yang melibatkan sekitar 500 organisasi di seluruh dunia.

Ada banyak aktivis biotek yang merasa prihatin pada dampak teknologi atau aspek-aspek tertentu yang ditimbulkan, yang tidak didukung oleh sebuah kegiatan yang lebih luas dalam menolak neo-liberalisme. Untuk aktivis anti globalisasi di sisi lain, dengan siapa Via Campesina memiliki hubungan erat, biotek merupakan salah satu gejala sistem ekonomi yang menguntungkan agribisnis dengan mengorbankan petani kecil. Telah terjadi konvergensi beragam dan agenda kompetisi seputar kritikan umum mengenai neo liberalisme. Menurut catatan Edelman: 'perdagangan, tindakan *phytosanitary*, hak atas kekayaan intelektual, hewan dan kesehatan manusia, lingkungan, hak asasi manusia, bioteknologi, kesetaraan gender dan kedaulatan pangan, dalam kehidupan politik sehari-hari, menjadi terikat dengan satu sama lain "(2003, 212) . Hal ini berlaku bagi kelompok seperti Via Campesina serta koalisi yang dibentuk untuk menentang kesepakatan perdagangan tertentu seperti HAS, disana terlihat bagaimana pembentuka kesepakatan alternatif *'Alternativas para Las Americas: Hacia la construcción de un acuerdo de los pueblos hemisférico'* mencerminkan keragaman dan isu yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Hubungan yang sangat erat antara pembangunan biotek di Amerika Latin dan evolusi perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk mengamankan akses pasar untuk teknologi telah menempatkan bioteknologi pertanian secara tegas pada layar radar lawan integrasi regional yang berorientasi pasar. Sebagai contoh, oposisi terhadap FTAA kembali dibingkai menjadi sebuah perjuangan yang lebih

luas terhadap industrialisasi global dan intensifikasi pertanian. Jaringan yang ada ditempa untuk ikut aktif dalam kampanye internasional melawan RGO, yang juga memiliki resonansi sentralitas didaerah Argentina dan Brazil untuk perdebatan RG global. Menurut Teubal dan Rodriguez, 'gerakan petani telah berhasil mengartikulasikan gerakan global otentik dalam beberapa tahun terakhir "(2002, 197). Hal ini didasarkan pada oposisi untuk mengontrol perusahaan transnasional pertanian (termasuk hak paten dan biopiracy), perdagangan bebas hasil pertanian (terutama dumping), penggunaan hormon dan transgenik dan mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan pangan. Koalisi semacam ini yang melakukan berbagai kegiatan protes telah menjadi strategi utama yang diadopsi oleh gerakan petani, yang juga sering dibantu oleh dukungan keuangan dari kelompok yang bersimpati di Eropa dan Amerika Utara, mereka mendanai perjalanan kelompok petani-petani ini untuk demonstrasi anti-FTAA (Newell dan Tussie 2006).

Hasil dari pembangunan koalisi ini, mungkin dapat diperdebatkan, seperti pertanyaan Edelman, apakah itu semata-mata merupakan partisipasi petani dalam jaringan petani yang memiliki rasa dinamis pada diri mereka sebagai aktor politik, diberdayakan dengan pengetahuan baru, dan dijejalkan dengan konsep-konsep solidaritas dan alat-alat perjuangan '(2003, 214). Pembangunan-koalisi juga terjadi secara horizontal antara gerakan. Di Brasil, walaupun kampanye untuk Brasil bebas RG telah membentuk pusat protes, jaringan telah berevolusi antara gerakan berbasis petani seperti MST dan Via Campesina dan berbagai kelompok berbasis lingkungan dan gerakan konsumen termasuk Greenpeace dan ESPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria, pengembangan kelompok-kelompok seperti ActionAid dan AS-PTA (*Assessoria e Servicios a Projetos em Agricultura Alternativa*), Kelompok pendidikan seperti

FASE (lihat di bawah) dan INESC (Instituto de Estudios Sosial-Economicos). Dalam hal ini penting juga melihat apa yang dilakukan oleh PT (Workers Party/Partai Buruh). Hubungan simbolis penting juga dibangun dengan Gereja melalui Komunitas *Basic Christian Base Community* (Boff nd). *Pastoral Commission od Land* menghasilkan deklarasi tentang RGO, misalnya, terdapat sebuah daftar serangkaian keberatan sosial dan lingkungan dengan penggunaan teknologi (PCL 2004), kelompok gereja ini juga melibatkan diri dalam kampanye *"save creole seeds"* dengan menciptakan komunitas bank bibit dalam menghadapi kekayaan intelektual oleh perusahaan multinasional (PCL nd). Di tengah keanekaragaman seperti itu mungkin setiap kelompok harus terus melanjutkan strategi protes yang diajukan dan menggunakan sumber daya dimana kemungkinannya akan kembali dengan cepat. Catatan Scoones: 'setiap organisasi harus mampu berfokus pada area yang berbeda dari ranah advokasi, beberapa melakukan aksi langsung dan berorientasi kepada pelayangan protes, beberapa terfokus pada alternatif lain seperti demonstrasi praktis; beberapa melalui pengadilan dan media' (2005, 12).

Satu strategi aktivis yang diadopsi adalah mengganggu perdagangan produksi RG melalui sarana hukum dan aksi langsung. Pada tahun 1997 Greenpeace melayangkan tuntutan ke pengadilan untuk mencegah dua kapal container yang berlayar membawa jagung RG dari Argentina menuju Brasil dan industri perternakan. Langkah itu berhasil mendorong perdebatan publik, akhirnya kapal yang penuh dengan jagung Argentina itu tiba tetapi kembali dan berada di lepas pantai saat keputusan dibuat mengenai apakah komoditas transgenik akan di izinkan masuk ke negara itu. MST juga melakukan intervensi secara fisik untuk menghentikan impor RG ke Brasil ketika pada bulan Juli 2000 MST memimpin sebuah kelompok petani untuk menyerang kapal di Recife yang berisi jagung RG impor

dari Argentina (Scoones 2005). Sebuah tindakan hukum juga diajukan terhadap Menteri Kehakiman dalam upaya untuk memblokir pengiriman kedelai lebih lanjut dari AS atas dasar bahwa tidak ada izin label di Brasil untuk melindungi konsumen. Kontroversi ini membawanya pada kewjiban untuk melakukan pengujian terhadap konten impor RG dan menurut Paarlberg (2001,84), impor RG yang signifikan dari US dan Argentina dihindari untuk meminimkan kontroversi. Meskipun, dalam jangka pendek, tindakan semacam itu berfungsi untuk menarik perhatian pada perdagangan yang buruk dan diatur dengan risiko yang terkait, isu tersebut masuk ke wilayah publik dan mau tidakmau menarik perhaitan pemerintah untuk menanggapinya, upaya pemerintah dengan berargumentasi tentang alasan perdagangan yang menguntungkan secara ekonomis sia-sia karena pergeseran posisi pemerintah Lula terhadap biotek. Pada tanggal 22 Maret 2005, misalnya, CTN Bio menyetujui impor 370.000 ton jagung RG dari Argentina yang akan digunakan sebagai pakan ayam.

Sering kali bekerja ditengah kecerdikan aktor media transnasional menyebabkan perlawanan nasional mendapat perhatian internasional dan itu berpotensi menjadi ujung tombak suatu perubahan. Tetapi permasalahan kemudian bagi kelompok-kelompok seperti MST adalah bahwa aksi mereka diliput oleh media jika perjuangan gerakan pedesaan itu dilakukan dengan strategi yang sama digunakan berulang kali (invasi tanah). Tetapi banyak fakta mengatakan, politik radikal yang melatari aksi-aksi itu sering terjadi di daerah pedesaan terpencil yang membuat mereka mungkin berada di luar jangkauan jurnalis nasional yang berbasis di pusat perkotaan. Dan juga bagi media, sulit mencari hal baru dalam gerakan yang melakukan invasi tanah, sehingga jarang ada rasa simpatik terhadap tujuan pergerakan seperti itu sehingga menyulitkan untuk mempublikasikan tindakan-tindakan utama mereka dalam

media mainstream (Andrioli 2006). Sebaliknya, keberadaan 'bintang anti-RG internasional ' (Scoones 2005, 15) pada pertemuan World Social Forum (WSF) di Brasil, dalam banyak hal berfungsi sebagai 'intelektual organik' dari gerakan anti-RG yang memberi visibilitas , pengaruh dan bimbingan (dalam proporsi yang berbeda), dan telah membantu untuk menarik perhatian media, sehingga berguna untuk perjuangan nasional melawan biotek. Ketertarikan media misalnya dinyalakan oleh keterlibatan aktivis anti-RG yang terkenal dan juga seorang petani, José Bove, yang ditahan karena berpartisipasi dalam invasi yang dipimpin MST terhadap pertanian Monsanto di Rio Grande, menghancurkan lima hektar tanaman RG (Scoones 2005). Selain itu ada juga bintang yang lain yaitu Vandana Shiva, seorang penulis dan aktivis India, Percy Schmeiser seorang petani dari Kanada yang terlibat dalam pengadilan dengan Monsanto, juga menyatakan bahwa Monsanto memang menggunakan bibit secara illegal, tuntutannya bahwa tanamannya telah 'terkontaminasi' oleh tempat percobaan tanaman RG Monsanto di lahan yang bersebelahan dengan nnya (Glover dan Newell 2004). Keterlibatan dalam WSF terbukti efektif untuk gerakan domestik yang terpusat pada perhatian masalah ini dan membangun koalisi dengan aktivis internasional. forum semacam itu juga memberikan kesempatan untuk menarik perhatian agenda kelompok 'seperti WSF pada tahun 2001 menjadi tempat untuk melahirkan World Forum on Food Sovereignty' didukung oleh CLOC dan Via Campesina. Memang Edelman menyarankan, 'riwayat partisipasi yang tinggi dalam protes internasional dan pertemuan masyarakat sipil terus menjadi ciri kegiatan Via Campesina' (2003, 206).

Penting untuk di ingat, bagaimanapun, bahwa mobilisasi transnasional sering mendapatkan kekuatannya dan strategi orientasi dari pengaturan nasional tertentu.

Brasil menjabat peran sebagai episentrum dalam perjuangan sosial yang lebih luas atas bioteknologi. situs khusus dalam kontes global bioteknologi pertanian di masa depan yang menjadi transnasional karena nilai simbolis yang mereka hasilkan dan mereka menyatakan bahwa ini akan diproyeksikan untuk para aktivis di tempat lain. romantisme yang mengelilingi gerakan sosial di Amerika Latin pada umumnya tentu jelas dalam kaitannya dengan MST, khususnya di kalangan aktivis antibiotek yang berbasis di wilayah barat untuk menangkis pernyataan bahwa mereka menolak teknologi yang elitis dan berfungsi untuk menolak akses ke petani miskin yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan lewat teknologi.

Sebagaimana telah kita lihat, kebijakan ekonomi global di Amerika Latin dan di wilayah lain, terutama WTO, berupaya untuk membentuk proses regional dan transnasional yang disalurkan melalui negara. Banyak upaya yang dilakukan untuk melakukan penggeseran dan melanjutkan posisi pemerintah nasional sebagai cara untuk membentuk kebijakan internasional. Oleh karena itu, mungkin ada bukti tentang apa yang disebutkan oleh Tarrow (2005) "aktivisme transnasional yang baru" yang menanggapi dan *scaling up* pada struktur kesempatan politik yang ada dalam forum internasional dan regional, tetapi mayoritas aktivisme yang terkait dengan biotek terus berlangsung di tingkat nasional, bahkan jika hal ini terkait dengan kelompok lain dan juga sering bertentangan dengan aktor transnasional yang beroperasi di arena domestik (seperti TNCs). Bagi kebanyakan aktivis,target utamanya tetap negara dan audiens utamanya adalah nasional, bahkan jika diungkit di tingkat internasional, ini dapat digunakan untuk menghasilkan reformasi dalam negeri. Hal ini sangat dimengerti oleh mereka dari gerakan pedesaan yang terlibat dengan masalah seperti MST, dimana biotek dipandang sebagai manifestasi lain dari pembagian

yang tidak adil dari tanah dan kekayaan dari produksi pertanian, dimana negara memiliki tanggung jawab utama untuk menanganinya. Ini merupakan Isu-isu yang berada di luar yurisdiksi badan-badan regional dan internasional bahkan jika keputusan yang mereka buat, terutama di sekitar perdagangan, memiliki dampak nasional dan lokal yang mendalam.

Kampanye Nasional di kawasan ini mungkin dikelola melalui badan-badan pelayanan sebagai titik koordinasi dan dengan transnasional yang berbasis representasi. Mereka membantu untuk mengarahkan klaim mereka ke arah gelanggang global dan regional, seperti WTO atau arena multilateral untuk menangani masalah-masalah yang berdampak pada kehidupan pedesaan, seperti musyawarah CBD tentang akses dan pembagian keuntungan atau perdebatan tentang pembatasan penggunaan teknologi GURT. Aktivis memanfaatkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara bersamaan di ruang politik yang berbeda dan melampaui batas skala. Mereka melibatkan diri, misalnya dalam memobilisasi aliansi nasional dalam ' arena transnasional' seperti apa yang terjadi pada negosiasi Protokol Cartagena. Dengan akses ke arena transnasional seperti yang ada dalam platform untuk memajukan tujuan politik nasional, misalnya, sekitar 1.500 petani yang dimobilisasi oleh Via Campesina berdemonstrasi di Curitibia, dimana MOP3 (Rapat partai) itu diadakan. Mereka memprotes lamanya waktu (4 tahun) diperbolehkannya ketentuan mengenai identifikasi transgenik dalam makanan yang masuk kedalam wilayah mereka.

Meskipun dikatakan bahwa gerakan sosial global lebih banyak jumlah bagian-bagiannya daripada klaim yang membentuk itu sendiri, mereka memberikan batas-batas yang tidak relevan, runtuh, dan melampaui penggabungan ruang aktivisme, diperlukan tindakan hati-hati tentang sejauh mana aktivisme benar-benar terlihat dalam lintas

batas. Kasus aktivisme sekitar perdagangan dan bioteknologi di Amerika Latin tampaknya akan memberi pengaruh (2005) pada ungkapan Tarrow bahwa aktivisme yang disebut transnasional sebenarnya sering mengekspresikan tuntutan global yang diartikulasikan dalam pengaturan nasional tertentu yang dimaksudkan untuk menggeser posisi keadaan bangsa tertentu. Apa yang kita amati tampaknya adalah kemunculan 'titik fokus', momen atau ruang konvergensi politik di mana prioritas nasional lebih luas, kampanye penekanan dan preferensi strategis dapat dinyatakan. Ini dapat mengambil bentuk wacana koalisi '(Hajer 1995) atau menjadi narasi yang menyatukan gerakan eklektik di wilayah yang berbeda, Alur cerita atau perangkat lunak yang bekerja dalam situasi yang berbeda dan oleh karena itu memungkinkan untuk terjadinya jual-beli politik di kelompok-kelompok yang mungkin tidak bekerja sama. Konsep 'kedaulatan pangan' tentu bekerja dengan cara ini, dengan kemampuan umum untuk melayani banyak hal (dan kadang-kadang bertentangan) dengan kebutuhan kampanye secara bersamaan. Sedangkan MST, memberikan titik awal untuk menyatakan tentang redistribusi tanah yang bagi kelompok-kelompok pedesaan lainnya merupakan slogan untuk pertahanan ekonomi lokal sementara, pada saat yang sama, memungkinkan banyak aktivis lingkungan berdebat untuk kelanjutan produksi makanan secara ekologis (non RG).

Bukti apa yang dapat kita temukan dalam tingginya level koordinasi internasional dalam NGO seperti Greenpeace? Kelompok seperti ini dapat memainkan peran sebagai jembatan antara kampanye di lokasi global yang berbeda, meniru taktik yang diadopsi oleh kelompok mereka di salah satu bagian dari dunia di wilayah lokal lainnya. Misalnya, sudah menjadi tradisi yang kuat dalam kelompok Greenpeace dan genetix snowball di Eropa untuk menggunakan tindakan langsung untuk mencabut tanaman

RG di lahan percobaan. strategi tersebut juga diadopsi di Brasil, di mana telah terjadi invasi Monsanto dan didirikannya stasiun penelitian Monsanto, dan sama dengan aksi di Eropa, mereka mencabut tanaman percobaan itu. Pada bulan Januari 2001, sebagai bagian dari protes anti globalisasi yang lebih luas, lebih dari 1.000 anggota MST menyerbu pabrik Monsanto di Rio Grande do Sul dan mengatakan mereka akan tinggal di sana tanpa batas waktu sebagai tindakan protes terhadap tanaman RG yang dikembangkan oleh perusahaan itu. Tampaknya mungkin bahwa kita akan melihat penekanan tinggi pada strategi tindakan langsung dalam menghadapi pergerakan pemerintah untuk lebih membuka pasar bagi pengembangan RG. Misalnya, Maret 2006, Via Campesina menduduki lahan percobaan situs perusahaan bioteknologi Syngenta dan melaporkan penggunaan kedelai RG 'ilegal' dan jagung di daerah tersebut. Pada bulan November 2006, Roberto Requião gubernur disana menandatangani Keputusan untuk mengambil alih pertanian Syngenta. Menurut Kenfield dan Burbach (2007), "Keputusan itu merupakan kemenangan politik besar bagi gerakan pedesaan dan lingkungan, yang menentang kekuatan agribisnis di Brasil '. Jika demikian tinggal sedikit lagi perjuangan. Pada bulan Juli 2007 Syngenta dan sekutunya berhasil menjungkirbalikkan keputusan dan Via Campesina diusir dari lokasi itu. Baru-baru ini (Oktober 2007) pergulatan tersebut menyebabkan kekerasan dan bahkan kematian terhadap beberapa aktivis Via Campesina di Paraná, yang sedang melakukan pendudukan bersama 150 anggota lainnya (Via Campesina 2007; Kenfield dan Burbach 2007). Tentu hal ini berada disekitar aktivisme transnasional biotek, meskipun dalam satu organisasi dengan berbagai informasi yang signifikan dan sumber daya yang bertujuan untuk menyelaraskan perjuangan nasional dengan prioritas kampanye internasional.

Dalam hal gerakan transnasional yang berbasis petani, aktivisme sekitar bioteknologi di Amerika Latin dapat ditemukan sebagai bagian dari tren, Edelman (2003) yang menjelaskan tentang 'globalisasi dari bawah', di mana petani mengembangkan agenda umum dan repertoar sebagai protes pada masalah-masalah yang berbeda seperti perdagangan dan isu hak asasi manusia. Hasilnya, dia berpendapat 'petani telah mencapai kepentingan di arena internasional yang jarang mereka nikmati di negara mereka sendiri'' (2003, 185). Meskipun perbedaan kepentingan materi yang ada di antara mereka, yang menyatukan petani miskin dan buruh tak bertanah adalah kondisi nasib yang sama yaitu sama-sama di eksploitasi, yang dapat dijelaskan dalam istilah kelas yang melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu, meskipun mereka terlibat dalam gerakan sosial pedesaan dengan identitas beragam seperti etnisitas dan gender dalam menegaskan hak-hak mereka dan menjelaskan pengecualian mereka, eksploitasi, bukan kesadaran atau kesadaran umum dan inilah keunggulan dari cara baca kelas (Burnham 2002, 117), seperti yang terjadi dalam mobilisasi terhadap biotek akan lebih dipahami jika dilihat dalam istilah kelas. De Ste. Croix mengklaim bahwa 'kelas'' (berdasarkan relasinya) adalah ekspresi sosial kolektif fakta eksploitasi, dan cara eksploitasi terwujud di dalam suatu struktur sosial' (1981, 43, dikutip dari Burham 2002, 117). Masalah dalam konteks ini tidak bisa direduksi hanya untuk mengendalikan alat-alat produksi, karena petani yang lebih kecil memiliki sertifikat tanah, tidak seperti buruh tak bertanah yang mereka perkerjakan. Sebaliknya, resistansi yang muncul adalah hasil dari eksploitasi yang dilakukan oleh kepentingan komersial yang lebih besar, disamping itu negara juga menciptakan ikatan politik antara kelas petani di Amerika Latin dan di luar.

Sebagai contoh, tujuan perjanjian perdagangan dengan efek yang luas pada ekonomi pedesaan berfungsi untuk membangkitkan aksi sosial dan memberikan ancaman umum bagi produsen - produsen kecil. Ini tentunya kasus yang masih berkaitan dengan perjanjian NAFTA dimana melahirkan serangkaian koalisi di antara mereka yang disingkirkan dari pasar yang terintegrasi dengan FTAA (Teubal dan Rodríguez 2004). RMALC (Mexican Network Against Free Trade) merupakan salah satu manifestasi dari hal ini, dan menjadi sumber penting dari analisis kebijakan perdagangan untuk pergerakan petani (Edelman 2003; Icaza 2004). Isu-isu kelompok yang spesifik seperti *En Defensa del Maíz* (EDM 2002), difokuskan pada seputaran permasalahan perdagangan bebas dan jagung RG, dan koalisi nasional *campesino* seperti *El Campo Aguanta No Mas*[168] menarik perhatian terhadap dampak negatif NAFTA pada mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan, juga terhadap munculnya perjanjian – perjanjian baru. Perdagangan politik juga ikut menghubungkan ekonomi makro yang ditata ulang dengan 'samar samar' tentang kebijakan masalah-masalah pembangunan dalam dan luar negeri dengan cara yang baru. Ada juga pendirian pada aktivis – aktivis di seputaran isu-isu perdagangan dimana mereka tidak lagi menjadi titik acuan utama bahkan lobi berlanjut diteruskan terhadap negara. Ekspresi solidaritas, didorong melalui kerjasama demonstrasi, deklarasi, perjalanan panjang dan seperti apa yang dikatakan Edelman bahwa perdagangan 'semakin membagi orang menjadi lebih sedikit dalam ranah nasional dibandingkan hubungannya dalam strata kebersamaan, masalah berbasis sosial (2003,198). Demikian juga dengan

[168] Diterjemahkan sebagai: The Countryside Cannot Take Any More". Sebagai contoh, lihat http://www.groupocholarlavi.org/php/doc/documentos/elcamponoaguanta.pdf.

kelompok adat dan petani , identitas politik yang melewati batas negara tentu suatu hal yang penting. FTAA berfungsi untuk meluruskan permasalahan ini di seluruh dunia dan diwujudkan dalam pembentukan *Hemispheric Social Alliance*.

Partisipasi

Meskipun banyak mobilisasi -yang seperti dijabarkan di atas- berusaha untuk memperjuangkan hubungan antara bioteknologi dan perdagangan melalui 'orang luar' dengan strategi protes dan perlawanan, beberapa kelompok telah berusaha untuk menggunakan jalur yang tersedia pada partisipasi kelembagaan atau 'membentuk celah' yang tersedia untuk mereka pada pemerintah dan lembaga - lembaga perdagangan regional yang berhubungan dengan isu seputar bioteknologi.

Tidak ada celah di sini untuk meninjau ulang jajaran ruang yang secara utuh tersedia untuk mengorganisir masyarakat sipil dalam ranah formal kebijakan perdagangan di Amerika Latin yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian seperti NAFTA, FTAA, Mercosur, dan dalam hal ini pula telah dilakukan peninjaun ulang dimana-mana (Newell dan Tussie 2006). Cukup untuk dicatat bahwa partisipasi tokoh-tokoh masyarakat sipil telah ditujukan untuk menciptakan dukungan politik masyarakat bagi perjanjian perdagangan yang kontroversi daripada membuka pengawasan masyarakat yang serius. Ini adalah kesempatan bagi aktivis untuk membuat pandangan mereka agar memahami lebih lanjut bahwa mereka dibatasi oleh tingkat dukungan yang bersandarkan ke teknologi oleh para penguasa seperti di Brazil dan Argentina. Dalam pikiran institusi Mercosur, seperti SGT6 [169] kelompok Kerja

[169] Sub-Grupo de Trabajo.

lingkungan, meskipun sudah diantipasi lebih awal mengenai potensi risiko yang terkait dengan teknologi, Argentina memainkan peran utama dalam memveto ketentuan biosafety dari draft yang diusulkan. Kerangka Perjanjian itu disetujui pada tahun 2001 dimana tidak ada urusan sama sekali pada isu biosafety (Hochstetler 2003). Ketika kementerian Pertanian Argentina mengadakan pertemuan di Mercosur tahun 2005 untuk mendapatkan dukungan terhadap keadaan mereka dalam melakukan pembayaran royalti Monsanto pada tanaman kedelai (bukan bibit), dukungan awal datang dari Brasil dan Paraguay. Bagaimanapun, Tekanan yang sangat kuat setelah pertemuan itu, memaksa pemerintah menarik kembali posisi mereka dengan dasar bahwa mereka sedang mengadakan perjanjian dengan pihak swasta dan Monsanto.[170]

Di luar ranah politik perdagangan biotek di Amerika Selatan, beberapa pemerintah daerah juga ikut serta dalam penandatanganan Protokol Cartagena dalam hal Biosafety, yang pada gilirannya membutuhkan negara untuk menciptakan mekanisme pada partisipasi dan konsultasi publik seputar rancangan kerangka biosafety nasional mereka (Glover et al 2003). Oleh karena itu di tingkat nasional, hal ini telah menimbulkan pembentukan celah nasional yang mengundang partisipasi seputaran bioteknologi. Meskipun demikian, demokratisasi kebijakan dalam hal ini sangatlah sulit, di Brazil, penjelasan singkat CTNBIO dalam agenda pertemuan ditempatkan di situs Web mereka sebelum pertemuan dan keputusan yang diambil secara resmi, diinformasikan kepada pihak berwenang baik lokal dan regional dan lembaga federal lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kesehatan. Keputusan juga diposting di Internet setelah

[170] wawancara pada Menteri Pertanian , Argentina November 2007

pertemuan. Namun, pertemuan diselenggarakan dengan tertutup dan publik tidak dapat mengakses secara lengkap laporan dalam diskusi tersebut. Pemerintah membenarkan adanya pendekatan melalui rekomendasi ke arah keperluan komersial yang bersifat rahasia. Persyaratan untuk proyek percobaan perkebunan dipublikasikan dalam jurnal resmi pemerintah dan di Internet satu bulan lebih dulu agar warga yang tertarik dapat menyatakan posisi mereka bahwa mereka bersedia untuk ikut ambil bagian dalam ketetapan ini. Meskipun begitu, kendati akses terhadap informasi meningkat, Dewan menerima kontribusi yang sangat sedikit dari masyarakat sampai saat ini. CTNBIO telah mendukung kegiatan yang dipromosikan oleh *Biosafety National Association* Asosiasi Biosafety Nasional (ANBIO), seperti yang dilakukannya pertama kali pada Kongres Biosafety di Brazil, pada September 1999. Para aktivis mengeluh, seharusnya organisasi yang bertujuan untuk beroperasi sebagai organisasi yang mengurus peraturan dalam hal kesehatan publik dan isu lingkungan harus mempertahankan independensinya dari perusahaan yang diwakili oleh ANBIO, keluhan ini karena acara itu mendapatkan sokongan dari perusahaan bioteknologi termasuk perusahaan bioteknologi Monsanto, Novartis, Agrevo dan Du Pont. Akibatnya, menurut Pelaez dan Schmidt (2004, 249-50) CTNBio dihadapkan pada krisis kredibilitas yang serius dalam masyarakat Brasil yang dikhawatirkan menstimulir bioteknologi menjadi menguntungkan perusahaan multinasional.

Sifat konfliktual yang ada pada perdebatan kebijakan, yang dijabarkan oleh Scoones dalam buku ini, dipandang oleh beberapa sebagai hasil dari keluhan-keluhan oleh kelompok-kelompok yang merasa mereka tidak diajak dalam forum konsultasi publik dan terus dibiarkan keluar dari proses pembuatan kebijakan atas masalah-masalah ini.

Berkenaan dengan hal ini dikutip dari laporan MP Brasil Ronaldo Vasconcellos, tentang kegiatan CTNBIO.

> Kami percaya dan dapat berharap bahwa CTNBIO membuat prosedur yang lebih terbuka kepada masyarakat Brasil, meruntuhkan mitos yang selama ini ada di banyak kasus, karena ketertutupan dan kegiatan yang dilakukan dengan prosedur yang tak transparan . Kita tahu bahwa forum para ilmuwan tidak dapat menjadi sebuah majelis yang ternama tetapi, juga, tidak harus ditandai oleh suasana dewa-dewa yang di klaim masyarakat sipil. Gaya otoriter yang menandai CTNBIO, khususnya jabatan kepresidenan yang sampai tahun 2001, tidak memberikan kontribusi yang efektif bagi pengembangan kebijakan biosafety demi kepentingan terbaik untuk seluruh masyarakat Brasil. (Dikutip dari Glover et al.2003,9)

Ronaldo Vasconcellos mengakhiri laporannya dengan merekomendasikan 'definisi kriteria baru bagi pemilihan anggota CTNBIO dan tindakan lainnya untuk meningkatkan transparansi keputusan tersebut, dan untuk membawanya lebih dekat dengan masyarakat sipil'. Sehubungan dengan intensitas perlawanan masyarakat sipil untuk pengembangan tanaman RG di Brasil, CTNBio berusaha untuk memperluas kisaran pemangku kepentingan itu untuk berkonsultasi dengan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dari tahun 1999 dan seterusnya, CTNBIO berusaha untuk melakukan konsultasi secara 'extensive' dengan ilmuwan-ilmuwan non-bioteknologi di Akademi Ilmu Nasional Brasil dalam menanggapi kritik yang memberikan kontribusi yang cukup baik berkaitan dengan posisinya mendukung teknologi. Kendatipun demikian, dia CTNBIO tetap terus maju dengan gayanya dan dia lebih memilih itu daripada mencegah "tubuhnya tergoyahkan" oleh kelompok-

kelompok masyarakat sipil yang kritis, hingga kemudian menggantikan IDEC di Komisi setelah adanya protes dari kelompok kiri

Tingkat akses dan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat sipil juga ditegaskan menurut hubungan mereka dengan partai-partai yang berkuasa. Aktivis melihat adanya perbedaan di Brasil, misalnya, antara pemerintahan Cardoso yang dalam pandangan mereka menjadikan masalah agraria menjadi masalah kapasitas polisi -untuk menangani kelompok pemberontak- dan di sisi lain pemerintah Lula, yang diundang MST untuk berpartisipasi dalam dewan kabinet, menangani masalah-masalah seperti kelaparan dan reformasi agraria. Ini terlepas dari kritik aktivis tentang sifat keterbatasan dari proses reformasi dan dukungan pemerintah yang berorientasi dalam model ekspor agribisnis (Santos 2006).

Diskusi publik mengenai dampak potensial dari RGO yang dinilai dibutuhkan di Brasil bahkan beberapa perwakilan dari CTNBIO percaya bahwa keterlibatan publik tidak diperlukan karena isu biosafety sangat bersifat 'Teknis'. Koalisi NGO 'Untuk Brasil bebas RGO' berjuang untuk membuat penilaian dampak lingkungan dengan wajib mengikutsertakan public. strategi itu telah membuka 'kotak hitam' dari pengambilan keputusan untuk suara yang beranekaragam dan untuk pembenaran percekcokan diluar masukan masyarakat, yakni bahwa sifat teknis itu didefinisikan secara sempit bahwa partisipasi yang dimaksud hanya dari kalangan ahli. Levidow (1998) yang mengacu pada " demokrasi dari proses bioteknologi" telah disajikan untuk membatasi debat dalam scenario yang telah ditetapkan tentang masa depan biotek daripada terikat lebih luas dengan keprihatinan etis dan sosial. 'Masalah teknis' yang dapat memperbaiki bahaya neo-liberal hanya melahirkan analisis keuntungan dari permintaan istimewa bagi para ahli . Seperti yang dikatakan Newell: "dengan

bioteknologi kita melihat adanya prinsip penting dari modernitas dan kapitalisme yang diemban untuk menutup perjanjian demokratis yang lebih luas dengan jumlah tertentu, di banyak rangkaian, untuk pertanyaan-pertanyaan penentu seperti tentang hak, akses dan hak atas pangan dan kesejahteraan mata pencaharian '(2006, 76). Perangkat politik yang lazim digunakan oleh negara dan perusahaan elit pada akhir ini adalah mengaggap masyarakat sebagai orang bodoh, kurang informasi dan hanya dapat terlibat dalam isu-isu ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat 'emosional' dasar (Wynne 2001). Efeknya adalah 'partisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai tanaman RG bagi kebanyakan masyarakat tidak ada, dia hanya mengambil bentuk dari melaksanakan hak-hak konsumen untuk membeli, atau menolak untuk membeli produk yang telah disetujui untuk masuk pasar, meskipun upaya para aktivis dalam demokratisasi mengharuskan pengambilan keputusan dengan mencoba untuk melindungi hak-hak publik terhadap informasi, dan mengekspos proses kesepakatan kepada publik '(Newell 2006, 77).

Menanggapi keterbatasan jalur formal partisipasi publik, ActionAid Brasil, FASE (*Federacao dos Orgaos butir e Educacional Asistencia Sosial*), MST, CUT (Confederation of Labour Unions-Konfederasi Serikat Buruh), dan Penasehat dan Pusat Riset (ESPLAR) telah mempertimbangkan bahwa masyarakat harus ikut melakukan penilaian sebagai saksi, masyarakat yang dimaksud disini adalah kaum petani skala kecil, orang yang tidak memiliki lahan dan konsumen miskin perkotaan. Yang pertama berlangsung di Fortaleza, ibukota negara bagian Timur Laut Ceará, pada bulan April 2001. Yang kedua diselenggarakan di Belem do Para, ibukota negara bagian Amazon, pada bulan September 2001. Saksi dipilih 'secara acak' dari daftar yang disediakan oleh jajaran dari perwakilan asosiasi yang berbasiskan masyarakat setempat. Ratusan

petani berskala kecil, orang yang tak memiliki lahan dan konsumen miskin perkotaan ikut menghadiri acara tersebut. Di antara pertanyaan yang harus didapatkan jawabannya dengan mendatangkan saksi ini adalah 'apakah ada cukup bukti bahwa RGO tidak mengancam lingkungan? 'dan'apakah proses pengujian dan penggunaan komersial RGO dilakukan dengan demokratis, transparan dan cukup hati-hati? "Setelah mendengar bukti dari para saksi, jawaban untuk kedua pertanyaan dari juri adalah 'tidak', di kedua acara yang diselenggarakan. Sidang berlangsung selama dua hari. [171] Perwakilan dari ActionAid Brasil menyimpulkan bahwa 'orang-orang ini, selalu di ekslusi dalam proses pembuatan kebijakan dalam isu-isu yang justru sangat berpengaruh sangat besar pada mereka, dari sini mereka memiliki kesempatan untuk mengakses semua informasi dan mengambil keputusan dengan menjadi anggota saksi' (Campolina 2001, 29). Proses yang sama juga terjadi di Rio pada bulan Agustus 2002. Ini mengikuti prosedur yang sama dengan sebelumnya, melainkan ditargetkan pada konsumen perkotaan. Pada tahun 2004 ada penilaian masyarakat di Parana. Menurut Scoones, 'ini lebih dari kesatuan massa dari proses penjurian dengan 3.000 aktivis MST yang menghadirinya '(2005, 36). Pada acara itu ternyata terjadi politik *buy-in* dari pejabat negara, dia memanfaatkan itu untuk pemilihan gubernur.

Di Argentina, terdapat tingkat skeptisisme yang tinggi tentang perlunya batasan biosafety nasional dengan ketentuan partisipasi publik. Khususnya kelompok bisnis, ketakutan bahwa proses tersebut akan menghasilkan keraguan dan skeptisme tentang teknologi yang mereka mengklaim sekarang sama sekali tidak terbukti. [172]Dalam

---

[171] Untuk percobaan kebijakan yang lebih konsultatif lihat Scoones dan Thompson (2003) dan Pimbert dan Wakeford (2002).

[172] Wawancara dengan pimpinan ArgenBio, November 2006.

proses pengambilan keputusan formal, akses kritik NGO pada teknologi sudah sulit, dalam banyak hal CONABIA adalah, pusat perembukan proses persetujuan untuk penerapan bioteknologi pertanian. Ini adalah suatu badan yang multi-sektoral, dimana diwakili oleh swasta dan organisasi masyarakat. Keanggotaan dan koordinasi yang telah dimodifikasi dengan meningkatkan input dari sektor swasta. Saat ini, CONABIA terdiri dari tiga lembaga penelitian publik , empat universitas, enam asosiasi sektor swasta, satu perkumpulan masyarakat konsumen, empat perwakilan SAGPyA (Secretary of Agriculture, Fisheriesand Food)-(Panitera Pertanian, Perikanan dan Makanan) dan dua anggota dari Departemen Kesehatan, meskipun komposisi ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketegasan utama tentang siapa yang duduk di komite dipilih dari Menteri Pertanian, walaupun anggota CONABIA mengklaim bahwa seseorang dengan 'pengalaman profesional' dapat ikut serta untuk berpartisipasi. Ketika ditanya tentang ada tidak nya konsumen atau kelompok lingkungan, seorang pejabat mengaku telah mengundang Greenpeace dan organisasi-organisasi konsumen untuk berpartisipasi 'tetapi mereka tidak memiliki usulan satupun dengan kapasitas professional dalam ranah ini.[173] Menggunakan kriteria yang berdasarkan ilmu untuk menentukan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai suatu mekanisme untuk mengartikan 'sah' atau tidaknya pemangku kepentingan umumnya juga berlaku untuk sistem peraturan lainnya, tapi itu hanya berfungsi untuk kubu yang kurang kritis terutama mereka yang tidak memandang resiko yang berhubungan dengan teknologi (Newell 2006). Seorang mantan wakil CONABIA dari Sekretaris pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan,

[173] wawancara dengan CONABIA, November 2006

ketika dia mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang isu-isu biosafety, ternyata yang belum begitu dipelajari, dan jumlah orang yang kritis ini sangat sedikit jumlahnya daripada orang yang berpihak mendukung teknologi.[174]

Apa yang kita amati kemudian adalah tidak adanya celah resmi yang berfungsi sebagai arena untuk pertimbangan yang efektif, apalagi pembantahan bioteknologi oleh aktivis. Dengan ini, upaya untuk membangun tempat alternatif untuk mengartikulasikan suara-suara 'Pembangkang' tidak bisa diadakan, meskipun ketidakmampuan mereka untuk otoritatif terhadap kemampuan mengambil keputusan akan terus menjadi batasan yang serius bagi usaha perubahan yang abadi.

Representasi

Seperti catatan editor dalam buku ini: "jelas bahwa terjadinya pergerakan global telah membuat langkah yang mengesankan, terlebih bagi kelompok pedesaan, mereka menjadi tidak terwakili sama sekali, namanya saja yang berada dalam gerakan-gerakan agraria transnasional" (Borras et al 2008). Bahkan hal ini terjadi di negara-negara seperti Brazil, yang "konon menjadi benteng dari setiap gerakan-gerakan". Sebagian, ini merupakan hasil dari peran ganda petani yang melakukan sekaligus bertindak sebagai produser, aktivis, warga lokal dan global. Edelman mengartikan ini secara kongkrit: "individu-individu yang sama yang memobilisasi untuk konferensi internasional mungkin juga harus mengerahkan sebuah tim hukum untuk membela kepemilikan yang diperebutkan , tindak lanjut atas perintah kerjasama sementara dan panen di ladang kubis sebelum hujan tiba"(2003, 214). Beberapa mungkin

[174] wawancara dengan ahli ilmu tanah, November 2006

menjadi "pedesaan selebriti" seperti Bove dan Schmeiser dalam kasus RG. Ditekan oleh kendala waktu, prioritas dan kurangnya pemahaman petani terhadap tekhnik pembuatan kebijakan perdagangan, membuat kesempatan hanya sedikit untuk representasi langsung secara realistis. Ini pasti meninggalkan ruang lingkup yang luar biasa untuk pengaturan agenda otonom bagi pimpinan koalisi berbasis luas.

Kebangkitan dan kejatuhan ASOCODE (Asosiasi Organisasi Petani Amerika Tengah untuk pengembangan dan Kerjasama) memberikan peringatan bagi koalisi transnasional yang lainnya agar mempersiapkan sejak dari skala regional dan internasional sambil tetap responsif kepada basis sosial mereka. Seperti yang Edelman cerminkan: "dalam kasus ASOCODE, sebuah organisasi yang sangat terkenal, mempunyai pengaruh yang lebih besar, ketika dihadapkan pada donor, mereka tidak lagi fokus ke petani dan terjadilah percekcokan terus-menerus yang kemudian menghancurkan keduanya dan membawa asosiasi tersebut ke titik di mana namanya saja yang eksis tetapi itu hanya menikmati kejayaan sebelumnya yaitu dinamika dan prestise belaka"(2003, 191).

Sehubungan dengan keduanya, mobilisasi "massa" atau menyebarkan pengaruh melalui saluran kelembagaan formal, membuat isu-isu itu berbicara untuk siapa dan tentang apa. Isu-isu semacam itu juga dapat meningkatkan ketegangan antara kelompok masyarakat sipil sebagaimana kerja sama yang mereka bangun dan kemudian dihadapkan dengan pertanyaan tentang siapa yang akan diwakilinya. Dalam koalisi antara aktivis perdagangan di lingkungan NAFTA, serikat buruh menyuarakan keprihatinan mereka mengenai dasar dari perwakilan NGO yang mereka gambarkan dengan berupa sindiran sebagai individu non-pemerintah, sementara itu gerakan tenaga kerja juga dituduh sebagai gerakan dengan tatanan hierarkis yang

tertutup dalam pengambilan keputusan (Newell dan Tussie 2006). Ketika masalah pendanaan dan beragam protes budaya di mana siswa kelas menengah menyingsingkan lengan dengan didukung kaum tani miskin sebagai gabungannya, potensi gesekan sangat besar. Misalnya, dalam mobilisasi sekitar NAFTA, pertanyaan yang diajukan kelompok-kelompok kerja untuk menjamin kesepakatan perjanjian adalah pertanyaan seputar apakah dukungan mereka berguna bagi perjanjian perdagangan, dan apakah itu membantu melahirkan apa saja yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan yang diterima dari kepentingan ekonomi dengan kemungkinan besar berasal dari ketentuan perdagangan.

Ada juga sebuah sisi menarik tentang kontradiksi yang muncul dari pengadopsian sikap anti-RG dengan gerakan-gerakan seperti MST dimana banyak dari mereka yang jajaran anggotanya telah memakai benih RG, sekalipun dalam kebanyakan kasus bersifat ilegal. Keanggotaan aliansi antar bangsa seperti Vía Campesina dan partisipasinya dalam forum seperti WSF, yang sering diselenggarakan di Porto Alegre, menyediakan akses istimewa untuk kelompok yang ternama di Brazil seperti MST, mendorong kepemimpinan untuk mengadopsi sikap anti-RG, yang konsisten dengan keseluruhan strategi yang bertujuan untuk menantang kekuatan agribisnis di Brazil dan seterusnya. Tapi penolakan teknologi oleh pimpinan gerakan dikarenakan adanya adopsi yang meluas dari anggota-anggota pergerakan, mungkin menunjukkan tidak adanya perselisihan internal dibalik posisi pergerakan dalam isu tertentu. Refleksi pribadi dari seorang pengamat yang telah lama mengamati gerakan sosial pedesaan di Brazil seperti kutipan panjang lebar dibawah ini:

> Kami tidak punya perjuangan sosial melawan bioteknologi di Brasil sama sekali. Paling kita hanya

bersifat "reaksi sosial" terhadap RGO. Ada kelompok kecil NGO yang terus memperjuangkan dengan gaya konserfatif, dan ini bisa diterapkan di Brasil, tapi tanpa basis sosial. Protes mereka sangat lemah tanpa menimbulkan kehebohan apapun di media atau di tempat lain. Via Campesina dan MST tidak memiliki informasi dari kelompok-kelompok sosial untuk mendukung retorika politik dari pemimpin mereka ketika berhadapan dengan transgenik ataupun dengan bioteknologi pertanian. Kenyataannya adalah bahwa ketika suatu keluarga yang tidak memiliki lahan ikut berpartisipasi dalam berbagai aksi yang disponsori oleh gerakan-gerakan itu, mereka bahkan membawa spanduk yang isinya menyerang perdagangan dan sebagainya, tetapi ketika anda berbicara kepada mereka akan ada aksi tutup mulut tentang isu-isu ini. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sasaran yang dibangun kepemimpinan oleh sebuah kelompok kecil tidak menemukan reaksi terhadap kelompok yang lebih rendah dalam gerakan ini. Sebagai contoh satu dari sekian banyak keganjilan yang ada dalam perkembangan politik, ialah sikap anti-transgenik dari MST dan fakta bahwa para pemukiman petani berada dibawah pengaruh gerakan di ladang-ladang produktif yang menggunakan bibit transgenik di ladangnya.[175]

Sama halnya dengan keraguan Scoones tentang tingkat pemahaman politik kelompok miskin pedesaan untuk wacana yang diartikulasikan tentang bioteknologi oleh orang-orang tokoh gerakan atau pelopor gerakan NGO pedesaan. Dia mencatat:

---

[175] komunikasi personal, dengan pengamat dan aktivis pengembangan pedesaan di Brazil, 12 Desember 2006.

> Sebagian besar penduduk pedesaan……tidak benar-benar memiliki gagasan tentang apa itu tanaman RG dan pada isu-isu lain yang digunakan untuk memobilisasi - kekhawatiran terhadap ketidaktahuan (tanaman penghancur, makanan olahan dll), kepentingan akan hak paten, hilangnya keanekaragaman lokal dan sebagainya. Memang, sangat sering para petani yang sama dimobilisasi oleh gerakan petani yang terorganisir – apakah itu KRRS di Karnataka atau MST di Brazil – mereka adalah petani yang sama yang juga menanam tanaman RG secara ilegal, atau mereka akan mencobanya jika mereka bisa. (2005, 18)

Tingkatan yang lebih tinggi dari keterlibatan langsung ini adalah dengan orang-orang yang mengklaim dirinya mewakili kepentingan mata pencaharian yang lebih terpusat. Pertanyaan tentang reforma agraria, akses terhadap tanah dan hak terhadap makanan memasuki tingkat kekhawatiran yang sangat memprihatinkan bagi mereka yang mata pencahariannya terikat dengan pengembangan pedesaan. Hal ini mungkin dapat dibenarkan dengan dikatakan bahwa tidak perlu untuk berkonsultasi dengan basis keanggotaan petani miskin dan petani yang tidak memiliki lahan tentang keinginan mereka akan memiliki lahan. Tapi 'wacana koalisi' yang terbentuk seperti semboyan''kedaulatan makanan'' menyamarkan banyak fakta, bahkan produsen kecil sekalipun, yang benar-benar tergantung pada sistem ekspor pertanian dan meskipun mereka mungkin mendapatkan manfaat dari reforma agraria lebih dulu, berpisahnya ekonomi lokal dari rantai pasokan global juga mungkin bisa menjadi bencana bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam pengertian ini Scoones membenarkan untuk memberi kesan bahwa biotek, bukannya sebuah isu yang mencuat dari bawah, dengan pangkat dan jajaran anggota yang menuntut sikap yang

tegas dalam suatu kepemimpinan, secara strategis, ini mewakili suatu kesempatan yang berguna bagi pergerakan seperti MST untuk meingkatkan pamor dan mengkonsolidasikan posisi mereka dalam mendukung jaringan internasional. Dia mencatat: "seiring dengan terus meningkatnya pergerakan di dunia - dengan website dan dukungan kelompok di AS dan Eropa. . . [Dan] kedatangan aktivis dengan pesawat murah ke Porto Allegre untuk perayaan WSF setiap tahun, MST mampu meninggikan pamor mereka di tingkat internasional (dan lokal) dan menempa hubungan dengan ruang ketenaran aktivis anti-RG internasional yang datang'(2005, 22).

Seperti koleksi catatan editor dalam kata pengantar ini, hanya ada satu yang terbaik yaitu bekerja dengan 'representai sebagian' dimana klaim berbicara atas dasar basis massa sosial yang dilakukan tanpa mekanisme yang terkait dalam gerakan pembujukan, apalagi bertindak sendirian diatas kepentingan yang mungkin meluas. Sebagai catatan editor, 'representasi efektif yang berbasis ketertarikan sosial dalam gerakan, tidak dapat diasumsikan menjadi sesuatu yang otomatis atau permanen dan bukan bermasalah" representasi efektif " secara dinamis dapat dinegosiasikan didalam dan di antara kepemimpinan dan bagian keanggotaan gerakan dari waktu ke waktu. "

Di sini kita menemukan broker politik yang dilakukan oleh para perantara *"speaking for not with*", yang mengklaim legitimasi yang akan dijadikan sebagai basis sosial mereka. Bahayanya adalah bahwa mempertahankan koalisi, terutama ketika ada prospek pendanaan lanjutan, akan lenyap dengan sendirinya. Dalam konteks ini, dasar rasionil suatu organisasi, untuk melayani konstituen marginal tertentu menjadi tidak penting demi mempertahankan pekerjaan mereka di kepaniteraan, pilihannya ada dua, menjaga momentum kampanye atau menjamin pendanaan untuk acara internasional selanjutnya. Memutuskan ini

tidak butuh banyak waktu untuk menentukan apakah pendukung setuju bahwa ini adalah prioritas untuk koalisi atau tidak. Seperti yang dikatakan Edelman, praktek jaringan 'representasi - Mengajukan proposal, menyelenggarakan pertemuan, penerbitan *newsletter* atau situs web, penyusunan "kegiatan program partai"- kadang berusaha untuk menunjukkan efektivitas jaringan dengan mengacu pada deskripsi diri sendiri- dan kegiatan – kegiatan yang lebih baik dari dampak yang nyata pada konstituen yang ditargetkan, yaitu kebijakan dan institusi (2003, 214). Seperti yang terjadi dengan MST di Brazil, gerakan yang diundang untuk berpartisipasi dalam undangan adalah institusi formal, oleh karena itu partisipasi dan representasinya jarang menjurus pada permasalahan yang disasar. Dilema representasi ini diperkuat oleh seperti dengan apa yang sering disebut aktivis sebagai "pemerintah bersahabat"[176] atau gerakan-gerakan dalam kekuasaan. Seperti halnya dengan MST, kegagalan laju reformasi melalui cara institusional dan politik kompromi dan negosiasi sudah jelas dan tidak diragukan, dapat menyebabkan kegagalan dan intensifikasi dari sebuah strategi tindakan langsung, untuk gerakan yang terkenal (Petras dan Veltmeyer 2005).

Kemudian kita juga dapat melihat gerakan-gerakan "massa" yang menurut dugaan orang berada dalam yang konteks "ketidakteraturan mayoritas" yang lebih luas yang tidak dimobilisasi atau tidak transnational. Ada juga fenomena minoritas yang terorganisir; kelompok vokal dengan hubungan internasional yang baik tetapi memiliki basis social sedikit atau pengaruh nasional yang lemah. The

[176] Tema ini muncul sebagai tema utama dalap diskusi di workshop yang kami susun dengan aktivis perdagangan dalam "Cumbre por la intergracion de los pueblos". KTT yang diadakan di Cochambamba, Bolivia pada bulan Desember 2006 pada waktu yang sama dengan pertemuan Community of South Americas Nations.

Argentine Grupo Reflexión Rural, Sebuah NGO pengembangan pedesaan kecil , telah berhasil mengembangkan hubungan dengan kelompok-kelompok di kawasan ini ,seperti RALLT (*Red por una América Latina Gratis de Transgénicos)* dan melakukan hubungan internasional melalui kegiatan Forum Sosial Dunia (WSF). Penolakan mereka tentang biotek merupakan bagian kritik yang lebih luas terhadap dampak sosial dan lingkungan dari suatu model yang berorientasi kepada ekspor pengembangan agribisnis, penekanan ini seiring dengan aktivis anti-globalisasi yang telah bersedia untuk menawarkan program-program pada pertemuan aktivis di Eropa dan di tempat yang lain.[177] Mengadopsi taktik cerdas media- dari kelompok seperti Greenpeace, termasuk protes di luar konferensi perusahaan dan pameran bioteknologi pertanian, mereka menghadirkan wartawan untuk mendapatkan foto yang baik, tetapi menurut beberapa, tidak ada pembahasan atau apa pun di belakang posisi pembelaan mereka ini.[178]

Kesimpulan

Mengevaluasi dampak dan makna yang lebih luas dari intervensi politik perdagangan dan pengembangan pertanian yang berkaitan dengan bioteknologi di Amerika Latin dengan kerumitan yang ada membuat ini sebagai latihan yang utuh. Sudah jelas banyak variabel yang menjelaskan bahwa sedikit banyak dampak itu dirasakan oleh kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan. Dalam istilah klasik, dampak dari aksi bersama sangat dipengaruhi oleh "kesempatan struktur politik ", mobilisasi sumber daya dan "pembingkaian isu" (McAdam et al. 2003). Tapi kita juga telah melihat bagaimana -mobilisasi politik mikro

[177] Contohnya, Adolfo Boy diundang sebagai pembicara pada kontra –KTT Uni Eropa-Pertemuan perdagangan Amerika Latin

[178] Wawancara dengan jurnalis, 15 November 2006

menimbulkan serangkaian faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam menentukan sejauh mana agenda aktivis biotek membuat banyak kemajuan: pentingnya partai politik, peran media dan dampak strategi dan budaya protes dalam suatu tatanan politik yang beraneka ragam.

Tentu saja ada juga berbagai dampak indikator. Sebagian besar tujuannya ialah, mengubah kebijakan pemerintahan atau kebijakan perusahaan: tuntutan untuk penataan baru atau perbaikan kebijakan dari gerakan-gerakan yang menentang. Contohnya, merangkum ketentuan penilian akan dampak lingkungan, ketentuan biosafety yang ketat, pembatasan penggunaan GURTs atau pernyataan dari perusahaan bahwa mereka tidak akan mengambil sumber kedelai dari ladang yang tandus untuk membuat celah bagi budidaya tanaman. Untuk gerakan lain, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai teknologi dan tata cara dalam perjanjian perdagangan pemerintah otonomi nasional yang kacau dengan menerima teknologi. Masih dengan kasus yang lain, termasuk MST dan Via Campesina, kampanye sekitar bioteknologi adalah kepentingan sekunder terhadap permasalahan yang sesungguhnya, yaitu pembaruan agraria dan ekonomi yang selama ini tergantung pada kekuatan investor agribisnis. Mencapai perubahan dalam arena ini, kesepakatan aliansi antara pejabat Negara dan modal (trans)nasional yang menjalankan strategi akumulasi, membuat perdebatan bioteknologi tampaknya tidak signifikan untuk dibandingkan.

Teknik pergeseran yang langsung dan dramatis dalam kebijakan mungkin merupakan tujuan yang masih jauh, tetapi tantangan jangka pendek adalah untuk melibatkan masyarakat dalam perdebatan, dan tantangan media saat ini adalah membuat pemerintah tertarik terhadap masalah ini. Kenyataan bahwa pemerintah utama di wilayah ini terus mendukung bioteknologi (Argentina, Brazil) atau di

beberapa kasus bertindak oposisi atau sikap skeptis terhadap keterbalikan itu (Peru, Bolivia) bukanlah bukti dari suatu kegagalan pergerakan. Kekuatan, pengaruh ekonomi dan sumber daya politik yang merupakan penyokong bioteknologi dan potensi perjanjian liberalisasi perdagangan jauh lebih besar daripada perlawanan mereka. Namun, dengan memposisikan strategi yang cermat , jaringan yang luas dan membangun suatu aliansi, pada kesempatan yang mereka miliki, semua itu bisa mengakali lawan-lawan mereka. Seperti catatan Peleaz dan Schmidt dalam kaitannya dengan Brasil, misalnya, untuk beberapa waktu walaupun semua teknis istimewa yang ditawarkan dan pengetahuan ilmiahnya, pengalamannya dalam mendekati regulator di negara-negara lain dan dengan sumber finansial yang besar untuk membangun jaringan pemasaran yang besar dan berinvestasi dalam "tekanan ekonomi", Monsanto tidak bisa mendapatkan otoritas untuk merilis kedelai RG di Negara tersebut (2004,254).

Aktivis Biotech sangat pandai dalam menjalin hubungan antara biotek dan isu-isu yang beresonansi dengan khalayak publik yang beraneka ragam, dampak teknologi pada mata pencaharian petani miskin pedesaan, kesehatan dan masalah lingkungan hidup bagi konsumen perkotaan. Pada suatu waktu, mereka mendapatkan tantangan dalam medan perdebatan, memperkenalkan bentuk alternatif dari keahlian dan menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya (Fitting 2006). Mereka sudah sukses menciptakan celah-celah informal untuk menambah partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perdebatan kebijakan yang selama ini selalu ditempatkan di luar ranah musyawarah bersama para ahli. Mereka juga telah sukses dalam menempa hubungan dengan aktivis anti-RG internasional yang, pada gilirannya, mempunyai pengaruh di beberapa bidang. Hal ini dapat membuat efek 'bume-

rang' (Keck dan Sikkink 1998) misalnya di mana sebuah perusahaan bioteknologi di Eropa tunduk pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap tindakannya di pedesaan Brasil.

Namun demikian, sekalipun kemenangan sementara dalam pertempuran dengan negara (khususnya asing), perang atas bioteknologi di Negara besar dalam suatu wilayah dpat dimenangkan. Perusahaan biotek telah menerima produk mereka dengan melalui proses yang lambat dari suatu pergesekan, membangun suatu koalisi secara teliti dan menciptakan lobi-lobi yang terpadu dalam ranah kelembagaan dan masyarakat secara seimbang. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, bagaimana masa depan liberalisasi perdagangan di daerah ini dan sejauh mana akan maju, baik secara regional atau secara bilateral. Ini bisa dilihat sebagai tantangan bagi aktivis untuk memastikan bahwa keberhasilan di tingkat regional dan banyaknya inisiatif, jika menghasilkan kesepakatan bilateral jauh lebih baik dari pada tidak ada nya perjanjian yang diusulkan dari daerah (Gallagher, 2008).Kasus FTA antara AS dan Peru, seperti yang disebutkan di atas, adalah satu kasus dalam permasalahan ini.

Dalam hal ini Perdebatan bioteknologi dalam ranah nasional akan terus menjadi petunjuk dan dampak yang berbeda secara signifikan di seluruh wilayah. Di Argentina, ada suatu wadah kecil yang disediakan untuk memperdebatkan bioteknologi. Kesesuaian material, institusional dan ada kekuatan diskursif yang menghasilkan pengaruh 'agro-hegemoni'. Hal yang serupa juga terjadi di Uruguay dan Paraguay. Meskipun lebih dini, kami telah melihat meningkatnya sambutan akan teknologi di Brazil dan sikap berkeberatan yang berkelanjutan dalam menanggapi promosi transgenik. Ketika dihadapkan dengan oposisi, negara menyerah kepada agribisnis. Meskipun secara pribadi harapan yang sangat besar dari aktivis RG ada di

Presiden Lula karena janji yang diungkapkan sebelum pemilihan dirinya dan keterkaitannya terhadap gerakan oposisi, dan dengan Menteri Pertanian, Roberto Rodrigues, dengan cepat mendukung sekutunya dalam bidang agribisnis. Maka dalam bulan Maret 2003, ketika dihadapkan dengan keputusan tentang apakah mengeluarkan kebijakan pelarangan RG dan pengrusakan tanaman panenan yang terjadi tahun 2002-03 atau mengizinkan penjualannya, akhirnya pemerintah mengizinkan pemasaran tanaman RG, dimana banyak aktivis yang kecewa. Keputusan Presiden lebih lanjut kembali mengizinkan penjualan kedelai RG dari 2003 - 04, meskipun tetap tidak mendapat pengesahan untuk penanaman (Scoones 2005). Hukum tentang Biosafety yang disetujui oleh Senat pada tahun 2005 telah membuka jalan terhadap konsolidasi akan posisi Brasil sebagai pemimpin global dalam bidang bioteknologi,mengikuti jalur yang telah dijalankan oleh negara tetangganya Argentina.

Ketergantungan negera ini terhadap agribisnis merupakan tantangan politik. Salah satu pengamat berkata kepada saya: "itu akan sulit untuk menciptakan oposisi politik terhadap agribisnis atau problematis teknologi pertanian modern saat ini ketika surplus keuangan ekspor Brasil terbentuk terutama dari ekspor biji-bijian, sebagian besar dihasilkan dari agribisnis[179] Dalam korespondensi informan lebih lanjut mencatat: "terutama jika kita berpikir dalam istilah transgenik untuk produksi pertanian, nampaknya pertempuran telah dimenangkan oleh kepentingan komersial. Alasannya bukanlah politik tapi praktis. Produksi biji-bijian transgenik, terutama kedelai, sekarang tersebar diseluruh Brazil dan saya tidak dapat melihat bagaimana mencegah penggunaannya lebih lanjut.

[179] Komunikasi pribadi, dengan pengamat dan aktivis desa pengembangan di Brazil , 12 Desember 2006

Beberapa pegawai pemerintahan masih berbicara tentang pembatasan dan sebagainya, tapi ini hanya retorika untuk publik karena tidak ada regulasi untuk membatasi itu[180]

Sebuah artikel yang muncul di halaman opini surat kabar *Folha de Sao Paulo* mendukung alasan ini, disana ditunjukkan skala penanaman tanaman ilegal seperti kedelai dan kapas dan ketidakmasukakalan yang sesungguhnya dalam mengatur hal itu secara efektif, yang menghasilkan "kelumpuhan institusional".[181] Mungkin perdebatan terhadap biotek telah dimenangkan. Sudah pasti kita harus menyadari bahwa kekuatan dipegang oleh orang-orang yang mendukung teknologi, yang mendukung integrasi perdagangan regional sehingga berbaur dan memastikan perlindungan seluruh Amerika Latin, yang mana mencakup beberapa lobi-lobi paling berpengaruh dalam ekonomi politik global kontemporer dari sektor agribisnis. Ada banyak tekanan yang dibawa untuk dibebankan kepada pemerintah di seluruh wilayah yang mendapatkan bioteknologi pertanian, melalui ancaman perdagangan atau penerimaan paksa terhadap bantuan pangan RG seperti dalam kasus Bolivia dan Ekuador, penerapan perjanjian perdagangan bilateral merupakan sinkronisasi dari sistem peraturan yang berkaitan dengan bioteknologi seperti dalam kasus perjanjian antara Peru dan Amerika Serikat atau tindakan secara resmi yang dilakukan oleh Monsanto terhadap mantan sekutunya Argentina, negara-negara di wilayah ini bergerak dalam konteks "otonomi yang terbatas" (Newell2006). Banyak pemerintah, tampaknya, percaya bahwa mereka tidak mampu untuk membicarakan masa depan teknologi. Tantangan

[180] Komunikasi pribadi, dengan pengamat dan aktivis desa pengembangan di Brazil , 12 Desember 2006

[181] 'Barreira transgênica', Folha de São Paulo 24/12/06.

bagi aktivis adalah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat dan *tidak* mampu untuk memperdebatkan teknologi, dan ketidakmampuannya untuk mengubah sistem produksi pertanian yang bergantung pada banyak daerah dengan penduduk termiskin.

Referensi

Acción Ecológica, 2004. 'Area de Libre Comercio de las Américas'. http://www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=242, Accessed 2 February 2007.

Andrioli, A.I., 2006. 'Soja Orgânica versus Soja Transgênica'. *Movimento Dos Trabalhadores Rurais sem Terra*, October 30. http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=2334, Accessed 21 February 2007.

Bellisario, A., 2007. 'The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist "Partial" Counter-Agrarian Reform, 1964–1980: Part 1: Reformism, Socialism and Free-Market Neoliberalism'. *Journal of Agrarian Change*, 7 (1): 1–34.

Benbrook, C.M., 2005. 'Rust, Resistance, Run Down Soils and Rising Cost: Problems Facing Soybean Producers in Argentina'. AgBioTech InfoNet, Technical paper no. 8. http://www.earthscape.org/p1/ES16592/Greenpeace_rust.pdf, Accessed 12 October 2006.

Boff, L., n.d. 'Transgênicos? Não'. http://www.cebusai.org.br/transgenicos.htm, Accessed 12 May 2006.

Borras, S. Jr, 2004. 'La Vía Campesina: An Evolving Transnational Movement'. TNI Briefing No. 2004/6. Amsterdam: Transnational Institute.

Borras, S. Jr, M. Edelman and C. Kay, 2008. 'Transnational Agrarian Movements: Origins and Politics, Campaigns and Impact'. *Journal of Agrarian Change*, 8 (2/3): 169–204.

Boy, A., 2006. 'Grupo Reflexión Rural'. Presentation, *Enzando Alternativas*, Vienna, 10–13 May 2006.

Burnham, P., 2002. 'Class Struggle, States and Circuits of Capital'. In *Historical Materialism and Globalisation*, eds M. Rupert and H. Smith, 113–29. London: Routledge.

Campolina, A., 2001. 'Brazilian Small-Scale Farmers and Poor Consumers Reject RGOs'. *LEISA Magazine*, 29 December.

Clapp, J., 2006. 'The Political Economy of Food Aid in an Era of Agricultural Biotechnology'. In *The International Politics of Genetically Modified Food: Diplomacy, Trade and Law*, ed. R. Falkner, 85–101. Basingstoke: Palgrave.

Conway, G., 1999. *The Doubly Green Revolution: Food for All in the Twenty-First Century*. New York: Cornell University Press.

Edelman, M., 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society*, eds H. Anheier, M. Glasius and M. Kaldor, 185–221. Oxford: Oxford University Press.

EDM (En Defensa del Maíz), 2002. Conclusiones del seminario, Ciudad de México, 23 and 24 January. http://www.ceccam.org.mx/ConclusionesDefensa.htm, Accessed 4 December 2007.

Fitting, E., 2006. 'The Political Uses of Culture: Maize Production and the RG Corn Debates in Mexico'. *Focaal: European Journal of Anthropology*, 48: 17–34.

FoEI (Friends of the Earth International), 2007. *Who Benefits from RG Crops? An Analysis of the Global Per-*

formance of RG Crops (1996–2006). Amsterdam: Friends of the Earth International.

Gallagher, A., 2008. 'Trading away the Ladder? Trade Politics and Economic Development in The Americas'. *New Political Economy*, 13 (1): 37–59.

Galli, E., 2005. 'De la Chaucha de Soja al Reactor Nuclear de Investigación'. *La Nación*, 4 January, 2.

Global Exchange, 2004. 'Top Ten Reasons to Oppose the Free Trade of the Americas'. http://www.globalexchange.org/campaigns/ftaa/topten.html, Accessed 2 August 2004.

Glover, D. and P. Newell, 2004. 'Business and Biotechnology: Regulation of RG Crops and the Politics of Influence'. In *Agribusiness and Society: Corporate Responses to Environmentalism,Market Opportunities and Public Regulation*, eds K. Jansen and S. Vellema,200–31. London: Zed Books.

Glover, D., J. Keeley and P. Newell, 2003. *Public Participation and the Cartagena Protocol on Biosafety*. A Review for DfiD and UNEP-GEF. Brighton: Institute of Development Studies.

Greenpeace, 2006a. 'Desmontes S.A: Quiénes Están Detrás de la Destrucción de los Ultimos Bosques Nativos de la Argentina'. Greenpeace Argentina Report. http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/bosques/desmontes-s-a.pdf, Accessed 15 October 2006.

Greenpeace, 2006b. 'A Turning Point in the Fight to Protect the Amazon'. *The Guardian*, 28 September 17.

Hajer, M.A., 1995. *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford: Oxford University Press.

Hochstetler, K., 2003. 'Fading Green? Environmental Politics in the Mercosur Free Trade Agreement'. *Latin American Politics and Society*, 45 (4): 1–33.

Icaza, R., 2004. *Civil Society and Regionalisation. Exploring the Contours of Mexican Transnational Activism*. CSGR Working Paper No. 150/04, Warwick University.

James, C., 2006. *Global Status of Commercialized Biotech/RG Crops*. ISAAA Briefs No. 35. Ithaca, NY: ISAAA.

Jansen, K. and S. Vellema, eds, 2004. *Agribusiness and Society: Corporate Responses to Environmentalism, Market Opportunities and Public Regulation*. London: Zed Books.

Kay, C., 2002. 'Chile's Neo-Liberal Agrarian Transformation and the Peasantry'. *Journal of Agrarian Change*, 2 (4): 464–501.

Keck, M. and K. Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kenfield, I. and R. Burbach, 2007. 'Landless Rural Worker Shot by Security Company Hired by Multinational Syngenta'. Posted on the 'Brazil Network' list serve, 21 October 2007.

Kossoy, A., 2003. 'Iniciativas de Asociaciones de Productores Agropecuarios: La Incorporación de la Soja en la Emergencia Alimentaria'. In *Respuestas de la Sociedad Civil ala Emergencia Social*, eds I. González Bombal, 89–119. Buenos Aires: CEDES.

Levidow, L., 1998. 'Democratizing Technology or Technologizing Democracy? Regulating Agricultural Biotechnology in Europe'. *Technology in Society*, 20 (2): 211–26.

Lipton, M., 2001. 'Reviving Global Poverty Reduction: What Role for Genetically Modified Plants?'. *Journal of International Development*, 13 (7): 823–46.

McAdam, D., S. Tarrow and C. Tilly, 2003. 'Dynamics of Contention'. *Social Movement Studies*, 2 (1): 99–102.

Murray, W., 2006. 'Neo-Feudalism in Latin America? Globalisation, Agribusiness and Land Re-Concentration in Chile'. *The Journal of Peasant Studies*, 33 (4): 646–77.

Newell, P., 2006. 'Corporate Power and Bounded Autonomy in the Global Politics of Biotechnology'. In *The International Politics of Genetically Modified Food*, eds R. Falkner, 67–85. Basingstoke: Palgrave.

Newell, P., 2007. 'Trade and Environmental Justice in Latin America'. *New Political Economy*, 12 (2): 237–59.

Newell, P. and D. Tussie, 2006. 'Civil Society Participation in Trade Policy in Latin America: Lessons and Reflections'. IDS Working Paper, 267. Brighton: Institute for Development Studies.

Oya, C., 2005. 'Sticks and Carrots for Farmers in Developing Countries: Agrarian Neo-Liberalism in Theory and Practice'. In *Neo-liberalism: A Critical Reader*, eds S. Saad-Filho and D. Johnston, 127–35. London: Pluto Books.

Paarlberg, R., 2001. *The Politics of Precaution: Genetically-Modified Crops in Developing Countries*. Washington, DC: IFPRI and Baltimore, MD: John Hopkins Press.

PCL (Pastoral Commission on Land), 2004. 'Declaration on RGOs'. http://www.cptnac.com.br/?system=news&action=read&id=1230&eid=88, Accessed 21 August 2006.

PCL (Pastoral Commission on Land), n.d. 'The Solution is to Preserve'. http://www.cptnac.com.br/?system=news&eid=87, Accessed 21 August 2006.

Peleaz, V. and W. Schmidt, 2004. 'Social Struggles and the Regulation of Transgenic Crops in Brazil'. In *Agribusiness and Society: Corporate Responses to Environmentalism, Market Opportunities and Public*

Regulation, eds K. Jansen and S. Vellema, 232–61. London: Zed Books.

Pengue, W.A., 2005. *Agricultura Industrial y Transnationalización en América Latina: ¿La Transgénesis de un Continente?* Mexico City: PNUMA and Buenos Aires: GEPAMA.

Petras, J. and H. Veltmeyer, 2005. *Social Movements and State Power*. London: Pluto Press.

Pimbert, M. and T. Wakeford, 2002. *Prajateerpu: A Citizen's Jury/Scenario Workshop on Food and Farming Futures for Andhra Pradesh India*. Brighton: Institute for Development Studies and London: International Institute for Environment and Development.

RACDV (Rede Alerta Contra o Deserto Verde), n.d. 'Comunidades e Monocultures de Arvores'. http://www.wrm.org/uy/inicio.html, Accessed 12 April 2006.

Radio Mundo Real, n.d. 'Terminator Seeds are Killer Seeds, of Other Crops and of Peasants'. http://www.viacampesina.org/main_sp, Accessed 12 December 2006.

RALLT (Red por una América Latina Libre de Transgenicos), 2007. 'Una Red de Resistencia a los Organismos Transgénicos en América Latina'. http://www.rallt.org.menus/mision.htm, Accessed 12 September 2007.

Santos, I.F., n.d. 'Action Day Against Terminator Mobilizes Vía Campesina and Environmentalists'. http://www.viacampesina.org/main_sp, Accessed 30 March 2006.

Santos, M., 2006. 'Inimigo é Parceria Entre Latifúndio, Agronegócio e Empresas Transnacionais'.*Movimento Dos Trabalhadores Rurais sem Terra*, 13 December. http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=2593, Accessed 9 February 2007.

Scoones, I., 2005. 'Contentious Politics, Contentious Knowledges: Mobilising Against RG Crops in India, South Africa and Brazil'. IDS Working Paper, 256. Brighton: Institute for Development Studies.

Scoones, I. and J. Thompson, eds, 2003. 'Participatory Processes for Policy Change: Learning from Experiments in Deliberative Democracy'. PLA Notes 4.

Stedile, J.P., 2004. 'Who Does the Agribusiness Model of Agriculture Serve?' *Movimento Dos Trabalhadores Rurais sem Terra*, 1 June. http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=500, Accessed 6 March 2007.

Tarrow, S., 2005. *The New Transnational Activism*. New York: Cambridge University Press. Teubal, M. and J. Rodríguez, 2002. *Agro y Alimentos en la Globalización: Una Perspectiva Crítica*. Buenos Aires: La Colmena.

The Economist, 2006. 'Argentina's Government and its Farmers'. 26 October. http://www.economist.com/displayStory.cfm?Story_ID=E1_RDRGRTJ, Accessed 2 November 2006.

Third World Network, 2006. 'US FTA Likely to Open Peru to RGOs?'. 2 October. Kuala Lumpur, Malaysia: TWN Biosafety Information Service.

Thrupp, L.A., 1996. 'New Harvests, Old Problems: The Challenges Facing Latin America's Agro-Export Boom'. In *Green Guerrillas: Environmental Conflicts and Initiatives in Latin America and the Caribbean*, ed. H. Collinson, 122–32. London: Latin America Bureau.

Vara, A.M., 2005. 'Argentina, RG Nation; Chances and Choices in Uncertain Times'. NYU Project on International RGO Regulatory Conflicts. (http://www.law.nyu.edu/centers/etc/profrans/Argentina%20Country%20Case%20Sept%20%202005>vara.d'), Accessed 10 October 2005.

Vía Campesina, 2007. 'Attack by Syngenta's Armed Militia Results in Deaths and Wounded in Brazil'. Press Release, 21 October.

Vía Campesina, n.d. a. 'Open Letter from Vía Campesina to President Lula'. http://www.viacampesina.org/main_sp, Accessed 12 January 2007.

Vía Campesina, n.d. b. 'Vía Campesina Brazil and the Question of Seeds'. http://www.cptnac.om.br/?system=news&action=read&id=1226&eid=87, Accessed 20 December 2006.

Vía Campesina, n.d. c. 'Victory of Peasants in Defense of Seeds and Against the Terminator'.http://www.mmcbrasil.comb.br/noticias/080306/060406_via_campe.htm, Accessed 12 April 2006.

Warwick, H., 2000. 'Sygenta: Switching off Farmers' Rights?' Report by Genewatch Action Aid, The Berne Declaration and the Swedish Society for Nature Conservation.

WRM (World Rainforest Movement), 2006. 'Petition to the CBD to Ban the Releast of RG Trees'. http://www.wrm.org.uy/temas/ARG/cartaCBD.html, Accessed 2 April 2006.

Wynne, B., 2001. 'Creating Public Alienation: Expert Cultures of Risk and Ethics on RGOs'. *Science as Culture*, 10 (4): 445–81.

8

Mengklaim Tanah Untuk Reformasi Gerakan Agraria dan Lingkungan di Indonesia

Nancy Lee Peluso, Suraya Afiff
dan Fauzi Noer Rachman

Pendahuluan

Di dalam bab ini dibahas lintasan dan strategi 'baru' pergerakan agraria yang perlu dipahami dalam hubungannya dengan gerakan lingkungan serta posisi dan hubungan kekuasaan dari kedua tipe pergerakan tersebut dalam perkiraan pergeseran politik ekonomi. Kami memfokuskan pada persamaan dan perbedaan antar pergerakan di Indonesia dan bagaimana perubahannya terjadi di bawah perubahan dan transformasi politik ekonomi sejak tahun 1970 ketika "gerakan lingkungan modern" dimulai. Indonesia merupakan kasus yang menarik untuk mencerminkan kecenderungan yang lebih luas, karena membantu menunjukkan bahwa pergeseran aliansi dan konflik tidak berasal dari kekuatan transnasional sendiri. Sebaliknya, kami menyarankan bahwa mereka juga tergantung pada keadaan asal-usul politik ekonomi dan sejarah masing-masing gerakan, pada jenis tanah yang

diperebutkan, pada politik yang memiliki akses ke lahan tersebut dan munculnya apa yang Hajer (1993, 1995) sebut sebagai 'Wacana koalisi', yang mendominasi ruang terpisah. Selain melihat wacana sebagai ruang terpisah dalam bidang praktek dan institusi, kami juga memeriksa hubungan dari praktek-praktek terpisah dari kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah, transnasional, nasional dan organisasi akar rumput yang terlibat dalam perjuangan gerakan agraria dan gerakan lingkungan di Indonesia

Pergeseran koalisi ini meliputi pergeseran yang terjadi di gerakan agraria dan lingkungan, serta organisasi masyarakat adat dengan kepentingan yang mungkin berhubungan dengan salah satu ataupun keduannya, ini membantu kami untuk lebih mengerti apa yang dimaksudkan dalam tesis Christodolou (1990, 112) bahwa "reforma agraria adalah turunan dari konflik agraria". Secara khusus, kami berpendapat bahwa bentuk koalisi didalam konteks konflik agraria khususnya mempunyai efek yang lama, bahkan ketika kelompok-kelompok gerakan bergerak maju dan mengikuti yang baru, disana banyak lintasan yang terpisah. Efek berbeda dari beragam konflik yang berbeda sangat jelas di Indonesia, di mana sejumlah konflik agraria menghasilkan bermacam koalisi yang berbeda dan membantu menghasilkan peluang politik baru di masa-masa berikutnya. Konflik Agraria di tahun 1960-an, misalnya, tidak mengarah langsung ke reforma agraria (Husken and White 1989; Farid 2005).

Suatu hal yang penting di sini adalah bagaimana agraria didefinisikan. Ini penting terutama dalam memahami kebangkitan kembali gerakan agraria di Indonesia saat ini, Penguasa yang ditargetkan adalah "institusi pengelolaan lingkungan"- Departemen Kehutanan. Pengambilalihan jutaan hektar tanah oleh negara dengan menciptakan hutan nasional menempatkan hak kehutanan berada dijantung sebagian besar perjuangan agraria di In-

donesia, meskipun ini mengambil bentuk berbeda di berbagai negara (lihat misalnya, Bachriadi dan Lucas 2001; Li 2007). Dalam bab ini, kami menyertakan konflik lingkungan atas akses ke dan kontrol atas hutan dan kampanye anti-bendungan dalam penggunaan istilah konflik agraria, karena hal itu terkait isu-isu hak dan penggunaan sumber agraria berupa tanah. Pertentangan ini mengambil tempat lebih luas didalam hal pendefinisian "lingkungan agrarian" (Sivaramakrishnan dan Agrawal 2003), sebuah istilah yang mengakui bahwa situs tersebut tidak selalu dipisahkan menjadi wacana terpisah dan domain dari "Kehutanan" dan "pertanian".

Gerakan agraria di Indonesia dan hubungan transnasional mereka sangat disebabkan karena politik tertentu dan momen sejarah dimana mereka muncul dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tekanan besar repeasantization[182] melalui pendudukan tanah dan pembentukan organisasi pedesaan baru telah terjadi setelah lebih dari 30 tahun terjadinya depolitisasi dan kekerasan terstruktur sejak pembantaian besar-besaran ditahun 1965-1966 (Cribb 1990) dan, pengambilalihan tanah secara sistematik oleh badan-badan negara di Indonesia dan kroni-kroni mereka di sektor (Fauzi 1999; Farid 2005). Gerakan agraria yang baru, secara simultan muncul bersamaan dengan upaya-upaya dan usaha desentralisasi serta kerja-kerja penguatan masyarakat sipil (Robison dan Hadiz; Hadiz 2004a, 2004b). Kekhasan ini membuat gerakan agraria Indonesia menjadi unik dan penting untuk dipahami karena mereka dibatasi dalam kemampuan mereka untuk terhubung dengan

[182] "petani" di sini merujuk kepada para petani kecil dan pemilik tanah yang tidak memiliki lahan di luar area yang diduduki. Kata, 'Petani' di Indonesia diterjemahkan baik "peasant" atau "farmer". Aktivis agraria di1990-an secara eksplisit memilih untuk diterjemahkan menjadi "petani" dalam bahasa Inggris untuk konotasinya yang lebih radikal.

jaringan transnasional sampai akhir 1990-an. Di bawah kondisi represif rezim "Orde Baru'-nama dari rezim Soeharto yang dikenal selama 32 tahun (1966 -98)-, aktor-aktor gerakan lingkungan dan agraria Indonesia kerap harus berada dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan bentuk solidaritas, meski mempunyai beberapa perbedaan ideologi.

Kasus Indonesia juga menunjukkan bahwa kekuasaan negara tetap penting, meskipun dalam bentuk dan cara kelembagaan yang baru, dalam transisi dari pembangunan oleh negara (termasuk tapi tidak otoritarian) menuju pembangunan ekonomi politik yang didominasi oleh kebijakan neoliberal (lihat juga, Borras 2004). Memang, itu melibatkan aktor negara dan lembaga dalam berbagai koalisi yang terbentuk antara gerakan lingkungan dan agraria yang juga ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mendapatkan tanah - zona spasial – akibat pengaruh lokal, aktor dan lembaga nasional dan internasional.

Bahwa kekuasaan negara tetap penting di bawah perubahan rezim global tampak jelas didalam pencapaian gerakan lingkungan, itu terjadi secara perlahan tapi pasti, di bawah Rezim Suharto. Persimpangan kekuasaan negara dan sejarah wacana koalisi juga tercermin dalam banyak kenginan kelompok keadilan lingkungan untuk bekerja dalam batas hukum kehutanan di KBPSDA-CBNRM [Community-Based Natural Resource Management]) dan proyek-proyek sosial kehutanan. Di sini, "akses pada lahan hutan lebih kepada "hak pribadi atau komunal" bukan hutan dilihat sebagai pencapaian keadilan, meskipun ini tidak cukup untuk proses radikalisasi aktivis reforma agraria yang menuntut hak penuh atas tanah, termasuk pengambilalihan tanah saat ini di bawah yurisdiksi formal institusi-institusi kehutanan negara.[183] Mengingat strategi

[183] Mia Siscawati, komunikasi personal, 2006.

para aktivis lingkungan sebelumnya, sejak Reformasi beberapa kelompok gerakan agraria telah mulai bekerja dengan pemerintah, mencoba membentuk koalisi dengan kabupaten yang bersimpati dan anggota parlemen nasional dan BPN. Ini merupakan hal yang tidak mungkin sebelumnya, dimana organisasi petani didiskriminalisai dan ditekan setelah kebangkitan kampanye anti-kiri dan kekerasan agraria yang membawa Suharto berkuasa pada 1966.

Hal yang juga mempengaruhi sejarah agraria Indonesia dan gerakan lingkungan serta kondisi saling menguntungkan mereka adalah cara masing-masing membentuk hubungan dengan gerakan Masyarakat Adat yang baru lahir. Seperti gerakan lingkungan, faktor pendorong utama gerakan ini berasal dari kegiatan internasional dan meraih imajinasi aktivis Indonesia pada pertengahan tahun 1990-setelah PBB menyatakan Tahun 1993 sebagai *"The Year of The World's Indegenious People*".[184] Namun, gerakan ini harus dipahami bukan hanya sebagai artefak dari politik pergerakan transnasional, tetapi juga sebagai alasan bersejarah dari seperangkat lembaga yang berpartsipasi, berpraktik dan mendorong pembuat kebijakan agar menemukan cara untuk mengekspresikan posisi politik mereka melalui artikulasi dengan wacana transnasional dan nasional (Li 2000, 2001; Moniaga 2007). Hal ini telah secara bergantian diklaim oleh pembela keadilan lingkungan dan agraria.

Kebangkitan kembali gerakan agraria saat ini menunjukkan dampak dari ketegangan sejarah dan kemunculan hal yang baru. Sebagai akibat merosotnya kekuasaan negara, dan dengan itu beberapa dari pencapaian seperti konservasi, desentralisasi, demokratisasi dan meningkatnya hegemoni kebijakan dan praktek neoliberal

[184] Diperpanjang hingga satu dekade.

telah menghasilkan perpecahan baru dalam gerakan lingkungan. Hal ini tercermin dalam aliansi baru antara konservasi dan modal besar dan perubahan dalam aliansi antara keadilan organisasi lingkungan dan reforma agraria. Sementara ketika perubahan koalisi di lapangan, sebuah inisiatif baru reforma agrari yang dipimpin negara diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Kehutanan (Dephut) dan Presiden Indonesia, yang sekali lagi membuat kontestasi tentang reforma agraria mulai dibicarakan secara kritis.

Gerakan agraria kontemporer bertujuan untuk mengubah kebijakan negara dan pelaksanaannya (Webster 2004, 2; Moyo dan Yeros 2005). Gerakan dan serikat petani yang dibentuk oleh praktek dan kebijakan negara dan berbagai bentuk formasi dari akumulasi formasi itu, maupun oleh pergerakan-pergerakan lain di bidang politik, membantu mereka untuk menciptakan gerakan(Buechler 2000, 78; McKeon et al;. 2004 McMichael 2005). Dimensi Transnasional dari kampanye dan pembelaan, pertukaran pengetahuan dan komunikasi, dan tipe baru serta tujuan tindakan kolektif telah menghasilkan ruang baru politik dan budaya secara nasional dan transnasional (Routledge 2004; Edelman 2005; lihat juga Keck dan Sikkink 1998). Sangat penting untuk dipahami, saat ini gerakan lingkungan, banyak dari mereka yang beroperasi di wilayah yang pernah dianggap sebagai 'wilayah Agraria'. Sementara beberapa pekerjaan telah dimulai dalam hubungan ini, sebuah urusan besar menanti untuk dibongkar (Edelman 1999; Franco dan Borras 2005, 2006; Kowalchuk 2005).

Pembentukan dan Jejak Gerakan Lingkungan dan Agraria dalam Politik Indonesia.

Di Indonesia, banyak aktivis lingkungan permulaan mendukung keadilan lingkungan dan bekerja di akar rumput (Tsing 1999; Lowe 2006), menciptakan suatu situasi

dimana aliansi bisa dibuat dengan kelompok-kelompok yang berjuang dalam bentuk lain dari keadilan agraria. Pada bagian ini, kita membahas konteks ekonomi politik pada masa awal tentang agraria, keadilan lingkungan, masyarakat adat, konservasi dan gerakan agraria yang kembali muncul dan berubah di Indonesia, dari tahun 1945 ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai koloni di Hindia Timur, menjadi Orde Baru (1966-1998). Praktik dan strategi dari pembangunan serta otorisasi negara mempengaruhi munculnya ruang untuk manuver dan pendekatan strategis oleh organisasi dan aktivis baik lingkungan maupun agraria. Pentingnya perkembangan kehutanan nasional dan konservasi internasional, secara radikal mengubah politik agraria selama periode ini. Perubahan bidang politik juga mempengaruhi hubungan pergerakan dengan yang lainnya.

Organisasi Agraria bukanlah hal yang baru untuk sejarah Indonesia. BTI (Barisan Tani Indonesia atau Indonesia Peasant Front) telah ada dibentuk pada tahun 1945. Organisasi ini merupakan yang pertama dari beberapa organisasi petani yang beroperasi di seluruh nusantara, dan memiliki basis kuat di Jawa, Sumatera dan Bali. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, organisasi petani ini berhubungan erat dengan partai politik[185]. Partai Komunis Indonesia dan BTI, adalah organisasi legal saat itu, dan dia menjadi pendukung paling aktif dalam program reforma agraria Negara yang bergerak setelah berlakunya UUPA tahun 1960. Mereka memobilisasi masyarakat pedesaan untuk melakukan "tindakan sepihak" dengan menduduki tanah-

[185] BTI (Barisan Tani Indonesia) berafiliasi dengan Indonesia Partai Komunis (PKI), Pertani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) dengan Partai Nasionalis (PNI), dan PERTANU (Persatuan Tani Nadhatul Ulama) dengan salah satu Partai Islam (Nadhatul Ulama) (Pelzer 1982).

tanah milik swasta besar dan menuntut redistribusi (McVey 1965; Lyon 1970;Mortimer 1972). Pada tahun 1965, ketika militer dipimpin oleh Jenderal Suharto, dia merebut kekuasaan dengan kekerasan, semua pihak kiri dan partai yang berhaluan kiri, asosiasi dan organisasi didiskriminalisasi dan dilarang. Ratusan ribu petani dan petani yang diduga menjadi pendukung PKI dan afiliasinya, termasuk BTI, dibunuh (Mortimer 1972; Cribb 1990).

Kekerasan tersebut merupakan saat-saat kritis dari akumulasi sederhana yang didukung semua tahap lebih lanjut dari perkembangan kapitalis dan bentuk-bentuk negara, perusahaan dan kumpulan akumulasi swasta di Indonesia (Farid 2005). Selain itu, pembantaian tersebut menjadikan gerakan sosial pedesaan dan agenda reforma agraria tinggal sejarah; mereka benar-benar berhenti dari beroperasi dalam bentuk yang ada sebelumnya. Transformasi Agraria selama Orde Baru umumnya berupa pencabutan hak milik tanah dalam skala-besar oleh lembaga pemerintah pusat dan kapitalis korporasi atau kroninya (Aditjondro 1993; Fauzi 1999).

Dulu, pada waktu pemerintahan presiden pertama Indonesia, Sukarno, sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dibuat untuk menyingkirkan hukum pluralisme hak pengusaan atas tanah berdasarkan pada kategori ras atau adat dan mendirikan hukum tunggal tanah yang mewakili sebuah bentuk "klasik" dari undang-undang agraria pada saat itu. Hal itu mempromosikan tanah-tanah milik swasta berdasarkan kualitas dan lokasi tanah (dengan tingkatan yang berbeda untuk lahan sawah irigasi dan lahan kering atau dataran tinggi), tetapi setelah kekerasan agraria besar-besaran dan Soeharto naik berkuasa, hukum prinsip-prinsip reforma agraria tersebut sebagian besar diabaikan, meskipun diatas kertas tetap disebut-sebut.

Berbagai program agraria pro-kapitalis mulai dilaksanakan, termasuk program "revolusi hijau" pada produksi

padi dan jagung, eksploitasi pertambangan dan eksploitasi hutan, serta usaha perkebunan besar oleh perusahaan swasta dan Negara (Fauzi 1999; Husken dan White 1989). Semua program ini terikat dengan sumber modal global dan didukung oleh militer-birokrasi-otoriterisasi negara yang dijalankan oleh rezim Suharto. Dibeberapa kasus, seperti kehutanan dan sektor pertambangan, Indonesia mulai masuk dalam pembangunan kapitalisme Negara (Mortimer 1973; Robison 1986; Barr 1997). Negara yang kuat harus diciptakan untuk menjamin stabilitas politik dan agar tetap memegang kontrol penuh pengendalian.

Di daerah dataran tinggi di Jawa dan pada hal yang lebih luas, hutan yang banyak di "Pulau Luar" seperti Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, Institusi Kehutanan dan Industri perkebunan dari Perusahaan dan Negara memusatkan kekuatan eksploitasinya (Barr 1997). Kebijakan "Sektoral" atau undang-undang manajemen sumber daya alam tentang kehutanan, pertambangan dan pembebasan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang diundangkan di bawah Orde Baru pada tahun 1967 secara radikal memusatkan manajemen sumber daya dan melampirkan pentingnya sistem dari lahan untuk hutan cadangan dan industri pertanian, untuk dikelola oleh badan-badan pemerintah di bawah berbagai pengaturan keuangan. Selain itu, undang-undang sumber daya alam ini tidak mengakui UU Pokok Agraria sebagai salah satu prinsip hukum yang mendahuluinya, Sebagai gantinya semua itu dikembalikan ke sebuah klausul di dalam konstitusi nasional dimana Negara memiliki kedaulatan atas "wilayah nasional dan seluruh tanah dan sumber daya didalamnya" (Moniaga 1997; Zerner 1992). Undang-undang ini meliputi sekitar 70 persen dari tanah negara sebagai "hutan politik" nasional (zona hutan selamanya dan dipelihara oleh penjaga hutan negara yang profesional)

dan memperkuat hukum kehutanan untuk Jawa dan Madura, yang telah ada sejak masa kolonial. UU Kehutanan no. 5/1967 secara khusus merupakan usaha untuk membangun agar agraria dan lingkungan hutan secara legal, kelembagaan menjadi ruang terpisah secara konseptual (Peluso dan Vandergeest 2001). Di dalam dan luar Jawa, lembaga manajemen sumber daya berbasis negara ini memiliki tingkatan dan wilayah hukum teritorial sendiri yang tidak bergabung dengan teritori dan otoritas administrasi sipil dan terpisah dari daerah perkotaan dan pertanian di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Peluso 1992; Afiff et al. 2005). Undang-undang ini mengiringi dan memfasilitasi perubahan kritis yang mengubah politik perekonomian Indonesia, struktur dan persepsi pedesaan, serta konteks politik ekologi di mana gerakan agraria selanjutnya akan terus berlangsung (Robison 1986; Barber et al. 1995; Dauvergne 1994).

Di bawah Orde Baru, kelembagaan dan kendali hukum kontrol disertai oleh 'de-politisasi '', terutama terhadap penduduk pedesaan (Mortimer 1972;Mas'oed 1983; Robison 1986). Organisasi petani independen dipaksa bergabung dengan organisasi pengganti yaitu HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), sebuah organisasi yang dikelola oleh militer atau pejabat pemerintah dan secara resmi berafiliasi dengan Golkar, partai negara yang berkuasa (Hikam 1995). Hukuman kekerasan dan penahanan dijatuhkan pada siapapun yang menolak untuk bergabung dengan organisasi ini.

Sampai tahun 1980-an, Orde Baru berhasil mempertahankan kekuasaan yang sangat besar dan kontrol yang kuat dimana protes pedesaan hampir tidak didengar. Koalisi aktivis dari pedesaan dan perkotaan-NGO, mahasiswa dan para pemimpin lokal - mulai memberontak dari cengkraman negara di awal 1990-an (Lucas dan Warren 2000,

2003; Aspinall 2004). Banyak pekerjaan awal mereka harus dilakukan bawah tanah dan melibatkan konfigurasi antara mahasiswa dan aktivis lainnya (Ganie-Rochman 2002). Para mahasiswa membahas potensi dan strategi untuk gerakan agraria dan bekerja dengan penduduk desa dataran tinggi di Jawa dan Sumatra serta masyarakat adat, yang telah dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk militer, lembaga negara lainnya atau perusahaan besar.

Cahaya dalam Kegelapan Zaman Orde Baru itu adalah Keadilan Lingkungan

Karakter akarrumput dari gerakan lingkungan di awal 1980-an Indonesia hari ini bisa digambarkan sebagai gerakan keadilan lingkungan (Lowe 2003;Tsing 2005). Selama Orde Baru, di mana setiap oposisi politik terhadap negara tidak bisa ditolerir, pembelaan dan hukum lingkungan tampak - dan terbukti – menjadi arena yang aman bagi para aktivis yang bersangkutan bekerja baik untuk membantu masyarakat lokal dan memajukan agenda lingkungan.

Mungkin karena kapitalisme negara di bawah Suharto telah mengatur prioritas pembangunan terfokus pada proyek-ekstraktif skala besar dan mengubah distribusi sumber daya agraria, tidaklah mengherankan bahwa penggiat lingkungan akarrumput terlibat dalam perjuangan agraria. Kepedulian lingkungan oleh aktivis akar rumput ini disuarakan secara serempak oleh lembaga lingkungan hidup transnasional dan para advokat lingkungan dan penasihat kebijakan, mereka bekerja dengan dan melalui lembaga negara untuk membuat kebijakan negara dan praktek pembangunan yang lebih berorientasi lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan multi-skala ini menjadi sangat penting bagi keberhasilan gemilang wacana lingkungan di Indonesia dan kendala lingkungan yang dihadapi nanti.

Dalam wacana transnasional, perlindungan lingkungan adalah sebuah urusan besar dari keberagaman yang membayanginya di bawah permukaan. Sebagai contoh, penjaga hutan profesional mengklaim pengalaman di bidang konservasi nya telah dilakukan sejak pembentukan perlindungan hutan era kolonial, sedangkan ahli ekologi dan aktivis lingkungan lainnya mengkritik penjaga hutan karena terlalu berorientasi produksi. Pada akhir 1980-an, kritikus penggiat lingkungan hidup telah mendapat dukungan berarti di tingkat nasional dan internasional. NGO yang bergerak di bidang konservasi internasional dengan agenda penyelamatan mulai mendirikan kantor-kantor di Indonesia. Pendukung lain dari keadilan lingkungan adalah yang tertarik untuk melakukan pembelaan terhadap praktek penggusuran orang-orang dari tanah mereka yang terjadi ketika politik hutan dilindungi dan diperkuat dengan isu pengamanan cadangan alam yang didukung internasional (Djuweng 1997).[186]

Kekuatan isu Lingkungan dan konservasi di domain hukum dan kebijakan di Indonesia tumbuh sebagai bagian dari sebuah reaksi terhadap pertumbuhan cepat dan kemudian hancur oleh industri sumber daya alam yang berlindung dibelakang kebijakan modernisasi, dan sejumlah besar keuntungan negara, perusahaan dan individu dihasilkan dengan mengorbankan lingkungan. Namun pendukung konservasi sering sepakat dengan penjaga hutan pemerintah dalam menyalahkan deforestasi pada perladangan berpindah dan masyarakat yang bergantung pada

[186] Pada saat itu, paradigma dominan dalam ilmu ekologi cenderung tidak menyertakan manusia dalam mereka analisis suksesi hutan kecuali sebagai 'gangguan' - bertanggung jawab untuk menghancurkan hutan daripada menciptakannya – sebuah pandangan yang terus berlanjut di antara ahli ekologi sampai saat ini. Untuk iterasi terbaru argumen ini dalam bahasa Inggris, lihat Terborgh (1999).

hutan, mereka bertentangan dengan agenda kelompok keadilan lingkungan. Pada saat yang sama, meskipun banyak dari kepentingan konservasi besar ini mungkin tidak setuju dengan pembela keadilan sebagai solusi yang tepat untuk masalah lingkungan hidup, namun mereka membantu membuat pemerintah sadar tentang masalah lingkungan, mereka juga membantu membentuk lembaga dan menyediakan dana untuk menangani masalah ini di jalur legal formal pada saat yang sama dengan pembela keadilan lingkungan yang bekerja di lapangan. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat di bawah ini, rezim Suharto membentuk Kementerian Lingkungan Hidup di samping Departemen Kehutanan, dan dengan demikian berkontribusi pada penciptaan penggandaan konteks untuk agenda lingkungan. Tetapi anggaran lembaga dan kekuasaan ideologis terdahulu dalam negara hampir tidak cocok untuk apa yang pengelola kehutanan sebut 'Departemen keemasan' mereka (Peluso 1992). Dengan demikian, berbagai aliansi dan perbedaan menandai gerakan lingkungan ini dari awal, bahkan ketika *common ground* dianggap kebijakan politis.

Kesamaan dari cerita awal orientasi akarrumput dan nasional atau lembaga-lembaga lingkungan hidup internasional digambarkan oleh kisah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Lembaga ini dibentuk pada 1980 dan secara eksplisit asal-usul dan inspirasinya berawal pada pertemuan Stockholm untuk Sustainable Development pada tahun 1972, sebuah pertemuan yang juga banyak menginspirasi organisasi lingkungan dan konservasi besar lainnya.

WALHI didirikan saat kekuasaan kehutanan di Indonesia berada di puncak, ketika hutan (kayu) dan ekstraksi minyak dan perdagangan dicatat sebagai bagian terbesar penyumbang GDP Indonesia (Robison 1986). Kehutanan diangkat statusnya menjadi Departemen pada tahun 1983,

dengan yurisdiksi atas ratusan juta hektar tanah nasional. Ratusan konsesi kayu dialokasikan di seluruh negeri – di Kalimantan sendiri saja lebih dari 500 (Barr 1997). Dengan bantuan teknis dan pinjaman dari FAO (Food and Agriculture Organization) dan Bank Dunia, pengelola hutan telah menyatakan, mengalokasikan dan memetakan hutan nasional, membagi mereka ke dalam hutan produksi dan hutan lindung, serta cadangan alam dan cadangan hutan konservasi (untuk persiapan konversi ke industri pertanian atau pengembangan proyek pembangunan).

Mengingat kekuatan kelembagaan Departemen Kehutanan dan kekuatan otorisasi pemerintahan, WALHI tidak bisa bertahan tanpa dukungan dari dalam pemerintah. Menanggapi tekanan internasional, tetapi dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan untuk mengganggu pendapatan luar biasa dari sektor kehutanan, Soeharto menciptakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dipimpin oleh Dr Emil Salim. Kementrian Lingkungan Hidup memiliki anggaran sedikit dan kekuasaan nyata yang kecil di dalam negara. Namun, kementrian yang dipimpin oleh Salim menyediakan tempat yang aman bagi aktivis keadilan lingkungan – posisinya sendiri yang termarjinalkan di pemerintahan menciptakan dasar untuk membentuk aliansi dengan para pendukung keadilan ini. Pada saat yang sama, KLH mengembangkan hubungan dengan pengacara lingkungan internasional dan penasihat hukum - yang juga terpinggirkan oleh pengembangan skala besar kepentingan global yang dominan di pimpinan negara. Dalam beberapa hal, kemudian, KLH menjadi lembaga pemersatu bagi kelompok keadilan dan komponen hijau yang jauh dari gerakan lingkungan. Ketika pemerintah Orde Baru mulai menafsirkan kritik-kritik kebijakan dan praktek pengembangan mereka sebagai subversif, diskusi-diskusi diarahkan dilakukan melalui media publik dimana hak-hak petani atau akses terhadap tanah yang hilang untuk perusahaan-

perusahaan ekstraktif bisa dibahas. Lebih lanjut, konteks politik membuatnya penting bagi mereka untuk memiliki hubungan dengan badan pemerintah.

Jadi, strategi aktor transnasional dan kendala praktis NGO yang bekerja dalam waktu pemerintahan otoriter Soeharto, sebenarnya membantu menempa hubungan antara pendukung lingkungan internasional, pendukung lingkungan pemerintah dan non-pemerintah - baik mereka yang berada pada jalur keadilan lingkungan dan mereka yang lebih konsen pada kebijakan konservasi. Koneksi yang dekat antara aktivis gerakan lingkungan yang bekerja di bidang hukum tingkat nasional dan lokal dikuatkan melalui koneksi advokasi keadilan dengan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), yang juga bekerja di berbagai skala, bekerjasama dengan NGO dan aktivis mahasiswa serta kelompok bantuan hukum transnasional. Momen yang sangat jelas dari hubungan mereka terjadi pada tahun 1989 ketika anggota dari YLBHI menjadi kepala presidium WALHI. Di berbagai hal, YLBHI didukung oleh NOVIB (LSM donor dari Belanda) dan CIDA (Bantuan Kanada).

Sebuah momen yang menentukan terjadi cukup dini dalam kolaborasi ini, sesuatu yang kemudian menjelaskan perbedaan dalam gerakan lingkungan dan peluang untuk aliansi antara keadilan lingkungan dan aktivis agraria. Momen 'ikonik' ini didasari saat maraknya mobilisasi aktivis menentang proyek Kedung Ombo, sebuah proyek bendungan bantuan World Bank di Jawa Tengah. Berlangsung lebih dari lima tahun, dan akhirnya gagal, -seperti Kampanye anti bendungan Narmada di India-(Baviskar 1995), mobilisasi ini bertujuan untuk mencegah penenggelaman sepetak besar pedesaan di Jawa Tengah, gerakan itu penting untuk melihat bagaimana menggerakkan aktivis yang berbeda latar, sekaligus menunjukkan persamaan dan potensi aliansi di masa mendatang. Untuk kelompok

lingkungan hidup di dalam dan di luar Indonesia, Kedung Ombo merupakan bagian dari kampanye global 'Anti-Bendungan-Besar'. Untuk aktivis agraria, kampanye ini adalah kesempatan untuk membantu para petani di Jawa yang digusur dari tanah mereka tanpa kompensasi yang adil (Rumansara 1998). Dan sebagai pengembangannya, kaum tani yang digusur ini dipaksa ikut dalam proyek transmigrasi keluar dari Jawa, para petani ini secara tidak sengaja membangun hubungan dengan masayarakat adat disana yang dipaksa juga untuk berpindah dari tanahnya karena akan diperuntukkan bagi petani gusuran dari jawa.

Kampanye ini mendapat perhatian nasional lebih besar ketika YLBHI dan NGO anggota INGII lainnya[187] mengirimkan *aide memoire*, surat kepada kepala Bank Dunia, untuk memprotes proyek yang melanggar hak asasi manusia di desa ini. Internasionalisasi kasus ini, seperti yang Keck dan Sikkink (1998) sebut sebagai 'efek boomerang', betul-betul menjadi bumerang dalam beberapa cara. Moment ini mengurangi toleransi Soeharto terhadap aktivisme NGO; ia mengatakan bahwa kampanye itu menghina dan anti-nasional. Hal ini memaksa Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, yang selama ini menjadi sekutu dan pelabuhan yang aman bagi NGO lingkungan, untuk menyatakan bahwa perwakilan NGO Indonesia di INGI sudah terlalu jauh, mencampuri 'Politik' dan tujuan lingkungan. Salim menyatakan bahwa aspek-aspek politik

[187] INGI (Inter-NGO Conference on Inter-Governmental Group Indonesia (IGGI) Matters) dibentuk tahun 1985 oleh YLBHI dan NOVIB (de Nederlands Organisatie voor Internationale Bijstand), keduanya baik aktor transnasional dan lokal memberikan masukan kepada konferensi pemerintah-pemerintah donor yang memberikan bantuan untuk Indonesia. WALHI adalah anggota INGI. Kemudian, IGGI diubah menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia) dan INGI menjadi INFID (International NGO Forum on Indonesia Development).

dari kasus-kasus lingkungan hidup adalah masalah pemerintah, bukan dalam lingkup NGO lingkungan.

Secara politik, gerakan pada waktu itu menghadapi masa kritis, dibawanya isu itu kedalam keterbukaan fakta bahwa itu adalah 'masalah lingkungan' ternyata tidak seramah kalau itu dibawa ke isu yang sifatnya tidak politis, sebagaimana organisasi keadilan lingkungan telah tunjukkan. Memang, Kedung Ombo adalah contoh dari artikulasi lingkungan dan wacana agraria di Jawa (Aditjondro 2003), ini adalah sebuah peristiwa yang menghubungkan beberapa kejadian. Namun , kegagalam kampanye untuk menghentikan bendungan sebagian karena kekerasan dalam sejarah agraria Jawa menyisakan sebuah hambatan untuk kegiatan gerakan berbasis hak agraria selama tahun 1980-an dan awal 1990-an. Selanjutnya, sejarah ini memaksa tingkat dan cara di mana beberapa aktivis keadilan lingkungan bersedia untuk melanjutkannya.

Di Luar Jawa, khususnya di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, dimana masih ada ruang untuk manuver, yaitu di provinsi-provinsi dengan hutan yang rata-rata dua pertiga hingga tiga perempat dari keseluruhan wilayah berada di bawah juridiksi Departemen Kehutanan. Pada daerah ini pendukung keadilan lingkungan cenderung bersekutu dengan kelompok-kelompok lokal yang akhirnya menyebut diri mereka sebagai Masyarakat Adat (Li 2000). Asal-usul dan identitas dari kelompok-kelompok ini, dan organisasi nasional yang dibentuk di akhir 1990-an, melihat dirinya sendiri baik sebagai organisasi gerakan agraria maupun organisasi keadilan lingkungan.

Di Indonesia, Organisasi Masyarakat Adat ini pertama kali terdiri dari masyarakat yang telah terusir dari tanah mereka oleh proyek-proyek pembangunan skala besar yang terkait dengan kehutanan, perkebunan, transmigrasi, bendungan atau pariwisata berskala besar. Pengalaman pengambilalihan tanah mereka itu menempatkan mereka

pada perlawanan terhadap pengembangan dan wacana lingkungan negara dan perluasan konservasi hijau dunia. Mereka berbeda dari aktivis agraria dan petani di Jawa dan Bali dan sebagian Sumatera yang ingin merebut kembali tanah yang hilang yang disebabkan pengambilalihan oleh pemerintah dan perusahaan yang jarang berbicara tentang lingkungan hidup.[188]

Masyarakat Adat telah menjadi peserta penting dalam awal perjuangan keadilan lingkungan, sebagian dikarenakan mereka biasanya mewakili sebagai pemilik adat yang ramah lingkungan. Ini bermanfaat dalam beberapa hal, namun tidak dalam hal lainnya: definisi organisasi nasional mereka adalah AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memutuskan bahwa untuk Masyarakat Adat secara jelas didasarkan pada definisi antropologi dari 'suku', dengan segala pembawaan positif dan negatif yang terkait dengan label tersebut (Tsing 1999; Li 2001). Mereka, bagaimanapun juga, merupakan pertanda masa depan: NGO yang bekerja dengan mereka berusaha melegitimasi klaim teritorial mereka dengan mengaitkan praktik agraria mereka pada tujuan lingkungan yang keberlanjutan.

Selain itu, sejarah mereka cukup berbeda dengan petani yang terlibat dalam perjuangan agraria selama tahun 1950-an dan 1960-an di Jawa, Bali dan sebagian di Sumatera seperti yang disebutkan di atas. Pada saat itu, kelompok

---

[188] Lihat, misalnya, Fidro dan Fauzi (1998) yang menganalisis 29 kasus sengketa tanah di bawah Orde Baru dan membuat saran yang praktis dan strategis saran untuk memajukan gerakan agraria baru lahir (masih bawahytanah). Tidak ada dalam tulisan-tulisan ini yang menyarankan sebuah sensitivitas untuk potensi strategis dalam wacana lingkungan wacana, kecuali makalah oleh Aditjondro, yang berpendapat bahwa ekonomi kemasyrakatan sebaiknya adalah 'diversifikasi tanaman/polikultur' yang lebih ramah lingkungan daripada perkebunan monokultur yang dipaksakan. Saat itu hal ini belum menjadi ide pemersatu untuk kelompok pendukung agraria.

yang mengidentifikasikan diri sebagai Masyarakat Adat sebagian besar tinggal di luar Jawa, di daerah yang hingga sampai tahun 1940-an sebagian besar masih di bawah pemerintahan tidak langsung kolonial. Etnis Jawa, Sunda dan Bali tidaklah benar-benar dianggap 'suku' sebagaimana karakteristik Masyarakat Adat yang disepakati oleh pejabat kolonial dan pengamat, ilmuwan sosial dan NGO Indonesia.[189] Memang ketentuan pluralisme hukum kolonial telah mengakui 'teritori adat' dari kelompok-kelompok tersebut sebagai tempat di mana mereka diberikan kekuasaan atas kepemilikan tanah, diantara fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Bagi orang-orang pribumi di daerah hutan di Indonesia, Undang-undang yang paling mengancam adalah Undang-undang Kehutanan (Ruwiastuti 2000). Undang-undang ini mendefinisikan 'kepemilikan hutan-agro' atau 'area dilindungi' mereka sebagai tanah 'kosong' dan 'ditinggalkan', dan juga mengkriminalisasi sistem budaya pertanian perladangan berpindah mereka.

Kembali ke dasar masalah aktifitas agraria...

Setelah kampanye Kedung Ombo, aktivis agraria dan aktivis keadilan lingkungan bekerja lebih erat dengan YLBHI untuk membantu penduduk desa dalam sengketa hak tanah di Jawa dan sebagian Sumatra (Aspinal 2004). Meskipun masih sangat nyata risiko untuk dituduh sebagai pendukung 'komunis' dan lebih buruk lagi ditangkap bagi para aktivis yang mengorganisir protes untuk menarik perhatian pada perjuangan tanah milik para petani. Tidak seperti WALHI, para aktivis pada awal 1990-an membingkai dukungan mereka dalam hal hak-hak masyarakat adat (keadilan lingkungan) dan mengkritisi undang-undang

[189] Ini kemudian berubah, ketika orang Bali, Baduy dan kelompok lain bergabung AMAN dan memperluas dasar nasional dan definisi kerja masyarakat adat di Indonesia.

kehutanan dan pertambangan, sedangkan YLBHI dan mahasiswa serta aktivis agraria memfokuskan kritik mereka pada tidak dilaksanakannya (atau kegagalan pelaksanaan dari) Undang-undang No. 5 1960 (UUPA). Beberapa aktivis lingkungan diundang ke Bandung untuk mengambil bagian dalam diskusi yang kemudian menjadi dasar dari berdirinya KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria (wawancara penulis 2007).

UUPA adalah ikon nasional, dia memformalkan maksud kaum nasionalis untuk melepaskan politik pembedaan ala kolonial yang berdasarkan ras dan etnis - diwujudkan dalam hukum pluralisme kolonial- dengan membentuk hukum pertanahan nasional yang bersatu. Suatu komponen penting dari hukum itu adalah diadakannya reforma agraria nasional. Pemerintahan Suharto, bagaimanapun, melaksanakan hukum secara selektif, menginginkan sesuatu yang mendukung hak-hak negara untuk mendapatkan tanah untuk proyek-proyek pembangunan "atas dasar kepentingan nasional". Sedangkan bagian-bagian yang membahas fungsi-fungsi sosial tanah untuk mata pencaharian dan reforma agraria diabaikan. YLBHI dan aliansi mahasiswa, membingkai gerakan dan kegiatan mobilisasi mereka pada sekitaran reforma agraria ini, mereka menganjurkan pemerintah untuk melaksanakan UUPA lebih komprehensif. Meskipun mereka –YLBHI- bekerja pada pendekatan multi-skala, sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis lingkungan, para aktivis reforma agraria di Jawa dan Sumatra kekurangan keterikatan secara nasional dan pendanaan internasional yang luas yang tersedia bagi kelompok gerakan lingkungan. Mereka juga masih sensitif secara politis karena harus bergerak lebih halus.

Beberapa kunci, perbedaan sejarah dan perbedaan geografis membagi jenis reforma pada dua jenis gerakan agraria yaitu reforma agaria berbasis masyarakat adat dan

reforma agraria berbasis petani - cara mereka terlibat menganut gerakan dan wacana lingkungan, nasional maupun internasional. Aktivis mahasiswa yang bekerja di Jawa, Bali dan sebagian Sumatera, di mana ketegangan kelas pedesaan telah lama menjadi masalah, cenderung untuk memisahkan agenda reforma agraria dari agenda lingkungan, meskipun pada waktu (seperti di Kedung Ombo) mereka terlihat cocok untuk bergabung dengan aktivis lingkungan. Mereka harus bergerak diluar pengamatan publik, sampai akhir dari Rezim Soeharto - ketika ia dipaksa mundur pada tahun 1998 saat krisis ekonomi. Pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an, Jenis organisasi 'Masyarakat Adat' ditandai erat dengan merajut rangkaian gerakan agraria di luar Jawa dan Bali, yang mana sebagian besar mereka memiliki hubungan ke masalah keadilan lingkungan dan aktif lebih terbuka.

Beberapa aktivis dan pemimpin bergerak dengan mudahnya di antara kelompok kerja lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu reforma agraria. Pada dasarnya, hal ini difasilitasi oleh kelompok yang tidak puas dengan kebijakan rezim Soeharto yang mengambil alih tanah secara besar-besaran dan penggalian sumber daya bagi pendapatan negara atau swasta. Mereka menemukan dasar bersama dalam mobilisasi melawan prinsip dari dualisme hukum: Hukum Kehutanan dan bagian dari Undang-Undang Pokok Agraria yang memungkinkan pengambil-alihan tanah negara. Kedua hukum ini adalah produk dari tahun 1960-an, tapi keluar dari bingkai ideologi yang berbeda yang telah menggerakkan dua rezim nasional pertama. Selama itu, efek kumulatif mereka telah menghilangkan atau mengabaikan hak komunal dan adat lainnya karena mendukung swasta barat dan hak milik negara (Djuweng dan Moniaga 1994; Heruputri 1997).

Reformasi dan Neoliberalisme: Ledakan, Radikalisasi, Rutinisasi dan Fragmentasi Pergerakan

Pembebasan dari penindasan meledak tepat dengan jatuhnya Suharto pada tahun 1998; perubahan utama datang dengan Reformasi. Segera setelah itu Soeharto lengser, puluhan petani, orang-orang tak bertanah dan petani pemilik tanah kecil menduduki hutan negara dan lahan perkebunan. Mereka menebang karet, kakao, jati, pinus dan banyak spesies ditebang di hutan hujan. Pada tanah-tanah perkebunan dan hutan negara, mereka menanam singkong, padi, pisang, durian dan kelapa sawit milik sendiri. Pada awal September 2000, Direktur Jenderal Departemen Kehutanan dan perkebunan memperkirakan sekitar 118.830 hektar lahan perkebunan nasional telah diambilalih, bersama dengan 48.051 hektar lahan perkebunan swasta (Kuswahyono 2003; di Fauzi 2003). Untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, organisasi petani terbentuk, memperdebatkan politik pertanahan, menemukan sekutu di dalam dan di luar pemerintahan, dan meletakkan dasar bagi suatu lintasan baru dalam mobilisasi untuk berjalannya reforma agraria (Lucas dan Warren 2003).

Kelompok reforma Agraria tidak lagi harus bekerja secara sembunyi-sembunyi, tapi lamanya masa penindasan dengan kekerasan telah mempengaruhi bentuk ekspresi para oposisi. Tidak sampai beberapa tahun setelah "reformasi" Indonesia, kebijakan neoliberal membuat kemajuan yang luar biasa dengan dicetuskannya desentralisasi kekuasaan Negara, ada sejumlah besar petani dan petani kecil yang bersedia secara terbuka bergabung dengan organisasi agraria. Namun mobilisator dari akademisi dan aktivis membingkai pergerakan ini secara berbeda, petani yang dimobilisasi adalah mereka yang telah melihat demonstrasi, protes dan tuntutan sebagaimana mirip dengan orang-orang yang telah ditekan dengan keras pada

tahun 1965. Lebih-lebih, saat ini, pemilik tanah terbesar yang harus mereka tentang adalah negara itu sendiri: Kekuatan Departemen Kehutanan yang kini mengendalikan sekitar dua-pertiga dari tanah negara. Pada saat yang sama, di bawah payung desentralisasi, tingkat pemerintah kabupaten - anggota parlemen, bupati dan lembaga birokrasi kabupaten sektoral - telah mendapatkan kewenangan dan kekuasaan administrasi yang lebih. Beberapa dari mereka bersedia untuk mendukung organisasi-agraria yang baru berseru untuk reforma agraria.

Secara kritis, walaupun demikian, kebangkitan kembali gerakan-gerakan agraria ini sudah masuk kedalam konteks politik yang telah dibentuk kembali oleh agenda dan gerakan lingkungan yang mulai mempengaruhi alokasi dan pengelolaan lahan Indonesia di tahun 1980-an. Investasi besar-besaran di pengolahan hutan Indonesia setelah tahun 1970 diparalel beberapa tahun kemudian oleh meningkatnya aktivitas gerakan lingkungan internasional. Sementara gerakan ini tidak benar-benar mengambil bentuk organisasi di Indonesia sampai awal 1980-an, dampaknya sudah dirasakan ketika FAO mengadakan Kongres Kehutanan tahunan di Indonesia pada tahun 1978 dengan tema, "Forest for People". Pertemuan ini meramalkan masa depan perjuangan, sebagaimana bentuk-bentuk baru kekuatan teritorial lingkungan sedang dibayangkan dan direalisasikan melalui pekerjaan para pengelola kehutanan profesional dan ilmuwan ekologi lainnya, serta oleh NGO keadilan lingkungan yang mulai berkembang. Pada saat gerakan promasyarakat miskin agraria muncul kembali ke publik di Indonesia pada akhir 1990-an, wacana lingkungan hidup telah mengubah bidang politik lokal dan nasional, serta arena hukum dan kebijakan internasional, aktivisme dan otoritas moral. Perubahan ini penting untuk membentuk strategi, posisi dan artikulasi gerakan agraria dan lingkungan setelah pergantian abad ke dua puluh satu. Pada

saat yang sama, beberapa kesamaan mereka mulai terkikis.

Pada tahun 2004, Via Campesina, bisa dikatakan sebagai organisasi petani transnasional yang paling berpengaruh di dunia, dia mendirikan kantor globalnya ke Indonesia, memindahkan Sekretariat Operasional Internasionalnya dari Honduras. Selama dekade terakhir, Via Campesina, adalah kumpulan aktivis dan kritikus yang vokal terhadap kebijakan agraria dan pertanian neoliberal, organ ini telah menkonsolidasi jaringan organisasi transnasional petani dari Asia, Amerika dan Eropa, mengkoordinasi protes global dan berkampanye untuk visi spesifik "reforma agraria dan kedaulatan pangan" (Desmarais 2002; Edelman 2003; Rosset 2006). Ketika mereka pindah ke Indonesia, mereka mengumumkan bahwa Henry Saragih, Direktur Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), salah satu serikat petani di Indonesia yang berlingkup nasional, akan menjadi sebagai Ko-ordinator Internasional yang baru.

Organisasi petani terbesar di Jawa, Serikat Petani Pasundan /Jawa Barat- (SPP) yang merupakan anggota FSPI pada waktu itu dan memiliki sekitar 30.000 anggota, yang sebagian besar tak memiliki tanah atau sangat miskin[190] (Wargadipura 2005, 19) secara resmi didirikan pada tahun 2000 (namun diorganisasi secara sembunyi pada pertengahan 1990-an), 52 organisasi tani lokal (OTL) SPP pada tahun 2005 berlokasi di area konflik agraria di tiga kabupaten di Jawa Barat dan menduduki lebih dari 15.000 hektar perkebunan negara dan lahan hutan di dataran tinggi Jawa Barat. Mereka adalah salah satu serikat petani yang bergerak melawan pengelola lahan negara yang mengendalikan Perusahaan Kehutanan Negara dan

[190] Meskipun analisis kelas secara sistematis dari keanggotaan SPP belum dilakukan, pemimin organisasi dan koneksi afiliasi LSM membuat pernyataan ini.

Perusahaan Perkebunan Negara. Operasi SPP menggambarkan bentuk baru organisasi pergerakan agraria, karena dia bekerja tidak hanya melalui pendudukan tanah lansung dan bentuk lain tindakan kolektif, tapi juga dengan negosiasi para pemimpinnya dengan politisi, pejabat di lembaga manajemen tanah pemerintah, dan anggota parlemen distrik dan pemimpin nasional. SPP dan NGO terkait (terutama Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA dan, baru-baru ini, KARSA-Lingkar Pembaruan Agraria Dan Pedesaan), juga telah bekerja sama dengan NGO yang bekerja untuk hak asasi manusia (YLBHI) dan konservasi (WALHI, LATIN-Lembaga Alam Tropika Indonesia). KPA dibentuk pada tahun 1995 selama periode bawah tanah dari kegiatan aktivis agraria. Meskipun secara teknis dia merupakan sebuah NGO, beberapa anggota KPA juga merupakan pemimpin organisasi petani.

SPP dan keanggotaannya mempraktekkan ide yang dibawa kepada mereka oleh akademisi pro-reformasi, Gunawan Wiradi (1997), menggagasi tentang "pengaruh reforma agraria" (Powelson dan Bursa 1990). Kemampuan mereka untuk menempati, memegang dan mengubah penggunaan dan penutup vegetatif dari wilayah yang diduduki adalah penting, walaupun daerah tersebut tampaknya relatif kecil untuk jutaan hektar lahan hutan dan perkebunan di Jawa Barat. Pendudukan tersebut merupakan hal yang paling berarti untuk mereka selama tiga perempat dekade. Di bawah pemerintahan Soeharto, pemilik tanah akan dipaksa keluar atau lebih buruk lagi. Memang, Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan Negara telah mempekerjakan ratusan preman untuk mengusir petani dari wilayah yang diduduki, tapi akhirnya gagal untuk mengusir mereka.

Baru-baru ini, kelompok reforma agraria telah berkampanye untuk mendapatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam wilayah kerja mereka

di Jawa Barat, SPP melobi pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat komite untuk menyelesaikan konflik agraria, terutama di wilayah yang penting yang saat ini dialokasikan ke Perusahaan Kehutaan dan Perkebunan Negara, yang mencakup 44% dari seluruh Kabupaten Garut (Fauzi 2003).[191] SPP juga membentuk asosiasi kepala desa dan parlemen di distrik-distrik dan memenangkan sekitar 10% dari pemilihan kepala desa di wilayah kerja mereka pada tahun 2006.

Kita harus melangkah mundur sedikit dan memeriksa transformasi ekonomi-politik utama yang telah membuat kegiatan-kegiatan institusi baru ini menjadi mungkin: pendudukan tanah, kebangkitan kembali bentuk-bentuk kriminalisasi organisasi dan "negosiasi' antar kelompok gerakan dengan pejabat pemerintah. Pendek kata, "Reformasi", versi Indonesia dan "*people power*" versi " Filipina", merepsentasikan perubahan konteks politik. Reformasi adalah istilah Indonesia untuk transformasi ekonomi politik Indonesia, menyebabkan perubahan radikal dalam konteks, program, strategi, posisi dan aliansi antara organisasi agraria dan lingkungan. Penerus Suharto pada tahun 1998 dengan segera mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mendesentralisasikan banyak fungsi pemerintah pada kabupaten, khususnya fungsi anggaran dan pengelolaan sumber daya (Reso Sudarmo 2005). Sebuah anomali penting yang mempengaruhi perkiraan distribusi ulang tanah negara dan cara-cara kelompok akarrumput dan NGO yang harus bergerak kemudian. Lembaga pemerintah pusat sektoral, yang terpenting Departemen Kehutanan,[192] menahan yurisdiksi atas lahan

---

[191] Cf.Wargadiputra (2005, 2), yang menyatakan bahwa 50 persen dari kabupaten ini adalah hutan negara atau tanah perkebunan.

[92] Dan lembaga-lembaga regional, termasuk Perusahaan Kehutanan Negara di Jawa.

tersebut, meskipun mereka dituntut oleh ketentuan desentralisasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya di atas permukaan tanah (McCarthy 2000, 2006).

Termasuk kedalam ruang politik ini adalah kesempatan dan kendala dimana organisasi kaum petani dan pendukung konsorsium NGO muncul dan memulai kegiatan mereka. Setelah jatuhnya Orde Baru, dengan diberlakukannya desentralisasi selama dua tahun, aktivis agraria, NGO dan kelompok mahasiswa membantu mengorganisir petani yang terampas di luar kota besar di Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya) dan sebagian dari Sumatera (Medan). Mereka mendirikan "komite-komite aksi" dan merekayasa protes publik dan berdialog dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen. AMAN – Asosiasi Masyarakat Adat Nasional - resmi didirikan pada tahun 1999 di pertemuan nasional di Jakarta. Sebelum Reformasi, sebagian besar delegasi berasal dari luar Jawa, namun pada pertemuan ini hadir juga wakil dari Jawa dan Bali.

Peluang baru yang ditawarkan oleh desentralisasi dan pembentukan lebih banyak kebebasan sipil diperburuk oleh suatu sumber yang mendasari perbedaan pedesaan dalam masyarakat sipil dan pemerintah reformasi. Bagaimana hubungan ini – dan dalam bentuk apa hubungannya?- seperti apa reforma agraria diterapkan untuk tanah hutan negara. Sebuah pembagian yang bisa dilihat sebagai kepentingan lingkungan dan agraria, tapi, sebagaimana yang kami tunjukkan di bawah ini, aliansi dan konflik tidak berada tepat di atas hal tersebut

Pengaruh Gerakan Lingkungan dan Agraria Transnasional

FSPI dan KPA secara teknis dikategorikan sebagai jenis organisasi gerakan agraria yang berbeda, meskipun

dalam praktiknya mereka memiliki beberapa kesamaan, karena keduanya dipimpin oleh aktivis, bukan petani. Ketika pertama kali terbentuk pada pertengahan tahun 1990-an sampai akhir 2007, FSPI adalah sebuah federasi organisasi petani yang dipimpin oleh aktivis berbasis di Sumatera yang terkait dengan sebauh NGO bernama Yayasan Sintesa (Yayasan Sintesa, YS). KPA adalah konsorsium akarrumput NGO Indonesia yang berbasis di Jawa Barat, organisasi dan aktivis petani, dan terdaftar di Indonesia sebagai sebuah NGO. Pemimpim pendirian keduanya mulai bekerja sebagai aktivis selama perjuangan di era-Soeharto, bekerja masing-masing secara sembunyi didaerah asli mereka di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Perbedaan yang muncul sejak awal selalu berdasar pada perebutan tempat terbaik dalam organisasi tingkat nasional, pendanaan dan sumber-sumber persaingan lainnya (Lucas dan Warren 2003; Afiff 2004).

Mereka banyak mendukung kebijakan dan tindakan Via Campesina, dan sebagai anggota afiliasi utama Via Campesina di Indonesia, FSPI, hingga pertemuan nasional pada tahun 2007, SPP selalu bersekutu lebih dekat dengan KPA. KPA, sebagaimana sebuah NGO, tidak bisa menjadi anggota FSPI ataupun Via Campesina. Mungkin karena alasan itu, KPA mendirikan koneksi dengan International Land Coalition (ILC), yang juga merupakan semacam konsorsium beragam jenis organisasi dan mewakili ideologi lebih beragam diantara anggotanya daripada Via Campesina. Sebagai contoh, ILC memiliki pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dengan Bank Dunia dan kebijakan pertanahannya yang berorientasi pasar - walaupun Bank Dunia adalah anggota organisasi.

Namun, sebagaimana Borras (2004) tunjukkan, posisi politik dari dan hubungan aktual antara organisasi dan individu di ILC dan VC adalah hal membingungkan dan bervariasi, seperti beberapa kelompok adalah anggota dari

keduanya. SPP, misalnya, adalah anggota dari ILC dan merupakan anggota VC melalui keanggotaannya di FSPI sampai akhir tahun 2007 ketika SPP mengundurkan diri (lihat di bawah). NGO seperti KPA jauh lebih bersimpati pada kepedulian dan ideologi daripada ILC dan begitu juga banyak anggota kelompok lainnya, tetapi dilarang menjadi keanggotaan formal dalam VC karena status mereka adalah NGO. Ini semua bahkan lebih kompleks sebagaimana ketegangan kritis antara Via Campesina (VC) dan ILC di arena global (Edelman 2003; Borras 2004) yang telah tercermin dapat menciptakan ketegangan baru - nyata atau diwakili seperti – antara beberapa sekutu mereka di Indonesia dan berbagai anggota kelompok daerah.

Belajar dari pelarangan keanggotaan NGO di pertemuan internasional Via Campesina di Meksiko pada tahun 1996, yang mengejutkan para aktivis Indonesia. Para pemimpin KPA (NGO), SPP (organisasi tani) dan YS (NGO) semua melihat diri mereka sebagai sama-sama berkomitmen untuk reforma agraria radikal dan aktivis Indonesia ini telah banyak terlibat dengan organisasi-organisasi petani. Selanjutnya, pada tahun 1999 mereka setuju untuk membentuk secara eksklusif FSPI sebagai organisasi petani, tetapi dengan aktivis non-petani -Henry Saragih dari Yayasan Sintesa - sebagai sekjen pertama. Beberapa aktivis mengingatkan pemahaman bahwa, ketika organisasi dan keanggotaannya berakhir, seorang petani kecil akan benar-benar mengambil alih kepemimpinan. Ketika FSPI menjadi tempat kesekretaritan VC internasional, itu juga menjadi pintu gerbang internasional utama dalam kegiatan gerakan agraria Indonesia. Pada saat yang sama, agenda nasional organisasi ini sekarang lebih ditentukan oleh prioritas kampanye internasional dibandingkan oleh orang-orang anggota organisasi dari Indonesia. Pimpinan KPA dan SPP, sebaliknya, sementara menyadari perkembangan internasional dan bercermin pada pe-

ngalaman dan ide dari MST dan gerakan agraria internasional lainnya, cenderung lebih fokus ke Indonesia, secara eksplisit melihat ke dalam dengan tuntutan dan kebutuhan dari anggota mereka di Jawa Barat dan di daerah-daerah Indonesia lainnya. Sampai akhir 2007, SPP tetap menjadi anggota penting dari FSPI, mengirimkan tiga perempat dari 10.000 petani yang berbaris di bawah bendera FSPI ke demonstrasi untuk reforma agraria Juni 2007 di Bandung (http://fspi.or.id/en/content/view/120/1).

Pada pertemuan terakhir mereka tahun di 2007, kepemimpinan FSPI mengubah syarat-syarat anggota di FSPI, membuatnya lebih individual daripada sebuah unit keanggotaan dari suatu organisasi petani. Ini mengecewakan beberapa organisasi anggota, sehingga mengubah secara signifikan karakter federasi organisasi. SPP dan beberapa organisasi petani lainnya menolak untuk membubarkan organisasi mereka sendiri untuk menjadi bagian atau anggota perseorangan dari FSPI, dan seteah itu mereka mengundurkan diri dari FSPI. Henry Saragih kembali diangkat menjadi direktur, menyebabkan ketidakpuasan lebih lanjut di beberapa kalangan karena dia belum mengundurkan diri untuk membiarkan petani yang benar-benar petani untuk memimpin organisasi.[193]

Ketegangan antara kelompok-kelompok atau pemimpin mereka juga telah diperburuk oleh kampanye dan koneksi dengan isu-isu dan kelompok-kelompok lingkungan hidup. Secara khusus, perbedaan intensif atas berbagai hal menggerakakan langkah untuk mengintegrasikan diskusi-diskusi tentang reforma agraria seperti dibahas dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan reklamasi lahan hutan dan tambang dibawah lingkup Departemen Ke-

[193] Meskipun pernyataan dari seorang wartawan dalam sebuah artikel baru FSPI di The Guardian, Henry Saragih tidak memulai sebagai 'seorang petani kecil'.

hutanan dan Pertambangan. Bagaimana ketegangan ini telah dimainkan di atas sebagai alasan dapat dilihat melalui dua kunci legislatif dan inisiatif kebijakan yang menggerakkan forum ini di periode awal reformasi dan baru-baru ini (2005-07). Inisiatif ini adalah Ketetapan MPR no. IX/2001 (selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001) dan inisiatif reforma agraria yang diumumkan bersama-sama oleh Presiden, Menteri Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bulan September 2006. Selain itu, berbagai gagasan berbeda dari tujuan akhir untuk reformasi telah memisahkan kelompok-kelompok dan individu, yang ditunjukkan oleh perdebatan atas hutan kemasyarakatan atau CBNRM. Perdebatan ini menunjukkan perubahan agraria (sekali lagi) dan konteks politik di dalamnya dimana organisasi beroperasi.

Perdebatan TAP MPR IX/2001

Pada akhir tahun 2000 dan 2001, telah jelas bahwa tidak hanya reformasi yang akan mengubah negara Indonesia, tetapi bahwa juga inisiatif gerakan lingkungan, selama periode Soeharto, penataan ulang lembaga negara, termasuk hukum, dan normalisasi rezim baru dalam melakukan kontrol teritorial. Gerakan Lingkungan – disini juga ikut gerakan agraria dan konservasi hutan, yang juga mempengaruhi pola-pola kontrol dan akses tanah sebagian besar- merupakan arena yang berbeda antara negara dan masyarakat sipil ,namun operasi dari komponen yang terjalin (konservasi 'besar' dan keadilan lingkungan). Ini adalah sebuah konteks - konteks - di mana gerakan agraria harus bernegosiasi dan berjuang.

KPA telah lama menjadi salah satu kelompok agraria yang bersedia bekerjasama dengan NGO keadilan lingkungan di itngkat nasional dan daerah, sebagian karena beberapa kelompok keadilan lingkungan (misalnya, LATIN

dan WALHI) kadang-kadang menyediakan dana untuk KPA dan SPP untuk membiayai okupasi dan protes (wawancara penulis 2007). Pada tahun 2001 mereka mendirikan sebuah Kelompok Kerja Pembaruan Agraria dan Manajemen Sumber Daya Alam. Bagi kalangan aktivis agraria dan kelompok keadilan lingkungan, hal ini merupakan untuk pertama kalinya mewakili isu dua kelompok yang berbeda di forum publik untuk bersama-sama menyusun strategi dan mempengaruhi kebijakan nasional dan undang-undang, walaupun dalam cara yang masih terbatas oleh sifat keadaan dan kekuataan dan perbedaan mereka sendiri (Rosser et al. 2005, 67).

Kolaborasi aktivis Agraria-lingkungan ini terjadi di proses mendorong TAP MPR IX/2001, juga penting untuk melihat partisipasi AMAN, organisasi masyarakat adat nasional, yang mengklaim dan diklaim sebagai organisasi agraria maupun organisasi keadilan lingkungan, ini memungkinkan nya untuk fokus pada isu-isu kepemilikan di konflik lingkungan, meskipun kata "kepemilikan" tidak digunakan secara konsisten. Sebaliknya, malah dimaksudkan pada keduanya adalah "penguasaan tanah" atau "kepemilikan sumber daya", yang belakangan belum tentu bermakna hak atas tanah secara resmi. Pada saat yang sama, simpati akademisi dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengintegrasikan agro-ekologi dan sosial struktural, dimensi dari dua pendekatan untuk reformasi. Mereka memulai reforma agraria sebagai satu strategi untuk menghubungkan ketidakadilan struktural agraris dengan krisis ekologi, dan menunjukkan bagaimana pemecahan pertama bisa membantu memperbaiki yang kedua (misalnya Sangkoyo 2000; Kartodihardjo 2002). Dikatakan juga bahwa agenda reforma agraria seharusnya tidak hanya merestrukturisasi akses dan kontrol tanah atau mengubah tata guna lahan, sistem produksi dan konsumsi untuk menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan penduduk

miskin, tetapi juga untuk memastikan integritas ekosistem dan meningkatkan produktivitas (Fauzi dan Zakaria 2001, 2002).

Banyak ide-ide sudah digabungkan baik secara global dan lokal (Indonesia) serta dalam wacana masyarakat, dan bagian dari strategi komunitas berbasis pengelolaan sumber daya alam (CBNRM) (Arupa et al). 2003. Di sini, mereka dikemas kembali oleh aktivis agraria sebagai bagian dari mereka sendiri dan agenda agraria-lingkungan secara umum. Menariknya, apa yang dimulai sebagai ideologi berbasis komunitas dimaksudkan untuk merebut kendali atas ketatnya kontrol sumber daya hutan oleh pemerintah pusat segera direpresentasikan pada tingkat internasional sebagai strategi neoliberal untuk mengurangi besarnya campur tangan pemerintah (McCarthy 2005; cf. Belsky 2008) maupun strategi mobilisasi/pengorganisasian untuk reforma agraria

Pertentangan lainnya dalam merepresentasikan isu-isu "reformasi" dicirikan pada perdebatan TAP MPR IX/2001. Antara beberapa kelompok reforma agraria (terutama KPA) dan kelompok keadilan lingkungan, didalam kepentingan untuk menghasilkan TAP MPR IX/2001 itu dianggap oleh kelompok-kelompok reforma agraria lainnya sebagai sebuah penyerahan kepada mekanisme neoliberalisme. Kepemimpinan FSPI, misalnya, berpendapat resolusi parlemen dapat digunakan oleh kekuatan pro-pasar untuk mengubah – atau membatalkan - prinsip reforma agraria yang ada di UUPA 60.[194] Pada situs FSPI, untuk contohnya, dinyatakan bahwa TAP MPR IX/2001 telah digunakan sebagai dasar berbagai draf hukum (RUU) yang jelas menentang dan mengurangi

[194] Lihat Lucas dan Warren (2003) untuk melaborasi lebih luas perdebatan ini.

semangat UU No 5/1960 dan UUD 1945 Pasal 33. Undang-undang ini juga mengungkapkan kelemahan dalam hukum pertanian di Indonesia yang telah menghasilkan struktur agraria yang tidak adil dan meningkatkan proses liberalisasi sumber daya alam. Situs ini juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara terdahulu (BUMN di Indonesia) telah diambil alih atau diperkuat oleh perusahaan transnasional, untuk lebih lengkap lihat di situs via campisena dengan alamat (http://viacampesina.org/main_en/images/stories/lvcbooksonwto.pdf).

Pandangan ini bagaimanapun juga, mengubah maksud dari aliansi agraria dan pendukung keadilan lingkungan. Bagi mereka, penerbitan TAP MPR No IX/2001 adalah arti simbolis yang besar dan strategis. Pemimpin lokal SPP menggunakan keputusan tersebut sebagai cara untuk membenarkan pendudukan tanah dan sebagai alat tawar-menawar dengan pusat dan BPN di daerah (Afiff et al). 2005. Disadari atau tidak dalam perjanjian permasalahan perundang-undangan sumber daya alam di era Suharto, diperkuat dimasa reformasi dengan revisi UU Kehutanan direvisi (41/1999) dan keputusan presiden berikutnya (KepPress 34/2003), KPA, SPP dan pendukung resolusi lainnya telah menggunakan TAP MPR IX/2001 untuk membawa isu-isu reforma agraria kembali ke meja perundingan dengan pemerintah. Keputusan ini jelas menyatakan dukungan bagi UUPA. Meskipun anggota organisasi dari FSPI memiliki pandangan yang berbeda terhadap potongan-potongan baru ini dari peraturan tersebut, seperti Keppres 34/2003. SPP melihat Keputusan Presiden ini sebagai legitimasi parlemen kabupaten dan keterlibatan administrasi didalam reforma agraria, menempatkan resolusi konflik lebih dekat dengan sumber (Lucas dan Warren 2003, 35-6; Afiff et al. 2005, 5). FSPI, SPP dan KPA yang sama mendukung reforma

agraria dan UUPA, para petani melihat TAP MPR IX/2001 lebih bermanfaat bagi konservasi besar *(dark green)* dan korporasi lingkungan daripada isu-isu keadilan lingkungan. Bagi KPA dan SPP, keadilan lingkungan sering mencari solusi yang sama dengan inisiatif reforma agraria.

Kelompok lingkungan hidup juga tidak terpikat dengan TAP MPR IX/2001, karena aliansi agraria dan apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap wilayah yang baru-baru ini mereka peroleh. Prospek mendistribusikan seluruh bidang lahan hutan pada petani miskin atau masyarakat adat dan petani di Jawa, atau lainnya dimanapun, adalah kalimat yang di beberapa kelompok lingkungan dengan aliran moderat atau konservatif tidak dapat diterima. Pada perdebatan saat ini, anggapan beberapa lembaga pemerintahan Indonesia menganggap aktivis agraria sebagai tuan tanah. Langkah ini mengubah ketentuan dalam reforma agraria dan dalam beberapa hal yang membedakan perjuangan di Indonesia dari negara-negara lain.[195] Ini juga membenturkan aktivis agraria paling radikal terhadap aktivis yang lebih moderat dan NGO lingkungan hijau. Beberapa yang terakhir ini tidak bersedia untuk mempertimbangkan implikasi dari sejarah terbaru dari pengambilalihan hutan negara (1967) dalam membentuk 'hutan nasional', suatu proses yang juga melibatkan pengambil alihan pengelolaan adat atau kepemilikan tanah (Peluso dan Vandergeest 2001). TAP MPR IX/2001 dengan demikian berjalan melalui beberapa kolaborasi, sama sebagaimana dia telah menlahirkan sisi baru.

Perdebatan tentang TAP MPR IX/2001 juga menerangi kenyataan bahwa tantangan besar nasional telah beralih dari kriminalisasi gerakan masyarakat sipil menjadi apakah dan bagaimana aktivis akan bekerja dengan atau

[195] Tapi lihat Borras (2006), misalnya, yang berbicara reformasi agraria di lahan hutan di Filipina.

di dalam negara. Negara Indonesia sendiri membuat perubahan radikal dalam struktur, praktik dan kebijakan. Bagi aktivis agraria radikal dan moderat, bekerja didalam pemerintahan merupakan konsep yang sama sekali baru, sedikitnya butuh untuk memikirkan tentang diterima atau tidak – jika sama sekali - rencana ini untuk dilakukan.

Namun pemerintah masih harus menangani masalah desentralisasi yang telah menciptakan sebuah kontradiksi besar: pejabat tingkat kabupaten banyak yang sekarang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan sendiri mengenai hal-hal yang mereka tidak tau cara menyelesaikannya karena pada waktu orde baru mereka hanya tau diperintahkan untuk mengurusnya sehingga tidak selalu tahu bagaimana membuat keputusan tersebut. Dengan demikian beberapa kelompok aktivis, termasuk KPA, mengembangkan program pelatihan untuk anggota parlemen di tahun-tahun awal Reformasi. Melalui lokakarya dan sesi-sesi pelatihan, mereka membahas implikasi hukum baru, dan kemungkinan skenario yang berbeda untuk reforma agraria. Dalam banyak diskusi-diskusi ini, pengelola kehutanan tingkat kabupaten dilibatkan. Memang, dibutuhkan sebuah kesadaran yang konstan dimana integritas ekologi dan kelestarian lingkungan akan diusulkan. Bahkan para agarianis yang berorientasi pada hak asasi yang paling radikal harus belajar membicarakan ini jika strategi mereka ingin mengubah hukum dan kebijakan lembaga pengelolaan pertanahan pemerintah.

Pengaruh dari Wacana Lingkungan.

Aktivis lingkungan selalu melihat bagian utama dari gerakan mereka sebagai operasi yang legal di mata hukum - mencari wilayah di mana mereka dapat mendesakkan kontrol atau mempengaruhi kontrol negara - di samping bekerja pada akar rumput. Seperti ditunjukkan di atas, dari

waktu ke waktu, mereka berhasil: bahkan di bawah kekuasaan otoriter di Indonesia, wacana lingkungan telah berhasil memperoleh alas hukum. Manfaat konservasi dari hutan negara dan strategi akumulasi berbasis sumber daya alam (Perusahaan dan negara) dilakukan dengan menentang kapasitas badan-badan sumber daya alam seperti Departemen Kehutanan untuk mengelola kelangsungan sumberdaya agraria berupa tanah.[196] Pengukuhan taman nasional baru, kawasan konservasi dan cagar alam adalah bukti fisik dari kekuasaan penggiat lingkungan: mereka bahkan mengubah ketentuan kehutanan, memperluas jumlah hutan yang disediakan untuk kawasan lindung atau konservasi lebih dari produksi skala besar atau pembangunan.

Peningkatan daya konservasi mengubah dan telah diubah oleh konteks politik ekonomi. Di sisi pelestarian kelompok hijau, dasar teritorial dari konservasi dianggap sebagai ancaman oleh desentralisasi dan reforma agraria - baik melalui pendudukan tanah langsung atau melalui kebijakan pemerintah (McCarthy 2006; Resosudarmo 2005). Jika pengelolaan hutan dan kawasan konservasi didesentralisasikan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mendanai dan menegakkan cagar alam dan kawasan lindung pada tahun-tahun suksesnya konservasi pada mobilisasi transnasional, nasional dan tingkat local? (Jepson dan Whittaker 2002) Dan Jika Menteri Kehutanan dan Perusahaan Kehutanan Negara dianggap sebagai pengelola lahan yang haram di politik lahan hutan, hutan konservasi yang dibangun selama Orde Baru bisa jadi dipertanyakan sebagaimana yang terjadi pada kasus Dongi-Dongi di Sulawesi (Adiwibowo 2005; Li 2007). Perkembangan baru

[196] Pada aliansi 'alami' antara kapitalisme dan konservasi, lihat Smith (1984).

ini memaksa gerakan agraria yang moderat untuk fleksible terhadap kelompok keadilan lingkungan untuk bergerak melawan area ekslusif dari "kelestarian alam" (Lowe 2003; Afiff dan Lowe 2008; Stedile 2002). Mungkin untuk alasan ini, beberapa kelompok lingkungan membuat beberapa kesepakatan dengan modal besar, yang menunjukkan era neoliberal terpaksa mengikuti aliansi konservasi yang dibuat kelompok konservasi internasional dengan militer dan pemerintahan otoriter di masa pembangunan (Peluso 1993; Chapin 2004).

Kelompok keadilan lingkungan juga telah memenangkan beberapa "pertempuran" selama Orde Baru, salah satunya berhasilnya dimasukkan konsep kehutanan sosial. Komunitas kehutanan dalam kelompok keadilan lingkungan telah lama mengejar tujuan mereka untuk meningkatkan akses petani di hutan lahan milik pemerintah sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas pada masa reformasi. Pada tahun-tahun awal milenium baru, mereka mempunyai beberapa prestasi yang kecil namun sangat simbolik. Contohnya, Menteri Kehutanan secara resmi mengakui beberapa komunitas kehutanan otonom di Sumatera dan Kalimantan (D'Andrea 2003; Li 2007). Di Jawa, Perusahaan Kehutanan Negara memperluas akses penduduk desa ke hutan melalui bentuk kerjasama pengelolaan hutan bersama di area 'Kehutanan Sosial' Pulau Jawa, sebagian dalam rangka menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh pendudukan hutan dan penebangan massal yang terjadi pada tahun-tahun awal Reformasi.

Konsolidasi kontrol Pemerintah Indonesia begitu banyak atas wilayah nasional hutan negara yang mewajibkan kelompok gerakan agraria membuat perjanjian secara eksplisit dengan program dan peduli terhadap komunitas/sosial kehutanan. Sebagaimana aktivis reforma agraria di akhir 1990an memfokuskan perhatian mereka pada daerah dataran tinggi, pekerjaan mereka akhirnya tak

terhindarkan menjadi bertumpang-tindih dan kadang-kadang bertentangan dengan aktivis Pengelolaan hutan berbasis komunitas.

Di Jawa, di mana lahan sudah padat dan hutan politik telah memainkan banyak peran dalam sejarah penggunaan lahan pulau itu dan khususnya selama Orde Baru, aktivis pengelolaan hutan berbasis komunitas tidak selalu bersikeras pada perpajakan lahan dari hutan[197]. Langkah pertama adalah berusaha untuk meningkatkan akses petani ke tanah dan sumber daya hutan.

Namun, permasalahan rakyat dan kehutanan sosial, dalam pandangan beberapa aktivis agraria, adalah hak kepemilikan sumber daya dan akses bukannya kontrol mutlak atau otonomi masyarakat, lebih dari itu, mereka bekerjasama dengan Perusahaan Kehutanan Negara atau Menteri Keuangan. Untuk gambaran hak yang lebih rumit, banyak aktivis agraria yang berharap untuk lebih banyak alternatif kepemilikan komunal untuk muncul secara organik atau diusahakan. kepemilikan pribadi mempunyai resiko dijual, sedikit pelajaran untuk banyak orang setelah sukses dan menganggap kegagalan dari kampanye di Sagara (Fauzi 2003; Lukmanudin 2001).[198] Dengan cara ini dan

---

[197] Di Jawa, bentuk yang diterapkankan dalam Perusahaan Kehutanan Negara disebut Kehutanan Sosial. Aktivis mengemukakan kehutanan masyarakat sebagai bentuk alternatif, yang tidak akan melibatkan intervensi atau kekuasaan pembuat keputusan oleh negara, suatu keadaan yang diakui masyarakat hutan sebagai di luar Kawasan Hutan atau wilayah hutan negara.

[198] Desa Sagara telah dimobilisasi oleh SPP dan KPA untuk menduduki tanah juga diklaim oleh Perusahaan Kehutanan Negara. Kasus ituberakhir dengan kekalahan Perusahaan Kehutanan Negara, ketika Menteri Agraria Nasional dan Kepala Badan Pertanahan Nasional mententukan bahwa tanah negara yang bersangkutan dapat digolongkan kepada reformasi tanah (Keputusan No. 35VI/1997). Namun, tiga tahun setelah permukiman, sebagian besar dari 580 hektar tanah yang didistribusikan telah dijual, hal ini mengecewakan aktivis agraria.

lainnya, lebih baik bekerja sama dengan pemerintah dalam program kehutanan sosial dan "memenangkan" kepemilikan swasta menjadi inti utama pertikaian.

Beberapa masyarakat sekitar hutan dan aktivis reforma agraria berupaya berhubungan dan berkolaborasi, sehingga dapat untuk melihat pekerjaan mereka dari perspektif baru. Untuk KPA, misalnya, masyarakat kehutanan merepsentasikan koneksi akses dukungan dan jaringan ke sumber daya baru. Koneksi juga memberikan kesempatan untuk aktivis reforma agraria untuk meradikalisasi masyarakat kehutanan sebagai bentuk lain dari keadilan lingkungan. Untuk tujuan ini, WALHI dan NGO lingkungan seperti ARUPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam) memimpin kampanye di Jawa untuk membubarkan Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)- yang sebenarnya adalah untuk mengumumkan kebangkrutan perusahaan pemerintah ini pada tahun 2002. Meskipun pada akhirnya Perusahaan Kehutanan Negara dipertahankan dengan dukungan dari Menteri Keuangan, namun tekanan oleh para aktivis, akademisi dan beberapa yayasan /penyandang dana memaksa Perusahaan Kehutanan Negara untuk secara dramatis meningkatkan hak-hak akses masyarakat terhadap tanah negara berupa hutan ini serta meningkatkan jumlah wilayah dan pohon di bawah program kehutanan sosial - namun tidak untuk mendistribusikan atau mereklasifikasi lahan hutan negara (Simon 1993,1994; Awang 2004). Sementara hal ini dikritik oleh aktivis reforma agraria, aktivis keadilan lingkungan membela ini sebagai "akses" pendekatan, dan melihatnya sebagai celah potensial pada sulitnya pengelolaan untuk lahan hutan. Keuntungan tambahan pada akses petani akan sulit untuk ditolak setelah Perusahaan Kehutanan Negara atau Menteri Keuangan telah mengakui mereka (wawancara penulis dilihat 2007). Dalam kenyataannya skenario inilah yang terjadi.

Hal ini tidak begitu mengejutkan, bahwa kemudian, setelah Reformasi, beberapa kelompok gerakan agraria telah bersepakat untuk merangkul sikap ramah lingkungan sebagai komponen eksplisit dari strategi politik mereka. Beberapa pemimpin gerakan agraria mengambil sebuah halaman dari buku lingkungan, menyebarkan pendekatan multi-skala ini untuk mendapat legitimasi, wilayah dan otoritas moral dalam berbagai "arena pertandingan", termasuk hukum negara dan kebijakan (Afiff et al 2005). Faktanya bahwa kegagalan untuk berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bisa menjadi dasar untuk penolakan akses terhadap tanah - terutama di daerah yang diklasifikasikan sebagai hutan atau daerah konservasi.

Memang, perjanjian antara gerakan keadilan lingkungan dan alliansi akademis internasional sudah terfokus pada kesalahpahaman dan misrepsentasi dari keberlangsungan praktek dan klaim agroforestry masyarakat adat oleh pengelola hutan dan yang lainnya.[199] Sama seperti pendukung keadilan lingkungan yang telah menyadari kebutuhan untuk menerjemahkan praktek-praktek tradisional Masyarakat Adat kedalam ide tentang manajemen sumber daya yang berkelanjutan, pendukung KPA juga segera bergerak ke arah itu. Potensi okupasi tanah harus dilihat sebagai pengelolaan berkelanjutan dari lingkungan dataran tinggi yang rapuh, membuat jalur agar pimpinan SPP dan KPA mengubah pandangannya tentang okupasi tanah menjadi praktek yang mendukung agro-kehutanan. Pemimpin SPP mencela 'agro kehutanan tradisional' di dataran tinggi yang dikontrol PERHUTANI dan terkait dengan itu adalah sistem monokultur di pegunungan oleh Kementrian Kehutanan yang menyebabkan

[199] Ini juga merupakan literatu besar, termasuk didalam bahasa Inggris, di Indonesia, sebagian besar dari karya seumur hidup Michael Dove (lihat misalnya, Dove 1983, 1985, 1996, dan banyak lainnya).

bencana alam seperti erosi dan tanah longsor pada lahan hutan Pulau Jawa (wawancara penulis 2007).

Di luar Jawa, melalui AMAN dan kelompoknya, masyarakat adat sendiri terus bekerja sama dengan gerakan keadilan lingkungan. Mereka menginginkan pengakuan hukum dari 'wilayah leluhur' yang berarti pengakuan secara formal. Salah satu kemungkinan untuk ini adalah memeperkenalkan kembali pluralisme hukum ke sistem hukum Indonesia, langkah ini didukung sebagian oleh beberapa aktivis nasional, lokal dan internasional dan bahkan oleh penyandang dana. Tapi langkah ini dapat memberikan jarak hubungannya dengan kalangan aktivis reformia agraria karena beberapa 'sistem hak adat' termasuk beberapa anggota AMAN didominasi oleh 'elit feodal' yang ditentang kalangan aktivis reforma agraria dan aktivis nasionalis dalam pergerakan anti kolonial, dan gerakan anti-feodal dari tahun 1940-an dan 1950-an. Sebagian besar aktivis kontemporer tidak bersedia untuk memfasilitasi elit-elit yang sekarang ini mengklaim 'hak-hak adat' melalui inklusi di inisiatif reforma agraria atau aliansi strategis. Mereka ingin, mempertahankan hubungan untuk kelompok anggota AMAN dengan lebih demokratis, komunal atau koneksi egaliter.

Debat mengenai Inisiatif Pemerintah mengenai Reforma Agraria saat ini.

Perbedaan antara prinsip-prinsip fundamental yang mendasari organisasi-agraria dan bagaimana mereka bekerja (atau tidak) dengan pemerintah disorot lebih lanjut ketika bulan September 2006, Presiden RI secara resmi mengumumkan bahwa reforma agraria akan dilaksanakan di Indonesia setelah absen lebih dari 40 tahun, dengan meredistribusikan 8,15 juta hektar tanah negara di bawah yurisdiksi Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (Republika Online 28 September 2006). Segera

setelah itu, pemimpin FSPI berkampanye tentang bahaya "reforma agraria palsu" ini karena skema yang ditawarkan diterapkan tanpa transformasi politik-ekonomi yang kokoh (FSPI 2006).

KPA, disisi lain, dan beberapa organisasi petani lain, berpendapat bahwa meskipun struktur ekonomi politik tidak akan berubah secara radikal, rencana tersebut bisa digunakan untuk memfasilitasi legalisasi ratusan ribu klaim pada lahan yang diduduki oleh petani dan kelompok adat (KPA 2006). Kebingungan yang ditimbulkan oleh posisi di antara kedua pendukung reforma agraria ini (KPA dan FSPI) ini terlihat pada diskusi permasalahan tanah negara, pemimpin SPP, yang menjadi anggota dari FSPI dan KPA, terlibat dalam diskusi formal dan informal dengan aktor pemerintah tentang pelaksanaan inisiatif baru tersebut.

Inisiatif reforma agraria dapat menjadi indikator bahwa sekarang giliran gerakan agraria dan para pemimpin mereka untuk mengubah konteks politik-ekonomi. Selain itu, konteks pada tahun 2007 ini -baik neoliberal maupun desentralisasi periode pasca-Soeharto- secara signifikan berbeda dari saat baru lahirnya gerakan bawah tanah yang pertama kali dimulai pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Pemerintahan terpusat ala Orde Baru adalah campuran dari beragam, desentralisasi kabupaten, masing-masing berhubungan dengan pergeseran dan politik yang tidak menentu dalam lingkungan agraris yang berbeda-beda dengan perbedaan lembaga dan sejarah pengelolaan tanah. Dephut masih berpegang teguh pada klaim mereka terhadap lahan hutan. Taman nasional sebagaimana hutan produksi terlihat baik untuk menginspirasi para penuntut reforma agraria, tetapi tidak di mata konservasionis konservatif dan beberapa pendukung keadilan lingkungan. Meskipun ini merupakan bentuk-bentuk oposisi yang kuat, tapi pembaruan tetap dijalankan.

Bagaimana semua ini akan diselesaikan tidak sepenuhnya jelas, sebagaimana area proyek percontohan untuk inisiatif reformasi agraria nasional yang dipilih pada akhir 2007. Posisi publik dan agitasi yang dilakukan oleh aktivis dan tindakan oleh pendukung reformasi dan para pengkritiknya akan terus berlanjut. Seperti kolaborasi dan reforma agraria lainnya, cerita nyatanya belum di publikasi.

Yang jelas adalah bahwa akan ada beberapa aliansi antara pendukung keadilan lingkungan nasional dan daerah dan aktivis reforma agraria, seperti terjadinya peningkatan dalam kampanye transnasional. Perang terhadap Teknologi Transgenik dan dukungan dari pertanian organik internasional yang menjadi contoh aliansi paling jelas (Stedile 2002, 103; Borras 2004; Biekart dan Wood 2001). Pada konferensi Perubahan Iklim 2007 di Bali dan pada website mereka, FSPI telah mendukung pertanian berkelanjutan, upaya pertanian organik, kampanye anti-Transgenik dan inisatif yang didukung secara global oleh Via Campesina. Di Bali, FSPI / Via Campesina mengatakan kepada masyarakat internasional bahwa 'peternakan keluarga kecil membuat bumi lebih sejuk'. Sekali lagi, ini adalah hal menarik bahwa pemimpin FSPI cenderung menggunakan forum-forum yang berorientasi internasional untuk membuat klaim seperti itu, mencari legitimasi dari luar, sementara organisasi gerakan agraria nasional lainnya seperti KPA menempatkan mayoritas inisiatif strategis mereka pada perdebatan, lembaga dan aktor nasional dan daerah.

Kesimpulan

Reformasi, desentralisasi dan kebangkitan gerakan reforma agraria di Indonesia dimulai pada saat yang sama dengan protes global terkenal terhadap WTO yang terjadi di Seattle, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari

gerakan transnasional pada umunya. Namun, Biekert dan Wood telah menunjukkan bahwa, Protes global telah ada sebelum terjadinya 'Perjuangan Seattle'. Yang baru adalah hubungan yang berkembang antara kampanye yang berlatar beragam(2002, 1).

Bab ini telah menunjukkan bahwa kampanye yang dibentuk di bawah rezim yang berbeda dan meng-artikulasikan dalam hubungan berbeda, dengan efek pada satu sama lain timbul dari sumber transnasional, nasional dan daerah. Dalam berbagai cara yang masih perlu dieksplorasi lebih dalam, garis antara gerakan lingkungan dan keadilan agraria sering kabur oleh sejarah secara khusus dan umum, mereka menentang pengambilalihan oleh negara. Hal ini sebagian telah tersembunyi dari pandangan kebanyakan, bahwa strategi gerakan lingkungan dan agraria menunjukkan perbedaan itu lebih daripada sekedar artikulasi dan konvergensi. Menggunakan Indonesia sebagai contoh misalnya, kita ditunjukkan bagaimana retorika, strategi, aliansi dan praktek lainnya dari gerakan lingkungan dan agraria bervariasi di bawah neoliberalisme dan Reformasi, serta di bawah pemerintahan otoriter sebelumnya, yang dipimpin rezim pembangunan. Hasil dan konfigurasi kekuatan telah berubah dari waktu ke waktu.

Bagi para pengamat Indonesia, seringnya terjadi konflik agraria dan lingkungan di percaturan politik Indonesia, mengakibatkan terjadinya mobilisasi massa pendukung agraria, okupasi tanah, oposisi publik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan penting lainnya sejak tahun 1998 dan itu merupakan sebuah revolusi. Dengan demikian, gerakan agraria saat ini dipaksa untuk datang dan berdamai dengan teritorial dan usaha pemerintahan dari gerakan lingkungan terdahulu. Demikian pula, sesuatu yang tak terduga, sebagaimana agenda reforma agraria telah mendapatkan alasan, paling tidak dalam arti simbolis atau moral, aktivis lingkungan sekarang dipaksa untuk

memperhitungkan kampanye, tuntutan dan klaim mereka sendiri. Aliansi awal dengan kelompok keadilan agraria di Indonesia membagi gerakan lingkungan Indonesia antara kelompok lingkungan yang relatif memaksa dengan yang berorientasi keadilan. Banyak kelompok gerakan agraria, yang bagaimanapun, telah menemukan alasan yang sama dengan pendukung keadilan lingkungan.

Meskipun mereka mempunyai euforia bersama ketika Reformasi menggantikan kekuasaan otoriter, organisasi yang membangkitkan kembali gerakan agraria di Indonesia tidaklah bersatu dalam perjuangan mereka saat ini. Di antara alasan-alasan lain untuk berpisah adalah perbedaan karakteristik serta perbedaan asosiasi politik dengan kelompok transnasional dari masing-masing kelompok gerakan agraria dan organisasi lingkungan, kelompok nasional atau daerah telah dihasilkan baik di bawah masa pembangunan maupun masa Reformasi.

Sebagaimana bidang politik yang telah berubah, aliansi dengan pemerintah dan lembaga transnasional juga berubah, kadang bertemu kadang berpisah, keprihatinan aktivis yang sebelumnya terpinggirkan telah menjadi normalisasi dalam praktek dan ideologi negara dan pembangunan – bagi aktivis gerakan lingkungan dan gerakan agraria-. Aktivitas dan aksi aktivis lingkungan dan agraria telah mengakibatkan perubahan perundangan, kelembagaan, dan kontrol territorial dan pengelolaan pertanahan nasional. Dibawah rezim politik-ekonomi yang berbeda, didalam momen sejarah yang berbeda, terbuka kesempatan politik bagi kelompok gerakan lingkungan dan agraria untuk dibentuk tidak hanya oleh agenda internasional dan nasional tetapi juga oleh pengorganisasian akar rumput yang kuat, dan kelompok-kelompok pergerakan merasakan kebutuhan dan kapasitas untuk beraliansi dengan yang lainnya, dengan pemain transnasional dan pemerintah dan pemilik modal. Hal-hal rumit

yang lebih lanjut, logika apa yang mungkin disebut sebagai akar rumput nasional termasuk migran yang berkeliling untuk mencari pekerjaan di industri berbasis sumber daya atau tanah yang mereka anggap sebagai "kosong" - tidak selalu bekerjasama dengan baik dengan dengan logika dari akarrumput lokal (Li 2007). Dengan demikian, kemitraan di dan di dalam gerakan dan secara transnational belum konsisten.

Yang menarik adalah bahwa mereka semua telah belajar untuk berbicara tentang kelangsungan lingkungan, yang mana telah menjadi semakin penting untuk dilakukan. Okupasi Tanah harus memunculkan pengelolaan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan landasan moral yang tinggi dan menciptakan dasar bagi reforma agraria. Namun dalam keadaan seperti saat ini, reforma agraria yang harus peka lingkungan dilihat sebagai pra-konfigurasi oleh gerakan lingkungan, baik konservatif maupun radikal.

Referensi

Aditjondro, George J., 1993. 'The Media as Development "Textbook": A Study on Information Distortion in the Debate about the Social Impact of an Indonesian Dam (Kedung Ombo Dam)'. PhD Dissertation, Cornell University.

Aditjondro, George J., 2003. 'Kebohongan–Kebohongan Negara Perihal Kondisi Obyektif Lingkungan Hidup di Nusantara'. Yogyakarta: Pustaka Pajar.

Adiwibowo, Suryo, 2005. 'Dongi-dongi – Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective'. PhD Dissertation, Universität Kassel, Germany.

Afiff, Suraya, 2004. 'Land Reform or Customary Rights?: Contemporary Agrarian Struggles in South Tapanouli,

Indonesia'. PhD Dissertation, University of California, Berkeley.

Afiff, Suraya, Noer Fauzi, Gillian Hart, Lungisile Ntsebeza and Nancy Peluso, 2005. 'Redefining Agrarian Power: Resurgent Agrarian Movements in West Java, Indonesia'. Center for Southeast Asia Studies Working Paper CSEASWP2-05.

Afiff, Suraya and Celia Lowe, 2008. 'Collaboration, Conservation, and Community: A Conversation between Suraya Afiff and Celia Lowe'. In *Biodiversity and Human Livelihoods in Protected Areas: Case Studies from the Malay Archipelago*, eds. Navjot S. Sodhi, Greg Acciaioli, Maribeth Erb and Alan Khee-Jin Tan, 153–64. Cambridge:Cambridge University Press.

Arupa, Koling, Yayasan and the Asian Forest Network, 2003. *Communities Transforming Forestland*. Java, Indonesia, Bohol, Philippines: Asia Forest Network.

Aspinall, Edward, 2004. 'Indonesia: Civil Society and Democratic Breakthrough'. In *Civil Society and Political Change in Asia. Expanding and Contracting Democratic Space*, ed. Muthiah Alagappa, 61–96. Stanford, CA: Stanford University Press.

Awang, San Afri, 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. Yogyakarta: Bigraf Pub. & Program Pustaka.

Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas, 2001. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

Barber, Charles, Suraya Afiff and Agus Purnomo, 1995. 'Tiger by the Tail: Challenges toBiodiversity in Indonesia'. Washington, DC: World Resources Institute, WALHI, Pelangi.

Barr, Christopher, 1997. 'Discipline and Accumulate: State Practice and Elite Consolidation in the Indonesian

Timber Industry'. Master's Thesis, unpublished, Cornell University, Ithaca, NY.

Baviskar, Amita, 1995. *In the Belly of the River: Tribal Conflicts Over Development in the Narmada Valley*. Delhi: Oxford University Press.

Belsky, Jill M., 2008. 'Creating Community Forests'. In *Forest Community Connections: Continuity and Change*, eds. Ellen Donoghue and Victoria Sturtevant, 219–242. Washington, DC: Resources for the Future.

Biekart, Kees and Angela Wood, 2001. 'Ten Reflections on the Emerging Global Protest Movement'. *The Ecologist*, 31: 8 (October).

Borras, Saturnino M., 2004. 'La Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Movement'. Briefing Series No. 6, Transnational Institute, Amsterdam. http://www.tni.org/reports/newpol/campesina.pdf.

Borras, Saturnino M., 2006. Redistributive Land Reform in Public (Forest) Lands? Rethinking Theory and Practice with Evidence from the Philippines. *Progress in Development Studies*, 6 (2): 123–45.

Buechler, Steven M., 2000. *Social Movements in Advanced Capitalism: The Political Economy and Cultural Construction of Social Activism*. New York: Oxford University Press.

Chapin, Mac, 2004. *A Challenge to Conservationist*. World Watch magazine, November/December 2004.

Christodoulou, Demetrios, 1990. *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.

Contreras-Hermosilla, Arnoldo and Chip Fay, 2005. *Strengthening Forest Management in Indonesia Through Land Tenure Reform: Issues and Framework for Action*. Bogor and Washington, DC: Forest Trends, ICRAF, World Bank.

Cribb, Robert, 1990. 'Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia'. In *The Indonesian Killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali*, ed. Robert Cribb, 1–43. Clayton, Victoria, Monash University Centre of Southeast Asian Studies.

D'Andrea, Claudia, 2003. 'Coffee, Capitalism and Culture in Katu, Sulawesi, Indonesia'. PhD dissertation, University of California, Berkeley.

Dauvergne, Peter, 1994. *Shadows in the Forest*. Cambridge, MA: MIT Press.

Desmarais, Annette Aurélie, 2002. 'The Vía Campesina: Consolidating an International Peasant and Farm Movement'. *Journal of Peasant Studies*, 29: 91–124.

Djuweng, Stepanus, 1997. 'Asal-usul Global dari Konflik Lokal versus Korban Lokal dari Masalah-masalah Global'. dalam *Tanah dan Pembangunan*, ed. Noer Fauzi, 253–81. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Djuweng, Stepanus and Sandra Moniaga, 1994. 'Kebudayaan dan Manusia yang Majemuk di Indonesia. Masihkah Punya Tempat?' In *ILO Convention 169*. Jakarta: ELSAM dan LBBT.

Dove, Michael, 1983. 'Theories of Swidden Agriculture and the Political Economy of Ignorance'. *Agroforestry Systems*, 1 (2): 85–99.

Dove, Michael, 1985. 'The Agroecological Mythology of the Javanese, and the Political- Economy of Indonesia'. *Indonesia*, 39: 1–36.

Dove, Michael, 1996. 'So Far from Power, So Near to the Forest: A Structural Analysis of Gain and Blame in Tropical Forest Development'. In *Borneo in Transition: People,Forests, Conservation, and Development*, eds. Christine Padoch and Nancy Lee Peluso,41–58. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Edelman, Marc, 1999. *Peasants Against Globalization:*

Rural Social Movements in Costa Rica. Stanford, CA: Stanford University Press.

Edelman, Marc, 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society Yearbook 2003*, eds. M. Kaldor, H. Anheier and M. Glasius, 185–220. Oxford: Oxford University Press.

Edelman, Marc, 2005. 'Bringing the Moral Economy Back In . . . to the Study of Twentyfirst Century Transnational Peasant Movements'. *American Anthropologist*, 107: 331–45.

Farid, Hilmar, 2005. 'Indonesia's Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion,1965–66'. *Inter-Asia Cultural Studies*, 6 (1): 3–16.

Fauzi, Noer, 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*.Yogyakarta: Insist Press.

Fauzi, Noer, 2003. 'The New Sundanese Peasants' Union: Peasant Movements, Changes in Land Control, and Agrarian Questions in Garut, West Java'. Paper prepared for workshop New and Resurgent Agrarian Questions in Indonesia and South Africa. Center for Southeast Asia Studies and Center for African Studies – Crossing Borders Program 2003–2004, 24 October 2003. Institute for International Studies – Moses Hall University of California, Berkeley, CA. http://repositories.cdlib.org/cseas/CSEASWP1-03.

Fauzi, Noer and R. Yando Zakaria, 2001. *Mensiasati Otonomi Daerah, Panduan Fasilitasi Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Rakyat*. Yogyakarta: Insist Press.

Fauzi, Noer and R. Yando Zakaria, 2002. 'Democratizing Decentralization: Local Initiatives from Indonesia'. Paper submitted for the International Association for the Study of Common Property 9th Biennial Conference, Zimbabwe.

Fidro, Boy and Noer Fauzi, 1995. *Pembangunan Berbuah Sengketa: 29 Tulisan Pengalaman Advokasi Tanah*. Bandung: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan.

Franco, Jennifer C. and Saturnino M. Borras, 2005. 'Changing Patterns of Peasant Mobilizations for Land and Democracy in the Philippines'. In *On Just Grounds, Struggling for Agrarian Justice and Citizenship Rights in the Rural Philippines*, eds. J.C. Franco and S.M Borras. Quezon City: Institute for Popular Democracy; Amsterdam: Transnational Institute.

Franco, Jennifer C. and Saturnino M. Borras, 2006. 'Pandangan dan Sikap FSPI Tentang Program Pembaruan Agraria Nasional'. http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=1, Accessed 26 January 2007.

Ganie-Rochman, Meuthia, 2002. *An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto's New Order*. Jakarta: LabSosio FISIP-UI.

Hadiz, Vedi, 2004a. 'Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives'. *Development and Change*, 35 (4): 697–718.

Hadiz, Vedi, 2004b. 'Indonesian Local Party Politics: A Site of Resistance to Neo-Liberal Reform'. *Critical Asian Studies*, 36 (4): 615–36.

Hajer, Maarten, 1993. 'Discourse Coalitions and the Institutionalisation of Practice: The Case of Acid Rain in Great Britain'. In *The Argumentative Turn in Policy Analysis andPlanning*, eds. Frank Fischer and John Forester, 43–67. London: Mobipocket.

Hajer, Maarten, 1995. *The Politics of Environmental Discourse*. Oxford: Oxford University Press.

Heruputri, Arimbi, 1997. 'Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat oleh Kelompok Dominan'. Kertas Posisi WALHI No. 06-1997.

Hikam, Muhammad, 1995. 'The State, Grass-roots Politics and Civil Society: A Study ofSocial Movements under Indonesia's New Order 1989–1994'. PhD dissertation, theUniversity of Hawaii at Manoa.

Husken, Frans and Benjamin White, 1989. 'Java: Social Differentiation, Food Production and Agrarian Control'. In *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*, eds. Gillian Hart, Andrew Turton and Benjamin White, 235–65. Berkeley, CA: University of California Press.

Jepson, Paul and Robert J. Whittaker, 2002. 'Histories of Protected Areas: Internationalisation of Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)'. *Environment and History*, 8: 129–72.

Kartodihardjo, Hariadi, 2002. 'Hutan Kemasyarakatan Dalam Belenggu Penguasaan Sumber-sumber Agraria'. In *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*, 339–57. Bandung: Akatiga.

Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networksin International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kowalchuk, Lisa, 2005. 'The Discourse of Demobilization: Shifts in Activist Priorities and the Framing of Political Opportunities in a Peasant Land Struggle'. *The Sociological Quarterly*, 46: 237–61.

KPA, 2006. 'Komunike Internal KPA No. 02/Desember/2006. Mari Rapihkan Barisan untuk Mengawal Program Pembaruan Agraria Nasional!' http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=53&PHPSESSID=a7a475d0ec77bd7c3eb633425f92b5de, Accessed 26 January 2007.

Kuswahyono, Imam, 2003. 'Mencari Format Hukum dalam Menuju Reforma Agraria dalam Kerangka Otonomi Daerah'. http://www.otoda.or.id/Artikel/

Imam%20Koeswahyono.htm, Accessed 4 October 2003.

Li, Tania, 2000. 'Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot'. *Comparative Studies in Society and History*, 42: 149–79.

Li, Tania, 2001. 'Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone'. *Modern Asian Studies*, 353: 645–76.

Li, Tania, 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham, NC: Duke University Press.

Lowe, Celia, 2003. 'Sustainability and the Question of "Enforcement" in Integrated Coastal Management: The Case of Nain Island, Bunaken National Park'. *Pesisir & Laut*, No. 1: 49–63.

Lowe, Celia, 2006. *The Wild Profusion: Biodiversity in an Indonesian Archipelago*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lucas, Anton and Carol Warren, 2000. 'Agrarian Reform in the Era of Reformasi'. In *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*, eds. Chris Manning and Peter van Diermen, 220–38. Indonesia Assessment Series. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Lucas, Anton and Carrol Warren, 2003. 'The State, the People and Their Mediators: the Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia'. *Indonesia*, October, 76: 87–126.

Lukmanudin, Ibang, 2001. 'Mari Bung Rebut Kembali, Rakyat Segera Menuntut Hak Atas Tanah'. In *Mengubah Ketakutan Menjadi Kekuatan, Kumpulan Kasus-kasus Advokasi*, Yogyakarta: Insist Press.

Lyon, Margo L., 1970. *Bases of Conflict in Rural Java*. Berkeley, CA: Center for South and Southeast Asia Studies, University of California.

Mas'oed, Mochtar, 1983. 'The Indonesian Economy and Political Structure During the Early New Order 1966–1971'. PhD dissertation, Ohio State University.

McCarthy, James, 2005. 'Devolution in the Woods: Community Forestry as Hybrid Neoliberalism'. *Environment and Planning*, 37: 995–1014.

McCarthy, John F., 2000. 'The Changing Regime: Forest Property and Reformasi in Indonesia'. *Development and Change*, 31 (1): 91–129.

McCarthy, John F., 2006. *The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra's Rainforest Frontier*. Stanford, CA: Stanford University Press.

McKeon, Nora, Wendy Wolford and Michael Watts, 2004. 'Peasant Associations in Theory and Practice'. Civil Society and Social Movements Programme Paper Number 8, United Nations Research Institute for Social Development.

McMichael, Philip, 2005. 'Globalization'. *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization*, eds. Thomas Janoski, R. Alford, A. Hicks and M. Schwartz,587–606. Cambridge: Cambridge University Press.

McVey, Ruth, 1965. *The Indonesian Communist Party*. Ithaca, NY: Cornell Universit Press.

Moniaga, Sandra, 1997. 'Keaslian Suku dari Suku-suku Asli di Indonesia: Dilihat dari Perspektif Siapa?' In *Tanah dan Pembangunan*, ed. Noer Fauzi, 233–51. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Moniaga, Sandra, 2007. 'From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey'. In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics. The Deployment of Adat From Colonalism to Indigenism*, eds. Jamie S. Davidson and David Henley, 275–94. London:Routledge.

Mortimer, Rex, 1972. *The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959–1965*. Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

Mortimer, Rex, 1973. *Showcase State: The Illusion of Indonesia's Accelerated Modernization*. Sydney: Angus and Robertson.

Moyo, Sam and Paris Yeros, 2005. 'The Resurgence of Rural Movements under Neoliberalism'. In *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, eds. S. Moyo and Paris Yeros, 8–64. London: Zed Books.

Peluso, Nancy Lee, 1992. *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*.Berkeley, CA: University of California Press.

Peluso, Nancy Lee, 1993. 'Coercing Conservation: The Politics of State Resource Control'. *Global Environmental Change*, 3: 199–217.

Peluso, Nancy Lee and Peter Vandergeest, 2001. 'Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand'. *The Journal of Asian Studies*, 60 (3): 761–812.

Pelzer, Karl J. 1982. *Planters Against Peasants: The Agrarian Struggle in East Sumatra, 1947–1958*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Powelson, J.P. and R. Stock, 1990. *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World*. Washington, DC: Cato Institute.

Resosudarmo, Budi, 2005. *The Politics and Economics of Indonesia's Resources*. Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies.

Robison, Richard, 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin.

Robison, Richard and Vedi Hadiz, 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.

Rosser, Andrew, Kurnya Roesad and Donni Edwin, 2005. 'Indonesia: The Politics of Inclusion'. *Journal of Contemporary Asia*, 351: 53–77.

Rosset, Peter, 2006. 'Moving Forward: Agrarian Reform as a Part of Food Sovereignty'. In *Promised Land. Competing Visions of Agrarian Reform*, eds. P. Rosset, Raj Patel and Michael Courville, 301–21. Oakland, CA: Food First.

Routledge, Paul, 2004. *Resisting and Shaping the Modern*. London: Routledge.

Rumansara, Augustinus, 1998. 'Indonesia: The Struggle of the People of Kedung Ombo'. In *The Struggle for Accountability – The World Bank, NGOs and Grassroots*, eds. Jonathan Fox and L. David Brown, 123–50. Cambridge, MA: MIT Press.

Ruwiastuti, Maria, 2000. *'Sesat Pikir' Politik Hukum Agraria. Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-hak Adat*. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.

Sangkoyo, Hendro, 2000. 'Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis sebagai Agenda Pokok Pengurusan Masyarakat dan Wilayah'. Consortium for Agrarian Reform (KPA) Position Paper.

Simon, Hasanu, 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Yogyakarta: Aditya Media.

Simon, Hasanu, 1994. *Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sivaramakrishnan, Kalyanakrishnan and Arun Agrawal, 2003. *Agrarian Environments: Resources, Representations, and Rule in India*. Durham, NC: Duke University Press.

Smith, Neil, 1984. *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space*. Cambridge: Blackwell.

Stedile, Joao Pedro, 2002. 'Landless Battalions: The Sem Terra Movement of Brazil'. [Interview by Francisco de Oliveira]. *New Left Review*, 15 (May–June): 77–104. Terborgh, John, 1999. *Requiem for Nature*. Washington, DC: Island Press.

Tsing, Anna, 1999. 'Becoming a Tribal Elder and Other Green Development Fantasies'. In *Transforming Indonesia's Uplands*, ed. Tania Li, 159–202. Amsterdam: Harcourt.

Tsing, Anna, 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Wargadipura, Nissa, 2005. 'Bekerja Bersama Anggota Serikat Petani Pasundan Dalam Mempengaruhi Kebijakan Reforma Agraria'. Paper presented at Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat – FPPM national meetings, 27–29 January 2005, Lombok Barat, Indonesia.

Webster, Neil, 2004. *Understanding the Evolving Diversity and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization*. Civil Society and Social Movements – Paper No. 7. Geneva: United Nation Research Institute for Social Development.

Wiradi, Gunawan, 1997. 'Pembaruan agraria: Sebuah Tanggapan'. In *Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia*, eds. D. Bachriadi, B. Setiawan and E. Faryadi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, and KPA.

Zerner, Charles, 1992. *Indigenous Forest-Dwelling Communities in Indonesia's Outer Islands: Livelihood, Rights and Environmental Management Institutions in the Era of Industrial Forest Exploitation*. A report commissioned by the World Bank, Forestry Sector Review.

9

Aturan Siapa? Pertentangan untuk Menjamin "Produksi Lokal untuk Konsumen Jauh"[200]

Harriet Friedmann dan McNair AMBER

Pendahuluan

Tatanan baru perusahaan pangan transnasional dipastikan memotong rantai pasokan petani dari pasar lokal. Petani yang terbiasa untuk menjual secara lokal, regional atau nasional tidak bisa terus begitu seperti sebelumnya. Beberapa petani, pengolah, distributor dan pengecer masuk ke dalam kontrak produksi dalam rantai pasokan transnasional; sementara yang lain terpinggirkan; tidak dapat mengandalkan stabilitas walaupun supermarket membawa petani dari seluruh dunia ke dalam persaingan untuk kontrak - bahkan untuk memasok pelanggan di dekatnya. Petani kecil di utara telah bergabung melalui berbagai strategi pemasaran langsung: "pasar petani", *Community Shared Agricultur*, skema box dan sejenisnya

[200] Ini adalah frasa Slow Food yang digunakan oleh Fonte (2006).

yang menjamur tapi masih diperhitungkan untuk pangsa pasar yang sangat kecil. Di selatan, supermarket dengan cepat menjamur, sehingga sulit untuk melacak perubahan yang terjadi, putusnya petani dari pembeli makanan. Di Amerika Latin, Reardon dan Berdegué (2002, 371) melaporkan bahwa dalam dekade 1990 sampai 2000, saham supermarket dari pembelian eceran di Amerika Latin naik 10-20 % menjadi 50-60 %. Sementara banyak muncul resistensi, memeriksa ini sebagai tanggapan kreatif dalam merespon kondisi baru ini sangat penting dilakukan. Sementara beberapa muncul dalam bentuk kerjasama gaya lama (Reardon dan Berdegué 2002, 382), yaitu pendekatan kewirausahaan yang inovatif oleh kelompok-kelompok terorganisir dalam sistem makanan yang ingin kembali ke pertanian dan konsumsi makanan secara sosial dan ekologi.

Regional Project ini menggambarkan inovasi abad kesembilan belas Eropa tentang *terroir*[201] dan sekarang mendapatkan bentuknya dalam kelembagaan seperti Geographical Indication di World Trade Center. Sementara yang sebelumnya terkadang implicit yang membuat jelas bahwa proyek-proyek alternatif menghadapi tantangan yang sama seperti negara besar, dengan berbagai jenis sumber daya. Untuk menghindari marginalisasi, pemasok lokal varietas tanaman dan pangan ternak serta makanan tradisional harus meningkatkan kualitas, menarik konsumen dan pasar yang jauh (Fonte 2006). Ini tantangan untuk negara dan mereka yang mencari alternatif-alternatif baru, karena itu dia harus memberi tahu kualitas, dan memberi tahu asal-usul makanan. Praktek lama seperti

[201] terroir mengacu kepada "kombinasi faktor alam (tanah, air, lereng, ketinggian di atas permukaan laut, vegetasi, iklim mikro) dan manusia (tradisi dan praktek budidaya) yang memberikan karakter yang unik untuk setiap daerah pertanian kecil dan makanan yang tumbuh , mengangkat, membuat, dan dimasak disana (Petrini 2001, 8).

merek dagang, , segel persetujuan dan sertifikasi menjadi penting bagi segala jenis rantai pasokan. Ini menjadi arena pertentangan, penggandaan, kebingungan, dan karenanya membuka peluang bagi strategi kreatif.

Dalam bab ini kita akan mengkaji eksperimen lokal dalam melekatkan pasar pertanian dalam ekosistem lokal dalam konteks global. Dalam melakukannya, kita mengambil sudut tertentu pada proyek "ketahanan pangan". Kebanyakan penelitian tentang gerakan-gerakan sosial transnasional yang telah dipahami berfokus pada perlawanan terhadap perpindahan dari petani yang tersisa sejak tahun 1980-an (Bernstein 2006; Araghi 2000; cf Pietrykowski 2004).[202] Bab ini akan berfokus pada "tindakan konkrit dan proyek yang dapat dilaksanakan" (Petrini 2001, 110) untuk melindungi makanan dan agrikultur di bawah ancaman kepunahan sebagaimana rantai pasokan Agrifood yang bergabung dan meminggirkan yang lain. Mereka telah masuk di bawah tenda besar visioner ketahanan pangan, proyek-proyek ini berusaha

[202] Resistensi berasal dari berbagai arah - petani terpinggirkan, petani terperangkap dan tertindas dengan hubungan kontrak baru, dan bahkan dari populasi pedesaan secara besar-besaran digantikan oleh apa Araghi (2000) sebut batas global kaum tani. Dan belum dibatasi ke Selatan. Kemunculnya Via Campesina luar biasa hanya dalam waktu satu dekade dan mungkin setengah dekade (Patel 2007; Edelman 2003; McMichael 2007; Desmarais 2007), misalnya, mengungkapkan solidaritas yang luar biasa di kalangan petani kecil di Utara, yang bersedia untuk mengidentifikasi sebagai 'masyarakat tanah', dengan petani yang jauh lebih kecil, pekerja di pedesaan dan masyarakat adat di Selatan. Hebatnya, solidaritas Utara-Selatan sangat berbeda dengan konflik antara negara Utara dan Selatan dalam organisasi internasional. Hal ini menarik bahwa konflik antara negara bagian Utara dan Selatan di WTO berkontribusi terhadap terjadinya kebuntuan dalam peraturan antar negara, yang mengundang swasta dengan peraturan Agrifood, seperti yang akan kita lihat, tetapi juga membuka ruang untuk politik pasar kreatif dari bawah.

untuk membuat atau membentuk hubungan pasar. Karena mereka tidak bisa tetap menjadi "local", sebagai kunci untuk kelangsungan hidup mereka - dan potensi transformatif - terletak pada koordinasi dan fasilitasi transnasional. Proyek-proyek yang kami jelaskan berbagi dengan 'fair trade' dan kontradiksi yang melekat pada inisiatif terkait '. . . antara gerakan dan prioritas pasar '(Raynolds dan Murray 2007, 223), tetapi koordinasi global pada isu ekologis dan budaya yang melekat pada sistem Agrifood menggeser penekanan dari mobilisasi politik untuk membangun lembaga alternatif.

Argumen dibagi ke dalam empat bagian. Pertama, kami menunjukkan tentang dua proyek untuk hubungan Agrifood global yang muncul, keduanya perlu semacam sertifikasi. Dari atas, Modal Agrifood yang dipimpin oleh supermarket, dicontohkan oleh konsorsium GLOBAL GAP yang secara aktif menciptakan fleksiblitas, ini dapat dilacak dari rantai pasokannya yang berdasarkan standar norma kualitas.[203] Ini mungkin sebuah hal instan dari pergeseran yang lebih luas terhadap 'kapitalisme hijau "(Friedmann 2005).

Dari bawah, teori *Slow Food* mengkoordinasikan penyusunan organisasi regional yang berkembang dengan semangat bereksperimen dengan proses produksi, pengetahuan, inovasi dan pemasaran, semua atas nama kualitas, yang bersama-sama mengantisipasi konstelasi alternatif 'rantai pasokan' yang tertanam di wilayah budaya dan alam yang beragam. Kedua, kami memberikan satu contoh dari Selatan (Michoacán, Meksiko) tentang bagaimana dua proyek yang berinteraksi dengan masalah agraria. Ketiga, kami melaporkan tentang proyek inovatif di Utara (Ontario, Kanada), yang telah rusak melalui

[203] Ini mungkin sebuah hal instan dari pergeseran yang lebih luas terhadap 'kapitalisme hijau "(Friedmann 2005).

beberapa batasan untuk meningkatkan pasar untuk lokal, kelangsungan petani melalui persyaratan kelembagaan "Agrifood" raksasa yang membeli produksi mereka. Keempat, kami menjelaskan tentang beberapa percobaan di seluruh dunia yang terhubung dalam jaringan global akan mengubah pertanian dan makanan di skala dunia. Kami mengadopsi strategi unkonventional, oleh karena itu, menempatkan teori pada akhir bab ini, berharap untuk memandu pembaca dengan metode induktif yang kami terapkan dalam tulisan ini. Untuk mengantisipasi, kami menunjukkan sebuah pendekatan baru dari konsep Polanyi tentang "embeddedness", menghubungkannya ke yang disebut Wright (mendatang) yang memperbarui konsepsi Marxis mengenai transformasi sosial.

Sertifikasi Aturan, Tapi Milik Siapa?

Politik "kualitas" ini mengubah konflik dan negosiasi dalam sistem Agrifood. Sebuah perkembangan literatur mengeksplorasi bagaimana "proses audit makanan berimplikasi pada kebijakan pemerintahan neo-liberal yang berkaitan dengan pertanian dan makanan" (Campbell dan LeHeron 2007, 133). Audit dan sertifikasi kualitas memiliki garis silsilah yang menarik, dalam hal ini dibatasi hanya dalam sistem pangan. Merek *Kosher* di New York pada pergantian abad kedua puluh (Glaswirt 1974, dirangkum dalam Campbell dan LeHeron 2007, 136-38) menemukan hubungan paralel yang menarik dalam penciptaan sertifikasi halal di Amerika Utara.[204] Sertifikasi organik sangat

[204] Label mencerminkan aturan khusus bagi Muslim diasporik, misalnya, penerimaan dari mesin (selain tangan) penyembelihan telah dibuat oleh Masyarakat Islam Amerika Utara (lihat http://www.isna.net). aturan mereka mungkin ditantang oleh kelompok lain, tapi kami belum dapat menemukan referensi di situs Web lain, misalnya, Canadian Council of Muslim Theologians.

ditentang seiring dengan meningkatnya industri organik (Campbell dan LeHeron 2007; Lyons 2007; Guthman 2004). Munculnya rantai pasokan global membawa kasus-kasus kecil ke pusat, yang melibatkan budaya politik yang rumit dari audit makanan, yang membawa pemain penting dan berkuasa seperti supermarket dan perusahaan produsen dalam negosiasi dengan kepentingan masyarakat umum yang memiliki kemampuan untuk tidak mengakui dan mengakui nilai-nilai budaya dalam makanan '(Campbell dan LeHeron 2007, 147).

Sebagaimana peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada makanan yang berasal dari lembaga swasta, 'lintas hibridisasi standar publik-swasta' berguguran semua, tapi dalam skala kecil, ada juga yang tetap bisa berjalan (Barling dan Lang 2005, 41). Tanpa mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan di satu sisi, dan konsumen, masyarakat dan petani di sisi lain, intinya adalah bahwa konflik dan negosiasi terjadi pada kedua ujung rantai pasokan, menghubungkan produsen dan konsumen ke dalam sistem swasta yang bisa diaudit yang peraturannya sulit untuk distabilkan.

Dua fenomena peraturan baru yang dimainkan antara lembaga-lembaga standarisasi dan beragam lembaga sertifikasi adalah kebijakan tentang: 'Third Party Certification' (TPC) dan "tracebility". TPC muncul dari dua perubahan, di samping liberalisasi perdagangan: (1) devolusi peraturan pemerintah tentang makanan, misalnya, pemerintah Inggris mengganti audit dokumen pengecer dari hanya cek dokumen ke inspeksi di tempat (Marsden et al 2000a). Kebijakan ini membuka jalan bagi lembaga non-pemerintah untuk membentuk lembaga 'audit', dan (2) Gerakan sosial yang mempelopori produk pertanian khusus, seperti organik dan perdagangan yang adil, yang memerlukan label organisasi agar konsumen mengetahui kualitas produk mereka. Dengan demikian, standar baru,

seperti standar organik *United States Departement of Agriculture*, dilaksanakan melalui sertifikasi pihak ketiga yang disahkan oleh pemerintah. Ini membuka jalan bagi pemerintahan di dunia Selatan untuk melakukan 'benchmark' pada standar public untuk pemerintah (Codex Alimentarius) dan untuk standar yang ditetapkan oleh modal swasta, terutama ketika diatur ke dalam konsorsium.

Traceability adalah tujuan dari TPC: untuk memungkinkan negara dan (kadang) konsumen untuk mengetahui kualitas dan asal-usul makanan. Gagasan dan teknik ini dirintis oleh produsen kecil untuk menunjukkan perbedaan produk mereka dalam memastikan kualitas. Sebuah warisan dari abad terakhir yaitu *Denomination of origin* (DOC), untuk anggur dan produk di daerah lain di Eropa. Ide ini bertransformasi melalui perdagangan baru dan hukum hak kekayaan intelektual, dan sekarang diabadikan dalam kesepakatan pertanian dalam sidang WTO sebagai *Geographical Indication* (GI). Namun juga, seperti yang akan kita lihat, dasar untuk *traceability* global yang didasarkan pada karakteristik produk tertentu pada ekologi dan budaya. Baru-baru ini, gerakan organik menciptakan berbagai organisasi sertifikasi dan label untuk membedakan dan menjamin produk mereka sesuai dengan berbagai kriteria badan sertifikasi.

Aturan Sertifikasi dan lembaga sertifikasi telah berkembang, melemahkan tujuan untuk menginformasikan dan melindungi konsumen dan produsen. Pemerintah berperan banyak pada masalah ini : mereka memfasilitasi sistem traceability[205] dan "Standarisasi" peraturan pemerintah untuk standar pribadi. Uni Eropa meningkatkan

[205] Sebagai contoh, di Ontario, lihat http://www.ontraceagrifood.com. deconstructionist bisa menulis panjang lebar tentang hubungan baru antara pemerintah dan swasta, yang pergi jauh lebih dalam daripada kemitraan.

penelitian yang berpotensi bisa meletakkan dasar bagi peraturan antar-pemerintah melalui GI di WTO, berdasarkan 'model pertanian Eropa ".[206] Namun, drama utama adalah terjadinya pertarungan antara modal swasta dan gerakan sosial (Busch et al 2005).[207]

Standar yang distandarkan: keseragaman varietas dari mana saja dan dimana-mana.

Supermarket berkembang dan mendominasi sektor Agrifood pada tahun 1990-an dan mereka mengepung pasar. Pada saat itu terjadi juga ledakan perdagangan buah-buahan segar, sayuran dan ikan di pasar dunia, yang dimulai sebagai akibat langsung dari debat politik tahun 1980-an. 'Program Penyesuaian struktural' yang diberlakukan oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) pada pemerintah yang berhutang salah satu point nya adalah harus menaikkan ekspor disertakan dalam setiap cara yang memungkinkan. Banyak pemerintah di dunia selatan mengembangkan lahan dan mendorong tenaga

---

[206] Uni Eropa Para sponsor proyek SINER GI untuk 'memaksimalkan kontribusi GI sebagai driver untuk pembangunan pedesaan dan kepercayaan konsumen. Hal ini diarahkan kepada anggota baru dan calon, tetapi juga untuk mendukung legitimasi mereka dalam rangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) negosiasi (lihat http://www.origin-food.org/2005/base.php?cat=20).

[207] Menghadapi keputusan perdagangan yang tidak menguntungkan dalam perselisihan tentang keamanan pangan dan kualitas peraturan, pada saat ketika moratorium terhadap tanaman transgenik diizinkan untuk berakhir, Uni Eropa mengumumkan maksud untuk meminta traceability. Apakah ini adalah sebuah 'pengekangan terhadap perdagangan' sebagai pemerintah lainnya berpendapat, kebuntuan di WTO itu berarti permainan pindah ke supermarket. Seperti ketakutan akan keselamatan dari industri makanan, termasuk ternak dan tanaman monocultural lapangan, datang untuk memengaruhi supermarket dari pelanggan, mereka bergerak cepat untuk mengimplementasikan teknologi untuk pelacakan dan audit di sepanjang rantai pasokan.

kerja pada ekspor 'tanaman non-tradisional' (bandingkan dengan produksi massa tanaman tropis "tradisional" , seperti pisang, kopi dan tebu, yang didirikan pada abad sebelumnya). Sebagai hasilnya promosi ekspor hadir untuk membentuk 'ketahanan pangan' dalam tujuan hirarki nasional (Friedmann 2004). buah-buahan segar, sayuran dan ikan menjadi bidang baru akumulasi global. Perjanjian perdagangan pada 1990-an memanfaatkan supermarket yang sudah membuka saluran antara konsumen dan produsen buah-buahan, sayuran dan ikan.

Supermarket menciptakan jaringan yang sangat terkendali dari kontraktor dan subkontraktor di seluruh dunia (Burch dan Lawrence 2007). Mereka bisa dikendalikan sehingga menciptakan 'rantai pasokan transnasional'. Tanaman non-tradisional yang merupakan sebagian besar dari rantai pasokan transnasional sekarang dibedakan dari tanaman yang diproduksi secara massal dan yang tidak, seperti jagung dan kedelai, yang anehnya (dan tidak secara teoritis) kemudian disebut [208] "komoditas" . Kedelai adalah bahan utama yang membentuk berbagai macam makanan olahan (Pollan 2006), tetapi kedelai juga akan dibedakan, dikendalikan dan dipantau berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan norma-norma, atas nama 'pelestarian identitas'.

Di sisi permintaan, pendapatan menjadi lebih tidak merata di semua negara dimulai pada tahun 1980-an, yang membuka jalan bagi pasar makanan "berkualitas". Differensiasi makanan ke dalam sistem kaya dan miskin pal-

[208] Ini sebagian berasal dari kebutuhan untuk memisahkan tanaman rekayasa genetika, terutama untuk pasar Eropa. Namun, penggunaan biji-bijian sebagai bahan baku untuk diproses kompleks banyak barang jadi, termasuk plastik, cat dan sekarang bahan bakar, yang membutuhkan varietas semakin spesifik. Pada keganjilan dari penggunaan ini, lihat Bernstein dan Campling (2006a).

ing jelas dicontohkan oleh pertumbuhan yang cepat dari dua jenis baru dari supermarket, yaitu *Whole Foods dan Wal-Mart* (Friedmann 2005). Supermarket lain memperkenalkan 'merek mereka sendiri' terhadap barang yang mereka beli dari produsen tak bermerek (Burch dan Lawrence 2007). Pengertian kualitas didefinisikan sebagai makanan segar (dan baru disiapkan), termasuk pengenalan produk eksotis dan musiman, yang dijual dengan harga lebih tinggi daripada "makanan tahan lama" dari perusahaan manufaktur, yang mendominasi produk ini adalah jagung dan bahan kedelai, 2 jenis ini ditata ulang untuk menciptakan berbagai bentuk seperti saripati, tekstur, rasa dan protein, dan sekarang anehnya disebut 'komoditas' yang berbeda dengan makanan 'berkualitas' atau 'niche'. Selandia Baru adalah pelopor dalam pergeseran produk-produk "niche". Yang pertama untuk menghilangkan perlindungan pertanian dari petaninya (sesuatu yang masih dipertahankan dalam negara-negara ekspor "kaya" seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa). Pemerintahan Selandia Baru meluncurkan sebuah pergeseran ekspor dari 'komoditas' (susu dan daging) ke "produk-produk berkualitas" kesuksesan awal untuk mempromosikan buah yang hampir tidak dikenal di Barat, yaitu' kiwi ', diikuti dengan anggur dan sejenisnya. ikan segar dan ekspor makanan laut menjadi penting, seperti juga agrikultur dan perikanan intensif untuk memasok permintaan internasional. Pendapatan menjadi lebih tidak merata di seluruh dunia, kelompok besar dari hak istimewa di daerah selatan memberikan kesempatan investasi baru bagi masuknya supermarket, yang kemudian memperluas operasi ritel mereka ke titik di mana supermarket menjual produk segar di dunia selatan lebih besar secara daripada kuantitas yang mereka ekspor ke Negara-negara di utara. Perbedaan antara ekspor berkualitas tinggi dan produk pertanian kualitas rendah dalam negeri berkurang, supermarket semakin tertarik pada

penggabungan standar domestik dan standar ekspor (Reardon et al 2005, 47-56).

Rantai pasokan transnasional ini mengubah hubungan antara Perusahaan Agrifood dan konsumen. Dalam konteks di mana antar-negara membatasi ruang lingkup bagi pemerintah untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap kualitas makanan, supermarket berada di garis depan untuk menjamin keselamatan dan kualitas. Seperti rantai Agrifood yang menjadi komoditas, yang dalam bahasa analisis rantai komoditas disebut 'buyers-driven'-pembeli adalah raja (Gereffi dan Korzeniewicz 1994; Busch dan Bain 2004), masalah kepercayaan (Callon et al 2002;. Wilkinson 2005) diatasi langsung di supermarket terhadap ketakutan akan keamanan pangan pada 1990-an yang diperburuk oleh kekhawatiran konsumen dan kekhawatiran warga tentang bahaya makanan hasil tanaman rekayasa genetik. Pertanyaan yang sifatnya Ethical (diekspresikan melalui fair trade) seperti lingkungan dan masalah-masalah kesehatan (misalnya, organik) muncul ke permukaan. Supermarket mulai mengundang pelanggan mereka - baik dari Utara dan Selatan – agar percaya dengan otoritas mereka untuk menentukan jaminan keamanan dan kualitas (Dixon 2007). Beberapa melakukan strategi ini melalui label mereka sendiri, seperti di Kanada, raksasa Loblaw yang disebut sebagai 'President's memulai barisan rantai supermarket dengan slogan "segar dan berbudaya". Untuk makanan segar dan minimal makanan olahan, yang kurang bisa dibedakan oleh merek-merek supermarket, kontrol kualitas harus dibentuk di seluruh jaringan kontraktor dan subkontraktor yang mencakup seluruh dunia. Relasi kuasanya mengalami perubahan dari kantor perusahaan pertanian di seluruh dunia, supermarket berpindah ke mengantisipasi dan memenuhi tuntutan konsumen (Barling dan Lang 2005, 43).

Standarisasi yang diterapkan di kelembagaan pemerintah gagal menjaga rantai pasokan Agrifood transnasional (Busch dan Bain 2004; Barling dan Lang 2005). Standarisasi, hari ini seperti di masa lalu, membawa keseragaman produk dan memfasilitasi pengiriman dan menggunakan berbagai budaya, geografi dan praktek manusia (Tanaka dan Busch 2003, 30, 32). Basis genetik alpukat saat ini, seperti pisang pada abad yang lalu, mulai menyempit. Perbedaan dari masa lalu adalah bahwa tidak ada negara bangsa dan budaya pangan mendominasi, seperti tujuan impor Britania (dan lebih luas Eropa) pada abad kesembilan belas. Dengan kebutuhan standar antar-pemerintah, dan jalan buntu antara kekuasaan pemerintah- tentang apa yang mereka harus lakukan,[209] supermarket lah yang diperlukan untuk menemukan cara-cara sendiri untuk mengendalikan konsumen yang jaraknya jauh.

Hal ini menyebabkan meningkatnya upaya untuk pengawasan aktivitas di lokasi yang jauh melalui standardisasi produk dan proses (Konefal et al 2007, 295). Perubahan-perubahan jaringan sangat dikendalikan oleh subkontraktor yang menjangkau seluruh dunia dan perlu dipantau apakah mereka patuh terhadap protocol yang semakin spesifik dan seragam. Dan dalam konteks saat ini kualitas menjadi hal yang di pertentangkan - dari rekayasa genetik hingga pestisida - penekanan ke sistem pertanian diperdalam, dengan memperhatikan berbagai kriteria yang lebih luas yang berhubungan dengan produksi dan hasilnya. Prosedur teknis untuk menciptakan praktik standar oleh

[209] Kemungkinan untuk standar antar-pemerintah diperkenalkan pada tahun 1995 dengan otorisasi dari Codex Alimentarius Commission sebagai wasit pembatasan diizinkan pada perdagangan, oleh Agreement on Agriculture of the World Trade Organization. Ini terdiri dari 'Sanitary dan Phyto-Sanitary (SPS) tindakan, salah satu dari beberapa diizinkan "Technical Barriers to Trade"(TBT).

produsen dalam beberapa lokasi yang jaraknya jauh merupakan tantangan berat.

"Peraturan pasar dari rangkaian suplai Agrifood" (Konefal et al 2007,. 284) bukanlah pekerjaan mudah untuk dilakukan.[210] Hal ini membutuhkan koordinasi perusahaan Agrifood dengan pasar utama, yang berbeda secara kualitas (UE vs AS dalam daging, mengenai standar organik). Hal ini juga memerlukan hubungan baru untuk kebijakan antar-pemerintah (McMichael dan Friedmann 2007). Ini berada di luar cakupan bab ini, tetapi kami mencatat mereka sebagai konteks untuk lembaga swasta awal dan paling komprehensif untuk merancang dan mengimplementasikan teknologi audit ke pertanian dan ekosistem di seluruh dunia, yang berbasis di Eropa.

Pada tahun 1997, Euro Retailer Producer Working Group Good Agricultural (EUREPGAP) - konsorsium pengecer swasta, layanan makanan, perusahaan manufaktur dan industri Agrifood lainnya, didirikan untuk mengembangkan standar untuk memfasilitasi produk dari berbagai macam daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah standar umum dari buah,ikan dan bunga, sebagai layanan pada semua anggotanya. Supermarket akan menggunakan merek mereka sendiri, EUREPGAP hany berfungsi sebagai organisasi intra-industri. Dengan konsentrasi penuh sektor ritel di Eropa (Harvey 2007), sejumlah kecil rangkaian ritel mengikuti semua standar tunggal dan mendominasi pasar antar benua. Hal ini dengan cepat melatih 'auditor' untuk memantau praktek pertanian di seluruh dunia, untuk memenuhi syarat pembelian dan

[210] Peraturan Swasta oleh modal Agrifood tampaknya akan muncul sebagai proyek dalam konteks disintegrasi rezim makanan dari 1947-1973, namun bentuknya hanya secara bertahap muncul dari kedua reorganisasi kapitalis dan politik antar-negara (Friedmann 1993, 2005).

penjualan di pasar Eropa. Standar EUREPGAP bertemu atau melebihi standar Uni Eropa, mereka bisa menjamin 'mutu' di pasar lainnya juga. Petani seluruh dunia diundang untuk berinvestasi dalam praktek, baik agronomi dan dokumenter, untuk memenuhi standar yang lebih tinggi dengan harapan menerima harga yang lebih tinggi.

EUREPGAP baru-baru ini dilahirkan kembali sebagai GLOBALGAP (GG), dan dengan itu memperdalam penekanan pada teknis keseragaman standar. Pada tahun 2004, di situs EUREPGAP menyatakan:

> Dalam menanggapi permintaan konsumen, pengecer dan pemasok global, mereka telah menciptakan dan menerapkan serangkaian sektor standar sertifikasi pertanian tertentu. Tujuannya adalah untuk menjamin integritas, transparansi dan harmonisasi standar pertanian global. Ini termasuk persyaratan untuk keamanan makanan yang dihasilkan yang memperhatikan isu-isu dari pekerja kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, isu lingkungan dan hewan. (Eurep, dikutip dalam Friedmann 2005, 255).

Pada tahun 2007, GG adalah 'badan sektor swasta yang menetapkan standar sukarela untuk sertifikasi produk pertanian di seluruh dunia. . . terutama dirancang untuk meyakinkan konsumen.[211] GG telah menciptakan sebuah sistem untuk melembagakan standar transnasional yang mengatur visi 'Good Agricultural practices'. Tujuannya adalah untuk menetapkan SATU standarisasi . . dengan aplikasi produk yang berbeda mampu diterapkan untuk seluruh pertanian global. GG mengesahkan produk dari input pertanian tapi tidak ditingkat petaninya, tetapi hanya sebagai "label bisnis". GG 'terdiri dari serangkaian dokumen normatif. . . Peraturan umum,. . . Control Points

[211] lihat website GLOBALGAP (http://www.globalgap.org).

dan Pemenuhan Kriteria, yang digunakan oleh badan independen dan sertifikasi terakreditasi [TPC] di lebih dari 80 negara. Untuk mengatasi masalah beberapa skema sertifikasi, masing-masing membutuhkan audit, GG mendorong "skema jaminan pertanian pada tingkat nasional atau regional" untuk "benchmark" sehingga mereka dapat diakui oleh GG.[212] Dengan demikian, pemerintah Meksiko, yang mengacu pada peraturan nasional untuk label *Meksiko Calidad suprema* dapat mengajukan ke GG, sehingga dapat akreditasi produk dan diakui oleh GG. Proses pelabelan GLOBALGAP dapat dibandingkanan dengan sistem penyaringan, yang memenuhi syarat dan keselarasan standar yang berbeda di seluruh dunia. Pembandingan dilakukan dengan baik dari "review anggota" dan "penilaian saksi independen".[213]

Beragam Standar? Sertifikasi makanan , Sertifikasi tingkat Wilayah

Kemajuan GLOBALGAP menemukan kesamaan dengan cita-cita global dan inovasi organisasi nasional, yaitu proyek luar biasa yang dipelopori oleh *Slow Food* untuk "meningkatkan kualitas" dari tanaman spesifik secara regional, ternak dan makanan siap saji, dan untuk membantu dalam membuat agar manfaat makanan tersebut diketahui pelanggan yang dekat maupun pelanggan yang jauh. Setiap skema sertifikasi menghadapi masalah kompleks dan perubahan politik untuk mendefinisikan 'kualitas' dan asal-usul serta jaminan proses produksi (Campbell dan LeHeron 2007). Namun Slow Food

[212] Lihat What is GLOBALGAP (http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=2).

[213] Lihat GLOBALGAP - Benchmarking (http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart = 44 & idcat = 29 & lang = 1 & client = 1).

menantang standardisasi itu sendiri secara eksplisit akan menimbulkan pertentangan yang akan terjadi di skala global. Untuk melakukannya, dibutuhkan proyek ambisius untuk menggantikan 'fetisisme ganda' di mana 'pengetahuan' juga 'dijual' di samping komoditi itu sendiri (Freidberg 2003, dikutip dalam Bernstein dan Campling 2006b, 430). "Pengetahuan" ini disampaikan pada label supermarket yang telah berevolusi menjadi bentuk literal yang disebut 'supermarket pastoral', yang memberikan kesan yang sangat berbeda dari apa yang penyidik temukan di lokasi produksi aktual (Pollan 2006). Slow Food memenuhi syarat tidak hanya dalam produk atau komoditi saja, namun konteks budaya dan ekologi.

Kawasan dunia didefinisikan sebagai bioregions budaya yang unik, layak diapresiasi, didukung, dan membutuhkan bantuan timbal balik dalam rangka mengembalikan kehilangan keanekaragaman hayati dan budaya, yang dilihat sebagai ancaman terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Hasil produksi dari banyak kawasan ini menjadi komoditas untuk bertahan hidup, tetapi upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan karakteristik mereka, tetapi untuk menjamin keunikan tanaman yang kadang hanya bisa ditanam di kawasan tertentu saja. Presidium[214] produk ini dijual pada jarak jauh yaitu untuk ekspor dalam term internasional, namun berbeda dengan tanaman ekspor klasik seperti kopi, asal-usulnya terletak pada agronomi dan budaya makanan lokal, dan yang terakhir merupakan objek regulation.[215]

---

[214] Presidia adalah 'kerja tangan' The Ark of Taste dari Slow Food Foundation for Biodiversity (lihat catatan kaki 19). Presidia adalah proyek-proyek kecil yang membantu kelompok produsen tradisionil untuk 'membangun kualitas dan keaslian standar untuk produk mereka. . . menstabilkan teknik produksi, untuk menetapkan standar.

[215] Apakah ini dapat berhasil, ia menghindari beberapa masalah yang dianalisis oleh Bernstein dan Campling (2006b).

Proyek ini didasarkan pada pengalaman berbeda di supermarket-supermarket Eropa yang melahirkan GG, *terroir* dan Controlled Denomination of origin (DOC). Hal ini berangkat dari model DOC dalam dua cara. Pertama, tidak membekukan teknik produksi. Slow Food tumbuh dari eksperimen awal Carlo Petrini dan rekan-rekannya untuk 'membangun. . . wilayah 'di wilayah Langhe, Italia, di mana kota Bra, markas Slow Food terletak.[216] ini termasuk usaha membawa produsen anggur, restoran dan wartawan bersama-sama untuk merencanakan pembaruan komersial berdasarkan kualitas makanan. Rencana tersebut dilaksanakan melalui katalog produk, sejarah lisan individu dan situs produksi, seperti kebun anggur dan gudang, menekankan kekhasan masing-masing dalam kekhasan daerah, dan -paling inovatif- pendidikan petani, vintners, dan lain-lain berdasarkan kombinasi pengetahuan formal, misalnya, dari peternak hewan, dan pengetahuan praktis petani, pekerja tangan dan juru masak.

Kedua, kawasan ini, yang berkembang di Italia dan kemudian merembet ke belahan dunia lain, jarang sesuai dengan yurisdiksi politik yang ada di Negara tersebut. "Setiap produk tunggal memiliki batas dan bentuk ruang sendiri, dan mereka secara bersamaan membentuk sebuah mosaik geografis dengan beberapa persimpangan '(Petrini 2001, 40). DOC (dan di Perancis, Appellation d'Origine Controllée) telah yakini oleh negara-negara nasional sebagai bagian dari warisan proteksionis abad kesembilan

[216] Asal dari gerakan Slow Food di Italia pada akhir 1970-an. Sekelompok muda radikal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran produk lokal, menarik perhatian apresiasi makanan dan anggur - budaya menghubungkan dan keahlian memasak untuk masalah tanah dan tenaga kerja, produksi dan konsumsi. Arcigola, pendahulu Slow Food didirikan di Bra, Italia pada 1986. gerakan International Slow Food diresmikan pada tahun 1989 dengan penandatanganan Manifesto Slow Food (Petrini 2001).

belas. Kekayaan intelektual telah menjadi kompleks ketika denominasi diklaim oleh mereka yang di luar negeri, misalnya, melalui varietas transplantasi tanaman. Untuk alasan ini, dan bagi orang lain ini adalah usaha membendung perselisihan yang masih belum terselesaikan di WTO, Uni Eropa mempromosikan pelaksanaan *Geographical Indications* (GI), yang juga tampaknya bagi pemerintah dan produsen di negara-negara lain, ini cukup menjanjikan. Meskipun demikian apa pun yang terjadi dengan GI, Presidia dan penjamin mereka dalam *Slow Food Foundation for biodiversity*, yang bekerja secara berbeda, setidaknya sejauh ini, belajar dari keberhasilan keju *Reggiano Parmigiano* - yang pada 1980-an datang untuk dijual dengan harga tinggi di seluruh dunia justru karena bisa menjamin protokol produksi dari jenis sapi hingga padang rumput untuk mempercepat proses menciptakan cara-cara membentuk jaminan kualitas untuk produk tertentu dan membangun jaringan apresiasi pelanggan, baik lokal dan maupun konsumen yang jauh.

Dalam pandangan ini, varietas tanaman khas daerah dan perkembangbiakkan ternak, serta makanan tradisional, hanya bisa bertahan hidup dengan mencari pelanggan. Menghargai dan memberi pengetahuan pada pelanggan pada gilirannya, tidak hanya memerlukan "sifat pendidikan" –sesuatu yang dilakukan Slow Food sebelum memperhatikan tanaman, ternak dan keragaman makanan di skala dunia-. Ini juga membutuhkan definisi kualitas, distribusi kepada pelanggan dan jaminan untuk mempertahankan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini pada gilirannya mengharuskan petani dan pekerja yang membuat makanan olahan dihargai lewat penghargaan sosial dan uang, dan didorong untuk berinovasi. Semua persyaratan-persyaratan ini ditujukan dalam Manifesto Ark[217]

[217] The Ark of Taste merupakan proyek dari Slow Food Foundation

pada tahun 1997, dan dibentuk melalui Presidium, organisasi diciptakan dan dikoordinir oleh Slow Food Foundation for Biodiversity (SFBD) yang didirikan pada tahun 1999.

Sejak tahun 2003, Presidia diciptakan atas inisiatif kelompok-kelompok lokal (tidak hanya produsen) untuk menentukan kriteria untuk produk-produk berkualitas yang spesifik 'dengan potensi komersial "(Petrini 2001, 92). Setiap Presidia membuatkan standar kualitas sebuah produk tertentu, baik berbagai tanaman atau hewan, atau produk artisanal yang terbuat dari bahan-bahan itu, atau keduanya; membuat standar kualitas bagi sebuah kombinasi spesifik agar dapat mendatangkan orang-orang yang dapat memproduksi, dan menggunakan teknik-teknik yang spesifik. Berbeda dengan GLOBALGAP, Presidia harus memberikan cara menaikkan kualitas pada sebuah produk yang unik seperti mendorong inovasi produsen lokal (dalam parameter dinegosiasikan), mendorong mereka agar berbagi pengetahuan sesama mereka melalui pertemuan-pertemuan internasional Presidia (misalnya, oleh para pembuat keju kambing di daerah yang berbeda), dan membedah konsep di luar *'terroir'* untuk memasukkan tanaman dan makanan yang diperkenalkan kepada ekosistem baru (misalnya, keju yang belum dipasteurisasi di Amerika Serikat, yang termasuk ke Presidium tunggal).

Tentu saja, pasar tidak mudah dibatasi, sehingga SFBD bekerja dengan ketegangan dalam "rangkaian pendek pasokan makanan". Fitur standarisasi kualitas yang kedua adalah berapa banyak pengetahuan tentang produk yang tertanam di dalamnya bukan jarak geografis atau

---

for Biodiversity ke dalam katalog 'Forgotten flavours' - spesies, keturunan dan praktek artisanal untuk membantu menyelamatkan mereka dari kepunahan (lihat http:// www.slowfoodfoundation-.com/eng/arca/ lista.lasso).

jumlah hubungan dalam rantai pasokan (Marsden et al 2000b). Dengan menekankan pengetahuan, mencari cara untuk memasukkan produk daerah tertentu, dan menjamin bahwa standar kualitas telah diikuti, SFBD melakukan beberapa telaah tentang standardisasi yang ditemukan dalam pengiriman barang dari tanaman "organik" jarak jauh (Guthman 2004; Raynolds 2004) . Fonte berpendapat bahwa "yang sebenarnya penting dalam sistem Agrifood lokal adalah penguatan jaringan makanan dalam konteks teritorial. . . Wilayah (kedekatan geografis) atau yang bisa mempereratnya, seperti kedekatan sejarah, yaitu memantapkan nilai-nilai bersama, norma-norma, peraturan dan dalam kegiatan ekonomi yang terkoordinasi (sosio-ekonomi dekat) (2006, 3) .

Untuk tujuan ini, SFBD membuka diri untuk menerima tawaran dari kelompok berbasis territorial, semuanya bisa mengajukan, tidak terbatas kepada produsen saja, untuk menciptakan sebuah Presidia agar tanaman jenis tertentu, varietas ternak dan makanan tradisional tidak mengalami kepunahan. *The Ark of Taste* menjadi database untuk catalog makanan berisiko di seluruh dunia. Presidia membantu produsen dengan membawa mereka bersama-sama, mendokumentasikan sejarah mereka, menetapkan teknik produksi, kadang-kadang membantu untuk memperbaiki kualitas produksi, pengembangan kapasitas dan bahkan prasarana seperti rumah pertanian atau Rumah Pemotongan Hewan. Presidia membentuk jaringan yang dikoordinasikan oleh SFBD.

Dengan bekerja secara Transnasional, dan tidak membiarkan *snail logo* dipakai di Presidia, SFBD berusaha untuk mengatasi *'label fatigue'* yang dialami oleh konsumen dunia dalam mengembangkan sertifikasi (Goodman 2003, 10). Pada saat yang sama SFBD memberikan perhatian pada "cita rasa terdidik" untuk menambahkan kepuasan kepada para pemakan/peminum ini hingga menarik

mereka untuk peduli, misalnya, label "fair trade" dan "corporate imitators"; yaitu usaha Slow Food untuk melakukan 'pendidikan' yang dalam *terroir*, dan ini memang benar-benar dibutuhkan, mereka berusaha untuk bergerak di luar pengetahuan 'voyeuristik' yang dicanangkan untuk menarik 'konsumen etis' dan testimonial mereka (Goodman 2004, 900).

Sebuah langkah besar dalam skema perubahan ini merupakan kesepakatan yang ditandatangani antara Slow Food dan Coop, sebagai supermarket terbesar di Italia, untuk memasarkan produk Presidium. Coop mencoba untuk tidak hanya menjalin hubungan dekat dengan produsen. Hal ini dimediasi oleh Presidia. Slow Food, sama dengan GG,yang tidak mengizinkan logo untuk digunakan pada produk Presidia, namun dalam hal ini menjadi latar belakang mendukung sertifikasi tanaman, peternakan, sistem pertanian, teknik pemrosesan dan karena itu, diharapkan, terjadi budaya makanan yang kompleks.

Perjanjian antara Slow Food dan Coop Italia membantu merangsang permintaan produk tetapi Slow Food menjamin bahwa ini akan terjadi dengan cepat dan dalam batas-batas yang layak di skala kecil yaitu produksi artisanal, sehingga ini menjaga mereka dari tantangan-tantangan khusus yang sering berusaha untuk "mempertimbangkan" produksi "niche" dan pemasarannya (Goodman 2003). Coop Italia, untuk bagian ini, mendidik konsumen, melatih staf dan membuat event uji coba untuk membantu menumbuhkan kesadaran perusahaan untuk menerapkan aturan di Presidia. Mereka juga menarik konsumen hibrida yang membeli makanan khas, makanan tradisional di samping pembelian rutin mereka. Perjanjian ini menawarkan kesempatan kepada pengecer makanan besar agar stok produk local berurusan dengan produsen kecil dan, tren dominan terhadap ekspansi global supermarket dan restrukturisasi mereka dalam rantai pasokan,

pelokalan pasokan dan saluran distribusi. Hal ini menawarkan kemungkinan 'perubahan logika dari perusahaan ritel besar, jauh dari pasar massal, terhadap pasar "niche" universal, yang dibatasi secara teritorial' (Fonte 2006, 16).

Bisa atau tidaknya Slow Food memperpanjang strategi ini dalam pemasaran ke seluruh dunia, Slow Food menawarkan sebuah contoh bagaimana sebuah pasar "niche" muncul dan dikoordinasikan. SFBD sedang mencoba untuk melakukan hal ini dengan memperluas visi strategis dan jaringan ke Selatan, sebagai tempat untuk sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia. Hanya empat tahun sejak Presidium diciptakan, 41 Presidia ada di 21 di negara-negara Selatan (Slow Food Foundation 2007). Pada bulan November 2007 Slow Food menyelenggarakan kongres internasional di luar Eropa untuk pertama kalinya di Puebla, Meksiko (Slow Food 2007). Seperti yang telah terjadi di Italia, isu keanekaragaman hayati, makanan, dan hak asasi petani dari Utara dan Selatan muncul bersama pada sebuah panel (V Slow Food International Congress Agenda). Vandana Shiva dan Carlo Petrini – yang sebelumnya telah bergabung teoretikus lain dan aktivis dari seluruh dunia- mengeluarkan Manifesto bersama tentang Masa Depan Pangan, dan setahun setelah itu mereka melakukan pertemuan international dengan komunitas masyarakat pangan yang bernama Terra Madre (' mother earth '), dan membawa produsen dari masyarakat adat dan lainnya bersama-sama untuk saling tukar dan saling bercerita tentang pengalaman mereka.[218]

Dua Strategi di Dataran Tinggi Michoacan, Meksiko

Di dataran tinggi Meksiko tengah, label Bioregional dirancang untuk mendukung pembangunan kembali

[218] Lihat http://www.slowfoodfoundation.com.

pertanian adat yang terancam oleh konversi untuk ekspor pertanian.[219] Label Bioregional telah muncul dalam konteks pelaksanaan standar *phytosanitary* dan *Good Agricultural Practices* (GAP), yang cepat dan sangat mengubah sistem pertanian terhadap keseragaman ekspor. Reorganisasi pertanian untuk ekspor alpukat telah meminggirkan banyak varietas dalam sejarah pertanian mereka, usaha ini mengandaikan hanya ada satu standar, dan baik dari segi agronomi dan hubungan sosial produksi untuk semua tanaman termasuk jagung. Ekspor produksi alpukat, seabgai tanaman yang tidak membahayakan air dan sumber daya hutan, memperdalam ancaman impor jagung untuk produksi subsisten bagi masyarakat adat di kawasan itu.

Alpokat yang Meng-Global

Sektor alpukat Michoacán telah berkembang secara dinamis sejak 1970-an. Mereka menanam Varietas alpokat Hass yang dikembangkan di California yang kemudian dibawa ke Mexico pusat, karena iklim diwilayah ini cocok untuk penanaman jenis ini dan akhirnya komoditas ini menggantikan varietas asli yang ada disana (Stanford 2002).[220] Di tahun 1970, kebijakan pangan pemerintah Meksiko tidak bisa mengimbangi peristiwa yang bergerak cepat yang berhubungan dengan minyak dan krisis pangan. Booming minyak Meksiko meningkatkan pendapatan dan permintaan untuk makanan, tetapi upaya pemerintah untuk memerangi inflasi dengan menjaga harga pangan tetap

[219] Bagian ini melaporkan hasil awal dari penelitian lapangan yang dilakukan dari bulan Februari sampai Juni 2007.

[220] Untuk waktu yang lama tanaman jenis Criollo di budidayakan di Meksiko. Tetapi kemudian digantikan oleh Jenis Hass adalah jenis unggulan dalam segi produksi dan pemasaran, karena jenis Hass sangat transportability (bisa dikirim lewat alat transportasi ke tempat yang jauh) dan umur penyimpanan lebih lama, ini dimungkinkan karena kulit buah ini lebih tebal.

rendah mendorong para petani yang berorientasi komersil untuk menjauh dari tanaman pangan menuju tanaman dengan nilai tinggi (Scherr 1985, 13-14). Mereka yang memiliki sumber daya mencukupi bergeser untuk memproduksi buah-buahan, sayuran dan ternak. Pada 1980-an, setelah kegagalan Meksiko dalam menangani "krisis hutang" berakibat terhadap terjadinya penurunan drastis daya beli dalam negeri, para petani mulai mencari peluang ekspor. alpukat Meksiko mencapai Eropa, Jepang dan Kanada, tetapi diblokir dari pasar AS karena larangan *phytosanitary* di tempat itu sejak 1914.

Akses ke AS dan kemudian tuntutan pasar dunia menjadikan alpukat sebagai komoditi impor utama pada tahun 1980, dilakukannya kampanye *phytosanitary* mengubah kualitas produksi dan kekacauan pasar nasional ke peningkatan kualitas dan produksi alpukat di dunia (Stanford 2002).[221] Peraturan tentang *phytosanitary* ini berlaku untuk penyakit tanaman, pengendalian hama dan penggunaan pestisida yang diawasi oleh dewan kesehatan tanaman kota, dengan persetujuan inpektur Departemen Pertanian US.[222] Para insinyur yang bertanggung jawab atas kampanye *phytosanitary* menjelaskan bahwa itu dimaksudkan untuk memperbaiki, karena tidak adanya peraturan yang lengkap untuk alpukat, dengan kata lain, terjadi 'Kekacauan Produksi'

> Harga menjadi tak stabil karena produsen tidak memodali kebun mereka yang kemudian dijual murah, jadi situasi ini diprovokasi ... oleh standarisasi - bahwa ada undang-undang. Dan juga. . . panen benar-benar gagal. Mereka panen dengan batang pohon dan buah yang

[221] Fieldwork 2007.

[222] Wawancara, Dirección General de Agoalimentaria Inocuidad, Acuícola y Pesquera(General Direction of Food Safety, Fisheries and Aquaculture) 9 April 2007.

> jatuh di tanah dan dalam waktu delapan hari akan menjadi busuk dan benar-benar hitam. Jadi, semua ini menyebabkan pembuatan standar. Standar memberi tahu cara panen, cara transportasi dan akhirnya kualitas akan meningkat, standarisasi mengajarkan bagaimana menyimpannya dan juga mencegahnya dari hama. Jadi standar berbicara kepada seluruh proses: produksi, pengepakan dan pengiriman.[223]

GAP (cara-cara bertani yang baik) juga diperlukan di ladang. Pada tahun 1999 Sekretaris Ekonomi Mexico, Menteri Pertanian dan Bancomext (sebuah bank nasional yang bertujuan untuk mempromosikan bisnis Meksiko di luar negeri) membuat *Meksiko Calidad suprema* (Mexico supreme Quality) – sebuah label yang bertugas untuk meningktkan kualitas agar lebih tinggi, sehingga penjualnnya pun yang lebih bagus (seperti Wal-Mart) dank e luar negeri. Pada tahun 2006, label ini mengacu ke GLOBAL / EUREPGAP, yaitu standar pemerintah untuk penjual eceran. Sekarang sertifikasi ini tidak hanya berlaku di pengepakan, tetapi juga di proses penanamannya. Ada 11.000 Ha alpukat sedang dalam proses dan harus disertifikasi hingga akhir 2007. Sektor alpukat secara universal dipandang sebagai hal bagus oleh pemerintah Meksiko yang bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai ekspor agar tinggi - untuk organisasi produsen alpukat, pemberantasan hama dan penyakit, penerapan GAP dan Good Practices, peningkatan harga dan volume exports.[224] inilah keberhasilan dari "green gold", orang-orang berusaha matimatian untuk mencari nafkah disini mengakibatkan menjamurnya pembelian tanah – satu hektar di sini, dua atau tiga hektar di sana - bahkan terjadi pembelian terhadap

[223] Wawancara, MA, Uruapan, 14 Maret 2007.
[224] Wawancara, RG Uruapan, 4 Mei 2007

tanah komunal (ejidal), yang dengan segera setelah itu disahkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1992. Hutan menjadi gundul untuk menanam pohon alpukat. Mereka ditanam di tempat lain, bahkan di tanah yang tidak dapat mendukung produksi alpukat untuk iklim atau alasan ekologi.[225]

Ini merupakan sukses besar walaupun menciptakan bahaya sosial-ekonomi dan ekologi untuk orang lain. Ketergantungan pada satu varietas, tidak hanya di Michoacán tetapi melalui semua daerah penanaman alpukat di dunia, meningkatkan kerentanan terhadap wabah dan penyakit pada tumbuhan yang bisa menyebar ke seluruh wilayah.[226] Timbul kesadaran karena terjadi perubahan iklim regional yang mengikuti penanaman alpukat secara luas ini. Penebangan hutan pinus untuk produksi alpukat mengakibatkan penurunan debit air tanah – dibandingkan dengan dulu sewaktu masih hutan pinus-.[227] Tanah dan air tercemar oleh bahan kimia pertanian yang diizinkan oleh GAP, yang berargument tentang kesehatan konsumen – dan orientasi eksport- tetapi menyebabkan kerentanan baru di ekologi.

Ancaman konvergensi pada subsistensi masyarakat adat

Di dataran tinggi barat Michoacan ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Meseta Purepecha yang tidak

---

[225] Suatu hari ketika mengunjungi sebuah ejido di Tierra Caliente yang memproduksi blackberry, penumbuh menjelaskan bagaimana tetangga di seberang jalan (bukan bagian dari ejido itu) telah mencoba membudidayakan alpukat meskipun lingkungan tidak tepat dan kondisi tanah. tanah itu dangkal dan tidak bisa mendukung sistem akar yang mendalam. Jadi dia membeli tanah atas dan ditanam kebun buah alpukat pula. Akarnya sekarang telah mencapai batas mereka dan pemiliknya berusaha untuk menjual kebun itu sebelum menjadi terlalu jelas tak terelakkan.

[226] Wawancara, Uruapan SMA, 10 April 2007

[227] Wawancara, Morelia SHD, 4 Juni 2007.

menginginkan pertanian komersial. Penduduk Meseta merupakan masyarakat adat Purepecha yang hidup dalam komunitas agraria di seluruh wilayah, kebanyakan di ketinggian lebih dari 2000 meter yang udaranya tidak cocok untuk menanam alpukat.[228] Dikarenakan adanya teritorial pegunungan api di Michoacan yang sangat membedakan ekosistem di daerah terdekatnya, tidak hanya termasuk kebun alpukat namun juga yang ada dibawah ketinggian mereka seperti mangga, lemon dan berry. Meskipun demikian komunitas purepecha dan komunitas didataran rendah saling terkait dengan kebun alpukat paling produktif di dunia.

Sebaliknya pada area ekpor alpukat terdekat, komunitas purepecha menggunakan subsistensi dan pertanian produk khusus skala kecil terutama jagung, labu dan kacang dengan tenaga kerja keluarga (dalam cara pertanian yang dirujuk sebagai milpa. Berbagai jenis jagung dalam wilayah tersebut adalah bagian dari kepingan keberagaman genetik di Amerika yang sebagai pusat dari asal jagung. Variasi yang terjadi merupakan hasil dari adaptasi beratus-ratus tahun yang dilakukan oleh petani untuk merubah penerapan geografi dan budaya. Tempat ekologikal yang tidak terbatas, yang amsing-masing memiliki kondisi iklim yang unik telah menyebabkan petani dalam setiap tempat untuk terus beradaptasi dengan varietas lokal. Komunitas telah memilih dan mempertahankan berbagai tipe jagung untuk penggunaan yang berbeda. Disebabkan oleh kelangkaan air di wilayah, sehingga tanaman tidak teririgasi, dan hanya dengan penggunaan air yang tertampung dalam tanah saat musim hujan saja. Beberapa pemasukan dari luar digunakan dalam pertanian tradisional. Benih benar-benar

[228] Di Meksiko, masyarakat adat memiliki status hukum yang melibatkan kepemilikan lahan kolektif yang berbeda dari sistem ejidal.

dipilih oleh petani, disimpan, ditukar dan ditanam kembali.

Milpas adalah usaha intensif namun juga bisa dikembangkan dalam pertanian yang sukar untuk memberikan keamanan pangan untuk kelangsungan dalam secara lingkungan. Rata-rata hasil panen di meksiko rendah jika dibandingkan dengan produksi jagung monokultural yang disubsidikan dengan tinggi di amerika serikat. Namun konsep dalam penilaian efisiensi dalam hasil panen yang gagal untuk menangkap kenyataan yang sulit dalam produksi jagung di pedesaan di meksiko. Penyesuasian struktural dibentuk ulang pada tahun 1980an dan North American Free Trade Agreement pada tahun 1995 menyebabkan kemunduran dukungan pemerintah pada produksi jagung domestik. Impor jagung amerika serikat[229] saat ini lebih murah sekalipun kandungan gizinya rendah, yang mana bisa masuk ke dalam negara meskipun ada penolakan masyarakat meksiko dalam penanaman domestik. Jagung rekayasa genetik telah didistribusikan sebagai makanan lokal, dan pada tahun 2000 landrace asal ditemukan dalam jejak yang berisi rekayasa genetik, kemungkinan dari penanaman lokal atau jagung yang didistribusi. Keragaman di pusat asal menjadi beresiko.

Michoacan menghadapi deforestasi yang menyebabkan lebih dari setengah hutan asli hilang sejak tahun 1962. Secara nasional, kebijakan pedesaan selalu dibuat untuk perluasan agrikultur daripada pelestarian hutan. Padahal hutan sangat penting untuk memberikan keberagaman hayati hingga ekologi wilayah dan hutan juga melindungi sumber air dalam akuifer bawah tanah. Hutan

[229] Tiga puluh persen dari Jagung dikonsumsi di Michoacán berasal dari Amerika Serikat (lihat http:// www.lajornadadeMichoacán.com.mx/2007/01/12/index.php?section-finanzas&article=009n2fin). Pada tahun 2006, 61 persen dari seluruh jagung ditanam di AS dari berbagai rekayasa genetika (lihat http:// www.csmonitor.com/2006/0831/p15s01-sten.html).

juga berfungsi sebagai tempat melakukan aktifitas ekonomi bagi komunitas purepecha, dimana sumber utama dari pekerjaan adalah kerajinan kayu dalam keluarga atau komunitas, mereka menggunakan kayu hutan untuk membuat peti kayu yang digunakan untuk menaruh alpukat. Dalam waktu perekonomian sedang sulit, banyak terjadi penebangan ilegal tanpa usaha penanaman kembali. Dikarenakan banyak hutan yang gundul dimana-mana dan dibukanya lahan untuk penanaman alpokat, pemeliharaan keberlangsungan hutan menjadi lebih penting. Semenjak kebanyakan hutan Meksiko ditangani secara bersama oleh ejidal atau sistem pengangan tanah masyarakat adat, komunitas ini harus mampu melanjutkan penghidupan pada tanah mereka sehingga mereka tidak harus mengeksploitasi sumber alam mereka dengan cara merusak.

Coyote Rojo: melindungi Varietas asli melalui penjualan.

Berlawanan dengan latar belakang kemunculan *Coyote Rojo*. Mereka ("red Coyote" atau jiuatsi Xarhapiti dalam bahasa purepecha) adalah label organik bioregional, yang mulai menjadi produsen bersertifikasi pada bulan agustus 2007. *Coyote Rojo* bertujuan untuk menjadi pelindung dan mempromosikan keragaman hayati, menjujung tinggi praktek budaya dalam penyimpanan benih, metode produksi tanaman dan makanan khusus, untuk melindungi sumber alam (air dan hutan) dan kelangsungan untuk memanennya (*Coyote Rojo reglamanto*). Kebalikan dari *Mexico Calidad Suprema*- label merek pemerintah yaitu GLOBALGAP yang bukan pertanian melainkan bioregion alam yang dituju.

Standar yang diuraikan oleh produsen yang berpartisipasi di dalam label. Pertama dinisiasi dan dipimpin oleh seorang visionari yang bernama Fulvio Gioanetto, seorang imigran asal Italia yang telah hidup di kawasan itu selama sebelas tahun. Gioanetto mengepalai kantor sertifikasi

organik internasional Bioagricert di Meksiko (basisnya di Italia) dan dia sendiri adalah seorang petani jagung. Dia menulis Il Manifesto yang diterbitkan di penerbitan italia, pertama kali diterbitkan atas ide dari pendiri Slow Food (Petrini 2001, 7), menandai hubungan intelektualnya dengan gerakan internasional.

Produsen disertifikasi dengan tiga bagian untuk memenuhi standar organik nasional meksiko dan dokumen produksinya harus diproses dengan *Coyote Rojo*. Sejak beberapa pemasukan digunakan dalam agrikultur tradisional di wilayah. Mensertifikasi produksi organik adalah cara untuk menunjukan keberlanjutan praktek agraria dalam terminology saat ini.

Coyote Rojo memperluas ruang lingkup terroir dengan menggeser ke bioregion. Komunitas pertanian bioregional mengambil keuntungan dengan memperbaharui sumber energi, mempromosikan dan mempertahankan agrikultur organik. Coyote rojo melindungi kemampuan mereka untuk melanjutkan kendati mengancam ekosistem melalui pembangunan bisnis berdasarkan kemapuan lokal, pengetahuan dan kapasitas.

Label *Coyote Rojo* adalah cara untuk mengkonfrontasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh komunitas masyarakat adat dengan sistem pertanian yang dipusatkan pada jagung. Ratusan varietas jagung dikhususkan untuk lokal, mewakilkan simbol budaya meksiko yang paling besar dan memiliki nilai tinggi pada konsumen jika mereka bisa mengidentifikasi. Jika masyarakat ada memperbaharui pengetahuan yang berharga tentang bagaimana mengolah milpas. Dengan mempromosikan komersialisasi jagung lokal, diharapkan proyek dapat melindungi praktek pertanian yang unik di wilayah, untuk mempertahankan dan mengisi kembali persediaan sumber air yang menipis dan melindungi hewan lokal dan banyak tanaman selain jagung. Mempertahankan praktek panen memberikan

masyarakat desa mendapat pekerjaan sementara mempertahankan hutan. Bioregionalisme mendukung mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan lokal yang membentuk planet.

Komersialisasi membutuhkan konsumen kepada siapa label menawarkan garansi kualitas pada produk tradisional, termasuk kualitas estetis dan organopletic (sensor). Kami membuat pasar dan garansi label yang paling cocok, menyadarkan dan menjamin konsumen, tidak hanya produksi yang bagus untuk kesehatan mereka, kualitas hidup dan lingkungan namun pada waktu yang sama menjamin rasa yang otentik dan keindahan original. Mungkin gema masyarakat kota yang mendukung makanan regional di eropa, menarik pada notalgia pasar[230], kepada mereka yang meninggalkan rumah mereka ke tempat lain. Membentuk hubungan emosional/budaya/sejarah antara konsumen, produsen dan asal tempat dari asal makanan. Produk-produk saat ini tersedia di pertanian dan pasar lokal (tianguis) di beberapa negara, dan ada diskusi tentang penjualan di tempat yang lebih besar. Walmart di meksiko memberika ketertarikan, namun coyote rojo belum menyanggupi karena label belum cukup sertifikasi dalam hal kuantitas untuk mensuplai.[231] Komunikasi pribadi, Gioanetto, 24 Oktober 2007.

Pembangunan ini terjadi dalam konteks nasional yang terlihat perlawanan yang ekstrim dalam penggeseran meksiko pada kebijakan agrikultural yang dipimpim oleh ekspor. Pemberontakan the chiapas yang terjadi pada tahun 1994 menginisiasi tuntutan untuk merevisi bagian North America Free Trade Agreement dalam agrikultur yang melarang perdagangan bebas jagung dan kacang. Krisis

[230] Wawancara, SBU San Juan Nuevo, 13 Juni 2007.
[231] Komunikasi pribadi, Gioanetto, 24 Oktober 2007.

tortilla di awal tahun 2007 membuktikan kelanjutan oposisi petani dan masyarakat adat dalam kebijakan nasional. Label bioregional coyote rojo yang berhubungan secara intelektual dengan Slow Food dan secara sistematis dengan agrikultural meksiko dan politik lingkungan adalah proyek praktek oleh satu komunitas untuk membantu perlindungan keanekaragaman hayati regional dan praktek budaya, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri mereka dan keluarga mereka pada tanah mereka dan membangun kembali ekologi regional denga memasarkan produk secara lokal namun yang paling penting juga di pasar yang jauh.

FOOD PLUS LOKAL: Sebuah Label Daerah di Ontario, Kanada

Inovasi terbaru dalam peningkatan pasar lokal, kelangsungan pangan terjadi di daerah toronto. Karakteristik agrikultur amerika utara yang basis keseluruhannya pada tanaman dan peternakan yang dikenalkan oleh imigran dari eropa 200 tahun yang lalu. Para imigran datang dengan selera baru dan tanaman dari bebagai bagian di seluruh dunia dalam waktu setengan abad hingga sekarang namun mereka menetap di kota-kota. Tantangan dalam konteks ini adalah untuk membentuk sebuah pengembangan sistem pangan regional dengan tipikal "placeless foosscapes", yang mana secara mendalam berakar pada budaya pangan. Di sisi lain, percampuran budaya secara berlanjut mengganti selera dan membutuhkan bahan-bahan; di sisi lain petani yang berumur dan hilangnya lahan pertanian dasar untuk lahan urban membuatknya sulit untuk memperbaharui pertanian untuk mensuplai mereka. Maka dari itu, contoh ini berbicara tentang ekologi dan penanaman budaya, yang membutuhkan baik pembaharuan sistem pertanian dan adaptasi hubungan, praktek

dan pangan hingga perubahan pencampuran budaya.

Local Food Plus yang dahulunya bernama Local Flavour Plus[232] terbentuk sebagai organisasi non-profit selama proses negosiasi dengan kontrak pertamanya dengan University of Toronto yang mempunyai 60.000 mahasiswa. Ini adalah inovasi Third Party Certifier, yang menemukan identitasnya, masyarakat, peraturan dalam rangkaian kerjanya dengan institusi publik besar untuk mendesain dan melaksanakan kontrak pelayanan pangan untuk membentuk perusahaan pelayanan pangan transnasional yang menawarkan makanan ke dua dari tiga kampusnya. Permintaan penawaran yang mana dibentuk hampir setahun, membutuhkan kerjasama "untuk menggunakan dan menyokong produk pertanian lokal untuk makanan porsi kecil yang disertifikasi oleh LFP.[233]

Fitur utama dari konstelasi yang terbentuk lebih dari beberapa bulan memberikan tanggapan kreatif hingga ketegangan diantara gerakan dan tujuan pasar. Salah satunya adalah pergeseran dalam prioritas hingga petani lokal sebagai basis untuk kelangsungan sistem makanan. Lokal telah lama menjadi bagian dari percampuran isu, namun masih belum menjadi prioritas. Petani organik telah memperjuangkan pasar apapun untuk menghadapi impor "industri organik" dan kegigihan praktek supermarket yang menggunakan suplai rantai jangka panjang, terutama dari california. Keamanan pangan dan organisasi anti-kelaparan, yang mana paling lama dan bagian yang paling

---

[232] Perubahan nama ini disebabkan oleh penemuan masalah kekayaan intelektual di bagian lain di Kanada. Hal ini mengindikasikan betapa cepatnya pertentangan dapat muncul pada setiap skala yang cepat berubah dalam konteks ekonomi dan hukum politik.

[233] Sebagian besar dari apa berikut diambil dari artikel yang ditulis oleh Friedmann (2007b), yang menggunakan metafora untuk menangkap cara tertentu yang telah disesuaikan LFP 'perbaikan terus-menerus' model dari antagonis ke kolaboratif.

pertama didirikan dalam gerakan pangan, termasuk ketahanan sebagai tujuan kedua. Salah satunya adalah FoodShare yang juga memberikan dukungan institusi yang penting untuk LFP dalam tahapan pembentukannya, terutama president pendiri LFP Lori Stahlbrand. Stahlbrand sendiri datang utnuk memprioritaskan makanan lokakl melalui kerja dan hubungan dari organisasi lingkungan. Pembentukan awalnya dalam percakapan dengan organisasi US Food Alliance yang ditegaskan untuk "eco-label" tanpa referensi penjualan jarak jauh, atau konteks ekologi dan budaya. Sebagai hasilnya, Food Alliance dengan cepat menarik perusahaan ekpor monokultural besar seperti Cascadian farms yang sebenarnya menggantikan tanaman lokal, seperti berry dari Ontario bahkan pada musimnya. Oleh karena itu Stahlbrand menggeser konsep privotal dari ekologi menjadi lokal.

LFP membentuk rangkaian enam standar termasuk kelangsungan agronomi dan juga standar tenaga kerja, manajamen alam liar, energi, kesejahteraan hewan dan tentu saja proximity. Setiap dari standar ini membutuhkan persyaratan dengan sistem utama yang mendukung kemajuan individual dan memperkenankan LFP untuk melanjutkan menaikkan standar. Hal ini termasuk pengalaman yang dipelajari dari managemen hama yang terinterhrasi dan lainnya, yang membentuk kerjasama, hubungan pemecahan masalah antara produsen dan pensertifikasi kekuasaan sertifikasi/desertifikasi dari pengawas makanan organik. Kelanjutan kemajuan oleh perusahaan yang memenangkan penawaran didukung oleh dorongan perjanjian untuk meningkatkan proporsi dari produk LFP yang disertifikasi, yang mewujudkannya dalam berkembangnya kelanjutan permintaan. Pada waktu yang sama, model kelanjutan kemajuan mengganti sistem hieraki dengan hubungan kerjasama selama mensuplai rantai.

Kontrak UofT kemudian memimpin dukungan institusioanl. Persetujuan lembaga kemudian menyusul, terutama dari Greenbelt Foundation, yang dibentuk sebagai bagaian dari program provinsi inovasi Ontario yang dimulai pada tahun 2005. LFP sesuai dengan amanat Greenbelt untuk melindungi tanah pertanian dari konversi untuk penggunaan lain.[234] Adanya persetujuan lembaga yang pada gilirannya menuntun LFP untuk terbentuk menjadi organisasi non-profit. Kontrak besar dengan UOFT bersamaan dengan kontrak personal kepala sekolahnya yang benar-benar tertanam dalam gerakan organik dan sektor ekonomi dan perhatian mereka pada beban petani yaitu pembentukan dan upah, menarik petani dan prosesor untuk menjamin. Penyelidikan dari institusi pendidikan di Ontario melewati kapasitas suplai LFP dan bahkan petani dan prosesor bersertifikasi, yang memberikan kondisi pertumbuhan yang cepat. Pada musim gugur 2007 datangnya terobosan dalam supermarket yang mana secara tegas menghindari aktivis ini, ketika Fiesta Farms, sebuah supermarket kecil yang dimiliki oleh imigran italia, mengumumkan ini akan menjadi fitur dari produl LFP.

Kurangnya kelanjutan budaya agrifood, mungkin yang melingkupi meta-culture LFP dapat dipahami sebagai politik. LFP tumbuh dengan basis dari praktek makanan komunitas mencakup gerakan sosial, organisasi non pemerintah dan pemerintah daerah selama dua dekade. Khususnya, Toronto Policy Council (dan koordinatornya,Public Health Departement daerah resmi) yang menjadi jembatan penting untuk menghubungkan pendiri Lori Stahlbrand dengan figur utama dari gerakan organik,

---

[234] Sebab pendanaan awal , termasuk untuk LFP, lihat action/ontarios-greenbelt-focus-3-27-million-grants-awarded-greenbelt-founda http://www.ourgreenbelt.ca/greenbelt-grants/grants-.

pendukung, oraniser, pemeriksa TPC dan grosir. Pertamanya tiga hingga empat kepala sekolah dapat bekerja bersama dengan cepat untuk membentuk inovasi peraturan dan praktek untuk sertifikasi lokal dan kelangsungan pangan, karena mereka telah sepakat dan pemahaman mereka telah dikembangkan melalui lingkungan dan keamanan pangan organisasi non pemerintah, terutama World Wildlife Fund dan FoodShare Toronto. Hubungan mereka pada departemen sosial dan petani cukup kuat untuk membiarkan mereka menyimpang dari praktek lampau di sektor mereka berasal termasuk organik dan memberi inspirasi pada masyarakat untuk bergabung bersama. Penulisan protokol, pendidikan dan pengrekrutan supplier dan membangun organisasi untuk mensertifikasi dan mengaransi produk, adalah kesemua proses yang pada waktu yang sama petani dan prosesor direkrut untuk disertifikasi dengan LFP. Bahkan ketika masyarakat bertemu pada pertama kalinya, mereka membentuk kepercayaan pleh jaringan sosial dan publik, institusi swasta dan non-pemerintah yang dibentuk lebih dari 20 tahun.

Walaupun beberapa aktivis sosial memandu unfolding tergabung dalam Slow Food, pemahaman dan praktek mereka telah berkembang dengan sendirinya lebih dari dua dekade. Perubahan paralel dari ide dan praktek memberikan konteks global yang lebih luas dan dalam, kemungkinan zeitgeist, yang mana Slow Food sangat patut dicontoh.

Kebudayaan sifatnya lebih condong "politik" daripada "kultural" dalam konteks Italia atau Meksiko. Pada waktu yang sama, SFBD membentuk hubungan kreatif dengan Ontario. Yang memberikan hak Presidium untuk Red Fife Wheat, yang kemungkinan diturunkan dari varietas Ukrania, yang pertama kali di kembangkan di wilayah Otonabee yang sekarang menjadi pusat Ontario pada tahun 1840an dan diperkenalkan kembali pada wilayah aslinya

di ontario pada tahun 2005.[235] Slow Food adalah salah satu dari banyak institusi dan jaringan yang memikirkan cara untuk menanamkan makanan dan agrikultur pada konteks ekologi dan budaya di toronto dan Ontario.

REFLEKSI: Keterikatan dan Transformasi Ruang Sela

Berangkat dari contoh-contoh diatas, apa yang ingin dikatakannya kepada kita tentang gerakan sosial agraria? Kami berpendapat bahwa mereka adalah contoh dari yang disebut Builder sebagai pendekatan Lawan hingga pahlawan untuk perubahan sosial. Petrini, pendiri Slow Food membedakan ' cara Slow Food ' dengan "gerilyawan" dan tindakan langsung Jose Bove, seorang militan terkemuka dan teoritisi Via Campesina (Petrini 2001, 26). Melalui Presidia, *Slow Food Foundation for Biodiversity* bertujuan untuk menyediakan dukungan kelembagaan bagi sistem penanaman Agrifood dalam konteks budaya dan ekologi, sehingga memberikan alternatif kepada penyederhanaan marginalisasi kaku yang dipaksakan oleh modal transnasional. Ini adalah pendekatan non-konfrontatif untuk transformasi sosial, yang bisa menciptakan berbagai node dalam sebuah jaringan. Sama seperti tanaman yang tumbuh melalui retakan di aspal akhirnya dapat merobah jalan menjadi hutan, proyek-proyek kecil di celah negara Agrifood mungkin potensial - dan akhirnya - menjadi cara baru untuk mengatur makanan dan pertanian, sekaligus menghubungkan lokal dan global. Hal ini dapat dipahami melalui gagasan Marx tentang perubahan yang muncul dalam kondisi masyarakat kapitalis.

Erik Olin Wright (yang akan datang, Ch 3, 12) berpendapat bahwa kadang-kadang, proyek yang tersebar dan kecil

[235] Lihat http://www.slowfoodfoundation.org/eng/presidi/dettaglio.lasso?cod=267

seperti itu dapat mengubah arah dominasi kekuasaan dan eksploitasi. Idenya mengenai transformasi sosial *interstisial* menunjukkan bahwa inilah "penggeseran upaya kita untuk membangun teori "dinamika trajectory" (dalam teori Marxis) hingga teori 'kesempatan struktural':

> Sejarah masa depan - jika menjadi sejarah pemberdayaan sosial emansipatoris - akan menjadi lintasan kemenangan dan kekalahan, pemenang dan pecundang, bukan sekadar kompromi dan kerjasama antara kepentingan dan kelas yang berbeda. Episode dari lintasan ini akan ditandai dengan inovasi kelembagaan yang harus mengatasi oposisi dari mereka yang kepentingannya terancam oleh egalitarianisme demokratis, dan oleh oposisi yang buruk, tidak patuh dan merusak. Jadi, mengharapkan metamorfosis tidak untuk mengharamkan perjuangan, tetapi untuk melihat tujuan strategis dan dampak perjuangan dengan cara tertentu: sebagai tambahan modifikasi struktur dasar dari sebuah sistem social dan mekanisme reproduksi sosial yang secara kumulatif mengubah sistem. (Wright yang akan datang, Ch 9, 1)

Militansi dan penataan institusi itu saling melengkapi. Institusi, pada abad kesembilan belas adalah dewan pekerja dan koperasi pertanian yang harus mempertahankan diri terhadap perusahaan kapitalis dan pemerintah, sementara gerakan perlawanan telah membangun lembaga-lembaga sosial untuk mendukung anggota mereka dan menjamin kontinuitas dari generasi ke generasi. Waktu adalah segalanya dalam memahami keseimbangan antara keduanya. Kami berpendapat bahwa perubahan yang terjadi baru-baru ini masih kecil, proyek-proyek sistem pangan lokal menumbuhkan kembali semangat anti-globalisasi, dan semangat perjuangan perlawanan. Tidak ada yang berubah dengan perjuangan itu, sebagai gambaran, misalnya yang

ditunjukkan dari transformasi kapitalis besar-besaran pada sistem Agrifood global, Itu mungkin mencerminkan penerimaan yang berkembang tentang bahwasanya dunia lama peraturan nasional (Friedmann 1993) tidak dapat dipulihkan. Memang, pemahaman baru dan politik *indigeneity*, merupakan ancaman terhadap keaneka-ragaman tanaman genetik dan ternak serta pertahanan spesifik agro-ekosistem, diantara faktor-faktor lainnya, tetapi itu tidak membuat suatu keuntungan yang di-inginkan.

Dalam konteks global, ada sedikit prospek untuk kembali ke 'tradisi'. Petani di mana-mana akan terbawa oleh arus transformasi ekologi dan sosial besar-besaran. Mereka yang terlibat dalam sistem pertanian campuran yang disesuaikan dengan tanah, iklim, sungai dan budaya makanan, akan menemukan suatu kondisi, dimana mereka tidak lagi bisa seperti itu. Beberapa mungkin berubah untuk menjadi petani kontrak komoditas niche untuk rantai pasokan global saja- bahkan yang dijual di supermarket lokal- sementara kebanyakan dari mereka terpinggirkan dan tidak mampu menghasilkan seperti sebelumnya karena tidak layak untuk lahan produksi dan tidka layak untuk dipasarkan. Dalam lintasan konvergensi, mereka yang terlibat dalam komoditas khusus di tahun-tahun sesudah perang, terutama biji-bijian, minyak sayur, dan daging dan produk susu, menemukan produk-produk mereka terdevaluasi sebagai bahan untuk sumber pasar global makanan yang diproduksi menurut perubahan peraturan perdagangan.

Via Campesina adalah jaringan global yang membela petani kecil dan keragaman agroekosistem di Utara dan Selatan, dan memerangi ancaman bagi mereka, seperti tanaman rekayasa genetik, aturan kekayaan intelektual dan perdagangan yang mendukung para pemodal besar untuk mengakses tanah dan sumber daya lainnya. *Presidium* dan

Slow Food Foundation for Biodeiversity -sebagaimana Petrini berpendapat- mewakili keseimbangan yang berbeda antara bangunan institusi dan militansi sebagai salah satu yang menyebabkan pendirian Via Campesina. Presidium adalah bentuk yang fleksibel yang dapat menampung para petani kecil di Utara dan Selatan, zona tropis dan subtropis, tumbuhan asli masyarakat atau tanaman yang baru diperkenalkan kepada mereka. *Slow Food Foundation for Biodiversity* oleh karena itu, menyarankan beberapa lintasan berbeda, yang berasal dari lokasi yang berbeda dalam rezim makanan yang sedang sekarat, yang didasarkan pada peraturan nasional (Friedmann 1993), dan cenderung ke arah sistem baru di mana setiap bagian otonom dan terhubung sekaligus, diberdayakan dan saling tergantung.

Pada saat yang sama, kerangka kerja kelembagaan yang diwarisi dari rezim makanan yang sekarat tidak mampu mengintegrasikan pangan dan pertanian dengan isu-isu yang besar terkait dengan kesehatan, energi dan integritas ekosistem, termasuk kemampuan biosfer untuk terus mendukung kehidupan manusia.

Lembaga publik untuk standarisasi dari organisasi swasta nyaris tak terlihat, seperti GLOBALGAP dan Organisasi Inter-nasional yang lebih besar untuk Standardisasi, peraturan pemerintah lebih sering menjadi bagian dari masalah, misalnya, ketika terjadi pertentangan peraturan *higiene* pedagang kecil dan pasar tradisional, yang telah tertanam pada kehidupan budaya dan ekologis petani dan pengrajin makanan, seperti petani dari varietas jagung lokal dan pembuat tortilla di Meksiko. Pemerintah cendrung menerapkan struktur anakronistik dalam penanganan masalah nya. Ketika dihadapkan dengan masalah baru yang terkait dengan makanan dan kesehatan lingkungan, mereka megnanggap ini adalah politik pertanian lama, sering anggapan seperti ini ada dalam dukungan kemen-

trian pertanian, dan aliansi baru antara organisasi-organisasi non-pemerintah dan kementerian lingkungan yang lemah pada tahun-tahun 1970-an. Sebagai patokan pemerintah, standar nasional Meksiko untuk label *Meksiko Calidad suprema* hingga GLOBALGAP, itu tidak hanya mengubah pertanian yang lama dan kementrian pangan, tetapi juga untuk menanggapi upaya akar rumput ketika mereka berhadapan dengan masalah lingkungan, budaya dan masalah ketenagakerjaan yang timbul dari konversi ekspor pertanian .

Misalnya, Provinsi Ontario tidak bertanggung jawab untuk kesehatan dan pertanian, tetapi kotamadya Toronto, ketika terjadi pembagian desa-kota tua, telah melibatkan secara serius masuknya organisasi petani dan pertanian dalam kebijakan dan programnya. Provinsi Ontario sekaligus diarahkan ke lobi pertanian konvensional melalui Departemen Pertanian, dan - melalui kementerian pembangunan ekonomi, daerah perencanaan dan lingkungan – mereka berjuang untuk menanggapi gerakan sosial yang melihat bahwa solusi konvergen makanan dan pertanian itu adalah hal yang dilematis.[236]

---

[236] Usaha-usaha untuk mengintegrasikan mereka bahkan secara konseptual harus mereka sendiri yang menginovasi secara institusional. Misalnya, International Assesment of Agricultural Science and Technology for Development adalah yang paling akhir di sebuah institusi yang berkembang dari 'penilaian ilmiah', yang dimulai dengan Panel Intergov-ernmental tentang Perubahan Iklim. Ini tidak memiliki status formal, seperti nyata dari lintasan iklim politik yang tidak menentu, namun telah diperdebatkan karena ini diperbolehkan untuk digunakan oleh individu mereka seperti Al Gore, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial, untuk melakukan diskusi publik besar-besaran dan - meskipun ketidakseimbangan kekuatan peserta – pergeseran cascading dalam kesadaran akan perlunya perubahan yang mendasar, begitu mendasar sehingga tidak mungkin untuk melihat bagaimana melakukannya (lihat http:// www.agassessment.org).

Kami tentu saja tidak menganggap visi transformasi Agrifood global ini digantungkan di benang rapuh proyek lokal di dataran tinggi barat Michoacán, Meksiko atau Ontario, Kanada, atau di jaringan Slow Food linnya. Sebaliknya, kami menyarankan bahwa berpikir tentang mereka, memungkinkan kita untuk mengamati perubahan dalam celah sistem Agrifood, yang kemunculannya dibayangi ketakutan dari bentuk akhir konstelasi baru hubungan praktek-praktek Agrifood. Kreativitas organisasi dan intelektual Slow Food terletak pada dukungan paradoksnya yang mengakui keberagaman, melekat dalam sistem pangan yang saling berhubungan. Organisasi ini tidak ragu lagi mengubah cara kerjanya dan berpikir, mungkin nanti akan muncul organisasi lainnya melalui jaringan-jaringan dan percobaan baru.

Pergeseran cara berpikir dalam kesadaran ini sedang berlangsung, di mana semakin mungkin untuk melihat makanan dan pertanian bukan sebagai sisilain dari 'pertumbuhan', tetapi sebagai inti yang dapat direalisasikan, dan sebagai isu pokok yang berpengaruh pada kelanjutan kehidupan. Kesehatan, iklim yang kacau, kekurangan energi, kekurangan air, penurunan tanah dan polusi semua semakin jelas terhubung ke makanan dan pertanian.

Namun lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi antar pemerintah tidak dapat melihat hubungan ini. Sementara kebijakan lembaga baru, seperti 'multi-fungsi' di Eropa, telah mencapai beberapa keberhasilan sederhana dalam menghubungkan beberapa masalah tersebut, dalam hal ini mereka berusaha untuk mengubah petani dari polusi tanah dan air menjadi manajer ekosistem dengan membayar jasa lingkungan. Tidak penting bahwa dorongan untuk kreativitas tersebut berasal dari strategi perdagangan, yaitu sifat perubahan interstisial. Yang penting adalah bahwa hal itu membuka kemungkinan cakrawala baru.

Perspektif yang disarankan oleh Cojote Rojo dan Local Food Plus, serta Slow Food, selaras dengan gerakan ketahanan makanan yang luas dan beragam. Apa yang membedakan gerakan pembangunan adalah bahwa ia menghindari konfrontasi langsung dengan modal (setidaknya untuk saat ini) dengan bekerja dengan dan melalui pasar dan mengejar "keuntungan dari pendidikan" yang sebenarnya merubah sistem agrifood? Proyek-proyek ini berada di ujung absorpsi, pemilihan dan lainnya. Meskipun yang lain muncul dan pulih, mereka tetap membutuhkan kewaspadaan konstant dan koreksi-diri, eksperimen dan saling belajar. Transformasi intersitital sosial adalah suatu gagasan yang mengundang kita untuk berangkat dari melihat adanya pembagian kutub antara gerakan oposisi otonom di satu sisi, dan kooptasi oleh perusahaan kuat dan negara di sisi lain. Ini adalah daerah keruh di mana orang bisa tenggelam setiap saat, namun mungkin juga salah satu dari keduanya dapat memperbaharui dan mengarahkan perjalanan seperti rawa-rawa yang dipetakan.

Kami berpendapat, ada pemahaman yang kurang tentang politik bahwa dia menjadi bagian dari itu semua. Polanyi mengamati dan membandingkan tiga jenis respon ketika terjadinya kehancuran masyarakat dan alam oleh 'sistem pasar yang mengatur diri sendiri', dan sistem Negara terpusat. Dalam karya klasiknya *The Great Transformation* (1944), Polanyi membandingkan tiga percobaan redistribusi selama Depresi Besar pada tahun 1930-an - fasisme, komunisme Soviet dan demokrasi sosial ala US.[237]

---

[237] Roosevelt's New Deal. Kami menggunakan istilah 'demokrasi sosial' secara luas, Britania hancur secara ekonomis, sedangkan sebagian besar benua ini hancur akibat perang, dan hanya model intervensi pemerintah AS yang bertahan selama Perang Dunia II menurut Polanyi .

Bahkan dalam pekerjaan itu, bagaimanapun, secara teoritis Polanyi mengidentifikasi bentuk sejarah yang menjadi bagian dari peristiwa itu daripada redistribusi selain negara-pusat, termasuk timbal balik dan 'householding'. Setelah Perang Dunia II, Polanyi dan kolaborasinya berfokus pada bentuk-bentuk alternatif pertukaran tertanam dalam hubungan non-instrumental (Polanyi et al 1957). Dengan menggunakan metode penulisan etnografi untuk melihat sejarah pra-kapitalis, penulis menemukan berbagai pengertian pasar yang dibatasi oleh ruang geografis dan perdagangan jarak jauh, yang tidak mempengaruhi harga lokal atau produksi, dan yang ada dalam hubungan pasar secara substansial dalam 'masyarakat' yang terorganisisr. Kami berpendapat, bahwa era 'globalisasi' - dan berbagai cara di mana pemerintah telah menyerahkan wewenang dan kontrak administrasi serta pelayanan kolektif - sebagian menggeser toeri protective yang ditawarkan Polanyi yang mengatakan bahwa tanah adalah tempat menanamkan dan bekerja bagi tenaga kerja yang ada di sebuah negara. Contoh yang coba kami tunjukkan bahwa dalam waktu yang panjang, terjadi penyebaran luas kesadaran, yang mulai memandang perlunya visi ekologis dan budaya. Pandangan inilah yang dulu tidak pernah ada pada waktu Polanyi melakukan penelitian. Sekarang mereka bekerja secara kreatif dengan pemerintah di semua skala, seperti modal Agrifood swasta. "Para praktisi pembangunan" dan "Pemenang" saat ini berada dalam titik pergeseran paradigma.

Cojote Rojo dan *Local Food Plus* merupakan contoh yang cukup bagus dari Meksiko dan Kanada - atau lebih tepatnya, dari Michoacán Barat dan Ontario Selatan. Masing-masing memiliki keunikan dalam hal budaya dan system pertaniannya. Keduanya secara luas terhubung ke pergeseran kesadaran dan praktek global tentang makanan dan pertanian. Kita melihat, banyak Lembaga-lembaga

yang memperlihatkan pergeseran ini bermunculan di mana-mana, jika kita melihat banyak nya cara pertanian yang sama muncul dibanyak tempat. Slow Food di berbagai-situati adalah pelaksanaan dari berkembangnya cara kerja mandiri petani untuk mendukung pendekatan regional kreatif yang bertujuan untuk membangun keragaman dan itu telah menjadi satu dengan system pertanian mereka. Inovasi Presidium yang fleksibel, mendukung para petani dan pengrajin menjadi satu dengan lahan garapannya, Presidia membantu mereka untuk menciptakan dan mempertahankan praktek yang menjamin bahwa mereka telah melakukannya untuk pembeli jarak jauh. Mereka memang masih baru dalam tekhnik yang diperkenalkan dalam kelembagaan –presidia yang juga baru, tetapi dengan ikutnya petani dalam skema ini, mereka mendapatkan penambahan pengalaman tentang tipe-tipe umum dari praktek ekonomi global yang didasarkan pada budaya dan ekologis yang ada pada system pangan.

Referensi

Araghi, F., 2000. 'The Great Global Enclosure of our Times: Peasants and the Agrarian Question at the End of the Twentieth Century'. In *Hungry for Profit? The Agribusiness Threat to Farmers, Food and the Environment*, eds H. Magdoff, J. Foster and F. Buttel, 145–60. New York: Monthly Review Press.

Barling, D. and T. Lang, 2005. 'Trading on Health: Cross-Continental Production and Consumption Tensions and the Governance of International Food Standards'. In *Cross-Continental Food Chains*, eds N. Fold and B. Pritchard, 39–51. London: Routledge.

Barry, T., 1995. *Zapata's Revenge: Free Trade and the Farm Crisis in Mexico*. Boston, MA: South End Press.

Bernstein, H., 2006. 'Is There an Agrarian Question in the 21st Century?'. *Canadian Journal of Development Studies*, 27 (4): 449–60.

Bernstein, H. and L. Campling, 2006a. 'Commodity Studies and Commodity Fetishism I: *Trading Down*. On *Trading Down: Africa, Value Chains, and the Global Economy*, by P. Gibbon and S. Ponte'. *Journal of Agrarian Change*, 6 (3): 239–64.

Bernstein, H. and L. Campling, 2006b. 'Commodity Studies and Commodity Fetishism II: "Profits with Principles"?'. *Journal of Agrarian Change*, 6 (2): 414–47.

Burch, D. and G. Lawrence, 2007. 'Supermarket Own Brands, New Foods and the Reconfiguration of Agrifood Supply Chains'. In *Supermarkets and Agri-food Supply Chains. Transformations in the Production and Consumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 100–30. Cheltenham: Edward Elgar.

Busch, L. and C. Bain, 2004. 'New! Improved? The Transformation of the Global Agrifood System'. *Rural Sociology*, 69 (3): 321–46.

Busch, L. et al., 2005. 'The Relationship of Third Party Certification (TPC) to Sanitary/ Phytosanitary (SPS) Measures and the International Agri-food Trade: Final Report. Prepared for USAID' http://www.msu.edu/~ifas/downloads/The%20Relationship%20of%20TPC%20to%20SPS%20Measures—Final%20Report%20+%20Annexes.pdf, Accessed 30 January 2008.

Callon, M., C. Meadal and V. Rabeharisoa, 2002. 'The Economy of Qualities'. *Economy and Society*, 31 (2): 194–217.

Campbell, H. and R. LeHeron, 2007. 'Supermarkets, Producers and Audit Technologies: The Constitutive Mi-

cro-politics of Food, Legitimacy and Governance'. In *Supermarkets and Agri-food Supply Chains. Transformations in the Production and Consumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 131–53. Cheltenham: Edward Elgar.

Coyote Rojo, n.d. *Reglamento para la Certificación Territorial Bioregionalista JIUATSI*. Nurio, Michoacan, Mexico: Coyote Rojo.

De la Tejera, B., 2007. '¿Que Hay Detrás del Precio de la Tortilla?'. *La Jornada de Michoacán*. 26 January. http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2007/01/20/index.php?section= opinion&article=002a1pol, Accessed 30 January 2008.

Desmarais, A.A., 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Point Black, NS and London: Fernwood Books & Pluto Press.

Dixon, J., 2007. 'Supermarkets as New Food Authorities'. In *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 29–50. Cheltenham: Edward Elgar.

Edelman, M., 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society 2003*, eds M. Kaldor, H. Anheier and M. Glasius, 185–220. Oxford: Oxford University Press.

Fonte, M., 2006. 'Slow Food's Presidia: What Do Small Producers Do with Big Retailers?'. *Research in Rural Sociology and Development*, 12: 1–39.

Friedmann, H., 1993. 'The Political Economy of Food: A Global Crisis'. *New Left Review*, 197: 29–57.

Friedmann, H., 2004. 'Feeding the Empire: Pathologies of Globalized Agriculture'. In *Socialist Register: The Empire Reloaded*, eds L. Panitch and C. Leys, 124–43. London: Merlin.

Friedmann, H., 2005. 'From Colonialism to Green Capi-

talism: Social Movements and Emergence of Food Regimes'. In *New Directions in the Sociology of Global Development*, eds F.H. Buttel and P. McMichael, 227–64. Oxford: Elsevier.

Friedmann, H., 2007a. 'Seeds of the City'. In *Food*, eds J. Knechtel, 240–50. Cambridge, MA: Alphabet City and MIT Press.

Friedmann, H., 2007b. 'Scaling Up: Bringing Public Institutions and Food Service Corporations into the Project for a Local, Sustainable Food System in Ontario'. *Agriculture and Human Values*, 24 (3): 389–98.

Gereffi, G. and M. Korzeniewicz, eds, 1994. *Commodity Chains in Global Capitalism*. Westport, Connecticut: Praegar.

Goodman, D., 2003. 'The Quality "Turn" and Alternative Food Practices: Reflections and Agenda'. *Journal of Rural Studies*, 19 (1): 1–7.

Goodman, M.K., 2004. 'Reading Fair Trade: Political Ecological Imaginary and the Moral Economy of Fair Trade Foods'. *Political Geography*, 23: 891–915.

Guthman, J., 2004. *Agrarian Dreams: The Paradox of Organic Farming in California*. Berkeley,CA: University of California Press.

Hamm, G., 2007. 'Mexicans Protest as Tortilla Crisis Hurts Calderon'. *The Boston Globe*. 13 January. http://www.boston.com/news/world/latinamerica/articles/2007/02/01/mexicans_protest_as_tortilla_crisis_hurts_calderon, Accessed 28 December 2007.

Harvey, M., 2007. 'The Rise of Supermarkets and Asymmetries of Economic Power'. In *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 51–73. Cheltenham: Edward Elgar.

Jaffee, D., 1997. 'Confronting Globalization in the Com-

munity Forests of Michoacán, Mexico: Free Trade, Neoliberal Reforms and Resource Degradation'. Presented at the *LASA Conference*, Guadalajara, April 1997.

Klooster, D., 2003. 'Campesinos and Mexican Forest Policy During the Twentieth Century'. *Latin American Research Review*, 38 (2): 94–126.

Konefal, J. and M. Mascarenhas, 2005. 'The Shifting Political Economy of the Global Agrifood System: Consumption and the Treadmill of Production'. *Berkeley Journal of Sociology*, 49: 76–96.

Konefal, J., C. Bain, M. Mascarenhas and L. Busch, 2007. 'Supermarkets and Supply Chains in North America'. In *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 268–90. Cheltenham: Edward Elgar.

Lyons, K., 2007. 'Supermarkets as Organic Retailers: Impacts for the Australian Organic Sector'. In *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production andConsumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 154–72. Cheltenham: EdwardElgar.

Marsden, T., A. Flynn and M. Harrison, 2000a. *Consuming Interest: The Social Provision of Foods*. London: UCL Press.

Marsden, T., J. Banks and G. Bristow, 2000b. 'Food Supply Chain Approaches. Exploring Their Role in Rural Development'. *Sociologia Ruralis*, 40: 424–38.

McMichael, P., 2007. 'Sustainability and the Agrarian Question of Food'. Keynote Address *European Congress of Rural Sociology*, Wageningen, 20–24 August 2007.

McMichael, P. and H. Friedmann, 2007. 'Situating the

"Retailing Revolution"'. In *Supermarketsand Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Foods*, eds D. Burch and G. Lawrence, 154–72. Cheltenham: Edward Elgar.

Mijangos-Cortés, J.O. et al., 2007. 'Differentiation among Maize (*Zea mays* L.) Landraces from the Tarasca Mountain Chain, Michoacán, Mexico and the *Chalqueño* Complex'. *Genetic Resources and Crop Evalutaion*, 54: 309–25.

Morgan, K., T. Marsden and J. Murdoch, 2006. *Worlds of Food: Place, Power, and Provenance in the Food Chain*. Oxford: Oxford University Press.

Nadal, A., 2006. 'Mexico's Corn-producing Sector: A Commentary'. *Agriculture and Human Values*, 23: 33–6.

Patel, R., 2007. 'Transgressing Rights: La Vía Campesina's Call for Food Sovereignty'. *Feminist Economics*, 13 (1): 87–116.

Petrini, C., 2001. *Slow Food: The Case for Taste*. New York: Columbia University Press.

Pietrykowski, B., 2004. 'You Are What You Eat: The Social Economy of the Slow Food Movement'. *Review of Social Economy*, 42 (3): 307–21.

Polanyi, K., 1944. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times*. Boston, MA: Beacon Hill.

Polanyi, K., C.M. Arensbert and H.W. Pearson, eds, 1957. *Trade and Markets in the Early Empires*. Chicago, IL: Henry Regnery.

Pollan, M., 2006. *The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals*. New York: Penguin Press.

Quist, D. and I.H. Chapela, 2001. 'Transgenic DNA Introgressed into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, Mexico'. *Nature*, 29 (414): 541–3.

Raynolds, L.T., 2004. 'The Globalization of Organic Agro-

Food Networks'. *World Development*, 32: 725–43.
Raynolds, L. and D. Murray, 2007. 'Fair Trade: Contemporary Challenges and Future Prospects'. In *Fair Trade. The Challenges of Transforming Globalization*, eds L. Raynolds, D. Murray and J. Wilkinson, 223–34. Abingdon: Routledge.
Reardon, T. and J.A. Berdegué, 2002. 'The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development'. In *Development Policy Review*, 20 (4): 371–88.
Reardon, T. et al., 2005. 'Supermarket Expansion in Latin America and Asia: Implications for Food Marketing Systems'. In *New Directions in Global Food Markets/ AIB-794*, eds A. Regmi and M. Gehler, 47–61. Economic Research Service/USDA. http://www.ers.usda.gov/publications/aib794/aib794.pdf, Accessed 30 January 2008.
Ribeiro, S., 2004. 'The Day the Sun Dies: Contamination and Resistance in Mexico'. *Seedling*. http://www.grain.org/seedling/?id=292, Accessed 30 January 2008.
Scherr, S.J., 1985. *Agriculture and the Oil Syndrome: Lessons from Tabasco, Mexico*. New York: Praeger.
Slow Food, 2007. Programme for Fifth International Slow Food Congress. Puebla, Mexico, 8–11 November.
Slow Food Foundation, 2007. *International Presidia*. http://www.slowfoodfoundation.org/pdf/Elenco%20EN%2017-05-07.pdf, Accessed 30 January 2008.
Stahlbrand, L., 2003. *Ecolabelling as a Marketing Tool to Support Sustainable Agriculture*. Toronto: World Wildlife Fund.
Stanford, L., 2002. 'Constructing "Quality": The Political Economy of Standards in Mexico's Avocado Industry'. *Agriculture and Human Values*, 19 (4): 293–310.

Tanaka, K. and L. Busch, 2003. 'Standardization as a Means for Globalizing a Commodity: The Case of Rapeseed in China'. *Rural Sociology*, 68 (1): 25–45.

Wilkinson, J., 2005. 'Global Agrifood Chains, Retail and Catering: The Cast of the Fish Sector'. *FAO Corporate Document Repository*. Rome: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org.docrep.007/y5767e/y5767e0j.htm, Accessed 21 December 2006.

Works, M. and K.S. Hadley, 2004. 'The Cultural Context of Forest Degradation in Adjacent Purépecha Communities, Michoacán, Mexico'. *Geographical Journal*, 170 (1): 22–38.

Wright, E.O., forthcoming. Envisioning Real Utopias (unpublished). http://www.ssc.wisc.edu/~wright, Accessed 27 October 2007.

10

Organisasi Migran dan Dampak Kampung Halaman di Meksiko Perdesaan

Jonathan Fox dan Xochitl Bada

Menelaah Masa Depan Perdesaan: Keluar (*Exit*) Atau Bersuara (*Voice*)?

Para ahli ekonomi politik mengoposisikan "keluar" dan "bersuara", sebagai sebuah steno konseptual bagi respon yang mungkin bagi aktor terhadap banyak tantangan.[238] Dalam konteks ini, migrasi kerap dimengerti sebagai pilihan jalan keluar dan dengan demikian menjadi alternatif suara. Secara logika dapat dikatakan bahwa para migran memiliki hak suara dengan modal kaki mereka, dalam pemahaman umum. Seandainya dikotomi tentang "Exit dan Voice" ini bisa bermakna demikian, maka dapat dipastikan bahwa ratusan ribu orang Meksiko yang setiap tahun meninggalkan desa-desa mereka sebetulnya secara tidak langsung sedang memperlemah kapasitas masyarakat sipil perdesaan dalam aksi kolektif dan representasi politik. Bab ini mencoba untuk menjelaskan dimana meski

[238] Lihat karya klasik Hirschman (1970, 1981). Ia menerapkan gagasan ini untuk individu, perusahaan dan masyarakat, baik dalam arena ekonomi dan politik.

keputusan untuk melakukan migrasi tetap bisa dijadikan alternatif bagi suara dalam jangka pendek, namun suara bisa juga diperoleh berbarengan dengan proses perpindahan ini.

Pengertian tersebut didapat setelah melalui sebuah analisa mengenai proses-proses yang melintasi batas dalam mana para migran menjadi satu komunitas transnasional, yang pada gilirannya menciptakan fondasi sosial bagi 'masyarakat sipil migran' yang sedang muncul . Kaum migran Meksiko menunjukkan kapasitas yang semakin besar untuk membentuk organisasi perwakilan mereka sendiri. Selama lebih dari satu dekade , ratusan asosiasi kota asal kaum migran Meksiko yang berbasis di AS telah berhasil mengumpulkan dana dan berkampanye untuk pengembangan masyarakat dan akuntabilitas publin di desa asal mereka. Praktik-praktik keanggotaan komunitas jarak-jauh yang tersebar luas menciptakan pengertian tentang kewarganegaraan ganda.[239] Kerangka bi-nasional untuk memahami masyarakat sipil migran Meksiko yang mulai muncul memungkinkan para analis untuk memperhitung-kan efek umpan balik organisasi migran terhadap relasi kuasa dalam komunitas asal.

Bentuk-bentuk keanggotaan aktif lintasbatas dan multilevel mewakili sebuah dimensi dari proses yang lebih luas tentang pembentukan masyarakat sipil transnasional. Sejauh ini, studi tentang masyarakat sipil transnasional didominasi oleh diskusi-diskusi tentang kampanye advokasi transnasional, seringkali melibatkan kelompok kepentingan publik yang dipolitisasi dan/atau gerakan sosial yang militan. Kampanye-kampanye semacam itu seringkali dideskripsikan sebagai gerakan sosial transnasional, meski dalam praktiknya biasanya melibatkan jaringan atau koa-

[239] Lihat pembahasan konseptual terkait di Fox (2005a).

litasi yang kepadatan aktualnya berada tidak jauh dari definisi gerakan sosial.[240] Namun bagi organisasi sosial dan politik yang paling berbasis-luas yang terlibat dengan jaringan atau mobilisasi lintas-batas, hanya sedikit dari partisipannya yang benar-benar lintas batas (dalam banyak pengertian). Dalam banyak sektor dan wilayah persoalan, keterlibatan dan hubungan transnasional seringkali terbatas bagi sejumlah kecil pemimpin atau staf profesional, yang berperan sebagai perantara antara global dan lokal. Namun beberapa gerakan transnasional yang secara khusus bergerak di isu-isu agraria sedikit berbeda, melibatkan kontak langsung yang mendalam dan luas antar-anggota lintas-batas, sebagaimana dalam kasus gerakan agroekologi Campesino to Campesino (e.g Holt-Gimenez 2006). Dalam konteks ini, ketika mempertimbangkan serangkaian bentuk-bentuk ekspresi gerakan transnasional agraria yang mungkin ada, migran yang datang dari perdesaan yang berhasil melintasi batas untuk berhubungan dengan kampung halaman dan desa mereka juga "dianggap" sebagai bagian dari masyarakat sipil transnasional- bahkan jika persyaratan keterlibatan mereka dibatasi menjadi agenda pembangunan sipil dan komunitas yang dipolitisasi secara tidak terbuka. Sementara organisasi sipil migran yang berbasis wilayah hanya sekali-kali berkonfrontasi secara terbuka dalam sikap mereka terhadap negara, dan hanya sedikit dari organisasi migran berbasis-massa yang mengejar tujuan transformatif,

---

[240] Sebagai contoh, kampanye melawan North America Free Trade Agreement, melibatkan kelompok-kelompok buruh, agraria, hak asasi manusia, lingkungan dan kemasyarakatan, diperdebatkan merupakan 'kasus paradigma' untuk menilai sejauh mana globalisasi dari bawah menyusul globalisasi dari atas . Di hampir semua sektor, dimensi transnasional dari jaringan dan kampanye terbukti untuk sementara (Brooks dan Fox 2002). Untuk perspektif terkait berdasarkan studi tentang kampanye lainnya, lihat lebih Laxer dan Halperin (2003).

migran tersebut diorganisir untuk mempromosikan pengembangan masyarakat dan demokratisasi dalam komunitas asal mereka mungkin mempunyai kepadatan transnasional dan kohesi lebih daripada kampanye lintas-batas yang kurang mengakar dalam masyarakat mereka masing-masing.[241]

Untuk menilai beberapa cara yang mana aksi kolektif migran dapat mendorong demokratisasi perdesaan, bab ini berfokus dalam pola-pola dan dampak partisipasi migran yang terorganisir dalam program 'pengembangan masyarakat "Three-for-One" pemerintah yang sesuai dengan pendanaan .[242] Sebagai konteks, studi ini dimulai dengan tinjauan singkat tentang tren migrasi-ke luar perdesaan, diikuti dengan diskusi tentanghubungan antara konsep keluar, suara dan loyalitas.

Mempercepat Migrasi

Migrasi ke kota-kota besar Meksiko dan ke Amerika Serikat telah lama menjadi jalur untuk melarikan diri dari sempitnya pertanian petani kecil , sering sebagai bagian dari strategi kelangsungan hidup keluarga yang beragam. Sementara migrasi ke AS secara historis terkonsentrasi di wilayah pusat-barat Meksiko, pada 1980-an dan 1990-an migrasi-ke luar menyebar ke pedesaaan di seluruh negeri, serta ke kota-kota besar dan melampaui campuran kelas sosial yang lebih luas. Namun sementara jumlah kaum urban dalam migrasi orang Meksiko ke AS semakin bertambah, kaum migran sebagian besar adalah orang

[241] Salah satu pengecualian dalam konteks Meksiko-AS, dalam arti organisasi massa bi-nasional yang mencapai tujuan transformatif, adalah Bi-National Front of Indegenous Organization (FIOB). Lihat Fox dan Rivera-Salgado (2004).

[242] Pada dinamika demokratisasi perdesaan lebih umum di Amerika Latin, lihat Fox (1990).

perdesaan, seringkali berasal dari desa-desa terpencil dalam minisipalitas asal mereka. Bagi perdesaan Meksiko, pertimbangkan implikasi dari fakta bahwa berjuta buruh pertanian Meksiko yang berhasil memperoleh ijin tinggal permanen AS berdasarkan reforma Imigrasi tahun 1986 sama jumlahnya dengan seperenam dari jumlah penduduk laki-laki dewasa Meksiko waktu itu (Martin 2005, 6). Seiring dengan terus bertambahnya jumlah desa, dari perbatasan wilayah utara sampai ke wilayah Suku Mayan di timur laut, laki-laki dan perempuan muda semakin berharap untuk bisa bermigrasi, ketimbang merajut masa depan mereka di perdesaan Meksiko.

Sementara proses migrasi lintas-batas ini merepresentasikan fase saat ini proses struktural yang yang telah berlangsung selama seabad, langkahnya dipercepat oleh pilihan kebijakan sadar. Dalam forum Harvard tahun 1991, yang kemudian menjadi wakil menteri Pertanian Meksiko, Luiz Tellez, meramalkan perubahan besar dalam pertanian masyarakat Meksiko. Ia memperkirakan bahwa dalam satu dekade mendatang, jumlah populasi pertanian yang aktif secara ekonomi akan mengalami penurunan dari 26 persen menjadi 16 persen—berkat tiga reforma kebijakan perdesaan pemerintaan Salinas— North American Free Trade Agreement, penghapusan subsidi terhadap pendukung produksi bagi pertanian keluarga dan serta reformasi Konstitusional yang mendorong sertifikat individual tanah-tanah reforma agraria.[243]

[243] Untuk analisis dari titik balik politis itu, yang mendahului pemberontakan Zapatista, lihat Fox (1994). Perhatikan bahwa reformasi konstitusional tidak menimbulkan privatisasi dan penjualan tanah individu yang luas. Sebagian besar masyarakat land reform mengikuti hukum sejauh mereka setuju untuk mengkonfirmasi batas-batas tanah kolektif dan tanah keluarga, dan kecenderungan terhadap komodifikasi dan penyewaan tanah yang

Berdasarkan sensus penduduk Meksiko tahun 2000, 25% dari populasi masih mendiami tempat-tempat pemukiman dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa. Hal ini mementahkan ramalan Tellez, khususnya ketika kita lihat bahwa ambang resmi untuk mendefinisikan arti wilayah perdesaan ternyata sangat rendah. Namun,jika dilihat pada jumlah populasi yang 'aktif secara ekonomi' dalam pertanian, maka ramalan Tellez bisa dikatakan sangat tepat mengenai sasarannya. Berdasarkan hasil dari National Employment Survey yang paling baru, dlapangan kerja pertanian mengalami penurunan dari 24% di tahun 1991 menjadi kurang dari 15% di tahun 2005 (INEGI n.d.). Sebuah hasil penelitian lain yang serupa menemukan hilangnya 1,3 juta pekerjaan dalam bidang pertanianantara tahun 1993 dan 2002 (Polaski 2003, 20). Semua data ini menunjukkan adanya perbedaan tajam antarapopulasi yang tinggal *di* perdesaandengan populasi yang hidup *dari* perdesaan. Pertumbuhan jumlah populasi perdesaanyang tidak hidup dari pertanian memiliki implikasi besar bagi masa depan kehidupan publik di perdesaan.

Pada tahun 2000, hanya 6 tahun setelah implementasi NAFTA, data sensus nasional menunjukkan adanya peningkatan angka migrasi internasional, dengan 96,2% dari kotamadya-kotamadya negeri itu melaporkan adanya 'ekspulsi' tenaga kerja internasional. Angka migrasi yang meningkat dikombinasikan dengan rendahnya angka kelahiran mengakibatkan depopulasi yang menyebar luas dalam yang disebut dengan wilayah 'pengirim': antara tahun 2000 sampai 2005, 33% kotamadya Mexico melaporkan angka pertumbuhan penduduk negatif. Sebagai

sudah berjalan lama tersebut diakselerasi, tapi sangat sedikit ejidos yang mengalami tahap akhir privatisasi lengkap - keputusan yang diserahkan hukum ke tangan masyarakat (misalnya, Cornelius dan Myhre 1998).

contoh, di negara bagian Michoacan, antara tahun 1990 dan 2000, 93,8% kotamadya-kotamadya negara melaporkan penurunan populasi, Dengan beberapa kotamadya lain kehilangan lebih dari 9%populasinya selama dekade itu. Populasi negara berkurang 0.1 % setiap tahunnya antara tahun2000 sampai 2005, dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduksebesar 1,2% yang dilaporkan antara tahun 1995 sampai 2000, dengan demikian menjadi negara bagian pertama di negara itu yang melaporkan pengurangan jumlah penduduk sejak berakhirnya Revolusi Mexico (INEGI 2006; CONAPO dikutip dalam Ramos 2007; SEDESO 2004).

Sebagai akibat dari laju migrasi-keluar yang terakselerasi, pengiriman uang ke meroket selama dekade terakhir, dari total sedikit di bawah 3,7 miliar dolar AS pada tahun 1995 menjadi lebih dari 23 miliar dolar AS di tahun 2006, meningkat lima kali lipat hanya dalam satu dekade dan saat ini mewakili 2.7% GDP Mexico dan 66 persen dari eksport minyak. Kebanyakan sumber pendapatan ini kemudian dihabiskan untuk konsumsi dasar (86%) dan prosentase sedang diinvestasikan dalam operasi komersial atau perbaikan komunitas(0,6%) (Banco de Mexico 2007). Investasi dengan remiten kolektif mencapai rata-rata 14 juta dolar AS setiap tahun, merepresentasikan kurang dari 1 persen remiten migran.

Remiten Meksiko terkonsentrasi secara tidak merata di beberapanegara bagian. Tahun 2006, 65,5% dari total remiten keluarga yang dilaporkan mengalir kesembilan negara bagian, termasuk Mexico City dan negara bagian tradisional 'pengirim' di Meksiko tengah (Michoacan, Guanajuato dan Jalisco). Sisanyatersebar di 23 negara bagian. Tidak ada konsensus tentang jumlah pasti remiten di Mexico. Beberapa ahli remiten percaya bahwa angka resminya di bawah perkiraan karena angka itu tidak termasuk*transfer cash*, pensiun yang diterima oleh migran

yang kembali, hadiah, dan berbagai macam bentuk transfer dari para migran kepada sanak keluarga mereka. Ahli-ahli lain mempertanyakan kalkulasi Bank Centraldan percaya bahwa remiten telah dilebih-lebihkan dan dimanipulasi sebagai alat politik, agar para pemimpin politik dapat menggambarkan migran sebagai pahlawan dalam diskursus publik nasional (Lozano Ascencio 2003; Lozano Ascencio dan Olivera Lozano 2005; Leyva Reus 2005).

Keluar dan Bersuara: Dikotomi atau Interaktif[244]

Secara keseluruhan, pada tahun 2000, 14% dari buruh yang terlahir sebagai orangMexico tinggal di Amerika Serikat (Martin 2005,10). Hasil kumulatif dari eksodus orang dewas usia-kerja pasti mempengaruhimempengaruhi prospek bagi masa depan perubahan sosial dan politik di wilayah-wilayah perdesaan, tetapi pola dari pengaruh ini masih belum jelas. Bukan merupakan sebuah kebetulan bahwa para analis di Mexico sering merujuk isu ini sebagai 'persoalan migrasi', meskipun—bagi kaum migran sendiri—akses terhadap pasar buruh AS merepresentasikan sebuah 'solusi'.

Penting untuk diingat kembali bahwa selama dekade pos-NAFTA, Mexico tidak mengalami gerakan proteskaum miskin perdesaan yang berkelanjutan dan dalam cakupan nasional.[245] Pengecuailan dari generalisasi ini yang paling terkenal, gerakan Zapatista yang terkenal, yang berhasil memperoleh simpati dari seluruh negeri, tetapi tetap menjadi aktor sosial yang terikat-secara regional. Pawai

[244] Bagian ini diambil dari bagian dari bab 10 di Fox (2007).

[245] Gerakan Barzón yang terkenal untuk penghapusan utang mencapai lingkup nasional, tapi terutama mewakili produsen komersial ukuran kecil-ke-menengah. Hanya sebagian kecil dari petani Meksiko yang cukup beruntung untuk menerima kredit bank di tempat pertama.

'Countyside Won't Take Any More' yang meluas namun singkat pada tahun 2003 di Mexico City adalah satu-satunya protes petani dalam satu dekade itu yang memiliki signifikansi nasional yang berfokus untuk membuat pertanian keluarga secara ekonomi berkelanjutan. Meskipun mobilisasi jauh lebih luas daripada yang diperkirakan oleh para pengamat yang simpatik, pawai ini berakhir hampir tanpa pengaruh terhadap perdaganan agrikultural nasional dan kebijakan investasi, yang terus sangat bias dengan menguntungkan para produsen yang lebih kaya.[246] Bulan Januari 2008, implementasi final dari ukuran agrikultural NAFTA juga memprovokasi pawai protes petani nasional, meskipun seperti kasus klasik 'sedikit terlambat'.

Kalangan elite politik Mexico dan Amerika Serikat mempresentasikan NAFTA kepada publik AS sebagai sebuah strategi membuka lapangan kerja yang akan mengurangi migrasi, tetapi angka tahunan migrasi-ke luar

---

[246] Tentang bias kelas pada pengeluaran pemerintah Meksiko untuk pertanian, lihat yang secara nominal adalah analisis publik World Bank (2004) namun sedikit diketahui. Sebagian besar analis setuju bahwa konsesi kebijakan pertanian yang sangat sederhana yang nampak dimenangkan oleh protes petani pada tahun 2001 dengan cepat diserap oleh pembayaran bergaya-korporatis kuno kepada organisasi. Setelah para pengunjuk rasa kembali ke rumah, kombinasi dari pengalih perhatian teknokratis dengan intervensi terus-menerus dari kelompok-kelompok petani korporatis tradisional membuat kewalahan perwakilan nasional yang berpartisipasi dalam organisasi independen. PAN yang baru berkuasa menemukan kenyamanan politik dalam memberikan dana secara langsung kepada organisasi petani bergaya-PRI (contoh, Fox dan Haight akan datang). Untuk latar belakang tentang gerakan 'El Campo no aguanta mas', lihat, antara lain, Schwentesius et al. (2004), isu-isu tematis El Cotidiano (No 124, Maret-April, 2004) dan perdebatan yang meluas pada tahun 2003 antara analis perdesaan terkemuka Luis Hernández Navarro dengan Armando Bartra di halaman di harian berhaluan kiri La Jornada.

yang diperkirakan mengalami pertumbuhan yang pesat selama tahun 1990an (Passel dan Suro 2005). Dalam konteks ini, penting untuk mengaji ulang pemilihan umum nasional Mexico tahun 1994. Kebijakan publik yang sekarang sangat diasosiasikan dengan peningkatan angka migrasi-ke luar, terutama penarikan harga-harga sarana produksi, subsidi input dan perlindungan perdagangan bagi biji-bijian dasar, terutama dimulai dari era pemerintahan Salinas (1988-1994). Dalam pengertian ini, pemilu tahun, 1994, seandainya saja sepenuhnya demokratis bagi pemilih di perdesaan, mungkin dapat digunakan sebagai referendum tentang pake kebijakan publik ini.

Berkat gerakan warga negara untuk pengawasan pemilu independen tahun 1994,dipimpin oleh Civic Aliance, laporan mereka menunjukkan bahwa setidaknya setengah dari polling yang dilakukan di perdesaan kerahasiaan suaranya tidak terjamin (Fox 2007). Civic Aliance juga menemukan tekanan jual-beli suara di 35% tempat pemungutan suara. Seperti yang dicatat oleh Hirschman, kerahasiaan surat suara merupakan mekanisme kunci untuk 'menciptakan voice retaliation-proof' (1981,241). Untuk mengatakannya dalam istilah Hirschman, melihat kurangnya suara politik bagi sebagian besar kaum miskin perdesaan, banyak yang memilih keluar. Namun ini bukanlah satu-satunya faktor pendorong migrasi, angka migrasi-keluar memang naik secara substansial selama sisa dekade, mungkin menunjukkan beberapa relasi antara kurangnya suara dengan pilihan untuk keluar—setidaknya pada titik balik politik itu..[247]

[247] Baru-baru ini, analisis stattistik berskala besar Goodman dan Hiskey tentang tingkat kehadiran pemilih dan data survey menemukan bahwa, pada level kotamadya, tingkat migrasi-keluar yang lebih tinggi diasosiasikan dengan tingkat kehadiran pemilih yang lebih rendah dalam pemilihan umum nasional. Pada saat yang sama, tingginya tingkat migrasi diasosiasikan dengan tingkat keterlibatan

Ekspresi paling jelas dari suara politik perdesaan selama periode ini datang dari masyarakat adat Meksiko, yang organisasi sosial lokal dan regionalnya banyak dan secara politik beragam yang berkembang dari tahun 1970-an hingga 1990an (Fox 1996, 2007). Dalam kebangkitan peringatan 500 tahun dari penaklukan Eropa dan didukung oleh gerakan Zapatista, mereka mulai bersatu secara nasional untuk pertama kalinya selama tahun 1990an. Namunselama dekade yang sama, proses migrasi lintas-batas mulai meluas untuk pertama kalinya sampai hampir di seluruh wilayah masyarakat adat Meksiko (Fox dan Rivera-Salgado 2004). Melihat kembali selama dekade terakhir masyarakat adat Meksiko telah melakukan aksi baik "voice" dan "exit" lebih dari sebelumnya.

Sementara wacana konvensional di Meksiko merujuk migran sebagai 'orang yang meninggalkan' komunitas mereka, sebuah lembaga riset yang sedang berkembang tentang aksi koleksif masyarakat migran berdasarkan pada komunitas asal yang sama menunjukkan bahwa banyak migran membawa rasa kemasyarakatan, dan menciptakannya kembali dengan *paisanos* mereka di AS. Rasa identitas kolektif masyarakat sipil yang dimiliki bersama ini diperluas ketika asosiasi kampung halaman membentuk federasi negara bagian asal di Chicago atau Los Angeles, membangun rasa kebersamaan memiliki regional yang mungkin tidak dimiliki migran sebelum mereka pergi.

Pada saat yang sama seiring dengan orang mengakui kemunculan dan konsolidasi komunitas transnasional, yang akan dibahas di bawah ini, seseorang juga harus mengakui bahwa banyak yang bermigrasi *memang* meninggalkan komunitas mereka. Sebagian tidak kembali. Meskipun perhatian luas terhadap volume remiten migran yang

sipin yang dilaporkan yang lebih tinggi di tingkat lokal, yang dapat dikaitkan dengan kemitraan bi-national dengan imigran terorganisir.

semakin besar, minoritas-minoritas substansial tidak mengirim sumber daya untuk menghidupi keluarga mereka. Di tambah, ketika seorang organiser bermigrasi, organisasi mereka jelas menderita kerugian—terutama jika kepemimpinan sudah ada dalam pelatihan mereka, seperti dalam kasus sertifikat koperasi kopi produksi organik (misalnya, Mutersbaugh 2008).

Pola-pola ini menunjukkan bahwa sementara keluar kadang-kadang melemahkan suara, dan di lain waktu dapat saling memperkuat satu sama lain, mungkin keluar juga dapat mencerminkan *kelemahan sebelumnya* suara. Banyak pengamat menunjuk ke wilayah migrasi-keluar jangka panjang dan melihat masyarakat sipil sangat sedikit, namun hubungan sebab dan akibat tidak begitu jelas. Banyak migran meninggalkan daerah di mana masyarakat sipil perdesaan *sudah* tipis. Selain itu, bahkan di daerah-daerah yang telah mengalami aksi kolektif otonom, beberapa kampanye telah menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, dan bahkan lebih sedikit yang dapat menawarkan pilihan masa depan yang layak bagi kaum muda. Tapi kalau kita memperpanjang kerangka temporal dan geografis untuk memperhitungkan interaksi antara keluar dan suara dan memperhitungkan arena bi-nasional ke , muncul cara-cara baru mempertimbangkan hubungan antara keluar dan suara yang serta peran loyalitas sebagai faktor mediasi .

Review ini mengenai tren migrasi-keluar perdesaan dan dilema konseptual yang ditimbulkan oleh hubungan antara keluar dan suara yang menjadi panggung diskusi tentang masyarakat sipil migran Meksiko dan dampak remiten pengembangan komunitas kolektif terhadap pemerintahan desa. Tapi terlebih dahulu, diskusi singkat tentang hubungan antara migrasi keluar dengan tingkat kemiskinan.

Migrasi-keluar dan Tingkat Kemiskinan Perdesaan

Data tentang kotamadya perdesaan yang tersedia menunjukkan bahwa tidak ada korelasi langsung antara tingkat kemiskinan dengan tingkat migrasi-keluar. Dari 2.443 kotamadya di Meksiko, 82 persennya dianggap perdesaan. Seperempat dari kotamadya Meksiko juga dianggap sebagai wilayah masyarakat adat (kategori yang ditetapkan dengan penggunaan bahasa). Data sensus pemerintah menunjukkan bahwa 62,6 persen dari kotamadya perdesaan dan masyarakat adat berada dalam kemiskinan ekstrim, dengan tingkat marginalitas 'tinggi' atau 'sangat tinggi' - indikator yang merujuk terutama pada akses terhadap layanan dasar (air, sanitasi, pendidikan, perumahan, dll). Kotamadya perdesaan ini, berpenghasilan rendah merupakan 20 persen dari populasi nasional (CONAPO 2000).

Tabel 1. Perdesaan dan kotamadya pribumi: migrasi dan tingkat kemiskinan

Intensitas Migrasi	Tingkat marginalitas tinggi dan sangat tinggi (%)	tingkat marjinalitas menengah dan rendah (%)	Tingkat marjinalitas sangat rendah (%)
Sangat tinggi	3,3	4,7	0
Tinggi	7,1	8,4	0,2
Sedang	8,1	7,5	0,9
Rendah	11,9	7,5	1,4
Sangat Rendah	27,8	6,0	0,4
Tak ada Data	4,4	0,1	0
Total	62,6	34,3	3,1

Sumber: Carral Davila (2006,. 99-100), berdasarkan 2.000 data dari National Population Council.

Badan demografi pemerintah menganggap 20 persen dari kotamadya perdesaan Meksiko memiliki tingkat migrasi-keluar yang tinggi atau sangat tinggi. Jika seseorang mengulas kotamadya perdesaan Meksiko dalam hal beragam tingkatan dari apa yang dirujuk oleh wacana pemerintah sebagai "intensitas migrasi" dan "marjinalitas", maka ia bisa mendapatkan pengertian bahwa relasi antara kemiskinan dengan migrasi-keluar tidak se-langsung sebagaimana diasumsikan, seperti ditunjukkan oleh data pada Tabel 1.

Data ini menunjukkan tiga pola yang berbeda antara kotamadya perdesaan, yang ditandai dengan tipografi pada Tabel 1.

(i) Hanya lebih dari 10 persen dari kotamadya perdesaan mengalami baik kemiskinan yang tinggi maupun tingkat migrasi yang tinggi. Dampak dari program anti-kemiskinan pemerintah maupun remiten sangat terbatas.[248]

(ii) Sekitar 20 persen dari kotamadya perdesaan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan dari 'intensitas migrasi' di tingkat menengah, dan cenderung untuk meningkatkan angka migrasi-keluar di masa depan, karena ketiadaan investasi dalam pertanian keluarga yang secara substansial meningkat .

(iii) 13 persen yang lain dari kotamadya perdesaan memiliki tingkat migrasi keluar yang tinggi dengan tingkat kemiskinan "sedang". Di sini dampak potensial program anti-kemiskinan pemerintah dan remiten tampak lebih signifikan.

[248] Program unggulan kesejahteraan pemerintah federal, yaitu program transfer uang tunai Oportunidades bersyarat, muncul untuk mencapai bagian populasi perdesaan termiskin yang lebih besar daripada menerima remiten migran (contoh, Munoz 2004).

Pendekatan untuk memahami interaksi antara kemiskinan dan tingkat migrasi ini diperrumit oleh fakta bahwa kotamadya perdesaan bukanlah jurisdiksi pemerintah yang 'paling lokal '. Mereka merujuk kepada distrik-distrik lokal daripada ke desa-desa tertentu, dan karena itu biasanya mencakup sebuah 'pusat kota' dan sejumlah desa-desa terpencil dan dusun (juga dikenal sebagai 'lokalitas'), yang cenderung memiliki tingkat kemiskinan dan migrasi-kelua yang lebih tinggi daripada pusat kota. Oleh karena itu data resmi kotamadya mereratakan kemiskinan dan tren migrasi dalam berbagai jenis masyarakat ini. Kebanyakan data migrasi-keluar yang resmi tidak cukup terpilah-pilah sampai ke tingkat 'lokalitas' untuk memungkinkan analisis yang lebih tepat tentang hubungannya dengan tingkat kemiskinan.

Dari sudut pandang pemahaman tentang dinamika demokratisasi perdesaan, sangat penting untuk mengenali bahwa di sebagian besar perdesaan Meksiko, desa-desa terpencil secara politik disubordinasi ke pusat-pusat kota, baik secara formal maupun informal. Banyak kotamadya perdesaan berada di tengah-tengah "transisi rezim" jangka panjang, sebagian besar tak terlihat bagi orang luar, di mana komunitas terpencil berkampanye untuk hak atas sumber daya dan pemerintahan sendiri vis-à-vis pusat kota (Fox 2007). Inilah konteks dalam mana asosiasi kampung halaman kaum migran yang terorganisir , bersama-sama dengan komunitas asal mereka di desa-desa terpencil, tekanan kota dan otoritas negara untuk mendapatkan kedudukan, suara dan representasi.

Masyarakat Sipil Migran dan Asosiasi Daerah Asal [249]

Sebanyak ratusan ribu migran Meksiko bekerja sama dengan paisanos mereka untuk mempromosikan "Philan-

[249] Teks berikut mengacu pada Fox (2005b). Perhatikan bahwa

thropy from below", mendanai ratusan initiatif pengembangan masyarakat di kota asal mereka. Puluhan ribu mendaftar untuk menggunakan hak-yang-baru-dimenangkan untuk memberikan suara pemilihan presiden Meksiko pada tahun 2006. Banyak lagi yang terlibat dengan komunitas AS mereka - sebagai pekerja yang terorganisir, orang tua, anggota kongregasi religius dan pemilih yang dinaturilisasikan. Selain itu, beberapa migran Meksiko berusaha untuk menjadi anggota penuh baik dalam masyarakat AS maupun Meksiko pada saat yang sama, menciptakan praktik-praktik ' 'sipil dengan dua kebangsaan'.

Apa saja implikasi dari menyatukan tiga kata: 'masyarakat sipil migran?' Secara sederhana, masyarakat sipil migran mengacu pada *keanggotaan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga publik yang dipimpin-migran*. Secara khusus, ini mencakup empat arena yang sangat nyata dari aksi kolektif. Setiap arena tersusun atas pelaku, sedangkan setiap rangkaian aktor juga menyusun sebuah arena. Arena-arena ini mencakup ruang publik otonom (seperti pertemuan budaya dan politik skala besar), LSM yang dipimpin migran, media massa yang dipimpin migran, serta keanggotaan organisasi yang dipimpin migrani.[250]

Keanggotaan organisasi tersusun terutama atas migran yang berkisar dari asosiasi daerah asal (HTAs) hingga organisasi-organisasi pekerja dan jemaat agama. Karena fokusdi sini adalah dampak lintas-batas terhadap komunitas daerah asal, diskusi ini akan terbatas pada HTAs. Hometown Asosiasi adalah organisasi keanggotaan migran yang dibentuk oleh orang-orang dari komunitas

'masyarakat sipil migran' muncul dari namun berbeda dengan komunitas transnasional, karena mereka mungkin atau tidak terikat dengan lingkup publik.

[250] Untuk pembahasan rinci tentang arena masyarakat sipil migran, lihat Bada et al. (2006) dan Fox (2007).

dengan daerah asal yang sama. Meskipun kebanyakan dimulai sebagai kelompok yang sangat informal, mulai pergantian abad telah menjadi organisasi formal. HTAs berfungsi sebagai jaringan dukungan sosial, serta pemancar budaya dan nilai-nilai kepada generasi yang lahir di AS. Sering kali sebagai respon terhadap dorongan pemerintah Meksiko, banyak dari klub translokal kemudian bergabung dengan klub lain dari negara asal mereka untuk membentuk federasi. Bentuk-bentuk representasi yang membesar meningkatkan pengaruh migran dengan pemerintah negara asal mereka. Mereka menjadi terlibat dalam proyek-proyek pembangunan sosial atas nama komunitas asal mereka, serta dalam pembelaan atas hak-hak migran di wilayah pemukiman mereka.

Konsulat Meksiko telah mendaftar lebih dari 600 klub semacam itu (Rivera-Salgado et. al. 2005). Departemen Pembangunan Sosial federal juga sedang mengembangkan basis data tentang HTAs Meksiko di Amerika Serikat dan Kanada dan sejauh ini mereka telah menemukan 815 kelompok. Namun, angka ini belum terpilah secara geografis (SEDESOL 2006). HTAs Meksiko sangat terkonsentrasi di California dan Illinois, dengan 86,5 persennya terkonsentrasi di wilayah metropolitan Los Angeles dan Chicago. Mereka juga memperluas kelompok mereka di New York City (Cordero-Guzmán dan Quiróz-Becerra 2005; Smith 2006). Sementara mereka terkonsentrasi di kota-kota besar AS, sebagia besar memiliki akar perdesaan di Mexico.[251] Masing-masing memiliki keanggotaan inti mungkin rata-rata dua lusin keluarga, beberapa dengan ratusan atau lebih. Banyak anggota HTAs yang

[251] Salah satu dari sedikit federasi HTA-HTA yang berlokasi terutama di daerah perdesaan AS adalah Alianza LUDA (Latinos Unidos de América), yang meliputi 16 klub terutama berbasis-buruh tani yang di masyarakat perdesaan kecil California's Salinas Valley.

relatif mapan di AS, dan banyak dari para pemimpin mereka memiliki stabilitas ekonomi dan merupakan pemukim legal atau warga negara AS (yang memungkinkan mereka untuk sering melakukan perjalanan bolak-balik).

Sulit untuk mengukur dengan tepat berapa banyak migran berpartisipasi, terutama mengingat variasi yang luas dalam ukuran dan kegiatan setiap HTA dan federasi. Selain itu, pendaftar resmi konsuler memasukkan beberapa kelompok yang hanya ada di atas kertas, sementara beberapa asosiasi yang aktif memilih untuk tidak mendaftar. Sebuah survei skala yang luar biasa besar terhadap migran Meksiko yang relatif baru menemukan bahwa 14 persen responden termasuk dalam semacam asosiasi daerah asal (Suro 2005). Namun, sebuah survei nasional yang jauh lebih kecil menemukan bahwa hanya 6 persen dari orang Meksiko kelahiran luar negeri yang diwawancarai dilaporkan menjadi anggota dalam organisasi sipil etnis imigran atau organisasi sosial (Waldinger 2007).[252]

HTA-HTA Meksiko masa kini memiliki sejarah panjang, dengan kelompok Zacatecan pertama di California bisa dilacak kembali ke tahun 1962 (Montezuma 2005). Tapi jumlah dan keanggotaan mereka meledak dalam 15 tahun terakhir, sebagai akibat dari beberapa faktor yang menyatukan. Di dalam AS, regularisasi besar-besaran pekerja yang tidak terdokumentasikan yang mengikuti reforma imigrasi pada tahun 1986 memfasilitasi baik peningkatan ekonomi maupun kebebasan bergerak melintas-batas bagi jutaan migran. Di sisi Meksiko, pemerintah mengerahkan kekuatan menyatukan aparatur konsuler yang luas, mengumpulkan orang-orang dari komunitas

[252] Apakah angka-angka ini dianggap tinggi atau rendah tergantung pada kerangka rujukan komparatif seseorang.

dengan daerah asal yang sama dan menawarkan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan pendanaan untuk mendorong remiten sosial kolektif, melalui program Three-for-one yang sesuai dengan pendanaan. Meskipun kebijakan ini dimulai sebagai respon terhadap tekanan dari imigran Zacatecan yang terorganisasi, ini juga sebagai perangsang kuat untuk migran lain untuk berkumpul dalam organisasi formal untuk pertama kalinya. Memang, banyak hubungan sosial dan sipil transnasional berkembang di luar klub dan federasi (Fitzgerald 2000). Selain itu, negara Meksiko mengubah nada hubungannya dengan diaspora dengan secara resmi mengizinkan kewarganegaraan ganda untuk pertama kalinya.[253] Sementara kebanyakan klub muncul secara mandiri, dari bawah, banyak federasi tingkat negara bagian dibentuk melalui keterlibatan dengan negara Meksiko (Goldring 2002; González Gutiérrez 1997).[254]

---

[253] Perhatikan bahwa diskusi penuh tentang potensi dampak politik negara asal migran dalam arena pemilu adalah di luar ruang lingkup studi ini. Secara singkat, dimulai pada akhir 1980-an, pemimpin sipil migran mulai berkampanye untuk hak suara, akhirnya meraih kemenangan parsial yang memperbolehkan migran yang membawa kartu suara mereka untuk mengendalikan proses birokrasi yang kompleks untuk memberikan suara melalui surat pada tahun 2006. Kurang dari 1 persen dari kira-kira pemilih migran yang memenuhi syarat yang benar-benar berpartisipasi, dan nampaknya tidak untuk membuat perbedaan apapun bahkan dalam hasil nasional yang sangat dekat. Sementara banyak migran Meksiko yang pasti dipolitisasi, energi itu belum sepenuhnya diungkapkan melalui proses pemilu partisan lintas- batas. Oleh karena itu aman untuk mengatakan bahwa sejauh ini, dampak sipil dan politik lintas-perbatasan terbesar migran Meksiko berada di tingkat masyarakat. Tentang kampanye hak untuk memilih migran, dilema dan hasil, lihat arsip jurnal sipil bi-nasional MX Sin Fronteras (http://www.mxsinfronteras.com).

[254] Untuk lebih lanjut tentang HTA-HTA Meksiko, lihat juga, antara lain, Bada (2004a, 2004b, 2004c, 2008), Escala Rabadán dan Zabin (2002), Fitzgerald (2000, 2004), Lanly dan Valenzuela (2004), Montezuma (2003a, 2003b), Orozco et al. (2004), Rivera-Salgado

Remiten Kolektif dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Daerah Asal

Seiring waktu, pembahasan akademis dan kebijakan tentang dampak migrasi pada komunitas pengiri telah bergeser dari fokus sebelumnya mengenai hilangnya modal manusia, menjadi sebuah perdebatan tentang apakah remiten keluarga memberikan kontribusi kepada lebih dari subsistensi keluarga, dan apakah temiten dapat menjadi pengumpil untuk penciptaan lapangan kerja (Goldring 2004). Dalam hal dikotomi yang sering diajukan antara penggunaan remiten untuk konsumsi vs investasi, pengalaman yang terdokumentasikan dengan usaha berkelanjutan untuk menciptakan pekerjaan-di luar skala yang sangat kecil sangat terbatas, setidaknya sejauh ini.[255] Ada banyak alasan kuat mengapa hasil dari investasi penciptaan lapangan pekerjaan dari remiten terbatas, termasuk distribusi tanah yang tidak merata, penawaran dan permintaan yang tidak sesuai, kurangnya kapasitas teknis, lingkungan kebijakan yang kurang ramah, daya tarik yang lebih besar dari barang publik vs swasta (dalam kasus remiten kolektif) dan kesempatan investasi yang sangat terbatas di banyak masyarakat pengirim. Selain itu, upah yang biasanya yang ditawarkan oleh migran mikro-investor migran jarang lebih baik dari upah yang berlaku di perdesaan, yang membatasi insentif untuk tinggal di rumah alih-alih pergi untuk mencari upah yang lebih tinggi di Amerika Serikat.

---

dan Escala Rabadán (2004), M Smith (2003), R Smith (2003, 2006), Smith dan Bakker (2008) dan Williams (2004).

255 Lihat Garcia Zamora (2005a, 2005b, 2006). Untuk kritik heterodoks dalam diskusi konvensional tentang remiten dan pembangunan, lihat Declaración de Cuernavaca dari Migration and Development Network, di http://www.migracionydesarrollo.org. Untuk terjemahan bahasa Inggris, lihat Enlaces News, No 10, Agustus 2005 di http://www.enlacesamerica.org.

Di negara bagian Michoacán, beberapa proyek penciptaan lapangan kerja dengan menggunakan remiten kolektif dan individu telah dilaksanakan, dengan hasil yang beragam. Banyak yang berjuang untuk bertahan hidup terlepas dari kontribusi keuangan berulang kali dari pemerintah untuk mencegah kebangkrutan, sementara yang lain telah gagal setelah beberapa tahun operasi (Bada 2008). Negara bagian ini adalah pelopor dalam melaksanakan proyek-proyek pertanian dengan remiten kolektif, menggunakan model koperasi yang membutuhkan partisipasi dari setidaknya 10 investor migran. Namun, koperasi produksi petani di Mexico telah memiliki rekam jejak yang tidak rata, dan negara bagian Michoacán tidak terkecuali, dengan hasil yang terbatas setelah bertahun-tahun upaya pemerintah negara sejak restrukturisasi ekonomi akhir 1980-an (Gledhill 1995, 212).

Sejauh ini, dampak utama migran pada struktur produktif masyarakat perdesaan adalah melalui penarikan tenaga kerja mereka, bukan melalui investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Namun mereka memang sering mempengaruhi kehidupan politik dan sipil. Apakah mereka mendorong demokratisasi lokal? Apakah mereka mempengaruhi kesempatan perempuan untuk partisipasi dan representasi? [256] Banyak partisipan dan pengamat berharap bahwa HTA-HTA memiliki dampak demokratisasi, meskipun bukti itu belum jelas. Migran yang kembali jelas memainkan peran kunci dalam kehidupan publik daerah asal sebagai individu. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh agensi pendukung migrasi pemerintah negara bagian Michoacán, 37 persen dari 113 walikota yang

[256] Untuk analisis bi-nasional tentang pengorganisasian migran Meksiko dan gender, lihat Goldring (2004), Stephen (2007) dan Maldonado dan Artía Rodríguez (2004).

berkuasa di negara bagian itu selama 2002-2004 adalah mantan migran (Bada 2004c).

Tapi kenyataan bahwa beberapa migran kembali untuk mengisi peran kepemimpinan lokal tidak menjawab pertanyaan tentang dampak sipil dan politik HTA-HTA. Secara lebih umum, sampai di tingkatan apakah asosiasi daerah asal mereproduksi budaya politik yang mendominasi Meksiko pada abad kedua puluh? Kaum optimis sering menyarankan bahwa masyarakat sipil yang terorganisir menghasilkan nilai-nilai dan praktek demokrasi, dan ini kadang-kadang terjadi. Tetapi masyarakat sipil juga membawa beban sejarah, dan terpotong-potong oleh hirarki dan ketidaksetaraan gender, kelas dan kelompok etnis, serta warisan ideologi politik yang kurang demokratis. Namun demikian, banyak federasi, begitu pula beberapa HTA, berkumpul bersama-sama untuk menanggapi inisiatif pemerintah Meksiko. Jika seseorang menafsirkan relasi ini melalui lensa relasinegara-masyarakat di Meksiko, maka strategi pemerintah ini merepresentasikan baik respon terhadap tuntutan nyata dari bawah, maupun sebagai saluran institusional untuk mengatur hubungan dengan masyarakat sipil imigran. Pada prinsipnya, berbeda dengan upaya pemerintah serupa *di* Meksiko, migran di AS kurang rentan terhadap manipulasi klientelistik, tapi beberapa laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama sulit mati.[257]

Sementara dalam beberapa kasus bertahannya budaya politik masyarakat asal melintasi perbatasan menopang clientelism yang kokoh, dalam kasus lain rasa keanggotaan

[257] Sebagai contoh, studi Fitzgerald (2004) tentang politik komunitas lintas batas/daerah asal dalam serikat buruh lokal California yang dipimpin migran menunjukkan bahwa "politik lama'' dapat bertahan melintasi perbatasan dan triangulasi ke kampung halaman untuk melibatkan masyarakat asal.

komunitas lokal yang kuat mendasari kohesi sosial jarak jauh. Memang, banyak komunitas adat yang memiliki kriteria yang kuat, eksplisit untuk menentukan kewarganegaraan setempat, berdasarkan pada tingginya harapan akan ayanan masyarakat gratis dan perpajakan informal (Fox 2006a). Siring komunitas-komunitas ini menjadi lebih terlibat dalam imigrasi, beberapa telah menciptakan pendekatan fleksibel untuk memungkinkan keanggotaan jarak jauh, memungkinkan migran untuk diminta kembali untuk mengabdi untuk menghabiskan waktu kurang dari biasanya, atau membayar orang lain untuk menutupi iuran mereka (Kearney dan Besserer 2004). Dalam satu kasus Oaxacan, migran yang kembali untuk melakukan kepemimpinan komunitas membentuk koalisi de facto dengan perempuan yang tereksklusi secara lokal untuk mengusir bos-bos lokal yang sudah mengakar (Maldonado dan Artía Rodríguez 2004).

Namun demikian, tingginya tingkat migrasi secara langsung merusak tradisi-tradisi masyarakat adat yang sangat bergantung pada sebagian besar populasi laki-laki dewasa yang menyediakan layanan pada satu waktu. Karena masyarakat tidak bisa mencegah migrasi, maka beberapa telah menemukan cara untuk menghalagi keluar dengan membuat jalan kembali lebih sulit. Sebagai contoh, para tetua desa dapat memutuskan untuk tidak fleksibel dalam hal keanggotaan jarak jauh, bersikeras bahwa jika penduduk desa tidak kembali untuk memberikan layanan mereka, mereka beresiko kehilangan status kewarganegaraan setempat. Hal ini mengandung beban yang jelas dan simbolis , hak atas tanah bisa hilang, dan migran yang tidak kembali saat dipanggil bisa kehilangan hak mereka untuk dimakamkan di pemakaman desa. Ini merupakan apa yang dikenal sebagai 'kematian sipil' (Mutersbaugh 2002).

Pertanyaan yang luas tentang dampak politik-sipil komunitas asal migran perlu dibongkar setidaknya dalam

dua cara. Pertama, sampai di mana HTA-HTA sendiri menciptakan nilai-nilai dan praktek demokrasi ? Sejauh ini, penelitian yang membandingkan praktek-praktek internal berbagai federasi negara yang berbeda menemukan berbagai praktek, dari yang lebih sampai yang kurang demokratis (Rivera-Salgado dan Esacala Rabadán 2004). Pertanyaan kedua akan berfokus pada dampak mereka terhadap komunitas asal. Pertanyaan-pertanyaan ini berbeda karena, pada prinsipnya, klub daerah asal bisa sangat mewakili konstituen mereka yang berbasis US, tetapi belum tentu penduduk non-migran.

Mengapa seseroang mengharapkan klub imigran untuk mendorong demokratisasi dalam komunitas asal? Mereka yang mengirimkan remiten kolektif untuk investasi komunitas memberatkan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Secara historis, mereka yang membayar pajak terbiasa untuk menuntut beberapa bentuk representasi, yang mengingatkan metafor keluar, suara dan loyalitas. Dalam pandangan ini, remiten kolektif adalah berkat migrant yang keluar, mereka ada karena kesetiaan mereka, dan mereka kemudian cenderung mendorong penggunaan suara.

Praktik kewarganegaraan tersebut menunjukkan hipotesis bahwa HTA-HTA cenderung menganggap pemerintah lokal dapat betanggungjawab.[258] Namun, bahkan jika kebanyakan klub s secara internal demokratis, dan bahkan jika mereka menganggap pemerintah daerahbertanggung jawab (terhadap 'donor-donor' HTA), tidak niscaya menciptakan demokratisasi dalam komunitas asal. Akuntabilitas merujuk pada sebuah relasi kuasa, *checks and balances*, dalam kasus ini antara konstituensi tertentu dengan pemerintah lokal -tetapi tidak niscaya vis-

[258] Lihat terutama Burgess (2005, 2006) dan Williams (2004).

à-vis mayoritas komunitas (baik yang didefinisikan dalam istilah lokal *atau* dalam translokal). Apakah non-migran berperan dalam menentukan cara menginvestasikan remiten kolektif? Bagaimana pilihan ditimbang antara proyek-proyek infrastruktur yang digunakan migran pada kunjungan tahunan ke rumah vs proyek-proyek yang mungkin memiliki dampak yang lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari non-migran (misalnya, rodeo rings vs sistem pengairan)? Seharusnya tidak mengherankan bahwa relasi antara migran dan para walikota tidak selalu mudah, apalagi sekarang pemilihan lokal yang lebih demokratis di banyak daerah di Meksiko.

Program Pengembangan Masyarakat Migran *Three-for One*

Program pembangunan masyarakat Three-for-One dengan dana yang sesuai adalah contoh langka sebuah program pengembangan yang muncul untuk merespon langsung terhadap tekanan masyarakat sipil -dalam kasusini dari masyarakat sipil migran, dimulai dengan sebuah program di tingkat negara bagian Zacatecas. Program ini memungkinkan migran yang terorganisir untuk mengusulkan gagasan proyek pengembangan masyarakat, terutama untuk kota-kota kecil dan desa, yang dibiayai dengan remiten kolektif. Pemerintah federal, negara bagian dan kotamadya kemudian memeriksa proposal. Jika disetujui, masing-masing level pemerintahanmengkontribusi dana yang sesuai. Pada prinsipnya, komite-komite lokal mengawasi pelaksanaan proyek. Oleh karena itu program ini membuka jendela pada keseimbangan kekuasaan dan negosiasi antara aktor-aktor pemerintahan dan masyarakat sipil yang berbeda.

Ternyata sulit untuk menilai pengaruh migran dalam pemilihan proyek Three-for-One. Pada awalnya, aturan pelaksanaan program Three-for-One menyatakan bahwa

setiap kelompok warga negara yang terorganisir berhak untuk mengajukan proyek, tetapi situasi itu berubah pada tahun 2004, ketika lobi federasi HTA membatasi akses terhadap kelompok-kelompok migran yang terorganisir. Akibatnya, sistem baru telah menciptakan beberapa ketegangan dalam masyarakat perdesaan yang tidak memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok imigran yang terorganisir di Amerika Serikat, karena sistem baru ini mengeksklusi inisiatif warga negara yang terorganisir secara lokal dari akses terhadap sumber pendanaan proyek potensial. Seperti disebutkan di atas, banyak komunitas perdesaan berpenghasilan rendah tidak memiliki tingkat migrasi keluar yang tinggi- meskipun mereka mungkin memiliki akses ke yang lain, program-program anti-kemiskinan berskala lebih besar, seperti dana kota reguler, atau Micro-Regions programme federal.

Penelitian tentang hubungan antara HTAs dengan anggota komunitas yang tinggal di-rumah dalam proses pengambilan keputusan masih baru muncul. Namun, dalam survey tahun 2004 evaluasi resmi terhadap anggota HTA dari enam negara bagian, 62 persen anggota klub yang diwawancarai menyatakan bahwa seleksi proyek diputuskan oleh konsensus bulat dan 38 persen melaporkan bahwa keputusan seleksi proyek dibuat oleh suara mayoritas, menunjukkan tingkat demokratisasi dalam struktur HTA (Servicios para el Desarrollo Profesionales Económico 2005).

Menggoyang keseimbangan antara partisipasi dari para pejabat pemerintah lokal, penerima manfaat proyek dengan kelompok imigran dalam memilih proyek Three-for-One telah terbukti sedikit menantang. Contohnya, staff kotamadya mengeluh bahwa pemerintah lokal diwajibkan untuk memilih proyek yang bukan prioritas dan mereka menunjukkan sikap frustrasi karena harus melaporkan pada migran mengenai kemajuan proyek dan pengeluarannya.

Di sisi lain, keluhan utama para penerima keuntungan adalah bahwa mereka hanya bisa mengajukan proyek dengan persetujuan dari kelompok imigran yang terorganisir (Profesionales Servicios para el Desarrollo Económico 2005). Secara umum, penelitian dan laporan-laporan media tentang peran HTA-HTA cenderung meremehkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang tinggal di rumah dalam banyak proyek pengembangan masyarakat. Memang, penelitian lapangan Bada (2008) di Zacatecas dan Michoacán mengungkapkan bahwa lebih dari setengah proyek-proyek yang dikunjungi di kedua negara bagian melibatkan dana yang disumbangkan baik oleh masyarakat yang tinggal di rumah maupun migran yang terorganisir.

Baru-baru ini, sebuah studi terhadap 13 komunitas di tiga kotamadya Zacatecas yang menerima dana Three-for-One menemukan bahwa HTA-HTA mereka di AS telah menawarkan dukungan mereka untuk proyek-proyek yang dipimpin oleh anggota masyarakat yang tinggal di rumah demi mendapatkan persetujuan untuk pendanaan proyek Three-for-One. Strategi ini dirancang untuk memenuhi persyaratan bahwa proyek-proyek harus secara eksklusif diajukan oleh migran terorganisir (García de Alba Tinajero et al. 2006, 224). Pola kerjasama antara migran dengan anggota masyarakat yang tinggal di rumah ini juga muncul dalam survei nasional, yang menemukan bahwa 59 persen penduduk desa menyumbangkan sejumlah uang untuk proyek Three-for-One (Secretaria de la Función Publica 2006). Beberapa HTA merespon bahwa mereka membiayai proyek-proyek ini secara tidak langsung, karena beberapa kontribusi keluarga lokal dimungkinkan oleh remiten.

Dalam penelitian Bada tentang puluhan proyek yang dibiayai melalui Three-for-One di negara bagian Michoacán, baik walikota maupun anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka memberikan kontribusi secara

ekstensif untuk proyek-proyek infrastruktur, baik melalui usaha penggalangan dana lokal atau dengan tenaga kerja masyarakat yang tidak dibayar (dikenal sebagai *faenas*, atau *tequio*, dalam masyarakat adat). Mengakui partisipasi baik dari 'mengirim' dan 'menerima' akhir dari komunitas transnasional merupakan langkah penting untuk mempertahankan partisipasi tanpa menimbulkan konflik intra-masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang telah menyaksikan tatanan sosial mereka melemah akibat kepergian besar-besaran dari begitu banyak orang dewasa yang bekerja.

Menurut pejabat Departemen Pembangunan Sosial, persyaratan program bahwa federasi migran yang terorganisir-lah yang memilih proyekmenyulitkan upaya untuk memaksimalkan pengaruh pendanaan anti-kemiskinan. Sebagaimana diindikasikan oleh data pada Tabel 1 , banyak dari kotamadya berpenghasilan terendah tidak menghasilkan sejumlah besar migran internasional; yang lain menghasilkan terutama migran domestik, yang mengirimkan remiten lebi sedikit dan bukan subyek dari program.[259] Perwakilan federal untuk program yang sesuai dana di Morelia menguatkan keprihatinan tentang kesulitan untuk menyalurkan sumber daya ke kotamadya yang paling miskin ini:

> Salah satu masalah yang kita hadapi dalam menyalurkan sumber dayakepada 35 kota termiskin ini adalah bahwa,

[259] Beberapa walikota dari kotamadya berpenghasilan rendah juga melaporkan bahwa bahkan ketika mereka menemukan kelompok-kelompok ekspatriat di AS, mereka 'tidak mau berpartisipasi karena mereka takut untuk memberikan informasi pribadi mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka mengirimkan surat berkomitmen untuk menyumbangkan dana, pemerintah Meksiko akan melaporkan mereka ke kantor Imigrasi di Amerika Serikat dan mereka akan dideportasi' (wawancara Bada, Morelia, Michoacán, Juli, 2004). Semua terjemahan wawancara dilakukan oleh penulis.

> misalnya, komunitas-komunitas ini tidakmemiliki air minum tapi migran mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki alun-alun desa atau mereka ingin memperbaiki gereja. Mereka memiliki masalah limbah tapi migran ingin membangun sebuah *rodeo rings*. Kami mencoba untuk mendorong mereka untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada kebutuhan segera dan dasar tetapi kita tidak dapat memaksa mereka. . . . Kami membiarkan komite validasi [tingkat negara] memilih proyek dengan manfaat tertinggi untuk didukung dengan pendanaan masyarakat.[260]

Namun otoritas lokal juga berbagi tanggung jawab atas banyak keputusan investasi 'pembangunan masyarakat' yang memiliki sedikit hubungan dengan penurangan kemiskinan. Para walikota tampaknya lebih tertarik untuk mendanai proyek infrastruktur publik yang lebih mudah terlihat . Sebaliknya, proyek pembuangan kotoran dan air minum di daerah terpencil tidak midah dilihat. Lagi pula, persyaratan bahwa komite imigran dan pemerintah lokal harus setuju dengan proposal proyek juga dapat mendorong sebuah pendekatan 'angka penyebut yang sama yang paling rendah'.

Namun demikian, terlepas dari kendala-kendala ini, sebuah fraksi substansial dari proyek Three-for-One yang memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. Tabel 2 menunjukkan distribusi sektoral proyek, menurut sebuah evaluasi eksternal resmi. Data tersebut memperlihatkan dengan jelas preferensi kuat terhadap barang-barang publik seperti jalan, air minum, pelayanan kesejahteraan, trotoar dan listrik, namun hanya fraksi kecil yang diinvestasikan dalam proyek produktif.

---

[260] Wawancara Bada dengan pejabat Departemen Pembangunan Sosial di Morelia, Mei 2005.

Relasi kuasa antara migran yang terorganisasi dengan otoritas kota juga dipengaruhi oleh komite proyek paralel, yiatu kelompok warga yang diorganisir di sekitar proyek-proyek infrastruktur yang disetujui yang didanai melalui program Three-for-One. Komite-komite ini sering dipilih dalam majelis masyarakat atau dipilih oleh pemimpin HTA untuk mewakili mereka dalam berhubungan dengan pemerintahan tiga tingkat. Fungsi utama mereka adalah untuk mengawasi proses konstruksi. Pada tahun 2006, sebuah survei pemerintah nasional menemukan bahwa 87 persen dari 91 proyek Three-for-One memiliki komite paralel yang disusun secara resmi (Secretaria de la Función Publica 2006). Namun demikian, sebagian besar komite ini lemah, sebagian karena pelatihan yang buruk dan tingkat baca rendah. Saat ini, di negara bagian Michoacán, tidak lebih dari 10 persen dari komite-komite ini bekerja dengan baik dan sangat sedikit yang memiliki daya tawar yang efektif dengan pemerintah kota dan pemimpin HTA.[261] Mereka juga dihalangi oleh tidak adanya pembagian kerja yang jelas dengan HTA-HTA yang berbasis US. Selain itu, HTA-HTA masih memiliki mekanisme akuntabilitas yang terbatas vis-à-vis konstituen mereka sendiri. Namun demikian, keberadaan struktur pengawasan baru berbasis translokal merupakan langkah pertama menuju mewakili suara masyarakat di pemerintah kota yang sebelumnya kurang terwakilkan- terutama mengingat konteks yang lebih luas dari subordinasi desa-desa kepada pemerintah kota yang berbasis di pusat kota.

Memang, ketika seseorang menguji apakah proyek pengembangan komunitas Three-for-One berlokasi di pusat kotamadya vs komunitas terpencil, pola ini dengan jelas

[261] Komunikasi pribadi dengan seorang anggota staf Migrant Affairs State Office, 8 Januari 2006.

Tabel 2. Kategori investasi pembangunan komunitas Three-for-One, 2002-2005

Jenis proyek	Rata-rata saham proyek 2002-2005 (%)
Pemasaran makanan	0,32
Air minum	7,12
Drainase	4,95
Dukungan untuk produksi primer	1,02
Kesejahteraan sosial dan layanan komunitas	15,66
Jalan perdesaan	8,80
Jalan bantu	10,68
Layanan kesehatan	2,20
Perencanaan pembangunan Regional	1,31
Irigasi	0,96
Elektrifikasi	7,55
Dukungan produksi dan produktivitas	1,88
Infrastruktur Olahraga	3,39
Infrastruktur pendidikan	4,32
Infrastruktur peternakan	0,34
Trotoar	14,60
Tempat sejarah dan budaya	1,58
Urbanisasi	14,11
Perlindungan daerah aliran sungai dan wilayah federal	0,15
Perumahan	0,20

Sumber: Servicios para el Desarrollo Profesionales Económico (2005, hal 38-40)..

menyokong desa yang lebih kecil. Hal ini konsisten dengan pandangan yang luas bahwa tingkat migrasi-keluar dalam komunitas terpencil lebih tinggi daripada di pusat kota. Sebagaimana yang diindikasi dalam Tabel 3, penekanan pada komunitas terpencil berlaku untuk semua negara bagian utama yang terlibat dalam program Three-for-One—dengan pengecualian utama negara bagian Jalisco,

di mana laporan lapangan menunjukkan bahwa para walikota seringkali lebih berpengaruh daripada organisasi imigran dalam membuat keputusan proyek.[262]

Tabel 3. Persentase proyek pengembangan masyarakat migran di luar pusat kota

Negara	2002-2005%
Guanajuato	82
Guerrero	84
Hidalgo	66
Jalisco	48
Michoacán	73
Oaxaca	58
Veracruz	65
Zacatecas	65

Sumber: Burgess (2006 hal.113)

Pola yang condong pada komunitas terpencil berpendapatan-lebih rendah di program sebagai sebuah keseluruhan konsisten dengan wawancara lapangan Bada di negara bagian Mochoacan, dimana kapasitas HTA untuk memobilisasi dan melobi meningkatkan suara dan posisi komunitas terpencil vis-a-vis otoritas kotamadya. Perangkat paling penting bahwa HTA-HTA harus meningkatkan alokasi dana untuk komunitas yang kurang terawat adalah

[262] Perhatikan juga bahwa sumber daya program tetap sangat terkonsentrasi secara geografis, dengan 72 persen dari dana tahun 2006 difokuskan pada empat negara yang dianggap 'negara bagian pengirim' yang bersejarah di kawasan pusat-barat. Zacatecas memimpin dengan 27,39 persen, diikuti oleh Jalisco (26,96 persen), Michoacán (10,24 persen) dan Guanajuato (8,03 persen) (Sagarnaga Villegas et al. 2006, hal 32). Bukan kebetulan, keempat negara bagian bersama-sama menyusun 52 persen dari lebih dari 600 HTA-HTA yang terdaftar secara resmi, pada 2003, tahun terakhir di mana data yang tersedia (Bada et al. 2006, p. 7).

kapasitas mereka untuk bernegosiasi secara langsung dengan pemerintah *negara,* dan pada tingkatan yang lebih rendah dengan Social Development Ministry federal, dan dengan demikian menekan otoritas kotamadya yang tidak responsif.[263] HTAs sudah sangat efektif dalam menginformasikan pemerintah pusat mengenai kebutuhan komunitas mereka dan janji-janji yang belum terpenuhi yang sudah lama dibuat oleh banyak kotamadya tentang persoalan menyangkut kurangnya sekolah dasar, air, listrik, jalan dll. Sebagai tanggapan, pemerintah negara telah berusaha membangun kesadaran di antara para presiden kotamadya tentang kondisi mendesak yang dihadapi banyak komunitas di luar pusat kota. Namun, keberhasilan HTA-HTA kadang-kadang berakhir di sini karena kurangnya kapasitas dalam pengawasan proyek dan pemahaman yang buruk mengenai peran mereka sebagai aktor akuntabilitas publik. Hal ini terbukti dalam hasil sebuah survei yang diterapkan pada penerima keuntungan Three-for-One dan yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Publik, yang mengungkap bahwa hanya 43 persen memahami hak mereka untuk memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana federal dan hanya 4 persen yang pernah mengajukan keluhan resmi kepada otoritas yang tepat (Secretaria de la Función Publica 2006).

Salah satu sumber utama pengaruh HTA atas nama komunitas asal mereka adalah suara mereka yang secara institusional diakui dalam komite Three-for-One untuk evaluasi dan persetujuan proyek. Namun, efektivitas mereka sebagai pialang kekuasaan baru dibatasi oleh masalah 'representasi yang berlebihan' setelah absen

[263] Dinamika ini dapat dipahami sebagai contoh dari proses yang jauh lebih luas, 'efek bumerang' dalam kampanye transnasional masyarakat sipil (Keck dan Sikkink 1998).

panjang sebagai anggota masyarakat dan kebungkaman yang dipaksakanterkait dengan keabsenan mereka. Ketika kesempatan untuk memulihkan suara mereka tersedia, beberapa anggota yang absen ingin memiliki perwakilan langsung di setiap kesempatan pembuatan keputusan. Sebagai contoh, pada tahun 2005, HTA-HTA Michoacano diizinkan untuk memiliki kursi di komite Three-For-One untuk evaluasi dan persetujuan proyek dan mereka memilih wakil dari Chicago. Segera, keluhan dari perwakilan dari Las Vegas, Los Angeles, Texas, Alaska dan banyak tempat lainnya dengan perwakilan HTA dari Michoacán juga ingin memiliki kursi di komite ini. Akibatnya, pada tahun 2007, komite di Michoacán memiliki 12 orang yang mewakili semua asosiasi dan federasi HTA di Amerika Serikat, tetapi mereka hanya memiliki satu suara.[264] Mencapai konsensus adalah sebuah tantangan ketika tidak semua perwakilan mampu melakukan perjalanan ke pertemuan komite di Morelia (yang biasanya tidak dibayar oleh pemerintah) dan mereka tinggal beberapa ribu mil terpisah dari satu sama lain di Amerika Serikat. Sejauh ini, mereka telah mampu memberikan suara bulat dalam pertemuan pertama komite itu, tetapi sukses jangka panjang model ini belum terlihat. Terlepas dari kehadiran dan partisipasi merekayang meningkat dalam komite evaluasi program Three-for-One, mereka tidak selalu berhasil meyakinkan otoritas kota-madya untuk melaksanakan semua proyek Three-for-One yang dibutuhkan di komunitas terpencil dan tingkat penolakan tetap tinggi. Antara tahun 2002, dan 2004, sebanyak 192 proyek Three-for-one ditolak di negara bagian itu. Di antaranya, 140 (73 persen) terletak di luar pusat kota (Bada 2008). Namun, dalam jangka panjang, dampak

[264] Wawancara Bada dengan pejabat Departemen Sosial Pembangunan di Morelia ddalam The First Latin American Migrant Community Summit, Morelia, Michoacán, 10-13 Mei 2007.

paling signifikan dari peningkatan *leverage* program Three-for-One bagi desa-desa terpencil dapat berkembang di arenasipil lokal lainnya—jika mereka berhasil untuk menggunkaan suara yang yang lebih besar di seluruh proses pembuatan keputusan di kotamadya. Dengan kata lain, dampak *kelebihan* sipil bisa berubah menjadi yang paling signifikan.

Ketiadaan Hubungan yang Kokoh Antara Migrasi Dengan Pembangunan[265]

Dalam terang tumpang tindih yang jelas antara tantangan migrasi dengan pembangunan perdesaan, seseorang mungkin berharap dialog tingkat tinggi dan konvergensi di antara para analis dan aktor sosial yang terlibat. Namun demikian, pertumbuhan remiten buruh migran, dikombinasikan dengan penyebaran asosiasi daerah asal yang terorganisir, telah membangkitkan optimisme yang meluas tentang prospek investasi pengembangan masyarakat lintas-batas. Namun analisis tentang migrasi orang Meksiko dan pembangunan terus berhubungan secara sporadis, karena berbagai alasan yang tidak dipahami dengan baik. Setiap agenda cenderung memperlakukan yang lain sebagai kategori sisa, sementara pendekatan yang sepenuhnya terintergrasi belum dikembangkan. Salah satu faktor mungkin bahwa menetapkan sifat dari hubungan antara migrasi dengan pembangunan ternyata lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Sebagai contoh, apakah perdagangan produksi dan pemasaran biji kopi yang berkelanjutan/adil memberikan alternatif bagi migrasi, apakah hal ini menjadi sumber pendanaan untuk pemasaran, atau apakah remiten mengakhiri pensubsidian produksi biji kopi karena permintaan dengan harga di perdagangan yang adil tidak

[265] Bagian ini diambil dari Fox (2006b, 2007).

mencukupi? Penelitian yang ada menemukan sedikit bukti bahwa fair trade/ kopi organik melambatkan arus migrasi.[266]

Sejauh ini, volume besar remiten ekonomi telah menarik sebagian besar perhatian publik dan kebijakan. Pembingkaian isu-isu migrasi dan pembangunan dengan lensa remiten menarik perhatian pada pertanyaan tentang bagaimana lembaga finansial dapat memperoleh dana. Sementara '*banking the unbanked*' ini tentu sangat penting bagi mereka baik untuk pengiriman dan penerimaan remiten, hubungan dengan pembangunan yang lebih luas masih tidak pasti. Bagi migran dan keluarga mereka, dampak paling nyata dari diskusi publik yang meluas adalah penurunan signifikan biaya transaksi baru-baru ini, didorong terutama oleh meningkatnya persaingan sektor swasta. Fokus remiten juga menarik perhatian pada investasi remiten kolektif, terutama untuk infrastruktur sosial dan bukan pembangunan ekonomi (seperti ditunjukkan pada Tabel 2).

Potensi remiten untuk menciptakan alternatif pembangunan ekonomi yang telah dibicarakan selama lebih dari satu dekade, tetapi di Meksiko baru ada sedikit bukti nyata tentang pekerjaan berkelanjutan di luar beberapa kasus tingkat mikro. Tantangan untuk menemukan dan mengelola proyek yang secara ekonomi layak diperparah oleh struktur dari proses pengambilan keputusan. Ketika migran mengumpulkan uang yang didapat dengan susah payah bagi proyek daerah asalnya, mereka menempatkan premi pada investasi-investasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat *sebagai suatu keseluruhan*. Kebanyakan investasi yang menciptakan pekerjaan , sebaliknya, secara

[266] Untuk salah satu dari sedikit studi untuk secara langsung merujuk hubungan antara migrasi dengan perdagangan yang adil/ inisiatif kopi organik, lihat Lewis dan Runsten (2005)

langsung hanya mempengaruhi sebagian kecil dari masyarakat. Selain itu, keuntungannya dapat dianggap beresiko ditangkap oleh elit lokal atau kerabat baik —dalam konteks di mana 'akuntabilitas jarak jauh' sulit. Dilema ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi investasi produktif mereka yang juga dapat memiliki efek 'barang publik', seperti infrastruktur pengolahan kopi- di komunitas-komunitas di mana sebagian besar orang bergantung pada kopi dan sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun bekerja sama dalam koperasi pemasaran yang kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun kategori proyek investasi yang potensial ini belum dikaitkan dengan aksi kolektif migran.

Upaya untuk membawa organisasi migran ke dalam debat kebijakan pembangunan yang lebih luas masih baru dimulai, sebagaimana agenda kebijakan Meksiko mereka yang terus didominasi oleh kerangka 'kebijakan migrasi' yang masih terikat secara tradisional, terbatas pada program Three-for-One,Institute for Mexicans Abroad dan pendekatan Meksiko terhadap imigrasi AS dan kebijakan perbatasan. Selain itu, LSM berbasis lokal-tidak selalu sadar akan keberadaan HTA-HTA dan karena itu tidak ada komunikasi atau agenda bersama untuk mengembangkan tujuan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Bahkan pada agenda kebijakantingkat lokal dan translokal, beberapa organisasi keanggotaan lintas-batas mendukung agenda pembangunan akarrumput baik dalam komunitas asal *maupun* di komunitas permukiman. Mexico's Association of Social Sector Credit Unions telah bekerja dengan organisasi-organisasi migran untuk meluncurkan sebuah jaringan bank-mikro perdesaan, yang bisa memberikan modal kerja bagi pembangunan ekonomi lokal. Bi-National Front of Indegenious Organizations (FIOB) adalah pengecualian lain, karena ia membangun jaringan kredit mikro akarrumput partisipatif daerah asal, untuk membuat

basis institusional lokal yang akuntabel yang pada akhirnya dapat menerima dan menginvestasikan remiten (Dominguez Santos 2004).

Dalam upaya untuk merancang cara baru dalam membingkai hubungan antara migrasi dengan pembangunan, ahli strategi pembangunan perdesaan Meksiko Armando Bartra (2003) menjembatani antara agenda migrasi, pembangunan dan hak dengan seruannya untuk menghargai 'hak untuk tidak [harus] bermigrasi'. Lagi pula, Pasal 123 Konstitusi Meksiko masih berbicara tentang hak warga negara untuk 'berkerja yang bermartabat dan secara sosial berguna'. 'Hak untuk tidak bermigrasi' bisa menjadi konsep yang berguna yang menjembatani untuk mempromosikan refleksi dan diskusi antara aktor yang beragam dan kadang-kadang yang berlainan yang melihat proses ini dengan cara yang berbeda. Prinsip ini mengakui bahwa meskipun migrasi adalah pilihan, itu adalah pilihan yang dibuat dalam konteks yang dipaksakan oleh kebijakan publik yang mendukung beberapa strategi pembangunan atas yang lain. Namun dampak konsep 'hak untuk tidak berimigrasi' yang tampaknya terbatas menunjukkan bahwa menerjemahkan kerangka evokatif ke dalam strategi-strategi praktis untuk organisasi akar-rumput ternyata adalah sebuah tantangan yang serius.

Apa yang mungkin menjelaskan ketiadaan hubungan yang kokoh antara migrasi dengan pembangunan? Migrasi semakin diakui seiring tersebarnyar ke seluruh Mexico, remiten secara luas dianggap sebagai sumber daya pembangunan, dan para praktisi dan analis yang meneliti migrasi semakin mengakui perlunya memperhitungkan dinamika di komunitas asal. Mungkin akarnya menjadi lebih dalam dan perlu untuk melihat kerangka dasar yang digunakan untuk menentukan strategi untuk perubahan. Sebagian besar praktisi dan analis pembangunan perdesaan Meksiko secara implisit memperlakukan migrasi sebagai proses

eksternal terjadi 'di luar' proses pembangunan akarrumput, sebuah kategori sisa *de facto*—di mana bagi keluarga *campesino*, migrasi berada *di dalam* kotak, komponen utama dari strategi bertahan hidup yang beragam Bagi kebanyakan praktisi dan analis yang bekerja pada migrasi, sebaliknya, dimensi pembangunan tentang hubungan antara komunitas yang menerima dan yang mengirim dipahami dalam kerangka 'kedermawanan dari bawah' ('philanthrophy from below'), sebuah pendekatan yang cenderung memprioritaskan proyek yang *high profile*, 'sesuatu untuk semua orang' dan bukan advokasi kebijakan untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu indikator dari tantangan untuk mempertautkan migrasi dengan agenda pembangunan melibatkan bentangan yang tidak merata dari organisasi berbasis masyarakat yang relevan. Migran Meksiko, misalnya, telah menghasilkan susunan organisasi keanggotaan yang luas dan beragam, tapi sangat bervariasi dalam hal kepadatan dan distribusi. Untuk memberikan kontribusi secara langsung terhadap strategi pembangunan akarrumput di lapangan, diperlukan tahap pemetaan berikutnya . Pada tingkat negara atau wilayah, akan sangat berguna untuk memetakan komunitas-komunitas yang para migrannya telah menciptakan asosiasi daerah asal dan meletakkannya di atas peta komunitas-komunitas asal yang juga menciptakan organisasi pembangunan sosial, sipil dan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai mitra dengan imigran yang terorganisir. Beberapa komunitas "yang mengirim" di negara bagian Oaxaca memiliki prospek pembangunan ekonomi yang sangat terbatas, tetapi komunitas lain memiliki perusahaan berbasis masyarakat yang signifikan, dan berkembang, seperti kopi organik dan koperasi kayu. Membayangkan alternatif dengan imigran yang terorganisir yang datang dari daerah asalnya dengan catatan

pembangunan ekonomi berbasis-komunitas dapat berjalan terus untuk menjawab persoalan yang mempersulit investasi produktif remiten. Isu tersebut mencakup kebutuhan akan prospek investasi yang nyata, akan pengalaman perintis usaha dan dukungan teknis yang dapat dipercaya, akan akuntabilitas publik kepada komunitas asal dan akan dampak sosial tumpahan yang positif partai lokal yang tertarik. Namun konvergensi sosial-geografis antara organisasi migran berbasis-teritori dengan inisiatif pembangunan ekonomi komunitas yang dipimpin akarrumput masih baru dimulai.

Kesimpulan

Munculnya masyarakat sipil migran Meksiko menunjukkan bahwa keluar dapat diikuti oleh suara. Bagi para migran Meksiko, aksi kolektif otonom dimulai saat mereka melihat ke rumah. Bagi mereka yang aktif sebelum mereka pergi, kehidupan sipil di daerah asal bisa saja rusak, setidaknya dalam jangka pendek - meskipun beberapa orng kemudian memberikan layanan masyarakat, secara langsung atau tidak langsung. Bercermin pada orang-orang Meksiko yang aktif dalam masyarakat sipil migran yang memiliki rekam jejak aksi kolektif sebelum meninggalkan menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang menemukan jalur baru untuk mengungkapkan komitmen mereka, mengikuti prinsip Hirschman(1984) tentang 'transformasi dan mutasi energi sosial'. Ide ini mengacu pada cara-cara di mana aktivis sering merujuk kepada pengalaman pembentukan mereka dengan tindakan kolektif, bahkan setelah perubahan besar dalam konteks politik dan medan sosial mereka, dan menarik warisan ini untuk mengilhami inisiatif baru mereka di arena yang berbeda.

Analisis sebelumnya tentang dinamika pengambilan keputusan proyek dalam program investasi pengembangan

komunitas Three-for-One menunjukkan bahwa organisasi migran memiliki kapasitas untuk meningkatkan representasi komunitas daerah asal mereka yang tersubordinasi dalam politik kotamadya, negara bagian dan federal. Namun, program ini mewakili sebagian kecil dari keseluruhan pengeluaran investasi sosial Meksiko. Lebih penting lagi, program ini belum berhasil mendongkrak investasi produktif yang substansial, berkelanjutan. Tanpa alternatif pekerjaan yang secara ekonomi yang nyata, berbasis luas, yang secara sosial dapat dipercaya, migrasi-keluar akan terus semakin dalam di komunitas yang belum dianggap telah mencapai 'intensitas migrasi yang tinggi'. Hasilnya, asosiasi daerah asal migran memberikan sepersepuluh dari milik mereka untuk diinvestasikan di daerah asal dalam kebutuhan publik yang mungkin menghadapi dilema dengan membangun lapangan basket dan stadium baseball dengan pemain yang hanya sedikit, kecuali untuk 3 sampai 4 minggu setiap tahun ketika para ekspatriat datang untuk berkunjung.[267] Investasi program Three-for-One dalam pelaksanaannya dapat memfasilitasi kepulangan migran saat Natal, namun mereka juga mengarahkan generasi mendatang ke utara.

Kesimpulannya, pengalaman orang Meksiko dengan keterlibatan imigran terorganisir dalam initiatif pengembangan masyarakat daerah asal menunjukan bahwa suara terkadang dapat diikuti dengan keluar. Namun suara yang terbatas untuk menunjukkan gejala daripada penyebab eksklusi sepertinya tidak mengarah pada kelanjutan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

---

[267] Scenario terakhir digambarkan dalam dokumenter tahun 2003 The Sixth Section (lihat http://www.sixthsection.com).

Referensi

Bada, Xóchitl, 'Reconstrucción de identidades regionales a través de proyectos de remesas colectivos: la participación ciudadana extraterritorial de comunidades migrantesmichoacanas en el área metropolitana de Chicago'. In *Organizaciones de Mexicanos en Estados Unidos: la política transnacional de la nueva sociedad civil migrante*, eds Guillaume Lanly and M. Basilia Valenzuela, 175–224. Mexico: Universidad de Guadalajara.

Bada, Xóchitl, 2004b. 'Clubes de michoacanos oriundos: Desarrollo y membresía social comunitarios'. *Migración y Desarrollo*, April, No. 2.

Bada, Xóchitl, 2004c. 'Las remesas colectivas de las organizaciones de migrantes mexicanos: Participación cívica transnacional y estrategias comunitarias de desarrollo'. Naskah dipresentasikan pada the 4° Congreso sobre la Inmigración en España, Ciudadanía y Participación, Girona, 10–13 November.

Bada, Xóchitl, 2008. 'Transnational and Trans-local Sociopolitical Remittances of Mexican Hometown Associations in Michoacán and Illinois'. PhD Dissertation in Sociology, University of Notre Dame, akan terbit.

Bada, Xóchitl, Jonathan Fox and Andrew Selee, eds, 2006. *Invisible No More: Mexican Migrant Civic Participation in the United States*, Washington, DC: Woodrow WilsonCenter, Mexico Institute/University of California, Santa Cruz, Latin American and Latino Studies, August. http://www.wilsoncenter.org/migrantparticipation, Diakses 1 February 2008.

Banco de México, 2007. 'Las remesas familiares en México. Inversión de los recursos de migrantes: resultados de las alternativas vigentes'. Mexico City: Banco de Mexico.

Bartra, Armando, 2003. *Cosechas de ira: Economía política de la contrareforma agraria*. México: Ed. Ithaca/ Instituto Maya.

Brooks, David and Jonathan Fox, eds, 2002. *Cross-Border Dialogues: US–Mexico Social Movement Networking*, La Jolla, CA: University of California, San Diego, Center for US–Mexican Studies.

Burgess, Katrina, 2005. 'Migrant Philanthropy and Local Governance in Mexico'. In *New Patterns for Mexico: Remittances, Philanthropic Giving and Equitable Development*, ed. Barbara Merz, 99–124. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Burgess, Katrina, 2006. 'El impacto del Three-for-One en la gobernanza local'. In *El Programa 3x1 para Migrantes, ¿Primera politica transnacional en Mexico?*, eds Rafael Fernández de Castro, Rodolfo García Zamora and Ana Vila Freyer, 99–138. Mexico: ITAM/ UAZ/Miguel Angel Porrúa.

Carral Dávila, Alberto, 2006. 'Migración Rural'. In *Escenarios y actores en el medio rural*, ed. Héctor Robles Berlanga, 89–118. Mexico City: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Dec.

CONAPO, 2000. *Indices de marginación*. Mexico City: Consejo Nacional de Población. http:// www.conapo.gob.mx, diakses 2 February 2008.

Cordero-Guzmán, Héctor R. and Victoria Quiróz Becerra, 2005. 'Mexican Hometown Associations (HTA) in New York'. New York City: Baruch College, Working paper. http://www.wilsoncenter.org/news/docs/ Mexican-HTA-NYC-CQ-10-05.pdf, Diakses 1 February 2008.

Cornelius, Wayne and David Myhre, eds, 1998. *The Transformation of Rural Mexico*. La Jolla, CA: University

of California, San Diego, Center for US–Mexican Studies.

Domínguez Santos, Rufino, 2004. 'The FIOB Experience: Internal Crisis and Future Challenges'. In *Indigenous Mexican Migrants in the United States*, eds Jonathan Fox and Gaspar Rivera-Salgado, 69–80. La Jolla, CA: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies and Center for US–Mexican Studies.

Escala Rabadán, Luis and Carol Zabin, 2002. 'Mexican Hometown Associations and Mexican Immigrant Political Empowerment in Los Angeles'. *Frontera Norte*, No. 27.

Fitzgerald, David, 2000. *Negotiating Extra-Territorial Citizenship: Mexican Migration and theTransnational Politics of Community*. La Jolla, CA: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies, Monograph 2.

Fitzgerald, David, 2004. 'Beyond Transnationalism: Mexican Hometown Politics and an American Labour Union'. *Ethnic and Racial Studies*, March, 27 (2): 228–47.

Fox, Jonathan, ed., 1990. *The Challenge of Rural Democratisation: Perspectives From Latin America and the Philippines*. London: Frank Cass.

Fox, Jonathan, 1994. 'The Politics of Mexico's New Peasant Economy'. Dalam *The Politics of Economic Restructuring: State-Society Relations and Regime Change in Mexico*, eds Maria Lorena Cook, Kevin J. Middlebrook and Juan Molinar, 243–76. La Jolla, CA: UCSD, Center for US–Mexican Studies.

Fox, Jonathan, 1996. 'How Does Civil Society Thicken? The Political Construction of Social Capital in Rural México'. *World Development*, June, 24 (6): 1089–103.

Fox, Jonathan, 2005a. 'Unpacking "Transnational Citizen-

ship" '. *Annual Review of Political Science*, 8: 171–201.

Fox, Jonathan, 2005b. 'Mapping Mexican Migrant Civil Society'. Dipresentasikan pada 'Mexican Migrant Social and Civic Participation'. Woodrow Wilson Center for Scholars, November. http://www.wilsoncenter.org/migrantparticipation, Diakses 1 February 2008.

Fox, Jonathan, 2006a. 'Rethinking Mexican Migration as a Multi-Ethnic Process'. *Latino Studies*, 4 (1): 39–61.

Fox, Jonathan, 2006b. 'Mexican Migration and Development: Encounters and Disconnects'. *Grassroots Development*, 27 (1): 2–5.

Fox, Jonathan, 2007. *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico*. Oxford: Oxford University Press.

Fox, Jonathan and Elizabeth Haight, forthcoming. 'El condicionamiento político del acceso a programas sociales en México'. Dalam *Candados y derechos: El blindaje de la política social en México desde una perspectiva comparada*, eds Alejandro Grinspun and David Gómez Alvarez, United Nations Development Programme in preparation.

Fox, Jonathan and Gaspar Rivera-Salgado, eds, 2004. *Indigenous Mexican Migrants in the United States*. La Jolla, CA: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies and Center for US–Mexican Studies.

García de Alba Tinajero, María, Leticia M. Jáuregui Casanueva and Claudia Núñez Sañudo, 2006. 'Liderazgos y nuevos espacios de negociación en el Programa 3x1 para Migrantes. El caso de Zacatecas'. In *El Programa 3x1 para Migrantes. ¿Primera PolíticaTrasnanacional en México?*, eds Rafael Fernández de Castro, Rodolfo García Zamora and Ana Vila

Freyer, 223–48. Mexico, DF: ITAM-Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa.

García Zamora, Rodolfo, 2005a. 'Migración internacional y remesas colectivas en Zacatecas'. *Foreign Affairs en Español*, July–Sept. http://www.foreignaffairs-esp.orghttp://www.foreignaffairs-esp.org , Diakses 1 February 2008.

García Zamora, Rodolfo, 2005b. 'Collective Remittances and the 3 X 1 Program'. Washington, DC: Woodrow Wilson Center and Latin American and Latino Studies Department, UC Santa Cruz, November. http://www.wilsoncenter.org/migrantparticipationhttp://www.wilsoncenter.org/migrantparticipation , Diakses 1 February 2008.

García Zamora, Rodolfo, 2006. 'El Programa 3 X 1 y los retos de los proyectos productivos en Zacatecas' In *El Programa 3x1 para Migrantes. ¿Primera Política Transacional en México?*, eds R. Fernández de Castro, R. García Zamora and A. Vila Freyer, 157–70. Mexico, DF: ITAM-Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa.

Gledhill, John, 1995. *Neoliberalism, Transnationalization and Rural Poverty. A Case Study of Michoacán, Mexico*. Boulder, CO: Westview Press.

Goldring, Luin, 2002. 'The Mexican State and Transmigrant Organizations: Negotiating the Boundaries of Membership and Participation'. *Latin American Research Review*, 37 (3): 55–99.

Goldring, Luin, 2004. 'Family and Collective Remittances to Mexico: A Multidimensional Typology'. *Development and Change*, 35 (4): 799–840.

González Amador, Roberto, 2005. 'En lo que va del sexenio emigraron a Estados Unidos 400 mil personas al año'. *La Jornada*, 15 April.

González Gutiérrez, Carlos, 1997. 'Decentralized Diplomacy: the Role of Consular Offices in Mexico's Relations with its Diaspora'. Dalam *Bridging the Border: TransformingUS–Mexican Relations*, eds Rodolfo O. De la Garza and Jesús Velasco. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Goodman, Gary and Jonathan Hiskey, 2008. 'Exit Without Leaving: Political Disengagementin High Migration Municipalities in Mexico'. *Comparative Politics*, January, 40 (2): 169–88.

Hernández Navarro, Luis, 2006. 'Optimismo y cambio en América Latina'. *La Jornada*, 31 January: 27. Hirschman, Albert, 1970. *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*. Cambridge, MA: Harvard.

Hirschman, Albert, 1981. *Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press

Hirschman, Albert, 1984. *Getting Ahead Collectively: Grassroots Experiences in Latin America*. Elmsford, NY: Pergamon Press.

Holt-Gimenéz, Eric, 2006. *Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. Oakland, CA: Food First Books.INEGI, n.d. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 'Población ocupada según sector económica (nacional)'. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. http:// www.inegi.gob.mx, Diakses 2 February 2008.

INEGI, 2006. 'Resultados Definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 para el Estado de Michoacán de Ocampo'. Mexico City: Instituto Nacional de Estadística Geograf ía e Informática.

Kearney, Michael and Federico Besserer, 2004. 'Oaxacan Municipal Governance in Transnational Context'. In

Indigenous Mexican Migrants in the United States, eds Jonathan Fox and Gaspar Rivera-Salgado, 449–68. La Jolla: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies and Center for US–Mexican Studies.

Keck, Margaret and Kathryn Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders*. Ithaca, NY: Cornell.

Lanly, Guillaume and M. Basilia Valenzuela, eds, 2004. *Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política transnacional de la nueva sociedad civil migrante*. Guadalajara, Mexico: Universidad de Guadalajara.

Laxer, Gordon and Sandra Halperin, eds, 2003. *Global Civil Society and its Limits*. London: Palgrave.

Levitt, Peggy, 2001. *Transnational Villagers*. Berkeley, CA: University of California.

Lewis, Jessa and David Runsten, 2005. 'Does Fair Trade Coffee Have a Future in Mexico? The Impact of Migration in a Oaxacan Community'. Dipresentasikan pada 'Trading Morsels' Conference, Princeton University, February 2005.

Leyva Reus, Jeanette, 2005. 'Motivan polémica modelos para clasificar remesas familiares. Reportan Sedesol y Colef diferencia de 41.9 porciento con el Banxico. Imposible que los hogares hayan captado 16 mil mdd'. 23 June. In *El Financiero* online. México, DF. http://www.elfinanciero.com.mx, Diakses 3 February 2008.

Lozano Ascencio, Fernando, 2003. 'Discurso Oficial, Remesas, y Desarrollo en México'. *Migración y Desarrollo*, 1: 23–31.

Lozano Ascencio, Fernando and Fidel Olivera Lozano, 2005. 'Impacto económico de las remesas en México: un balance necesario'. Naskah dipresentasikan pada the Seminario Internacional: Problemas y Desafíos de la Migración y el Desarrollo en América. Cuernavaca,

Morelos: Red Internacional Migración y Desarrollo. http://www.migracionydesarrollo.orghttp://www.migracionydesarrollo.org , Diakses 3 February 2008.

Maldonado, Centolia and Patricia Artía Rodríguez, 2004. ' "Now We are Awake". Women's Participation in the Oaxacan Indigenous Binacional Front'. Dalam *Indigenous Mexican Migrants in the United States*, eds Jonathan Fox and Gaspar Rivera-Salgado, 495–510. La Jolla, CA: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies and Center for US–Mexican Studies.

Martin, Philip, 2005. 'NAFTA and Mexico–US Migration'. Dipresentasikan pada Consejo Nacional de Población, Mexico City, 16 December 2005.

Moctezuma Longoria, Miguel, 2003a. 'The Migrant Club El Remolino: A Binational Community Experience'. Dalam *Confronting Globalization: Economic Integration and Popular Resistance in Mexico*, eds Timothy Wise, Hilda Salazar and Laura Carlsen. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Moctezuma Longoria, Miguel, 2003b. 'Territorialidad de los clubes zacatecanos en Estados Unidos'. *Migración y Desarrollo*, October, No. 1.

Moctezuma Longoria, Miguel, 2005. 'Transnacionalismo, agentes y sujetos migrantes.Estructura y niveles de las asociaciones de mexicanos en Estados Unidos'. Presentedat 'Problemas y Desafíos de la Migración y Desarrollo en América', Red Internacional de Migración y Desarrollo. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y CERLAC, Cuernavaca, 7–9 April.

Muñoz, Alma, 2004. 'Niega Sedeso que remesas de migrantes ayuden a paliar la pobreza del país'. *La Jornada*, 5 December.

Mutersbaugh, Tad, 2002. 'Migration, Common Property and Communal Labor: Cultural Politics and Agency in a Mexican Village'. *Political Geography*, 21 June.

Mutersbaugh, Tad, 2008. 'Serve and Certify: Paradoxes of Service Work in Organic Coffee Certification'. Dalam *Confronting the Coffee Crisis: Fair Trade, Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mexico and Central America*, eds Christopher Bacon, V. Ernesto Méndez, Stephen R. Gleissman, David Goodman and Jonathan A. Fox, 261–88. Cambridge, MA: MIT Press.

Orozco, Manuel with Michelle LaPointe, 2004. 'Mexican Hometown Associations and Development Opportunities'. *Journal of International Affairs*, 57 (2): 31–49.

Passell, Jeffrey, 2005. 'Unauthorized Migrants: Numbers and Characteristics'. Washington, DC: Pew Hispanic Center, 14 June 2005. http://www.pewhispanic.org/reportshttp://www.pewhispanic.org/reports , Accessed 1 February 2008.

Passell, Jeffrey and Roberto Suro, 2005. 'Rise, Peak and Decline: Trends in US Immigration, 1990–2004'. Washington, DC: Pew Hispanic Center, 21 March 2005. http:// www.pewhispanic.org/reports, Diakses 2 February 2008.

Polaski, Sandra, 2003. 'Jobs, Wages and Household Income'. In *NAFTA's Promise and Reality: Lessons from Mexico for the Hemisphere*, eds Demetrious Papademetriou, John Audley, Sandra Polaski and Scott Vaughn, Carnegie International Endowment for Peace, November 2003. http://www.cargenieendowment.org, Diakses 2 February 2008.

Ramos, Jorge, 2007. 'Migró más gente de la que murió en el país en 2006'. *El Universal*, 4 May, Mexico City. http://www.eluniversal.com.mx, Accessed 1 February 2008.

Rivera-Salgado, Gaspar and Luis Escala Rabadán, 2004. 'Collective Identity and Organizational Strategies among Indigenous and Mestizo Mexican Migrants'. Dalam *Indigenous Mexican Migrants in the United States*, eds Jonathan Fox and Gaspar Rivera-Salgado, 145–78. La Jolla, CA: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies and Center for US–Mexican Studies.

Rivera-Salgado, Gaspar, Xóchitl Bada and Luis Escala Rabadán, 2005. 'Mexican Migrant Civic and Political Participation in the US: the Case of Hometown Associations in Los Angeles and Chicago'. Dipresentasikan pada 'Mexican Migrant Civic and Political Participation', Washington, DC: Woodrow Wilson Center and Latin American and Latino Studies Department, UC Santa Cruz. http://www.wilsoncenter.org/migrantparticipationhttp://www.wilsoncenter.org/migrantparticipation , Diakses 2 February 2008.

Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam, et al., 2006. 'Evaluación Externa del Programa 3 x 1 para Migrantes 2006'. Mexico: Universidad Autónoma Chapingo/ Sedesol, December. http://www.coneval.gob.mx/evaluaciones, Accessed 1 February 2008.

Schwentesius, Rita, Miguel Angel Gómez, José Luis Calva Telléz and Luis Hernández Navarro, eds, 2004. *¿El campo no aguanta más?*, 2nd edn. Chapingo: Universidad Autónoma de Chapingo, CIESTAAM. Secretaría de la Función Pública, 2006. 'Encuesta de Opinión al Programa 3x1 para Migrantes. Beneficiarios'. Mexico City: Secretaría de la Función Pública.

SEDESO, Michoacán, 2004. 'Crecimiento poblacional estatal 1990–2000'. Dalam basis data Excel database tentang tren migrasi antara tahun 1980 sampai 2000. Morelia: Secretaría de Desarrollo Social.

SEDESOL, 2006. 'Programa 3x1 para Migrantes'. Mexico City: Secretaría de Desarrollo Social, Dissemination Brochure.

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, 2005. 'Evaluación Externa del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, 2004'. Mexico City: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). http://www.coneval.gob.mx/evaluaciones, Accessed 1 February 2008.

Smith, Michael Peter, 2003. 'Transnationalism, the State and the Extraterritorial Citizen'. *Politics and Society*, December, 31 (4): 467–502.

Smith, Michael Peter and Matt Bakker, 2008. *Citizenship across Borders: The Political Transnationalism of El Migrante*. Ithaca, NY: Cornell University Press

Smith, Robert, 2003. 'Migrant Membership as an Instituted Process: Transnationalization, the State and the Extra-Territorial Conduct of Mexican Politics'. *International Migration Review*, Summer, 37 (2): 297–343.

Smith, Robert, 2006. *Mexican New York. Transnational Lives of New Immigrants*. Berkeley, CA: University of California Press.

Stephen, Lynn, 2007. *Transborder Lives: Indigenous Oaxacan Migrants in the US and Mexico*. Durham, NC: Duke University Press.

Suro, Roberto, 2005. 'What Do Surveys Tell Us about Mexican Migrant Social and Civic Participation'. Dipresentasikan pada 'Mexican Migrant Civic and Political Participation'.

Washington, DC: Woodrow Wilson Center and Latin American and Latino Studies Department, UC Santa Cruz, November. http://www.wilsoncenter.org/migrationparticipation, Accessed 1 February 2008.

Waldinger, Roger, 2007. 'Between Here and There: How Attached Are Latino Immigrants To Their Native Country?' Washington, DC: Pew Hispanic Center.

Http:// www.pewhispanic.org, Diakses 1 Februay 2008.

Williams, Heather, 2004. 'Both Sides Now: Migrants and Emerging Democratic Politics in Mexico'. Dipresentasikan pada the Latin American Studies Association, Las Vegas.

World Bank, 2004. *Mexico: Public Expenditure Review* (Two Volumes), Report No.27894-MX, 10 August. http://www.worldbank.org, Diakses 1 February 2008.

11

Dari yang Tersembunyi sampai yang Terbuka: Politik Sehari-hari Petani di Cina dan Implikasinya pada Gerakan Agraria Transnasional

Kathy Le Mons Walker

Pendahuluan

Pada pertengahan 1980-an, melalui publikasi karyanya yang inovatif dan sangat berpengaruh *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985), James Scott merubah lensa analitiknya dari revolusi petani menjadi perlawanan petani. Dengan mengabaikan fokus pada aksi bersama, pemberontakan dan pengerahan revolusioner yang banyak mewarnai penelitian sebelumnya mengenai politik petani, Scott memilih untuk menyoroti hal-hal yang tersembunyi, informal dan tindakan-tindakan individual yang sering terjadi yang dengannya, dengan diperkuat oleh budaya populer perlawanan, para petani berusaha mempertahankan atau memperbaiki kedudukan mereka dalam perjuangankelas agraria. Dalam menegaskan hal itu ketika 'melipatgandakan seribu kali lipat' tindakan-tindakan perlawanan individu sehari-hari—keraguan, pembakaran, sabotase, desersi, pencurian, kepura-

puraan, dan sebagainya—yang mungkin memiliki konsekuensi politik atau sosial-ekonomi yang signifikan, membuka lahan baru dalam mengkonseptualisasikan protes dan menganalisis kontur dan konsekuensi pertarungan agraria. Di sisi lain, ketika gerakan-gerakan sosial radikal semakin berkurang dan pesimisme ideologis menyebar di kalangan akademisi dan pengorganisir, teori Scott tentang perlawanan sehari-hari menjadi lebih luas, memberikan lebih banyak dampak negatif. Hal itu memberikan kontribusi pemberian peran kembali para petani tidak sebagai mereka yang mampu mengubah kondisi sejarah baru, tetapi secara relatif sebagai agen yang lemah yang perjuangan-perjuangannya lebih banyak beradaptasi secara defensif terhadap perubahan.

Kebangkitan global pergerakan perdesaan selama dua dekade terakhir, serta fenomena gerakan agraria transnasional terorganisir, memproblematisasi formulasi Scott. Secara khusus, mereka meminta kami untuk mempertimbangkan pertanyaan mengapa perlawanan sehari-hari harus tersembunyi dan dihargai, dan mempertimbangkan secara historis keadaan dimana perlawanan tersembunyi para petani muncul atau mulai melakukan aksi-aksi bersama secara terbuka. Kontribusi ini saya lakukan bukan bermaksud untuk memperdebatkan atau mengkritik model sosiologis Scott. Sebaliknya tujuan saya adalah memberi perhatian pada pertanyaan di atas dengan memfokuskan pada pengalaman di Cina, di mana sejak pertengahan tahun 1980-an protes bersama para penduduk pedesaan dan pemberontakan-pemberontakan telah menjadi hal yang biasa. Melibatkan puluhan juta orang, aktivisme politik, saya membuktikan, bahwa semua itu telah menjadi bentuk sehari-hari politik petani Cina .

Dalam menganalisis perkembangan perlawanan terbuka yang terus-menerus petani Cina, sebagai titik

awalnya bab ini mengambil kejadian yang tak disengaja dari dua kecenderungan perkembangan yang berbeda: perubahan 'sosialisme pasar' di Cina pada tahun 1978 serta perubahan ke arah neoliberalisme pada dunia kapitalis lanjut. Bab ini terutama memperhatikan fitur serta akibat negatif bagi daerah pedesaan yang dihasilkan dari beririsannya kedua kecenderungan tersebut, dengan alasan bahwa pada periode pasca-sosialis kemuncula Cina sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia yang telah dicapai sampai tingkat yang sangat baik melalui tenaga kerja dan dengan mengorbankan masyarakat pedesaan. Selanjutnya memeriksa protes bersama selama dua dekade terakhir, terutama menyoroti hal yang saling bertentangan antara kekuasaan lokal dengan kekuasaan negara yang korup pada awal perkembangan gerakan pedesaan; dan memusatkan perhatian lebih besar, pada perampasan tanah, yang selama dekade terakhir merupakan masalah utama pemberontakan. Bagian akhir bab ini membahas tentang implikasi dari penemuan baru-baru ini tentang pemberontakan petani Cina - yang 210 miliar rumah tangganya mewakili satu dari setiap 3 keluarga petani di dunia—untuk gerakan agrariatransnasional.

Kontur: Perjalanan Cina Pasca-sosialis

Sejak pemimpin China meninggalkan jalur Maois menuju sosialisme dan mengadopsi program marketisasi pada tahun 1978, kemunculan Cina sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi utama didunia mulaidikenal luas. Baru-baru ini para sarjana dan pers mulai memusatkan perhatian pada aspek yang lebih gelap dari pengaruh global, termasuk meningkatnya kesenjangan sosial, PHK dan pemindahan 60 juta pekerja perkotaan dan industri, dan, khususnya fakta bahwa daerah pedesaan - dimana mayoritas orang Cina asli berada—tampaknya telah

ditinggalkan. Pada bagian ini agar dapat memberikan kontekstualisasi sejarah bagi perkembangan aksi bersama yang meluas di daerah pedesaan, saya mempertimbangkan beberapa aspek arah china pasca-sosialis yang saling berkaitan yang berpengaruh negatif pada masyarakat pedesaan.

Pertama, pada proses pergantian pemimpin pasca-sosialis Cina, dipimpin oleh Deng Xiaoping, yang diharapkan dapat mempertahankan penguasaan subtansial atas proses marketisasi, yang pada awalnya dipahami sebagai salah satu yang akan menyatukan perusahaan milik negara (SOEs) - *'stable centrepieces'* dari perekonomian yang dijalankan oleh negara - dengan marketisasi dan privatisasi yang bertahap. Tetapi setiap tahap dalam proses itu menghasilkan kontradiksi baru yang diselesaikan hanya melalui perluasan kekuasaan pasar, yang pada gilirannya mendorong hak-hak istimewa perusahaan swasta daripada perusahaan negara, pembangunan kota daripada pembangunan desa, serta terus meningkatnya, perusahaan dan pasar asing daripada pasar dalam negeri. (Hart-Landsberg dan Burkett 2004, 9, 31).

Kedua, peralihan China pasca-sosialis bersamaan dengan gerakan yang paralel yang ada dalam dunia kapitalis lanjut – perubahan menuju neoliberalisme. Lahir dari krisis overakumulasi dalam rezim kapitalis lanjut (Brenner 2002; Harvey 2003), reorganisasi proses akumulasi di bawah strategi neoliberal, dalam analisis terakhir, bergantung pada pergantian hak kepemilikan berskala dunia dan peningkatan dramatis persaingan internasional para pekerja melalui ekspansi global buruh murah. Persisnya karena pembangunan pasca-sosialis di Cina menghasilkan kemungkinan yang sangat banyak untuk melepaskan 'aset – aset yang sampai saat ini tidak tersedia ke dalam arus utama akumulasi kapitalis', para

pemain neoliberal menggunakan semua kapasitas organisasi mereka untuk memudahkan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk masuk kembalinya Cina ke dalam sistem kapitalis global (Harvey 2003, 149, 2005, 121). Pemulihan kekuasaan kelas dan pengabaian sejumlah besar penduduk dunia, khususnya orang miskin di pedesaan, dari proses akumulasi yang mendasari proyek neoliberal yang juga telah membentuk kontur dan hasil dari pembangunan Cina yang semakin *'foreign driven, export-led'*(Amin 2003; Harvey 2003, 137-82; 2005, 120-1).

Ketiga, apabila proyek neoliberal dunia mendaku diri sebagai bentuk modern 'Akumulasi primitif' atau sebagai enklosur yang secara global menargetkan relasi kepemilikan yang biasa/mapan maupun *'social commons'* yang dibuat oleh negara (De Angelis 2001), yang di Cina menemukan pendukung dan sekutu: persekutuan para pejabat dan pengusaha yang ingin melaksanakan akumulasi primitif versi meraka sendiri dan kemudian diuntungkan secara langsung dari proses-proses akumulasi yang saling terkait. Pemerintah dan kader awalnya dianggap pemimpin utama. Dalam sebuah perlombaan berbahaya untuk menjadi kaya, mereka mengambil jalan terlarang untuk 'merampas' dan 'merampok' milik masyarakat dan aset-aset negara (Hu 2005). Pada tahun 1980-an, hal ini terjadi sebagian besar melalui pedagangan gelap di pasar sektor bahan mentah negara dan komoditas. Di akhir tahun 1980-an dan 1990-an, kecenderungan ini semakin dalam seiring dengan BUMN yang dirubah menjadi perusahaan-perusahaan shareholding swasta dan asetnya dilucuti, , seiring dengan penggelapan dana negara untuk mendirikan usaha swasta pribadi, dan seiring dengan para pejabat pemerintah yang menjual hak guna tanah milik negara (di daerah perkotaan) atau yang dimiliki bersama (di daerah pedesaan) (He 2000, 38, 45, 50, 59, 2001a, 27; 2001b, 68). Pola akumulasi primitif ini, meskipun dengan tingkat yang lebih rendah,

sudah dikembangkan di kota– kota besar, kota- kota kecil dan desa-desa di seluruh negeri dalam 'koalisi jahat' (*hei tongmeng*), sebagaimana diistilahkan oleh media Cina , antara partai dengan pejabat pemerintah dan pengusaha keji(Cody 2005, 1A; Kahn dan Yardley 2007; Li C. 2006,6). Dalam proses ini, terutama setelah tahun 1992 ketika pengusaha dan para kapitalis pertama kali diperbolehkan menjadi anggota partai, Partai Komunis berubah menjadi 'persatuan penguasa' yang mewakili kalangan orang kaya dan orang yang memiliki hak istimewa dalam lapisan sosial. Dari tahun 2007, sepertiga orang terkaya di Cina adalah anggota partai (Chan 2007, 1).

Diapit dan terhubung dengan sejumlah besar investasi asing langsung, yang dari tahun 1997 sampai tahun 2005 mencapai total lebih dari $ 465 miliar dollar Amerika, jalan pasca-sosialis telah menghasilkan tidak hanya dua digit angka pertumbuhan selama lebih dari satu dekade, tetapi juga tingkat kekayaan yang belum pernah terjadi. Pada akhir tahun 2004, terdapat 236.000 jutawan (dalam dolar AS) di Cina - lebih dari India digabungkan dengan Rusia (Barboza 2005, 1). Pada tahun 2007 jumlah tersebut meningkat menjadi 345.000. Pada waktu yang sama, jumlah milyader meningkat dari 15 pada tahun 2006 menjadi 106 pada tahun 2007 (Cheng dan Lawrence 2007). Anak-anak para pemimpin senior Cina juga bergabung dengan barisan orang super kaya. Dari 3.220 orang Cina dengan kekayaan pribadi sebesar 100 juta yuan atau lebih, 2.932 anak-anak kader tingkat tinggi (Holz 2007, 38).

Berlawanan dengan cerita pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan oleh elite birokrasi-kapitalis bercokol kesenjangan , penurunan kualitas manusia dan biaya sosial lainnyayang meningkat pesat . Dalam kurun waktu kurang dari tiga dekade, Cina berubah dari masyarakat yang paling egalitarian di dunia menjadi salah satu masyarakat yang memiliki kesenjangan antara kaya dan miskin yang tertinggi

di seluruh dunia (Fewsmith 2007,9). Perpecahan dan kesenjangan daerah juga semakin dalam ketika daerah pesisir menjadi tempat utama investasi asing langsung dan industrialisasi perkotaan maupun pedesaan, sementara dalam proses ini daerah pertanian pedalaman sebagian besar tetap terabaikan. Antara tahun 1978 dan tahun 2003, misalnya, 86 persen dari total investasi asing langsung mengalir ke daerah pesisir timur dan selatan, sedangkan hanya 9 persen yang mengalir ke daerah pusat dan 5 persen ke barat (Li C. 2006,21). Hal lain yang sama mencoloknya adalah semakin tingginya disparitas pendapatan desa-kota -pendapatan perkotaan di tahun 2005 rata-rata 3,2 kali pendapatan di daerah pedesaan(Kahn 2005, 3).

Memang hanya dalam beberapa tahun pertama peralihan Cina menuju marketisasi China sajalah yang membuat pedesaan secara keseluruhan mendapat keuntungan yang nyata. Dari tahun 1978 hingga 1984, pendapatan pedesaan meningkat rata-rata 15 persen per tahun. Akan tetapi, setelah tahun 1984, produsen pedesaan mengalami beberapa kesulitan. Peningkatan produksi awal yang diperoleh dari pertanian keluarga setelah pembubaran komuni rakyat tidak dapat dipertahankan, pemerintah menurunkan harga kuota, biaya input naik, dan beban pajak para petani meningkat tajam. Akibatnya, pendapatan pedesaan mulai bergerak lamban, mengkerut dan di beberapa daerah bahkan bergerak mundur (Hart-Landsberg dan Burkett 2004, 34, 40). Pengenaan pajak yang terlalu tinggi, penggelapan dan privatisasi *de facto* oleh kader lokal perusahaan kota kecil dan desa (TVEs), yang tercipta dari asetkomuni dan membantu mensubsidi pertanian, memperburuk kecenderungan ini (Greenfield dan Leong 1997, 107-8). Akibatnya, dari pertengahan 1980-an ada persepsi umum yang berkembang di daerah pedesaan bahwa dalam kesibukan Cina untuk menjadi kayadaerah pedesaan sedang ditinggalkan. Dalam sindiran tajam

yangkhas, penduduk pedesaan bergurau bahwa sementara gaji 'naik turun di kota-kota besar', di pedesaan hanya ada ' harga naik, pajak, dan biaya-biaya' (Goodspeed 1993, 2F; Poole 1993, 10).

Seiring situasi pedesaan yang memburuk pada dekade dari tahun 1985 hingga tahun 1995, muncul sebuah 'populasi mengambang' lebih dari 100 juta petani yang sangat miskin. Hal itu terungkap dalam relief dampak dan konsekuensi aktual yang tegas dari jalur pembangunan pedesaan yang berpusat pada perkotaan . Pada tahun 2003, angka ini membengkak hingga 150 juta dan termasuk sebagian besar dari puluhan juta petani yang telah kehilangan tanah mereka karena penyitaan ilegal atau dengan kompensasi yang kurang (Greenfield dan Leong 1997,100; 'An Overview of Unemployment 2003' 2004; Yardley 2004). sebagian besar anggota populasi ini berhasil masuk ke kota, ke zona-zona pembangunan dan ke daerah-daerah suburban di wilayah pesisir untuk mencari kerja. Meskipun jutaan pekerja industri di-PHK di pertengahan tahun 1990-an, pekerja migran desa yang miskin dan yang tak berpunya menjadi tenaga kerja yang lebih disukai oleh industri ekspor yang sedang berkembang dan industri konstruksi. Di mata para majikan, mereka lebih penurut sekaligus lebih mudah dieksploitasi, karena di kotamereka tidak memiliki status resmi dan diperlakukan dengan hina sebagai warga negara kelas dua, sementara di pabrik mereka bekerja tanpa kontrak atau perlindungan hukum demi upah yang sangat rendah (Li 1993;Solinger 1999; Yu 1994). Uang pembayarannya, mereka kirim ke desa untuk membantu anggota keluarga yang tersebar di sana, tetapi seiring kondisi pedesaan terus memburuk tidak hanya seorang laki-laki (atau wanita) lajang namun seluruh keluargasemakin banyak yang semakin banyak berhasil masuk ke kantong-kantong perkotaan . Para pengusaha juga semakin sering menggunakan taktik menahan upah para buruh migran

sebagai alat untuk mengendalikan mereka (mengingatkan pada praktek 'perbudakan' (baosheng) sebelum revolusi Cina), membuat hidup lebih sulit baik bagi keluarga yang telah bermigrasi maupun anggota keluarga di daerah pedesaan yang bergantung pada kiriman uang. Berdasarkan perkiraan resmi, di awal tahun 2005 upah yang belum dibayarkan mencapai hingga 12 milyar dollar Amerika terhutang pada pekerja migran pedesaan (Chan 2005b, 1). Jadi hal tersebut mengakar dalam proses-proses yang memiskinkan dan memaksa penduduk pedesaan untuk meninggalkan daerah pedesaan, kemunculan Cina yang disebut dunia sebagai bengkel dunia sangat berhubungan dengan penciptaan *platform* buruh murah bagi kapitalisme global (Chan 2006, 3).

Akhirnya, dalam beberapa tahun terakhir masuknya Cina ke WTO telah memperparah masalah pedesaan. Setelah bergabung dengan organisasi ini pada tahun 2001 pemerintah memotong tarif rata-rata pertanian dari 54 persen menjadi 15,3 persen, dibandingkan dengan tarif rata- rata dunia sekitar 62 persen. Menurut Menteri Perdagangan Bo Xilai: 'Belum pernah ada satupun anggota dalam sejarah WTO yang telah membuat pemotongan sebesar itu [dalam hal tarif] dalam waktu yang sangat singkat '(Chan 2006, 2). Untuk meningkatkan akses bagi para pabrikan terhadap negara maju dan, mempertahankan laju pertumbuhan , para pemimpin Cina tampaknya sekali lagi bersedia mengorbankan pedesaan. Pada tahun 2004, Cina mengalami defisit perdagangan pertanian sebesar US $ 5,5 miliar akibat lonjakan impor. Impor kapas sendiri meningkat 175 kali lipat, dari 11.300 ton pada tahun 2001 menjadi 1,98 juta ton pada tahun 2004. Bagi para petani kapas China dan petani lain(terutama mereka yang menanam kacang kedelai dan tebu) hasil ini sungguh menyengsarakan. Sebagai contoh, Oxfam Hong Kong pada tahun 2006 melaporkan bahwa impor kapas murah AS ke

China pada tahun 2005 mengakibatkan kerugian sebesar US $ 208 juta pada pendapatan para petani dan hilangnya 720.000 lapangan pekerjaan (Chan 2006, 2-3). Di bawah pengaruh WTO, petani China dengan demikian mengalami peningkatan impor, penurunan harga lokal, kesulitan dalam menjual hasil panen mereka di pasar domestik, serta kerusakan dan kehancuran yang semakin meningkat yang keduanya berpengaruh pada para petani kecil dalam skala global dan membentuk isu-isu penting dalam perkembangan gerakan agraria transnasional.

Aksi Bersama Masyarakat Pedesaan, Kekuasaan Lokal dan Negara Pusat yang Korup

Uraian panjang di atas memberikan konteks untuk menganalisis perkembangbiakan perlawanan terbuka pedesaan selama hampir 20 tahun terakhir. Menurut Menteri Keamanan Umum, jumlah 'peristiwa massa', termasuk protes, demonstrasi, penutupan jalan dan 'kerusuhan' yang mengakibatkan kerugian besar terhadap orang dan/ atau harta benda, berada pada angka 8.700 pada tahun 1993. Angka itu meningkat menjadi 13.000 di 1996; 58.000 pada tahun 2003; 74.000 pada tahun 2004 (melibatkan 3,7 juta orang); dan 87.000 pada tahun 2005, dengan kemungkinan sebanyak 5 juta peserta (Li L. 2006, 250). Empat puluh sampai lima puluh persen dari kerusuhan itu terjadi di daerah pedesaan, sebagian besar sisanya adalah protes buruh perkotaan (Tanner 2005, 196-97; 'Highlights' 2004).

Kesenjangan sosial yang semakin besar menjadi tema pokok yang mendasari protes yang terus-menerus. Pada pertengahan 1980-an ketika perlawanan mulai muncul ke permukaan secara teratur, sebagian besar berupa, aksi'balas dendam' (baohu) atau kekerasanindividual diam-diam, yang menargetkan para pemungut pajak, para kader desa dan kotapraja yang korup, dan orang kaya baru di desa

(lebih sering kader) dengan merusak properti mereka, meracuni ternak dan unggas mereka, dan menebangi pohon-pohon mereka (Bernstein 1994, 63; Bernstein dan Lu 2003, 120; Li dan O'Brien 1996, 29). Hal ini sesuai dengan konseptualisasi Scott dalam gaya yang hampir seperti buku sekolahan tentang perlawanan sehari-hari. Di paruh kedua tahun 1980-an aksi bersama terbuka juga muncul. Melewati tahun 1990-an, persoalan penyalahgunaan pajak dan berbagai aspek kekuasaan lokal korup lainnya mendominasi agenda protes. Kemudian, penyitaan tanah oleh pejabat-pejabat dan kader lokal menjadi fokus utama protes. Seperti yang telah saya tulis secara rinci di tempat lain tentang perjuangan pada periode sebelumnya (Walker 2006), saya hanya akan memberikan gambaran singkat mengenai perjuangan itu di sini, dan kemudian akan beralih, secara lebih rinci, pada masalah-masalah perampasan tanah dan pemberontakan terhadap mereka.

Dari tahun 1980 sampai sekarang, sebagian besar pertikaian pedesaan telah dilokalisasi dan dikecilkan skalanya, seringkali hanya melibatkan beberapa atau bahkan hanya satu desa. Struktur formal organisasi juga tidak ada. Pola pembangunan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa karena masalah yang dihadapi para petani-baik yang berasal dari proses akumulasi global atau domestik atau kebijakan negara yang sering diasosiasik – yang berperan dalam konteks kekuasaan lokal, sebagian besar perlawanan mengambil bentuk lokal. Pada saat yang sama, baik pertikaian lokal 'Selular', yang juga mencirikan aksi bersama pekerja perkotaan (Lee 2007), maupun kurangnya pengembangan organisasial formal mencerminkan pengendalian pada perbedaan pendapat yang diterapkan oleh negara pusat China.

Pada contoh pertama, pemerintah Cina melarang pembentukan organisasi otonom di wilayah-isu yang secara politik sensitif, seperti hak asasi manusia atau buruh. China,

misalnya, hanya memiliki satu serikat buruh resmi , All China Federation of Trade Unions, yang dikendalikan oleh partai komunis, dan para pekerja dilarang membentuk serikat independen. Mereka yang berusaha untuk melakukannya didakwa dengan tuduhan subversi atau pengkhianatan (Lee 2007, 57 8). Demikian pula, petani yang telah mengorganisir organisasi politik independen dituduh menyerang negara (Belanda 1999, 10). Undang – undang China mengakui bahwa semua warga negara bebas berserikat, dan dengan demikian secara teknis petani harus mampu membentuk organisasi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Pada praktiknya hal ini jarang terjadi karena untuk melakukannya, seperti yang ditetapkan oleh peraturan Dewan Negara, mereka terlebih dahulu harus mendaftarkan organisasi di biro urusan sipil lokal dan untuk dapat mendaftar mereka harus dijamin departemen pemerintah untuk bertindak sebagai 'unit profesional pengawasan' mereka (yewu zhuguan danwei) (Li L.2006, 252). Kemungkinan untuk menemukan sponsor pemerintah seperti itu pada kenyataanya tidak ada apabila organisasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan petani melawan pelanggaran negara. Dalam keadaan ini meskipun pertikaian menjadi terbuka, hubungan organisasional umumnya tidak. Mereka hanya berkembang dengan sembunyi-sembunyi atau secara informal , yang menyumbang pada karakter yang terlokalisir dari protes-protes tersebut. Di sisi lain, laporan-laporan polisi, serta data lainnya menunjukkan bahwa seiring meningkatnya jumlah dan frekuensi protes-protes itu ukurannya juga meningkat, disertai dengan peningkatan dalam hal tingkat organisasi dan tingkat kekerasannya kualitas organisasi dan kekerasan (poin yang akan kita bahas nanti) (Tanner 2004, 140).

Negara pusat juga memainkan peranan sangat penting, namun bertentangan, dalam memperdalam kekuasaan

daerah yang korup dan perlawanan terhadapnya. Implementasi desentralisasi fiskal setelah dekolektivisasi, yang memungkinkan terciptanya kota-kota baru untuk mengatur keuangan mereka sendiri dengan cara mempertahankan sebagian pajak yang dikumpulkan untuk pemerintah pusat, secara efektif 'membuka jalan untuk berkembangbiaknya denda, pembayaran, dan pemerasan dengan berbagai alasan' -oleh pemerintah lokal yang korup (Chen dan Wu 2006, 171). Pada tahun 1994 ketika pemerintah pusat mengalihkan tanggung jawab negara untuk layanan kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya kepada daerah dan kotapraja, para pejabat lokal semakin memeras para petani dengan tujuan untuk menjalankan birokrasi yang berdana kecil dan semakin gemuk dan untuk kepentingan pribadi (Chen dan Wu 2006, 151-2). 'Beban' pajak para petani mulai di luar kendali, terutama di provinsi-propinsi pusat penghasil padi dan daerah pegunungan barat di mana sumber-sumber pendapatan alternatif mulai terbatas.

Di sisi lain, pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan fiskal dan pajaknya dengan serangkaian undang-undang dan peraturan yang memberikan para petani hak untuk menolak pajak dan biaya yang tidak sah dan mengajukan tuntutan hukum kolektif terhadappemerintah daerah, dan menetapkan batas 5 per sen pajak dan biaya daerah (Bernstein 1994, 71 ;'Decision on Alleviating' 1997; Li L. 2006, 253; 2005 Tang, 28). Inisiatif –inisiatif tersebut memungkinkan pemerintah pusat untuk mendaku diri sebagai penjamin kepentingan para petani dan 'menyalahkan' langsung ke bawah kepada tingkat lokal. Tampaknya mereka juga bermaksud untuk menyalurkan aktivisme petani ke dalam arena petisi hukum dan pengadilan-pengadilan yang sah, dan dengan demikian menjauhkan protes dan aksi bersama. Tentu saja, bersamaan dengan perkembangan LSM di Cina pada 1990-

an, sejumlah advokat, pengacara dan kelompok-kelompok 'perlindungan hak'(weiquan) muncul menjadi sebagai pelopor (Chen 2005, 2, 4, 7; Li C. 2006, 4).

Meskipun demikian niat negara , untuk melegitimasi perlawanan terhadap pajak dan biaya ilegal, inisiatifnya tersebut juga memicu semakin luas dan dalamnya protes-protes pedesaan. Dengan menggunakan retorika dan kebijakan pemerintah pusat sebagai senjata taktis, dalam gelombang aksi bersama yang semakin besar para petani menggunakan undang-undang batas 5 per sen dan undang-undang lain untuk menentang penyalahgunaan pajak dan penggunaan kekerasan dalam pemungutan pajak, maupun aspek kekuasan lokal yang korup lainnya (Li dan O'Brien 1996;O'Brien dan Li 2006). Banyak aksi bersama ini terjadi melalui proses petisi yang sah, para petani mengajukan banding ke Beijing dan tingkat pemerintahan lainnya sebagai penengah dalam melawan pemerintah daerah. Tetapi pertikaian yang dimediasi seperti pengajuan petisi hanyalah salah satu senjata dalam gudang senjata dan dalam perkembangan sehari-hari aksi bersama yang berkelanjutan. Dari awal hal tersebut bersamaan dengan protes-protes, demonstrasi dan pergolakan yang lebih transgresif yang sering berubah menjadi kerusuhan, yang mengakibatkan cedera sampai kematian para pejabat, serta perusakan atau pendudukan bangunan dan properti pemerintah. Beberapa pergolakan yang timbul tersebut mencapai tingkat yang signifikan, melibatkan hingga 20.000 peserta, dan diatasi hanya dengan pasukan paramiliter (Bernstein 1994, 70-5; Divjak 2000, 1; Goodspeed 1993, F2).

Sejak awal, juga, bentuk perlawanan yang lebih bertentangan muncul, terutama di daerah penghasil pangan dan daerah barat , di mana perlawanan atas pajak yang paling sering disebutkan dan konflik serta pertikaian

menjadi hal yang biasa. Sebuah laporan pemerintahan tingkat atas menunjukkan bahwa pada tahun 1993 total 8.200 pejabat kotapraja dan kabupaten luka-luka atau terbunuh. Laporan itu juga mencatat, dengan kekhawatiran, bahwa 'di beberapa desa para petani secara spontan mendirikan berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi agama atau organisasi bersenjata, untuk menggantikan pemerintah dan partai. Mereka telah menetapkan sistem perpajakan mereka sendiri '(seperti dikutip Perry 2003,264). Di desa-desa 'pelarian' lainnya, dengan keputusan bulat penduduk berhenti membayar pajak dan semua orang di desa, termasuk wanita, mengangkat senjata untuk mencegah pemungut pajak atau pejabat yang berusaha masuk desa mereka. Contohnya, di Wugao di propinsi Anhui, di mana jenis perlawanan seperti ini berlaku, sdi akhir tahun 1990-an 22 dari 29 desa di kotapraja dengan tegas menolak untuk terus membayar pajak atau mengumpulkan padi (Chen dan Wu 2006, 163-4).

Bentuk-bentuk kolektivitas baru juga bermunculan pada tahun 1990-an, terutama selama paruh akhir dekade ini. Beberapa beroperasi di tingkat desa dan antar-desa di bawah nama 'Komite Otonomi Petani' dan 'Komite Persatuan Petani'. Beberapa organisasi, seperti 'Komite Revolusi Petani' dan 'Komite Komando Pemberontakan Petani', mengasumsikan tujuan yang lebih lebih politik radikal. Organisasi pemberontakan tersembunyi yang lebih besar juga dibentuk, bersama dengan aksi yang tampak terkoordinasi yang menyebar di sejumlah daerah dan/ atau yang muncul di beberapa propinsi secara serempak (Belanda 1999, 10; Thornton 1999, 25, 2004, 93, 98). Aksi-aksi besar selama musim panas tahun 1997 menggambarkan hal ini. Di dalam pergolakan-pergolakan itu 70.000 ,200.000, 120.000 dan 200.000 peserta di ibukota provinsi Anhui, Henan, Hubei dan Jiangxi masing-masing

menyerang gedung pemerintah, menyandera sekretaris partai, membakar kendaraan-kendaraan pemerintah, merusak jalan, menyita semen dan pupuk milik pemerintah, dan setidaknya ada dua kejadian yang menyita amunisi dan senjata (Becker 1997; Li 1997; Yue 1997).

Ada pula bukti kuat bahwa selama tahun 1990-an baik partai maupun pemerintah pusat mengalami kemunduran dalam hal kredibilitas dan legitimasi di mata para petani. Hal ini mencerminkan semakin besarnya ketidakpuasan atas ketidakmampuan dan/atau keengganan pemerintah untuk mengontrol dan mengendalikan kader dan pejabat yang korup. Terkait juga dengan popularitas Mao Zedong yang tumbuh kembali dari kenangan para petani maupun buruh era sosialis akan masa ketika tersedia jaminan sosial, masyarakat bebas dari korupsi dan polarisasi kekayaan yang luas, dan mereka menjalankan kekuasaan sosial terbesar dan kontrol demokratis atas kader yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kebangkitan etika Maois dan nilai-nilai yang sejajar dengan 'immoralitas' dan 'eksploitasi' pasca-sosialis kemudian menjadi sarana mengumumkan bahwa masa kini, dengan menjaga cita-cita sosialis tetap hidup, dan selanjutnya mengesahkan pertikaian pedesaan (Hurst dan 2002 O'Brien; Jacka 1998; 2007 Lee, 140-7; Weil 2006). Ditinjau menurut keterangan di atas, dalam rentang waktu satu dekade yang pendek dalam pemikiran maupun aksi politik petani China tidak hanya menghilangkan pembagian antara terbuka dan tertutup sebagai bentuk perlawanan sehari-hari, tetapi terjadi dengan cara yang menantang dan berkontradiksi dengan asumsi standar ilmiah tentang kemampuan negara untuk menentukan dan mengendalikan fokus dan kontur protes petani.

Pada akhir tahun 1990-an semakin bertambahnya frekuensi dan militansi aksi protes dan pergolakan mendorong pemerintah pusat untuk mengakui semakin kurangnya kredibilitas dan menyatakan secara terbuka

bahwa kerusuhan sosial di pedesaan merupakan ancaman terhadap kekuasaan. Sebagai reaksi dari hal tersebut, pemerintah pusat telah mengambil langkah populis yang di rancang untuk 'meringankan beban petani' , terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan demikian, menghilangkan perbedaan pendapat. Langkah ini termasuk pengurangan pajak yang memuncak pada penghapusan pajak pertanian pada tahun 2006, menambah subsidi di sektor pedesaan (sebagian besar untuk pemerintah daerah yang kekurangan dana), subsidi langsung kepada para petani untuk produksi gandum dan undang-undang tenaga kerja bagi buruh migran (Li C. 2006, 2 'Rural Tax' ; 2003 'Threat of Rural'; 2002; ' Wen Jiabao; '' 2003).

Pada tingkatan tertentu, kebijakan ini merupakan hasil penting dari perlawanan atas pajak dan pertikaian pedesaan pada tahun 1980-an dan 1990-an yang berkelanjutan. Meskipun protes individu sering menemui keberhasilan parsial, jika ada, efek kumulatifnya adalah memaksa negara untuk memberikan kelonggaran pajak. Di sisi lain, hal tersebut sangat tepat dilakukan ketika konflik agraria semakin intensif pada isu perampasan tanah. Lagi pula, protes individu ini mengimbangi kelonggaran dengan sebuah program baru represi dan kontrol yang semakin ketat, dan dengan demikian sampai pada tingkat yang menghapuskan toleransi telah diperlihatkan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an bagi protes pedesaan yang tetap dalam skala kecil, hanya menargetkan para pemimpin daerah, dan tidak mengasumsikan bentuk politik yang tegas. Tindakan tegas termasuk dalam penggunaan polisi bersenjata, pasukan paramiliter, gas air mata dan senjata lainnya, penangkapan yang lebih sering, penggunaan teknik baru yang lebih canggih, seperti ' pasukan penculik' untuk menangkap para pemimpin protes, pembentukan pasukan khusus, unit-unit polisi anti huru hara bersenjata ditempatkan di 36 kota, dan pembentukan 30.000 stasiun polisi

baru di daerah pedesaan sebagai pengawasan dan pengendalian(Armitage 2004; Buckley 2006, 1;'China Reports '2006; ' Five Thousand PRC Farmers'1999; Manthorpe 2004, A7;' Public Security Organs'1999).

Meskipun demikian, selama tahun 2005 (tahun terakhir dikeluarkannya statistik pemerintah) tidak hanya jumlah protes terus meningkat, namun dari 87.000 insiden pada tahun tersebut; yang melibatkan konfrontasi sengit atau serangan terhadap properti pemerintah masih meningkat dengan cepat (Kahn 2006a, 10). Statistik tersebut mencerminkan intensifikasi konflik agraria seiring dengan perjuangan tanah menjadi pusat perhatian dan penggunaan kekuatan koersi pribadi, yang secara kriminal berhubungan oleh pemerintah daerah berkembang bersama dengan program represi dan kontrol pemerintah pusat.

Penyitaan Tanah dan Rutinisasi Persetujuan Sanksi Kekerasan Pidana yang Disetujui Secara Resmi di Pedesaan

'Gerakan enklosur tanah'(quandi yundong) dari tahun 1990-an telah dilaksanakan dari tahun 1987 setelah pemerintah mengeluarkan peraturan baru pengelolaan tanah. Setelah itu National People's Congress merubah undang-undang yang memungkinkan untuk pemindahan kepemilikan tanah, sehingga mendorong adanya pasar perdagangan tanah (Miao 2003). Pada awalnya 'kegilaan atas enklosur tanah' memicu sebuah ledakan *real estate* yang berpusat di perkotaan, tetapi mencakup juga tanah suburban dan pedesaan. Hal ini menggerakkan akumulasi baik domestik maupun asing. Pada awal tahun 1990, 90 persen dari semua investasi asing langsung mengalir ke dalam pasar perdagangan tanah yang baru dibuka (He 2000, 59).

Cakupan dan Skala dari 'Enclosure Movement'

Kemungkinan yang semakin banyak bagi investasi asing mendasari kegilaan,terutama pada tahun 1992 dan 1993, untuk membuat traktat atas tanah yang tersedia untuk disewakan di 'zona perkembangan ekonomi' (*jingji kaifa qu*). Untuk menciptakan zona inipara pejabat korup sering bekerja sama dengan mitra *real estate* asing, menyalahgunakan wewenang mereka dan melakukan penggusuran terhadap penduduk perkotaan maupun perampasan tanah pertanian di pedesaan. Provinsi Guangdong memulainya , dengan pemagaran tanah yang segera meluas ke seluruh provinsi seiring dengan perusahaan-perusahaan *real-estate* Hong Kong yang menyalurkan investasi ke dalam zona pembangunan. Propinsi-propinsi dan kota-kota pesisir lainnya segera mengikuti, seperti Propinsi Zhejiang, di mana lebih dari 600 zona pembangunan dan kawasan industri didirikan (Miao 2003).

Dari paruh kedua tahun 1990-an, laju urbanisasi semakin cepat serta desakan untuk pembangunan *real estate*, penurunan pendapatan pemerintah daerah yang timbul dari perubahan kebijakan pajak, dan keserakahan pribadi kader bergabung untuk mempercepat laju perampasan tanah. Jumlah hilangnya lahan subur memperlihatkan kecenderungan ini. Berdasarkan Biro Statistik Negara, 27,5 juta persegi *mu* tanah hilang antara tahun 1986 dan tahun 1995 (Gilboy dan Heginbotham 2004, 256); dan, seperti yang dilaporkan oleh Departemen Pertanian, total tanah menurun hampir 120 juta *mu* dalam delapan tahun dari tahun 1996 sampai 2004, atau rata-rata 14,25 juta *mu* setiap tahun (He 2007, 51; 2004 Cody, 1A).

Dalam jangka waktu 20 tahun, kemudian, Cina mengalami 'enclosure movement' yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, sehingga menghasilkan penjarahan (disposesi)—dalam banyak kasus

pemiskinan - puluhan juta rumah pertanian. Perhitungan dari jumlah petani yang dijarah mengalami pertentangan. Data statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 2005 lebih dari 40 juta rumah tangga telah kehilangan tanah mereka, dan jumlah ini terus meningkat sekitar 2 juta per tahun. Tetapi banyak perkiraan lain menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Dengan menggunakan perhitungan Departemen Pertanian 2 *mu* lahan pertanian per rumah tangga dan 120 juta *mu* untuk jumlah tanah yang dapat ditanami yang dirampas dari tahun 1996 sampai tahun 2004, seorang ahli ekonomi He Qinglian, memperhitungkan bahwa selama periode tersebut, 60 juta rumah tangga pertanian kehilangan tanah mereka (2007, 52). Berdasarkan prosedur yang sama dan menggunakan angka dari 147.5 juta *mu* untuk luas lahan yang hilang dari tahun 1987 sampai tahun 2004, jumlah total rumah tangga yang dijarah (*dispossed*) mencapai 73,75 juta. Angka ini beresonansi erat dengan perkiraan para ahli lain yang meletakkan jumlah total rumah tangga yang dijarah pada angka 70 juta pada tahun 2004 (Yardley 2004). Perkiraan dari 70 juta rumah tangga menjadi lebih mengejutkan ketika dipertimbangkan dari segi jumlah orang yang terlibat. Terhitung sebesar 4,5 orang per rumah pertanian, angka standar yang digunakan untuk rata-rata ukuran rumah tangga pertanian rata-rata di China, kemudian pada tahun 2004 sebanyak 315 juta orang mungkin telah diungsikan karena adanya perampasan tanah pertanian.

Dasar Hukum dan kontur Penyitaan lahan

Kemudahan relatif yang dilaksanakan oleh penyitaan adalah konsekuensi langsung dari ambiguitas dalam hak kepemilikan di pedesaandan hak negara untuk mengambil alih tanah . Land Administration Law (2004) menempatkan hak kepemilikan dalam "kolektif desa" petani, tapi hal

tersebut tidak menentukan struktur atau organisasi kolektif tersebut. Sebenarnya, dalam sebagian besar lokalitas sejak terjadi pembubaran komuni, tidak ada kolektif desa yang berfungsi. Sebaliknya, komite desa atau 'administratif desa' mengelola dan mengurus tanah yang disewakan kepada para petani di bawah Household Responbility System. (Ho2001, 401-2; Pils 2005, 240-1). Komite desa dan administratif desa, bagaimanapun juga tidak memiliki hak untuk memindahkan tanah pertanian untuk digunakan sebagai kompensasi. Hak itu dimiliki negara , yang sesuai dengan hukum, bisa mengambil alih tanah yang berada di bawah kepemilikan bersama, jika ' untuk kepentingan umum' (Cai 2003,664-5; 'Economist' 2004; Guo 2001). Jadi walaupun secara teknis para petani memiliki tanah itu dan telah dijamin kontrak 30 tahun untuk menggunakan tanah itu, dengan dalih 'kepentingan masyarakat' para pejabat dengan mudah menyitanya. Sebagaimana salah seorang pegawai mengatakan, 'hak kepemilikan tanah diam-diam telah di curi dari desa biasa dan diberikan kepada orang di tingkat yang lebih tinggi '(Ho 2001, 404).

Para pemain utama di 'tingkat yang lebih tinggi' itu adalah pemerintahan kotapraja di pedesaan serta pemerintah kota kecil dan kota besar. Berdasarkan hukum tanah 'area urban kota besar' merupakan milik negara, sedangkan 'area pinggiran kota' merupakan milik kolektif pedesaan. Tetapi karena urbanisasi yang terjadi terus menerus, di banyak lokalitas sebagian besar lahan suburban dimasukkan ke dalam batas-batas kota, mencakup, dalam beberapa kasus, pengambil-alihan semua tanah yang dimiliki bersama (Ho 2001, 405). Di sisi lain, karena administrasi pemerintahan kotapraja tidak memiliki akses langsung terhadap tanah kolektif di desa, mereka harus melibatkan komite desa dalam transaksi penjualan tanah - tapi hanya sebagai 'perluasan' kekuasaan politik mereka(Ho 2001, 405, lihat juga Guo 2001, 425).

Di daerah pedesaan serta kota-kota besar, 'agen-agen negara' ini menggunakan ketamakan dan cara kekerasan untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri dan untuk mendapatkan sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah yang kekurangan dana dan administrasi lokal yang semakin gendut. Akibatnya, transfer ilegal, penyewaan atau pengambilalihan tanah yang disewakan kepada petani tanpa memberikan pengetahuan tentang transaksi itu kepada mereka sebelumnya, pemaksaan perampasan dan dan pendudukan tanah pertanian para penduduk desa, penyimpanan dan pemotongan seluruh atau sebagian dana yang ditujukan sebagai ganti rugi bagi petani dan/atau pemindahan tempat tinggal, kurangnya lahan kerja bagi penduduk yang kehilangan tanah mereka dan penggunaan ancaman atau kekerasan dalam mendapatkan persetujuan dari penduduk desa yang menolak permintaan mereka menjadi hal yang biasa di antara para pejabat dan kader yang merebut tanah petani '(Tang et al 1993;. Wen dan Zhu 1996; Yao 2003, 1).

Kekerasan pidana yang disahkan secara resmi

Selanjutnya, pemerintah daerah, atau persekutuan bisnis mereka dengan persetujuan pemerintah , semakin sering menggunakan kekuatan yang diorganisir secara pribadi terorganisasi –kadang anggotaorganisasi kriminal— untuk melaksanakan pengambilalihan secara paksa maupun okupasi tanah pertanian, serta melakukan kekerasan pada penduduk desa untuk memaksa mereka untuk patuh. Kejahatan terorganisir (*heishehui zuzhi* , atau secara harfiah, perkumpulan gelap) muncul di Cina pada akhir tahun 1980-an, dan organisasi-organisasai kriminal bergaya mafia (*heishehui xingzhi de fanzhuituanhuo*), termasuk organisasi Triad internasional yang terkemuka yang ada sejarahnya dapat dilacak sampai kekaisaran China, semakin meningkat dalam jumlah dan kekuatannya pada tahun

1990-an (He2006, 93; Wen 2004). Pada tahun 1992, Menteri Keamanan Umum negara menyebarkan surat edaran,' terdapat lebih dari 1.830 organisasi, geng dan asosiasi bawah tanah yang bersifat rahasia . . . Sebuah kelompok rahasia kecil bisa memiliki lusinan anggota, sementara organisasai rahasia yang lebih besar mungkin memiliki 5.000 hingga 30.000 anggota dengan cabang organisasi yang ada di seluruh negeri '(dikutip dalam Perry 2003, 265).

Pertama-tama pemerintah daerah mulai menggunakan kekerasan bawah tanah atau penjahat ketika mengumpulkan pajak dan biaya serta merampok simpanan gandum milik petani jika mereka menolak untuk membayar pajak (Chen dan Wu 2006, 159). Tetapi seiring dengan perampasan tanah pertanian dan perlawanan petani terhadap mereka yang semakin intensif, dan seiring dengan pengaruh gangster, bandit dan dunia kriminal menjadi lebih jelas di berbagai tempat, termasuk perekonomian dan kehidupan publik, rutinisasi kekerasan kriminal yang disetujui secara resmi menjadi semakin meluas. Sebagaimana He Qinglian menyatakan:

> Sebuah persekutuan antara gangster dan pemerintah daerah mengarah pada kejahatan yang disetujui secara resmi, terutama pada tingkat pemerintahan akar rumput. Di banyak tempat, organisasi kriminal yang dilindungi pejabat setempat telah mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan dan sektor-sektor penting ekonomi. Organisasi tersebut begitu kuat sehingga masyarakat menunjuk mereka sebagai 'pemerintah kedua'. Khususnya sejak akhir tahun 1990-an, pemerintah daerah di seluruh China telah menggunakan organisasi kriminal sebagai pasukan untuk mengusir penduduk perkotaan dari rumah mereka serta merampas tanah para petani. (2006, 93)

Hasilnya di banyak tempat, seperti penulis lain katakan, adalah "persekutuan elit" yang 'bermunculan' yang mencakup para pejabat pemerintah kota, perusahaan, pemimpin desa, pejabat pemerintah di daerah atau tingkat yang lebih tinggi, dan preman sewaan- [yang] disebut oleh petani sebagai "kekuatan hitam". Persekutuan ini mengendalikan area desa dengan kekerasan'(Li F. 2006, 2).

Perebutan Tanah

Kemudian dalam jejaring represi negara yang semakin kuat dan tingkat baru kekerasan brutalitas dan degradasi manusia yang diciptakan oleh korupsi dan kejahatan yang disetujui secara resmi inilah, sejak akhir tahun 1990-an perjuangan tanah muncul mengemuka sebagai bentuk utama protes pedesaan. Karena perampasan tanah menghancurkan mata pencaharian dan kelangsungan hidup petani, memiliki dampak yang lebih besar daripada penyalahgunaan biaya dan pajak, dengan demikian hal itu merupakan akar dari meningkatnya perlawanan dan kekerasan. Tapi seperti ditunjukkan oleh besarnya jumlah keluarga yang kehilangan tanah mereka, perebutan tanah ini biasanya berakhir dalam kegagalan.

Perjuangan tiga tahun penduduk Sanchawang di Propinsi Shaanxi – salah satu di antara ribuan contoh – sangat khas. Pada akhir tahun 2002 setelah pemerintah daerah merampassebagian tanah penduduk desa dan mereka mengetahui bahwa para pegawai pemerintah telah menyewakan tanah tersebut 50 kali dari yang dibayarkan kepada mereka, hampir 800 dari mereka memblokir pembangunan zona pembangunan di tanah tersebut. Mereka mengorganisir 16 tim yang bergantian melakukan aksi duduk. Namun pada musim semi berikutnya, polisi beserta lebih dari 300 pekerja konstruksi bergerak untuk membubarkan pendudukan. Setelah itu penduduk desa menyusun petisi dan membawanya ke Beijing, namun

kemudian penduduk desa mengetahui bahwa pemerintah di Beijing hanya mengirim kembali keluhan mereka pada pegawai pemerintah yang merampas tanah. Pada musim semi tahun 2004 ketika pemerintah setempat merampas sebidang tanah lainnya, penduduk desa memutuskan untuk melakukan protes dengan tidak mengerjakan tanah mereka yang masih tersisa dan bertahan dengan makan dari cadangan gandum desa. Penolakan untuk bercocok tanam ini sangat provokatif, karena para pejabat ini bertanggung jawab atas produksi setempat. Penduduk desa juga mulai gelombang baru aksi duduk menghalangi pembangunan di sebidang tanah, dan sekali lagi polisi datang dan mulai menangkapi orang. Sampai di situ para penduduk merasa frutrasi, putus asa dan marah sehingga ratusan dari mereka merampas markas partai komunis desa serta memasang penutup selama lima bulan. Namun upaya mereka tidak menghasilkan hasil positif danpada akhirnya pemerintah mengirim 2.000 pasukan paramiliter untuk menghalau secara paksa para pemrotes dan menangkap para pemimpinnya . Serangan ini melumpuhkan protes-rprotes. Seperti yang dikatakan salah seorang wanita: ". Tak ada yang akan berani protes sekarang Semua orang takut."(Yardley 2005, 4A, 2004, 2).

Ratusan warga desa Sanchawang menderita luka-luka tapi tidak ada yang tewas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kejahatan preman dan pemerintah mempersenjatai pasukan paramiliter dengan peluru asli dan bukannya peluru karet, banyak penduduk desa tewas dalam beberapa konfrontasi. Di desa Shengyou di Propinsi Hebei pada tahun 2005, dengan persetujuan dari pemerintah setempat, kontraktor pembangunan mengirim 300 preman berhelm bersenjatakan senapan berburu, pipa logam dan sekop untuk mengusir penduduk desa yang menempati tanah yang telah disita oleh pemerintah lokal. Dalam konfrontasi yang terjadi kemudian,

para preman melepaskan tembakan dan dan menewaskan enam penduduk dan melukai lebih dari 100 orang (Saiget 2007; 'Turning Ploughshares into Staves '2005). Di Shanwei, Propinsi selatan Guangdong, tentara paramiliter, yang dikirim pada akhir 2006 untuk menumbangkan dan membubarkan partisipan dalam perebutan dan pendudukan tanah sitaan lainnya, menewaskan 20 warga desa dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai 'pembantaian Shanwei' (Gu, 2006).

Karena perlawanan dan kekerasan yang semakin meningkat, serta keprihatinan mengenai hilangnya tanah pertanian akibat perampasan tanah dapat mempengaruhi jaminan pangan negara itu, pada tahun 2003, pemerintah pusat mulai menjadikan perampasan tanah sebagai inti dari kebijakan negara. Negara membatasi jumlah zona pembangunan dan memberi tindakan keras terhadap penyitaan ilegal. Pada tahun 2004 pemerintah pusat menghentikan seluruh konversi tanah pertanian yang tidak penting selama enam bulan, dan kemudian mengeluarkan peraturan baru yang menuntut perubahan lainnya untuk disetujui oleh pemerintah di tingkat tinggi(He2007, 48-9; Rural Development Institute 2005; 'Turning Ploughshares' 2005). Tetapi seperti dalam kampanyenya melawan korupsi serta penyalahgunaan pajak, contoh-contoh di atas menunjukkan, kebijakan –kebijakan tersebut hanya memberikan sedikit pengaruh. Contohnya, menurut perhitungan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan Sumber Daya, terdapat 168.000 kasus transaksi tanah ilegal pada tahun 2004 (Cody 2004, 1A).

Pada tahun 2006, dalam pidato di mana dia menyatakan 'kami benar-benar tidak bisa melakukan suatu kesalahan historis atas masalah sengketa tanah', Perdana menteri Wen Jiabao berterus terang mengakui bahwa penyitaan tanah ilegal tanpa kompensasi yang cukup masih merupakan sumber utama pemberontakan dan pergolakan

di pedesaan (Kahn 2006b, 3A). Memang di tahun tersebut , menurut Departemen Pertanian dan sumber Daya, 131.000 penyitaan tanah ilegal melibatkan 100.000 hektar tanah masih berlangsung ('Illegal Land grabs Up'2007). Pada awal tahun 2007, National People's Congress mengesahkan undang-undang yang membatasi syarat-syarat pemindahan hak atas tanah pedesaan yang disewakan dan melarang pemindahan tanah dengan rumah ada di atasny ('NPC' 2007). Namun tampaknya peraturan ini hanya sedikit mampu mencegah 'koalisi jahat' para pejabat dengan para pengembang dalam pengambilalihan tanah ilegal, atau dalam menggunakan kekerasan untuk menjalankannya. Banyak laporan yang terus muncul ke permukaan, seperti kasus desa Yutian dekat Harbin di Propinsi Heilongjiang, pada Agustus 2007 penduduk yang menerima uang kompensasi yang kurang bentrok dengan polisi dan preman bersenjata yang dikirim oleh pengembang untuk merampas tanah pertanian serta untuk menghancurkan rumah mereka ('Farmers in Revolt'2007; lihat juga 'Farmers Protesting'2007).

Sementara itu, banyak petani dan buruh tak berpunya yang menyadari bahwa penolakan pemerintah untuk menetapkan hak atas tanah yang terjaminan di daerah pedesaan terus memberikan batasan bagi dan kemudahan pengambilalihan tanah pedesaan untuk industri, perluasan perkotaan atau pembangunan infrastruktur transportasi. Kontradiksi ini menjadi dasar sinisme dan kemarahan di antara mereka mengenai partai dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah(Pils 2005, 288; Cody 2006, 14A; Thornton 1999, 27-8). Kurangnya perbaikan di pengadilan dan ruang-ruang petisi hanya memperkuat menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Komentar-komentar seperti "Masyarakat dapat melihat bagaimana korupnya pemerintah sementara rakyat hampir tidak memiliki cukup makan" dan "Para pejabat peme-

rintah menghina rakyat biasa dan tidak takut untuk menggertak mereka" menunjukkan ejekan dan rasa jijik. Bahasa protes juga telah berubah. Dalam perlawanan pajak, seperti salah satu cendekiawan China katakan, "karena adanya kebijakan-kebijakan yang jelas untuk mendukung penyebab masalah, slogan akan berbunyi "melaksanakan kebijakan pusat. . . mengurangi beban petani". Karena isu tanah merupakan persoalan yang menyangkut kelangsungan hidup para petani, bahasa mereka menjadi tepat pada sasaran. Misalnya, [Mereka berkata:] "Bagaimana kita bisa hidup tanpa tanah!" '(Pils 2005, 288). Slogan seperti 'Kembalikan tanah dan properti kepada para petani' dan ''Wujudkan kekuatan politik petani sendiri' sama langsungnya (Thornton 2004, 98), tetapi mereka tidak menangkap kontradiksi mendasar tentang pengertian kapitalisme neoliberal yang terkandung dalam 'bagaimana kami bertahan hidup?' Para petani yang kehilangan tanah mereka akibat perampasan tanah atau siapa saja yang s telah dibuat kehilangan tanahnya mengatakan bahwa mereka sekarang termasuk dalam 'kelas' baru 'tiga tanpa'- tanpa tanah, tanpa pekerjaan, tanpa jaminan sosial. Tersirat di dalamnya sebuah kritik terhadap negara dan masyarakat yang tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong proses pembentukan kelas itu sendiri.

Kejengkelan dan kemarahan banyak penduduk pedesaan mengenai semakin besarnya kesenjanganjalur pasca-sosialis telah menggema dalam beberapa tahun terakhir dengan 'kemunculan' berbagai ledakan sosial besar-besaran. Tidak mengherankan, daerah pedesaan, daerah pinggiran kota dan perkotaan di mana pergolakan ini sering terjadi seringkali memili populasi migran pedesaan yang besar. Sebagian besar dari ledakan 'spontan' ini melibatkan kumpulan puluhan ribu orang dalam hitungan jam. Mereka menimbulkan banyak kekerasan, termasuk serangan ke markas polisi, kendaraan polisi,

barang milik negara dan barang milik kaum kaya atau pejabat pemerintah yang dilindungi polisi, dan yang hanyaditahan oleh penyebaran sejumlah besar pasukan paramiliter negara. Sebagian besar dipicu oleh peristiwa di mana pejabat pemerintah, orang kaya baru,atau bahkan PNS rendahan yang bertindak kejam dan menghina migran, petani dan kaum miskin perkotaan, atau para peserta protes yang memandang kebijakan negara yang mewakili serangan lainnya terhadap orang-orang miskin. Pada tahun 2004, misalnya, di distrik Wanzhou Chongqing di Propinsi Sichuan – di mana banyak penduduk pedesaan telah dipindahkan karena proyek Three Gorges Dam-mungkin sebanyak 80.000 orang 'mengamuk' setelah seorang pegawai pajak dengan brutal memukul pekerja migran yang tidak sengaja menabrak istri pegawai pajak tersebut (Chan 2004a, 2; 2004a, 1). Hal yang sama terjadi pula pada tahun 2005, 50.000 pekerja migran di Guangdong juga 'mengamuk' setelah seorang penjaga keamanan membunuh seorang pemuda migran yang dituduh mencuri sepeda (Chan 2005a, 4). Sejumlah besar orang yang bertindak serentak dengan kecepatan dalam ketiga pergolakan ini menunjukkan bahwa di antara kaum miskin perkotaan dan pedesaan , berbagi perspektif kelas dan pengertian luas tentang ketidakadilan yang mendalam sampai pada titik yang membuat mereka mampu mengesampingkan merasa takut dan perbedaan (cf. Thompson 1971, 78).

Memang, lahir dari kontradiksi kelas dan marginalisasi mereka dalam masyarakat pasca-sosialis, ledakan kejengkelan dan kemarahan di kalangan anggota masyarakat miskin pedesaan, kaum yang 'tidak punya apa-apa', pekerja migran, pekerja yang kehilangan haknya dan kaum miskin kota menunjukkan bahwa 'kesatuan sosial-budaya' berdasarkan konsepsi umum telah berkembang di antara mereka. Teoretisi gerakan sosial menyatakan bahwa "ra-

kitan massa, kerusuhan, dan spontanitas' menunjukkan bahwa gerakan sosial sedang dalam proses pembentukan (Tarrow 1994, 5). Apabila rumusan ini benar, dapatkah kita berharap untuk melihat perkembangan lebih jauh dari 'gerakan' itu dalam waktu dekat, baik melalui hubungan desa-kota atau di pedesaan saja? Saya pikir, kebanyakan sarjana-sarjana China akan menjawab 'tidak' untuk keduanya, mengingat tidak adanya hubungan organisasional, kapasitas yang lebih besar untuk merepresi yang telah dimiliki oleh negara pada tahun-tahun terakhir dan kemungkinan bahwa kebijakan populis pemerintah pusat mungkin untuk meredakan pertikaian.

Di sisi lain, catatan sejarah China menunjukkan bahwa, seperti sekarang, di saat-saat penting dari masa lalu ketika aksi kolektif pedesaan yang berkelanjutan —bersumber pada perjuangan-perjuangan local—yang berkembang pada skala transregional atau bahkan dalam nasional, hal ini dilakukan dengan mempersatukan perbedaan pendapat dan, oleh karena itu, meskipun tidak terorganisir, diasumsikan sebagai karakter dari gerakan. Pada saat-saat penting itu bentuk-bentuk organisasi baru muncul yang dengannya para petani merubah dan membuat sejarah. Di delta Yangzi, timbul dari aksi kolektif berkelanjutan pada dekade sebelum revolusi 1911, misalnya, sejumlah organisasi baru memungkinkan para petani melakukan pemogokan bayar sewa dan pajak di seluruh negeri atau area multi-daerah dan untuk mengembangkan agenda politik yang mana, seperti di Thousand Person Society Uprising (Qianrenhui) di Changshu, Wuxi dan kabupaten Jiangyin tahun 1911, mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari negara Republik baru dan mendirikan daerah otonom(Walker 1999, 168-9). Demikian pula, di akhir Dinasti Ming (1368-1644) para petani berubah dari sikap pasif relatif menjadi perlawanan yang berkelanjutan, dan kemudian menjadiserangan mi-

litan terorganisir bersenjata berjuang melawan dan secara efektif mengakhiri *bondservantry*/perbudakan di delta (Walker 1999, 47-8). Mengingat hal ini merupakan warisan sejarah, mungkin lebih baik agar tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa protes di China selama 20 tahun terakhir hanya bersifat perlawanan lokal dan tidak akan mengambil bentul gerakan sosial atau politik yang lebih besar.

Perebutan Tanah Petani di China dan Gerakan Agraria Transnasional

Seperti dianalisis oleh Karl Marx (1976, 873-940), pemisahan produsen dari alat-alat produksi selama (yang disebut) akumulasi modal primitif, yang mendasari dan memuncak dalam perkembangan kapitalis di Inggris, dilaksanakan melalui kekuatan ekstra-ekonomi negara dan friksi kelas sosial daripada melalui 'paksaan diam-diam' pasar. Dengan demikian hal itu dapat dicapai sampai tingkat yang cukup melalui pemangsaan, perampokan, penipuan, kekerasan dan kekejaman. Peleburan kepentingan kapitalis lokal dan global serta munculnya elit kapitalis-birokrat di China selama 25 tahun terakhir telah menciptakan proses akumulasi yang tidak hanya menyerupai akumulasi primitif yang dijelaskan oleh Marx, tetapi dalam serangan mereka dan yang juga merugikan masyarakat pedesaan sama hal nya seperti merampok. Perampasan yang terjadi—dan di banyak kasus pemiskinan—dari puluhan juta petani Cina menghubungkan keadaan menyedihkan dan politik mereka dengan keadaan dan politik kaum miskin pedesaan miskin di bagian lain dunia yang harus menanggung beban kebijakan neoliberal dunia, seperti yang dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang spesifik lokal dan nasional, dan yang telah menentang kebijakan-kebijakan dalam politik agraria yang muncul kembali dalam aksi bersama yang terang-terangan, gerakan

sosial dan visi alternatif masa depan. Banyak yang saling terkait dengan jaringan dan gerakan-gerakan agraria transnasional yang semakin meluas.

Dikarenakan kurangnya keterkaitan organisasional, gelombang pasang perlawanan terbuka sehari-hari di China jarang dianalisis sebagai bagian pembentuk basis sosial sosial bagi gerakan melawan globalisasi kapitalis atau gerakan agraria transnasional. Tapi, jelas, bersama-sama dengan perjuangan kaum miskin dan tak berpunya yang 'tak terorganisir' serta di tempat lain, pertikaian agraria di China baru-baru ini dapat dipahami sebagai komponen dari gelombang global yang terbentuk sebagai reaksi dan oposisi terhadap kapitalisme neoliberal.

Ditinjau dalam terang ini, pertanyaan utamanya adalah sejauh mana kondisi struktural dan perjuangan yang dihadapi kaum miskin pedesaan yang tidak terorganisir di China dan bagian dunia lainnya terjawab dalam gerakan agraria transnasional. Dengan kata lain, apakah persoalan tentang hubungan antara akumulasi kapitalis, di satu sisi, dengan penyitaan tanah pertanian, perampasan dan pemiskinan sosial di sisi lainnya, secara strategis mengilhami perjuangan mereka? Di bawah bendera neoliberalisme, serangan kaum imperialis kolektif terhadap masyarakat pedesaan dalam beragam bentuk, tapi dari Asia dan Afrika ke Amerika Latin terjadi transfer besar-besaran hak kepemilikan dan hak penggunaan tanah dari masyarakat miskin pedesaan kepada mereka yang memiliki kapital menjadi sebuah sumbu utama. Meskipun proses itu telah dilakukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di China, para petani di China yang dirampas menempati ruang struktural yang sama seperti saudara-saudara mereka di India, di mana penyitaan tanah dan pengusiran berskala besar juga terjadi—seperti di China, seringkali dalam konteks kejahatan yang disetujui secara resmi (Partai Komunis India n.d), sebagaimana rakyat di Afrika, yang

telah menjadi korban dari pemindahan tanah publik oleh pejabat pemerintah yang korup kepada individu yang terhubung secara politik dan perusahaan-perusahaan swasta maupun serangan Bank Dunia-IMF untuk menghancurkan penataan tanah komunal dan pengaruh reorganisasi kelas dan relasi kepemilikan yang meluas (Federici 2001), dan seperti saudara-saudara mereka di Amerika Latin, terutama yang berada di daerah pesisir, kehilangan tanah mereka di tangan para pengembang properti(Via Campesina 2006). Karena itu, perampasan tanah, penggusuran, penjarahan, pemiskinan dan hak petani atas tanahberjalinkelindan sebagai isu-isu penting global.

Bagaimana gerakan agraria transnasional menghadapi masalah ini, dan apakah terdapat kesenjangan antara program-program dan kampanye-kampanye dengan perjuangan sehari-hari petani untuk mendapatkan tanah di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan ini segera memunculkan persoalan tentang akuntabilitas dan keterwakilan gerakan terhadapa konstituen mereka yang terorganisir, yang menjadi perhatian pada volume ini. Mereka juga memunculkan persoalan mengenai *tanggung jawab* gerakan transnasional terhadap kaum miskin tak-teronganisir yang menjadi mayoritas petani dunia, merupakan perhatian lain masalah ini. Via Campesina, salah satu organisasi yang paling dinamis dari organisasi agraria transnasional (Dan mungkin satu-satunya gerakan yang benar-benar gerakan agraria transnasional—sebagai dilawankan dengan jaringan—yang mendekati jangkauan global), memberikan titik fokus yang sangat baik untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Sejak didirikan pada tahun 1993, Via Campesina telah menjadi suara keras dalam perlawanan terhadap neoliberalisme dan dalam mendukung masyarakat miskin dan tunakisma. Meskipun organisasi Via Campesina sekarang memiliki banyak anggota di 56 negara, organisasi ini telah berkembang secara tidak

merata dengan basis jaringan sosial di Amerika dan Eropa dan mengembangkan ikatan organisasional di Asia, tapi sampai saat ini hampir tidak ada cabang di Afrika (organisasi mengakui tujuh organisasi Afrika sebagai anggota pada tahun 2004) dan tidak ada sama sekali perwakilan dari China (Borras 2004, 25; Edelman 2003, 213). Melihat situasi politik di China dan kenyataan bahwa strategi politik utama Via Campesina adalah aksi bersama dan mobilisasi (selain mengembangkan kerjasama dan perundingan 'dalam persoalan tertentu dengan agensidan instansi tertentu'; Borras 2004, 21-2), mungkin mengherankan bahwa organisasi ini tidak berusaha untuk membangun perwakilan organisasi di China. Akan tetapi China tetap menjadi daerah 'kosong' dalam laporan-laporan dan analisis-analisisnya tentang kondisi global. Bahkan laporan tahunannya tentang 'Pelanggaran Hak Asasi petani' hampir mengabaikan daerah ini, di mana satu dari tiga petani berada. Dalam beberpa halaman yang tersisa, saya akan membahas posisi Via Campesina terhadap masalah-masalah tanah dan kemudian kembali pada persoalan tentang kebungkamannya tentang Cina.

Setelah periode awal konsolidasi internal organisasi, pada tahun 1999 Via Campesina bersama dengan Foodfirst Information and Action Network (FIAN), sebuah organisasi hak asasi manusia internasional yang mapan, meluncurkan inisiatif besar pertamanya tentang persoalan tanah—'The Global Campaign for Agrarian Reform' . Pada awalnya kampanye ini melibatkan mobilisasi, okupasi tanah dan peristiwa umum yang menekankan 'hak atas tanah dan jaminan land tenure' sebagai prasyarat mewujudkan hak asasi manusia atas pangan yang diatur yang dalam Pasal 11 dari International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (Desmarais 2002, 108).

Selama beberapa tahun berikutnya, meskipun Via Campesina terus menghubungkan masalah tanah pertanian dan pangan dengan ICESCR, tujuan utama kampanye agrarianya adalah menjadi lawan politik bagi 'market-assisted agrarian reform'(Borras 2004), yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh World Bank pada tahun 1998. Melawan prinsip "tanah . . . adalah untuk dibeli mereka yang memiliki modal ", yang dalam pandangannya mendukung kebijakan tanah World Bank dan menempatkannya untuk melayani modal transnasional, Via Campesina mengusulkan bahwa kepemilikan tanah pedesaan harus sesuai dengan kriteria 'hanya mereka yang mengolah tanah memiliki hak atas tanah ', dan berdasarkan hal itu mengartikulasikan prinsip alternatif 'Ukuran maksimum kepemilikan sosial atas tanah '(Borras 2004, 11). Pada tahun 2002, bersama dengan organisasi lain dengan tegas menolak kebijakan tanah World Bank, berpendapat bahwa kebijakan itu dirancang untuk 'menghindari redistribusi *landed property*' dan 'mengalihkan, merusak, membagi, dan menekan gerakan-gerakan petani tunakisma (seperti dikutip dalam Borras 2004, 13-14). Dengan memfokuskan pada World Bank, kampanye agraria Via Campesina-FIAN kemudian mengungkap maksud dan tujuan kebijakan-kebijakan tanah neoliberal di tingkat institusi internasional. Tapi hanya sedikit menyoroti perampasan tanah, penggusuran paksa dan penjarahan yang penting sebagai strategi akumulasi neoliberal.

Sesungguhnya, hubungan antara akumulasi kapitalis, penjarahan dan pemiskinan pedesaan timbul lebih menonjol dalam kampanye utama Via Campesina yang lain — yaitu 'kedaulatan pangan', di mana WTO menjadi sasaran utama. Dalam kampanye tersebut organisasi ini berpendapat bahwa sebagai hasil dari implementasinya oleh WTO, kebijakan neoliberal telah "memaksa ratusan juta petani untuk menghentikan praktik pertanian tradisional mereka,

menuju eksodus pedesaan atau untuk beremigrasi"(seperti dikutip dalam McMichael 2007, 7). Dalam menghubungkan gerakan pangan dengan penjarahan, perpindahan dan sirkulasi manusia, Via Campesina memperjelas sejauh mana rezim akumulasi arus modal bergantung pada maupun mendorong penciptaan angkatan kerja berupah global yang dapat digunakan (McMichael 2007, 9). Namun, apa yang terlupakan, adalah penekanan pada, dan dalam banyak hal transfer hak kepemilikanyang dipaksakan- dan dengan demikian hak atas tanah petani—yang sekaligus mendukung pembentukan angkatan kerja global yang termarjinalisasikan dan menjadi arena utama akumulasi neoliberal.

Di tahun-tahun belakangan ini, Via Campesina mulai mencurahkan perhatian yang lebih besar pada isu-isu hak atas tanah , perampasan tanah dan penjarahan. Tapi seperti dalam kampanye kedaulatan pangan, hal ini terutama sering terjadi di tempat-tempat selain kampanye reforma agraria. Dalam laporan tahun 2006 tentang 'Pelanggaran Hak Asasi Petani' (Violations of Peasant" Human Rights), sebagai contoh, yang dalam kata-katanya sendiri ditulis layaknya 'untuk menerangi situasi sehari-hari para petani di seluruh dunia', perampasan tanah pertanian dan penjarahanmuncul sebagai tema penting. Seperti yang dinyatakan dalam laporan:

> konflik penggunaan tanah sedang bermunculan di berbagai bagian dunia . . . Impunitas bagi tindakan yang diambil melawan buruh tunakisma atau petani kecil di pedesaan, di banyak negara, merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia terbesar. Gejalanya adalah terjadinya penggusuran paksa dan perampasan tanah , tanpa adanya reaksi dari pemerintah. (Via Campesina 2006,1-2)

Pada tahun 2007 dalam World Social Forum (WSF) di Nairobi, Rafael Alegria, koordinator internasional untuk Global Campaign for Agrarian Reform Via Campesina, mengumumkan 'peran Afrika' dalam kampanye. Dalam menggambarkan inisiatif baru ini, ia menyatakan bahwa sejumlah besar tanah yang disita di Afrika oleh World Bank dan bahwa kampanye di Afrika melibatkan utusan-utusan para pemimpin Via Campesina untuk mendukung dan menyertai rakyat Afrika dalam memeperjuangkan tanah mereka dan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah (Duraes2007).

Uraian singkat yang yang diberikan di atas menyoroti bahwa sebagaimana dalam konstruksi keseluruhan panji 'perjuangan melawan neoliberalisme', Via Campesina membentuk dan mengumpulkan keluhan dan isu-isu tertentu yang berkaitan dengan persoalan tanah ke dalam sebuah kampanye besar tentang reforma agraria. Kampanye itu memungkinkannya untuk menyasar kebijakan neoliberal di tingkat institusi internasional (dan bersamaan dengan di tingkat nasional) dan untuk mengembangkan konseptualisasi alternatif tentang *land reform* yang berdasarkan hak asasi manusia. Dengan demikian tampaknya Via Campesina telah menancapkan tiang perlawanan terhadap model kebijakan neoliberal atas sumber daya tanah di daerah di mana *land reform* menjadi persoalan (Borras 2004, 26). Di sisi lain, untuk kembali ke penyelidikan awal kita, cara akumulasi kapitalis neoliberalbenar-benar berlangsung di lapangan di sebagian besar pedesaan di Selatan global, yaitu, baik melalui perampasan tanah, penggusuran paksa dan penjarahan terhadap puluhan juta keluarga petani maupun melalui perlawanan rkaum miskin yang terorganisir dan tidak terorganisir, sebagian besar tetap menjadi masalah yang bisu dalam kampanye agraria.

Akibatnya, tantangan bagi Via Campesina adalah untuk memperluas dan memperdalam agenda tanahnya

sehingga sekaligus memperkuat perlawanan terhadap neoliberalisme dan berbicara langsung dengan perjuangan orang-orang yang melawan penyitaan tanah dan penggusuran paksa yang meluas. Di Nairobi selama pengumuman tentang kampanye Afrika, Rafael Alegria juga mengindikasikan bahwa setelah Afrika Asia akan menjadi pusat geografis kampanye global. Melihat semakin banyak kemunculan penyitaan tanah, penggusuran paksa dan penjarahan di India dan Indonesia, di mana jaringan sosial yang berafiliasi dengan Via Campesina telah meluas, nampak bahwa jika Via Campesina benar-benar mengembangkan kampanye Asia isu-isu itu mungkin (akhirnya) muncul sebagai area utama perhatian.

Jika Via Campesina harus menjadikan perampasan tanah pertanian, pengusiran paksa dan penjarahan sebagai fokus kampanye Asia, ia bisa mulai membalikkan kebungkamannya tentang perebutan tanah di Cina. Karena pembatasan negara Cina pada isu-isu yang secara politis merupakan wilayah isu yang sensitif, Via Campesina tentu saja tidak bisa mengembangkan kampanye militan di Cina. Tapi ia dapat memasukkan Cina dalam analisis-analisis, diskusi dan inisiatif-inisiatifnya dan yang terpenting, juga memperluas solidaritas bagi para petani China sebagaimana telah dilakukan di masa lalu. Aktivis pedesaan China mati-matian berusaha untuk menyebarkan berita tentang perjuangan mereka ke luar China dengan harapan mendapatkan dukungan dan sekutu yang mau mendesak negara Cina. Sejak tahun 2006, ketika otoritas pusat memblokir ratusan *website* internasional, menutup ribuan *website* China, dan menerapkan batasan baru bagi wartawan China maupun wartawan asing (Amnesty International 2007), komunikasi dan transmitansi informasi menjadi lebih sulit daripada sebelumnya, tetapi jauh dari kata mustahil.

Karena Via Campesina mendasarkan reforma agraria dan kampanye kedaulatan pangannya pada masalah hak

asasi manusia dan telah membentuk perserikatan yang kokoh dengan organisasi hak asasi manusia FIAN, Via Campesina mungkin juga mampu membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok yang berbasis di luar China, tetapi yang berfokus pada hak-hak asasi manusia. Divisi Asia dari Human Right Watch yang sudah mapan , sebagai contoh, telah menunjukkan minat yang besar terhadap perampasan tanah dan penggusuran paksa di China dan telah menerbitkan laporan sepanjang 40-halaman mengenai penggusuran paksa dan (Istilahnya) 'gerakan hak penyewa tanah' di perkotaan China. Human Rights in China, yang didirikan oleh mahasiswa dan sarjana China pada tahun 1989, mempublikasikan berita singkat harian dan bulanan yang merangkum berita tentang hak asasi manusia yang diliput pers lokal dan regional berbahasa China dan Inggris. Berita singkat bulanan, yang wilayah tema pokoknya termasuk petisi dan protes, buruh, para pembela hak asasi manusia dan sensor media, adalah salah satu sumber daya terbaik yang menyediakan ulasan sistematis tentang perebutan tanah para petani.

Sarjana gerakan sosial menunjukkan pentingnya struktur peluang politik dalam pe gerakan sosial. Mereka menegaskan juga, bahwa struktur peluang tidak hanya berlaku untuk pembentukan gerakan. 'Gerakan menciptakan kesempatan untuk diri sendiri atau orang lain', tulis Sidney Tarrow. 'Mereka melakukannya', dalam kata-katanya, 'dengan menyebarkan aksi kolektif melalui jaringan sosial dan dengan membentuk koalisi aktor sosial; dengan menciptakan ruang politik bagi gerakan yang sama. . . dan dengan menciptakan insentif bagi elit untuk menanggapi '(1994, 82). Dilihat dalam terang ini, kampanye Asia di mana Via Campesina memperluas agenda tanahnya sehingga dapat mencakup masalah perampasan tanah, penggusuran paksa dan penjarahan, membawa perjuangan pedesaan di Cina (dan di antara perjuangan

yang 'tak terorganisir' di tempat lain) pada masalah-masalah ini menjadi tinjauan penuh, dan mengembangkan sebuah koalisi persekutuan yang sependapat yang memperkuat baik Via Campesina maupun 'gerakan serupa' kalangan miskin tak terorganisir.

Di sisi lain, meskipun hak asasi manusia secara umum dianggap menjadi wilayah persoalan yang sensitif oleh pemerintah Cina, isu utama seperti hak-hak pekerja migran, pertanian berkelanjutan, lingkungan, kemiskinan, hubungan gender pedesaan dan yang paling baru hak-hak petani muncul menjadi masalah-masalah yang ' dapat diterima', dan dengan demikian sedang ditangani oleh proliferasi LSM domestik, asing dan internasional yang sekarang beroperasi di China. Mereka juga membentuk fokus di seputar mana Via Campesina mungkin bisa mulai mengembangkan hubungan dengan organisasi-organisasi China. Meskipun proyek-proyek transnasional LSM Cina tidak dapat melibatkan setiap jaringan atau kelompok internasional 'politik' atau 'militan', hubungan mereka dengan masyarakat sipil transnasional telah meluas. Pada tahun 1986, misalnya, hanya 484 LSM Cina menjadi anggota LSM internasional. Pada tahun 2002 jumlah tersebut meningkat menjadi 2.297 (Chen 2005, 7).

Jaringan agraria transnasional lainnya, seperti Reseau Mondial Agricultures Paysannes, Alimentation et Mondialisation (World Network of Agriculture, Peasant, Food and Globalization) (APM Mondial), telah mulai membangun hubungan organisasi di Cina. Tumbuh dari organisasi para agrikulturalis yang didirikan pada tahun 1980-an, APM-Mondial pertama berkembang sebagai jaringan regional di Afrika (Reseau APM-Afrique) dan kemudian terinternasionalisasi pada tahun 1990-an. Meskipun organisasi ini memilih program-program pendidikan dan pengembangan aktivis daripada tindakan langsung dan 'siasat menekan' yang digunakan oleh Via

Campesina, analisisnya tentang WTO serupa dengan analisis Via Campesina dan kedua organisasi itu bekerja sama dalam proyek-proyek di masa lalu (Edelman 2003, 213). Jaringan Chinanya (Reseau APM-Chine) didirikan pada akhir tahun 1990an dan pada awalnya beroperasi hanya dalam hubungan dengan individu dan lembaga di Cina yang ditunjuk oleh Pemerintah China (Edelman 2003, 213). Meskipun jaringan China tetap bersifat tidak resmi, baru-baru ini bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya untuk menyelenggarakan lokakarya tentang sistem pangan yang berkesinambungan (Citizen Earth –APM Network 2006). Demikian pula, International Forum on Globalization, forum skolar-aktivis yang menentang globalisasi pertanian industrial karena merusak tanah pertanian kecil dan komunitaspedesaan dan hubungannya dengan ketidakamanan pangan, sedang merencanakan serangkaian seminar di China pada tahun 2008, berdasarkan pengumuman, seminar-seminar tersebut akan 'disponsori oleh pemimpin kelompok lingkungan hidup dan pertanian China' terkemuka. Contoh-contohdi atas menunjukkan bahwa ada beberapa kesempatan yang melaluinya Via Campesina mungkin bisa mulai membangun hubungan dengan kaum petani yang telah terlibat dalam perjuangan agraria yang intens selama lebih dari 20 tahun. Tantangan akan terlihat berada dalam semesta pembentukan fleksibilitas dan koalisi.

Dengan mengembangkan hubungan dengan pedesaan Cina tampaknya sangat penting mengingat kenyataan bahwa masalah perampasan tanah dan penjarahan yang dijelaskan di halaman sebelumnya kemungkinan besar akan berlanjut untuk beberapa waktu. Para ahli memperhitungkan bahwa sedikitnya 30 juta lebih rumah tangga pedesaan akan kehilangan tanah mereka melalui perampasan di tahun-tahun yang akan datang, dan mereka menduga bahwa antara tahun 2004 dan tahun 2020 ada

300 juta penduduk pedesaan Cina yang akan pindah ke kota-kota kecil dan kota-kota besar (Gilboy dan Heginbotham 2004, 258; Yardley 2004). Jika para perencana neoliberal yang urban-sentris di dalam dan dekat dengan pemerintah berhasil, angka tersebut bisa jadi lebih lebih tinggi lagi. Beberapa orang, seperti Pan Wei, seorang penasihat pemerintah yang berpengaruh dan juga profesor Universitas Beijing, berpikir bahwa negara seharusnya 'mendorong' akselerasi yang lebih besar dan lebih cepat migrasi petani ke pusat-pusat kota sehingga Cina dapat mengembangkan 100 kota tambahan berpenduduk 5 juta orang atau lebih selama 30 tahun berikutnya, baik dengan membangun kota-kota yang sama sekali baru atau memperluas yang sudah ada (Gilboy dan Heginbotham 2004, 257).

Akhirnya, para petani China dan kaum tak berpunya di pedesaan telah membentuk identitas kolektif yang beresonansi dengan gerakan agraria transnasional seperti Via Campesina dan memberikan dasar untuk mengonseptualisasikan alternatif-alternatif bagi kapitalisme neoliberal. Dalam pernyataan mereka tentang '*peasantness*', mereka mengartikulasikan sebuah kritik berkelanjutan tentang pembangunan yang urban-sentris dan menghubungkan konflik kelas paska-sosialisme utama dengan posisi otoritas otonom dan pantas untuk diri mereka sendiri – yang keduanya berhubungan dengan tingkat yang mencolok untuk pembelaan Via Campesina terhadap 'cara petani' masyarakat pedesaan (Desmarais 2002, 96). Pada saat yang sama, petani China telah mengalami revolusi sosial yang paling menyeluruh dan reforma agraria redistributif yang sebenarnya yang sejauh ini dilakukan di mana saja. Meskipun jumlah mereka berkurang dengan cepat, masih ada sejumlah besar yang mengalami tahap pertama dari revolusi/reformasi itu, dan banyak lagi yang muncul selama proses kolektivisasi. Sebagaimana dicatat,

kini banyak orang melihat kembali ke periode sebelumnya sebagai masa yang lebih baik ketika wacana moral tentang keadilan sosial dan bentuk-bentuk produksi yang benar-benar ada yang menjamin martabat dan kemanan mata pencaharian. Bersama dengan migran tak berpunya, anggota (yang sebagian besar kehilangan haknya) kelas pekerja perkotaan dan kaum miskin kota, sebagai akibat dari pengalaman hidup mereka dengan apa yang disebut globalisasi - serta perjuangan mereka di daerah pedesaan – serta dengan periode sebelumnya sebagai titik acuan yang digunakan untuk menilai masa sekarang, banyak petani menjaga idealisme egalitarian agar tetap hidup (cf. Chen 2006). Ini merupakan sebuah ruang ideologi alternatif yang penting yang tidak dapat ditangkap atau dikendalikan sepenuhnya oleh modal , dan dengan demikian membentuk sebuah daerah penting bagi pengembangan lebih lanjut gerakan agraria transnational.

Referensi

Amin, Samir, 2003. 'World Poverty, Pauperization, and Capital Accumulation'. *Monthly Review*, 55 (5): 1–9.

Amnesty International, 2007. '2007 Human Rights Report, Annual Report for China' http://www.amnestyusa.org/annualreport, Accessed 29 December 2007. 'An Overview of Unemployment 2003', 2004.*China Labor Bulletin*, 14 July. http://www.china-labor.org.hk, Accessed 24 July 2004.

Armitage, Catherine, 2004. 'Winter of China's Discontents'.*The Australian*(Sydney), 20December.

Barboza, David, 2005. 'In China, a New Capitalist Beachhead'. *International Business*, 18January: 1.

Becker, Jasper, 1997. 'Rural Revolt Forces Action on Excessive Tax'.*South China MorningPost*, 20 November: 9.

Bernstein, Thomas P., 1994. 'In Quest of Voice: China's Farmers and Prospects for Political Liberalization'. Paper presented to the University Seminar on Modern China, Columbia University, 10 February.

Bernstein, Thomas and Xiaobo Lu, 2003. *Taxation Without Representation in Contemporary Rural China*. New York: Cambridge University Press.

Borras, Saturnino M. Jr, 2004. 'La Vía Campesina: An Evolving Transnational AgrarianMovement'. *TNI Briefing Series* 2004/6: 1–30. Amsterdam: Transnational Institute.

Brenner, Robert, 2002. *The Boom and the Bubble: The U.S. in the World Economy*.London:Verso. Buckley, Chris, 2006. 'China to "Strike Hard" Against Rising Unrest'. *Boston Globe*, 26 January.

Cai, Yongshun, 2003. 'Collective Ownership or Cadres' Ownership? The Non-Agricultural Use of Farmland in China'.*China Quarterly*, 175: 663–80.

Chan, John, 2004a. 'Martial Law Declared as Unrest Deepens in Rural China'.*World Socialist Web Site*(http://www.wsws.org), 15 November: 1–4. Accessed 16 February 2006.

Chan, John, 2004b. 'China: Riot in Guangdong Province Points to Broad Social Unrest'. *World Socialist Web Site*(http://www.wsws.org), 30 November: 1–2. Accessed 16February 2006.

Chan, John, 2005a. 'Beijing Tightens Political Control Over Dissent'. *World Socialist Web Site* (http://www.wsws.org), 6 January: 1–5. Accessed 1 March 2007.

Chan, John, 2005b. 'New Year for China's Rural Migrant Workers'. *World Socialist Web Site*

(http://www.wsws.org), 22 February: 1–4. Accessed 1 March 2007.

Chan, John, 2006. 'Beijing Abolishes Centuries-Old Agricultural Tax'. *World Socialist Web Site* (http://www.wsws.org), 17 January: 1–3. Accessed 1 March 2007.

Chan, John, 2007. 'An Explosion of Billionaires in China'. *World Socialist Web Site*(http://www.wsws.org), 4 November: 1–2. Accessed 10 November 2007.

Chen, Feng, 2006. 'Privatization and Its Discontents in Chinese Factories'.*The China Quarterly*, March (185): 42–60.

Chen, Guidi and Chuntao Wu, 2006. *Will the Boat Sink the Water? The Life of China's Peasants*. New York: Public Affairs.

Chen, Jie, 2005. 'Community in China: Expanding Linkages with Transnational Civil Society'. *Asia Research Center*, Murdoch University, Working Paper No. 128, December: 1–18.

Cheng, Allen T. and Dune Lawrence, 2007. 'China Has 106 Billionaires, Up From 15 Last Year'. 14 October. http://www.Bloomberg.com/apps/news, Accessed 14 October 2007.'China Reports Drop in Rural Riots, Protests', 2006. *China Confidential*, 7 November.

Citizens' Earth – APM Network, 2006. 'The Development of the Citizens' Earth – APM Network in the Wake of the APM Program and the Current Situation'. http://www.terre-citoyenne-apm.org/img/html/bip-3063.html, Accessed 27 December 2007.

Cody, Edward, 2004. 'China's Land Grabs Raise Specter of Popular Unrest'.*The WashingtonPost* (Foreign Service), 5 October: 1A.

Cody, Edward, 2005. 'For Chinese, Peasant Revolt is Rare Victory; Farmers Beat Back Police in Battle Over

Pollution'. *The Washington Post* (Foreign Service), 13 June: 1A.

Cody, Edward, 2006. 'China Leader Makes Appeal on Corruption; President Sounds Alarm Loudly on Party Anniversary'. *The Washington Post* (Foreign Service), 1 July: 14A.

Communist Party of India (Marxist-Leninist), n.d. 'Agrarian Crisis and Agrarian Struggles'. http://www.cpiml.org/index.html, Accessed 5 June 2007.

De Angelis, Massimo, 2001. 'Marx and Primitive Accumulation: The Continuous Character of Capitalist "Enclosures" '. *The Commoner*, September (2). http://www.thecommoner.org, Accessed 3 March 2005.'Decision on Alleviating Peasants' Burdens', 1997. *Xinhua*(Beijing), FBIS Translated Text (AFS Doc. No. 0W0404115697).

Desmarais, Annette-Aurelie, 2002. 'The Vía Campesina: Consolidating an International Peasant and Farm Movement'. *The Journal of Peasant Studies*, 29 (2): 91–124.

Divjak, Caarol, 2000. 'Rural Protests in China Put Down By Riot Police'. *World Socialist Web Site*(http://www.wsws.org), 7 September: 1–3. Accessed 16 February 2006.

Duraes, Suzanne, 2007. 'La Vía Campesina Launches a Global Campaign for Agrarian Reform in Africa'. 24 January. http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=viewoid=-271&itemid=1, Accessed 27 December 2007.

'Economists Examine Rural Land Problems, Offer Diverse Solutions', 2004. FBIS Report, FBIS Document No. FBIS-CHI-2004-0722, 8 July.

Edelman, Marc, 2003. 'Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks'. In *Global Civil Society* ,

eds Mary Kaldor, Helmut Anheier and Marlies Glasius, 185–220. London: Oxford University Press.'Farmers in Revolt Near Harbin Against Land Seizures', 2007.

Asia News, 27 August: 1.'Farmers Protesting the Theft of Their Lands Are Jailed for Extortion', 2007. *Asia News*,13 April: 1.

Federici, Silvia, 2001. 'The Debt Crisis, Africa, and the New Enclosures'. *The Commoner*,September (2): 1–13. http://www.thecommoner.org, Accessed 3 March 2005.

Fewsmith, Joseph, 2007. 'Assessing Social Stability on the Eve of the 17th Party Congress'. *China Leadership Monitor*, 20: 1–24.'Five Thousand PRC Farmers Protest Investment Firms' Collapse', 1999. Hong Kong AFP, FBIS Transcribed Text (AFS Doc. No. 0W2809121399), 28 September.

Gilboy, George J. and Eric Heginbotham, 2004. 'The Latin Americanization of China?'. *Current History*, September (103): 256–61.

Goodspeed, Peter, 1993. 'China's Peasants Get Restless: Rural Protests Send Shock Waves Through Beijing's Urbanized Elite'.*The Toronto Star* , 11 July: 2F.

Greenfield, Gerard and Apo Leong, 1997. 'China's Communist Capitalism: The Real World of Market Socialism'. In *The Socialist Register 1997*, ed. Leo Panitch, 96–122.New York: Monthly Review Press.

Gu, Qing-er, 2006. 'Communist Authorities Sentence Survivors of Shanwei Massacre'. *The Epoch Times*, 28 May. http://en.epochtimes.com/news/6-5-28/42034.html,Accessed 4 October 2007.

Guo, Xiaolin, 2001. 'Land Expropriation and Rural Conflicts in China'. *The China Quarterly*, June (166): 422–39.

Hart-Landsberg, Martin and Paul Burkett, 2004. 'China

and Socialism: Market Reforms and Class Struggle'. *Monthly Review*, 56 (3): 7–123.

Harvey, David, 2003.*The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.

Harvey, David, 2005.*A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford UniversityPress.

He, Qinglian, 2000. 'China's Descent into a Quagmire: Part I'. *The Chinese Economy*, 33 (3): 32–88.

He, Qinglian, 2001a. 'China's Descent into a Quagmire: Part II'. *The Chinese Economy*, 34 (2): 6–96.

He, Qinglian, 2001b. 'China's Descent into a Quagmire: Part III'. *The Chinese Economy*, 34 (4): 6–94.

He, Qinglian, 2006. 'Officially Sanctioned Crime in China: A Catalogue of Lawlessness'. *China Rights Forum*, (3): 92–3.

He, Qinglian, 2007. 'Officially Sanctioned Crime and Property Rights'. *China Forum*, (2): 44–57.'Highlights: PRC Civil Disturbances, 1 Jan–15 Dec 04', 2004. FBIS Report, 23 December.

Ho, Peter, 2001. 'Who Owns China's Land? Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity'. *The China Quarterly*, June (166): 394–42.

Holland, Lorien, 1999. 'China Cracks Down on Secretive Army of Peasants'. *The Independent* (London), 27 August.

Holz, C A., 2007. 'Have China Scholars All Been Bought?'. *Far Eastern Economic Review*, 170 (3): 36–40.

Hu, Ping, 2005. 'Taishi Village: A Sign of the Times'. *China Rights Forum*, (4).

Hurst, William and Kevin J. O'Brien, 2002. 'China's Contentious Pensioners'. *The China Quarterly*, (170): 345–60.'Illegal Land Grabs Up', 2007. *Asia News*, 22 March: 1.

Jacka, Tamara, 1998. 'Working Sisters Answer Back: The Representation and Self-Representation of Women in

China's Floating Population'. *China Information*, 13 (1): 43–75.

Kahn, Joseph, 2005. 'China to Cut Taxes on Farmers and Raise Their Subsidies'. *The New York Times* (New York), 3 February: 3A.

Kahn, Joseph, 2006a. 'Pace and Scope of Protest in China Accelerated in '05'. *The New York Times* (New York), 20 January: 10A.

Kahn, Joseph, 2006b. 'Chinese Premier Says Seizing Peasants' Land Provokes Unrest'. *The New York Times* (New York), 21 January: 3A.

Kahn, Joseph and Jim Yardley, 2007. 'As China Roars, Pollution Reaches Deadly Extremes'. *The New York Times* (New York), 26 August: 1A, 10A.

Lee, Ching Kwan, 2007. *Against the Law: Labor Protests in China's Rustbelt and Sunbelt*. Berkeley, CA: University of California Press.

Li, Cheng, 2006. 'Think National, Blame Local: Central-Provincial Dynamics in the Hu Era'. *China Leadership Monitor*, Winter (17): 1–24.

Li, D, 1993. 'Liudong renkou yu shehui wending' (The floating population and social stability). *Shehui*, 8: 42–3.

Li, Fan, 2006. 'Unrest in China's Countryside'. *China Brief: The Jamestown Foundation*, 6 (2): 6–8. http://www.jamestown.org/china_brief/article.php?articleid=2373163, Accessed 9 October 2007.

Li, Lianjiang, 2006. 'Driven to Protest: China's Rural Unrest'. *Current History*, September: 250–4.

Li, Lianjiang and Kevin J. O'Brien, 1996. 'Villagers and Popular Resistance in Contemporary China'. *Modern China*, 22 (1): 28–61.

Li, Zijing, 1997. 'Si sheng wushi wan nongmin kangzheng' (500,000 peasants resist in four provinces). *Zheng Ming*, August (238): 19–21.

Manthorpe, Jonathan, 2004. 'Unrest Sharply Increasing Through Much of China'. *Vancouver Sun* (Vancouver), 22 August.

McMichael, Philip, 2007. 'Revisiting the Peasant Question: A Lens on the Making of Another World'. http://devsoc.cats.cornell.edu/cats/devsoc/upload/mcmichal.pdf, Accessed 28 October 2007.

Marx, Karl, 1976. *Capital, A Critique of Political Economy*, Vol. 1. London: Pelican Books.

Miao, Ye, 2003. 'China's Land Market Creates Pressures'. *Asia Times*, 20 August. 'NPC: In the End China Opts for Private Property', 2007. *Asia News*, 9 March: 1.

O'Brien Kevin J. and Lianjiang Li, 2006. *Rightful Resistance in Rural China*. New York: Cambridge University Press.

Perry, Elizabeth J., 2003. 'To Rebel Is Justified: Cultural Revolution Influences on Contemporary Chinese Protest'. In *The Chinese Cultural Revolution Reconsidered: Beyond Purge and Holocaust*, ed. Kam-yee Law, 262–81. New York: Palgrave Macmillan.

Pils, Eva, 2005. 'Land Disputes, Rights Assertion, and Social Unrest in China: A Case From Sichuan'. *Columbia Journal of Asian Law*, Spring–Fall (19): 235–92.

Poole, Teresa, 1993. 'Chinese Leaders Told to Heed Disgruntled Farmers'. *The Independent* (London), 20 October. 'Public Security Organs Strike Hard in 98', 1999. *Xinhua* (Beijing), FBIS Translated Text (AFS Doc. No. 0W0901013099), 8 January.

Rural Development Institute, 2005. 'China to Deepen Land Management Reform', Monitoring Report, 1 November 2004–31 January 2005. http://www.rdiland.org/RESEARCH/Monitoring_Archives_01_05.html, Accessed 2 April 2005.

'Rural Tax Reform to Reduce Financial Burden on Farmers', 2003. *Xinhua* (Beijing), FBIS Translated Text

(AFS Doc. No. CPP20030528000024), 28 May.

Saiget, Robert J., 2007. 'AFP Interviews Residents of Northern Chinese Village 2 Years After Deadly Protest'. Hong Kong Agence France-Presse (English), 10 October.

Scott, James C., 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, CT: Yale University Press.

Solinger, Dorothy J., 1999. *Contesting Citizenship in Urban China: Peasant Migrants, the State, and the Logic of the Market*. Berkeley, CA: University of California Press.

Tang, Hongqian, Guo Xiaoming and Shen Maoying, 1993. 'Dangqian nongyong tudifeinonghua wenti de diaocha yu fenxi' (An investigation and analysis of the current non-agricultural uses of farmland). *Nongye jingji wenti*, 3: 45–51.

Tang, Yuen Yuen, 2005. 'When Peasants Sue En Masse: Large Scale Collective ALL Suits in Rural China'. *China: An International Journal*, 3 (1): 24–49.

Tanner, Murray Scott, 2004. 'China Rethinks Unrest'. *Washington Quarterly*, 27 (3): 137–56.

Tanner, Murray Scott, 2005. 'Rethinking Law Enforcement and Society: Changing Police Analysis of Social Unrest'. In *Engaging the Law in China: State, Society, and Possibilities for Justice*, eds Neil J. Diamant, Stanley B. Lubman and Kevin J. O'Brien, 193–212. Stanford, CA: Stanford University Press.

Tarrow, Sidney, 1994. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Thompson, E.P., 1971. 'The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century'. *Past and Present*, 50: 83–103.

Thornton, Patricia, 1999. 'Beneath the Banyan Tree: Popular Views of Taxation and the State during the Republican and Reform Eras'. *Twentieth-Century China*, 25 (1): 1–42.

Thornton, Patricia, 2004. 'Comrades and Collectives in Arms: Tax Resistance, Evasion, and Avoidance Strategies in Post-Mao China'. In *State and Society in 21st Century China: Crisis, Contention and Legitimation*, eds Peter Hays Gries and Stanley Rosen, 87–104. New York: Routledge Curzon.'Threat of Rural Unrest Forces China to Push Ahead with Tax Reform', 2002. Hong Kong AFP, FBIS Transcribed Text (AFS Doc. No. CPP20020623000008), 23 June.'Turning Ploughshares into Staves: China's Land Disputes', 2005. *The Economist*, 25 June.

Vía Campesina, 2006. 'Violations of Peasants' Human Rights: A Report on Cases and Patterns of Violence'. http://www.viacampesia.org, Accessed 28 December 2007.

Walker, Kathy Le Mons, 1999. *Chinese Modernity and the Peasant Path: Semi-Colonialism in the Northern Yangzi Delta*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Walker, Kathy Le Mons, 2006. ' "Gangster Capitalism" and Peasant Protest in China: the Last Twenty Years'. *The Journal of Peasant Studies*, 33 (1): 1–33.

Weil, Robert, 2006. 'We Have Been Here Before: The Cultural Revolution in Historic Perspective in the Global Struggle for Socialism'. *China Study Group*, 31 December: 1–13. http://www.chinastudygroup.org, Accessed 4 May 2007.

Wen, Dale, 2004. 'China Copes with Globalization: A Mixed Review, Part IV'. *International Forum on Globalization*, 31 December. http://www.chinastudygroup.org, Accessed 4 May 2007.

'Wen Jiabao Leading Move to Reduce Rural Taxes', 2003. *Wen Wei Po* (Hong Kong), FBIS Translated Text (AFS Doc. No. CPP20030804000045), 3 August.

Wen Tiejun and Zhu Shouyin, 1996. 'Xian yixia difang zhengfu ziben yuanshi jilei yunongcun xiaochengzhen jianshe zhong de tudi wenti' (The primitive accumulation of capital by sub-county local governments and land problems under rural urbanization). *Jingji yanjiu ziliao*, 1: 20–5.

Yao, Runfeng, 2003. 'Encroachment on the Rights and Interests of Peasants Regarding Land Has Become the Most Glaring Current Problem in the Infringement of Peasants Interests'. *Xinhua* (Beijing). FBIS Translated Text (AFS Doc. No. CPP20030820000137), 20 August.

Yardley, Jim, 2004. 'In Rural China, Unrest Over Land Seizures'. *New York Times* (New York), 9 Dec: 2.

Yardley, Jim, 2005. 'A Chinese Court Sentences Farmers Who Protested a Land Seizure'. *The New York Times*, 21 January: 4A.

Yu, Depeng, 1994. 'Chengxiang guanxi zhong de "cheng che xiaoying" ' (The 'riding the train' effect in relations between city and countryside). *Shehui*, 3: 37–9.

Yue, Shan, 1997. 'Gan-E wushi wan nongmin baodong' (Five hundred thousand peasants violently rebel in Jiangxi and Hubei). *Zheng ming*, September (239): 21–23.

12

Dimana Tidak Ada Gerakan : Perlawanan Lokal dan Potensi Solidaritas

Kevin Malseed

Pendahuluan

Pada konferensi internasional yang mengambil tema 'Land, Poverty, Social Justice and Development' pada tahun 2006,[268] saya bertanya apa yang saya pikir merupakan pertanyaan sederhana. Para pembicara terdiri dari perwakilan para akademisi dan gerakan agraria transnasional, di depan rekan kerja mereka, penyandang dana dan para pendukung, para pegawai badan pembangunan, dan lain-lain. 'Saya bekerja di tengah masyarkat Karen di Birma yang secara aktif berjuang untuk tanah dan hak asasi manusia di tingkat desa, tetapi mereka tidak dapat membentuk gerakan secara terbuka karena tekanan dari rezim militer. Apakah gerakan anda memiliki kebijakan solidaritas atau keterlibatan dengan orang-orang dalam

[268] Diselenggarakan 9-14 Januari 2006 di Institute Of Social Studies, The Hague, Belanda.

situasi seperti itu?' Karena pembicaraan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, saya melihat kebingungan terlihat di pembicara, dan ketika datang waktunya untuk menjawab pertanyaan, jawaban untuk saya tidak muncul, yang ada malah pemberian dukungan terhadap penyerangan WTO, World Bank dan lainnya. Sebenarnya, selama konferensi tampaknya tidak ada yang mampu memberikan saya jawaban. Sementara kepemimpinan petani dalam gerakan-gerakan ini yang telah menjadi ahli dalam bekerja di Institusi internasional, saya mulai bertanya-tanya apakah mereka telah terlalau memikirkan bagaimana melibatkan orang-orang akar-rumput di mana mereka tidak memiliki anggota. Bab ini bertujuan untuk mengangkat pertanyaan saya tadi bersama dengan yang lainnya, dengan harapan merangsang diskusi dan perhatian orang di seluruh dunia yang perjuangannya dalam banyak hal menyerupai gerakan, tetapi yang tidak memiliki kebebasan politik untuk membentuk sebuah 'Gerakan'.

Menulis mengenai gerakan-gerakan agraria umumnya mengabaikan negara seperti Burma,[269] dimana setiap gerakan terbuka harus bekerja sama dengan negara atau mangalami pemusnahan. Meskipun demikian, perlawanan sehari-hari dan bersifat lokal terhadap negara dan para pelaku lainnya terbukti terjadi diseluruh pedesaan Burma. Bagaimana perlawanan ini dibandingkan dengan dengan tujuan, taktik dan prestasi gerakan-gerakan agraria yang lebih terstruktur di tempat lain? Bisakah itu dianggap

[269] Burma diganti namanya menjadi 'Myanmar Naing-Ngan' oleh junta militer yang berkuasa pada tahun 1989. Perubahan nama ini telah ditolak karena dianggap tidak sah oleh kepemimpinan yang terpilih secara demokratis pada tahun 1990 (tetapi tidak pernah diperbolehkan untuk membentuk sebuah pemerintahan), dan dan juga dianggap asimilasionis oleh sebagian besar kelompok oposisi berbasis etnis; oleh karena itu penelitian ini tetap menggunakan kata 'Burma'.

sebagai bentuk gerakan itu sendiri? Dan apa, jika ada, yang harus ditawarkan satu sama lain oleh orang-orang pedesaan Birma dan gerakan-gerakan transnasional? Bab ini membahas masalah-masalah seperti yang terjadi pada penduduk perbukitan Karen, yang menerapkan ketidak-patuhan dan perlawanan yang luas walapun hidup dalam situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengorganisasikan gerkan terbuka.

'kami Akan Tetap Disini'[270]: Sebuah Konteks

Hanya dua minggu sebelum panen padi Oktober 2005, sepasukan tentara yang terdiri dari 300 Angkatan Darat Burma datang ke Sungai Shwegyin untuk memaksa orang-orang Karen pindah ke daerah yang diawasi oleh negara ke arah barat. Sekitar 1.000 warga desa melarikan diri dari desa mereka ketika pasukan muncul. Pada tanggal 19 September, pasukan tersebut menembak mati seorang penduduk desa yang mereka lihat di sawah, kemudian mulai menyerang Ler Wah dan desa lainnya di kawasan itu. 35 tentara perlawanan desa Karen berjuang sebentar dan kemudian menarik diri dan diganti Angkatan Darat yang bergerak di desa-desa, menghancurkan dan membakar rumah, menyayat dan melubangi kaleng air penduduk desa untuk mencegah mereka tinggal di sana. Bagi para penduduk desa ini bukanlah sesuatu yang baru: Angkatan Darat pertama kali membakar desa mereka pada tahun 1975, menyebabkan mereka berpencar ke dalam permukiman-pemukiman yang lebih kecil dan tersembunyi di hutan di mana mereka bisa tetap bertani tapi menghilang setiap kali pasukan tentara datang, yang biasanya terjadi sekali atau dua kali dalam setahun. Penduduk desa lebih

[270] wawancara dengan orang Karen, Nyaunglebin District, November 2005.

memilih seperti ini daripada harus melakukan kerja paksa dan di bawah penindasan yang akan mereka hadapi di bawah kekuasaan negara.

Kali ini mereka menuju puncak bukit di timur, orang dewasa ke lereng bukit terdekat di mana mereka bisa memantau gerakan Angkatan Darat, keluarga pergi ke bukit yang lebih tinggi. Sementara orang dewasa dengan cepat membangun tempat penampungan, pelajar-pelajar remaja dikirim untuk mengambil beras dari gudang penyimpanan tersembunyi. Guru sekolah menyandarkan papan tulis pada pohon-pohon dan melanjutkan sekolah untuk anak-anak kecil. Para tetua desa pergi untuk menghubungi pasukan perlawanan Karen untuk mendapatkan informasi dan beberapa ranjau rakitan untuk digunakan dalam mempertahankan tempat persembunyian dari tentara yang sedang berusaha mengejar. Tentara tidak pernah muncul keatas bukit, mungkin takut disergap, dan menarik diri pada tanggal 3 November tanpa menangkap satupun warga desa. Orang-orang segera kembali untuk memulai panen yang tertunda, sementara pasukan perlawanan Karen membersihkan desa-desa dan ladang dari setiap ranjau darat yang ditinggalkan oleh pasukan yang telah mundur.[271]

Sementara itu, penduduk desa yang tinggal di 20 desa yang dikuasai pemerintah di sebelah barat —dimana penduduk desa Ler Wah telah diperintahkan untuk pergi— dipaksa mebuat jalan akses militer tanpa dibayar. Sepanjang pelarian mereka yang terorganisir, penduduk desa Ler Wah tidak hanya mempertahankan panen dan juga akses ke tanah mereka, tetapi juga menghindari kerja paksa untuk negara tanpa bayaran. Pemberontakan ini harus dibayar mahal: itu adalah yang kedua kalinya tanah mereka diserang pada tahun 2005, dan pada awal tahun 2006 pasukan

[271] wawancara dengan para penduduk desa di wilayah yang terkena, November 2005.

negara datang dan membakar desa mereka lagi. *Tatmadaw* (tentara Burma) kemudian mendirikan sebuah posko permanen di wilayah tersebut, menciptakan krisis makanan dan menyebabkan banyak penduduk desa mengungsi ke kamp-kamp pengungsi di Thailand; tetapi sebagian besar tetap tinggal di sana, memantau gerakan Tatmadaw sementara mereka bermukim di hutan-hutan untuk terus bertani dan mengerahkan tuntutan mereka atas tanah mereka (KHRG 2006b).

Etnisitas dan Penindasan: Konflik Atas Kedaulatan

Setidaknya 80 persen dari perkiraan populasi di Burma sekitar 50 juta merupakan pedesaan dan agraris.[272] Jumlah orang Karen mungkin sekitar empat sampai tujuh juta, terkonsentrasi di Negara Karen dan Pegu, Negara Bagian Irrawaddy dan Tenasserim.[273] Unit utama organisasi sosial adalah desa (Marshall 1997, 127), yang terdiri dari lima sampai beberapa ratus keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala desa dan dewan tetua yang dipilih melalui berbagai bentuk konsensus desa. Etnisitas dan agama mungkin dua komponen kuat dalam identifikasi-diri masyarakat di Burma. Aspek lain identitas termasuk mata pencaharian: di daerah Karen sebagian besar penduduk desa merupakan petani padi ladang atau petani padi irigasi, tetapi beberapa adalah buruh tak bertanah, saudagar atau pedagang, atau campuran usaha pertanian padi dengan berbagai macam variasi. Di daerah datar pertanian komersial skala keluarga dan campuran mata pencaharian men-

[272] Tidak ada data sensus yang dapat dipercaya karena manipulasi data oleh pemerintah militer sejak tahun 1962 (lihat Smith 1991, 30).

[273] Sensus negara mengklaim 'antara 2 dan 5 juta, sedangkan nasionalis Karen mengklaim antara 7 sampai 12 juta' (Cheesman 2002, 203). Di daerah yang terkait dengan kelompok etnis utama Birma, lihat Smith (2002).

jadi hal umum, sedangkan di desa-desa yang lebih kecil (umumnya di bawah 50 rumah tangga) di perbukitan keluarga-keluarga lebih berfokus pada subsisten dan barter, masing-masing memiliki sawah, kebun kecil dan ternak, dan juga sedikit hasil panen.[274]

Identitas Karen umumnya telah terbentuk sebagai perlawanan terhadap 'Burmanness', yang mengacu pada etnis dominan di Burma pusat. Para penulis menghubungkan hal ini dengan migrasi bersejarah banyak orang Karen ke daerah perbukitan terpencil untuk melarikan diri dari pemerasan dan perbudakan oleh kerajaan Burma, hal tersebut menyebabkan identifikasi diri sebagai orang bukit yang hidup di luar jangkauan negara, yang sudah terbiasa dengan ancaman dan tekanan dari luar (Keyes 1977; Hinton 1979). Dengan tidak adanya struktur politik yang lebih tinggi daripada desa (Marshall 1997, 143), wilayah Karen selalu rawan dikuasai oleh masyarakat lembah yang secara hirarkis lebih terstruktur seperti kerajaan Burma. Pada 1800-an, orangSgaw, Pwo, Bwe, Pa'O dan bermacam-macam kelompok 'Karenni', meskipun berbeda geografis, agama dan bahasa, memadukan identitas 'Karen' yang lebih solid untuk bertahan hidup (Hinton 1979, 92-3), sebuah proses yang didukung oleh para missionaris asing (Cheesman 2002, 203). Ynag penting bagi identitas ini adalah adanya 'rasa adanya penindasan menunnggu di pintu' (Keyes 1977, 51) dan karakterisasi-diri sebagai 'yang tertindas, tak-berpendidikan dan berbudi luhur' (Cheesman 2002, 204). Mereka telah menetapkan diri sebagian besar berdasarkan pada 'oposisi struktural terhadap kelompok lain serupa. . . orang Karen juga memiliki mitos tersendiri dan cerita rakyat yang memiliki tema yang sama - posisi struktural mereka yang inferior vis-à-vis masyarakat dataran

[274] Pengamatan terlibat, desa-desa Karen, 1991-2005.

rendah, dikompensasikan oleh kepercayaan dalam superioritas moral mereka ' (Fernando 1982, 130).

Identitas ini bisa berdampingan dengan otoritas pusat, setelah didominasi oleh kerajaan Burma dan kemudian oleh kolonialis Inggris, selama bentuk kedaulatan tradisional Asia masih berlaku, dengan kata lain otoritas pusat hanya mengontrol wilayah terbatas di dalam jangkauan pusat kekuasaan, sambil dengan senang hati mengumpulkan upeti atau menetralkan ruang 'bukan-negara' yang semakin jauh menyimpang (Scott 1998, 185-7). Akan tetapi sejak kemerdekaan Burma pada tahun 1948, negara yang tersentralisasi semakin berusaha untuk memaksakan kedaulatan teritorial atas seluruh geografi 'Burma', yang mengarah pada konflik langsung dengan orang Karen dan penduduk desa lainnya yang terbiasa untuk melaksanakan pengaturan lokal atas urusan mereka sendiri (Malseed 2006, 10). Akibatnya adalah konflik masyarakat-negara merambah ke militer negara menghadapi spektrum perlawanan mulai dari orang sipil yang tidak-kooperasi yang tersebar untuk mendukung secara aktif dan ikut serta dalam pasukan perlawanan bersenjata Karen.

Perlawanan bersenjata segera dimulai setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948, termasuk pemberontakan Komunis dan beberapa gerakan perlawanan bersenjata yang dibangun di sekitar etnisitas dan pencarian kemerdekaan atau otonomi. Pasukan militer merebut kekuasaan negara pada tahun 1962 dan memegang kekuasaan sejak itu, sambil menghadapi 20-30 kelompok perlawanan bersenjata dalam satu waktu di berbagai daerah terpencil Birma yang secara etnis bermacam-macam. Pada tahun 1988 rezim membubarkan dengan kekerasan demonstrasi kaum urban pro-demokrasi, kemudian membatalkan pemilu yang diselenggarakan dua tahun kemudian. Pemberontakan komunis meledak dan menjadi tentara etnis Wa pada tahun

1989, dan sejak saat itu bersama dengan sebagian besar kelompok bersenjata lain didesak untuk melakukan 'gencatan senjata' tidak resmi dengan rezim, yang sekarang menyebut diri State Peace and Development Council (SPDC). Kurang dari sepuluh kelompok bersenjata masih melawan SPDC, tidak ada yang melancarkan ancaman langsung terhadap kekuasaan negara; lebih banyak yang beroperasi sebagai perlawanan gerilya kecil dalam konflik berintensitas rendah, berusaha untuk meminimalkan kekuasaan negara dalam masing-masing daerah mereka.

Di wilayah berpenduduk Karen di Burma tenggara, kelompok bersenjata utama adalah Karen National Union/ Karen Natioanl Liberation Army (KNU/KNLA), yang masih dalam konflik bersenjata dengan SPDC. Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) dan beberapa kelompok pecahan Karen lainnya yang lebih kecil mematuhi gencatan senjata dengan SPDC dan kadang-kadang bekerja sebagai wakil tentara melawan KNU/KNLA. SPDC mewajib-militerkan sebagian besar balatentaranya di Burma tengah, tetapi kelompok-kelompok Karen mengandalkan dukungan dan merekrut masyarakat sipil setempat, kadang-kadang sukarela, kadang-kadang dipaksa (HRW 2007). Meskipun kalah dalam jumlah dan senjata,[275] KNU / KNLA bertahan dengan dukungan sipil lokal, tetapi yang lebih penting dengan dukungan dari pihak sipil yang tidak bekerja sama dengan kekuatan negara. Sebagian besar keluarga memiliki kerabat langsung atau dekat di kepangkatan KNU / KNLA, yang sudah dirampingkan dan menjadi sukarelawan terutama sejak tahun 1995. Dukungan sipil juga didasarkan pada program kesehatan dan pendidikan KNU, perlawanannya terhadap gangguan negara dan aksinya yang terus-menerus untuk melindungi warga

[275] Jumlah tentara Tatmadaw sekitar 350,000, KNLA sekitar 3,000–5,000 (HRW 2002,19,121).

sipil yang terlantar, walaupun juga dikritik dalam masalah pajak dan kadangkala pengerahan paksa. DKBA memiliki basis dukungan yang lebih kecil, terutama karena ia telah mengalienasi banyak warga sipil melalui tuntutan beratnya untuk kerja paksa, pemerasan dan pengerahan paksa; jarang melindungi warga sipil terhadap predasi negara. Kelompok-kelompok bersenjata lainnya di daerah Karen kecil dan terbatas, dan memusatkan kekuatan mereka pada bisnis dan pemerasan.[276]

Tatmadaw terus berkembang dan membangun basis di pedesaan seluruh negeri, termasuk di wilayah yang tidak ada perlawanan bersenjata (Selth 2002, 35-6,165-6). Basis-basis ini menyebarkan kekuatan ke desa-desa sekitarnya, menerapkan pembatasan kegiatan dan gerakan warga sipil dan memeras sumberdaya, hasil panen dan tenaga kerja. Dimana populasi susah dikendalikan, Tatmadaw memerintahkan warga sipil untuk pindah ke tempat-tempat yang dikontrol oleh Angkatan Darat sambil menghancurkan desa mereka, hasil panen dan suplai makanan mereka. Warga sipil di daerah ini juga dipaksa bekerja sebagai kuli militer, pemandu dan sebagai pelayan di markas tentara (TBBC 2007, 2-4; HRW 2002, 20).

Operasi ini didukung oleh undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1974 yang menyerahkan kendali atas semua tanah pada negara (Hudson-Rodd et al 2003).

> Saat ini, Negara menguasai semua tanah. Petani hanya memiliki hak untuk mengolah, yang anggota rumah tangga dapat mewarisinya jika diizinkan oleh otoritas. . . Negara dapat mencabut hak guna tanah jika petani tidak menanam tanaman yang ditentukan oleh otoritas atau menggunakan tanah sebagaimana yang ditentukan.

[276] Penelitian lapangan, 1991-2007; wawancara pendukung dapat ditemukan dalam laporan KHRG sejak tahun 1995 (lihathttp://www.khrg.org).

> Penjualan tanah dan pengalihan hak kepemilikan adalah ilegal tapi penyewaan dan penjualan tanah dan pengalihan hak kepada orang yang bukan anggota keluarga tetap ada di tingkat informal. (Hudson- Dan Nyunt Rodd 2001, 6)

Di sebagian besar wilayah negara telah menetapkan bahwa penduduk desa harus menanam padi sebagai tanaman pokok dan harus memaksimalkan hasilnya; mereka yang gagal dicabut hak kepemilikan tanahnya dan/atau dipenjara (Hudson-Rodd et al 2003). Peningkatan produksi dilakukan melalui pemaksaan rencana penanaman gandadan tiga kali lipat, yang sering gagal ketika pejabat pemerintah yang korup mencuri pupuk yang diperlukan dan uang untuk infrastruktur irigasi, penduduk desalah yang membayar denda saat tiba waktu panen (Thawnghmung 2004, 1, 156-7; KHRG 2007, 43-5). Meskipun rezim mengklaim telah menghapus sistem pengadaan padi pada tahun 2003, yang memaksa penduduk desa untuk menyerahkan sekitar 20 persen dari setiap hasil panen jauh di bawah harga pasar (Fujita dan Okamoto 2006, 9-10), penduduk desa Karen di sebagian besar wilayah mengatakan bahwa hal ini hanya berujung pada peningkatan tuntutan *ad hoc* terhadap hasil panen mereka oleh pejabat militer lokal.[277] Militer dan otoritas sipil secara rutin menyita tanah dan menuntut tenaga kerja tanpa kompensasi kapanpun dibutuhkan untuk membangun jalan, markas Tatmadaw atau persediaan pertanian Tatmadaw(KHRG 2007, 20, 57-8). Perdagangan beras dan komoditas lainnya, meskipun tidak lagi dikontrol dengan ketat oleh monopoli negara, masih dibatasi oleh kontrol atas barang bergerak di wilayah 'sensitif' seperti perbukitan Karen, dan oleh tingginya biaya untuk menyuap para pejabat dan pos-pos pemeriksaan

[277] Wawancara, petugas kesehatan Karen, September 2005.

untuk membawa hasil panen ke pasar.[278]

Kebijakan-kebijakan ini telah menempatkan negara dalam konflik langsung dengan sistem tradisional pengolahan tanah penduduk desa. Di desa-desa Karen, sebagian tanah di sekitar desa adalah tanah komunal sementara cropping land berada di bawah kepemilikan tradisional dalam keluarga; alokasi dan sengketa tanah ditangani oleh para tetua desa dalam 'traktat desa', sebuah unit terdiri dari beberapa desa di suatu wilayah. Sebuah studi tahun 2005 terhadap para penduduk bukit Karenmenemukan bahwa hanya 23 persen yang memegang dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang mengakui beberapa bentuk kepemilikan atas tanah mereka, sementara lebih dari 70 persen memegang hak atas tanah melalui kepemilikan adat atau izin dari tetua desa (TBBC 2005).

Pertanian subsisten membentuk komponen penting identitas di pedesaan. Ikatan dengan tanah bersifat material, sebagai komponen penting demi kelangsungan hidup, dan bersifat spiritual. Animisme tradisional Karen berdasarkan pada seputar kekuatan-kekuatan yang bersemayam dalam semua benda, yang harus dipenuhi(Marshall 1997, 210-11), kepercayaan yang secara parsial telah diasimilasikan ke dalam Buddhisme dan Kristen lokal. Kebijakan negara atas tanah dan produksi hasil panen oleh karena itu sering dilihat sebagai serangan terhadap inti kehidupan, kelangsungan hidup dan spiritualitas desa. Dikombinasikan dengan tuntutan akan beragam kerja paksa (termasuk bekerja di tanah desa yang disita), pemerasan teratur uang dan makanan, dan hukuman kekerasan bagi mereka yang tidak patuh, hal ini menyudutkan penduduk desa di mana mereka tidak memiliki pilihan selain melawan.

---

[278] Lihat website World Food Programme, http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?negara=104.

Respon Desa

Banyak respon muncul selama beberapa dekade dengan arah yang berbeda, sebagian besar melibatkan berbagai bentuk perlawanan dan penyingkiran. Sebagai contoh, ketika penduduk desa diperintahkan untuk menanam padi musim kemarau mereka sering membeli bibit seperti yang telah ditetapkan tetapi tidak ditanam, mengetahui bahwa hasil panennya akan gagal karena infrastruktur irigasi yang diperlukan tidak ada. Bahkan jumlah benih yang mereka beli dikurangi karena mereka tidak melaporkan luas tanah yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Ketika kuota diminta pada waktu panen yang diproyeksikan, mereka menegosiasikan pengurangan karena penyakit, kurangnya air atau bencana lainnya, dan jika gagal mereka menyuap pejabat pemerintah. Taktik ini segera merusak proyek agrofuel nasional negara, yang mengharuskan setiap desa untuk menanam ribuan pohon jarak dan semak-semak jatropha dan panen buncis untuk menyediakan agrofuel bagi Tatmadaw (KHRG 2007, 45-6). Seorang pemimpin perempuan desa mengungkapkan pendapat umum: "Saya rasa kacang kastor ini tidak memberikan hal baik bagi kami. Tidak ada yang mau menanamnya dan kami tidak tahu cara menanam nya. . . . Kami kira kami tidak akan menanamnya, kami hanya akan membayar harga yang mereka tuntut dan menyimpan benih di tempat yang aman '(KHRG 2007, 50).

Ketika para pemimpin desa menerima permintaan tertulis untuk tenaga kerja paksadan material, sudah biasa bagi mereka untuk tidak menanggapinya, lalu meminta kerabat memberikan alasan ketidakhadiran atau sakit, lalu dengan beralasan bahwa penduduk desa terlalu sibuk dengan pekerjaan pertanian; akhirnya, banyak tuntutan menguap atau berakhir sangat tertunda dan berkurang. Dalam salah satu contoh pada tahun 2004, seorang pegawai

junior menuntut kerja paksa sebuah desa dari hari ke hari tanpa ada seorangpun yang pernah muncul, sampai desa menerima surat yang menjengkelkan di mana ia menulis, "Aku dikeluarkan [oleh petugas yang lebih tinggi] karena kalian' dan mengancam untuk menyerang desa jika tidak ada yang datang untuk bekerja. Akhirnya desa 'patuh' hanya jika kekerasan fisik terjadi, dengan mengirimkan setengah dari jumlah buruh yang diminta setelah terlambat seminggu (KHRG 2005, 93).

Banyak taktik perlawanan yang tidak sepenuhnya spontan, dan di sini peran kepala desa dan para tetua desa penting karena mereka bertindak sebagai penghubung dengan semua kelompok bersenjata dan banyak penduduk desa mengikuti petunjuk mereka. Hal Ini memberikan strategi perlawanan tingkat koordinasi dan kesatuan arah, dan juga menyebarkan strategi di antara desa melalui pertemuan 'traktat desa' di mana para kepala desa dapat bertukar pengalaman. Pemimpin desa secara rutin dipanggil oleh Tatmadaw maupun pasukan non-negara untuk menerima perintah bagi desa-desa mereka, sehingga mereka harus menjadi negosiator yang cerdik . Laporan-laporan dan daftar-daftar yang diwajibkan untuk dipenuhi biasanya disunting dengan ketat agar sesuai dengan kepentingan desa mereka. Akibatnya mereka bertindak sebagai koordinator taktis bagi ketidak-patuhan dan perlawanan penduduk desa, walaupun ketika mereka memutuskan bahwa tuntutan tertentu harus dipatuhi mereka kadang-kadang ditentang oleh penduduk mereka sendiri. Bagaimanapun juga, mereka umumnya bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok bersenjata untuk setiap ketidakpatuhan dan biasanya yang pertama ditahan atau disiksa untuk ketidakpatuhan.

Kekuatan bernegosiasi ditambah dengan ditetapkannya tetua perempuan sebagai pemimpin desa. Dengan memanfaatkan penghormatan untuk figur-ibu dalam

budaya Burma, para perempuan ini secara rutin memarahi atau menantang para perwira militer muda yang memberikan perintah, mengetahui bahwa rasa berkuasa dan otoritas mereka menjadi membingungkan ketika dihadapkan dengan figur-seorang ibu. Dalam perintah tertulis ke desa-desa, sangat umum bagi petugas Tatmadaw untuk memanggil perempuanpemimpin desa sebagai 'Ibu' dan merujuk diri mereka sebagai 'Anak laki-laki'.[279] Dalam suatu kasus seperti itu, seorang perempuan pemimpindesa di distrik Papun menerima sebuah perintah pada akhir tahun 2005 untuk mengirim beberapa penduduk desa sebagai 'pemandu' patroli militer. Mengetahui bahwa ini berarti kerja paksa sebagai manusia penyapu ranjau, ia pergi ke markas untuk menemui petugas. Setelah dia bertemu dengan petugas disana, ia berkata kepada petugas tersebut, "Kau tahu aku tidak bisa meminta penduduk desa saya untuk melakukan hal ini. Saya tidak bisa meminta mereka untuk berjalan di depan pasukan Anda dan menginjak ranjau.' Petugas tersebut meminta maaf dan berkata tidak ada yang bisa dia lakukan; "Ini tugas saya dan ini adalah perintah dari atas, Anda harus melakukannya atau desa Anda akan dihukum.' Pemimpin perempuan itu berkata, 'Kalau begitu masukan aku dalam daftar.. Aku akan pergi. Tapi dengan satu syarat. Aku takut ranjau, dan aku yakin kau takut juga. Jadi mari kita berjalan di depan bersama-sama, bergandengan tangan. Jika saya atau Anda menginjak ranjau, kita berdua akan mati bersama-sama. Aku akan puas dengan itu. Petugas itu akhirnya menjawab, "Saya akan memikirkannya, pulanglah Bu dan saya akan memberitahu Anda keputusan saya nanti ' lalu tuntutan itu tidak pernah datang lagi.[280] Pemimpin wanita itu tahu

[279] Banyak contoh seperti ini muncul dalam KHRG (2002) dan KHRG (2003).

[280] Wawancara, peneliti hak asasi manusia Karen, November 2005.

bahwa petugas itu bebas untuk membunuhnya di tempat, atau menahannya tanpa tuduhan apapun,dan jika ia melakukannya maka penduduk desa tidak bisa berbuat banyak selain memohon atau membayar untuk kebebasannya, karena setiap bentuk protes akan dihukum keras. Namun dia cukup mengenalnya dan cukup yakin pada otoritas keibuannya untuk bertaruh bahwa petugas itu tidak akan melakukannya. Contoh serupa terjadi hampir setiap minggu di banyak daerah.

Mungkin yang paling signifikan adalah strategi penduduk desa untuk mempertahankan kekuasaan atas tanah yang telah diperintahkan pada mereka untuk ditinggalkan. Ketika penduduk desa diperintahkan untuk pergi dari tanah mereka dan pindah ke tempatyang dikontrol Angkatan Darat agar mereka berada dalam pengawasan, mereka biasanya menanggapinya dengan melarikan diri dan berpindah-pindah - tetapi tidak di luar jangkauan tanah mereka. Sebaliknya, mereka berganti-ganti mata pencaharian yang memungkinkan mereka menghindari otoritas, memantau gerakan militer sehingga mereka dapat terus mengerjakan tanah mereka. Hal ini biasanya melibatkan tinggal di desa ketika tentara tidak ada dan tinggal di hutan di lain waktu; menyembunyikan makanan di tempat tersembunyi atau tinggal dengan kerabat yang tinggal di desa-desa yang lebih stabil; beralih ke tanaman akar-akaran yang lebih tahan lama atau tanaman akar (seperti kapulaga) jika diperlukan; dan berdagang dengan desa-desa tetap untuk barang kering dalam 'pasar hutan' tersembunyi yang berlangsung selama sehari dan kemudian menghilang dengan cepat (Malseed 2006, 18). Semua itu diatur dengan tidak resmi oleh penduduk desa sendiri, dengan kepala desa sebagai fasilitator ketika dibutuhkan. Hubungan keluarga dengan kelompok bersenjata dimanfaatkan untuk intelijen atau perlindungan; tetapi jika komandan KNLA atau DKBA lokal membuat

tuntutan yang berlebihan, ia biasanya menemukan taktik penduduk desa yang sama 'berbalik melawan dia.

Memantau gerakan militer, berbagi makanan ketika kondisi sulit, menggelar pasar rahasia, menanam dan memanen dalam kelompok dan jika diperlukan malam hari dengan penjagaan bersenjata, adalah operasi yang membutuhkan banyak persiapan, koordinasi dan kerjasama berkelanjutan yang menghilangkan prasangka orang luar terhadap para penduduk desa ini sebagai 'pengecut ketakutan' yang kelaparan, tidak berdaya yang berkumpul di hutan. Banyak penduduk desa di bukit telah menjalankan bentuk berpindah-pindah sejak pertengahan tahun 1970-an, dan ini telah menjadi faktor utama dalam mencegah kendali militer di bukit (Malseed 2006). Pada pertemuan khusus antara penulis dengan penduduk desa yang terlantar pada akhir tahun 2005, mereka mulai dengan menggambarkan diri mereka sebagai masyarakat tak berdaya dan rentan; namun ketika ditanya apa bentuk spesifik kekuasaan yang diterapkan militer pada mereka, mereka mulai menceritakan bagaimana strategi perpindahan mereka yang telah memungkinkan mereka untuk menghindari kerja paksa, pemerasan dan penyiksaan, dan segera membahas bagaimana hal ini pasti menghancurkan rencana Tatmadaw dan menantang petugas di daerah mereka. Perpindahan ini dilakukan bukan sebagai pengabaian tanah dalam ketakutan, tapi sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan kekuasaan atas tanah, sebuah perpindahan strategis, yang dikarakterisasikan dengan tepat oleh Adas (1986, 64) sebagai 'protes penghindaran'.

Kepala desa sering memanfaatkan kontak dengan pasukan perlawanan untuk memperkuat kemampuan penduduk desa mereka untuk menghindari penyiksaan, apakah dengan mendapatkan intelijen akan gerakan Tatmadaw, ranjau atau senjata untuk mempersenjatai patroli desa, atau main sikut-sikutan satu sama lain (misalnya, menolak

tuntutan dengan mengklaim bahwa kelompok bersenjata lain telah menempatkan tuntutan atas sumber daya itu, baik itu makanan, oxcarts atau waktu kerja masyarakat). Seiring Tatmadaw menanam ranjau dan merusak lebih banyak panen, lebih banyak warga pengungsi yang cenderung menggunakan ranjau darat dan meminta persenjataan;[281] hingga penindasan yang lebih keras dan situasi material yang lebih mengecewakan memaksa perlawanan penduduk desa menjadi langsung dan terbuka.

Terlepas dari peran penting mereka, saya belum mendengar seorang kepala desa memformalisasikan atau berusaha menstrukturkan sebuah gerakan dengan mereka sendiri sebagai pemimpin, bisa jadi karena alasan-alasan yang akan dibahas di bawah ini. Sebaliknya, banyak desa telah memutuskan untuk berbagi beban menjadi kepala desa dengan menggilir posisi itu secara rutin. Seperti dijelaskan oleh seorang penduduk wanita di desa Negara Karen bagian selatan,

> Kepala desa. . . dipilih oleh masyarakat sendiri. Mereka biasanya wanita, karena pria tidak dapat bertahan dari pukulan dan hukuman yang berulang-ulang oleh para tentara. Oleh karena itu, tak seorang pun maumenjadi seorang kepala desa di seluruh wilayah. Beberapa desa menjalankan sistem rotasi untuk posisi itu, dan mengganti kepala desa sesering mungkin setiap dua minggu atau setiap bulan. Akibatnya, bahkan anak perempuan yang berusia 17- atau 18 tahun kadang-kadang bertindak sebagai kepala desa, tapi mereka dapat mengatur desa dan akan dipatuhi karena semua orang tahu bahwa mereka diperintah dan dipandu oleh para tetua desa, biasanya para pemimpin biara, dan sehingga mereka

[281] Wawancara, para pengungsi di Pegu Division timur, November 2005.

> tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan mereka. (KHRG 2006a, 68)

Strategi-strategi perlawanan memperoleh kemiripan yang kuat sepanjang ruang dan waktu, dengan contoh-contoh seperti di atas yang terjadi berulang kali di daerah yang terpisah 1.000 kilometer atau lebih.[282] Ini mungkin telah berkembang bebas seperti yang dibutuhkan, tetapi komunikasi antara kepala desa dan sepanang daerah melalui struktur pemerintahan dan militer yang dibentuk oleh KNU/KNLA hampir dipastikan memainkan peran. Semua ini dicapai tanpa struktur formal, tetapi dengan tingkat persetujuan umum yang biasanya berpusat pada seorang kepala desa. Seperti yang disebutkan Scott (1985, 35), keterlibatan sebagian besar masyarakat dalam tindakan yang dikombinasikan ' subkultur pendukung' membuat hal tersebut 'masuk akal untuk membicarakan tentang gerakan sosial. Anehnya, bagaimanapun, ini adalah gerakan sosial tanpa organisasi resmi, tidak ada pemimpin resmi, tidak ada manifesto, tanpa iuran, tanpa reputasi, dan tanpa banner'. Selain itu, siasat ini memasang tujuan-tujuan yang akan terdengar tidak asing bagi aktivis manapun dalam gerakan agraria transnasional: penguasaan atas tanah-tanah desa, hak mata pencaharian tradisional, dan pemeliharaan identitas dan masyarakat.

Sebuah pernyataan terbuka yang luar biasa dari perlawanan kelompok terjadi pada bulan September 2007 di bagian Timur Laut Karen, di kawasan di mana penduduk desa telah berulang kali mengungsi ke hutan terdekat karena gangguan Tatmadaw sejak tahun 2005. Meskipun terusir, penduduk desa ini pada umumnya dapat menghasilkan panen padi ketika Tatmadaw menarik diri selama

---

[282] Hal ini tercermin dalam sejarah lisan yang dikumpulkan oleh penulis dari, selatan Tenasserim Division hingga Northern Kayah State, 1991-2007.

musim hujan, tetapi pada tahun 2007 Tatmadaw mendirikan beberapa pos kecil namun permanen, yang mengakibatkan pada krisis makanan. Pada pertemuan dengan para pengungsi dari empat desa pada bulan September, pejabat KNU mendesak mereka untuk pindah ke daerah yang lebih aman, tapi juru bicara desa menjawab 'Jika kami pindah ke daerah lain yang KNLA tidak bisa mengamankannya untuk kami, dan SPDC akan membuat markas di sekitar desa kami sehingga kami tidak akan bisa kembali'. Mereka mengatakan mereka lebih suka tinggal di tanah mereka dan melarikan diri bila diperlukan, dan mereka menyebut diri mereka 'Gher Der' ('Pertahankan rumah [kami']). Tidak ada pemimpin yang disebutkan.[283] Menamai strategi-strategi mereka tidak mengubah mereka, tetapi mencerminkan pengetahuan yang jelas tentang kepentingan umum dan aksi bersama. Seiring penduduk desa yang hidup dengan menghindari kontak dengan negara, inisiatif ini terjadi di luar kekuasaan negara. Apakah akan menyebar, dan apakah akan ditargetkan untuk dihancurkan oleh Tatmadaw atau kooptasi oleh KNU, masih harus dilihat.

Masalah-masalah Pembentukan Gerakan terbuka

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perlawanan penduduk desa bisa lebih efektif jika lebih terstruktur dan sistematis, atau bersatu menjadi sebuah gerakan yang jelas dan bernama. Dalam kebanyakan konteks lokal ada beberapa kemungkinan untuk koordinasi yang lebih besar antara keluarga dan desa, dan sejak tahun 2005 para peneliti lapangan bersama dengan Karen Human Right Group telah mendorong pembahasaan di desa-desa di mana potensi-

[283] Informasi dan kutipan diterjemahkan dari laporan lapangan peneliti KHRG yang hadir. Nama desa dihilangkan untuk melindungi desa-desa yang bersangkutan.

potensi ini berada.[284] Kemungkinan berbeda-beda antara beberapa desa tergantung pada sistem panen, peran perwira militer daerah dan faktor lainnya, tetapi menciptakan suatu 'gerakan' yang lebih formal dengan struktur atau hierarki yang nyata umumnya tidak dilihat sebagai pilihan, karena alasan berikut.

Pertama, strategi ketidakpatuhan para penduduk desa yang telah berkembang sejak lama terutama karena tidak ada pemimpin atau struktur yang bisa dibunuh, ditangkap dan disupa oleh negara. Bandingkan hal ini dengan beberapa lusin kelompok bersenjata di Burma, yang sebagian besar dipaksa, dikepung atau disuap untuk menyetujui perjanjian 'damai' dengan rezim, banyak dari mereka berubah menjadi entitas perusahaan eksploitatif atau wakil tentara negara. SPDC tidak disiapkan untuk mengizinkan segala bentuk masyarakat sipil yang tidak dapat dikendalikan atau dibatasi secara efektif (Steinberg 1999, 13). Di antara satu-satunya organisasi yang diizinkan beroperasi tanpa campur tangan langsung dari negara adalah organisasi keagamaan, dan penindasan dengan kekerasan oleh rezim terhadap penganut Buddha Sangha pada September 2007 setelah para biarawan berani memprotes kebijakan ekonomi memberikan contoh jelas tentang tanggapan rezim ketika lembaga keagamaan yang dihormati menuntut untuk reformasi. Negara yang sekarang, didedikasikan untuk mengendalikan semua tanah, tanaman dan perdagangan produktif melalui mekanisme yang diuraikan sebelumnya, jelas tidak mengizinkan segala bentuk gerakan kemerdekaan yang mewakili penduduk desa atau mendukung reforma agraria; seperti sebagian bukti, tidak adaserikat buruh atau organisasi-organisasi

[284] Pengamatan terlibat penulis, November 2005, 2006; April 2007.

agraria resmi di Burma sekarang ini.[285] Tatmadaw telah diketahui secara spesifik menargetkan kesehatan dan bantuan pemulihan di negara bagian Karen.[286] Meskipun organisasi bersenjata telah berhasil bertahan, mereka melakukannya dengan membuat kesepakatan dengan rezim, ataupun dengan mempertahankan keberadaannya secara militer melawan serangan militer besar-besaran yang niscaya terjadi .[287]

KNU / KNLA dan kepemimpinan DKBA itu sendiri tumbuh di bawah relasi masyarakat-negara yang sangat hirarkhis, dan sebagai akibatnya asalah kecurigaan terhadap setiap gerakan sipil yang berkembang di daerah operasi mereka yang tidak tunduk kepada kepemimpinan mereka. KNU kadang-kadang memberikan tekanan pada kelompok-kelompok sipil Karen untuk tunduk pada pengawasan,[288] sedangkan DKBA dilaporkan telah membuat

---

[285] Pada tahun 2006 International Labour Organization's Commitee of Experts on the Application of Conventions and Recommendation menulis, 'informasi yang diberikan oleh Pemerintah [Burma] terus menunjukkan kurangnya kemajuan menuju pembentukan sebuah kerangka legislatif yang yang di bawahnya organisasi pekerja yang bebas dan merdeka dapat didirikan'. 'CEACR: Individual Observation concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No 87) Myanmar (ratifikasi: 1955)', (lihat http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=8454&chapter=6&query=%28C087%29+%40ref+%2B+%28Myanmar%2CBurma%29+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0.

[286] Backpack Health Worker Team, sebuah organisasi bantuan medis, melaporkan bahwa timnya yang secara rutin dilacak dan ditargetkan oleh militer, dan bahwa pada tahun 1998 sampai tahun 2005 tujuh tenaga medisnya telah dieksekusi (BPHWT 2006, 22).

[287] DKBA adalah contoh dari pendahulunya, KNU / KNLA yang setelahnya.

[288] Diamati oleh penulis dalam pertemuan masyarakat sipil orang Karen, dan dalam pernyataan KNU, misalnya: 'Kami, KNU, dengan jelas mendesak revolusi di seluruh Karen dan orang Karen untuk berjuang, dalam kesatuan, dengan KNU, dan dengan tegas

ancaman kekerasan terhadap kelompok-kelompok hak asasi manusia setempat yang mendokumentasikan tuntutan DKBA terhadap penduduk sipil. Organisasi-pemulihan yang berbasis di Karen seperti Karen Office of Relief and Development (KORD) dan kelompok-kelompok aktivis seperti Karen Rivers Watch bekerja di Negara Bagian Karen tetapi dijalankan oleh para pengungsi yang berbasis di Thailand, sebagian untuk memudahkan akses terhadap sumber daya dan dukungan, tetapi juga untuk kemerdekaan yang lebih besar dari kelompok-kelompok bersenjata. Ruang politik bagi penduduk desa jauh lebih terbatas di dalam Burma sendiri, bahkan dalam daerah yang dikendalikan oleh perlawanan.

Kedua, strategi-strategi penduduk desa sering menggunakan bentuk ketidakpatuhan yang ditutupi oleh kepatuhan pura-pura. Perempuan Pemimpin desa menolak untuk menyediakan manusia penyapu ranjau yang telah disebutkan sebelumnya tidak menentang otoritas petugas secara terbuka atau bahkan menolak tuntutannya; dia hanya menyarankan metode lain, tidak memberi petugas itu alasan untuk menghukumnya karena pembangkangan tapi tahu bahwa petugas itu akan menolak keras. Perlawanan menimbulkan reaksi yang tidak begitu keras yang semakin kurang dilihat menentang struktur otoritas (Scott 1985, 33). Namun jika tujuan atau struktur perlawanan menjadi lebih terlihat, sumber daya negara mungkin akan langsung dikerahkan untuk merusak atau menghancurkannya.

Akhirnya, akibat yang wajar untuk kendali negara atas masyarakat sipil adalah bahwa warga sipil di seluruh Burma cenderung tidak mempercayai organisasi. Organisasi yang dijalankan negara beroperasi terutama sebagai

menentang seluruh aktivitas yang merusak kesatuan revolusioner dan nasional'(KNU 2007).

intstrumen represi dan predasi, sementara kelompok-kelompok perlawanan bersenjata sendiri sering mengeksploitasi penduduk desa dan memaksakan wajib militer. Selain itu, penduduk desa tahu bahwa keanggotaan dalam kelompok atau inisiatif manapun sering mengakibatkan pembalasan hukuman dari beberapa kelompok yang berlawanan, sehingga mereka enggan untuk bergabung dengan apapun yang berstruktur. Contoh 'Gher Der' yang telah disebutkan sebelumnya berkembang menjadi pengecualian, tumbuh dari sebuah konteks di mana penduduk desa melihat tidak ada pilihan yang layak; tapi bahkan 'Gher Der' terkenal akan kurangnya struktur formal.

Apa yang Membuat Sesuatu Disebut 'Gerakan'?

Tanpa struktur dan koordinasi menyeluruh, apakah mungkin untuk membicarakan tentang sebuah 'gerakan'? Apa yang membentuk dan mengendalikan sebuah 'gerakan' telah lama diperbincangkan. Analisis tradisional memusatkan pada perilaku kolektif, dan sering mengkarakterisasikan aktifitas gerakan sebagai ledakan irasional kemarahan gerombolan (Cohen 1985, 672). Dengan mengangkat bukti empiris yang bertentangan dengan ini, teoretisi 'mobilisasi sumber daya' pindah ke sisi ekstrim lain, menerapkan sebuah 'logika neoutilitarian yang dilekatkan pada pelaku kolektif' (Ibid., 674), memperlakukan partisipan gerakan aktor rasional 1 yang bermanfaat dan menekankan kepentingan, strategi dan pertentangan di antara organisasi-organisasi untuk 'pengakuan kelompok sebagai aktorpolitik atau. . . meningkatkan keuntungan material' (Ibid., 675). Pandangan ini dikontraskan dengan teoritisi yang 'identitas-sentris' atau gerakan sosial 'baru', yang menekankan pada pembentukan identitas kolektif dan mempelajari gerakan yang membentuk jaringan yang longgar yang berusaha 'menciptakan ruang-ruang demokratis bagi tindakan yang lebih otonom' (Escobar dan Alvarez 1992, 5).

Mereka mengkarakterisasikan gerakan sosial 'baru' dengan 'sebuah organisasi yang terbuka, cair, partisipasi yang inklusif dan non-ideologis, dan perhatian lebih besar pada transformasi sosial daripada transformasi ekonomi '(Della Porta dan Diani 1999, 12).

Baik mobilisasi sumber daya maupun paradigma identitas-sentris mengasumsikan sebuah 'kontestasi di antara kelompok-kelompok yang terorganisir' (Cohen 1985, 673). Tarrow (1998, 4) mendefinisikan gerakan sosial sebagai 'tantangan kolektif, berdasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan elit, lawan, dan otoritas'; namun 'tantangan kolektif'-nya harus disusun terlebih dahulu (mungkin oleh seorang pelopor), yang*setelah*nya tantangan lain dimobilisasi menuju penyebabnya melalui 'jaringan sosial' dan 'membangun solidaritas' (ibid.). Teoretisi lain menyatakan kebutuhan akan pemimpin secara lebih terus terang: "Sebuah gerakan sosial setidaknya terorganisir secara minimal. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi pemimpin atau juru bicara, anggota atau pengikut, dan organisasi atau koalisi, fenomena yang diselidiki adalah tren, mode, atau protes yang tak-terorganisir, bukan sebuah gerakan sosial' (Stewart et al 2001, 2). Sejak awal, Piven dan Cloward menantang definisi semacam itu, berpendapat bahwa, 'penekanan pada maksud sadar dalam penggunaan ini mencerminkan sebuah kebingungan dalam literatur antara gerakan massa di satu sisi, dengan organisasi formal yang cenderung muncul di puncak gerakan di sisi lain—dua fenomena yang saling terkait tetapi berbeda'(1977, 5). Mereka menganggap 'tantangan kolektif' menjadi 'fitur kunci dan yang membedakan sebuah gerakan protes'. Tantangan di sini merujuk pada aksi ketidak-patuhan atau perlawanan rakyat ketika mereka tidak lagi menganggap peraturan dan tuntutan sah; 'nampaknya aksi menantang yang terbagi-bagidapat dianggap peristiwa gerakan ketika

mereka yang terlibat menganggap diri mereka bertindak sebagai anggota suatu kelompok, dan ketika mereka memiliki keyakinan protes yang sama'(ibid., 4).

Meskipun berfokus pada 'kelompok-kelompok yang terorganisir, sebagian besar teoretisi 'gerakan sosial baru' memperhitungkan kecairan dalam struktur dan tujuan organisasi. Escobar dan Alvarez (1992, 7), misalnya, mengkritik 'penyederhanaan empiris dan reduksionisme politik yang mengarahkan para peneliti untuk memfokuskan perhatian mereka pada aspek protes yang terukur, seperti konfrontasi dengan sistem politik dan dampaknya pada kebijakan negara; akibatnya, mereka mengabaikan efek yang kurang terlihat pada tingkat budaya dan kehidupan sehari-hari' yang merupakan tujuan yang sebenarnya dari banyak protes sosial. Akses terhadap atau penggantian negara hanyalah sebuah cara, bukan tujuan. Beberapa tulisan mengenai 'identitas-sentris' atau 'gerakan sosial baru' lebih jauh, berpendapat bahwa kecenderungan menuju keterbukaan dan kecairan pada struktur membuat gerakan-gerakan ini resisten terhadap definisi apapun.[289] Sebuah posisi yang lebih moderat akan adalah jika gerakan-gerakan sosial itu sendiri berkembang, maka cara mereka didefinisikan juga harus berkembang juga.

Della Porta dan Diani (1999, 16) telah mensintesiskan beberapa perspektif untuk mengajukan sebuah definisi yang inklusif tentang gerakan sosial yang tampaknya tepat bagi gerakan berjejaring masa kini, dan yang membuka ruang bagi perbandingan dengan perlawanan tingkat-desa Karen: "Kami akan membahas gerakan sosial -dan, terutama, komponen politiknya- seperti (1) jaringan-jaringan informal, berdasarkan (2) pada kesamaan kepercayaan dan solidaritas, yang memobilisir tentang (3) persoalan-per-

[289] Escobar dan Alvarez (1992, 6-7) mengutip tulisan-tulisan Alain Touraine, Ruth Cardoso dan Elizabeth Jelin pada pengaruh ini.

soalan yang berkonflik, melalui (4) penggunaan berbagai bentuk protes yang sering. 'Mereka kemudian mengelaborasi definisi ini, menambahkan bahwa gerakan 'bukanlah organisasi' tetapi 'jejaring interaksi di antara beragam aktor yang bisa mencakup organisasi formal ataupun tidak, tergantung pada perubahan keadaan'(1999, 16). Ini menekankan fluiditas gerakan sosial; 'salah satu karakteristik nya, sesungguhnya, adalah rasa keterlibatan dalam sebuah upaya kolektif-tanpa harus secara otomatis masuk dalam sebuah organisasi tertentu. Lebih tepatnya, *gerakan sosial tidak memiliki anggota, tetapi partisipan . . . .* keanggotaan gerakan tidak pernah dapat direduksi menjadi satu aksi pelekatan tunggal. Sebaliknya, gerakan sosial terdiri dari serangkaian *aksi yang berbeda, yang dilakukanbersama-sama, memperkuat rasa memiliki dan identitas'* (1999, 17; penekanan ditambahkan). Dengan menggeser fokus dari struktur organisasional ke kepercayaan dan aksi bersama, definisi ini memungkinkan perbandingan antara beragam bentuk perlawanan yang sepaham dan kolektif, namun masih menerima bahwa terdapat batas yang jelas antara gerakan dan bukan-pergerakan.

Struktur dan Spontanitas: Membandingkan Perlawanan Penduduk Desa Karen dengan Gerakan yang Dikenal Secara Internasional

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Rurais Brazil (MST), atau Gerakan Petani tunakisma, adalah sebuah gerakan sosial agraria yang terkenal secara internasional. Dibentuk pada tahun 1985, sekarang MST menyatakan 1.5 juta anggota di seluruh Brasil, membuatnya menjadi gerakan sosial terbesar di Amerika Latin. Beroperasi pada prinsip-prinsip seperti 'tanah untuk petani' dan satu pasal dalam undang-undang Brasil yang menyatakan bahwa tanah yang tidak produktif harus diserahkan demi tujuan sosial, mengusahakan penghidupan yang berkelanjutan

bagi keluarga tunakisma melalui pendudukan damai yatas sebidang tanah yang tidak digunakan, dimana gerakan ini membuat pertanian kolektif atau keluarga yang didukung dengan sekolah-sekolah, klinik dan fasilitas lainnya. Gerakan ini menyatakan telah memegang sertifikat tanah untuk lebih dari 350.000 keluarga di 2.000 permukiman, dengan 180.000 lebih keluarga yang pada saat ini menghuni tanah yang masih menunggu sertifikat.[290]

MST berada dalam definisi Della Porta dan Diani (1999) tentang gerakan sosial. MST telah menjadi lebih dari sebuah 'jaringan informal', dengan kantor-kantor,, hierarki dan dewan pengurus provinsional dan nasional (MST 2001), namun masih didukung oleh tanggung jawab dan kerja para anggota tunakism. Keyakinan bersama dan solidaritas yang ada dalam filsafat hak atas tanah dan pendirian pertanian layanan sosial yang dikelola secara kolektif. MST bergerak di seputar masalahhak atas tanah yang sangat konfliktual, kadang-kadang menyebabkan serangan kekerasan terhadap anggotanya oleh negara dan kekuatan lainnya (MST 2001; Filho dan Mendonca 2007, 83-4). Terakhir, MST terlibat dalam berbagai bentuk protes, seperti pendudukan tanah dan demonstrasi. MST juga memenuhi definisi Piven dan Cloward, meskipun mereka membedakan 'pembangkangan bersama' buruh tunakisma yang timbul melawan sistem *tenure* tanah yang tidak lagi mereka lihat sah dari struktur gerakan yang formal yang muncul pada 'puncak' pembangkangan ini.

Perlawanan yang meluas tetapi tidak terstruktur penduduk desa Karen lebih sulit untuk ditempatkan dalam definisi Della Porta dan Diani, kecuali ditafsirkan secara luas. Penduduk desa memang beroperasi sebagai bagian

[290] Website MST (http://www.mstbrazil.org/?q=about), diakses 10 Oktober 2007.

dari jaringan interaksi informal, apakah melalui kekerabatan, komunikasi atau jaringan kerjasama antara keluarga dan desa. Sebagian besar jaringan ini tidak dibuat untuk tujuan perlawanan, meskipun mereka mengabdi pada tujuan itu seiring perlawanan berkembang. Demikian pula, keyakinan bersama dan rasa memiliki memang ada, meskipun tidak dianggap sebagai keanggotaan sebuah gerakan. Sebaliknya, rasa memiliki ada melalui rasa identitas bersama, sebagai orang Karen, sebagaipenduduk desa di bukit atau lembah, sebagai sesama penghuni suatu desa atau wilayah tertentu, sebagai sesama petani padi ladang, dll., sementara keyakinan bersama termasuk ide kedaulatan dan hak asasi manusia, tradisi-tradisi, kadang-kadang agama setempat, oposisi terhadap kediktatoran militer dan simpati untuk perlawanan bersenjata. Meskipun tidak tersusun sebagai sebuah filosofi gerakan, unsur-unsur tersebut menyusun apa yang Scott (1985, 35) sebut sebagai 'subkultur yang mendukung' yang penting untuk kesuksesan aksi perlawanan sehari-hari, dan memenuhi syarat strategi penduduk desa seperti apa yang Della Porta dan Diani (1999, 17) sebut' aksi-aksi yang berbeda, yang dilakukan bersama, memperkuat rasa memiliki dan identitas'. Mengenai persyaratan ketiga, karenaaksi kolektif yang berfokus pada isu-isu pertikaian, penduduk desa Karen sering bertindak secara kolektif untuk menghindari atau meringankan tuntutan dan siksaan dan melestarikan apa yang mereka lihat sebagai identitas orang Karen dan mata pencaharian melawan upaya negara untuk mengasimilasi mereka. Dalam arti luas, tindakan ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan sosial: akhir bagi praktek asimilasionis negara, dan pelestarian kedaulatanlokal atas tanah dan mata pencaharian. Terakhir, persyaratan bahwa gerakan menggunakan protes sebagai sebuah metode tidak berlaku jika berarti protes publik yang terbuka. Tapi kalau

protes ditafsirkan secara lebih luas mencakup bentuk-bentuk 'perlawanan sehari-hari' yang dipraktikkan secara meluas'(Scott 1985), maka pelarian bisa dianggap bentuk protes ('memilih dengan nama orang lain, atau 'protes penghindaran'), seperti halnya dapat menolak *en masse* untuk muncul dalam kerja paksa yang diperintahkan, atau mengirim wakil desa kepada otoritas lokal untuk menentang dan menegosiasikan tuntutan tertentu.

Dari perspektif Piven dan Cloward, apakah tindakan-tindakan ketidakpatuhan orang pedesaan Karen dapat dianggap sebagai 'gerakan' tergantung pada apakah mereka didorong oleh ketidak-sahan ekploitasi, dan oleh sekumpulan keyakinan bersama. Jika ditanya, sebagian besar orang pedesaanKaren tidak mungkin menggambarkan diri mereka sebagai bagian sebuah gerakan sosial agraria. Namun, ketika ditanya bagaimana mereka menanggapi siksaan tertentu baru-baru ini, kesadaran atas tindakan perlawanan mereka sendiri segera muncul, biasanya disertai dengan ekspresi harga diri komunitas dan solidaritas . Meskipun dapat dikatakan bahwa banyak tindakan yang dilakukan lebih untuk pertahanan daripada perlawanan, batas antara keduanya samar (adas 1986). Penduduk desa mungkin menolak kerja paksa terutama karena mereka harus bekerja di ladang, tetapi mereka juga merasa marah dan tidak melihat legitimasi dalam tuntutan itu dan sering mengatakan hal ini ketika diwawancara. Sama halnya, penduduk desa melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari tembak di tempat oleh pasukan Tatmadaw, tapi ini hanya terjadi karena mereka menolak untuk pindah ke tempat yang dikendalikan negaraseperti yang diperintahkan. Bahkan ketika ketidakpatuhan tidak mengandung maksud untuk menolak, otoritas militer tetap melihatnya sebagai perlawanan, seperti yang dibuktikan dalam ancaman-ancaman mereka ketika penduduk desa tidak

patuh.[291] Agar tindakan seperti itu dianggap sebagai bagian dari sebuah 'gerakan' perlawanan, penduduk desa tidak perlu menyadari setiap tindakan sebagai langkah menuju tujuan yang lebih besar, tetapi ada atmosfer penerimaan dan dukungan komunal, kesepahaman akan aksi dan konsistensi dengan gagasan tentang keadilan sosial yang dipegang bersama. Seperti disebutkan sebelumnya, strategi dan tujuan perlawanandesa Karen-berpusat di sekitar mempertahankan kontrol atas tanah dan mata pencaharian, komunitas dan identitas- menunjukkan kesamaan yang luar biasa antara orang-orang dalam suatu desa dengan wilayah yang beragam dan tidak saling berdekatan.[292] Sifat *kolektif* tindakan-tindakan ini tidak muncul dari koordinasi atau komunikasi, tetapi dari kesamaan alasan, metode dan tujuan. Fenomena 'Gher Der' yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebuah pengakuan terbuka akan sebab bersama yang biasanya dibiarkan implisit.

Selain itu, sangat kurangnya struktur, hirarki atau tujuan-tujuan yang tersusun dapat membantu perlawanan tetap lebih spontan dan mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi. Hirarki dan/atau demokrasiperwakilan dalam gerakan membuat mereka tunduk pada orang-orang pada posisi kepemimpinan dan pada relasi kuasa, sedangkan efek gabungan dari aksipetani yang tidak terkoordinasi karena kurangnya kepemimpinan

---

[291] pemimpin Desa secara teratur bersaksi bahwa para petugas mengancam akan memperlakukan desa sebagai 'musuh' jika mereka tidak mematuhi perintah.

[292] Hal ini dapat dilihat dalam, inter alia, strategi penyembunyian dan berbagi makanan, memantau gerakan militer, menghindari tuntutan kerja paksa dan menyesatkan pasukan negara sambil memberikan informasi kepada kelompok hak asasi manusia dan pasukan perlawanan, diamati oleh penulis antara tahun 1991 dan tahun 2005 di seluruh Divisi Tenasserim, Negara Bagian Mon, Negara Bagian Karen dan Divisi Pegu Timur.

menyebabkan dirinya resisten terhadap tujuan yang menyimpang atau korup. Setiap aksi terjadi dengan tujuan khusus, dan dampak keseluruhan terhadap struktur kekuasaan hanya terwujud saat seluruh aksi digabung. Meskipun dapat mencegah perlawanan menjadi terbuka atau terkoordinasi, tampaknyamerupakan cara yang efisien untuk menjaga gerakan tetap 'berjalan' , karena seluruh penampilannya berupa tubuh tanpa kepala. 'Dimana perlawanan sehari-hari terpisah dengan cara yang paling mencolok dari bentuk-bentuk perlawanan adalah dalam pengingkarannya yang tersirat terhadap tujuan publik dan simbolis '(Scott 1985, 33); yang berfungsi dengan baik, karena tujuan publik dan simbolis selalu tunduk pada interpretasi (dalam kasus simbolis) dan pada politik dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan (dalam kasus publik). Tujuan publik dan simbolis juga merupakan sasaran yang mudah untuk serangan atau kooptasi.

Ketika respon penduduk desa terhadap penindasan mengikuti pola yang sama dan secara konsisten dilaksanakan dalam skala besar, maka mungkin untuk memikirkan sebuah gerakan tanpa nama atau kesadaran diri. Dalam kasus Karen terdapat populasi besar yang tersebar di wilayah yang luas , namun mengidentifikasi diri mereka sebagai 'orang' dan menggunakan strategi-strategi yang sebanding untuk menghindari atau mengurangi eksploitasi dan siksaan oleh yang secara umum dianggap ' penindas', baik orang-orang ini, lembaga atau program. Aksi yang nampaknya terisolasi ini bergabung dengan efek yang mendalam untuk meruntuhkan kontrol Tatmadaw atas desa-desa dan menyabotase program 'pembangunan' negara. Ini merupakan aksi akar-rumput tanpa pelopor; yang eksis sebagai kumpulan dari individu dan aksi kolektif, jauh lebih sulit untuk mengendalikan arah dan dapat mencapai akhir yang sama bagi gerakan yang lebih terstruktur. Namun, sebelum kita menarik garis yang tegas

antara gerakan terstruktur dan yang tidak terstruktur, akan lebih berguna untuk memikirkan aktivitas gerakan yang memiliki sekumpulan ekspresi struktural yang mungkin, mulai dari struktur jaringan yang terorganisir dengan baik dengan wakil-wakil yang dapat dikenali, sampai gerakan tanpa pemimpin dan samar-samar seperti perlawanan desa bergaya-Karen. [293]

Kesamaan menjadi lebih jelas jika kita bandingkan tujuan, taktik dan prestasi perlawanan desa Karen dengan tujuan, taktik dan prestasi gerakan agraria yang diakui seperti MST. Pokok-pokoknya tentu saja sangat berbeda karena keduanya berada dalam konteks yang sangat berbeda untuk tujuan yang berbeda dan dengan partisipan yang berbeda, tetapi tujuannya di sini adalah untuk membandingkan jenis tujuan, taktik dan prestasi.

- Tujuan. MST mengorganisir isu-isu hak, khususnya hak atas tanah dan redistribusi tanah yang adil. Perebutannya terutama antara kaum miskin tunakisma dengan pemilik tanah besar. Aksi perlawanan orang Karen pedesaan juga terjadi dalam perebutan hak, dan banyak penduduk desa dengan tegas menyatakan hal ini. Secara khusus, mereka menginginkan kontrol atas tanah yang selalu mereka kerjakan tanpa campur tangan atau eksploitasi yang tidak perlu oleh negara atau aktor kuat lainnya. Perebutan terutama antara penduduk desa dengan pemilik tanah terbesar, yaitu negara Burma. Aksi individu mungkin didorong oleh kombinasi kepentingan pribadi dengan hasrat untuk menghilangkan penindasan, tetapi hal yang sama juga berlaku bagi MST; kebanyakan orang yang berpartisipasi dalam MST mungkin lebih tertarik untuk mendapatkan akses terhadap tanah daripada mengubah sistem kepemilikan tanah di Brazil.

[293] Saya berhutang kepada pereview anonim atas pengetahuan ini.

- Taktik. MST menggunakan aksi terbuka, dengan seorang pelopor yang bernegosiasi dengan pemerintah atau mengidentifikasi tanah untuk dirampas, merencanakan aksi dan mengorganisir orang ke dalam komunitas-komunitas besar untuk merebut tanah dan menetapkan hak-hak atas tanah (MST 2001). Orang Karen pedesaan beroperasi dengan cara yang kurang terorganisir, aksi perlawanan mereka biasanya terjadi di dalam desa. Namun, ketika diperintah untuk meninggalkan tanah mereka oleh Tatmadaw, tanggapan mereka sering dipandu oleh tetua desa, yang memimpin perpindahan ke hutan atau ke tempat relokasi yang dipaksakan yang diputuskan-negara; jika sebelumnya, perlindungan KNLA kadang-kadang dinegosiasikan terlebih dahulu dan aktivitas bertahan hidup dibagi di antara populasi seperti dijelaskan sebelumnya.
- Prestasi. Melalui MST, beberapa ratus ribu orang telah memperoleh akses terhadap tanah dan membentuk komunitas-komunitas baru dengan layanan-layanan pendukung; namun, beberapa orang telah terbunuh akibatkekerasan negara atau pembalasan dendam pemilik tanah. Meskipun tidak mencari sertifikat tanah resmi, perlawanan orang Karen pedesaan memungkinkan ratusan ribu dari mereka untuk tetap berada atau dekat dengan tanah mereka terlepas dari predasi negara dan kampanye relokasi paksa. Dalam proses ini, banyak orang telah terbunuh oleh kekerasan pembalasan militer, penyakit dan kekurangan gizi. Sifat tertutup perlawanan mereka berarti bahwa kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya dari tingkat kesuksesan atau kegagalannya.

Singkatnya, meskipun sangat berbeda dalam konteks dan pokok-pokoknya, sifat keseluruhan kedua perjuangan

ini menjadikan keduanya dapat dibandingkan, dan menunjukkan bahwa jika salah satunya memenuhi syarat sebagai sebuah 'gerakan' maka yang lain seharusnya juga.

Apakah perlawanan desa Karen dianggap sebuah 'gerakan' tidaklah penting, tetapi perlawanan ini memiliki dampak yang sangat kuat pada bagaimana para aktor lain menanggapinya. Saat ini banyak aktor eksternal menganggap orang Karen sebagai aktor yang tak berdaya dan pasif, kelaparan dan membutuhkan bantuan dari luar;[294] sebaliknya mengakui perlawanan mereka sebagai perlawanan yang berhasil, sadar dan respon tuntutan yang kuasi-terkoordinasi yang mengakui agensi mereka, mendukung alih-alih menghancurkan praktik-praktik yang sudah ada, dan membiarkan mereka mengendalikan proses perubahan apapun.

Hubungan –Hubungan Dengan Yang Di Luar Gerakan: Potensi Untuk Solidaritas

Jejaring Domestik

Pada bulan Agustus dan September 2007 dunia luar teralihkan perhatiannya ke Burma ketika pawai ribuan biksu turun ke jalanan untuk memprotes kebijakan negara. Seiring dengan dukungan sipil perkotaan untuk para biksu berkembang lebih jelas, beberapa komentator mempertanyakan mengapa penduduk pedesaan dan kelompok perlawanan bersenjata berbasis-etnis tidak tampak terlibat secara aktif.[295]Sebelum membahas potensi bagi hubungan-

---

[294] penggambaran seperti itu masih mendominasi laporan-laporan luar negeri. Horton (2005, 14), misalnya, menggambarkan para pengungsi desa Karen sebagai 'orang-orang yang trauma, lemah, secara psikologis mati rasa'.

[295] Lihat, sebagai contoh, 'Lack of Unity kept ethnic group out of show down', The Irrawaddy, 11 / 10/2007 (http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=8984http://www.irrawaddy.org/

hubungan antara perlawanan di tingkat desa dengan aktor transnasional, penting untuk mendiskusikan tuduhan bahwa penduduk pedesaan tidak cukup memberikan dukungan kepada 'gerakan' di Burma.

Perlu dicatat bahwa peemberontakan para biksu tidak berlangsung dalam isolasi. Peristiwa ini mengikuti eskalasi metode yang lebih halus protes perkotaan yang telah berkembang selama tiga tahun terakhir. Termasuk kampanye 'kemeja putih', yang melibatkan orang-orang yang menunjukkan perlawanan mereka terhadap rezim dengan mengenakan kemeja putih pada hari-hari tertentu; kampanye doa, ketika orang-orang mengenakan warna kuning untuk berdoa secara pribadi bagi tahanan politik di Pagoda Shwedagon di Rangoon pada hari Selasa; dan kampanye petisi, dengan petisi rahasia yang beredar di seluruh kota.[296] Setiap kali rezim berusaha untuk membubarkan kampanye-kampenye tersebut (misalnya, dengan mengerahkan preman yang dibayar untuk menyemprotkan air pada orang-orang yang sedang berdoa di Shwedagon atau dengan menangkap mereka yang dicurigai memulai petisi), sebuah bentuk protes baru yang muncul untuk melengkapi atau menggantikan yang lama. Pola ini terus berlanjut sejak kekerasan terhadap protes para biksu pada September 2007, dengan semboyan yang mengandung nama-nama para pemimpin junta yang muncul di leher anjing-anjing liar, dan pemboikotan rapat umum SPDC yang wajib dihadiri.[297] Sementara itu, orang-orang perko-

article.php?art_id=8984).

[296] Lihat "Junta warns of ation against student group", The Irrawaddy, 31/11/2006 (http://www.irwandy.org/article.php?art_id=6307).

[297] Lihat "protesting dogs are now on the regime's wanted list, The Irrawaddy, 12/10/2007 (http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=8998, diakses 31/10/2007), dan "Unlikely resistance in Burma's Mandalay", BBC News, 25/10/2007 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/7060424.stm)

taan melanjutkan strategi harian mereka untuk menghindari dan meminimalkan pajak dan tuntutan. Sama seperti perlawanan pedesaan, perlawanan perkotaan yang selalu muncul dalam berbagai bentuk.

Di permukaan tampak beberapa hubungan yang jelas antara perlawanan perkotaan dan pedesaan sehari-hari, atau antara perlawanan pedesaan di wilayah yang berbeda. Desa-desa orang Karen menghadapi jam malam reguler militer dan larangan perjalanan yang membatasi gerakan di luar desa mereka, dan bahkan untuk perjalanan jarak dekat memerlukan penyuapan di banyak 'pos pemeriksaan'. Selain itu, kurangnya kepemimpinan yang terstruktur yang melekat pada perlawanan tingkat desa menghalangi kemungkinan hubungan formal. Kelompok bersenjata negara dan non-negara yang curiga terhadap aktivitas politik warga sipil yang berada di luar wilayah kekuasaan mereka, membuat sulit untuk menciptakan hubungan warga sipil-ke-warga sipil. Ketika pembangkang perkotaan melarikan diri dari penangkapan datang ke desa-desa, penduduk desa kadang-kadang menghadapi hukuman keras dari aparat negara karena menampung mereka; kehadiran para penentang yang terbuka oleh karenanya menempatkan perlawanan rahasia sehari-hari mereka dalam bahaya. Akhirnya, orang Karen melindungi kedaulatan daerah dengan gigih dan curiga terhadap kecenderungan kaum asimilasionis Burma, mengarah pada ketidakpercayaan antara orang Karen dengan orang perkotaan Burma. Banyak ketidakpercayaan historis, baik antar-etnis maupun desa-kota, dapat membuat penduduk pedesaan lebih terbuka terhadap solidaritas dengan orang-orang dalam posisi yang sama di belahan dunia lain dibandingkan dengan para pembangkang perkotaan di negara mereka sendiri. Seperti ditunjukkan Fox (2005, 187), banyak hubungan transnasional yang sebenarnya 'translokal', antara kelompok-kelompok lokal atau polities yang tersebar

di seluruh dunia. Kadang-kadang membangun hubungan dengan orang-orang yang berada jauh di tanah yang terpencil bisa saja tidak dipenuhi dengan ranjau politik daripada bekerja sama dengan mereka yang berada di kota atau desa tetangga.

Terlepas dari hambatan untuk memiliki hubungan terbuka, hubungan dengan gerakan-gerakan domestik lainnya berjalan dengan cara yang lebih halus. Orang Karen mengetahui perjuangan-perjuangan yang terjadi di bagian lain negara itu melalui siaran radio gelombang pendek,[298] laporan-laporan hak asasi manusia yang beredar dalam bahasa Karen dan Burma, informasi dari kelompok perlawanan bersenjata, dan melalui partisipasi dalam rapat dan upaya pemulihan yang dikoordinasi oleh kelompok-kelompok perlawanan atau organisasi hak asasi manusia lokal. Informasi yang kemudian didapat membuat orang-orang tetap memperoleh informasi mengenai bagaimana penduduk desa di tempat lain menolak proyek agrofuel negara, atau menghindari pasukan militer melalui perpindahan strategis. Informasi dari siaran radio menghasilkan rapat umum oleh penduduk desa di bagian Selatan Negara Bagian Karen pada September 2007 untuk menunjukkan dukungan bagi protes para biksu di seluruh negeri.[299] Para pedagang dan rute perdagangan juga berfungsi sebagai saluran-saluran informasi dan dukungan material; misalnya, 'pasar hutan' yang diam-diam diorganisiroleh para penduduk desa dalam persembunyian dan mereka yang menetap yang berfungsi sebagai strategi bertahan hidup,

---

[298] Siaran BBC dan Voice of America di Burma sangat populer, sebagaimana siaran Democratic Voice of Burma dalam bahasa Burma, Karen dan bahasa lainnya.

[299] Lihat 'Protests spread in rural Karen State', KHRG Buletin, 25 September 2007. (Http:// www.khrg.org/khrg2007/ khrg07b3.htmlwww.khrg.org/khrg2007/khrg07b3.html).

sebuah taktik perlawanan dan hubungan komunikasi. Jadi jejaring perlawanan desa eksis sebagai bagian dari 'gerakan', tapi seperti perlawanan itu sendiri perlawanan itu tidak terstruktur dan sering bersifat sementara.

Hubungan Transnasional dan Koalisi Global

Apakah hubungan transnasional atau solidaritas akan berguna bagi perlawanan rahasia orang Karen di tingkat lokal adalah pertanyaan yang kompleks. Pada subjek ini, Keck dan Sikkink (1998, 12) mencatat 'efek bumerang', di mana perjuangan domestik yang tidak bisa mendapatkan tindakan dari jaringan transnasional yang melibatkan negara untuk memberikan tekanan kepada negara dari luar. Mereka menulis bahwa 'jaringan advokasi transnasional' dapat 'membuat sumber daya internasional tersedia bagi aktor-aktor baru dalam perjuangan sosial dan politik domestik. Jadi dengan mengaburkan batas-batas antara relasi negara dengan warga negaranya sendiri dan jalan lain yang dimiliki warga negara dan negara menuju sistem internasional, jaringan advokasi membantu untuk mengubah praktik kedaulatan nasional '(1998, 1-2). Hal ini sangat relevan terutama dengan penduduk desa yang pada dasarnya adalah aktor non-negara dalam perjuangan bersama negara akan kedaulatan daerah. Fox dan Starn (1997, 4) mengklaim perlawanan petani bahwa 'tidak mungkin menyiarkan perlawanan tertutup dalam jarak yang besar, dan tentu saja tidak di seluruh dunia'. Namun orang Karen telah mengirimkan strategi-strategi perlawanan mereka ke seluruh bagian wilayah yang terpisah-pisah di Burma, kelompok hak asasi manusia setempat telah menyebarkan pengetahuan tentang strategi-strategi ini kepada lembaga-lembaga, pemerintah dan aktor-aktor lain di seluruh dunia, dan bahkan bab ini adalah usaha untuk melanjutkan diskusi tentang masalah transnasional ini. Selama 15 tahun terakhir saya telah menyaksikan perso-

alan-persoalan tentang perhatian langsung terhadap penduduk pedesaan, termasuk tenaga kerja paksa, perpindahan dan relokasi paksa, berubah dari masalah yang diabaikan dalam forum internasional menjadi pusat diskusi internasional tentang hak asasi manusia di Burma,[300] semua karena aksi-aksi itu; sama halnya, laporan-laporan dari organisasi lokal dan internasional yang sekarang sering mengakui strategi bertahan hidup pengungsi orang Karen,[301] yang tidak menjadi masalah lima tahun lalu. Berlawanan dengan pernyataan Fox dan Starn, 'efek bumerang' nampak menjadi pilihan yang sangat layak, namun jika hal itu terjadi akan memerlukan aktor eksternal untuk memulai keterlibatandengan penduduk desa dan bukan sebaliknya.

Salah satu 'gerakan agraria transnasional' yang diwakili dalam konferensi panel yang gagal menjawab pertanyaan saya mengenai gerakan solidaritas adalah Via Campesina. Didirikan pada tahun 1993 oleh sekelompok petani dan gerakan petani dan organisasi di Amerika dan Eropa (Borras 2004, 3), Via Campesina sekarang menyatakan diri sebagai

> gerakan petani internasional, produsen kecil dan menengah, tunakisma, perempuan pedesaan, masyarakat adat, pemuda pedesaan dan pekerja pertanian. Kami mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan dasar anggota kami. Kami adalah gerakan otonom, pluralis dan multikultural, bebas dari afiliasi politik, ekonomi, atau afiliasi jenis lain. Anggota kami berasal dari 56 negara dari Asia, Afrika, [E]ropa, dan Amerika.[302]

---

[300] Sebagai contoh, tekanan oleh International Labour Organization sejak tahun 1997 akhirnya memaksa SPDC untuk secara formal melarang kerja paksa (meskipun tak dilaksanakan) (lihat see http://www.ilo.org/public/english/region/asro/yangon/).

[301] Lihat TBBC (2007, 4), South (2006, 87), BI / PWF (2006, 23-4).

[302] Lihat website Via Campesina (http://www.viacampesina.org/

Sebagai salah satu 'gerakan agraria transnasional', yang paling dikenal, Via Campesina akan digunakan di sini sebagai contoh dari aktor transnasional.

Via Campesina merupakan langkah penting menuju petani yang mewakili diri sendiri di tingkat internasional, dan bukannya diwakili. Delegasinya biasanya para pemimpin petani setempat dalam gerakan mereka sendiri. Namun, alih-alih sebuah 'gerakan', Via Campesina lebih tepatnya adalah sebuah koalisi gerakan, karena anggotanya terdiri dari gerakan bukan individu. Keanggotaan di Via Campesina terbatas pada gerakan dengan nama dan struktur yang jelas dan penerimaan anggota baru ditentukan diantara anggota yang ada, sebuah proses yang kadang-kadang dipengaruhi oleh politik antara gerakan saingan (Borras 2004, 17). Pertanyaan berulang-ulang yang saya ajukan kepada wakil Via Campesina tentang detil proses penerimaan dan kebijakan mereka pada perjuangan petani di luar konteks keanggotaan tidak mendapat jawaban apa pun.[303] Posisi Via Campesina dalam solidaritas tanpa-anggota masih belum jelas. Meskipun fungsi utamanya adalah untuk 'Mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan dasar anggota kami' (lihat di atas), pernyataan advokasi koalisi internasional sering menyiratkan klaim yang lebih luas untuk mewakili 'petani' diseluruh dunia, sering menyebutkan keanggotaan petani dari 56 negara. Bahkan tanpa klaim ini, advokasi ditujukan untuk mengubah kebijakan lembaga-lembaga global dan praktek perdagangan dapat berpotensi mempengaruhi petani dan masyarakat

---

main_en/index.php?option = com_content & task = blogcategory & id = 27 & Itemid = 44).

303 Pertanyaan ini dan pertanyaan terkait yang dikirim melalui email kepada dua wakil Via Campesina yang terpisah pada tanggal 1 Oktober dan dikirim lagi pada tanggal 17 Oktober 2007. Tidak ada tanggapan.

miskin pedesaan di setiap wilayah di dunia. Hal ini menciptakan tegangan antara komitmen koalisi terhadap anggotanya, yang berbasis pada kurang dari sepertiga negara-negara di dunia dan dengan tidak adanya perwakilan di wilaya-wilayah besar seperti Rusia, CIS, Asia Tengah, China dan Asia Tenggara daratan, dan advokasinya atas nama banyak negara besar lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Borras (2004, 24),

> Mayoritas besar rakyat pedesaan yang terpinggirkan, tentu saja, tetap berada di luar organisasi formal. Sementara penting bagi perkara petani miskin dan petani kecil bahwa Via Campesina mendukung posisi yang menyokong kelas sosial termarjinalkan dan kelompok sosial secara lebih lebih umum, penting untuk secara kritis menyadari kesenjangan antara kelompok para petani kecil (peasant) dengan petani besar (farmer) dalam jangkauan gerakan transnasional Via Campesina, dan rakyat pedesaan yang jumlahnya lebih besar yang tidak terjangkau.

The International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) pada bulan Maret 2006, dihadiri oleh perwakilan dari Via Campesina, koalisi-koalisi transnasional lainnya, kelompok-kelompok aktivis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pejabat pemerintahan, mengadopsi deklarasi akhir yang menyerukan 'solidaritas internasional dan dukungan bagi *organisasi-organisasi* petani kecil, tunakisma dan buruh pedesaan' (ICARRD, 2006; penekanan ditambah). Pernyataan ini kembali mengindikasikan bias yang condong pada kaum tani yang 'terorganisir' secara formal, dengan mengeksklusi mereka yang tidak memiliki ruang politik untuk diatur. Sebagian besar jaringan dan koalisi transnasional selain Via Campesina sama-sama distrukturkan di seputar konsep tentang keanggotaan, di mana gerakan terstruktur harus menga-

jukan permohonan untuk ikut serta.[304] Eksklusi dari struktur ini berarti suara mereka yang berada dalam perjuangan yang kurang terorganisasi sebagian besar tidak didengar dalam proses seperti pembuatan Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat, yang disahkan pada bulan September 2007 setelah lebih dari 20 tahun penyusunan.[305]

Via Campesina mencatat bahwa 'terdapat pola sistematis pelanggaran hak asasi para petani penggarap di seluruh dunia yang membutuhkan 'tanggapan kebijakan yang sistematis untuk menemukan solusi yang memadai'(Via Campesina 2006, 1). Untuk memutuskan dan menganjurkan 'tanggapan-tanggapan kebijakan' atas nama petani di seluruh dunia yang menempatkan tanggung jawab pada koalisi untuk mengetahui kepentingan petani di mana keanggotaan lemah atau tidak ada. Jika tidak, bisa dituduh merumuskan dan mengartikulasikan kepentingan petani tanpa konsultasi, yang akan menimbulkan pertentangan dengan filosofi dasar tentang petani yang mewakili kepentingan mereka sendiri.

Memperluas keanggotaan Via Campesina adalah sebuah proses yang sedang berjalan dan bertahap yang diperumit oleh penindasan pemerintah, ketegangan lokal dan ideologi yang berbeda di antara gerakan saingan atau yang sejajar, di antara faktor-faktor lainnya (Borras 2004, 17), dan perlawanan desa Karen dan gerakan serupa mungkin tidak pernah mengambil bentuk di mana mereka

---

304 The International NGO/CSO Planning Commitee on Food Sovereignty, misalnya, secara global mendukung hak atas tanah dan isu-isu terkait namun membatasi keanggotaannya untuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (lihat http://www.foodsovereignty.org/new/whoweare.php).

305 The UN Permanent Forum on Indigenious Issue yang merancang Declaration yang terdiri dari 16 'ahli' yang secara teratur berkonsultasi dengan organisasi-organisasi terakreditasi (lihat http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/structure.html).

dapat dipertimbangkan untuk keanggotaan. Ini bukanlah sebuah alasan bagi 'gerakan' perlawanan desa orang Karen untuk bergabung dalam Via Campesina, bahkan jika itu yang diinginkan akan menjadi tidak berguna karena persoalan perwakilan yang sulit yang akan muncul. Alih-alih, sebuah pertanyaan yang lebih berguna adalah apakah ada bentuk solidaritas dan konsultasi yang bisa membantu, bentuk-bentuk seperti apakah yang bisa diambil dan bahaya seperti apa yang mungkin ada.

Potensi dan Risiko Solidaritas

Bentuk keterlibatan yang didasarkan pada solidaritas dan jaringan daripada keanggotaan yang resmi dapat menyediakan jalan tengah, yang akan selanjutnya akan mengesahkan representasi Via Campesina akanpetani global dan perjuangan lokal dari gerakan yang belum dikenal, ssambil secara potensial menciptakan 'efek bumerang', yang dapat menguntungkan orangKaren dan penduduk desa lainnya. Memang, melibatkan perjuangan yang kurang terorganisir mungkin memberikan sedikit dukungan untuk memperkuat pengaruh internasional dari koalisi transnasional sekaligus membebani mereka dengan memperluas jangkauan kepentingan yang ingin mereka capai, tetapi jika mereka menuntut legitimasi di kalangan petani di luar keanggotaan terbatas mereka maka hal tersebut merupakan langkah penting.

Bentuk seperti apakah yang dapat diambil oleh keterlibatan solidaritas seperti itu paling baik ditentukan oleh para partisipannya, namun beberapa kemungkinan umum dapat diidentifikai. Pertama, perwakilan koalisi-koalisi seperti Via Campesina dapat mengunjungi orang Karen untuk mendiskusikan apa yang terjadi secara global, bersama dengan gerakan dan lembaga- lainnya, dan untuk mengetahui perjuangan lokal dan kepentingannya. Informasi lokal ini bisa berguna bagi posisi koalisi dan

advokasi baik secara regional maupun global, sedangkan mobilitas internasional dan akses institusional koalisi dapat memberikan pengakuan yang lebih besar dan dukungan dari luar bagi perlawanan desa orang Karen - 'efek bumerang'. Kedua, koalisi transnasional bisa memfasilitasi hubungan 'translokal' yang antara orang Karen dengan orang lain di manapun yang pada saat ini atau sebelumnya terlibat dalam perjuangan yang sama, berguna untuk pertukaran pengalaman dan yang lebih penting sebagai penggerak semangat juang - komponen yang sering kurang dihargai dalam analisis luar tetapi sangat penting dalam perjuangan yang sulit dan berlarut-larut. Ketiga, koalisi transnasional dapat bertindak sebagai pengawas untuk membantu melindungi orang pedesaan dari sergapan oleh agenda pembangunan asing yang dilaksanakan oleh badan-badan internasional dalam kerjasama dengan negara. Penduduk desa di Burma memiliki sedikit atau tidak ada kontak dengan agensi semacam itu dan sedikit kesempatan untuk mengakses pandangan kritis tentang pembangunan internasional, membuat mereka rentan terhadap program-program dari atas ke bawah dan merusak lahan atau eksploitasi sumber daya haruskah tanah air mereka t terbuka untuk intervensi dari luar yang lebih besar dan investasi. Untuk mengatasi kemungkinan ini l, koalisi-koalisi transnasional bisa mendidik masyarakat tentang pasukan internasional yang belum mereka hadapi, dan memantau rencana yang lahir dalam modal asing yang dapat mempengaruhi orang Karen. Via Campesina diposisikan denga -baik untuk menjadi bagian dari inisiatif semacam itu karena aktivitas-aktivitas dapat mengambil bentuk pembagian informasi dari petani-ke-petani.

Poin dan metode kontak sudah ada. Kepala desa biasanya dapat mengatur pertemuan dengan penduduk desanya . Untuk menghubungi kepala desa, bantuan lokal dan kelompok hak asasi manusia dapat memfasilitasi

akses. Meskipun terstruktur untuk maksud-maksud lain, beberapa kelompok lokal yang sudah disebutkan diangkat oleh penduduk desa dan pengungsi dan dapat bertindak sebagai penghubung.

Banyak faktor yang masih perlu dipertimbangkan untuk mencegah keterlibatan yang menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Untuk menghindari pembalasan militer inisiatif seperti itu mungkin harus merendah dan rahasia; kelompok hak asasi manusia dan bantuan lokal sudah mahir dalam hal ini, dan sering memfasilitasi kunjungan-kunjungan yang sama oleh wartawan dan advokat. faktor lainnya adalah risiko yang mengancam strategi perlawanan penduduk desa dengan menarik perhatian kepada mereka. Sejauh ini, strategi desa sebagian besar sukses dengan tetap rahasia dan nampak tidak mengancam bagi negara. Karen Human Rights Group telah menghadapi masalah ini sejak tahun 2005 dalam melaporkan strategi-strategi perlawanan, dan telah berusaha untuk fokus pada mereka yang telah diketahui otoritas militer lokal dan menghilangkan strategi yang lebih sensitif ataudetil yang dapat digunakan untuk menyasar desa-desa.[306]

Bentuk-bentuk khusus keterlibatan dan solidaritas harus dirancang oleh para para partisipan, jika ada konsensus pada kegunaannya. Dengan mobilitas mereka yang lebih besar dan akses terhadap komunikasi, koalisi transnasional paling tepat untuk memulai kontak ini, jika perlu dengan logistik yang difasilitasi oleh organisasi lokal yang bekerja di antara para penduduk desa. Dapat dikatakan bahwa ini melampaui mandat koalisi, yang ada untuk melayani anggota organisasi mereka. Namun hal ini tidak

[306] Diamati melalui partisipasi penulis dalam, pertemuan manajemen dan proses editing KHRG, Oktober 2005 sampai April 2007.

mencegah mereka untuk membangun jaringan 'ke atas' di luar keanggotaan mereka, dengan institusi seperti Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi non-pemerintah internasional, bahkan Organisasi Perdagangan Dunia, dan menekan lembaga-lembaga ini untuk mengubah kebijakan *global* mereka, tidak hanya kebijakan lokal mereka di negara-negara di mana koalisi memiliki banyak anggota. Dengan demikian, mereka mendapatkan tanggung jawab untuk menanggapi kebutuhan dan tujuan yang diungkapkan para petani secara global, yang juga akan terpengaruh oleh perubahan kebijakan. Oleh karena itu membangun jaringan tambahan 'ke bawah' harus menjadi prioritas.

Kesimpulan

Bab ini menimbulkan banyak pertanyaan daripada yang bisa dijawabnya, dengan harapan merangsang diskusi daripada mencapai kesimpulan. Seperti apakah perlawanan dan ketidak-kepatuhan orang Karen dapat dianggap sebagai sebuah 'gerakan', saya percaya bisa. Ada cukup bukti tentang aksi yang sepaham dan terarah yang tersebar luas yang berusaha mencapai tujuan yang dapat diidentifikasi tentang masalah-masalah pertikaian, terutama mempertahankan tanah dan mata pencaharian; bahwa aksi ini didasarkan pada keyakinan yang dipegang bersama dan identitas yang diterima; dan bahwa aksi ini sama-sama dibuat melalui bentuk-bentuk protes termasuk penghindaran ('protes penghindaran') dan ketidak-patuhan sistematis yang merusak sebuah sistem yang dilihat tidak sah dan menindas; untuk memenuhi persyaratan dari suatu gerakan yang didefinisikan secara luas. Kurangnya struktur atau pemimpin yang bisa diidentifikasi membuatnya layak dan tahan lama dalam konteks penindasan Birma, di mana suatu gerakan yang lebih terstruktur akan rentan terhadap

serangan kekerasan atau kooptasi. Hal ini juga membauatnya tetap spontan, dan mencegahnya untuk diarahkan melalui misrepresentasi atau kepentingan pribadi.

Menganggap perlawanan ini sebagai bentuk seruan untuk peninjauan ulang terhadap agensi rakyat dalam situasi yang represif di mana ruang bagi aksi terbuka dibatasi, dan membuka kemungkinan untuk keterlibatan melampaui kemurahan hati tradisional atau simpati. Terdapat banyak kemungkinan bagi koalisi agraria transnasional untuk meningkatkan legitimasi dan cakupan mereka dengan melibatkan penduduk desa di mana mereka saat ini tidak memiliki keanggotaan, dan untuk warga desa sendiri untuk memperoleh manfaat dari akses aktor transnasional dan pengaruh pada kebijakan global dan kemampuan mereka untuk menghasilkan tekanan dari luar, yang disebut Keck dan Sikkink sebagai 'efek bumerang'. Sementara itu menerima perjuangan-perjuangan seperti itu sebagai 'anggota' resmi dari koalisi-koalisi transnasional dalam banyak kasus tidak berguna bahkan bisa berbahaya, terdapat banyak bentuk solidaritas, keterlibatan dan advokasi yang bisa menjadi jalan tengah yang membangun, sementara kekurangan 'keanggotaan' resmi.

Saran-saran yang disajikan di atas untuk memulai solidaritas ini bersifat belum sempurna, karena detilnya dapat ditentukan oleh aktor itu sendiri. Hal ini juga seharusnya menjadi keputusan mereka apakah keterlibatan seperti itu diinginkan.

Referensi

Adas, M., 1986. 'From Footdragging to Flight: The Evasive History of Peasant Avoidance Protest in South and South-East Asia'. In *Everyday Forms of Peasant Resistance in South-East Asia*, eds J.C. Scott and B.J. Tria Kerkvliet, 64–86. London: Frank Cass.

BI/PWF (Burma Issues/Peace Way Foundation), 2006. *Shoot on Sight: The Ongoing SPDC Offensive Against Villagers in Northern Karen State*. Bangkok: Peace Way Foundation.

Borras, S. Jr, 2004. 'Vía Campesina: An Evolving Transnational Social Movement'. TNI Briefing Notes No. 2004/6. Amsterdam: Transnational Institute.

BPHWT (Backpack Health Worker Teams), 2006. *Chronic Emergency: Health and Human Rights in Eastern Burma*. Chiang Mai: Wanida Press.

Cheesman, N., 2002. 'Seeing "Karen" in the Union of Myanmar'. *Asian Ethnicity*, 3 (2): 199–220.

Cohen, J., 1985. 'Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements'. *Social Research*, 52 (4): 663–716.

Della Porta, D. and M. Diani, 1999. *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.

Escobar, A. and S.E. Alvarez, 1992. 'Introduction: Theory and Protest in Latin America Today'. In *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*, eds A. Escobar and S.E. Alvarez, 1–15. Boulder, CO: Westview Press.

Fernando, T., 1982. 'Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma (book review)'. *The Journal of Developing Areas*, 17 (1): 130–1.

Filho, J. and M.L. Mendonça, 2007. 'Agrarian Policies and Rural Violence in Brazil'. *Peace Review*, 19 (1): 77–85.

Fox, J., 2005. 'Unpacking "Transnational Citizenship" '. *Annual Review of Political Science*, 8: 171–201.

Fox, R.G. and O. Starn, 1997. 'Introduction'. In *Between Resistance and Revolution: Cultural Politics and Social Protest*, eds R.G. Fox and O. Starn, 1–16. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Fujita, K. and I. Okamoto, 2006. 'Agricultural Policies and Development of Myanmar's Agricultural Sector: An Overview'. Discussion Paper 63. Tokyo: Institute of Developing Economies. http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/pdf/063_okamoto.pdf, Diakses 25 October 2007.

Hinton, P., 1979. 'The Karen, Millenialism, and the Politics of Accommodation to Lowland States'. In *Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier withBurma*, ed. C.F. Keyes, 81–94. Philadelphia, PA: Institute for the Study of Human Issues.

Horton, G., 2005. 'Burma's Generals Must Be Brought to Account'. *Burma Campaign News*, 10: 14–15.

Hudson-Rodd, N. and M. Nyunt, 2001. 'Control of Land and Life in Burma'. *Tenure Brief*, 3: 1–8. Madison, WI: Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison.

Hudson-Rodd, N., M. Nyunt, S.T. Tun and S. Htay, 2003. 'The Impact of the Confiscation of Land, Labor, Capital Assets and Forced Relocation in Burma by the Military Regime'. NCUB/FTUB discussion paper. http://www.ibiblio.org/obl/docs/land_confiscation-contents.htm, Diakses 16 December 2005.

HRW (Human Rights Watch), 2002. *'My Gun was as Tall as Me': Child Soldiers in Burma*. New York: Human Rights Watch.

HRW (Human Rights Watch), 2007. *Sold to Be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma*. New York: Human Rights Watch.

ICARRD, 2006. 'International Conference on Agrarian Reform and Rural Development: Final Declaration'. Porto Alegre: ICARRD. http://www.icarrd.org/en/news_down/C2006_Decl_en.doc, Diakses 24 October 2007.

Keck, M.E. and K. Sikkink, 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Keyes, C.F., 1977. *The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia*. New York: Macmillan.

KHRG (Karen Human Rights Group), 2002. *Forced Labour Orders Since the Ban*. Chiang Mai: KHRG.

KHRG (Karen Human Rights Group), 2003. *SPDC & DKBA Orders to Villages: Set 2003-A*. Chiang Mai: KHRG.

KHRG (Karen Human Rights Group), 2005. 'Forced Labour Orders to Villages 2004–2005: Papun, Toungoo, Thaton, Pa'an and Dooplaya Districts' (unpublished). Submitted to the International Confederation of Free Trade Unions by the Karen Human Rights Group for consideration by the ILO Committee of Experts. KHRG internal document.

KHRG (Karen Human Rights Group), 2006a. *Dignity in the Shadow of Oppression: The Abuse and Agency of Karen Women Under Militarisation*. Chiang Mai: KHRG.

KHRG (Karen Human Rights Group), 2006b. *SPDC Attacks on Villages in Nyaunglebin and Papun Districts and the Civilian Response*. Chiang Mai: KHRG.

KHRG (Karen Human Rights Group), 2007. *Development by Decree: The Politics of Poverty and Control in Karen State*. Chiang Mai: KHRG.

KNU (Karen National Union), 2007. 'The KNU Statement Regarding Brigadier General Htain Maung'. KNU

Public Statement, 30 January 2007. Salinan E-mail yang diterima oleh penulis dari perwakilan KNU pada 30 January 2007.

Malseed, K., 2006. ' "We Have Hands the Same as Them": Struggles for Local Sovereignty and Livelihoods by Internally Displaced Karen Villagers in Burma'. Naskah dipresentasikan pada Land Poverty, Social Justice and Development Conference, The Hague, January 2006.

Marshall, H.I., 1997 [1922]. *The Karen People of Burma: A Study in Anthropology and Ethnology*. Bangkok: White Lotus.

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), 2001. *Strong Roots (Raiz Forte)*. Video disk. San Francisco, CA: Global Exchange.

Piven, F.F. and R.A. Cloward, 1977. *Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail*. New York: Pantheon.

Scott, J.C., 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, CT: Yale University Press.

Scott, J.C., 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale University Press.

Selth, A., 2002. *Burma's Armed Forces: Power Without Glory*. Norwalk: Eastbridge.

Smith, M., 1991. *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*. London: Zed Books.

Smith, M., 2002. *Burma/Myanmar: The Time for Change*. London: Minority Rights Group International.

South, A., 2006. *Forced Migration in Myanmar: Patterns, Impacts and Responses*. (tidak dipublikasikan). Report commissioned for the Office of the Resident Coordinator of the United Nations System in Myanmar.

Steinberg, D., 1999. 'A Void in Myanmar: Civil Society in Burma'. In *Strengthening Civil Society in Burma: Possibilities and Dilemmas for International NGOs*, eds Burma Center Netherlands and Transnational Institute, 1–14. Chiang Mai: Silkworm Books.

Stewart, C.J., C.A. Smith and R.E. Denton, Jr., 2001. *Persuasion and Social Movements*. Fourth Edition. Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Tarrow, S., 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

TBBC (Thailand Burma Border Consortium), 2005. *Internal Displacement and Protection in Eastern Burma*. Bangkok: TBBC.

TBBC (Thailand Burma Border Consortium), 2007. *Internal Displacement in EasternBurma: 2007 Survey*. Bangkok: TBBC.

Thawnghmung, A.M., 2004. *Behind the Teak Curtain: Authoritarianism, Agricultural Policies and Political Legitimacy in Rural Burma/Myanmar*. London: Kegan Paul.

Vía Campesina, 2006. 'Annual Report: Violations of Peasants' Human Rights: A Report on Cases and Patterns of Violances *[sic]* 2006'. Jakarta Selatan: Vía Campesina.

INDEKS

A

Akram Lodhi, H 2, 64, 184, 238
Alavi, Hamzah 80, 114
AMAN 426, 427, 435, 440, 450, 451, 679
Associated Country Women Of The World 17
Associated Country Women of the World 19, 64, 70, 71

B

Bachriadi, D 411, 456, 466
Bada, Xochitl 24, 33, 34, 39, 45, 519, 534, 537, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 560, 569
Bank Dunia 46, 442, 480, 679
Bharatiya Kisan Union 212
Biosafety National Association 381
Bolshevik 11, 66
Bukharin, Nikolai 15, 66
Byres, T 2, 65, 184, 231

C

Campesino A Campesino 8
Campesino a Campesino 69, 77, 116, 131, 132, 173, 565
CARP 216
Comprehensive Agrarian Reform Program 216

D

De Janvry, A 247, 283, 314, 333
De Soto, Hernando 2, 66, 185, 222, 232, 236
depeasantisasi 92
deforestasi 362, 420, 494
Democratic Peasant Movement of The Philippines 32

E

Edelman, Marc 1, 2, 4, 8, 13, 18, 23, 25, 31, 37,

40, 41, 46, 59, 66, 67, 73, 123, 128, 131, 139, 140, 143, 167, 173, 183, 191, 196, 243, 251, 294, 304, 350, 374, 377, 380, 381, 382, 385, 390, 391, 392, 401, 402, 407, 416, 417, 428, 445, 450, 469, 474, 529, 619, 629, 634
efek bumerang 551, 664, 675, 679
Environment Monitoring Group 300
etnisitas 52, 377, 631, 633

F

FAO 6, 7, 16, 20, 21, 40, 69, 70, 95, 113, 146, 172, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 227, 422, 431, 518
Fauzi, Noer 45, 49, 53, 61, 409, 411, 416, 417, 426, 430, 434, 441, 447, 456, 458, 459, 460, 463
FIAN 4, 59, 164, 166, 172, 192, 204, 218, 228, 232, 239, 606, 641, 645
Friends of the Earth 4, 401, 402
FSPI 49, 432, 435, 436, 437, 438, 441, 442, 451, 452, 460
FTAA 363, 364, 365, 368, 369, 378, 379, 402

G

GCAR 179, 190, 191, 221, 228
Gerakan Agraria Transnasional 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 129, 222, 368, 387, 573, 574, 603, 604, 605, 614, 629, 646, 667
GLOBALGAP 480, 481, 485, 495, 506, 507
Greenpeace 298, 303, 304, 306, 312, 315, 318, 319, 330, 342, 344, 353, 354, 357, 362, 363, 369, 370, 375, 386, 394, 400, 402

H

hak asasi manusia 86, 105, 111, 134, 162, 163, 192, 193, 196, 207, 302, 310, 424, 433, 583, 606, 608, 610, 611, 612, 627, 640, 648, 656, 663, 664, 665, 670, 671
Hak Kekayaan Intelektual 163, 347, 359, 360, 473
Hemispheric Social Alliance 365, 379

Herring 37, 52, 57, 69, 211, 233, 309, 341
HIVOS 131, 331
Husken, F 410, 417, 461

I

IFAD 6, 7, 40, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 228
IFAP 5, 7, 17, 18, 20, 21, 40, 41, 52, 56, 69, 98, 182, 183, 204, 210, 213, 214, 228
Internasional Hijau 9, 11, 17
Internasional Merah 9, 11
International Conference on Agrarian Reform and Ru 72, 228, 667, 676
International Planning Committee 93, 194, 228, 368

K

kewarganegaraan berbasis agraria 94
KMP 32, 51, 56, 190, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 234
KNU/KNLA 634, 644
KRRS 37, 50, 51, 53, 55, 56, 86, 190, 211, 212, 213, 219, 221, 228, 295, 296, 297, 298, 311, 312, 317, 318, 325, 329, 330, 333, 339, 391

L

Land Research and Action Network 4, 193, 228

M

Monsanto 111, 290, 291, 295, 296, 297, 298, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 325, 330, 339, 340, 341, 342, 344, 350, 358, 372, 376, 380, 381, 396, 399
MST 30, 31, 37, 42, 48, 49, 54, 56, 58, 73, 94, 108, 109, 110, 188, 189, 210, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 284, 305, 306, 314, 318, 324, 325, 326, 332, 346, 356, 357, 358, 359, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 438, 652, 653, 658, 659, 677

N

NAFTA 378, 379, 388, 389, 524, 526, 527, 567
Narmada 423, 457

P

Partai Komunis Cina 14
Peluso, Nancy 45, 49, 53, 61, 222, 236, 409, 418, 421, 443, 446, 456, 458, 464
People's Food Sovereignty 56, 60, 83, 94, 96, 97, 117, 118, 119, 120, 182, 187, 195, 234, 368, 668
Petras, James 54, 71, 119, 236, 249, 250, 287, 393, 405
Polanyi, Karl 81, 95, 96, 97, 98, 119, 471, 509, 510, 516

R

Rosset, P 2, 45, 72, 82, 115, 119, 179, 182, 184, 213, 223, 225, 235, 237, 288, 311, 432, 465

S

Sandinista 124, 128, 137
Scoones, Ian 36, 37, 41, 44, 51, 53, 61, 211, 289, 316, 341, 343, 354, 355, 357, 370, 371, 372, 381, 385, 390, 391, 398, 406
Scott, James 35, 38, 72, 73, 224, 237, 568, 573, 574, 583, 623, 633, 644, 648, 654, 655, 657, 674, 677
Stédile, João Pedro 30, 31, 54, 73

U

UNORKA 51, 56, 217, 218, 228

V

Vía Campesina 65, 66, 70, 74, 115, 116, 120, 170, 171, 177, 179, 228, 230, 232, 237, 238, 239, 249, 252, 267, 268, 283, 346, 389, 400, 405, 407, 457, 458, 513, 616, 618, 624, 674, 678

W

WALHI 421, 422, 423, 424, 427, 433, 440, 448, 456, 460
Wolf, Eric 76, 121
Wolford, Wendy 30, 41, 42, 48, 70, 79, 94, 105, 108, 109, 121, 235, 239, 241, 248, 250, 255, 283, 288, 463

Y

YLBHI 423, 424, 427, 428, 433

Z

Zapatista 120, 523, 526, 529